LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 03 TAHUN 2026
TANGGAL : 21 Agustus 2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Lampiran xii
Daftar Gambar xiii
Catatan atas Laporan Keuangan 1
Bab I Pendahuluan 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 4
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 6
2.1 Ekonomi Makro 6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 6
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 7
2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 8
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8
2.1.5 Kemiskinan 9
2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM) 10
2.1.7 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan 11
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah 12
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 13
2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah 13
2.3.1 Arah dan Kebijakan Belanja Daerah 13
2.3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 14
2.4 *Mandatory Spending* dalam APBD 15
2.4.1 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan 15
2.4.2 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan 16
2.4.3 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur 17
2.4.4 *Mandatory Spending* Fungsi Aparatur 19
2.4.5 *Mandatory Spending* Fungsi Dana Transfer ke Desa 19
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 20
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 20
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan 20
3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 22
3.1.1.2 Pendapatan Transfer 26
3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 26
3.1.1.4 Permasalahan dan Solusi 26
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah 27
3.1.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah 28
3.1.2.2 Target dan Realisasi Belanja 30
3.1.2.3 Permasalahan dan Solusi 32
3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan 33
Bab IV Kebijakan Akuntansi 34
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 34
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 34
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 35

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 35
4.5 Kebijakan Akuntansi Akun 44
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 45
5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan 45
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 45
5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 108
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 114
5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) 182
5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas 216
5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 220
5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas 230
5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas pada Pendapatan 230
5.2.2 Penerapan Basis Akrual pada Beban dan Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA) 234
5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan 239
5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 239
Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah 241
6.1 Kondisi Umum Daerah 241
6.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografis 241
6.1.2 Penggunaan Lahan 242
6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah 243
6.1.4 Jumlah Penduduk 243
6.15 Kondisi Demografi 244
6.2 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok 245
6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan 249
Bab VII Penutup

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 6

Tabel 2 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 Tahun 2020-2024 7

Tabel 3 Target Pendapatan APBD 2025 dan Target Pendapatan Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 13

Tabel 4 Capaian Mandatory Spending Fungsi Kesehatan 14

Tabel 5 Capaian *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan..... 16

Tabel 6 *Capaian Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur..... 18

Tabel 7 *Capaian Mandatory Spending* Fungsi Aparatur..... 19

Tabel 8 *Capaian Mandatory Spending* Fungsi Dana Transfer ke Desa 19

Tabel 9 Pendapatan Daerah Setelah Perubahan APBD 2025 22

Tabel 10 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 24

Tabel 11 Target dan Realisasi Retribusi DaerahTahun Anggaran 2025..... 25

Tabel 12 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025..... 25

Tabel 13 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 25

Tabel 14 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 26

Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 26

Tabel 16 Struktur Anggaran Belanja APBD Kabupaten PacitanTahun Anggaran 2025 30

Tabel 17 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 32

Tabel 18 Target dan Realisai Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 33

Tabel 19 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 33

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 42

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 46

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 47

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 48

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan Tahun 2024 48

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan Tahun 2024 50
Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan Tahun 2024 52
Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024 53
Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024 54
Tabel 29 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024 54
Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024 55
Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan Tahun 2024 56
Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Tahun 2025 dan Tahun 2024 57
Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dan tahun 2024 57
Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi hasil pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024 57
Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Dana Dana Bagi hasil Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024 59
Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 dan Tahun 2024 62
Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024 63
Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 65
Tabel 39 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan Tahun 2024 69
Tabel 40 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024 69
Tabel 41 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025 73
Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024 73
Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024 74
Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 75
Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 75
Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 77
Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024 80

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 83
Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024 84
Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024 84
Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan Tahun 2024 85
Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024 87
Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan Tahun 2024 87
Tabel 54 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025 93
Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 93
Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024 94
Tabel 57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024 95
Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024 96
Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 97
Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024 98
Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 99
Tabel 62 Rincian Belanja Tidak Terduga 100
Tabel 63 Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan 101
Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2025 dan Tahun 2024 102
Tabel 65 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 102
Tabel 66 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 103
Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024 103
Tabel 68 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan Tahun 2025 104
Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024 105
Tabel 70 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan Tahun 2024 106

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan Tahun 2024 106
Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 106
Tabel 73 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 107
Tabel 74 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dan Tahun 2024 107
Tabel 75 Rincian Laporan Perubahan SAL Tahun 2025 dan 2024 108
Tabel 76 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024..... 112
Tabel 77 Rincian Kas Di Kas Daerah Sesuai Peruntukannya 115
Tabel 78 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*) 115
Tabel 79 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-DBH CHT 115
Tabel 80 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-DID 116
Tabel 81 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-DAK FISIK 116
Tabel 82 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-DAK NON FISIK 116
Tabel 83 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-BKK Provinsi 117
Tabel 84 Laporan Realisasi Dan Sisa Kas di BLUD di 24 UPT Puskesmas 118
Tabel 85 Rekapitulasi Sisa Kas Di Bendahara Dana BOSP 119
Tabel 86 Laporan Realisasi Dan Sisa Kas Dana BOK di 24 UPT Puskesmas 120
Tabel 87 Piutang Daerah Tahun 2025 121
Tabel 88 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2025 121
Tabel 89 Piutang Pajak Daerah 121
Tabel 90 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi Bangunan 123
Tabel 91 Piutang Retribusi 123
Tabel 92 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 124
Tabel 93 Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagian Jangka Panjang 126
Tabel 94 Piutang Pokok dan Bunga- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian) 126
Tabel 95 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2025 128
Tabel 96 Rekapitulasi Penyisihan Piutang 129
Tabel 97 Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek 130
Tabel 98 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2025 133
Tabel 99 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2025 134

Tabel 100 Investasi Permanen 137
Tabel 101 Rincian Investasi Bank Jatim 137
Tabel 102 Investasi Permanen pada BPR Jatim 138
Tabel 103 Investasi Permanen pada PDAM 139
Tabel 104 Rincian Investasi PDAM 139
Tabel 105 Mutasi Aset Tetap 140
Tabel 106 Mutasi Tanah 142
Tabel 107 Mutasi Tanah Per SKPD TA 2025 142
Tabel 108 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin 144
Tabel 109 Mutasi Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2025 144
Tabel 110 Aset Tetap Gedung dan Bangunan 150
Tabel 111 Mutasi Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah TA 2025 150
Tabel 112 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 154
Tabel 113 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Perangkat Daerah TA 2025 154
Tabel 114 Aset Tetap Lainnya 157
Tabel 115 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD TA 2025 157
Tabel 116 Konstruksi dalam Pengerjaan 160
Tabel 117 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan 161
Tabel 118 Aset Lainnya 163
Tabel 119 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga 164
Tabel 120 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) 166
Tabel 121 Aset Tidak Berwujud - *Software* 167
Tabel 122 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 168
Tabel 123 Rincian Akumulasi Amortisasi per SKPD 168
Tabel 124 Mutasi Aset Lain-lain 2025 169
Tabel 125 Mutasi Aset Lain-lain 2025 125
Tabel 126 Mutasi Properti Investasi Tahun 2025 126
Tabel 127 Mutasi Poperti Investasi Tanah 127
Tabel 128 Mutasi Poperti Investasi Gedung dan Bangunan 172
Tabel 129 Nilai Akumulasi Penyusutan Poperti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025 173
Tabel 130 Kewajiban Jangka Pendek 2025 174
Tabel 131 Pendapatan Diterima Dimuka 174
Tabel 132 Utang Belanja 176
Tabel 133 Utang Belanja Barang 177
Tabel 134 Utang Belanja Jasa 179

Tabel 135 Utang Belanja Modal 180
Tabel 136 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 182
Tabel 137 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 182
Tabel 138 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 183
Tabel 139 Pajak Reklame - LO Tahun 2025 dan Tahun 2025 183
Tabel 140 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 185
Tabel 141 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024 186
Tabel 142 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 187
Tabel 143 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 188
Tabel 144 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 188
Tabel 145 Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 189
Tabel 146 Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 190
Tabel 147 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dan Tahun 2024Tahun 2023..... 190
Tabel 148 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 191
Tabel 149 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 191
Tabel 150 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 192
Tabel 151 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 192
Tabel 152 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 193
Tabel 153 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 193
Tabel 154 Rincian Lain-lain Pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 194
Tabel 155 Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024 195
Tabel 156 Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 195
Tabel 157 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 196
Tabel 158 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 196
Tabel 159 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024 197
Tabel 160 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 dan Tahun 2024 197
Tabel 161 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 198
Tabel 162 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 2025 dan Tahun 2024 198

Tabel 163 Beban Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024 199
Tabel 164 Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2025 dan Tahun 2024 199
Tabel 165 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025 dan Tahun 2024 201
Tabel 166 Beban Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 201
Tabel 167 Beban Jasa Kantor Tahun 2025 dan Tahun 2024 201
Tabel 168 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2025 dan Tahun 2024 203
Tabel 169 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024 204
Tabel 170 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024 204
Tabel 171 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 205
Tabel 172 Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 205
Tabel 173 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 dan Tahun 2024 205
Tabel 174 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 dan Tahun 2024 206
Tabel 175 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2025 dan Tahun 2024 207
Tabel 176 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024 208
Tabel 177 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024 208
Tabel 178 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024 209
Tabel 179 Beban Perjalanan Dinas Tahun Tahun 2025 dan Tahun 2024 210
Tabel 180 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan Tahun 2024 210
Tabel 181 Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024 211
Tabel 182 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024 212
Tabel 183 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024 213
Tabel 184 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024 213
Tabel 185 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 214
Tabel 186 Beban Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024 214
Tabel 187 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 215
Tabel 188 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 215
Tabel 189 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas 220
Tabel 190 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Tahun 2025 230

Tabel 191 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO Tahun 2025 230
Tabel 192 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO Tahun 2025 232
Tabel 193 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO Tahun 2025 232
Tabel 194 Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO Tahun 2025 233
Tabel 195 Selisih Saldo Belanja dan Transfer LRA dengan Beban Operasional dan Beban Luar Biasa pada LO Tahun 2025 234
Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Belanja Belanja Barang pada LRA dan Beban Persediaan pada LO Tahun 2025 235
Tabel 197 Rincian Selisih Saldo Belanja Jasa pada LRA dan Beban Jasa pada LO Tahun 2025 236
Tabel 198 Perkembangan Penduduk Kabupaten Pacitan 243
Tabel 199 Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan 245
Tabel 200 Susunan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2024-2029 per Fraksi 245
Tabel 201 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 246
Tabel 202 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan 246
Tabel 203 Nama Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan 248
Tabel 204 Daftar Rangkap Jabatan 248

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran BLUD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 2	Rekapitulasi Laporan Realisasi BOSP Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3	Daftar Reklas Aset Tetap Dari Belanja Barang Dan Jasa
Lampiran 4	Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2025
Lampiran 5	Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2025
Lampiran 6	Rekapitulasi Penyaluran Dan Penyerapan Dana Desa
Lampiran 7	Rincian Sisa Kas Di Blud Tahun Anggaran 2025
Lampiran 8	Rincian Saldo Kas Dana Bos 2025
Lampiran 9	Rincian Penerimaan Pembayaran Piutang Denda Pbbp2 Tahun 2025
Lampiran 10	Laporan Obat Kadaluwarsa
Lampiran 11	Laporan Keuangan Pdam Unaudited 2025
Lampiran 12	Rekap Saldo Akhir Perlengkapan Kantor Per Opd Kabupaten Pacitan
Lampiran 13	Rincian Aset Tetap Renovasi
Lampiran 14	Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 15	Daftar Rincian Aset Tetap Yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi
Lampiran 16	Rincian Bangunan Yang Berada Tidak Di Tanah Pemerintah Kabupaten Pacitan
Lampiran 17	Rincian Belanja Modal Di Non Kapitalisasi Reklas Ke Barjas 2025
Lampiran 18	Bantuan Peralatan dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 6

Gambar 2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupataen Pacitan Tahun 2020-2024 8

Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024..... 9

Gambar 4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 10

Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional tahun 2020-2024 11

Gambar 6 Peta Administrasi Kabupaten Pacitan..... 241

Gambar 7 Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan 244

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

I. PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan, kegiatan operasional, aset dan ekuitas dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu laporan keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait pelaporan keuangan bagi penggunanya, yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pemerintah lain yang lebih tinggi (pusat maupun Provinsi), dan pihak lain yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dan perubahannya.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
5. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi dengan anggarannya.
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari landasan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah di Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Jouncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jouncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahPasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 20112 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 64);
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 188);
29. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 61);Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 92);

30. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 123);
31. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 70);
32. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 132);
33. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 61).

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
  - 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
  - 2.1.3 Inflasi
  - 2.1.4 Tingkat Partisipan Angkatan Kerja (TPAK)
  - 2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
  - 2.1.6 Kemiskinan
  - 2.1.7 Indek Pembangunan Manusia (IPM)
  - 2.1.8 Rencana Target Ekonomi Mikro Kabupaten Pacitan
- 2.2 Kebijakan Keuangan
  - 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter
  - 2.3.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah
  - 2.3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.4 *Mandatory Spending* dalam APBD
  - 2.4.1 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan
  - 2.4.2 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan
  - 2.4.3 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur
  - 2.4.4 *Mandatory Spending* Fungsi Aparatur
  - 2.4.5 *Mandatory Spending* Fungsi Dana Transfer ke Desa

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter
  - 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan
  - 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah
  - 3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Telah ditetapkan
3.2.1 Pengelolaan Pendapatan
3.2.2 Pengelolaan Belanja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
4.5 Kebijakan Akuntansi Akun

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas
5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas Pada Pendapatan
5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)
5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan
5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

6.1 Kondisi Umum Daerah
6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis
6.1.2 Penggunaan Lahan
6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
6.1.2 Jumlah Penduduk
6.1.3 Kondisi Demografi
6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan
6.4 Catatan Penting Lainnya

Bab VII Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

2.1 Ekonomi Makro

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan adalah Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penganggaran, dan kemiskinan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indicator utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. Indikator ini mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi dari tahun ke tahun dan menjadi acuan utama dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan. Berikut ini disajikan data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

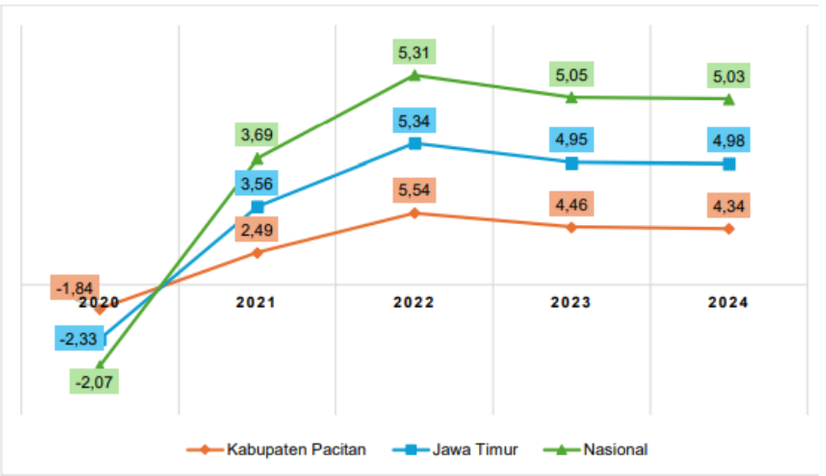

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2025

Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam periode 2020-2024. Setelah mengalami kontraksi sebesar -1,84% pada 2020, terjadi pemulihan dengan pertumbuhan mencapai puncaknya di 2022 sebesar 5,54%. Namun, setelah itu pertumbuhan mengalami sedikit perlambatan di 2023 dan 2024, dengan angka terakhir tercatat sebesar 4,34%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional, Kabupaten Pacitan sempat mengalami pemulihan yang lebih cepat pada 2021 dan 2022, meskipun akhirnya cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional di tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik pasca kontraks, meskipun masih mengalami sedikit perlambatan dalam dua tahun terakhir. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetap memerlukan strategi yang lebih adaptif, terutama dalam meningkatkan investasi dan produktivitas sektor unggulan daerah guna menjaga stabilitas pertumbuhan jangka panjang.

Tabel 1 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024

Sektor Produk Domestik Regional Bruto		Rata-Rata LQ	Ket
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,408	Basis
B	Pertambangan dan penggalian	1,271	Basis
C	Industri pengolahan	0,234	Non Bsis

Sektor Produk Domestik Regional Bruto		Rata-Rata LQ	Ket
D	Pengadaan listrik dan gas	0,134	Non Bsis
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,984	Non Bsis
F	Konstruksi	1,635	Basis
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	0,989	Non Bsis
H	Transportasi dan pergudangan	1,014	Basis
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,415	Non Bsis
J	Informasi dan komunikasi	1,165	Basis
K	Jasa keuangan dan asuransi	0,742	Non Bsis
L	Real estate	0,960	Non Bsis
M, N	Jasa perusahaan	0,36	Non Bsis
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,962	Basis
P	Jasa Pendidikan	1,869	Basis
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan social	1,54	Basis
R, S, T, U	Jasa lainnya	1,976	Basis

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (selanjutnya disebut PMTB) merupakan salah satu komponen penting dalam penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Pada konsepnya, PMTB merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal yang tidak dikonsumsi, tetapi memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, Bangunan lain seperti jalan dan bandara, mesin dan peralatan. PMTB dapat digambarkan sebagai berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor

Tabel 2 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB ADHK (Rp Milyar)	6.645,92	6.820,88	7.769,35	8.324,28	8.761,99
ADHB ADHK (Rp. Milyar)	4.227,97	4.299,52	4.559,54	4.735,36	4.941,56
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	42,10	41,64	43,20	42,71	42,42
Pertumbuhan (%)	(4,58)	1,69	6,05	3,86	4,35

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2025

Kabupaten Pacitan selama periode 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan investasi yang cenderung meningkat setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Berdasarkan data ADHB, nilai investasi mengalami kenaikan dari Rp6.645,92 miliar pada 2020 menjadi Rp8.761,99 miliar pada 2024, yang mencerminkan pertumbuhan investasi secara nominal. Sementara itu, dalam ADHK, terjadi peningkatan dari Rp4.227,97 miliar pada 2020 menjadi Rp4.941,56 miliar pada 2024, yang menunjukkan pertumbuhan investasi riil setelah disesuaikan dengan inflasi. Dari segi pertumbuhan, pada tahun 2020 PMTB mengalami kontraksi sebesar (4,58%), yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, menyebabkan penurunan investasi di berbagai sektor. Namun, pada 2021, investas mulai pulih dengan pertumbuhan 1,69%, meskipun masih berada di bawah kondisi ideal, di mana pertumbuhan PMTB yang sehat seharusnya mampu melebihi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemulihan ini berlanjut pada tahun-than selanjutnya yang menandakan adanya peningkatan kepercayaan investor serta mulai membaiknya perekonomian daerah.

Proporsi terhadap PDRB, PMTB Kabupaten Pacitan berada di kisaran

41,64% – 43,20%. Kabupaten Pacitan menunjukkan pemulihan investasi pasca-pandemi, dengan pertumbuhan yang cukup stabil. Namun, untuk mencapai kondisi ideal, diperlukan akselerasi investasi lebih lanjut, terutama di sektor produktif seperti industri, pariwisata, dan infrastruktur, agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih berkelanjutan.

2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (selanjutnya disebut TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran atau sedang mencari pekerjaan. Dalam lima tahun terakhir, berikut merupakan realisasi TPAK di Kabupaten Pacitan

Gambar 2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupataen Pacitan Tahun 2020 - 2024

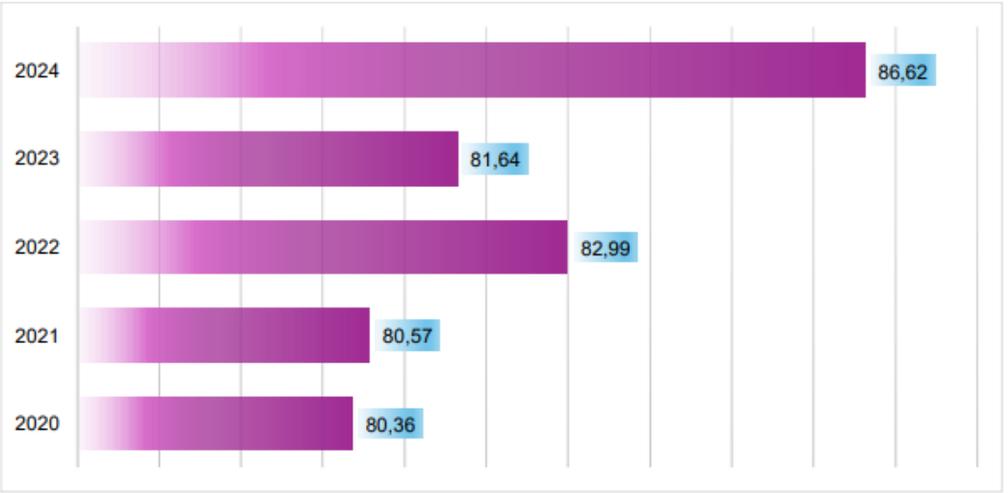

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

TPAK di Kabupaten Pacitan menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada 2020, TPAK tercatat 80,36% dan mencapai 86,62% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya dorongan masuknya lebih banyak penduduk usia kerja ke pasar tenaga kerja pada tahun-tahun tersebut. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 adalah sebanyak 419.721 jiwa, dengan TPAK Kabupaten Pacitan sebesar 86,62 persen, artinya dari setiap 100 penduduk Kabupaten Pacitan yang berusia 15 tahun ke atas, ada sekitar 86- 87 orang yang tersedia untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berikut ini disajikan data dengan tingkat Penganguran Terbuka Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024.

Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

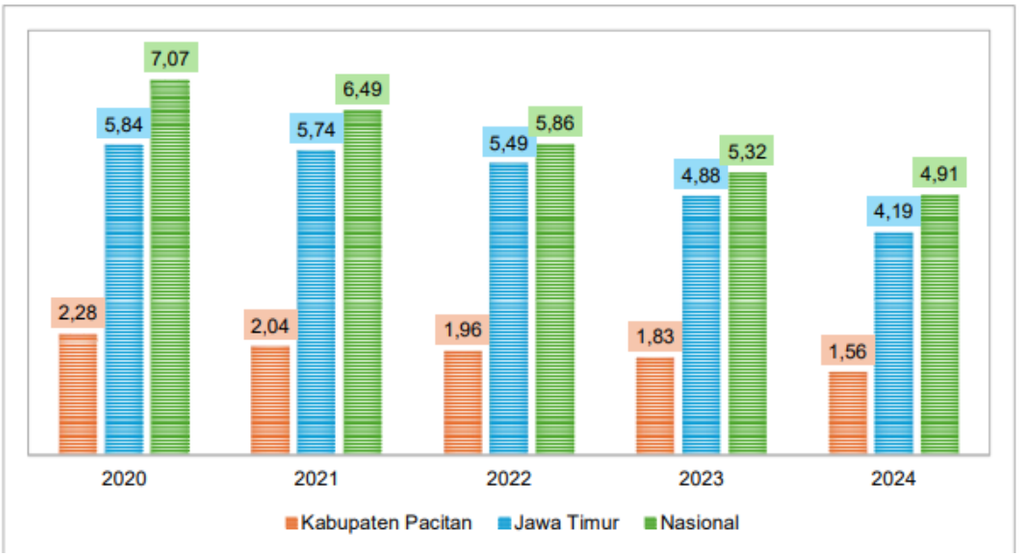

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren penurunan selama periode 2020-2024. Pada 2020, angka pengangguran tercatat sebesar 2,28% dan terus menurun hingga mencapai 1,56% pada 2024. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional, TPT di Kabupaten Pacitan relatif lebih rendah. Di tingkat provinsi, TPT juga menunjukkan tren menurun, dari 5,84% pada 2020 menjadi 4,19% pada 2024. Sementara itu, di tingkat nasional, TPT mengalami penurunan dari 7,07% pada 2020 menjadi 4,91% pada 2024.

2.1.5 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar kebutuhan dasar, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Urgensi indikator ini terletak pada perannya dalam mengukur efektivitas kebijakan pembangunan dan distribusi ekonomi. Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin baik kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang mencerminkan keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan perlunya intervensi yang lebih tepat dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan tren kemiskinan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Berikut ini merupakan data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar 4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020- 2024

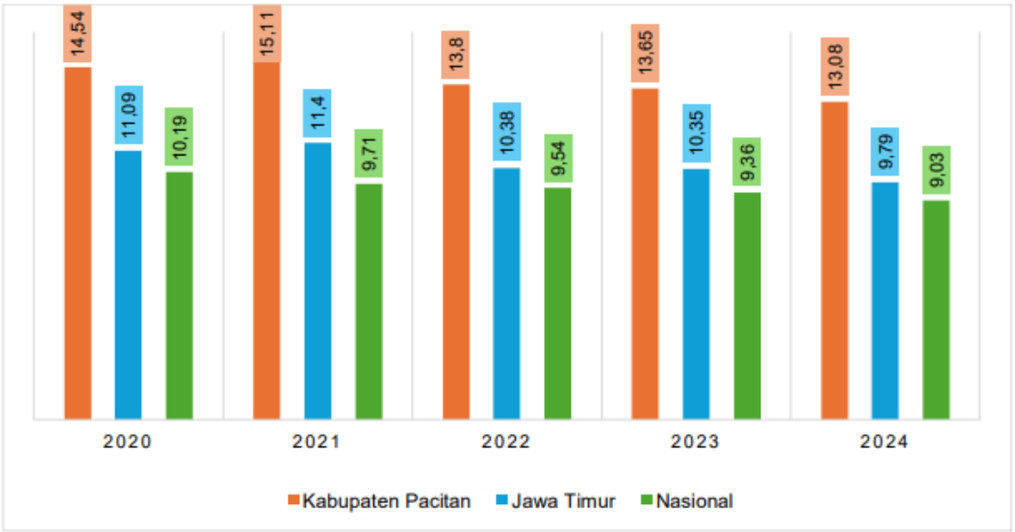

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan cenderung mengalami sedikit fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 14,54% dan sempat meningkat menjadi 15,11% di 2021. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 13,08% pada 2024. Dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan nasional, Kabupaten Pacitan masih memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi. Sementara di tingkat provinsi, kemiskinan mengalami tren penurunan dari 11,09% (2020) menjadi 9,79% (2024), dan di tingkat nasional turun dari 10,19% (2020) menjadi 9,03% (2024). Meskipun Kabupaten Pacitan menunjukkan tren penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di daerah ini masih cukup besar. Diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses ekonomi, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat guna mempercepat pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional dalam periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kabupaten Pacitan mencatat pertumbuhan IPM yang relatif stabil, dari sekitar 68,39 pada 2020 menjadi 71,49 pada 2024. Meskipun mengalami peningkatan, nilai IPM Pacitan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, yang masing-masing mencapai 75,35 dan 75,02 pada 2024. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Kabupaten Pacitan, meskipun masih tertinggal dibandingkan skala provinsi dan nasional. Hal ini menandakan bahwa meskipun pembangunan manusia terus mengalami peningkatan, masih diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar IPM dapat lebih kompetitif dengan daerah lain.

Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

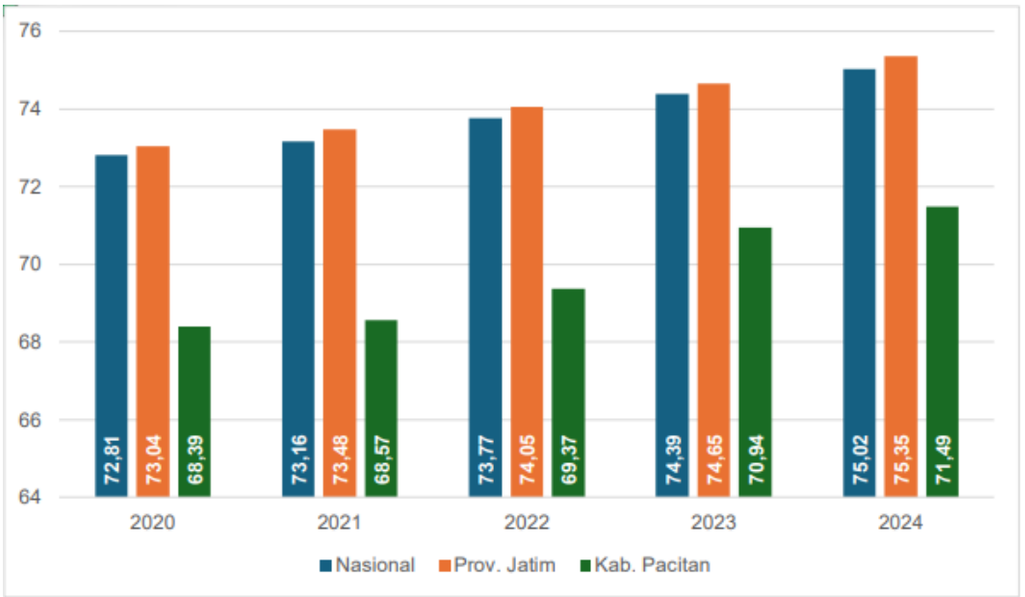

2.1.7 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi dan nasional;
2. Pemenuhan terhadap kebutuhan ketersediaan Pelayanan Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan Infrastruktur lain;
3. Pendapatan Asli Daerah yang minim. Pada tahun 2022 PAD Kabupaten Pacitan tercatat pada angka 11%. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan menjadi sangat terbatas;
4. Kualitas pembangunan Manusia masih berada pada level sedang sehingga perbaikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta perekonomian masyarakat harus mendapatkan perhatian dan prioritas; dan
5. Ketimpangan pengeluaran penduduk pada level sedang menyebabkan pengeluaran penduduk menjadi kurang merata.

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pacitan **"PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA"** yang memiliki makna Memberbaiki yang kurang dan melanjutkan yang sudah baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan akses dasar masyarakat.

Dengan Kabupaten Pacitan memiliki 4 Misi sebagai berikut:

1. **Pemberantasan Kemiskinan**
   Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Salah satu tugas pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin

akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

2. **Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
   Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses Pendidikan serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi bidang sumber daya manusia lainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.
3. **Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**
   Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris dan sektor lainnya wajib untuk diprioritaskan.

4. **Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani**
   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang agile (lincah), dinamis mengikuti dinamika regulasi yang ada, profesional, terbuka, inovatif dan melayani masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Proses perencanaan hingga pelaksanaan harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu birokrasi sebagai pelayanan masayarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik baik pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta transparan atas regulasi dan kebijakan yang dilaksanakanPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi juga mengharuskan para pegawai ASN untuk menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada saat ini kualitas birokrasi Kabupaten Pacitan perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era Revolusi Industri 4.0.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat

penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perancangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Daerah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yaitu:

Tabel 3 Target Pendapatan APBD 2025 dan Target Pendapatan Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**248.739.733.318,00**	**245.558.894.995,00**	**(3.180.838.323,00)**
4.1.01	Pajak Daerah	78.851.514.318,00	75.940.072.518,00	(2.911.441.800,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	58.194.735.650,00	162.472.264.526,00	104.277.528.876,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	3.100.000.000,00	100.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	108.693.483.350,00	4.046.557.951,00	(104.646.925.399,00)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.493.408.253.000,00**	**1.436.859.561.228,00**	**(56.548.691.772,00)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.381.247.000,00	1.346.525.391.843,00	(67.855.855.157,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.027.006.000,00	90.334.169.385,00	11.307.163.385,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	0,00	6.474.831.905,60	6.474.831.905,60
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.474.831.905,60	6.474.831.905,60
Jumlah Pendapatan		**1.742.147.986.318,00**	**1.688.893.288.128,60**	**(53.254.698.189,40)**

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan terdiri dari:

a. Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan diprioritaskan pada pelaksanaan program prioritas berdasar pada *money follow program priority* sesuai dengan apa yang di rumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029.

b. Belanja Daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja serta penerapan belanja berbasis kinerja serta efisiensi belanja non prioritas.

c. Mempertahakan penurunan proporsi pada alokasi Belanja Pegawai menuju 30% sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan pemberian tunjangan dan tambahan penghasilan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

d. Mengoptimalkan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil.

e. Menjaga konsistensi alokasi Belanja Bagi Hasil kepada Desa minimal 10% dari total penerimaan pajak dan retribusi.

f. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dengan menyinergikan fokus pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

g. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

h. Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

i. Pemenuhan belanja wajib pendidikan (20%) dan kesehatan (10%) atau biasa disebut sebagai *mandatory spending*, yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM daerah menuju regional *well-being* sebagai motor pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan *mandatory spending* lain seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

   a) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;

   b) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;

   c) paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan

   d) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah.

2.3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2025 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Adapun kebijakan pembiayaan pemerintah daerah sebagai berikut:

a. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*

b. Mendorong nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menurun sebagai salah satu tolok ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan keuangan daerah

c. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pendapatan dan Belanja Daerah dioptimalkan untuk menutup defisit anggaran Belanja Daerah.

d. Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/*Non-Governmental Organization.*

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah.

2.4 *Mandatory Spending* dalam APBD

Mandatory Spending dalam postur APBD *mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Pacitan meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.4.1 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Mandatory Spending Fungsi Kesehatan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	**a. Urusan Bidang Kesehatan**	**336.945.573.632,34**	**321.605.971.885,86**
	DINAS KESEHATAN	**150.917.962.776,59**	**145.778.001.377,00**
	1. Belanja Operasi	136.456.552.304,59	132.863.528.184,00
	2. Belanja Modal	14.461.410.472,00	12.914.473.193,00
	RSUD dr. DARSONO	**118.440.966.041,62**	**112.954.416.248,98**
	1. Belanja Operasi	104.816.190.041,62	101.652.067.538,98
	2. Belanja Modal	13.624.776.000,00	11.302.348.710,00

	PUSKESMAS	**67.586.644.814,13**	**62.873.554.259,88**
	1. Belanja Operasi	63.332.125.630,28	59.179.505.555,00
	2. Belanja Modal	4.254.519.183,85	3.694.048.704,88
2	**Anggaran Fungsi Kesehatan (a)**	**336.945.573.632,34**	**321.605.971.885,86**
3	**Total Belanja Daerah**	**1.748.323.175.233,87**	**1.668.011.933.424,00**
4	**Gaji ASN**	**498.712.503.428,33**	**494.242.963.393,00**
5	**Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)**	**1.249.610.671.805,54**	**1.173.768.970.031,00**
6	**Rasio Anggaran Kesehatan (2:5)x100%**	**26.96%**	**27.40%**

Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal peningkatan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Adapun tujuan dari program stunting tersebut adalah menurunkan *prevalensi stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi dan rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan intervensi spesifik (penyebab langsung), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil, pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil di Kawasan Ekonomi Khusus , ASI Ekslusif pada bayi usia < 6 bulan, pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) pada balita usia 6 - 23 bln, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap. Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan, Peraturan presiden ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Sasaran dari program stunting adalah remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 - 59 bulan. Kegiatan yg di lakukan adalah kegiatan intetvensi spesifik, kegiatan aksi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri (rematri), Penguatan Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) pada ibu hamil (kelas bumil), Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian PMT pada ibu hamil Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan balita usia 6 – bulan, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian vitamin A dan obat cacing pada balita, pemberian edukasi pada remaja, ibu hamil, dan keluarga termasuk stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

2.4.2 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) serta Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Dinas Pendidikan	619.113.181.828,02	393.604.130.417,00	63,58
2	Dinas Kesehatan	2.055.468.800,00	2.031.103.409,00	98,81
3	Puskesmas Pacitan	14.510.000,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Tanjungsari	14.760.000,00	0,00	0,00

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
5	Puskesmas Kebonagung	17.638.000,00	0,00	0,00
6	Puskesmas Ketrowonojoyo	11.880.000,00	0,00	0,00
7	Puskesmas Arjosari	12.558.000,00	0,00	0,00
8	Puskesmas Kedungbendo	11.460.000,00	0,00	0,00
9	Puskesmas Punung	21.380.000,00	0,00	0,00
10	Puskesmas Gondosari	12.680.000,00	0,00	0,00
11	Puskesmas Pringkuku	14.700.000,00	0,00	0,00
12	Puskesmas Candi	11.580.000,00	0,00	0,00
13	Puskesmas Donorojo	17.180.000,00	0,00	0,00
14	Puskesmas Kalak	18.780.000,00	0,00	0,00
15	Puskesmas Ngadirojo	18.360.000,00	0,00	0,00
16	Puskesmas Wonokarto	13.120.000,00	0,00	0,00
17	Puskesmas Tulakan	11.460.000,00	0,00	0,00
18	Puskesmas Bubakan	13.560.000,00	0,00	0,00
19	Puskesmas Sudimoro	15.120.000,00	0,00	0,00
20	Puskesmas Sukorejo	14.940.000,00	0,00	0,00
21	Puskesmas Tegalombo	12.680.000,00	0,00	0,00
22	Puskesmas Gemaharjo	14.360.000,00	0,00	0,00
23	Puskesmas Nawangan	13.580.000,00	0,00	0,00
24	Puskesmas Pakisbaru	13.380.000,00	0,00	0,00
25	Puskesmas Bandar	11.000.000,00	0,00	0,00
26	Puskesmas Jeruk	16.940.000,00	0,00	0,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	25.708.000,00	25.690.000,00	99,93
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	210.425.536,00	209.013.800,00	99,33
29	Dinas Sosial	329.675.920,00	327.749.357,00	99,42
30	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	471.397.835,00	437.221.901,00	92,75
31	Dinas Lingkungan Hidup	37.243.000,00	32.066.500,00	86,10
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.343.411,00	34.746.145,00	98,31
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.722.088.950,00	1.601.039.920,00	92,97
34	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	122.474.500,00	120.573.800,00	98,45
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.449.280,00	61.672.625,00	98,76
36	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	12.222.110.732,00	12.154.126.480,00	99,44
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	809.532.822,00	763.457.169,00	94,31
38	Dinas Perikanan	796.307.316,00	788.598.266,00	99,03
39	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	4.474.845.600,00	4.411.542.554,00	98,59
40	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	223.498.000,00	223.096.446,00	99,82
41	Badan Keuangan Daerah	400.541.370,00	399.773.522,00	99,81
Total Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan (Rp)		**643.459.898.900,02**	**417.225.602.311,00**	**64,84**
Total Belanja Daerah (Rp)		**1.748.323.175.233,87**	**1.668.011.933.424,00**	**95,41**
Persentase Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan (Minimal 20%)		**36,80%**	**25,01%**	

2.4.3 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 6 *Capaian Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur Tahun 2025

(dalam Rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI
1.	Dinas Pendidikan	20.043.139.188,84	19.663.111.182,00
2.	Dinas Kesehatan	16.408.511.120,70	14.770.630.694,00
3.	RSUD dr. Darsono	116.652.166.041,62	5.541.617.485,00
4.	Puskesmas Pacitan	1.732.992.581,00	80.611.941,00
5.	Puskesmas Tanjungsari	2.833.667.986,00	100.638.781,00
6.	Puskesmas Kebonagung	2.049.624.114,00	78.064.063,00
7.	Puskesmas Ketrowonojoyo	1.371.800.127,52	82.715.390,00
8.	Puskesmas Arjosari	3.565.813.972,39	104.410.648,00
9.	Puskesmas Kedungbendo	753.857.337,00	78.229.443,00
10.	Puskesmas Punung	2.561.909.164,00	77.521.516,00
11.	Puskesmas Gondosari	1.539.068.939,73	71.243.197,00
12.	Puskesmas Pringkuku	1.333.779.390,00	83.200.412,00
13.	Puskesmas Candi	951.886.729,66	68.875.353,00
14.	Puskesmas Donorojo	2.275.457.386,59	92.952.919,00
15.	Puskesmas Kalak	957.901.912,51	75.552.136,00
16.	Puskesmas Ngadirojo	4.840.799.773,93	113.059.318,00
17.	Puskesmas Wonokarto	1.284.422.947,24	77.927.404,00
18.	Puskesmas Tulakan	4.986.625.706,74	117.797.759,00
19.	Puskesmas Bubakan	2.472.026.910,10	83.797.656,00
20.	Puskesmas Sudimoro	1.662.732.743,34	72.241.267,00
21.	Puskesmas Sukorejo	1.345.176.985,14	60.936.320,00
22.	Puskesmas Tegalombo	3.631.045.454,00	106.367.379,00
23.	Puskesmas Gemaharjo	2.873.368.163,00	90.344.850,00
24.	Puskesmas Nawangan	2.645.888.110,35	112.771.949,00
25.	Puskesmas Pakisbaru	2.957.555.379,63	106.834.866,00
26.	Puskesmas Bandar	2.501.532.211,28	87.399.000,00
27.	Puskesmas Jeruk	1.503.460.788,98	83.637.305,00
28.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.708.401.727,80	58.577.652.232,00
29.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	63.715.540.472,00	62.760.411.730,00
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.936.687.800,00	1.921.208.330,00
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.021.476.117,00	2.031.721.467,00
32.	Dinas Sosial	1.050.153.682,00	970.177.417,26
33.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.816.452.300,00	2.768.855.270,00
34.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.580.409.853,00	14.153.663.848,60
35.	Dinas Lingkungan Hidup	6.920.629.370,00	6.505.211.960,55
36.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.607.550.809,00	1.559.342.291,00
37.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	809.727.175,00	783.226.410,00
38.	Dinas Perhubungan	2.615.017.531,00	2.575.772.716,00
39.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.267.751.739,00	3.224.824.814,00
40.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	829.364.588,00	806.157.716,00
41.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	826.717.334,00	793.998.073,00
42.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	11.811.802.314,00	11.650.858.557,00
43.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.352.517.863,00	1.322.792.091,00
44.	Dinas Perikanan	1.767.158.217,96	1.749.806.144,00
45.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	3.972.676.731,00	3.854.080.645,00
46.	Sekretariat Daerah	7.762.506.924,00	7.571.833.980,00
47.	Sekretariat DPRD	5.097.408.486,00	4.959.136.179,00
48.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.393.270.457,00	4.255.112.175,00
49.	Badan Keuangan Daerah	13.137.720.569,00	12.605.306.574,59
50.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	664.468.190,00	653.974.375,00
51.	Inspektorat Daerah	9.895.981.987,00	5.994.241.901,00
52.	Kecamatan Donorojo	463.456.687,00	438.718.370,00
53.	Kecamatan Punung	388.806.818,00	379.526.728,00
54.	Kecamatan Pringkuku	400.097.626,00	398.076.843,00
55.	Kecamatan Pacitan	565.590.317,00	540.916.255,00
56.	Kelurahan Sidoharjo	550.889.353,00	539.549.470,00
57.	Kelurahan Ploso	405.439.648,00	392.537.029,00
58.	Kelurahan Baleharjo	435.050.600,00	432.752.088,00
59.	Kelurahan Pucangsewu	435.537.248,00	411.668.283,00
60.	Kelurahan Pacitan	386.831.503,00	371.171.598,00
61.	Kecamatan Kebonagung	309.828.312,16	248.017.839,50
62.	Kecamatan Arjosari	236.807.829,00	226.569.713,00
63.	Kecamatan Nawangan	292.515.241,00	284.563.427,00
64.	Kecamatan Bandar	308.674.029,00	306.074.732,00

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI
65.	Kecamatan Tegalombo	345.000.551,00	337.115.217,00
66.	Kecamatan Tulakan	478.466.587,00	464.043.315,00
67.	Kecamatan Ngadirojo	526.574.257,00	532.325.787,00
68.	Kecamatan Sudimoro	233.767.500,00	228.762.930,00
69.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	848.707.173,00	815.290.786,00
	Jumlah Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	**447.909.644.681,21**	**263.479.537.540,50**
	Jumlah Alokasi anggaran Belanja Infrastruktur dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer (%)	**30,47%**	**18,80%**

2.4.4 *Mandatory Spending* Fungsi Aparatur

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Angaran 2022, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud dialokasikan paling sedikit 30% dari total belanja daerah. Tujuan dari mandatory spending fungsi aparatur adalah untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari mandatory spending fungsi aparatur di wilayah Kabupaten Pacitan adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7 *Capaian Mandatory Spending* Fungsi Aparatur Tahun 2025

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGARAN	REALISASI	%
a	Total Belanja Daerah	1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,41
b	Belanja Pegawai	823.727.581.396,11	796.605.950.209,00	96,71
c	Belanja Tambahan Profesi Guru (TPG)	197.837.312.590,00	183.240.660.100,00	92,62
d	Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)	2.937.500.000,00	2.283.375.000,00	77,73
e	Belanja Pegawai di luar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya. g=b-(c+d+e+f))	622.952.768.806,11	611.081.915.109,00	98,09

2.4.5 *Mandatory Spending* Fungsi Dana Transfer ke Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 4 menyebutkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 8 *Capaian Mandatory Spending* Fungsi Dana Transfer ke Desa Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	14.768.583.000,00	14.350.891.200,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	164.996.136.000,00	154.141.351.140,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	89.350.162.300,00	89.350.162.300,00
Jumlah		**269.114.881.300,00**	**257.842.404.640,00**

III. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Desember 2024 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 22 Mei 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 18 September 2025 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2025 tanggal 21 November 2025, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2025. Adapun ketentuan pertimbangan yang mendasari dilaksanakannya Perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pergeseran Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pergeseran I APBD Tahun Anggaran 2025, Tanggal 25 April 2025

   Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2025, Tanggal 22 Mei 2025

   Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

3. Pergeseran I Setelah PAPBD Tahun Anggaran 2025, Tanggal 21 November 2025Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah

terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber–sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
    1) Pajak Daerah;
    2) Retribusi Daerah;
    3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
    4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi:
    1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
    2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :
    1) Pendapatan Hibah;
    2) Dana Darurat;
    3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan pemanfaatan barang milik daerah seoptimal mungkin menjadi sumber pendapatan;
3. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
6. Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar Rp1.688.893.288.128,60 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.664.784.943.311,05 atau 98,57 %.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 253.989.282.694,35;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.404.314.890.833,00; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp6.480.769.783,70.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi maupun Pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik, disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Secara lengkap Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9 Pendapatan Daerah Setelah Perubahan APBD 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Kurang/ lebih	Capaian (%)
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**248.739.733.318,00**	**245.558.894.995,00**	**253.989.282.694,35**	**(3.180.838.323,00)**	**103,43**
-	Pajak Daerah	78.851.514.318,00	75.940.072.518,00	79.258.618.063,83	(2.911.441.800,00)	104,37
-	Retribusi Daerah	58.194.735.650,00	162.472.264.526,00	167.299.910.680,00	104.277.528.876,00	102,97
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100.000.000,00	100,81
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.693.483.350,00	4.046.557.951,00	4.305.755.125,11	(104.646.925.399,00)	106,41
B	**Pendapatan Transfer**	**1.493.408.253.000,00**	**1.436.859.561.228,00**	**1.404.314.890.833,00**	**(56.548.691.772,00)**	**97,74**
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.381.247.000,00	1.346.525.391.843,00	1.313.230.141.628,00	(67.855.855.157,00)	97,53
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.027.006.000,00	90.334.169.385,00	91.084.749.205,00	11.307.163.385,00	100,83
C	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0,00**	**6.474.831.905,60**	**6.480.769.783,70**	**6.474.831.905,60**	**100,09**
-	Pendapatan Hibah		0	27,39	0,00	0,00
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		6.474.831.905,60	6.480.769.756,31	6.474.831.905,60	100,09
JUMLAH PENDAPATAN		**1.742.147.986.318,00**	**1.688.893.288.128,60**	**1.664.784.943.311,05**	**(53.254.698.189,40)**	**98,57**

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:

1. Pajak Daerah

    1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah,

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

4) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3) hasil kerja sama daerah;
4) jasa giro;
5) hasil pengelolaan dana bergulir;
6) pendapatan bunga;
7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11) pendapatan denda pajak daerah;
12) pendapatan denda retribusi daerah;
13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14) pendapatan dari pengembalian;
15) pendapatan dari BLUD; dan
16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Komposisi target dan realisasi pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Reklame	560.000.000,00	685.768.323,00	122,45
2	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	159.873.335,00	106,58
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	445.000.000,00	864.518.873,97	194,27
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.264.439.500,00	25.910.649.281,00	98,65
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00	3.826.582.792,00	191,33
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.116.000.000,00	22.021.439.558,86	104,29

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20.156.149.539,00	19.819.723.300,00	98,33
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.248.483.479,00	5.970.062.600,00	113,75
Jumlah		**75.940.072.518,00**	**79.258.618.063,83**	**104,36**

Komposisi target dan realisasi retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11 Target dan Realisasi Retribusi DaerahTahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi Jasa Umum	150.178.171.276,00	153.693.583.090,00	102,34
2	Retribusi Jasa Usaha	11.869.093.250,00	13.108.385.432,00	110,44
3	Retribusi Perizinan Tertentu	425.000.000,00	497.942.158,00	117,16
Jumlah		**162.472.264.526,00**	**167.299.910.680,00**	**102,97**

Komposisi target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100,80
Jumlah		**3.100.000.000,00**	**3.124.998.825,41**	**100,80**

Komposisi target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	**Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan**	**130.000.000,00**	**241.150.400,00**	**185,50**
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	130.000.000,00	241.150.400,00	185,50
B	**Jasa Giro**	**400.000.000,00**	**381.022.268,53**	**95,25**
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	381.022.268,53	95,25
C	**Pendapatan Bunga**	**2.500.000.000,00**	**2.100.397.294,41**	**84,01**
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.100.397.294,41	84,01
D	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**5.000.000,00**	**169.571.276,28**	**3.391,42**
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	169.571.276,28	3.391,42
F	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**70.000.000,00**	**58.822.797,00**	**84,03**
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	6.000.000,00	1.413.636,00	23,56
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	145.000,00	250.020,00	172,42
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000,00	20.160,00	2,01
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.000.000,00	41.190.872,00	91,53
	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.855.000,00	2.948.109,00	60,72
D	**Pendapatan dari Pengembalian**	**575.000.000,00**	**769.475.869,04**	**133,82**
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	48.325.000,00	49.225.000,00	101,86
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	118.248.000,00	263.958.308,00	223,22
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	3.250.000,00	8.500.000,00	261,53
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	282.241.000,00	282.241.875,00	100,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.345.000,00	52.612.135,01	102,46
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	0,00	0,00	0,00

	Peralatan dan Mesin-Komputer			
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	17.380.000,00	58.422.943,03	336,15
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	54.211.000,00	54.515.608,00	100,56
E	**Pendapatan BLUD**	**365.557.951,00**	**579.082.958,10**	**158,41**
1	Pendapatan BLUD	365.557.951,00	579.082.958,10	158,41
I	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**1.000.000,00**	**6.232.261,75**	**623,22**
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	6.232.261,75	623,22
JUMLAH		**4.046.557.951,00**	**4.305.755.125,11**	**106,40**

3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian Pendapatan Transfer Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Kurang/ lebih	(%)
	Pendapatan Transfer	**1.493.408.253.000,00**	**1.436.859.561.228,00**	**1.404.314.890.833,00**	**(56.548.691.772,00)**	**97,73**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.381.247.000,00	1.346.525.391.843,00	1.313.230.141.628,00	(67.855.855.157,00)	**97,52**
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.027.006.000,00	90.334.169.385,00	91.084.749.205,00	11.307.163.385,00	**100,83**

3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Kurang/ lebih	(%)
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**0,00**	**6.474.831.905,60**	**6.480.769.783,70**	**6.474.831.905,60**	**100,09**
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.474.831.905,60	6.480.769.756,31	6.474.831.905,60	100,09

3.1.1.4 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya :

a) Potensi Pajak/Retribusi Belum Tergali Maksimal. Belum maksimal dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatan baru atau mengoptimalkan sektor potensial (seperti hotel, restoran, hiburan, dan PBB-P2).
b) Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran masyarakat dan badan usaha dalam membayar pajak daerah masih rendah.
c) Sarana dan prasarana Digitalisasi Pelayanan Pajak (E-Tax) masih kurang maksimal.
d) Keterbatasan SDM dan Teknologi. Kualitas dan kuantitas petugas pemungut pajak masih minim, serta sarana teknologi

informasi untuk pelaporan dan pembayaran pajak belum memadai (belum terdigitalisasi sepenuhnya).

e) Pengawasan dan Penegakan Hukum Lemah. Pengawasan, pemeriksaan dan penegakan sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak yang lalai.
f) Kinerja BUMD Belum Optimal. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sering kali belum memberikan kontribusi laba yang signifikan terhadap PAD.
g) Pemanfaatan Aset Daerah kurang maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
h) Ketergantungan Terlalu Tinggi pada Dana Transfer. Hal ini menciptakan keengganan/kurangnya kreativitas pemerintah daerah untuk mencari alternatif pendapatan (kurang inovatif).

b. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/ langkah-langkah sebagai berikut :

a) Validasi dan Pemutakhiran Data Potensi. Melakukan pendataan ulang (sensus) potensi pajak dan retribusi secara rutin agar target PAD sesuai dengan realitas di lapangan.
b) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan sosialisasi, mempermudah pembayaran melalui transaksi online, memberikan insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi.
c) Digitalisasi Pelayanan Pajak (E-Tax) secara bertahap. Menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis teknologi informasi (E-SPTPD, E-ticketing, tapping box dan lainnya) untuk mengurangi interaksi manusia, mencegah kebocoran, dan mempermudah wajib pajak.
d) Peningkatan Kompetensi SDM. Mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pegawai di bidang perpajakan, teknologi informasi, dan analisis data keuangan.
e) Penegakan hukum (sanksi tegas) kepada wajib pajak yang melanggar/lalai bekerjasama dengan Satpol PP dan Inspektorat Daerah.
f) Optimalisasi BUMD dan Aset Daerah. Melakukan restrukturisasi BUMD agar lebih profesional dan produktif.
g) Mendayagunakan aset milik daerah (tanah/bangunan) sebagai properti investasi dan mendukung peningkatan PAD.

3.1.2 Kerjasama dengan Pihak Ketiga melibatkan pihak swasta/pihak ketiga dalam pengelolaan objek wisata atau pemungutan parkir, serta meningkatkan investasi daerah untuk meningkatkan PADPengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada Tahun 2025 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Penentuan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penganggaran belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah, efisien dan efektifitas anggaran, tolok ukur dan target kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi :

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan

masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

6. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain kebijakan pengelolaan belanja daerah di atas, terdapat pengaturan belanja yang diarahkan untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, dan pendanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Besaran alokasi anggaran tersebut ditetapkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*DAU spesific grant*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025. Secara lengkap struktur belanja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 16 Struktur Anggaran Belanja APBD Kabupaten PacitanTahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A	**BELANJA OPERASI**	**1.315.610.212.699,00**	**1.349.924.131.493,22**
-	Belanja pegawai	786.051.295.547,00	823.727.581.396,11
-	Belanja barang dan jasa	499.256.249.797,00	492.477.582.742,11
-	Belanja hibah	29.622.267.355,00	32.916.067.355,00
-	Belanja bantuan sosial	680.400.000,00	802.900.000,00
B	**BELANJA MODAL**	**154.618.812.321,00**	**111.138.941.916,65**
-	Belanja modal tanah	3.812.060.000,00	3.947.060.000,00
-	Belanja modal peralatan dan mesin	25.745.497.254,70	31.380.865.616,35
-	Belanja modal gedung dan bangunan	32.706.913.128,36	33.186.176.916,85
-	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	89.578.323.320,94	36.725.342.713,45
-	Belanja modal aset tetap lainnya	2.645.518.617,00	5.368.996.670,00
-	Belanja Modal Aset Lainnya	130.500.000,00	530.500.000,00
C	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.000.000.000,00**	**8.786.749.647,00**
-	Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	8.786.749.647,00
D	**BELANJA TRANSFER**	**279.210.918.992,00**	**278.473.352.177,00**
-	Belanja bagi hasil	10.178.520.692,00	9.358.470.877,00
-	Belanja bantuan keuangan	269.032.398.300,00	269.114.881.300,00
JUMLAH BELANJA		**1.755.439.944.012,00**	**1.748.323.175.233,87**

3.1.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.748.323.175.233,87 realisasinya mencapai Rp1.668.011.933.424,00 atau 95,40% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.302.268.540.270,92 belanja modal sebesar Rp93.141.854.040,08 belanja tidak terduga sebesar Rp5.991.831.374,00 dan belanja transfer Rp266.609.707.739,00 terdapat penghematan sebesar Rp80.311.241.809,87.

Dari kelompok belanja operasi selain dipergunakan untuk belanja pegawai, pada tahun 2025 juga dialokasikan untuk:

1. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;

2. Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non – profesional.
3. Belanja Bantuan Sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Dari kelompok belanja tidak terduga dialokasikan untuk:

a. keadaan darurat;
b. keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya;
c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya; dan
d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Dari kelompok belanja transfer dialokasikan untuk:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

   Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.

   Belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/RW, bantuan Operasional BPD, dan bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja diarahkan pada :

1. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
2. Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan;
3. Menitik beratkan pada Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar, Urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
5. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
6. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
    a Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;
    b Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Setelah dilakukan operasionalisasi kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan Kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah dan faktor lain, maka target dan realisasi belanja daerah tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 17 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
A	**BELANJA OPERASI**	**1.349.924.131.493,22**	**1.302.268.540.270,92**	**96,46**
-	Belanja Pegawai	823.727.581.396,11	796.605.950.209,00	96,70
-	Belanja Barang dan Jasa	492.477.582.742,11	473.243.850.181,92	96,09
-	Belanja Hibah	32.916.067.355,00	31.638.939.880,00	96,12
-	Belanja Bantuan Sosial	802.900.000,00	779.800.000,00	97,12
B	**BELANJA MODAL**	**111.138.941.916,65**	**93.141.854.040,08**	**83,80**
-	Belanja Modal Tanah	3.947.060.000,00	3.933.608.350,00	99,65
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.380.865.616,35	26.626.928.884,20	84,85
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.186.176.916,85	29.602.423.738,88	89,20
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.725.342.713,45	27.094.777.231,00	73,77
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.368.996.670,00	5.359.748.936,00	99,82
-	Belanja Modal Aset Lainnya	530.500.000,00	524.366.900,00	98,84
C	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.786.749.647,00**	**5.991.831.374,00**	**68,19**
-	Belanja Tidak Terduga	8.786.749.647,00	5.991.831.374,00	68,19
D	**BELANJA TRANSFER**	**278.473.352.177,00**	**266.609.707.739,00**	**95,73**
-	Belanja Bagi Hasil	9.358.470.877,00	8.767.303.099,00	93,68
-	Belanja Bantuan Keuangan	269.114.881.300,00	257.842.404.640,00	95,81
JUMLAH BELANJA		**1.748.323.175.233,87**	**1.668.011.933.424,00**	**95,40**

3.1.2.3 Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan

1. Terbatasnya jumlah personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana Desa, BOSP, BOK dan BLUD);

b. Solusi

1. Melakukan konsultasi ke Kementerian terkait dan koordinasi dengan OPD penerima DAU yang ditentukan penggunaanya

untuk percepatan laporan rencana penggunaan anggaran serta laporan realisasinya karena hal tersebut menjadi syarat salur .

2. Secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui aplikasi sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut

3. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban, menyusun regulasi terkait pelaporan dana non RKUD dan Menetapkan rekening Dana Desa, BOSP, BOK dan BLUD menjadi bagian Rekening Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Realisasi Belanja dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja);

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah supaya sumber pendapatan yang berasal dari Silpa tahun yang lalu bisa digunakan pada APBD tahun berjalan. Secara lengkap pengelolaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18 Target dan Realisai Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	**59.429.887.105,27**	**59.791.530.623,00**	**100,60**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.179.887.105,27	59.179.887.105,27	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	250.000.000,00	611.643.517,73	244,65
PEMBIAYAAN DAERAH		**59.429.887.105,27**	**59.791.530.623,00**	**100,60**

Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada tahun 2025 sejumlah Rp59.429.887.105,27 terealisasi Rp59.791.530.623,00 atau capaian 100,60%. Penerimaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya sebesar Rp59.791.530.623,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp611.643.517,73.

Tabel 19 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.688.893.288.128,60**	**1.664.784.943.311,05**	**98,57**
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.558.894.995,00	253.989.282.694,35	103,43
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.436.859.561.228,00	1.404.314.890.833,00	97,73
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.474.831.905,60	6.480.769.783,70	100,09
5	**BELANJA DAERAH**	**1.748.323.175.233,87**	**1.668.011.933.424,00**	**95,40**
5.1	BELANJA OPERASI	1.349.924.131.493,22	1.302.268.540.270,92	96,46
5.2	BELANJA MODAL	111.138.941.916,65	93.141.854.040,08	83,80
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.786.749.647,00	5.991.831.374,00	68,19
5.4	BELANJA TRANSFER	278.473.352.177,00	266.609.707.739,00	95,73
	Jumlah Belanja	**1.748.323.175.233,87**	**1.668.011.933.424,00**	**95,40**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(59.429.887.105,27)**	**(3.226.990.112,95)**	**5,42**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**59.429.887.105,27**	**59.791.530.623,00**	**100,60**
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,60
	PEMBIAYAAN NETTO	**59.429.887.105,27**	**59.791.530.623,00**	**100,60**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**56.564.540.510,05**	

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

1. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pacitan diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dimana setiap tahunnya telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun Laporan Keuangan Audited RSUD dr. Darsono Tahun Anggaran 2024.

3. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan.

   Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah disajikan dalam bentuk Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Basis Kas
   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

2. Basis Akrual.
   Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan dan belanja yang tidak diterima langsung melalui Kas Daerah yang terjadi pada Entitas Akuntansi seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr. Darsono, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. **Pendapatan - LRA**

   Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto,* yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto,* dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:

   1) diterima di Rekening Kas Daerah; atau
   2) diterima oleh SKPD; atau
   3) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD; dan
   4) diterima dan dipergunakan langsung untuk operasional SKPD (BLUD, JKN, BOS). Pengakuan Pendapatannya diatur tersendiri dalam petunjuk teknis pada masing-masing SKPD yang diberikan kewenangan dalam menyampaikan SP3B dengan SP2B yang disahkan oleh PPKD.

2. **Belanja**

   Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

   Khusus untuk SKPD yang diberikan kewenangan menggunakan langsung pendapatannya untuk operasional kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja dengan menyampaikan SP3B dan SP2B yang disahkan oleh PPKD sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

3. **Pembiayaan**

   Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto,* dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. **Pendapatan-LO**

   Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

   1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.

2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*)

5. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *non* kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

6. Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti

memorial reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dan estimasi persentase piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

1) Kualitas lancar;
2) Kualitas kurang lancar;
3) Kualitas diragukan; dan
4) Kualitas macet.

Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:

1) Piutang pajak;
2) Piutang retribusi; dan
3) Piutang selain pajak dan retribusi.

Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan
    2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan
    2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
    2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
    2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
    2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau

2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

(1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari piutang dengan kualitas lancar;
(2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
(4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

(1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

(2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang

digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Investasi

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga, dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning* (tidak menghasilkan) atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD per 31 Desember 2024 pada harga perolehan yang terdiri dari:

1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-

masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa

secara hukum mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

5) **Properti Investasi**

Properti Investasi merupakan property (tanah dan bangunan atau bagian dari suatu bagunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai asset atau keduanya dan tidak untuk

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative; atau

2) dijual /atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Properti investasi diakui sebesar biaya perolehan atau nilai wajar property investasi dapat diukur dengan handal.

Properti Investasi disajikan dan diklasifikasikan dalam aset non lancar dan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Pemerintah daerah mengungkapkan Properti Invesatsi berdasarkan dasar penilaian, metode penyusutan, masa manfaat, tarif penyusutan, penambahan, pelepasan, alih fungsi dll.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran

ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya. Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

11. Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan *kurs* tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan

12. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Laporan Keuangan harus menyajikan secara akrual untuk pendapatan dan belanja serta informasi tambahan mengenai rincian *output* dan *outcame* dalam bentuk

indikator kinerja keuangan dengan maksud agar pembaca memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul dari penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja

4.5 Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan yang diuraikan sebagai berikut:

1) Kebijakan Akuntansi Aset;
2) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
3) Kebijakan Akuntansi Ekuitan;
4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
5) Kebijakan Akuntansi Belanja;
6) Kebijakan Akuntansi Transfer;
7) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
8) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
9) Kebijakan Akuntansi Beban;

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1. Pendapatan	**1.688.893.288.128,60**	**1.664.784.943.311,05**	**1.766.250.812.944,91**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun 2025, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.688.893.288.128,60 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.664.784.943.311,05 atau sebesar 98,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2024, realisasi pendapatan pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp101.465.869.633,86 atau sebesar 5,74%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	245.558.894.995,00	253.989.282.694,35	103,43	223.727.536.379,11	30.261.746.315,24
2	Pendapatan Transfer	1.436.859.561.228,00	1.404.314.890.833,00	97,74	1.542.471.977.210,00	(138.157.086.377,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.474.831.905,60	6.480.769.783,70	100,09	51.299.355,80	6.429.470.427,90
Jumlah		**1.688.893.288.128,60**	**1.664.784.943.311,05**	**98,57**	**1.766.250.812.944,91**	**(101.465.869.633,86)**

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebesar Rp245.558.894.995,00 dengan realisasi sebesar Rp253.989.282.694,35 atau sebesar 103,43%, sehingga melebihi target sebesar Rp8.430.387.699,35 atau 3,43%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, realisasi PAD pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp30.261.746.315,24 atau sebesar 13,53%.

Adapun Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Daerah	75.940.072.518,00	79.258.618.063,83	104,37	52.336.207.879,27	26.922.410.184,56
2	Retribusi Daerah	162.472.264.526,00	167.299.910.680,00	102,97	135.752.046.205,66	31.547.864.474,34
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100,81	3.101.336.168,69	23.662.656,72
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.046.557.951,00	4.305.755.125,11	106,41	32.537.946.125,49	(28.232.191.000,38)
Jumlah		**245.558.894.995,00**	**253.989.282.694,35**	**103,43**	**223.727.536.379,11**	**30.261.746.315,24**

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025.

Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, semua telah tercapai melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik
3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
6) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame;
7) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
8) Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah;

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp79.258.618.063,83 atau sebesar 104,37 dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Reklame	560.000.000,00	685.768.323,00	122,46	784.178.557,00	(98.410.234,00)
2	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	159.873.335,00	106,58	159.015.357,00	857.978,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	445.000.000,00	864.518.873,97	194,27	383.503.453,94	481.015.420,03
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.264.439.500,00	25.910.649.281,00	98,65	25.819.952.078,00	90.697.203,00
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00	3.826.582.792,00	191,33	2.042.282.031,00	1.784.300.761,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.116.000.000,00	22.021.439.558,86	104,29	23.147.276.402,33	(1.125.836.843,47)
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20.156.149.539,00	19.819.723.300,00	98,33	0,00	19.819.723.300,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.248.483.479,00	5.970.062.600,00	113,75	0,00	5.970.062.600,00
Jumlah		**75.940.072.518,00**	**79.258.618.063,83**	**104,37**	**52.336.207.879,27**	**26.922.410.184,56**

Sistem Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan 2 cara yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam Dan Batuan) dan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir serta Jasa Kesenian dan Hiburan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dari total pendapatan Pajak Daerah diatas, terdapat 2 obyek pajak yang tidak dapat memenuhi target dikarenakan :

1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp25.910.649.281,00 atau sebesar 98,65% dari pagu anggaran sebesar Rp26.264.439.500,00. Penyebab tidak tercapainya realisasi, diantaranya karena adanya beberapa wajib pajak yang belum membayar.
2) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
   Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp19.819.723.300,00 atau sebesar 98,33% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.156.149.539,00. Penyebab tidak tercapainya realisasi, diantaranya karena adanya beberapa wajib pajak yang belum membayar.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan pada :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp167.299.910.680,00 atau sebesar 102,97 % dari anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar Rp31.547.864.474,34 atau 23,24%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum	150.178.171.276,00	153.693.583.090,00	102,34	122.701.409.459,00	30.992.173.631,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.869.093.250,00	13.108.385.432,00	110,44	12.424.211.746,66	684.173.685,34
3	Retribusi Perizinan Tertentu	425.000.000,00	497.942.158,00	117,16	626.425.000,00	(128.482.842,00)
Jumlah		**162.472.264.526,00**	**167.299.910.680,00**	**102,97**	**135.752.046.205,66**	**31.547.864.474,34**

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp153.693.583.090,00 atau sebesar 102,34% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	144.827.128.276,00	148.607.617.090,00	102,61	117.307.522.459,00	31.300.094.631,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.062.259.000,00	3.053.436.000,00	99,71	3.059.424.000,00	(5.988.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.228.784.000,00	1.928.460.000,00	86,53	2.141.348.000,00	(212.888.000,00)
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	117.740.000,00	(117.740.000,00)
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	60.000.000,00	104.070.000,00	173,45	75.375.000,00	28.695.000,00
Jumlah		**150.178.171.276,00**	**153.693.583.090,00**	**102,34**	**122.701.409.459,00**	**30.992.173.631,00**

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan RSUD dr.Darsono Kabupaten Pacitan. Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp148.607.617.090,00 atau sebesar 102,61% dari pagu yang ditetapkan, kenaikan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2025 dikarenakan sesuai Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

b) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp3.053.436.000,00 atau 99,71% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belum sesuai target, dikarenakan pembayaran retribusi parkir berlangganan tidak sesuai jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Pacitan. Pendapatan parkir berlangganan sesuai dengan jumlah kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Pacitan, sedangkan banyak kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB sehingga juga terjadi lost potensi parkir berlangganan.

c) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mulai tahun 2025 sudah tidak dipungut. Adanya realisasi Tahun 2025 karena pembayaran atas ketetapan tahun sebelumnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.

d) Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Pelayanan Pasar. Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp1.928.460.000,00 atau 86,53% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belum sesuai target, dikarenakan banyaknya penjualan melalui media online sehingga pasar sepi pengunjung dan menyebabkan pedagang tidak berjualan.

e) Retribusi Pelayanan Kebersihan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp 104.070.000,00 atau sebesar 173,45% dari pagu yang ditetapkan, kenaikan Retribusi Pelayanan Kebersihan yang sangat signifikan dipengaruhi oleh bertambahnya wajib retribusi yang mendapat layanan kebersihan.

Dari jumlah Realisasi Retribusi Jasa Umum diatas, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp30.992.173.631,00 atau sebesar 25,26% dikarenakan adanya peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan bertambahnya wajib retribusi yang mendapat layanan kebersihan

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.869.093.250,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp13.108.385.432,00 atau sebesar 110,44%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	8.000.000,00	2.650.000,00	33,13	1.750.000,00	900.000,00
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	265.246.000,00	298.996.000,00	112,72	264.210.000,00	34.786.000,00
3	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	622.400.000,00	252.697.200,00	40,60	642.606.530,00	(389.909.330,00)
4	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.365.188.000,00	1.460.510.500,00	106,98	1.290.245.000,00	170.265.500,00
5	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	22.650.000,00	23.750.000,00	104,86	29.175.000,00	(5.425.000,00)
6	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	8.046.400.000,00	8.926.135.000,00	110,93	7.864.390.000,00	1.061.745.000,00
7	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	64.809.000,00	77.605.000,00	119,74	62.088.750,00	15.516.250,00
8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.474.400.250,00	2.066.041.732,00	140,13	2.269.746.466,66	(203.704.734,66)
Jumlah		**11.869.093.250,00**	**13.108.385.432,00**	**110,44**	**12.424.211.746,66**	684.173.685,34

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

a) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 instansi pemungutnya adalah Sekretariat Daerah dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp2.650.000,00 atau sebesar 33,13% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp8.000.000,00. Tidak terpenuhinya target dikarenakan minimnya pengunjung dan kondisi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila masih belum memenuhi standar.

b) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perhubungan.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp 298.996.000,00 atau sebesar 112,72% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 265.246.000,00.

c) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023, dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp 252.697.200,00 atau sebesar 40,60% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 622.400.000,00. Tidak terpenuhinya target di dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan terkait penghentian sementara

ekspor benih bening lobster (BBL/benur) dan fokus pada budidaya di dalam negeri untuk mencegah kerugian negara akibat penyelundupan.

d) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Retribusi ini sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp1.460.510.500,00 atau sebesar 106,98% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.365.188.000,00 .

e) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 instansi pemungutnya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan,

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp23.750.000,00 atau sebesar 104,86% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp22.650.000,00.

f) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dipungut oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan Perbup Nomor 137 Tahun 2023.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp8.926.135.000,00 atau sebesar 110,93% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp8.046.400.000,00 .

g) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Retribusi ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp77.605.000,00 atau sebesar 119,74% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp64.809.000,00

h) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023. Dipungut oleh Badan Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, serta Sekretariat Daerah.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp 2.066.041.732,00 atau sebesar 140,13% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.474.400.250,00. Pelampauan target yang meningkat dan signifikan dipengaruhi oleh adanya pembayaran sewa obyek baru.

Retribusi Jasa Usaha tersebut diatas, tidak semua potensi dapat dipenuhi sesuai target di Tahun 2025 yaitu Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan,

Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, realisasi Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp684.173.685,34 atau sebesar 5,51% dikarenakan adanya peningkatan pada Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan, Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp425.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp497.942.158,00 atau sebesar 117,16%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)	425.000.000,00	497.942.158,00	117,16	626.425.000,00	(128.482.842,00)
Jumlah		**425.000.000,00**	**497.942.158,00**	**117,16**	**626.425.000,00**	(128.482.842,00)

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) berdasarkan Perbub nomor 137 tahun 2023 dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan,

Pada tahun 2025 Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) terealisasi sebesar Rp497.942.158,00 atau 117,16 % dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp425.000.000,00 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Mengalami penurunan sebesar Rp128.482.842,00 atau 20,51% dibandingkan Tahun 2024

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 3.124.998.825,41 atau sebesar 100,81% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp 3.100.000.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100,81	3.101.336.168,69	23.662.656,72
Jumlah		**3.100.000.000,00**	**3.124.998.825,41**	**100,81**	**3.101.336.168,69**	**23.662.656,72**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan PT Bank BPR Jatim, merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Buku 2025.

Pembagian dividen PT Bank Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 48 Akta Tanggal 22 Mei 2025

Pembagian dividen PT Bank BPR Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 93 Akta Tanggal 16 Juni 2025. Pembagian dividen dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap kedua perusahaan tersebut yaitu 21,88% untuk Bank Jatim dan 0,93% pada PT Bank BPR Jatim.

Pembagian dividen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/343/KPTS/408.12/2025 Tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan Tahun 2024 yaitu sebesar 20 % dari laba bersih perusahaan setelah dikurangi PPH Perusahaan.

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebesar Rp3.124.998.825,41 terdiri atas:

1) Pendapatan dividen dari PT Bank Jatim sebesar Rp2.928.094.026,41
2) Pendapatan dividen dari PT Bank BPR Jatim sebesar Rp110.074.000,00 dan
3) Pendapatan dividen dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebesar Rp86.830.799,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.305.755.125,11 atau sebesar 106,41% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dipungut oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dan beberapa SKPD yang melaksanakan penjualan BMD.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sesuai Pasal 58 ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 110 Perda Nomor 8 Tahun 2023, dicatatkan dan dilaporkan sebagai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

3) Penerimaan Jasa Giro dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

5) Pendapatan Bunga dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

7) Pendapatan Denda Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

8) Pendapatan dari Pengembalian dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian.

10) Pendapatan BLUD dipungut oleh RSUD Dr. Darsono Pacitan dan 24 UPTD Puskesmas.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	130.000.000,00	241.150.400,00	185,50	480.546.521,00	(239.396.121,00)
2	Jasa Giro	400.000.000,00	381.022.268,53	95,25	358.094.770,73	22.927.497,80
3	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	2.100.397.294,41	84,01	4.008.340.812,82	(1.907.943.518,41)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	169.571.276,28	3.391,43	204.320.288,00	(34.749.011,72)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	70.000.000,00	58.822.797,00	84,03	53.931.628,00	4.891.169,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	575.000.000,00	769.475.869,04	133,82	520.272.572,50	249.203.296,54
8	Pendapatan BLUD	365.557.951,00	579.082.958,10	158,41	26.908.941.022,79	(26.329.858.064,69)
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	6.232.261,75	623,23	3.498.509,65	2.733.752,10
Jumlah		**4.046.557.951,00**	**4.305.755.125,11**	**106,41%**	**32.537.946.125,49**	**(28.232.191.000,38)**

1) Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp241.150.400,00 atau 185,50% dari total anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya (hasil penjualan hewan, biota perairan dan tanaman) dan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	00,00	13.250.000,00	(13.250.000,00)
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	130.000.000,00	241.150.400,00	185,50	467.296.521,00	(226.146.121,00)
Jumlah		**130.000.000,00**	**241.150.400,00**	**185,50**	**480.546.521,00**	**(239.396.121,00)**

2) Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro

dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan. Anggaran Pendapatan Jasa Giro Tahun 2025 sejumlah Rp400.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp381.022.268,53 atau 95,25% naik sebesar Rp 22.927.497,80 atau 6,40% dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan jumlah anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

3) Pendapatan bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.100.397.294,41 atau 84,01% dari anggaran yang ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar Rp1.907.943.518,41 atau sebesar 47,60% dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan jumlah pengendapan anggaran.

   Pendapatan Bunga sebesar Rp Rp2.100.397.294,41 terdiri dari

   a) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dalam bentuk deposito pada Bank Jatim sebesar Rp2.094.520.547,41
   b) Pendapatan bunga remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.876.747,00 yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan nomor bukti transaksi STBP 35.01/41.0/002412/STBP/5.02.0.00.0.00.04.0000/9/2025 sebesar Rp5.298.624,00 dan STBP Nomor 5.01/41.0/002413/STBP/5.02.0.00.0.00.04.0000/9/2025 sebesar Rp578.123,00

4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp169.571.276,28 atau sebesar 3.391,43% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 yang telah ditetapkan.

5) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp58.822.797,00 atau sebesar 84,03% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00 yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan denda pajak Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.374.640,00	(1.374.640,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.773.018,00	(1.773.018,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	576.546,00	(576.546,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	6.000.000,00	1.413.636,00	23,56	5.870.761,00	(4.457.125,00)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	122.353,00	(122.353,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	145.000,00	250.020,00	172,43	306.758,00	(56.738,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000,00	20.160,00	2,02	1.453.529,00	(1.433.369,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.000.000,00	41.190.872,00	91,54	42.454.023,00	(1.263.151,00)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00	13.000.000,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.855.000,00	2.948.109,00	60,72	0,00	2.948.109,00
	Jumlah	**70.000.000,00**	**58.822.797,00**	**84,03**	**53.931.628,00**	**(4.891.169,00)**

6) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp769.475.869,04 atau sebesar 133,82% dari anggaran sebesar Rp575.000.000,00 yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan Pengembalian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	49.225.000,00
b)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	263.958.308,00
c)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.500.000,00
d)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	282.241.875,00
e)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	52.612.135,01
f)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	58.422.943,03
g)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	54.515.608,00

7) BLUD) sebesar Rp579.082.958,10 atau 158,41% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp365.557.951,00 Tahun 2025 terdapat penurunan signifikan sebesar Rp26.329.858.064,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	323.500.000,00	537.751.148,76	166,23	911.478.420,84	(373.727.272,08)
2	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	25.997.462.601,95	(25.997.462.601,95)
3	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	42.057.951,00	41.331.809,34	98,27	0,00	41.331.809,34
Jumlah		**365.557.951,00**	**579.082.958,10**	**158,41**	**26.908.941.022,79**	**(26.329.858.064,69)**

a) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan terealisasi sebesar Rp537.751.148,76. Terdapat penurunan sebesar Rp373.727.272,08 dari Tahun 2024 dikarenakan pengakuan pendapatan BLUD dari Jasa Layanan bergeser menjadi pendapatan retribusi.

b) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain terealisai sebesar Rp 0,00 di Tahun 2025, terjadi penurunan sebesar Rp25.997.462.601,95 dari Tahun 2024 dikarenakan pengakuan pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain bergeser menjadi pendapatan retribusi

c) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp41.331.809,34 atau 98,27% dari pagu anggaran yang ditetapkan terdiri dari Pendapatan BLUD dari Jasa Giro.

d) Adapun Rincian pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) yang terdapat di 25 BLUD secara detail terdapat sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.**

8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp6.232.261,75. atau sebesar 623,23% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00 yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana bergulir telah dihentikan sesuai dengan peraturan perundang undangan mulai bulan April Tahun 2023.

1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.436.859.561.228,00 dan realisasinya Rp1.404.314.890.833,00 atau sebesar 97,74%. Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp138.157.086.377,00 atau sebesar 8,96%. Pendapatan Transfer dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2025.

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.166.864.856.843,00	1.144.424.391.488,00	98,08	1.196.289.614.602,00	(51.865.223.114,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	179.660.535.000,00	168.805.750.140,00	93,96	211.288.433.000,00	(42.482.682.860,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	90.334.169.385,00	91.084.749.205,00	100,83	134.893.929.608,00	(43.809.180.403,00)
JUMLAH		**1.436.859.561.228,00**	**1.404.314.890.833,00**	97,74	**1.542.471.977.210,00**	**(138.157.086.377,00)**

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.144.424.391.488,00 atau sebesar 98,08% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Dana Bagi Hasil Pajak	59.955.021.000,00	57.784.574.900,00	96,38	49.369.490.000,00	8.415.084.900,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	33.143.596.000,00	33.599.611.000,00	101,38	43.750.468.000,00	(10.150.857.000,00)
3	Dana Alokasi Umum	807.092.179.600,00	806.723.447.714,00	99,95	821.297.336.554,00	(14.573.888.840,00)
4	Dana Alokasi Khusus	266.674.060.243,00	246.316.757.874,00	92,37	281.872.320.048,00	(35.555.562.174,00)
Jumlah		**1.166.864.856.843,00**	**1.144.424.391.488,00**	**98,08**	**1.196.289.614.602,00**	**(51.865.223.114,00)**

1) Dana Bagi hasil pajak sebesar Rp59.955.021.000,00 terealisasi sebesar Rp57.784.574.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi hasil pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.870.759.000,00	5.399.584.500,00	91,97	4.184.676.000,00	1.214.908.500,00
2	DBH PPh Pasal 21	16.638.139.000,00	15.099.575.700,00	90,75	14.161.060.000,00	938.515.700,00

3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.733.331.000,00	1.572.622.700,00	90,73	1.197.308.000,00	375.314.700,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.712.792.000,00	35.712.792.000,00	100,00	29.826.446.000,00	5.886.346.000,00
Jumlah		**59.955.021.000,00**	**57.784.574.900,00**	**96,38**	**49.369.490.000,00**	**8.415.084.900,00**

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.870.759.000,00 terealisasi sebesar Rp5.399.584.500,00 atau 91,97%

Realisasi sebesar Rp5.399.584.500,00 terdiri dari Rp4.240.570.500,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.3 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan realisasi sebesar Rp1.159.014.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

Terdapat piutang sebesar Rp3.434.812.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

b) DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.638.139.000,00 terealisasi sebesar Rp15.099.575.700,00 atau 90,75%

Realisasi sebesar Rp15.099.575.700,00 terdiri dari Rp13.847.069.700,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.2 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan sebesar Rp1.252.506.000,00 realisasi sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp9.525.917.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

c) DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.733.331.000,00 terealisasi sebesar Rp1.572.622.700,00 atau 90,73%

Realisasi sebesar Rp1.572.622.700,00 terdiri dari realisasi Rp1.446.374.700,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.2 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan sealisasi sebesar Rp126.248.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp2.103.173.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

d) DBH dari Cukai Hasil Tembakau

DBH dari Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.712.792.000,00 terealisasi sebesar Rp35.712.792.000,00 atau 100,00% Realisasi sebesar Rp35.712.792.000,00 terdiri dari Rp34.784.933.000,00 realisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, dan sebesar Rp927.859.000,00 realisasi sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp9.411.769.000,00 dan utang sebesar Rp821.483.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

2) Dana Bagi hasil Bukan Pajak sebesar Rp33.143.596.000,00 terealisasi sebesar Rp33.599.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Dana Dana Bagi hasil Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.987.249.000,00	25.987.249.000,00	100,00	35.486.836.000,00	(9.499.587.000,00)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3.965.151.000,00	4.172.994.000,00	105,24	5.605.882.000,00	(1.432.888.000,00)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	16.429.000,00	21.225.000,00	129,19	28.034.000,00	(6.809.000,00)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	61.508.000,00	76.127.000,00	123,77	61.019.000,00	15.108.000,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.899.670.000,00	2.128.426.000,00	112,04	940.967.000,00	1.187.459.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	122.134.000,00	122.135.000,00	100,00	191.553.000,00	(69.418.000,00)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.091.455.000,00	1.091.455.000,00	100,00	1.436.177.000,00	(344.722.000,00)
Jumlah		**33.143.596.000,00**	**33.599.611.000,00**	**101,38**	**43.750.468.000,00**	**(10.150.857.000,00)**

a) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.987.249.000,00 terealisasi sebesar Rp25.987.249.000,00 atau 100%.

Realisasi sebesar Rp25.987.249.000,00 terdiri dari Rp24.629.565.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2025 Lampiran V.5 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp1.357.684.000,00 realisasi sesuai KMK Republik

Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp19.990.948.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

b) DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi

DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.965.151.000,00 terealisasi sebesar Rp4.172.994.000,00 atau 105,24%

Realisasi sebesar Rp4.172.994.000,00 terdiri dari Rp2.867.329.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.5 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, realisasi sebesar Rp207.843.000,00 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan realisasi sebesar Rp1.097.822.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp1.452.252.000,00 dan Utang sebesar Rp455.412.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

c) DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi

DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 16.429.000,00 terealisasi sebesar Rp21.225.000,00 atau 129,19%

Realisasi sebesar Rp21.225.000,00 terdiri dari Rp9.704.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.9 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.796.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan sebesar Rp6.725.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp21.504.000,00 dan Utang sebesar Rp15.474.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

d) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent

DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 61.508.000,00 terealisasi sebesar Rp76.127.000,00 atau 123,77%

Realisasi sebesar Rp76.127.000,00 terdiri dari Rp41.009.000,00 Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.6 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp14.619. 000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan realisasi sebesar Rp20.499.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp27.118.000,00 dan utang sebesar Rp7.144.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

e) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty

DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.899.670.000,00 terealisasi sebesar Rp2.128.426.000,00 atau 112,04%

Realisasi sebesar Rp Rp2.128.426.000,00 terdiri dari Rp.1.578.910.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.6 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp228.756.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan sebesar Rp320.760.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp2.151.125.000,00 dan Utang sebesar Rp398.839.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

f) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp122.134.000,00 terealisasi sebesar Rp122.135.000,00 atau 100,00%

Realisasi sebesar Rp122.135.000,00 terdiri dari Rp122.134.000,00sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201

Tahun 2024 Lampiran V.7 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan sebesar Rp1.000,00 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Terdapat Piutang sebesar Rp30.303.000,00 dan utang sebesar Rp105.165.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

g) DBH Sumber Daya Alam Perikanan

DBH Sumber Daya Alam Perikanan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.091.455.000,00 terealisasi sebesar atau 100,00%

Realisasi sebesar Rp1.091.455.000,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.8 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

Terdapat Utang sebesar Rp1.587.205.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

3) Dana Alokasi Umum sebesar 807.092.179.600,00 terealisasi sebesar Rp806.723.447.714,00

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
1	DAU	760.167.975.600,00	759.799.425.699,00	99,95	711.712.963.000,00	48.086.462.699,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.155.264.000,00	7.155.082.015,00	100,00	13.256.534.554,00	(6.101.452.539,00)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	21.775.820.000,00	21.775.820.000,00	100,00	23.930.800.000,00	(2.154.980.000,00)
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.993.120.000,00	16.993.120.000,00	100,00	33.142.493.000,00	(16.149.373.000,00)
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	38.254.546.000,00	(38.254.546.000,00)
Jumlah		**807.092.179.600,00**	**806.723.447.714,00**	**99,95**	**821.297.336.554,00**	**(14.573.888.840,00)**

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan KMK Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka

Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah sebesar Rp806.833.046.000,00

Dari alokasi tersebut, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp807.092.179.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp806.723.447.714,00 terdiri dari :

a) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp759.799.425.699,00.
b) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar 1.000.000.000,00.
c) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp7.155.082.015,00.
d) DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp21.775.820.000,00 .
e) DAU yang ditentukan penggunannya Bidang Kesehatan sebesar Rp16.993.120.000,00.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp266.674.060.243,00 terealisasi sebesar Rp246.316.757.874,00 terdiri dari :

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut dari pagu APBD sebesar Rp18.580.731.000,00 terealisasi sebesar Rp9.233.785.810,00 atau 49,70% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.040.181.000,00	1.038.874.308,00	99,87	254.632.850,00	784.241.458,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	207.302.000,00	207.301.802,00	100,00	0,00	207.301.802,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.450.536.000,00	2.262.700.000,00	92,33	0,00	2.262.700.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	148.000.000,00	141.480.000,00	95,59	2.356.357.838,00	(2.214.877.838,00)
5	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	14.734.712.000,00	5.583.429.700,00	95,59	5.063.024.498	520.405.202,00
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0.00	00,00	8.891.308.300,00	(8.891.308.300,00)
7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	00,00	6.765.219.300,00	(6.765.219.300,00)
8	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	00,00	5.886.673.158,00	(5.886.673.158,00)
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	00,00	20.536.093.718,00	(20.536.093.718,00)
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	00,00	6.234.180.000,00	(6.234.180.000,00)
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	00,00	834.007.263,00	(834.007.263,00)
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	00,00	1.402.660.977,00	(1.402.660.977,00)
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	00,00	1.234.412.000,00	(1.234.412.000,00)
Jumlah		**18.580.731.000,00**	**9.233.785.810,00**	**49,70**	**59.458.569.902,00**	(50.224.784.092,00)

1. DAK-Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.040.181.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar

Rp1.040.181.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.038.874.308,00.

2. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler SKB untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp207.302.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp207.302.000,00 dan terealisasi sebesar Rp207.301.802,00 atau 100,00%.

3. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp2.450.536.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.450.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.262.700.000,00 atau 92,33%.

4. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp148.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp141.480.000,00 atau 95,59%.

5. DAK Fisik-Bidang Sanitasi Reguler

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp14.734.712.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.734.712.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.583.429.700,00.

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp237.082.972.064,00 dari Pagu Anggaran Rp Rp248.093.329.243,00 atau sebesar 95,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	158.167.519.000,00	146.094.353.300,00	92,37	121.378.265.000,00	24.716.088.300,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.041.250.000,00	1.635.375.000,00	80,12	4.901.250.000,00	(3.265.875.000,00)
3	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.891.367.000,00	7.725.826.105,00	97,90	6.282.362.572,00	1.443.463.533,00
4	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	45.458.652.518,00	45.457.327.229,00	100,00	46.651.250.104,00	(1.193.922.875,00)
5	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00	100,00	2.635.000.000,00	(525.000.000,00)
6	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8.356.435.795,00	9.514.150.500,00	113,85	9.503.590.510,00	10.559.990,00
7	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	120.000.000,00	(60.000.000,00)
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.286.165.000,00	1.809.000.000,00	140,65	1.769.805.000,00	39.195.000,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	90.000.000,00	66,67	225.000.000,00	(135.000.000,00)
10	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.228.951.156,00	6.291.020.156,00	101,00	8.945.197.828,00	(2.654.177.672,00)
11	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	366.769.000,00	366.769.000,00	100,00	0,00	366.769.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.112.673.774,00	15.050.604.774,00	99,59	16.084.605.230,00	(1.034.000.456,00)
13	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	500.000.000,00
14	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	378.546.000,00	378.546.000,00	100,00	0,00	378.546.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	00,00	1.495.345.592,00	(1.495.345.592,00)
16	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	00,00	790.343.000,00	(790.343.000,00)
17	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	00,00	612.229.294,00	(612.229.294,00)
18	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	00,00	1.019.506.016,00	(1.019.506.016,00)
Jumlah		**248.093.329.243,00**	**237.082.972.064,00**	**95,56**	**222.413.750.146,00**	**14.669.221.918,00**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari

1) DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD)
   Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebesar Rp158.887.476.000,00, dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp158.167.519.000,00 dengan realisasi sebesar Rp146.094.353.300,00.

2) DAK Non Fisik-Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)
   Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran, untuk alokasi

DAK Non Fisik-Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.733.000.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.041.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.635.375.000,00 atau 80,12%.

3) DAK Non Fisik-BOKB-KB
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, ntuk alokasi DAK Non Fisik- BOKB-KB Kabupaten Pacitan sebesar Rp7.891.367..000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.891.367.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.725.826.105,00 atau 97,90%.

4) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOS Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp45.513.100.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.458.652.518,00 dengan realisasi sebesar Rp45.457.327.229,00 atau 100,00%.

5) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOS Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.110.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.110.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.110.000.000,00 atau 100,00%.

6) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP PAUD Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP PAUD Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp9.514.200.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.356.435.795,00 dengan realisasi sebesar Rp9.514.150.500,00 atau 113,85%.

7) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP PAUD Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp60.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00%.

8) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP Kesetaraan Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.809.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.286.165.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.809.000.000,00 atau. 140,65%.

9) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP Kesetaraan Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp135.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp90.000.000,00 atau 66,67%.

10) DAK Non Fisik- Dana BOSP- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Kabupaten Pacitan sebesar Rp7.125.930.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.228.951.156,00 dengan realisasi sebesar Rp6.291.020.156,00 atau101,00%

11) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp366.769.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp366.769.000,00 dengan realisasi sebesar Rp366.769.000,00 atau100,00%.

12) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOK Puskesmas
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOK Puskesmas Kabupaten/Kota Kabupaten Pacitan sebesar Rp16.688.836.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.112.673.774,00 dengan realisasi sebesar Rp15.050.604.774,00 atau 99,59%.

13) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp500.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00%.

14) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Kabupaten Pacitan sebesar Rp378.546.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp378.546.000,00 dengan realisasi sebesar Rp378.546.000,00 atau 100,00%.

1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp168.805.750.140,00 atau sebesar 93,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp179.660.535.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Desa

Bersarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp164.996.136.000,00, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp164.996.136.000,00 dengan realisasi sebesar Rp154.141.351.140,00 atau 93,42%.

2) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

Berdasarkan KMK RI Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp14.664.399.000,00

ditetapkan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp14.664.399.000,00 dengan realisasi sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp14.664.399.000,00.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp91.084.749.205,00 atau sebesar 100,83 % dari anggaran. yang terdiri dari:

Tabel 39 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	85.006.515.385,00	85.777.645.205,00	100,91	119.231.048.987,00	(33.453.403.782,00)
2	Pendapatan Bantuan Keuangan	5.327.654.000,00	5.307.104.000,00	99,61	15.662.880.621,00	(10.355.776.621,00)
Jumlah		**90.334.169.385,00**	**91.084.749.205,00**	**100,83**	**134.893.929.608,00**	**(43.809.180.403,00)**

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan bagi Hasil pajak propinsi pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp85.777.645.205,00 atau sebesar 100,91% dari anggaran yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	300.194.100,00	3.107.872.762,80	1.035,29	29.940.720.837,20	(26.832.848.074,40)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	113.791.700,00	1.185.654.965,00	1.041,95	10.939.950.835,00	(9.754.295.870,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.565.000.000,00	34.701.269.073,70	106,56	34.957.708.526,30	(256.439.452,60)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak AirPermukaan	345.000.000,00	322.945.103,50	93,61	274.309.246,50	48.635.857,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	51.682.529.585,00	46.459.903.300,00	89,89	43.118.359.542,00	3.341.543.758,00
	Jumlah	**85.006.515.385,00**	**85.777.645.205,00**	**100,91**	**119.231.048.987,00**	**(33.453.403.782,00)**

a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp300.194.100,00 terealisasi sebesar Rp 3.107.872.762,80

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp300.194.100,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.807.678.662,80,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp300.194.100,00 dengan realisasi sebesar Rp3.107.872.762,80 atau 1.035,29%.

a) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp113.791.700,00 terealisasi sebesar Rp1.185.654.965,00

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp113.791.700,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.071.863.265,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp113.791.700,00 dengan realisasi sebesar Rp1.185.654.965,00 atau 1.041,95%.

b) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp32.565.000.000,00 realisasi sebesar Rp34.701.269.073,70

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.172.612.500,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/487/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.712.402.900,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/802/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.818.170.300,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.931.256.473,70.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/927/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.066.826.900,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp32.565.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.701.269.073,70 atau 106,56%.

c) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan realisasi sebesar Rp 345.000.000,00 terealisasi sebesar Rp322.945.103,50

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp72.906.000,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/351/013/2025 tentang Penetapan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp950,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/487/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp79.390.700,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/802/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp90.183.800,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.535.253,50.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/927/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp55.928.400,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp345.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp322.945.103,50 atau 93,61%.

d) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok sebesar Rp51.682.529.585,00 terealisasi sebesar Rp46.459.903.300,00

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/279/013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Angaran 2025 sebesar Rp11.409.956.200,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/307/013/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/278/013/2025 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Angaran 2024 sebesar Rp6.941.041.400,00.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/504/013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.189.855.700,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/788/013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.909.405.800,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/918/013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.009.644.200,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.682.529.585,00 dengan realisasi sebesar Rp46.459.903.300,00 atau 89,89%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tidak menetapkan Piutang bagi hasil Pajak Rokok Tahun 2025 dikarenakan belum terbitnya Keputusan Gubernur Jatim tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Desember

Tahun 2025 sampai dengan tersusunnya LKPD Unaudited Tahun 2025.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2025 terealisasi Rp5.307.104.000,00 atau sebesar 99,61% dari pagu anggaran.

Terjadi penurunan realisasi pendapatan siqnifikan dibandingkan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp10.355.776.621,00 atau 66,12 % dikarenakan pada Tahun 2025 tidak ada Bantuan Keuangan Infrastruktur Jalan (Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang).

Adapun rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Alokasi
1	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Honorarium Perawat Ponkesdes	279.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Honorarium Dokter Umum di Puskesmas Sesuai Standart	135.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Konseling dari Pintu ke Pintu (KOPIPU)	33.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Bunda Anak Impian (BUAIAN) Pendampingan Bumil Risti	119.477.000,00
5	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Bunda Anak Impian (BUAIAN) Pendampingan Bumi KEK dalam Pencegahan Stunting	119.477.000,00
6	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH)	76.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pembinaan dan Monev BUMDes	30.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Honorarium Pembahasan Ketahanan pangan dan Honor Pembahasan Stunting di desa	1.367.150.000,00
9	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan BPPDGS Tingkat ULA, SD dan MI Swasta	2.533.500.000,00
10	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan BPPDGS Tingkat Wustha dan SMP Swasta	298.500.000,00
12	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Insentif Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	316.000.000,00
Jumlah		**5.307.104.000,00**

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp6.474.831.905,60 dengan realisasi sebesar Rp6.480.769.783,70 atau sebesar 100,09%. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah	0,00	27,39	0,00	13.355,80	(13.328,41)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.474.831.905,60	6.480.769.756,31	100,09	51.286.000,00	6.429.483.756,31
Jumlah		**6.474.831.905,60**	**6.480.769.783,70**	**100,09**	**51.299.355,80**	**6.429.470.427,90**

Realisasi Pendapatan sebesar Rp6.480.769.783,70 terdiri atas:

1) Pendapatan hibah yang berasal dari Jasa Giro BOP Paud Swasta yang ditutup karena adanya evaluasi kinerja dari Yayasan PAUD sebesar Rp 27,39.
2) Pendapatan Hibah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.480.769.783,70 yang terdiri dari :

a.	Pengembalian Dana Hibah KPU	4.972.287.582,46
b.	Pengembalian Banwaslu	1.502.529.323,60
c.	Pengembalian Dana Hibah (Pemeriksaan Inspektorat)	5.952.850,25

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 dari sisi pendapatan, kontribusi terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang mencapai Rp1.313.230.141.628,00 atau mencapai 78,88% dari total realisasi pendapatan.

Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp6.480.769.783,70 atau 0,39% atau dari total realisasi pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Hibah yang berasal dari Jasa Giro BOP Paud Swasta yang ditutup sebesar 27,39 dan Pendapatan Hibah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.480.769.756,31.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.664.784.943.311,05 sebagaimana dijelaskan di atas termasuk penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan langsung ke rekening desa di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2025 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp154.141.351.140,00.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2. Belanja	**1.469.849.823.056,87**	**1.401.402.225.685,00**	**1.543.472.903.750,09**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.401.402.225.685,00 atau sebesar 95,34% dari Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.469.849.823.056,87. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp142.070.678.065,09 atau sebesar 9,20%.

Didalam realisasi belanja daerah sebagaimana tersebut diatas, terdapat belanja BLUD, Belanja BOS dan Belanja BOSP dan Dana Desa. yang proses penyaluran / pencairan anggarannya tidak melalui RKUD. Untuk Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Adapun rincian realisasi belanja BLUD di masing-masing UPT Dinas Kesehatan sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.

Untuk realisasi belanja BOS dan BOSP per Satuan Pendidikan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 2**.

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Operasi	1.349.924.131.493,22	1.302.268.540.270,92	96,47	1.328.954.792.466,95	(26.686.252.196,03)
2	Belanja Modal	111.138.941.916,65	93.141.854.040,08	83,81	208.130.870.003,14	(114.989.015.963,06)
3	Belanja Tidak Terduga	8.786.749.647,00	5.991.831.374,00	68,19	6.387.241.280,00	(395.409.906,00)
Jumlah		**1.469.849.823.056,87**	**1.401.402.225.685,00**	**95,34**	**1.543.472.903.750,09**	**(142.070.678.065,09)**

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.302.268.540.270,92 atau sebesar 96,47% dari anggaran dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pegawai	823.727.581.396,11	796.605.950.209,00	96,71	757.963.046.718,24	38.642.903.490,76
2	Belanja Barang dan Jasa	492.477.582.742,11	473.243.850.181,92	96,09	497.989.714.888,71	(24.745.864.706,79)
3	Belanja Hibah	32.916.067.355,00	31.638.939.880,00	96,12	72.327.830.860,00	(40.688.890.980,00)
4	Belanja Bantuan Sosial	802.900.000,00	779.800.000,00	97,12	674.200.000,00	105.600.000,00
Jumlah		**1.349.924.131.493,22**	**1.302.268.540.270,92**	**96,47**	**1.328.954.792.466,95**	**(26.686.252.196,03)**

Realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp26.686.252.196,03 atau 2,01% dari realisasi Tahun 2024. Penurunan realisasi terbesar terdapat pada komponen Hibah. Adapun rincian Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp 796.605.950.209,00 atau sebesar 96,71% dari anggaran. Sisa Anggaran sebesar Rp27.121.631.187,11 atau 3,29% merupakan penghematan anggaran tahun 2025 dikarenakan adanya mutasi pegawai antara lain pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah lain.

Adapun rincian belanja pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	498.712.503.428,33	494.242.963.393,00	99,10	494.048.595.400,00	194.367.993,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	247.235.936.589,00	226.230.100.169,00	91,50	42.990.618.068,00	183.239.482.101,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	148.391.570.237,00	(148.391.570.237,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.760.085.789,00	20.090.869.982,00	96,78	20.078.991.138,00	11.878.844,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.503.575.625,00	1.161.281.284,00	77,23	806.728.637,00	354.552.647,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	831.000.000,00	21.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	54.663.479.964,78	54.028.735.381,00	98,84	50.815.543.238,24	3.213.192.142,76
Jumlah		**823.727.581.396,11**	**796.605.950.209,00**	**96,71**	**757.963.046.718,24**	**38.642.903.490,76**

Realisasi tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp38.642.903.490,76 atau 5,10% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai Tahun 2025. Diantara realisasi belanja pegawai sebesar Rp796.605.950.209,00 sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi belanja pegawai BLUD sebesar Rp54,028,735.381,00 yang terdiri dari belanja pegawai BLUD Puskesmas sebesar Rp24.023.747.465,00 dan belanja pegawai BLUD Rumah Sakit dr. Darsono sebesar Rp30.004.987.916,00

Terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp27.121.631.187,11 atau sebesar 3,29% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan belanja pegawai yang nilainya signifikan terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut

1) Dinas pendidikan terdapat sisa belanja cukup besar yaitu Rp17.448.700.636,85.

   Sebesar Rp14.596.652.490,00 merupakan sisa dari belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Rp654.125.000,00 sisa dari belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dianggarkan sebesar Rp197.837.312.590,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan SiLPA tahun sebelumnya. Realisasi salur sebesar Rp185.505.013.290,00 dan realisasi belanjanya sebesar Rp183.240.660.100,00 sehingga sisa riil adalah sebesar Rp2.264.353.190,00. Sedangkan belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD dianggarkan sebesar Rp2.937.500.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan SiLPA tahun sebelumnya. Realisasi salur sebesar Rp. 2.531.625.000,00 dan realisasi belanjanya sebesar Rp2.283.375.000,00 sehingga sisa riil adalah sebesar Rp248.250.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang purna tugas di tahun berjalan. pensiun serta belum terbayarkannya. Adapun sisa anggaran sebesar Rp2.197.923.146,85 merupakan penghematan belanja gaji dan tunjangan lainnya.

2) Badan Keuangan Daerah terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp2.146.338.341,00.

   Dari nilai tersebut, sebesar Rp2.045.145.845,00 merupakan insentif pemungutan pajak dan retribusi yang tidak dicairkan karena pegawai bersangkutan memilih TPP prestasi kerja. Sedangkan sisa sebesar Rp101.192.496,00 merupakan penghematan belanja gaji dan tunjangan lainnya.

3) Dinas Kesehatan terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp2.214.495.905,5

   Dari nilai tersebut terdapat sebesar Rp1.139.732.499,78 merupakan sisa dari belanja pegawai BLUD sedangkan Rp. 1.074.763.405,72 merupakan penghematan atas belanja gaji dan tunjangan.

4) Sekretariat Daerah terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp898.919.229,00.

   Dari nilai tersebut terdapat sebesar Rp142.116.400,00merupakan penghematan atas belanja gaji dan tunjangan, Rp161.241.888,00 merupakan penghematan dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan sebesar Rp253.266.600,00 adalah insentif pemungutan pajak dan retribusi ASN yang tidak dicairkan karena sudah mencairkan TPP prestasi kerja.

5) Sekretariat DPRD terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp 843.555.491,00.

   Dari nilai tersebut terdapat sebesar Rp174.339.684,00 merupakan penghematan atas gaji dan tunjangan ASN

sedangakan sebesar Rp669.215.807,00 merupakan penghematan dari gaji dan tunjangan DPRD.

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp473.243.850.181,92 atau sebesar 96,09% dari anggaran sebesar Rp492.477.582.742,11. Terdapat sisa anggaran yang merupakan penghematan belanja sebesar Rp19.233.732.560,19 atau3,91% .

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp24.745.864.706,79 atau 4,97% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Barang	158.179.295.322,43	153.838.983.746,00	97,26	145.748.553.625,14	8.090.430.120,86
2	Belanja Jasa	149.153.612.561,34	142.039.491.205,00	95,23	135.929.888.899,63	6.109.602.305,37
3	Belanja Pemeliharaan	6.782.657.521,95	6.623.323.100,94	97,65	13.465.512.590,99	(6.842.189.490,05)
4	Belanja Perjalanan Dinas	24.812.210.365,00	24.292.802.275,00	97,91	53.894.088.004,00	(29.601.285.729,00)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.806.307.500,00	11.311.258.332,00	95,81	8.021.290.889,00	3.289.967.443,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	00,00	37.149.215.340,00	(37.149.215.340,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	34.687.391.900,00	34.530.508.398,00	99,55	0,00	34.530.508.398,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.196.122.000,00	13.042.430.780,00	91,87	14.395.872.337,00	(1.353.441.557,00)
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.859.985.571,39	87.565.052.344,98	94,30	89.385.293.202,95	(1.820.240.857,97)
Jumlah		**492.477.582.742,11**	**473.243.850.181,92**	**96,09**	**497.989.714.888,71**	**(24.745.864.706,79)**

Diantara realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp473.243.850.181,92 sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp34.530.508.398,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp 13.042.430.780,00 dan dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp87.565.052.344,98 yang terdiri dari belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit dr. Darsono sebesar Rp69.925.513.622,98 dan belanja barang dan jasa BLUD 24 Puskesmas sebesar Rp17.639.538.722,00

Dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp473.243.850.181,92 terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp874.304.974,09 di karenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklaslasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3.**

Terdapat penghematan belanja barang dan jasa sebesar Rp19.233.732.560,19 atau3,91% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan belanja barang dan jasa yang nilainya signifikan terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

1) RSUD dr. Darsono terdapat penghematan sebesar Rp3.669.110.418,64 dikarenakan terdapat Belanja barang habis pakai yang tidak terserap pada kegiatan pembangunan gedung

rawat jalan, kontribusi kelembagaan yang tidak dapat terbayarkan karena kedatangan dokter PPDS yang tidak sesuai jadwal dan efisiensi belanja barang dan jasa pada kegiatan pelayanan penunjang BLUD

2) Dinas Kesehatan terdapat penghematan sebesar Rp 2.555.615.291,87 .

   Terdapat sisa pagu anggaran signifikan pada belanja barang jasa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

   Terdapat sisa anggaran pada beberapa sub kegiatan karena beberapa hal

   a) tidak ada kasus yang memerlukan rujukan persalinan,

   b) capaian pemeriksaan SHK bayi baru lahir tidak memenuhi target dikarenakan sasaran bayi riil tidak mencapai target yang ditentukan,

   c) tambahan peserta premi PBID tidak semua dimulai dari bulan januari 2025, sehingga pembayaran premi tidak utuh 12 bulan,

   d) bulan Januari-Agustus 2025 ada kompensasi pembayaran BPJS dari pengembalian BPJS atas temuan BPK.

3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdapat penghematan sebesar Rp1.574.308.687,4
   a) Terdapat penghematan belanja barang dan jasa dikarenakan pembatalan pengadaan kambing dan domba (P-APBD) serta pengadaan obat hewan pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
   b) Terdapat pengembalian kemahalan harga pengadaan kambing (LHP) pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;
   c) Terdapat sisa alokasi DAK NF untuk BOP Penyuluh Pertanian pada Sub Keg. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian;
   d) Pembatalan pengadaan kandang kambing pada Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
   e) Selain terdapat penghematan belanja barang dan jasa dikarenakan sisa atas pengadaan barang dan jasa pada beberapa sub kegiatan lainnya

4) Dinas Pendidikan terdapat penghematan sebesar Rp1.376.991.497,00.
   a) Penghematan atas belanja jasa tenaga pendidikan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp899.200.000,00 karena adanya penerima insentif yang tidak memenuhi kriteria.
   b) Selain itu ada beberapa Sub kegiatan yang tidak terealisasi secara maksimal dikarenakan perlu adanya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebijakan/prosedur

5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat penghematan sebesar Rp1.018.649.216,00.

   a) Terdapat penghematan yang signifikan atas belanja barang dan jasa atas barang untuk Dijual/Diserahkan kepada

Masyarakat dikarenakan adanya sisa atas pengadaan barang dan jasa

b) Terdapat sisa pagu anggaran belanja jasa pengukuran tanah dikarenakan besaran alokasi anggaran tersebut disusun berdasarkan perhitungan tahun-tahun terdahulu, dan pada tahun 2025, program “Kabupaten Lengkap” di Pacitan telah terlaksana 100% sehingga berdampak pada berkurangnya volume pekerjaan pengukuran konvensional
c) Selain terdapat penghematan belanja barang dan jasa dikarenakan sisa atas pengadaan barang dan jasa pada beberapa sub kegiatan lainnya

6) Sekretariat Daerah terdapat penghematan sebesar Rp891,941,610,66

a) Terdapat penghematan yang signifikan atas belanja barang dan jasa atas Belanja uang yang diberikan kepada masyarakat (penghargaan suatu prestasi) rencananya akan diberikan kepada Hafidz afidhoh tidak jadi diselenggarakan pada Kegiatan Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
b) Penghematan atas pemberian beasiswa yang diprioritaskan untuk anak-anak pacitan berprestasi, dan kurang mampu yang diwadahi melalui jalur kerjasama daerah dengan Perguruan Tinggi pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat (Belanja beasiswa)
c) Penghematan atas Sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian , kehutanan, kelautan dan perikanan (cukai), dimana untuk DBHCHT tidak bisa dialihkan ke program/bidang lainnya di OPD dikarenakan tahapan dan prosedurnya sudah diatur secara ketat mengikuti rencana kegiatan propinsi/pusat
d) Selain itu ada beberapa Sub kegiatan yang tidak realisasi maksimal dikarenakan perlu adanya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebijakan/prosedur

7) Badan Keuangan Daerah terdapat penghematan sebesar Rp645.027.369,41

Terdapat sisa anggaran yang signifikan sebagian besar merupakan belanja rekening Penerangan Jalan Umum pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di karenakan adanya adanya monitoring dan pengawasan oleh dinas perhubungan dan Badan Keuangan Daerah serta adanya progran meterisasi dari taksasasi

8) Inspektorat Kabupaten Pacitan terdapat penghematan Rp615.631.627,00

Terdapat sisa anggaran yang signifikan atas Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berilut:

a) Karena adanya pembubaran SATGAS SABER PUNGLI yang keanggotaanya terdiri atas APIP, Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan Komando distrik Militer. Dasar pembubaran adalah Perpres 49/2025 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perpres Nomor 87 Tahun 2016

tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.Sehingga beberapa rencana tindak kegiatan tidak dilaksanakan

b) Beberapa rencana peningkatan kompetensi SDM APIP dilaksanakan secara daring, karena banyak nya tugas mandatory yang wajib dilaksanakan oleh fungsional pengawasan. Namun standar jam pelatihan sudah terpenuhi,

9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat penghematan belanja barang dan jasa sebesar Rp552.850.796,80 yang merupakan sisa belanja pengadaan barang dan jasa pada beberapa sub kegiatan

Rincian penggunaan anggaran dan realisasi Belanja Barang Dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Belanja Barang dengan anggaran sebesar Rp158.179.295.322,43 terealisasi sebesar Rp153.838.983.746,00 atau 97,26% dengan rincian sebagai tabel dibawah:

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
I	**Belanja Barang Pakai Habis**	**157.980.357.369,43**	**153.642.686.177,00**	**97,25**	**144.947.950.695,14**	**8.694.735.481,86**
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.555.046.406,67	12.424.431.726,00	98,96	15.380.351.982,00	(2.955.920.256,00)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.122.743.064,17	4.105.009.590,00	99,57	3.920.945.036,00	184.064.554,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.640.512.691,88	4.036.902.469,00	86,99	4.501.740.989,50	(464.838.520,50)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	199.974.694,00	188.512.293,00	94,27	270.986.310,00	(82.474.017,00)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	178.518.264,00	136.562.040,00	76,50	301.181.420,00	(164.619.380,00)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	32.871.420,00	28.666.500,00	87,21	30.029.172,00	(1.362.672,00)
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	70.990.508,00	60.975.700,00	85,89	76.621.000,00	(15.645.300,00)
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	19.895.000,00	19.018.500,00	95,59	174.153.840,00	(155.135.340,00)
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.809.020,00	1.726.000,00	61,44	25.028.400,00	(23.302.400,00)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.385.972.283,00	1.362.095.058,00	98,28	1.217.088.220,00	145.006.838,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	262.906.577,04	260.292.891,00	99,01	525.519.900,00	(265.227.009,00)
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	29.559.966,00	29.557.080,00	99,99	67.250.000,00	(37.692.920,00)
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.396.324.935,29	2.326.629.922,00	97,09	2.676.084.627,00	(349.454.705,00)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.361.488.072,88	2.300.597.095,00	97,42	2.772.128.274,00	(471.531.179,00)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.804.317.415,59	5.689.921.848,00	98,03	6.261.772.265,00	(571.850.417,00)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	248.405.002,00	234.386.515,00	94,36	246.931.140,00	(12.544.625,00)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.464.508.321,00	2.402.320.149,00	97,48	2.435.516.212,00	(33.196.063,00)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.465.393.206,00	1.428.309.116,26	97,47	1.587.686.041,00	(159.376.924,74)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	884.280.653,00	876.816.244,00	99,16	1.009.311.863,00	(132.495.619,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.128.091.209,00	2.050.150.906,34	96,34	2.589.213.377,00	(539.062.470,66)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	840.948.584,00	827.199.476,00	98,37	1.088.359.567,00	(261.160.091,00)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.092.767.041,00	1.030.936.424,80	94,34	1.568.450.738,00	(537.514.313,20)
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.313.780.759,91	4.267.102.011,00	98,92	3.204.323.881,00	1.062.778.130,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.479.211.600,00	2.342.271.588,00	94,48	4.477.967.411,00	(2.135.695.823,00)
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	298.371.900,00	287.612.613,00	96,39	32.339.850,00	255.272.763,00
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.134.455.020,00	13.910.968.760,00	98,42	14.924.691.601,00	(1.013.722.841,00)
27	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	71.335.832.468,00	69.317.506.295,60	97,17	49.326.109.987,64	19.991.396.307,96
28	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	164.300.000,00	163.904.000,00	99,76	159.114.200,00	4.789.800,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.474.550.471,00	2.453.841.902,00	99,16	2.645.475.901,00	(191.633.999,00)
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	103.868.662,00	103.060.944,00	99,22	136.401.350,00	(33.340.406,00)
31	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	43.692.000,00	43.484.590,00	99,53	70.587.255,00	(27.102.665,00)
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.979.043.654,00	14.643.199.780,00	97,76	16.783.520.810,00	(2.140.321.030,00)
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.289.040.000,00	1.203.156.550,00	93,34	1.267.768.050,00	(64.611.500,00)
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	195.325.000,00	194.379.000,00	99,52	240.920.150,00	(46.541.150,00)
35	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.350.335.000,00	2.263.802.500,00	96,32	1.886.629.375,00	377.173.125,00
36	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	194.250.000,00	193.997.500,00	99,87	165.260.000,00	28.737.500,00
37	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	306.000.000,00	305.394.300,00	99,80	649.080.000,00	(343.685.700,00)
38	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	00,00	3.885.000,00	(3.885.000,00)
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	00,00	3.330.000,00	(3.330.000,00)
40	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	3.330.000,00	0,00
41	Belanja Pakaian Adat Daerah	98.000.000,00	97.791.000,00	99,79	48.606.900,00	49.184.100,00
42	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	00,00	192.258.600,00	(192.258.600,00)
43	Belanja Pakaian Jas/Safari	25.000.000,00	23.250.000,00	93,00	0,00	23.250.000,00
44	Belanja Barang Sampel Pangan	3.646.500,00	3.615.300,00	99,14	0,00	3.615.300,00
II	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**110.451.500,00**	**110.301.009,00**	**99,86**	**48.949.930,00**	**61.351.079,00**
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	110.451.500,00	110.301.009,00	99,86	47.357.430,00	62.943.579,00
2	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	00,00	1.592.500,00	(1.592.500,00)
III	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**88.486.453,00**	**85.996.560,00**	**97,19**	**751.653.000,00**	**(665.656.440,00)**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	17.648.667,00	17.615.700,00	99,81	0,00	17.615.700,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	00,00	5.328.000,00	(5.328.000,00)
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	70.837.786,00	68.380.860,00	96,53	28.000.000,00	40.380.860,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	00,00	880.000,00	(880.000,00)
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	00,00	717.445.000,00	(717.445.000,00)
Jumlah		**158.179.295.322,43**	**153.838.983.746,00**	**97,26**	**145.748.553.625,14**	**8.090.430.120,86**

Realisasi Belanja Barang tersebut diatas terdapat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp13.910.968.760,00 yang terdapat pada SKPD:

a)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	237.635.200,00
b)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	314.415.125,00
c)	Dinas Kesehatan	Rp	30.636.000,00
d)	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	4.397.067.370,00
e)	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	48.185.000,00
f)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	948.574.920,00
g)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	3.849.614.553,00
h)	Dinas Pendidikan	Rp	40.903.853,00
i)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	289.366.800,00
j)	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	2.249.906.746,00
k)	Dinas Perikanan	Rp	123.462.500,00
l)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	59.052.000,00
m)	Dinas Sosial	Rp	350.774.454,00
n)	Kecamatan Arjosari	Rp	50.149.800,00
o)	Kecamatan Bandar	Rp	49.450.500,00
p)	Kecamatan Donorojo	Rp	10.000.000,00
q)	Kecamatan Pacitan	Rp	21.021.180,00
r)	Kecamatan Sudimoro	Rp	98.978.000,00
s)	Kelurahan Baleharjo	Rp	92.572.400,00
t)	Kelurahan Pacitan	Rp	80.874.299,00

u) Kelurahan Ploso Rp 110.368.460,00
v) Kelurahan Pucangsewu Rp 111.780.400,00
w) Kelurahan Sidoharjo Rp 196.988.000,00
x) Sekretariat Daerah Rp 149.191.200,00

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp69.317.506.295,60 yang terdapat pada SKPD:

a) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp 9.154.040.346,60
b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 2.029.392.136,00
c) Dinas Pendidikan Rp 4.044.995.009,00
d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 210.110.340,00
e) Dinas Perikanan Rp 646.283.826,00
f) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp 53.232.684.638,00

Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-sebesar Rp163.904.000,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dari Realisasi Belanja Barang sebesar Rp153.838.983.746,00 terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp426.858.962,00 di karenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklaslasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3.**

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa dengan anggaran sebesar Rp149.153.612.561,34 terealisasi sebesar Rp142.039.491.205,00 atau 95,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Jasa Kantor	104.702.460.304,96	100.311.929.584,00	95,81	95.455.515.162,00	4.856.414.422,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.204.566.960,00	27.259.073.130,00	93,34	26.512.272.460,63	746.800.669,37
3	Belanja Sewa Tanah	513.500.000,00	511.500.000,00	99,61	400.500.000,00	111.000.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	937.697.150,38	866.685.382,00	92,43	878.728.218,00	(12.042.836,00)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	464.000.000,00	436.739.190,00	94,12	434.944.000,00	1.795.190,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	21.150.000,00	0,00	0,00	4.268.000,00	(4.268.000,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.127.198.675,00	3.881.516.905,00	94,05	4.434.103.212,00	(552.586.307,00)
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.761.150.000,00	2.739.718.014,00	99,22	2.968.963.620,00	(229.245.606,00)
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.717.360.000,00	5.531.581.900,00	96,75	4.210.800.977,00	1.320.780.923,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	265.556.770,00	195.625.000,00	73,67	308.826.500,00	(113.201.500,00)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	438.972.701,00	305.122.100,00	69,51	320.966.750,00	(15.844.650,00)
Jumlah		**149.153.612.561,34**	**142.039.491.205,00**	**95,23**	**135.929.888.899,63**	**6.109.602.305,37**

Dari realisasi belanja jasa sebesar Rp142.039.491.205,00 tersebut terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp196.231.350,00 dikarenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklaslasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp6.782.657.521,95 terealisasi sebesar Rp6.623.323.100,94 atau 97,65 %.

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.257.217.850,00	4.119.382.704,00	96,76	3.783.376.648,00	336.006.056,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.080.839.671,95	1.074.494.527,94	99,41	4.995.171.013,99	(3.920.676.486,05)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.259.110.000,00	1.244.636.419,00	98,85	4.502.354.129,00	(3.257.717.710,00)
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00	34.965.000,00	(24.975.000,00)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	175.500.000,00	174.819.450,00	99,61	149.645.800,00	25.173.650,00
Jumlah		**6.782.657.521,95**	**6.623.323.100,94**	**97,65**	**13.465.512.590,99**	**(6.842.189.490,05)**

Dari realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp6.623.323.100,94 terdapat reklasifikasi belanja pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp251.214.662,09 dikarenakan kesalahan penempatan rekening yang seharusnya masuk katagori Belanja Modal dapat dijelaskan dalam **Lampiran 3.**

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas dengan anggaran sebesar Rp24.812.210.365,00 terealisasi sebesar Rp24.292.802.275,00 atau 97,91%

Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.901.378.265,00	15.710.138.439,00	98,80	34.355.114.243,00	(18.644.975.804,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.376.090.100,00	6.167.501.036,00	96,73	13.611.356.002,00	(7.443.854.966,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.450.664.000,00	2.383.832.800,00	97,27	5.426.115.859,00	(3.042.283.059,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	84.078.000,00	31.330.000,00	37,26	501.501.900,00	(470.171.900,00)
Jumlah		**24.812.210.365,00**	**24.292.802.275,00**	**97,91**	**53.894.088.004,00**	**(29.601.285.729,00)**

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp11.806.307.500,00 terealisasi Rp11.311.258.332,00 atau 95,81%.

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
I	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**10.804.435.000,00**	**10.362.293.000,00**	**95,91**	**7.345.323.500,00**	**3.016.969.500,00**
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.000.985.000,00	999.193.000,00	99,82	446.173.500,00	553.019.500,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	210.450.000,00	34.200.000,00	16,25	47.850.000,00	(13.650.000,00)
3	Belanja Beasiswa	569.000.000,00	471.100.000,00	82,79	96.000.000,00	375.100.000,00
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.024.000.000,00	8.857.800.000,00	98,16	6.755.300.000,00	2.102.500.000,00
II	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.001.872.500,00**	**948.965.332,00**	**94,72**	**675.967.389,00**	**272.997.943,00**
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	632.872.500,00	582.665.332,00	92,07	675.967.389,00	(93.302.057,00)
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	369.000.000,00	366.300.000,00	99,27	0,00	366.300.000,00
		11.806.307.500,00	**11.311.258.332,00**	**95,81**	**8.021.290.889,00**	**3.289.967.443,00**

(1). Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp10.362.293.000,00 adalah sebagai berikut:

Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp999.193.000,00 yang terdapat pada SKPD:

a) Dinas Kesehatan 7.500.000,00
b) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 43.000.000,00
c) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 809.930.000,00
d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.500.000,00
e) Dinas Pendidikan 34.763.000,00
f) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.400.000,00
g) Dinas Perikanan 5.200.000,00
h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20.900.000,00
i) Inspektorat Daerah 15.000.000,00
j) Kelurahan Baleharjo 18.000.000,00
k) Kelurahan Ploso 6.000.000,00
l) Kelurahan Pucangsewu 12.000.000,00
m) Kelurahan Sidoharjo 13.000.000,00

Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp34.200.000,00 yang terdapat pada SKPD:

a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.000.000,00
b) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.000.000,00
c) Kecamatan Donorojo 7.900.000,00
d) Kecamatan Pacitan 11.650.000,00
e) Kecamatan Punung 5.650.000,00

Belanja Beasiswa sebesar Rp471.100.000,00 yang

terdapat pada Sekretariat Daerah.

Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp 8.857.800.000,00 adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa yang ditangani oleh SKPD Dinas Sosial yang terdapat pada Sub Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga .

(2). Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp948.965.332,00 adalah sebagai berikut:

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp 582.665.332,00 yang ditangani oleh SKPD :

a) Dinas Perhubungan 522.412.200,00
b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 60.253.132,00

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp366.300.000,00 yang ditangani oleh SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

6) Belanja Barang dan Jasa BOS
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp37.149.215.340,00 atau 100% dari Tahun 2024 dikarenakan reklas ke Belanja Barang dan Jasa BOSP menyesuaikan ketentuan Bagan Akun Standar
7) Belanja Barang dan Jasa BOSP
Belanja Barang dan Jasa BOSP dengan anggaran sebesar Rp34.687.391.900,00 terealisasi sebesar Rp34.530.508.398,00 atau 99,55% terjadi kenaikan sebesar Rp34.530.508.398,00 atau 100% dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan ketentuan Bagan Akun Standar reklas dari Belanja Barang dan Jasa BOS
8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa BOK untuk 24 Puskesmas Sebesar 13.042.430.780,00 dari anggaran sebesar 14.196.122.000,00 atau sebesar 91,87% dari anggaran yang telah ditetapkan.
9) Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp92.859.985.571,39 terealisasi sebesar Rp87.565.052.344,98 atau 94,30% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. Darsono Dengan Anggaran sebesar Rp73.488.166.041,62 dan terlealisasi sebesar Rp. 69.925.513.622,98 atau 95,15% pagu yang ditetapkan.
   b) Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk 24 UPT Puskesmas sebesar Rp17.639.538.722 dari anggaran sebesar

Rp19.371.819.529,77 atau sebesar 91,05% dari pagu yang ditetapkan

2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp31.638.939.880,00 atau sebesar 96,12% dari anggaran sebesar Rp 32.916.067.355,00. Terdapat penghematan belanja hibah sebesar Rp1.277.127.475,00 atau sebesar 3,88% dari target yang telah ditetapkan

Realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp40.688.890.980,00 atau 56,26% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan penerima hibah.

Adapun rincian dari masing masing belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	34.805.000.000,00	(33.805.000.000,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.958.400.000,00	14.228.901.400,00	95,12	20.427.724.498,00	(6.198.823.098,00)
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.164.700.000,00	4.162.008.725,00	99,94	4.304.693.067,00	(142.684.342,00)
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.620.767.355,00	1.101.984.255,00	67,99	1.047.839.295,00	54.144.960,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	11.172.200.000,00	11.146.045.500,00	99,77	11.742.574.000,00	(596.528.500,00)
Jumlah		**32.916.067.355,00**	**31.638.939.880,00**	**96,12**	**72.327.830.860,00**	**(40.688.890.980,00)**

1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.000.000.000,00 terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik , yang terdiri dari:

   Pencairan Dana Hibah Polres Pacitan Tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00, untuk Dukungan Operasional Kegiatan Kepolisian.

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp14.228.901.400,00 atau 95,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.958.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.413.400.000,00	7.404.400.000,00	99,88	12.207.804.498,00	(4.803.404.498,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.335.000.000,00	5.315.000.000,00	99,63	6.839.920.000,00	(1.524.920.000,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.210.000.000,00	1.509.501.400,00	68,30	1.380.000.000,00	129.501.400,00
Jumlah		**14.958.400.000,00**	**14.228.901.400,00**	**95,12**	**20.427.724.498,00**	**(6.198.823.098,00)**

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp7.404.400.000,00 ditangani oleh SKPD:

a) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian

Belanja Hibah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan hibah kepada DEKOPIN / Dewan Koperasi Indonesia Daerah Pacitan dengan tujuan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola koperasi dan pemahaman perkoperasian pada gerakan koperasi di Kabupaten Pacitan.

b) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Belanja Hibah sebesar Rp1.850.000.000,00 yang terdiri dari hibah untuk pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi (KONI PACITAN) sebesar Rp.1.500.000.000,00 serta hibah untuk Kwartir Cabang Pacitan sebesar Rp. 350.000.000,00

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja Hibah sebesar Rp5.036.400.000,00 merupakan hibah kepada 13 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) desa penerima DAK Sanitasi Tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Pucangombo Kec. Tegalombo (DAK)	375.000.000,00
2.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Kledung Kec. Bandar (DAK)	375.000.000,00
3.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Wonosidi Kec. Tulakan (DAK)	375.000.000,00
4.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari (DAK)	375.000.000,00
5.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Karangrejo Kec. Arjosari (DAK)	375.000.000,00
6.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Kemuning Kec. Tegalombo (DAK)	375.000.000,00
7.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Ketanggung Kec. Sudimoro (DAK)	375.000.000,00
8.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Mujing Kec. Nawangan (DAK)	375.000.000,00

9.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Ketro Kec. Tulakan (DAK)	375.000.000,00
10.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Mantren Kec. Kebonagung (DAK)	375.000.000,00
11.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Pagerejo Kec. Ngadirojo (DAK)	375.000.000,00
12.	Peningkatan TPS3R Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan	455.700.000,00
13.	Pembangunan TPS3R Kel. Ploso Kec. Pacitan	455.700.000,00

d) Dinas Pendidikan

Belanja Hibah sebesar Rp398.000.000,00 merupakan Hibah Uang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tingkat Wustha dan SMP Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2025

e) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

Belanja Hibah sebesar Rp 50.000.000,00 merupakan hibah kepada Kadin yang dipergunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan KADIN (Kamar Dagang dan Industri)

f) Dinas Perikanan

Belanja Hibah sebesar Rp 50.000.000,00 merupakan hibah yang diberikan kepada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Pacitan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.315.000.000,00 ditangani oleh SKPD:

a) Dinas Pendidikan

Belanja Hibah sebesar Rp4.855.000.000,00 merupakan :

1. Hibah Uang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tingkat ULA, SD dan MI Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebesar Rp. 3.357.000.000,00
2. Hibah Uang Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Insentif Honorarium Kinerja Guru Non PNS dan Insentif Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS Tahun 2025 sebesar 316.000.000,00
3. Hibah Uang Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Edukatif RA GUPPI POKO - RT 01 RW 07

Dusun Kayat, Desa Poko, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 20.000.000,00

4. Hibah Uang Pekerjaan Bantuan Operasional Kelembagaan PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) KABUPATEN PACITAN, Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Plosos, Kecamatan Pacitan sebesar Rp. 15.000.000,00
5. Hibah Uang Pekerjaan Bantuan Operasional Kelembagaan DEWAN PENDIDIKAN, Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan sebesar Rp. 15.000.000,00
6. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Area Bermain TK BERINGIN SAKTI - RT 03 RW 01 Dusun Krajan, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 49.000.000,00
7. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Sarana, Prasana dan Utilitas PONDOK PESANTREN BABUSSALAM - RT 03 RW 05 Dusun Glagahombo, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 25.000.000,00
8. Hibah Uang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru MI MUHAMMADIYAH KLUWIH I, RT 01 RW 04 Dusun Dasri, Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan seebesar Rp. 50.000.000,00
9. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MI MUHAMMADIYAH PADI II, RT 04 RW 06 Dusun Klesem, Desa Padi, Kecamatan Tulakan sebesar Rp. 100.000.000,00
10. Hibah Uang Pekerjaan Pengadaan Komputer/Laptop MI MUHAMMADIYAH KALIKUNING 1, RT 01 RW 11 Dusun Sono, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan sebesar Rp. 25.000.000,00
11. Hibah Uang Untuk Biaya Operasional dan Kegiatan HIMPAUDI KABUPATEN PACITAN Tahun 2025 sebesar Rp. 15.000.000,00
12. Hibah Uang Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas Baru PAUD/RA/BA RA GUPPI NGADIREJAN - Dusun Sumber RT 01 RW 11, Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan seebsar Rp. 60.000.000,00
13. Hibah Uang Pekerjaan Pengadaan Mebelair MI GUPPI SUDIMORO 3, RT 04 RW 10 Dusun Rejomulyo, Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro sebesar Rp. 25.000.000,00
14. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Pagar MIM PLUMBUNGAN RT 01 RW 01 Dusun Gebang,

Desa Plumbungan, Kecamatan Kebonangung sebesar Rp. 45.000.000,00

15. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MI MUHAMMADIYAH JERUK, RT 02 RW 11 Dusun Nalangan, Desa Jeruk, Kecamatan Bandar sebesar Rp. 98.000.000,00
16. Hibah Uang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTs MA'ARIF CIPTA INSAN MULIA Sekar Donorojo sebesar Rp. 100.000.000,00
17. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs MA'ARIF AL HIDAYAH KETRO Tulakan sebesar Rp. 100.000.000,00
18. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Paving MTs MA'ARIF 01 TULAKAN seebsar Rp. 70.000.000,00
19. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Aula MTs MA'ARIF 16 NGELO JETAK Tulakan sebesar Rp. 90.000.000,00
20. Hibah Uang Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs MA'ARIF 13 NAWANGAN sebesar Rp. 100.000.000,00
21. Hibah Uang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesenian MTs MA'ARIF 11 TOKAWI NAWANGAN sebesar Rp. 60.000.000,00
22. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Muhammadiyah 04 Gembuk, Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung sebesar Rp. 70.000.000,00
23. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Pagar/Paving MI Muhammadiyah Bandar I, RT 1 RW 5 Dusun Tratas, Desa Bandar, Kecamatan Bandar sebesar Rp. 50.000.000,00

b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Belanja hibah sebesar Rp100.000.000,00 merupakan belanja hibah kepada PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) Kabupaten Pacitan yang diperuntukkan sebagai dana operasional PWRI tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 100.3.3.2/271/KPTS/408.12/2025 tentang Penerima dan Besaran Hibah Uang Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suamber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025.

c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Hibah sebesar Rp. 85.000.000,00 merupakan Belanja Hibah DHC 45 (Dewan Harian Cabang) sebesar Rp 30.000.000,- Hibah PP Polri sebesar Rp

30.000.000,- dan Hibah PEPABRI sebesar Rp 25.000.000,-

d) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Belanja Hibah sebesar Rp75.000.000,00 merupakan Belanja Hibah kepada HKTI (Biaya Operasional Kelembagaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) sebesar Rp. 50.000.000,00; dan Hibah kepada KTNA (Biaya Operasional Kelembagaan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan) sebesar Rp. 25.000.000,00.

e) Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Belanja Hibah sebesar Rp200.000.000,00 merupakan Belanja Hibah dengan rincian Rp150.000.000 guna pembelian Genset LKP Seni Pradapa Loka Bhakti (Ds. Pelem, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan) serta Rp50.000.000 guna bantuan operasional kegiatan Dewan Kesenian Pacitan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.509.501.400,00 ditangani oleh SKPD :

a. Dinas Kesehatan

Belanja Hibah sebesar Rp 249.501.400,00 merupakan hibah kepada PMI (Palang Merah Indonesia).

b. Dinas Sosial

Belanja Hibah sebesar Rp150.000.000,00 merupakan hibah kepada Karang Taruna.

c. Sekretariat Daerah

Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp1.110.000.000,00 Merupakan hibah kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, lembaga/organisasi keagamaan (Organisasi Masyarakat Islam)

4) Belanja Hibah Dana BOS senilai Rp4.162.008.725,00 merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.620.767.355,00 terealisasi sebesar Rp1.101.984.255,00 atau 67,99%. Pelaksanaan pemberian Hibah diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD. Jumlah bantuan dana hibah menyesuaikan perolehan suara pada pemilihan umum Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 100.3.3.2/142/KPTS/408.12/2025 tentang Penerima dan Besaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Jumlah Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	157.288.332	109.920.780,00	5
2	PARTAI GERINDRA	96.351.469	57.420.540,00	1
3	PDI PERJUANGAN	491.700.422	140.640.705,00	6
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	187.396.580	174.341.565,00	7
5	PARTAI NASDEM	121.802.704	47.838.735,00	2
6	P. KEADILAN SEJAHTERA	292.813.498	61.126.740,00	2
7	P. PERSATUAN PEMBANGUNAN	89.594.234	35.045.955,00	2
8	PARTAI HANURA	114.908.499	52.490.655,00	2
9	PARTAI DEMOKRAT	68.911.617	423.158.580,00	18
Jumlah		**1.620.767.355**	**1.101.984.255,00**	**45**

6) Belanja Hibah Dana BOSP senilai Rp11.146.045.500,00 merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh :

a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp9.359.045.500,00

b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp1.787.000.000,00

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun 2025 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp779.800.000,00 atau 97,12% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp802.900.000,00.

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu baik berupa uang maupun barang pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp117.300.000,00 atau 83,55% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada individu yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp662.500.000,00 atau 100% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada Keluarga yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	Rincian Penerima
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	140.400.000,00	117.300.000,00	**Dinas Sosial** Bantuan sosial pangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah KabKota terealisasi sebesar Rp117,300,000 dengan sasaran warga miskin Kabupaten Pacitan yang belum tersentuh bantuan apapun.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	Rincian Penerima
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	662.500.000,00	662.500.000,00	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga sebesar Rp87.500.000,00 Belanja Bantuan Sosial Uang pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp157.500.000,00 Belanja Bantuan Sosial Uang pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp417.500.000,00
Jumlah		802.900.000,00	779.800.000,00	

2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2025 adalah sebesar Rp111.138.941.916,65, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp93.141.854.040,08 atau sebesar 83,81% Penghematan belanja modal sebesar Rp17.997.087.876,57 atau 16,19% yang merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2024, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp114.989.015.963,06 atau 55,25% menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2025.

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah	3.947.060.000,00	3.933.608.350,00	99,66	5.432.512.630,00	(1.498.904.280,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.380.865.616,35	26.626.928.884,20	84,85	36.441.967.327,00	(9.815.038.442,80)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.186.176.916,85	29.602.423.738,88	89,20	67.506.867.862,99	(37.904.444.124,11)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.725.342.713,45	27.094.777.231,00	73,78	93.163.507.371,15	(66.068.730.140,15)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.368.996.670,00	5.359.748.936,00	99,83	5.270.224.312,00	89.524.624,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	530.500.000,00	524.366.900,00	98,84	315.790.500,00	208.576.400,00
Jumlah		**111.138.941.916,65**	**93.141.854.040,08**	**83,81**	**208.130.870.003,14**	**(114.989.015.963,06)**

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp93.141.854.040,08 yang dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp91.931.885.385,19 atau 98,70% dan yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya administrasi/biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar Rp1.209.968.654,89 atau 01,30%. Terdapat pada Lampiran 17.

Diantara realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas terdapat:

1) Realisasi Belanja Modal BOSP sebesar Rp9.108.939.987,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Mesin BOSP senilai Rp4.340.195.081,00 dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS sebesar Rp4.768.744.906,00

2) Realisasi Belanja Modal BLUD sebesar Rp7.666.863.769,88 yang terdiri :

a) Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD sebesar Rp4.965.047.534,00 dengan rincian Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD Puskesmas sebesar Rp 3.411.535.110,00 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD (RSUD) sebesar Rp 1.553.512.424,00

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp2.350.569.922,88 dengan rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas sebesar Rp 194.310.487,88 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD (RSUD) sebesar Rp 2.156.259.435,00

c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp351.246.313,00. merupakan realisasi BLUD RSUD

2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah pada Tahun 2025 sebesar Rp3.933.608.350,00 atau 99,66% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.947.060.000,00.

Terdapat penghematan belanja modal tanah sebesar Rp13.451.650,00 atau sebesar 0,34% dari target yang telah ditetapkan. Sisa belanja tersebut terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Hal ini disebabkan karena efisiensi kontrak pekerjaan.

Realisasi belanja modal tanah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.498.904.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah Persil	300.000.000,00	287.617.550,00	95,87	3.427.474.350,00	(3.139.856.800,00)
2	Belanja Modal Lapangan	3.647.060.000,00	3.645.990.800,00	99,97	2.005.038.280,00	1.640.952.520,00
Jumlah		**3.947.060.000,00**	**3.933.608.350,00**	**99,66**	**5.432.512.630,00**	**(1.498.904.280,00)**

Dari realisasi Belanja Modal pengadaan tanah Tahun 2025 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap adalah sebesar Rp3.933.608.350,00 atau 100%.

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp26.626.928.884,20 atau 84,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.380.865.616,35

Terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 4.753.936.732,15 atau sebesar 15,15% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang nilainya signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Inspektorat Kabupaten Pacitan terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3.071.413.431,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
   a) Penghematan nilai pada pengadaan 1 unit kendaraan eselon II dan 1 unit kendaraan operasional

b) Adanya pengurangan jumlah pengadaan kendaraan operasioanl dinas dari jumlah yang direncanakan
c) Adanya penundaan pengadaan sarana dan prasarana gedung, karena gedung baru dilakukan serah terima pada tanggal 29 Desember 2025

2) Dinas Kesehatan terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp549.745.670,00
Penghematan belanja tersebut dikarenakan efisiensi kontrak pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

3) RSUD dr. Darsono terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp390.071.288,00
Penghematan belanja tersebut dikarenakan efisiensi kontrak pekerjaan. Efisiensi terbesar terdapat pada pengadaan belanja modal peralatan mesin BLUD.
Adapun rincian anggaran dan realisasi dirincian sebagai berikut:

Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Alat Besar	142.495.400,00	140.500.470,00	98,60	1.578.802.603,00	(1.438.302.133,00)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.206.444.364,00	1.448.673.497,00	34,44	5.525.582.000,00	(4.076.908.503,00)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	254.414.600,00	242.059.240,00	95,14	145.736.251,00	96.322.989,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	84.517.446,00	71.869.172,00	85,03	291.672.330,00	(219.803.158,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.793.884.012,60	4.448.987.972,00	92,81	8.053.552.251,00	(3.604.564.279,00)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	731.291.628,00	659.283.200,00	90,15	1.203.785.518,00	(544.502.318,00)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.718.098.103,00	4.282.042.258,00	90,76	1.652.397.797,00	2.629.644.461,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.129.613.798,90	2.942.345.239,00	94,02	2.900.387.800,00	41.957.439,00
9	Belanja Modal Komputer	2.864.127.293,00	2.758.040.528,00	96,30	3.874.771.865,00	(1.116.731.337,00)
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	85.750.000,00	85.700.000,00	99,94	31.000.000,00	54.700.000,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	65.250.000,00	65.181.420,00	99,89	421.511.000,00	(356.329.580,00)
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	183.213.000,00	177.003.273,20	96,61	146.451.650,00	30.551.623,20
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	4.372.718.838,00	(4.372.718.838,00)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.342.811.430,00	4.340.195.081,00	99,94	0,00	4.340.195.081,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.778.954.540,85	4.965.047.534,00	85,92	6.243.597.424,00	(1.278.549.890,00)
Jumlah		**31.380.865.616,35**	**26.626.928.884,20**	**84,85**	**36.441.967.327,00**	**(9.815.038.442,80)**

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.626.928.884,20. yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp25.926.244.213,69 atau 97,37%, sedangkan yang tidak dikapitalisasi masuk sebagai extracomtable dan pemeliharaan(barang perlengkapan dan/biaya administrasi dan /biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung menjadi aset) sebesar Rp700.684.670,51 atau 2,63%.

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp29.602.423.738,88 atau sebesar 89,20% dari anggaran

yang telah ditetapkan sebesar Rp33.186.176.916,85. Terdapat penghematan belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.583.753.177,97 atau sebesar 10,80% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang nilainya signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) RSUD dr. Darsono terdapat penghematan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 1.838.602.315,00
   Penghematan belanja tersebut dikarenakan efisiensi kontrak pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan dan pembangunan gedung dan bangunan BLUD.
2) Dinas Kesehatan terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp997.191.609,00
   Penghematan belanja tersebut dikarenakan adanya beberapa sisa kontrak dan ada putus kontrak dalam Pembangunan talud Puskesmas Nawangan karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia
3) Inspektorat Kabupaten Pacitan terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 561.569.913,00 dikarena adanya penghematan pada jasa perencanaan , Jasa pengawasan dan nilai fisik. Pada nilai fisik Pemenang tender menawar 20 % dari nilai HPS yang ditenderkan.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	29.612.761.256,85	27.116.377.767,00	91,57	59.026.771.329,12	(31.910.393.562,12)
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	00,00	148.846.000,00	(148.846.000,00)
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	137.975.660,00	135.476.049,00	98,19	800.504.009,00	(665.027.960,00)
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.435.440.000,00	2.350.569.922,88	68,42	7.530.746.524,87	(5.180.176.601,99)
Jumlah		**33.186.176.916,85**	**29.602.423.738,88**	**89,20**	**67.506.867.862,99**	(37.904.444.124,11)

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp29.602.423.738,88 yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp29.094.103.096,50 atau 98,28% sedangkan realisasi sebesar Rp 508.320.642,38 atau 1,72 % di nonkapitalisasi.

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp27.094.777.231,00 atau sebesar 73,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.725.342.713,45. Terdapat penghematan belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp9.630.565.482,45 atau sebesar 26,22% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang nilainya signifikan berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 9.491.591.653,45 dikarenakan Alokasi anggaran di Direktorat Jendral sanitasi untuk rencana pembangunan (IPLT) sebesar 9.159.440.406,38 milyar dibatalkan, terutama yang besumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penghematan lainnya merupakan sisa kontrak pekerjaan.

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**23.860.451.770,07**	**23.489.466.239,00**	**98,45**	**82.501.361.455,00**	**(59.011.895.216,00)**
	Belanja Modal Jalan	23.013.185.768,80	22.645.801.449,00	98,40	73.346.083.215,00	(50.700.281.766,00)
	Belanja Modal Jembatan	847.266.001,27	843.664.790,00	99,57	9.155.278.240,00	(8.311.613.450,00)
2	**Belanja Modal Bangunan Air**	**11.784.954.743,38**	**2.625.264.701,00**	**22,28**	**6.324.590.802,00**	**(3.699.326.101,00)**
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	651.051.422,38	645.893.559,00	99,21	1.967.964.956,00	(1.322.071.397,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	844.454.801,00	833.540.101,00	98,71	1.019.108.339,00	(185.568.238,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	54.760.000,00	53.648.700,00	97,97	35.176.900,00	18.471.800,00
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	972.507.520,00	961.164.827,00	98,83	3.184.481.500,00	(2.223.316.673,00)
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	14.300.000,00	14.050.364,00	98,25	25.339.107,00	(11.288.743,00)
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.247.881.000,00	116.967.150,00	1,26	92.520.000,00	24.447.150,00
3	**Belanja Modal Instalasi**	**634.936.200,00**	**628.799.978,00**	**99,03**	**447.190.977,15**	**181.609.000,85**
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	634.936.200,00	628.799.978,00	99,03	447.190.977,15	181.609.000,85
4	**Belanja Modal Jaringan**	**0,00**	**0,00**	**-**	**102.668.177,00**	(102.668.177,00)
	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	99.726.677,00	(99.726.677,00)
	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	2.941.500,00	(2.941.500,00)
5	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**445.000.000,00**	**351.246.313,00**	**78,93**	**3.787.695.960,00**	**(3.436.449.647,00)**
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	445.000.000,00	351.246.313,00	78,93	3.787.695.960,00	(3.436.449.647,00)
	Jumlah	**36.725.342.713,45**	**27.094.777.231,00**	**73,78**	**93.163.507.371,15**	(66.068.730.140,15)

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp27.094.777.231,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp27.094.777.231,00 atau 100%.

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5.359.748.936,00 atau 99,837% dari target anggaran sebesar Rp5.368.996.670,00. Terdapat penghematan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp9.247.734,00 atau sebesar 0,17% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematana Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terbesar terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Sekretariat Daerah.. Hal ini merupakan sisa efisiensi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Adapun rincian dari anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.000.000,00	14.500.000,00	96,67	825.228.880,00	(810.728.880,00)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	579.800.000,00	576.504.030,00	99,43	448.501.000,00	128.003.030,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	98.880.000,00	(98.880.000,00)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.897.614.432,00	(3.897.614.432,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.774.196.670,00	4.768.744.906,00	99,89	0,00	4.768.744.906,00
Jumlah		**5.368.996.670,00**	**5.359.748.936,00**	**99,83**	**5.270.224.312,00**	**89.524.624,00**

Dari realisasi belanja modal pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap Rp5.358.785.594,00 atau 100% sedangkan realisasi sebesar Rp963.342,00 atau 0,02% dinonkapitalisasi.

2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset lainnya pada Tahun 2025 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software terealisasi sebesar Rp524.366.900,00 atau 98,84% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp530.500.000,00. Terdapat penghematan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp6.133.100,00 atau sebesar 1,16% dari target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp524.366.900,00 yang diakui sebagai penambahan aset lainnya sebesar Rp524.366.900,00 atau 100%.

Penghematana Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp6.133.100,00 terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan merupakan sisa kontrak

2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.991.831.374,00 atau 68,19% dari anggaran sebesar Rp8.786.749.647,00. Dari realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp Rp5.991.831.374,00 yang direalisasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan untuk penanganan darurat akibat bencana sebesar Rp3.418.420.661,00 dan yang merupakan bantuan sosial tidak direncanakan diajukan oleh SKPD penanggung jawab sebesar Rp 2.573.410.713,00

Pada Tahun 2025 terdapat penghematan belanja tidak terduga sebesar Rp2.794.918.273,00 atau sebesar 31,81% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sifat dari belanja tidak terduga adalah antisipatif, artinya belanja ini dianggarkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diduga. Salah satunya disiapkan untuk penanganan darurat bencana, dengan mengacu pada kejadian bencana tahun-tahun sebelumnya.

Untuk rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2025 untuk penanganan darurat akibat bencana dapat dijelaskan sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 62 Rincian Belanja Tidak Terduga

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2025	Realisasi
1	**DINAS PUPR DAN DINAS PENDIDIKAN**	
A	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat Infrastruktur Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/182/KPTS/408.12/2025**	**1.107.735.000,00**
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Pembersihan Material Longsor di 9 Lokasi Wilayah Kabupaten Pacitan Jl Gondang-Nawangan, Jl Jatimalang-Karanggede, Jl Mblarak Desa Mujing, Jl Nawangan-Petungsinarang, dll Tahun 2025	85.000.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Jatimalang-Karanggede Dusun Trobokal Desa Karangrejo Kec. Arjosari Kab. Pacitan Tahun 2025	69.750.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Kebondalem-Bandar RT 04 Desa Ngunut Kec. Bandar Kab. Pacitan Tahun 2025	118.800.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jembatan Tamanasri Desa Jetis Lor Kec. Nawangan Kab. Pacitan Tahun 2025	217.200.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Saluran Air RT 02 RW 03 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kab. Pacitan Tahun 2025	10.000.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Sayap Bendung Irigasi Desa Kembang Kec./Kab Pacitan Tahun 2025	234.405.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Talud Pengaman SD Sobo Pringkuku Kec. Pringkuku Kab. Pacitan Tahun 2025	81.200.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Talud Pengaman SDN 4 Petungsinarang Kec. Bandar Kab. Pacitan Tahun 2025	104.630.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Talud Pengaman SDN 3 Gondang Kec. Nawangan Kab. Pacitan Tahun 2025	186.750.000,00
B	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat Infrastruktur Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/361/KPTS/408.12/2025**	**458.609.002,00**
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Ngadirojo - Wonokarto Desa Tanjung Lor Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan Tahun 2025	174.659.796,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Dusun Gedangan Desa Ketroharjo Kec. Tulakan Kab. Pacitan Tahun 2025	124.469.206,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Sarana Prasarana Sekolah SDN 3 Bomo Kec. Punung Kab. Pacitan Tahun 2025	99.980.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Sarana Prasarana Sekolah SDN Wareng Kec. Punung Kab. Pacitan Tahun 2025	59.500.000,00
2	**DINAS PUPR, DINAS PENDIDIKAN DAN BPBD**	
A	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat kerusakan Infrastruktur Tidak Direncanakan Akibat Bencana Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/679/KPTS/408.12/2025**	**712.121.965,00**
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Saluran Jl Letjend Suprapto Kel.Sidoharjo Kecamatan Pacitan	32.657.938,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Sungai Talang Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo	38.216.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jaringan Irigasi Gombong Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo	35.835.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Sirnoboyo-Plumbungan Kecamatan Pacitan	208.113.465,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Sukorejo-Klepu Kecamatan Sudimoro	72.674.302,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Klesem-Pantai Kaliuluh Kecamatan Kebonagung	162.989.260,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Kerusakan Sarana Prasarana Sekolah SDN 4 Wonosidi Kec. Tulakan	65.000.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Pembersihan Longsoran Jl Jetislor-Ngromo,Penanganan Darurat Jalan Pembersihan Longsoran Jl Nawangan-Pagergunung dan Penanganan Hidrometeorologi 2025 Kab. Pacitan	97.756.000,00
	- **Pengembalian Kelebihan Penyerapan Bantuan Tidak Terduga (BTT) dari BPBD Kab. Pacitan**	**(1.120.000,00)**
3	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	
A	**Penerima dan Besaran Bantuan Sosial tidak direncanakan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/342/KPTS/408.12/2025**	**425.000.000,00**
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Dana Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Pacitan Tahun 2025	425.000.000,00
4	**PENGEMBALIAN BK PROVINSI**	

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2025	Realisasi
A	**Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Pengembalian atas sisa Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/606/KPTS/408.12/2025**	**710.424.694,00**
B	**Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Kekurangan Pengembalian atas sisa Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/761/KPTS/408.12/2025**	**4.530.000,00**
Jumlah		**3.418.420.661,00**

Tabel 63 Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

(dalam Rupiah)

NO	Uraian penerima	Realisasi
1	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/Pasung	744.164.400,00
2	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Kesehatan	1.732.603.419,00
3	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan PPKS	96.642.894,00
	Jumlah	2.573.410.713,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp5.991.831.374,00, realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.387.241.280,00 terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2025 yaitu sebesar Rp395.409.906,00 atau 6,19% dikarenakan menyesuaikan kondisi darurat dan mendesak.

Dari realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp5.991.831.374,00 terdapat reklasifikasi belanja belanja tidak terduga ke Aset Tetap sebesar Rp1.375.300.761,00 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 3**

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3. Transfer	**278.473.352.177,00**	**266.609.707.739,00**	**281.914.102.191,00**

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp266.609.707.739,00 atau sebesar 95,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp278.473.352.177,00

Terdapat penghematan belanja transfer sebesar Rp11.863.644.438,00 atau sebesar 4,26% dari target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Terdapat sisa belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp591.167.778,00 dan Bagi hasil Retribusi sebesar Rp0,00
2) Tidak terdapat sisa atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 tahun 2024 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
3) Terdapat sisa atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp417.691.800,00 yang terdiri dari sisa insentif modin sebesar Rp. 7.200.000,00, insentif RT/RW sebesar Rp. 30.600.000,00 dan Siltap sebesar Rp. 379.891.800,00
4) Terdapat sisa atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp10.854.784.860,00. Sisa tersebut tidak terdapat di RKUD karena dana desa disalurkan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan langsung ke rekening desa melalui KPPN.

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 sebesar Rp266.609.707.739, Tahun 2024 sebesar Rp281.914.102.191,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.304.394.452,00 atau sebesar 5,43% dari realisasi Tahun 2024. Selisih tersebut berupa kenaikan bagi hasil pajak sebesar

Rp1.911.782.461,00, penurunan bagi hasil retribusi sebesar Rp249.278.761,00 dan penurunan bantuan keuangan sebesar Rp16.966.898.152,00

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.594.007.252,00	7.002.839.474,00	92,22	5.091.057.013,00	1.911.782.461,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.764.463.625,00	1.764.463.625,00	100	2.013.742.386,00	(249.278.761,00)
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	269.114.881.300,00	257.842.404.640,00	95,81	274.809.302.792,00	(16.966.898.152,00)
Jumlah		**278.473.352.177,00**	**266.609.707.739,00**	**95,74**	**281.914.102.191,00**	**(15.304.394.452,00)**

3.1 Belanja Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp7.002.839.474,00 atau sebesar 92,22% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.911.782.461,00 atau sebesar 37,55% dari realisasi Tahun 2024.

Penghitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa. Adapun Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam **Lampiran 4.**

Adapun rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per objek pajak untuk masing-masing kecamatan TA 2025 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 65 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2025
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	501.109.107,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	555.938.879,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	553.865.123,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	829.898.267,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	757.640.325,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	670.228.187,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	400.542.346,00
9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	341.882.399,00
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	469.501.666,00
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	707.814.962,00
12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	717.761.955,00
13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	496.656.258,00
Jumlah		**7.002.839.474,00**

3.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.764.463.625,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp249.278.761,00 atau sebesar 12,38% dari realisasi Tahun 2024.

Penghitungan dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa per rincian obyek retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran 5.

Adapun rincian bagi hasil retribusi di masing-masing kecamatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 66 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	227.487.201,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	176.466.118,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	210.255.998,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	182.240.020,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	159.012.621,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	174.171.712,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	81.769.546,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	69.965.823,00
9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	92.059.913,00
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	147.406.033,00
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	159.937.813,00
12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	83.690.827,00
Jumlah		**1.764.463.625**

3.3 Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp257.842.404.640,00 atau sebesar 95,81% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp16.966.898.152,00 atau sebesar 6,17% dari realisasi Tahun 2024.

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	14.768.583.000,00	14.350.891.200,00	97,17	10.953.150.492,00	3.397.740.708,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	164.996.136.000,00	154.141.351.140,00	93,42	174.505.990.000,00	(20.364.638.860,00)
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	89.350.162.300,00	89.350.162.300,00	100,00	89.350.162.300,00	0,00
Jumlah		**269.114.881.300,00**	**257.842.404.640,00**	**95,81**	**274.809.302.792,00**	(16.966.898.152,00)

3.3.1 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp14.350.891.200,00 atau 97,17% dari pagu anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 100.3.3.2/752/KPTS/408.12/2025 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/1/KPTS/408.12/2025 Tentang Penerima dan Besaran Serta Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

Adapun peruntukan dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Realisasi penggunaan untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) di Pemerintah Desa sebesar Rp722.591.200,00
2) Realisasi penggunaan untuk Insentif Modin sebesar Rp193.200.000,00
3) Realisasi penggunaan untuk Insentif RT dan RW sebesar Rp3.959.100.000,00 dan
4) Realisasi penggunaan untuk Pembangunan Infrastruktur di Pemerintah Desa sebesar Rp9.476.000.000,00

3.3.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar 154.141.351.140,00 atau sebesar 93,42% dari anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa.

Adapun penyerapan dan penyaluran Dana Desa serta realisasi penggunaan dana desa di masing masing rekening Kas Desa sebagaimana terdapat pada **Lampiran 6**

3.3.3 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp89.350.162.300,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran.

Adapun Rincian RealisasiBelanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 68 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Total
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	589.751.900	11.071.604.200	7.543.405.000	19.204.761.100
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	422.102.800	11.969.159.520	7.395.663.000	19.786.925.320
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	576.907.300	10.881.557.400	7.763.388.000	19.221.852.700

No	Uraian	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Total
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	1.039.229.200	14.378.027.780	9.314.774.300	24.732.031.280
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	2.103.900.000	15.326.745.600	9.974.083.000	27.404.728.600
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	758.100.000	14.003.128.200	8.717.307.000	23.478.535.200
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	2.397.400.000	10.772.338.400	5.104.276.000	18.274.014.400
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	1.993.600.000	9.227.750.400	4.570.448.000	15.791.798.400
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	532.200.000	11.994.750.540	5.787.670.000	18.314.620.540
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	2.414.100.000	18.460.779.600	9.176.473.000	30.051.352.600
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	747.000.000	15.517.069.500	8.790.029.000	25.054.098.500
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	776.600.000	10.538.440.000	5.212.646.000	16.527.686.000
Jumlah		**14.350.891.200**	**154.141.351.140**	**89.350.162.300**	**257.842.404.640**

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
4. Surplus / Defisit LRA	**(59.429.887.105,27)**	**(3.226.990.112,95)**	**(59.136.192.996,18)**

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 adalah defisit sebesar Rp3.226.990.112,95 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.688.893.288.128,60	1.664.784.943.311,05	98,57	1.766.250.812.944,91	101.465.869.633,86)
2	Belanja dan Transfer	1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,41	1.825.387.005.941,09	(157.375.072.517,09)
Surplus (Defisit)		**(59.429.887.105,27)**	**(3.226.990.112,95)**	**5,43**	**(59.136.192.996,18)**	55.909.202.883,23

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5. Pembiayaan Netto	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	**118.316.080.101,45**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp59.791.530.623,00 atau sebesar 100,61% dari anggaran sebesar Rp59.429.887.105,27 dan mengalami penurunan sebesar

Rp58.524.549.478,45 atau 49,46% dari realisasi tahun lalu, yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pembiayaan	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,61	118.316.080.101,45	(58.524.549.478,45)
Pembiayaan Netto		59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	**100,61**	118.316.080.101,45	(58.524.549.478,45)

5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp59.791.530.623,00 atau sebesar 100,61 % dari anggaran sebesar Rp59.429.887.105,27 dan penurunan sebesar Rp58.524.549.478,45 atau 49,46% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	59.179.887.105,27	59.179.887.105,27	100,00	116.508.846.101,76	(57.328.958.996,49)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	250.000.000,00	611.643.517,73	244,66	1.807.233.999,69	(1.195.590.481,96)
Jumlah		**59.429.887.105,27**	**59.791.530.623,00**	**100,61**	**118.316.080.101,45**	(58.524.549.478,45)

Adapun Penerimaan Kembali Pinjaman sebesar Rp611.643.517,73 merupakan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari:

a) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp200.000,00

b) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp499.036.572,32

c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp112.406.945,41

Realisasi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp59.179.887.105,27 terdiri dari Sisa Lebih Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	27.338.004.644,84	27.338.004.644,84	100,00	44.107.266.325,76	(16.769.261.680,92)
3	Penghematan Belanja	935.981.474,00	935.981.474,00	100,00	2.486.468.601,00	(1.550.487.127,00)
4	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	18.915.727.136,41	18.915.727.136,41	100,00	44.466.819.466,00	(25.551.092.329,59)
5	Sisa Belanja Lainnya	11.990.173.850,02	11.990.173.850,02	100,00	25.448.291.709,00	(13.458.117.858,98)
	Jumlah	**59.179.887.105,27**	**59.179.887.105,27**	**100,00**	**116.508.846.101,76**	**(57.328.958.996,49)**

5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 berupa penyertaan modal dan investasi non permanen tidak ada anggaran dan realisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk :

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2) Penyertaan Modal Daerah;
3) Pembentukan Dana Cadangan;
4) Pemberian Pinjaman Daerah;
5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sedangkan belum dilaksanakannya penyertaan modal kepada PDAM pada tahun 2025 karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	**0,00**	**56.564.540.510,05**	**59.179.887.105,27**

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp56.564.540.510,05 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 73 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.688.893.288.128,60	1.664.784.943.311,05	98,57	1.766.250.812.944,91	(101.465.869.633,86)
2	Belanja dan Transfer	1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,41	1.825.387.005.941,09	(157.375.072.517,09)
3	Surplus/Defisit	(59.429.887.105,27)	(3.226.990.112,95)	5,43	(59.136.192.996,18)	55.909.202.883,23
4	Pembiayaan Netto	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,61	118.316.080.101,45	(58.524.549.478,45)
SILPA		**0,00**	**56.564.540.510,05**	**0,00**	**59.179.887.105,27**	(2.615.346.595,22)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp56.564.540.510,05 tersebut terdiri dari.

Tabel 74 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Kas 2025	Jumlah Kas 2024
1	Kas Di Kas Daerah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	2.031.000,00	8.473.734,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas Di BLUD	11.916.222.402,26	11.990.173.850,02
5	Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Dana BOSP	121.317.601,00	54.447.482,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.191.544.397,00	1.638.231.226,00
SiLPA LRA		**56.564.540.510,05**	**59.179.887.105,27**

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang sehingga menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SikPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Laporan Perubahan SAL Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	**59.179.887.105,27**	**116.508.846.101,76**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	59.179.887.105,27	116.508.846.101,76
Sub total a	**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	56.564.540.510,05	59.179.887.105,27
Sub total b	**56.564.540.510,05**	**59.179.887.105,27**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**56.564.540.510,05**	**59.179.887.105,27**

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih	**59.179.887.105,27**	**116.508.846.101,76**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp59.179.887.105,27 dengan rincian sebagai berikut:

SiLPA BEBAS **Rp18.915.727.136,40**

SiLPA TERIKAT : **Rp40.264.159.968,87**

BLUD RSUD Rp7.488.166.041,62

BLUD PUSKESMAS Rp4.502.007.808,40

BOS Rp54.447.482,00

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp4.076.274.439,00

Bantuan Keuangan Provinsi Rp 935.981.474,00

Insentif Fiskal Rp 782.289.251,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 3.474.935.367,00

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp1.638.231.226,00

Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik : Rp14.967.942.129,00

1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD) Rp11.035.287.990,00
2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) Rp685.250.000,00
3) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) Rp1.157.764.205,00
4) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Rp522.835.000,00
5) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp424.670,00

6)	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp797.311,00
7)	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Rp539.918.514,00
8)	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Rp21.544.700,00
9)	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp3.699.000,00
10)	BOKKB	Rp165.510.895,00
11)	BOK Kabupaten Kota	Rp 834.909.844,00
Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaanya	Rp 2.343.884.750,84	
1)	DAU Penggajian Formasi PPPK	-
2)	DAU Pendanaan Kelurahan	Rp11.819.310,00
3)	DAU Bidang Pendidikan	Rp528.543.920,00
4)	DAU Bidang Kesehatan	Rp837.024.198,00
5)	DAU Bidang Pekerjaan Umum	Rp966.497.322,84
Jumlah SiLPA		**Rp59.179.887.105,27**

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**59.179.887.105,27**	**116.508.846.101,76**

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih awal senilai Rp 59.179.887.105,27 merupakan SILPA Tahun 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	**Rp**	**27.338.004.644,84**
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	4.076.274.439,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Rp	11.819.310,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Rp	528.543.920,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Rp	837.024.198,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Rp	966.497.322,84
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Rp	1,00

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp	52,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Rp	199.020.289,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Rp	604.540.030,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Rp	1.654.890,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Rp	28.499.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang PasarPenugasan	Rp	1.275.179,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	Rp	36.324.450,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	Rp	9.870,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	Rp	2,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	Rp	73.300,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	Rp	520.051.557,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	Rp	390.227.799,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Rp	914.398.011,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	Rp	439.888.102,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	Rp	325.100,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus	Rp	95.470.183,00

(DAK)-DAK Fisik-Bidang JalanJalan Mendukung Konektivitas Daerah		
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang JalanTematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	Rp	14.625.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Rp	22.967.326,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang IrigasiTematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Rp	119.939.550,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Rp	36.677.500,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	Rp	48.968.175,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	Rp	1,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Reguler	Rp	54.447.482,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD	Rp	11.035.287.990,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp	685.250.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKBBOKB	Rp	165.510.895,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-PK2UKM	Rp	797.311,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	424.670,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	Rp	539.918.514,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp	21.544.700,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	3.699.000,00

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	Rp	1.157.764.205,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	Rp	522.835.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Rp	896.978.844,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Rp	1.576.162.226,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Rp	98.609.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Rp	683.680.251,00
Sisa Belanja Transfer	Rp	**935.981.474,00**
Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp	935.981.474,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Rp	**18.915.727.136,41**
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	Rp	18.915.727.136,41
Sisa Belanja Lainnya	Rp	**11.990.173.850,02**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Rp	11.990.173.850,02
Jumlah	**Rp**	**59.179.887.105,27**

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan senilai Rp56.564.540.510,05, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan neto. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp56.564.540.510,05 dapat diuraikan sebagai berikut:.

Surplus/Defisit Anggaran	Rp(3.226.990.112,95)
Pembiayaan Netto	Rp59.791.530.623,00
SILPA	Rp56.564.540.510,05

4. SAL Akhir

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
SAL Akhir	**56.564.540.510,05**	**59.179.887.105,27**

Saldo Anggaran Lebih Akhir senilai Rp 56.564.540.510,05 merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 76 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25	(2.155.135.703,46)
Kas di Bendahara Penerimaan	2.031.000,00	8.473.734,00	(6.442.734,00)

	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0,00
Kas di Bendahara BLUD	11.916.222.402,26	11.990.173.850,02	(73.951.447,76)
Kas di Bendahara Dana BOS	121.317.601,00	54.447.482,00	66.870.119,00
Kas di Bendahara Dana BOK	1.191.544.397,00	1.638.231.226,00	(446.686.829,00)
Jumlah	**56.564.540.510,05**	**59.179.887.105,27**	**(2.615.346.595,22)**

Rincian SiLPA menurut sumber dana dapat dijelaskan sebagai berikut.

SILPA BEBAS				**Rp**	**31.079.599.178,95**
SILPA TERIKAT :				**Rp**	**25.484.941.331,10**
BLUD RSUD	**Rp**	**7.558.815.299,40**			
BLUD PUSKESMAS	**Rp**	**4.357.407.102,86**			
BOS	**Rp**	**121.317.601,00**			
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	**Rp**	**2.403.496.360,00**			
Bantuan Keuangan Provinsi	**Rp**	**481.298.631,00**			
Insentif Fiskal	**Rp**	**124.899.000,00**			
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**Rp**	**2.621.015.579,00**			
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	**Rp**	**1.191.544.397,00**			
Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik :	**Rp**	**4.130.261.786,00**			
1)	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)		Rp	1.073.180.790,00	
2)	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)		Rp	248.250.000,00	
3)	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)		Rp	1.183.869.205,00	
4)	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		Rp	522.835.000,00	
5)	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)		Rp	98.347.341,00	
6)	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Rp	424.670,00	
7)	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM		Rp	797.311,00	
8)	Dana Pelayanan Kepariwisataan		Rp	539.918.514,00	
9)	Dana Fasilitasi Penanaman Modal		Rp	21.544.700,00	
10)	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		Rp	47.465.000,00	
11)	Dana Bantuan Pengembangan Program (Bpp) Perpustakaan Daerah		Rp	47.821.459,00	
12)	BOK Kabupaten/Kota		Rp	341.250.895,00	
13)	BOK Pengawasan Obat dan Makanan		Rp	4.556.901,00	
Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaanya	**Rp**	**2.494.885.574,84**			
1)	DAU Pendanaan Kelurahan		Rp	231.610,00	
2)	DAU Bidang Pendidikan		Rp	1.025.004.615,00	
3)	DAU Bidang Kesehatan		Rp	1.467.743.350,00	
4)	DAU Bidang Pekerjaan Umum		Rp	1.905.999,84	
Jumlah SILPA				**Rp**	**56.564.540.510,05**

15.1.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

1. ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.156.784.768.195,28 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1.1 ASET LANCAR

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Lancar	**137.371.578.687,25**	**111.152.727.402,74**	**26.218.851.284,51**

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp137.371.578.687,25 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.1.1	Kas di Kas Daerah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25	(2.155.135.703,46)
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.031.000,00	8.473.734,00	(6.442.734,00)
1.1.3	Kas di BLUD	11.916.222.402,26	11.990.173.850,02	(73.951.447,76)
1.1.4	Kas Lainnya	19.765.510,00	28.608.815,00	(8.843.305,00)
1.1.5	Kas Dana BOSP	121.317.601,00	54.447.482,00	66.870.119,00
1.1.6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.191.544.397,00	1.638.231.226,00	(446.686.829,00)
1.1.7	Piutang Pajak Daerah	4.819.416.725,00	4.303.156.684,00	516.260.041,00
1.1.8	Piutang Retribusi	10.692.843.690,80	9.600.651.745,30	1.092.191.945,5
1.1.9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.867.259.095,49	2.076.855.567,24	(209.596.471,75)
1.1.10	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	48.148.921.000,00	14.562.210.000,00	33.586.711.000,00
1.1.11	Piutang Lainnya	4.990.199.050,86	5.601.842.568,59	(611.643.517,73)
1.1.12	Penyisihan Piutang Pendapatan	(10.085.824.108,16)	(9.984.650.042,75)	(101.174.065,41)
1.1.13	Beban Dibayar Dimuka	56.188.333,33	54.115.833,33	2.072.500,00
1.1.14	Persediaan	20.298.268.879,88	25.730.049.126,76	(5.431.780.246,88)
Jumlah Aset Lancar		**137.371.578.687,25**	**111.152.727.402,74**	**26.218.851.284,51**

Kas dan Setara Kas

Nilai Aset Lancar sejumlah Rp137.371.578.687,25 yang merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.584.306.020,05 yang merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Lainnya, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25	(2.155.135.703,46)
Kas di Bendahara Penerimaan	2.031.000,00	8.473.734,00	(6.442.734,00)
Kas di BLUD	11.916.222.402,26	11.990.173.850,02	(73.951.447,76)

Kas Lainnya	19.765.510,00	28.608.815,00	(8.843.305,00)
Kas Dana BOSP	121.317.601,00	54.447.482,00	66.870.119,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.191.544.397,00	1.638.231.226,00	(446.686.829,00)
Jumlah Setara Kas	**56.584.306.020,05**	**59.208.495.920,27**	**(2.624.189.900,22)**

1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	**43.333.425.109,79**	**45.488.560.813,25**	**(2.155.135.703,46)**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp43.333.425.109,79 merupakan saldo bank yang berada pada Rekening Giro PT Bank Jatim,Tbk sebesar Rp43.333.425.109,79 dengan nomor Giro 0211002166.

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 77 Rincian Kas Di Kas Daerah Sesuai Peruntukannya

(dalam Rupiah)

No	Kas di kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	31.077.568.178,95	18.907.253.402,41	12.170.314.776,54
2	Kas yang ditentukkan penggunaannya (mandatory)	12.255.856.930,84	26.581.307.411 ,00	(14.325.450.480,00)
	- DAU (Penggajian Formasi PPPK, Kelurahan,Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum)	2.494.885.574,84	2.343.884.750,84	151.000.824,00
	- DBH CHT	2.403.496.360,00	4.076.274.439,00	(1.672.778.079,00)
	- Insentif Fiskal	124.899.000,00	782.289.251,00	(657.390.251,00)
	- DAK Fisik	2.621.015.579,00	3.474.935.367,00	(853.919.788,00)
	- DAK Non Fisik Total	4.130.261.786,00	14.967.942.129,00	(10.837.680.343,00)
	- BKK	481.298.631,00	935.981.474,00	(454.682.843,00)
Jumlah		**43.333.425.109,79**	**45.488.560.813,25**	**(2.155.135.703,46)**

Perincian Kas yang ditentukan penggunaanya (*mandatory*) sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)

(dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DAU Kelurahan	11.819.310,00	1.000.000.000,00	1.011.587.700,00	231.610,00
2	DAU Kebijakan Penggajian PPPK	0,00	7.155.082.015,00	7.155.082.015,00	0,00
3	DAU Pendidikan	528.543.920,00	21.775.820.000,00	21.279.359.305,00	1.025.004.615,00
4	DAU Kesehatan	837.024.198,00	16.993.120.000,00	16.362.400.848,00	1.467.743.350,00
5	DAU Pekerjaan Umum	966.497.322,84	0,00	964.591.323,00	1.095.999.84
Jumlah		**2.343.884.750,84**	**46.924.022.015,00**	**46.773.021.191,00**	**2.494.885.574,84**

Tabel 79 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-DBH CHT

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DBHCHT - Bidang kesejahteraan masyarakat	1.989.232.297,00	17.019.981.704,00	18.534.360.171,00	474.853.830,00
2	DBHCHT - Bidang penegakan hukum	3.541.777,00	3.192.732.662,00	3.172.157.320,00	24.117.119,00
3	DBHCHT - Bidang kesehatan	2.053.868.766,00	15.500.077.634,00	15.649.420.989,00	1.904.525.411,00
4	DBHCHT - Bidang program prioritas dan kebutuhan	29.631.599,00	0,00	29.631.599,00	0,00
5	DBHCHT kurang bayar tahun 2023 yang masuk ke RKUD pada tanggal 31 Desember 2024 yang belum dianggarkan dan belum digunakan tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**4.076.274.439,00**	**35.712.792.000,00**	**37.385.570.079,00**	**2.403.496.360,00**

Tabel 80 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-DID

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya	782.289.251,00	14.664.399.000,00	15.321.789.251,00	124.899.000,00
2	Insentif Fiskal Tahun berjalan Inflasi daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Insentif Fiskal Kesejahteraan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**782.289.251,00**	**14.664.399.000,00**	**15.321.789.251,00**	**124.899.000,00**

Tabel 81 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-DAK FISIK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DAK FISIK	3.474.935.367,00	9.233.785.810,00	10.087.705.598,00	2.621.015.579,00
Jumlah		**3.474.935.367,00**	**9.233.785.810,00**	**10.087.705.598,00**	**2.621.015.579,00**

Tabel 82 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-DAK NON FISIK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	11.035.287.990,00	146.094.353.300,00	156.056.460.500,00	1.073.180.790,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	685.250.000,00	1.635.375.000,00	2.072.375.000,00	248.250.000,00
3	Dana Pelayanan Kepariwisataan	539.918.514,00	0,00	0,00	539.918.514,00
	Dana Operasional Penyelenggaraan BOP PAUD	1.157.764.205,00	9.574.150.500,00	9.548.045.500,00	1.183.869.205,00
4	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten/Kota	834.909.844,00	6.291.020.156,00	6.784.679.105,00	341.250.895,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP Kesetaraan	522.835.000,00	1.899.000.000,00	1.899.000.000,00	522.835.000,00
5	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	366.769.000,00	362.212.099,00	4.556.901,00
5	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	165.510.895,00	7.725.826.105,00	7.792.989.659,00	98.347.341,00
6	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	21.544.700,00	0,00	0,00	21.544.700,00
7	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.699.000,00	378.546.000,00	334.780.000,00	47.465.000,00
8	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	797.311,00	0,00	0,00	797.311,00
	Dana Pelayanan Administrasi	424.670,00	0,00	0,00	424.670,00
	Dana Bantuan Pengembangan	0,00	500.000.000,00	452.178.541,00	47.821.459,00

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Program (BPP) Perpustakaan Daerah				
Jumlah		**14.967.942.129,00**	**174.465.040.061,00**	**185.302.720.404,00**	**4.130.261.786,00**

Tabel 83 Rincian Kas yang ditentukkan penggunaannya (*mandatory*)-BKK Provinsi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	BKK Provinsi	935.981.474,00	5.307.104.000,00	5.761.786.843,00	481.298.631,00
Jumlah		935.981.474,00	5.307.104.000,00	5.761.786.843,00	481.298.631,00

1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	**2.031.000,00**	**8.473.734,00**	**(6.442.734,00)**

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2025, Kas di Bendahara Penerimaan bersaldo Rp2.031.000,00 merupakan setoran retribusi parkir kendaraan Pantai Pancer Dorr yang ditransfer ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 23.45 WIB dan tidak bisa dioverbooking ke RKUD Kab Pacitan setelah pukul 23.30 WIB.

1.1.3 Kas di BLUD

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di BLUD	**11.916.222.402,26**	**11.990.173.850,02**	**(73.951.447,76)**

Kas di BLUD posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp11.916.222.402,26 terdiri dari :

1) Kas di BLUD RSUD dr. Darsono sebesar Rp7.558.815.299,40 terdiri dari

   a) Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.494.478,00 saldo tersebut merupakan setoran dalam perjalanan (*deposit in transit*) yang belum masuk ke Rekening Kas BLUD sesuai jadwal operasional bank.

      Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan penerimaan tunai atas pembayaran pasien tanggal 31 Desember 2025 shif sore dan malam s/d 24.00 WIB yang di setorkan ke Bank hari berikutnya.

   b) Rekening Kas BLUD Jasa Giro dengan Nomor Rek. 021.101.3613 saldo sebesar Rp7.544.320.821,40.

2) Kas di BLUD 24 Puskesmas sebesar Rp4.357.407.102,86 yang merupakan saldo akhir pada neraca per 31 Desember 2025, sedangkan saldo Kas di BLUD yang tersimpan pada Rekening Giro per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.340.407.102,86.

   Adapun rincian Kas BLUD Puskesmas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 84 Laporan Realisasi Dan Sisa Kas di BLUD di 24 UPT Puskesmas

(dalam Rupiah

No	Nama UPT	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Kas 2025	Rincian Saldo	NOMOR GIRO
						Bank	
1	Puskesmas Pacitan	164.441.896,00	1.369.031.048,00	1.412.991.542,00	120.481.402,00	120.481.402,00	1587241145
2	Puskesmas Tanjungsari	226.606.459,00	2.398.383.381,00	2.258.147.468,00	366.842.372,00	366.842.372,00	1587241156
3	Puskesmas Kebonagung	74.880.269,00	1.737.786.313,00	1.744.045.466,00	68.621.116,00	68.621.116,00	1587241178
4	Puskesmas Ketrowonojoyo	7.740.568,52	1.189.466.406,71	1.085.580.570,00	111.626.405,23	111.626.405,23	211042711
5	Puskesmas Arjosari	501.633.712,39	2.768.561.084,80	3.181.949.725,88	88.245.071,31	88.245.071,31	211042729
6	Puskesmas Kedungbendo	11.131.820,00	604.613.042,00	524.604.789,00	91.140.073,00	91.140.073,00	1587209609
7	Puskesmas Punung	126.495.664,00	1.950.687.462,00	2.014.110.154,00	63.072.972,00	63.072.972,00	1587196789
8	Puskesmas Gondosari	158.829.884,73	1.410.715.411,75	1.328.230.959,00	241.314.337,48	224.314.337,48	211042745
9	Puskesmas Pringkuku	71.895.563,00	1.075.463.645,00	1.083.047.594,00	64.311.614,00	64.311.614,00	1587209610
10	Puskesmas Candi	10.740.645,66	749.160.564,22	725.088.882,00	34.812.327,88	34.812.327,88	211042737
11	Puskesmas Donorojo	5.950.323,59	1.646.832.200,37	1.603.365.441,00	49.417.082,96	49.417.082,96	211042753
12	Puskesmas Kalak	10.371.701,51	756.722.643,97	747.844.903,00	19.249.442,48	19.249.442,48	211042761
13	Puskesmas Ngadirojo	526.504.172,93	3.653.108.486,35	3.937.365.697,00	242.246.962,28	242.246.962,28	211042770
14	Puskesmas Wonokarto	146.690.354,24	934.279.851,28	920.520.411,00	160.449.794,52	160.449.794,52	211042788
15	Puskesmas Tulakan	297.290.115,01	4.840.999.829,31	4.636.185.697,00	502.104.247,32	502.104.247,32	211042796
16	Puskesmas Bubakan	215.167.406,10	2.551.082.520,79	2.222.979.536,00	543.270.390,89	543.270.390,89	211042800
17	Puskesmas Sudimoro	360.539.462,34	1.351.006.861,38	1.233.953.612,00	477.592.711,72	477.592.711,72	211042818
18	Puskesmas Sukorejo	124.127.922,14	1.113.204.106,32	1.122.659.264,00	114.672.764,46	114.672.764,46	211042826
19	Puskesmas Tegalombo	259.880.390,00	3.101.928.925,00	2.960.948.057,00	400.861.258,00	400.861.258,00	1587209597
20	Puskesmas Gemaharjo	426.735.692,00	2.092.226.288,00	2.475.663.735,00	43.298.245,00	43.298.245,00	1587241134
21	Puskesmas Nawangan	183.864.703,35	2.345.374.575,52	2.311.888.567,00	217.350.711,87	217.350.711,87	211042834
22	Puskesmas Pakisbaru	219.328.404,63	2.378.939.475,98	2.385.714.248,00	212.553.632,61	212.553.632,61	211042842
23	Puskesmas Bandar	266.101.999,28	1.934.653.462,96	2.114.928.933,00	85.826.529,24	85.826.529,24	211042851
24	Puskesmas Jeruk	105.058.678,98	1.170.303.493,63	1.237.316.534,00	38.045.638,61	38.045.638,61	211042869
TOTAL		**4.502.007.808,40**	**45.124.531.079,34**	**45.269.131.784,88**	**4.357.407.102,86**	**4.340.407.102,86**	

Terdapat selisih sebesar Rp17.000.000,00 antara saldo Kas BLUD di Neraca dengan Saldo RC Bank dikarenakan ada kelebihan pembayaran pajak PPN atas belanja obat pada Puskesmas Gondosari.

Terhadap selisih tersebut telah dilakukan Permohonan Restitusi pada KPP Pratama Ponorogo Tanggal 18 Desember 2025 Nomor BPE-33699/CT/KPP.2414/2025.

1.1.4 Kas Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Lainnya	**19.765.510,00**	**28.608.815,00**	**(8.843.305,00)**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.765.510,00 yang merupakan dana titipan di RSUD dr

Darsono yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp.0,00 dan saldo bank rekening titipan pasien BLUD RSUD nomor rekening 021.104.9324 sebesar Rp.19.765.510,00

Adapun penjelasan dari kas lainnya RSUD dr. Darsono adalah sebagai berikut:

1) Uang yang diberikan pasien kepada rumah sakit sebagai titipan atas biaya perawatan sebelum terbit tagihan dan bukan merupakan hak rumah sakit.
2) Uang yang diberikan pasien dengan penjamin kepada rumah sakit sebagai titipan atas biaya perawatan sebelum terbit jaminan dari pihak penjamin dan bukan merupakan hak rumah sakit

Uang yang diberikan pasien dengan penjamin kepada rumah sakit atas urun biaya karena naik kelas yang belum terbit tagihan biaya rumah

1.1.5 Kas Dana BOSP

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Dana BOSP	**121.317.601,00**	**54.447.482,00**	**66.870.119,00**

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp121.317.601,00 yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp3.720.076,000 dan sebesar Rp117.577.525,00 berada pada Rekening Satuan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85 Rekapitulasi Sisa Kas Di Bendahara Dana BOSP

(dalam Rupiah)

NO	SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	SALDO TAHUN 2025		
			Tunai	Bank	Jumlah
1	BOSP Sekolah Dasar (SD)	NEGERI	3.720.076,00	117.553.808,00	121.273.884,00
2	BOSP Sekolah Menengah Pertama (SMP)	NEGERI	0,00	43.717,00	43.717,00
3	BOSP PAUD	NEGERI	0,00	0,00	0,00
4	BOSP Kesetaraan	NEGERI	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			**3.720.076,00**	**117.577.525,00**	**121.317.601,00**

Adapun penjelasan rincian Saldo Kas di Bendahara Dana Bos pada masing-masing Satuan Pendidikan dapat dilihat di **Lampiran 8.**

1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Dana BOK Puskesmas	**1.191.544.397,00**	**1.638.231.226,00**	**(446.686.829,00)**

Saldo Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp1.191.544.397,00 yang merupakan sisa dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK Puskesmas) posisi 31 Desember 2025 berada pada rekening masing-masing UPT Puskesmas.

Adapun rincian Kas Bantuan Operasional Kesehatan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Terdapat penurunan Sisa Dana BOK Puskesmas senilai 446.686.829,00 atau sebesar 27,27% dari Tahun 2024 dikarenakan pagu anggaran mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Hal ini dikarenakan silpa tahun 2024 menjadi pengurang salur di tahun 2025.

Terdapat selisih saldo Kas Dana BOK Puskesmas di Neraca dengan saldo RC Bank sebesar Rp4.831.200,00 dikarenakan adanya kelebihan pengembalian Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Balita ke Rekening VA SIKLUS HIDUP dan ke rekening puskesmas (GIRO) sehingga terjadi dobel transfer.

Terhadap kesalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan:

1) Membuat surat permohonan pemindahbukuan dari Rekening Giro BNI (Nomor Rekening 1590063650) atas nama 1032388BOXPKMKALAK ke rekening atas nama Nurul Inayah Fitrianan (PJ. Pelaksana Kelas Ibu Hamil dan Balita) melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2025 (Nomor Rekening 1786823013)
2) Proses pemindahbukuan telah dilakukan pada tanggal 09 Februari Tahun 2026 dengan bukti transfer nomor Pemindahan Ke 1846840441 simsem giro interal penya 1000101426Bok PKM Kalak 1846840441 pengembalian dn non bok senilai Rp4.831.200,00

Tabel 86 Laporan Realisasi Dan Sisa Kas Dana BOK di 24 UPT Puskesmas

(dalam Rupiah

No	Nama UPT	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Kas 2025	Rincian Saldo	NOMOR REK GIRO
						Bank	
1	Puskesmas Pacitan	62.884.900,00	627.909.141,00	646.307.342,00	44.486.699,00	44.486.699,00	1590063832
2	Puskesmas Tanjungsari	115.191.864,00	1.085.495.663,00	1.102.146.897,00	98.540.630,00	98.540.630,00	1590063876
3	Puskesmas Kebonagung	34.075.590,00	732.446.255,00	745.295.876,00	21.225.969,00	21.225.969,00	1590063821
4	Puskesmas Ketrowonojoyo	92.138.219,00	560.075.840,00	570.648.662,00	81.565.397,00	81.565.397,00	1590063752
5	Puskesmas Arjosari	65.212.118,00	960.382.142,00	929.075.634,00	96.518.626,00	96.518.626,00	1590063854
6	Puskesmas Kedungbendo	72.843.132,00	473.542.385,00	440.623.279,00	105.762.238,00	105.762.238,00	1590063661
7	Puskesmas Punung	180.455.642,00	541.325.166,00	652.695.049,00	69.085.759,00	69.085.759,00	1590063796
8	Puskesmas Gondosari	44.846.113,00	401.100.799,00	420.094.906,00	25.852.006,00	25.852.006,00	1590063729
9	Puskesmas Pringkuku	64.863.298,00	560.157.950,00	586.634.017,00	38.387.231,00	38.387.231,00	1590063785
10	Puskesmas Candi	123.570.668,00	373.855.416,00	475.496.557,00	21.929.527,00	21.929.527,00	1590063718
11	Puskesmas Donorojo	88.363.375,00	531.633.688,00	560.498.408,00	59.498.655,00	59.498.655,00	1590063730
12	Puskesmas Kalak	38.434.651,00	541.457.560,00	554.020.138,00	25.872.073,00	30.703.723,00	1590063650
13	Puskesmas Ngadirojo	76.937.823,00	889.776.778,00	925.814.481,00	40.900.120,00	40.900.120,00	1590063865
14	Puskesmas Wonokarto	64.022.466,00	458.752.617,00	474.048.397,00	48.726.686,00	48.726.686,00	1590063672
15	Puskesmas Tulakan	51.542.511,00	1.058.451.170,00	1.003.006.617,00	106.987.064,00	106.987.064,00	1590063887
16	Puskesmas Bubakan	85.393.095,00	665.776.409,00	716.899.282,00	34.270.222,00	34.270.222,00	1590063843
17	Puskesmas Sudimoro	43.893.664,00	617.889.083,00	598.515.037,00	63.267.710,00	63.267.710,00	1590063774
18	Puskesmas Sukorejo	23.513.176,00	499.313.887,00	495.036.214,00	27.790.849,00	27.790.849,00	1590063763
19	Puskesmas Tegalombo	132.852.310,00	608.838.718,00	634.193.950,00	107.497.078,00	107.497.078,00	1590063809
20	Puskesmas Gemaharjo	18.663.750,00	574.357.072,00	584.349.114,00	8.671.708,00	8.671.708,00	1590063694
21	Puskesmas Nawangan	75.319.671,00	559.783.736,00	628.298.388,00	6.805.019,00	6.805.019,00	1590063810

No	Nama UPT	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Kas 2025	Rincian Saldo	NOMOR REK GIRO
						Bank	
22	Puskesmas Pakisbaru	13.882.578,00	556.644.397,00	567.880.968,00	2.646.007,00	2.646.007,00	1590063707
23	Puskesmas Bandar	49.731.261,00	585.522.951,00	612.120.728,00	23.133.484,00	23.133.484,00	1590063683
24	Puskesmas Jeruk	19.599.351,00	586.115.951,00	573.591.662,00	32.123.640,00	32.123.640,00	1590063741
TOTAL		**1.638.231.226,00**	**15.050.604.774,00**	**15.497.291.603,00**	**1.191.544.397,00**	**1.196.375.597,00**	

Piutang Daerah

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 70.518.639.562,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 87 Piutang Daerah Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Piutang Pajak	4.819.416.725,00	4.303.156.684,00	516.260.041,00
Piutang Retribusi	10.692.843.690,80	9.600.651.745,30	1.092.191.945,50
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.867.259.095,49	2.076.855.567,24	(209.596.471,75)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	48.148.921.000,00	14.562.210.000,00	33.586.711.000,00
Piutang lainnya	4.990.199.050,86	5.601.842.568,59	(611.643.517,73)
Jumlah Piutang Bersih	**70.518.639.562,15**	**36.144.716.565,13**	**34.373.922.997,02**

Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 88 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Per 31 Des 2024	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Per 31 Des 2025
		Koreksi Tahun Lalu	Penambahan/ Reklasifikasi	Koreksi Tahun Lalu	Pembayaran dan Reklasifikasi	
Piutang Pajak	4.303.156.684,00	0,00	2.226.978.040,00	0,00	1.710.717.999,00	4.819.416.725,00
Piutang Retribusi	9.600.651.745,30	0,00	9.700.544.237,00	0,00	8.608.352.291,50	10.692.843.690,80
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.076.855.567,24	0,00	465.000,00	0,00	210.061.471,75	1.867.259.095,49
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	14.562.210.000,00	0,00	39.855.828.000,00	0,00	6.269.117.000,00	48.148.921.000,00
Piutang Lainnya	5.601.842.568,59	0,00	0,00	0,00	611.643.517,73	4.990.199.050,86
Jumlah Piutang Bersih	**36.144.716.565,13**	**0,00**	**51.783.815.277,00**	**0,00**	**17.409.892.279,98**	**70.518.639.562,15**

Saldo dan Mutasi dari kelompok piutang per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.1.7 Piutang Pajak

Piutang Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	4.819.416.725,00	**4.303.156.684,00**	**516.260.041,00**

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp4.819.416.725,00 berada di Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

Tabel 89 Piutang Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2024	Koreksi	Reklasifikasi	Pelunasan 2025	Penambahan 2025	Saldo Akhir 2025
1	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	525.000,00	0,00	(525.000,00)	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Akhir 2024	Koreksi	Reklasifikasi	Pelunasan 2025	Penambahan 2025	Saldo Akhir 2025
2	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	176.000,00	0,00	(176.000,00)	0,00	525.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	5.473.200,00	0,00	0,00	361.200,00	176.000,00	5.112.000,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	303.331,00	0,00	0,00	303.331,00	3.600.000,00	0,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.843.428.273,00	0,00	0,00	259.735.588,00	0,00	3.251.229.118,00
7	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	1.449.650.880,00	0,00	0,00	1.449.650.880,00	0,00	1.559.441.607,00
8	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/ Bungalo/Resort/Cottage	0,00	0,00	525.000,00	332.000,00	5.473.200,00	193.000,00
9	Piutang PBJT-Restoran	0,00	0,00	3.776.000,00	335.000,00	0,00	3.441.000,00
TOTAL		**4.303.156.684,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710.717.999,00**	**2.226.978.040,00**	**4.819.416.725,00**

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp4.819.416.725,00 di Tahun 2025, mengalami kenaikan sebesar Rp516.260.041,00 atau 12,00% dibandingkan realisasi Tahun 2024. Selisih lebih tersebut berasal dari saldo awal Tahun 2024 Rp4.303.156.684,00 dikurangi pelunasan sebesar Rp1.710.717.999,00 dan penambahan piutang pajak Tahun 2025 sebesar Rp2.226.978.040,00. Saldo piutang pajak sebesar Rp4.819.416.725,00 didominasi oleh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp3.251.229.118,00 atau 67,46% dari total piutang pajak.

Pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2014 diikuti dengan serah terima data piutang PBB-P2 tertuang dalam Berita Acara Serah Terima BA-15/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 29 Januari 2014. Pada lampiran II-1 Daftar Kompilasi Piutang terdapat catatan yang menjelaskan bahwa terdapat selisih antara database piutang PBB-P2 pada SISMIOP dengan nilai piutang yang tercantum dalam BAST. Nilai piutang pada awal 2014 mengacu pada nilai BAST dicatatkan sejumlah Rp1.187.434.104,00 sementara pada database SISMIOP terdapat piutang dengan ketetapan sejumlah Rp7.912.626.177,00 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp6.725.192.073,00. Selisih tersebut disebabkan karena belum dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data piutang sampai dengan tahun 2013.

Adapun Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 90 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi Bangunan

(dalam Rupiah)

TAHUN PAJAK	KONDISI PER 31 DESEMBER 2025					
	BERDASARKAN BERITA ACARA PELIMPAHAN DARI PUSAT	DATABASE SISMIOP	SELISIH	SALDO PERHITUNGAN MANUAL	DATABASE SISMIOP	SELISIH
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
2025				667.536.433,00	667.536.433,00	0,00
2024				243.061.251,00	243.061.251,00	0,00
2023				69.330.341,00	69.330.341,00	0,00
2022				134.909.638,00	134.909.638,00	0,00
2021				109.805.796,00	109.805.796,00	0,00
2020				99.981.439,00	99.981.439,00	0,00
2019				81.851.314,00	81.851.314,00	0,00
2018				150.453.559,00	150.453.559,00	0,00
2017				225.286.290,00	225.286.290,00	0,00
2016				181.740.750,00	181.740.750,00	0,00
2015				167.408.981,00	167.408.981,00	0,00
2014				150.989.019,00	150.989.019,00	0,00
2013	240.101.172,00	2.277.815.183	2.037.714.011,00	148.989.020,00	157.656.724,00	8.667.704,00
2012	170.191.557,00	170.191.557	0,00	135.704.884,00	138.354.467,00	2.649.583,00
2011	309.988.483,00	309.988.483	0,00	219.185.164,00	210.817.170,00	(8.367.994,00)
2010	1.002.353,00	1.002.353	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1.180.860,00	1.180.860	0,00	241.835,00	241.835,00	0,00
2008	98.679,00	98.679	0,00	98.679,00	98.679,00	0,00
2007	84.567.000,00	1.327.280.315	1.242.713.315,00	84.567.000,00	1.326.962.473,00	1.242.395.473,00
2006	56.914.000,00	549.778.043	492.864.043,00	56.914.000,00	549.775.470,00	492.861.470,00
2005	75.650.000,00	885.185.071	809.535.071,00	75.650.000,00	885.027.203,00	809.377.203,00
2004	17.000,00	455.844.225	455.827.225,00	17.000,00	455.844.225,00	455.827.225,00
2003	0,00	643.619.733	643.619.733,00	0,00	643.619.733,00	643.619.733,00
sd. 2002	**247.723.000,00**	**1.290.641.675**	**1.042.918.675,00**	247.506.725,00	1.290.557.967,00	1.043.051.242,00
2002		69.341.791	69.341.791,00		69.316.251,00	69.316.251,00
2001		311.497.292	311.497.292,00		311.439.124,00	311.439.124,00
2000		251.511.235	251.511.235,00		251.511.235,00	251.511.235,00
1999		198.325.522	198.325.522,00		198.325.522,00	198.325.522,00
1998		216.614.526	216.614.526,00		216.614.526,00	216.614.526,00
1997		193.261.963	193.261.963,00		193.261.963,00	193.261.963,00
1996		45.648.050	45.648.050,00		45.648.050,00	45.648.050,00
1995		0,00	0,00		0,00	0,00
1994		4.441.296	4.441.296,00		4.441.296,00	4.441.296,00
JUMLAH	**1.187.434.104,00**	**7.912.626.177**	**6.725.192.073,00**	**3.251.229.118,00**	**7.941.310.757,00**	**5.980.639.606,00**

1.1.8 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	10.692.843.690,80	**9.600.651.745,30**	**1.092.191.945,50**

Jumlah Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.692.843.690,80 yaitu terdiri dari:

Tabel 91 Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2024	Koreksi	Reklas	Pelunasan 2025	Penambahan 2025	Saldo Akhir 2025
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.549.972.860,00	0,00	0,00	8.391.422.709,00	9.245.165.837,00	9.403.715.988,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
3	Piutang Retribusi Penyediaan	336.349.799,00	0,00	0,00	11.932.650,00	0,00	324.417.149,00

No	Uraian	Saldo Akhir 2024	Koreksi	Reklas	Pelunasan 2025	Penambahan 2025	Saldo Akhir 2025
	Tempat Pelelangan						
4	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	221.953.336,30	0,00	0,00	4.750.932,50	0,00	217.202.403,80
5	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Gangguan-HO)	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	93.943.500,00	0,00	(93.943.500,00)	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	204.898.000,00	0,00	0,00	139.010.000,00	433.500.000,00	499.388.000,00
8	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	3.652.000,00	0,00	0,00	3.652.000,00	0,00	0,00
9	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	0,00	0,00	93.943.500,00	57.584.000,00	21.878.400,00	58.237.900,00
	Total	**9.600.651.745,30**	**0,00**	**0,00**	**8.608.352.291,50**	**9.700.544.237,00**	**10.692.843.690,80**

Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp10.692.843.690,80 di Tahun 2025, mengalami kenaikan sebesar Rp1.092.191.945,50 atau 11,38% dibandingkan Tahun 2024. Nilai Piutang sebesar Rp10.692.843.690,80 berasal dari saldo akhir Tahun 2024 Rp9.600.651.745,30 dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp8.608.352.291,50 dan penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp9.700.544.237,00.

1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	**1.867.259.095,49**	**2.076.855.567,24**	**(209.596.471,75)**

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.867.259.095,49 terdiri atas:

Tabel 92 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2024	Koreksi	Reklas	Pelunasan 2025	Penambahan 2025	Saldo Akhir 2025
1	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	454.734.855,22	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	404.734.855,22
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.068.698.569,50	0,00	0,00	144.395.923,00	0,00	924.302.646,50
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	658.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.400,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	1.068.040.169,50	0,00	0,00	144.395.923,00	0,00	923.644.246,50
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	318.436.142,52	0,00	0,00	6.232.261,75	0,00	312.203.880,77

5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dinkes)	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
6	Piutang BLUD RSUD	10.952.250,00	0,00	0,00	933.287,00	0,00	10.018.963,00
7	Piutang Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht-Anggota DPRD)	222.813.750,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	214.313.750,00
TOTAL		**2.076.855.567,24**	**0,00**	**0,00**	**210.061.471,75**	**465.000,00**	**1.867.259.095,49**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.867.259.095,49 di Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp209.596.471,75 atau 10,09% dari tahun 2024. Nilai tersebut berasal dari saldo Tahun 2024 sebesar Rp2.076.855.567,24 pelunasan sebesar Rp210.061.471,75 dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp465.000,00.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

1) Piutang hasil sewa BMD pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.220.000,00. Nilai tersebut merupakan saldo Tahun 2024 yang belum terbayar.

2) Piutang hasil kerjasama pemanfaatan BMD sebesar Rp404.734.855,22 berasal dari saldo Tahun 2024 yang belum terbayar, terdiri dari denda keterlambatan kerjasama pemanfaatan kawasan wisata Pantai Teleng Ria oleh PT. El John Tirta Emas Wisata sebesar Rp278.538.855,22 dan kerjasama pengelolaan pabrik es sebesar Rp126.196.000,00.

3) Piutang pendapatan denda pajak sebesar Rp924.302.646,50 merupakan piutang sanksi administrasi atas pajak reklame papan dan PBB-P2 terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak/kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.

   Tahun 2025 terdapat pelunasan piutang denda pajak sebesar Rp 144.395.923,00 yang merupakan pelunasan denda atas pajak PBB-P2 dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 9**.

4) Piutang hasil pengelolaan dana bergulir (piutang bunga) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp312.203.880,77. Piutang tersebut merupakan piutang bunga atas Investasi Dana Bergulir sejak Tahun 2002 s/d 2024 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian yang sudah jatuh tempo.

5) Piutang pendapatan dari pengembalian sebesar Rp465.000,00 merupakan piutang pengembalian atas belanja obat Puskesmas Candi yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga pada tahun 2025 dan akan dikembalikan pada tahun 2026.

6) Piutang pendapatan BLUD sebesar Rp10.018.963,00 merupakan denda keterlambatan dari pembangunan gedung 5 dengan nomor kontrak 10/KPA_BLUD_I.PGRI/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022.

7) Piutang berdasarkan putusan pengadilan (inkracht) sebesar Rp214.313.750,00 merupakan piutang atas Purna Tugas kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Pacitan untuk

masa jabatan Tahun 1999-2004 atas kelebihan pembayaran purna bakti. Nilai tersebut berasal dari saldo tahun 2024 sebesar Rp222.813.750,00 dan pelunasan Tahun 2025 sebesar Rp8.500.000,00.

1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	**48.148.921.000,00**	**14.562.210.000,00**	**33.586.711.000,00**

Piutang transfer pemerintah pusat sebesar Rp48.148.921.000,00 terdiri dari saldo tahun 2024 sebesar Rp14.562.210.000,00 (KMK 44/KM.7/2024) terdapat pelunasan sebesar Rp6.269.117.000,00 dan penambahan piutang berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 sebesar Rp39.855.828.000,00 yang merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil.

1.1.11 Piutang Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Lainnya	**4.990.199.050,86**	**5.601.842.568,59**	**(611.643.517,73)**

Piutang lainnya adalah piutang yang awalnya berasal dari investasi dana bergulir yang diberikan kepada koperasi dan masyarakat dan revolving pengembangan modal usaha. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 123 Tahun 2023, guna tertib administrasi pengelolaan dana bergulir agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka dilakukan penghentian penyaluran dana bergulir. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 93 Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Piutang Dana Bergulir	Saldo Per 31 Des 2024	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Per 31 Des 2025
		Koreksi Tahun Lalu	Penambahan/ Reklasifikasi	Koreksi Tahun Lalu	Pembayaran/ Reklasifikasi	
Dana Bergulir kepada Koperasi	1.057.692.957,26	0,00	0,00	0,00	112.406.945,41	945.286.011,85
Dana Bergulir kepada Masyarakat	4.516.339.611,33	0,00	0,00	0,00	499.036.572,32	4.017.303.039,01
Jumlah Piutang Bersih	**5.574.032.568,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611.443.517,73**	**4.962.589.050,86**

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) Rp27.610.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94 Piutang Pokok dan Bunga- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian)

(dalam Rupiah)

Piutang atas Perjanjian Pinjaman Dinas Pertanian	Saldo Piutang 31 Des 2024		Mutasi 2025		Saldo Piutang 31 Desember 2025		
	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Total Piutang
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman	5.510.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00

Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
Jumlah	**27.810.000,00**	**0,00**	**(200.000,00)**	**0,00**	**27.610.000,00**	**0,00**	**27.610.000,00**

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*)– Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman senilai Rp5.310.000,00 pada Kelompok Paguyuban Ternak Sapi di desa Kembang Kecamatan Pacitan.

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*)–Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin senilai Rp22.300.000,00 yang berada pada Kelompok Gemah Ripah I di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp16.500.000,00 dan Kelompok Gemah Ripah II di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp5.800.000,00.

1.1.12 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan	**(10.085.824.108,16)**	**(9.984.650.042,75)**	**(101.174.065,41)**

Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Penggolongan Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

Piutang Pajak:

1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%
2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 2 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%
3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >2 tahun - 5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbit Belum melunasi, penyisihan 50%
4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan/atau jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%

Piutang Retribusi:

1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 0 - 1 bulan dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%
2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan - 3 bulan dan/atau 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%

3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 bulan – 12 bulan dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%
4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 12 bulan dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Selain Pajak dan Retribusi:

1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%
2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum melakukan pelunasan 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%
3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan terhitung dalam waktu Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%
4) **Kualitas macet** apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu 1 bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, penyisihan 100%.

Penyisihan Piutang Tahun 2025 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Penyisihan piutang sebesar Rp10.085.821.408,16 diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur piutang. Rekapitulasi piutang dan rincian per obyek penyisihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang daerah tersebut dirinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 95 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang 2024 (Rp)
1	**Penyisihan Piutang Pajak Daerah**	**2.223.314.161,81**	**2.172.349.430,93**
-	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	88.500,00
-	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	67.600,00
-	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	1.592.000,00
-	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	2.469.600,00	575.320,00
-	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	58.622,30
-	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.211.252.353,77	2.162.719.134,23
-	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	7.797.208,04	7.248.254,40
-	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	96.500,00	0,00
-	Piutang PBJT-Restoran	1.698.500,00	0,00
2	**Penyisihan Piutang Retribusi**	**1.005.843.674,99**	**968.039.656,55**
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	204.775.980,19	186.000.423,25
-	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	84.557.000,00
-	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	324.417.149,00	335.633.399,00
-	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	217.202.403,80	221.953.336,30
-	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Gangguan-HO)	105.325.250,00	105.325.250,00
-	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	33.527.498,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	35.111.500,00	1.024.490,00
-	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	18.260,00
-	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	34.454.392,00	0,00
3	**Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**1.866.467.220,50**	**2.075.334.386,68**
-	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	1.220.000,00
-	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	404.734.855,22	454.734.855,22
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	923.973.446,50	1.068.106.009,50

-	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	312.203.880,77	318.436.142,52
-	Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dinkes)	2.325,00	0,00
-	Piutang BLUD RSUD	10.018.963,01	10.023.629,44
-	Piutang Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht-Anggota DPRD)	214.313.750,00	222.813.750,00
4	**Piutang Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**0,00**	**0,00**
5	**Penyisihan Piutang Lainnya**	**4.990.199.050,86**	**4.768.926.568,59**
-	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Koperasi	945.286.011,85	1.047.742.957,26
-	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Masyarakat	4.017.303.039,01	3.693.373.611,33
-	Piutang Lainnya - Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat	27.610.000,00	27.810.000,00
Jumlah		**10.085.824.108,16**	**9.984.650.042,75**

Tabel 96 Rekapitulasi Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	**PIUTANG PAJAK**	**4.819.416.725,00**	**2.226.978.040,00**	**243.332.251,00**	**322.520.775,00**	**2.026.585.659,00**
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	5.112.000,00	0,00	216.000,00	4.896.000,00	0,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.251.229.118,00	667.536.433,00	243.061.251,00	314.045.775,00	2.026.585.659,00
3	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	1.559.441.607,00	1.559.441.607,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
5	Piutang PBJT-Restoran	3.441.000,00	0,00	55.000,00	3.386.000,00	0,00
2	**PIUTANG RETRIBUSI**	**10.692.843.690,80**	**9.700.544.237,00**	**0,00**	**69.917.000,00**	**922.382.453,80**
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.403.715.988,00	9.245.165.837,00	0,00	0,00	158.550.151,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
3	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	324.417.149,00	0,00	0,00	0,00	324.417.149,00
4	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	217.202.403,80	0,00	0,00	0,00	217.202.403,80
5	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Gangguan-HO)	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	499.388.000,00	433.500.000,00	0,00	65.888.000,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	58.237.900,00	21.878.400,00	0,00	4.029.000,00	32.330.500,00
3	**PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH**	**1.867.259.095,49**	**465.000,00**	**0,00**	**658.400,00**	**1.866.135.695,49**
1	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	404.734.855,22	0,00	0,00	0,00	404.734.855,22
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	924.302.646,50	0,00	0,00	658.400,00	923.644.246,50
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	658.400,00	0,00	0,00	658.400,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	923.644.246,50	0,00	0,00	0,00	923.644.246,50
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	312.203.880,77	0,00	0,00	0,00	312.203.880,77
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dinkes)	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang BLUD RSUD	10.018.963,00	0,00	0,00	0,00	10.018.963,00
7	Piutang Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht-Anggota DPRD)	214.313.750,00	0,00	0,00	0,00	214.313.750,00
4	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**48.148.921.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Piutang Dana Bagi Hasil	48.148.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PIUTANG LAINNYA**	**4.990.199.050,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.990.199.050,86**
1	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Koperasi	945.286.011,85	0,00	0,00	0,00	945.286.011,85

2	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Masyarakat	4.017.303.039,01	0,00	0,00	0,00	4.017.303.039,01
3	Piutang Lainnya - Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat	27.610.000,00	0,00	0,00	0,00	27.610.000,00
TOTAL PIUTANG		**70.518.639.562,15**	**11.927.987.277,00**	**243.332.251,00**	**393.096.175,00**	**9.805.302.859,15**

Tabel 97 Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	**PIUTANG PAJAK**	**4.819.416.725,00**	**2.226.978.040,00**	**243.332.251,00**	**322.520.775,00**	**2.026.585.659,00**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**2.223.314.161,80**	***11.134.890,20***	***24.333.225,10***	***161.260.387,50***	***2.026.585.659,00***
	NRV Piutang	2.596.102.563,20	2.215.843.149,80	218.999.025,90	161.260.387,50	0,00
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	5.112.000,00	0,00	216.000,00	4.896.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**2.469.600,00**	0,00	**21.600,00**	**2.448.000,00**	0,00
	NRV Piutang	2.642.400,00	0,00	194.400,00	2.448.000,00	0,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.251.229.118,00	667.536.433,00	243.061.251,00	314.045.775,00	2.026.585.659,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***2.211.252.353,77***	***3.337.682,17***	***24.306.125,10***	***157.022.887,50***	***2.026.585.659,00***
	NRV Piutang	1.039.976.764,24	664.198.750,84	218.755.125,90	157.022.887,50	0,00
3	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	1.559.441.607,00	1.559.441.607,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***7.797.208,04***	***7.797.208,04***	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	1.551.644.398,97	1.551.644.398,97	0,00	0,00	0,00
4	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***96.500,00***	0,00	0,00	***96.500,00***	0,00
	NRV Piutang	*96.500,00*	0,00	0,00	96.500,00	0,00
5	Piutang PBJT-Restoran	3.441.000,00	0,00	55.000,00	3.386.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.698.500,00***	0,00	***5.500,00***	***1.693.000,00***	0,00
	NRV Piutang	*1.742.500,00*	0,00	49.500,00	1.693.000,00	0,00
2	**PIUTANG RETRIBUSI**	**10.692.843.690,80**	**9.700.544.237,00**	**0,00**	**69.917.000,00**	**922.382.453,80**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.005.843.674,99***	***48.502.721,19***	***0,00***	***34.958.500,00***	***922.382.453,80***
	NRV Piutang	*9.687.000.015,82*	9.652.051.515,82	0,00	34.958.500,00	0,00
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.403.715.988,00	9.245.165.837,00	0,00	0,00	158.550.151,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***204.775.980,19***	***46.225.829,19***	***0,00***	***0,00***	***158.550.151,00***
	NRV Piutang	*9.198.940.007,82*	9.198.940.007,82	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***84.557.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***84.557.000,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	324.417.149,00	0,00	0,00	0,00	324.417.149,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***324.417.149,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***324.417.149,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	217.202.403,80	0,00	0,00	0,00	217.202.403,80
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***217.202.403,80***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***217.202.403,80***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Gangguan-HO)	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***105.325.250,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***105.325.250,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	499.388.000,00	433.500.000,00	0,00	65.888.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***35.111.500,00***	***2.167.500,00***	***0,00***	***32.944.000,00***	***0,00***
	NRV Piutang	*464.276.500,00*	431.332.500,00	0,00	32.944.000,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	58.237.900,00	21.878.400,00	0,00	4.029.000,00	32.330.500,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***34.454.392,00***	***109.392,00***	**0,00**	***2.014.500,00***	***32.330.500,00***
	NRV Piutang	*23.783.508,00*	21.769.008,00	0,00	2.014.500,00	0,00
3	**PIUTANGLAIN-LAIN PAD YANG SAH**	**1.867.259.095,49**	**465.000,00**	**0,00**	**658.400,00**	**1.866.135.695,49**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.652.153.470,49***	***2.325,00***	**0,00**	***329.200,00***	***1.651.821.945,49***
	NRV Piutang	*215.105.625,00*	462.675,00	0,00	329.200,00	214.313.750,00
1	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.220.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1.220.000,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	404.734.855,22	0,00	0,00	0,00	404.734.855,22
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***404.734.855,22***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***404.734.855,22***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	924.302.646,50	0,00	0,00	658.400,00	923.644.246,50
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***923.973.446,50***	**0,00**	**0,00**	***329.200,00***	***923.644.246,50***
	NRV Piutang	*329.200,00*	0,00	0,00	329.200,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	658.400,00	0,00	0,00	658.400,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***329.200,00***	**0,00**	**0,00**	***329.200,00***	**0,00**
	NRV Piutang	*329.200,00*	0,00	0,00	329.200,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	923.644.246,50	0,00	0,00	0,00-	923.644.246,50
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***923.644.246,50***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***923.644.246,50***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	312.203.880,77	0,00	0,00	0,00	312.203.880,77
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***312.203.880,77***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***312.203.880,77***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	*Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dinkes)*	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***2.325,00***	***2.325,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*462.675,00*	462.675,00	0,00	0,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
6	*Piutang BLUD RSUD*	10.018.963,00	0,00	0,00	0,00	10.018.963,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***10.018.963,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***10.018.963,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	*Piutang Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht-Anggota DPRD)*	214.313.750,00	0,00	0,00	0,00	214.313.750,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***214.313.750,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***214.313.750,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PIUTANG LAINNYA**	**4.990.199.050,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.990.199.050,86**
	%penyisihan		0,50%	0,50%	0,50%	100%
	Jml Penyisihan	***4.990.199.050,86***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***4.990.199.050,86***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Koperasi	945.286.011,85	0,00	0,00	0,00	945.286.011,85
	%penyisihan		0,50%	0,50%	0,50%	100%
	Jml Penyisihan	***945.286.011,85***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***945.286.011,85***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Masyarakat	4.017.303.039,01	0,00	0,00	0,00	4.017.303.039,01
	%penyisihan		0,50%	0,50%	0,50%	100%
	Jml Penyisihan	***4.017.303.039,01***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***4.017.303.039,01***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Lainnya - Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat (Revolving)	27.610.000,00	0,00	0,00	0,00	27.610.000,00
	%penyisihan		0,50%	0,50%	0,50%	100%
	Jml Penyisihan	***27.610.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***27.610.000,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PIUTANG		**22.369.718.562,15**	**11.927.987.277,00**	**243.332.251,00**	**393.096.175,00**	**9.805.302.859,15**
		0,50%	10%	50%	100%	100%
	9.871.510.358,14	***59.639.936,39***	***24.333.225,10***	***196.548.087,50***	***9.590.989.109,15***	***9.590.989.109,15***
	12.498.208.204,02	11.868.347.340,62	218.999.025,90	196.548.087,50	214.313.750,00	214.313.750,00

1.1.14 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2025 (Rp)	3 1Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	56.188.333,33	**54.115.833,33**	**2.072.500,00**

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp56.188.333,33 merupakan saldo Beban atau Belanja yang telah dibayar pada periode Tahun 2025 namun pelaksanaan kegiatan tersebut baru akan terjadi di tahun berikutnya.

Beban dibayar dimuka sebesar Rp54.115.833,33 terdiri dari pembayaran premi asuransi proteksi profesi doktersesuai Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Asuransi BUMIDA) dengan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan No. 100.3.7.1 61/SPK/408.36.27/2023 sebesar Rp34.288.333,33 dengan jangka waktu pelaksanaan penanggungan gugat 01 Agustus 2025 – 31 Juli 2026. Pembayaran biaya pelatihan sebesar Rp21.900.000,00 untuk pelatihan keperawatan neonates level 2 di RS Sardjito yang akan dilaksanakan pada bulan April 2026 sebesar Rp15.000.000,00 dan Pelatihan Ikmi Jatim Breastfeeding Professional Training dilakukan pada tahun 2026 sebesar Rp6.900.000,00.

1.1.15 Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Persediaan	**(Rp)**	**(Rp)**	**(Rp)**
	20.298.268.879,88	**25.730.049.126,76**	**(5.431.780.246,88)**

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.298.268.879,88 Persediaan dicatat dengan metode periodik dan *perpetual*. Persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, maka dicatat dengan metode *perpetual* dimana transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan dicatat dalam kartu barang.

Sedangkan persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), dicatat dengan metode periodik. Nilai mutasi persediaan pada masing-masing SKPD tanggal 31 Desember 2025 merupakan hasil *stock opname* fisik. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 98 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Keadaan	Mutasi / Perubahan		Keadaan
		Per 01 Januari 2025	Periode Januari 2025		Desember 2025
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo
1	Dinas Pendidikan	707.800,00	18.139.491.867,00	18.139.125.742,00	1.073.925,00
2	Dinas Kesehatan	13.034.260.062,97	53.995.226.683,43	54.373.782.064,86	12.655.704.681,52
3	RSUD dr. Darsono	9.300.057.065,32	39.720.202.227,36	44.212.489.108,16	4.807.770.184,52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	813.074.017,94	17.345.771.155,00	17.839.264.460,42	319.580.712,52
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		53.524.047.084,00	53.524.047.084,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja		1.783.821.125,80	1.783.821.125,80	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.647.324.950,00	1.526.088.907,00	1.725.265.691,50	1.448.148.165,50
8	Dinas Sosial		572.579.366,26	572.579.366,26	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	437.797.872,00	1.768.904.760,00	1.816.410.779,00	390.291.853,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	118.573.515,00	16.771.729.480,00	16.638.282.815,55	252.020.179,45
11	Dinas Lingkungan Hidup		845.594.481,00	845.594.481,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.091.000,00	1.273.483.143,00	1.149.995.433,00	128.578.710,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	240.055.393,00	240.055.393,00	0,00

No	SKPD	Keadaan	Mutasi / Perubahan		Keadaan
		Per 01 Januari 2025	Periode Januari 2025		Desember 2025
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo
14	Dinas Perhubungan	52.453.300,00	461.756.050,00	500.015.830,00	14.193.520,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika		109.376.470,00	109.376.470,00	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	41.155.605,00	224.133.890,00	224.133.890,00	41.155.605,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		152.656.171,00	152.656.171,00	0,00
18	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	52.697.079,00	1.575.862.880,00	1.600.403.033,00	28.156.926,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.690.000,00	376.081.306,00	393.818.896,00	21.952.410,00
20	Dinas Perikanan	39.963.755,90	1.005.781.712,00	1.015.322.044,00	30.423.423,90
21	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	30.635.977,00	3.096.784.565,00	3.084.436.761,00	42.983.781,00
22	Sekretariat Daerah	7.952.875,00	3.921.536.241,00	3.921.514.321,00	7.974.795,00
23	Sekretariat DPRD		1.089.085.661,00	1.089.085.661,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		207.765.560,00	207.765.560,00	0,00
25	Badan Keuangan Daerah	106.394.251,63	660.069.617,00	661.187.861,16	105.276.007,47
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		129.545.510,00	129.545.510,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	1.000.000,00	227.684.445,00	225.700.445,00	2.984.000,00
28	Kecamatan Donorojo		110.123.400,00	110.123.400,00	0,00
29	Kecamatan Punung		113.990.400,00	113.990.400,00	0,00
30	Kecamatan Pringkuku		155.731.096,00	155.731.096,00	0,00
31	Kecamatan Pacitan		1.116.247.976,00	1.116.247.976,00	0,00
32	Kecamatan Kebonagung	1.220.000,00	25.939.420,00	27.159.420,00	0,00
33	Kecamatan Arjosari		165.729.593,00	165.729.593,00	0,00
34	Kecamatan Nawangan		133.015.798,00	133.015.798,00	0,00
35	Kecamatan Bandar		193.609.185,00	193.609.185,00	0,00
36	Kecamatan Tegalombo		270.410.550,00	270.410.550,00	0,00
37	Kecamatan Tulakan		176.610.555,00	176.610.555,00	0,00
38	Kecamatan Ngadirojo		273.830.286,00	273.830.286,00	0,00
39	Kecamatan Sudimoro		232.045.100,00	232.045.100,00	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		471.541.434,00	471.541.434,00	0,00
JUMLAH		**25.730.049.126,76**	**224.159.163.516,85**	**229.615.720.790,71**	**20.298.268.879,88**

Nilai saldo persediaan Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.431.780.246,88 menjadi Rp20.298.268.879,88 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp25.730.049.126,76. Sedangkan rincian nilai persediaan per jenis barang pada masing-masing SKPD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :.

Tabel 99 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

A.1	**Persediaan**	**20.298.268.879,88**
A.2	**Barang Pakai Habis**	**20.298.268.879,88**
A.3	**Bahan**	**2.194.215.155,19**
•	Bahan Bangunan dan Konstruksi	312.134.166,52
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312.134.166,52
•	Bahan Kimia	1.793.413.208,77
•	Dinas Kesehatan	1.071.864.393,25
•	RSUD Dr.Darsono	721.548.815,52
•	Bahan Baku	41.155.605,00
•	Dinas Koprasi,Usaha Mikro dan Perindustrian	41.155.605,00
•	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.718.500,00
•	Dinas Kesehatan	8.398.500,00
•	Inspektorat Daerah	320.000,00
•	Isi Tabung Gas	8.370.251,00
•	Dinas Kesehatan	6.480.251,00
•	RSUD Dr.Darsono	1.890.000,00
•	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.423.423,90
•	Dinas Perikanan	30.423.423,90
B	**Suku Cadang**	**25.861.500,00**
•	Suku Cadang Alat Angkutan	25.861.500,00

•	Dinas Kesehatan	25.861.500,00
C	**Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**	**6.043.634.084,36**
•	Alat Tulis Kantor	78.864.565,17
•	Dinas Pendidikan	256.410,00
•	Dinas Kesehatan	55.144.347,07
•	RSUD Dr.Darsono	11.103.440,00
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	840.381,00
•	Dinas Perhubungan	658.000,00
•	Sekretariat Daerah	4.950.045,00
•	Badan Keuangan Daerah	4.774.192,10
•	Inspektorat Daerah	1.137.750,00
•	Kertas dan Cover	74.940.321,06
•	Dinas Pendidikan	596.070,00
•	Dinas Kesehatan	58.304.232,69
•	RSUD Dr.Darsono	8.909.970,00
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.833.165,00
•	Sekretariat Daerah	3.024.750,00
•	Badan Keuangan Daerah	745.883,37
•	Inspektorat Daerah	1.526.250,00
•	Bahan Cetak	40.678.686,50
•	RSUD Dr.Darsono	40.678.686,50
•	Benda Pos	3.830.000,00
•	Dinas Kesehatan	3.820.000,00
•	RSUD Dr.Darsono	10.000,00
•	Bahan Komputer	111.116.282,74
•	Dinas Pendidikan	104.895,00
•	Dinas Kesehatan	81.327.755,24
•	RSUD Dr.Darsono	18.803.052,50
•	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	4.146.960,00
•	Dinas Perhubungan	823.620,00
•	Badan Keuangan Daerah	5.910.000,00
•	Perabot Kantor	129.464.116,55
•	Dinas Pendidikan	84.360,00
•	Dinas Kesehatan	65.113.795,55
•	RSUD Dr.Darsono	60.058.411,00
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.557.550,00
•	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	650.000,00
•	Alat Listrik	68.702.693,47
•	Dinas Pendidikan	32.190,00
•	Dinas Kesehatan	42.978.972,27
•	RSUD Dr.Darsono	24.476.081,20
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.215.450,00
•	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.536.037.418,87
•	Dinas Kesehatan	5.403.975.829,43
•	RSUD Dr.Darsono	63.165.599,44
•	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.895.990,00
D	**Obat-obatan**	**9.819.021.996,25**
•	Obat	7.683.993.020,43
•	Dinas Kesehatan	5.425.903.553,05
•	RSUD Dr.Darsono	1.871.763.504,38
•	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	386.325.963,00
•	Obat-obatan Lainnya	2.135.028.975,82
•	RSUD Dr.Darsono	1.893.787.153,82
•	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	143.430.000,00
•	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.965.890,00
•	Badan Keuangan Daerah	93.845.932,00
E	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan**	**1.470.627.182,50**
•	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.470.627.182,50
•	Dinas Kesehatan	5.218.240,00
•	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.235.172.175,50
•	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	124.431.750,00
•	Dinas Perhubungan	12.711.900,00
•	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	28.156.926,00
•	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.952.410,00
•	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	42.983.781,00
F	**Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga**	**220.803.599,45**
•	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	220.803.599,45
•	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	220.803.599,45
G	**Natura dan Pakan**	**512.616.862,13**
•	Natura	512.616.862,13
•	Dinas Kesehatan	401.313.311,97
•	RSUD Dr.Darsono	91.575.470,16
•	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.728.080,00
H	**Persediaan Penelitian**	**11.488.500,00**
•	Persediaan Penelitian Teknologi	11.488.500,00
•	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.488.500,00

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada posisi 31 Desember Rp1.470.627.182,50 terdiri atas:

1. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada SKPD
   1) Dinas Kesehatan Rp5.218.240,00 dengan Barang berupa Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
   2) Dinas Penangulangan Bencana Daerah Rp1.235.172.175,50 dengan bahan makanan cepat saji dan Peralatan kebencanaan
   3) Dinas Kebendudukan dan Pencatatan Sipil Rp124.431.750,00 belangko KTP (Kartu Tanda Penduduk)
   4) Dinas Perhubungan Rp12.711.900,00 dengan barang Karcis Parkir Kendaraan Bermotor
   5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp28.156.926,00 Berupa Karcis wisata.
   6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp21.952.410,00 berupa buku bacaan masyarakat
   7) Dinas Perdangangan dan tenaga kerja Rp42.983.781,00 berupa karcis retribusi pasar
2. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Pada SKPD Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp220.803.599,45 Dengan barang paket Sembako

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pemusnahan obat *expired* (rusak) serta penghapusan pencatatan persediaan sebesar Rp342.941.430,15 yang diakui sebagai defisit pelepasan aset lancar pada RSUD Dr. Darsono dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor:400/7.3.4/309/408.36.27/2026 dan Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2/386/KPTS yang terdapat sebagaimana **Lampiran 10**

Selain nilai persediaan sebagaimana pada Neraca, pada tahun 2025 terdapat barang logistik bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp1.245.676.000 yang belum terdapat Berita Acara Serah Terima yang sah sebagai dasar pengakuan persediaan.

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.184.679.344,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMN/BUMD. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 terdiri dari.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen	**52.184.679.344,00**	**51.836.289.741,00**	**348.389.603,00**

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp52.184.679.344,00 terdiri dari saldo awal Tahun 2024 sebesar Rp51.836.289.741,00 ada pengurangan sebesar Rp210.281.905,00 karena koreksi ekuitas menyesuaikan Laporan Keuangan PDAM dan penambahan penyertaan dari laba PDAM sebesar Rp558.671.508,00. Adapun rincian investasi permanen Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 100 Investasi Permanen

(dalam Rupiah)

InvestasiPermanen	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
BPD Jatim	13.380.067.750,00	0,00	0,00	0,00	13.380.067.750,00
BPR Jatim	4.125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000.000,00
PDAM	34.331.221.991,00	(210.281.905,00)	558.671.508,00	0	34.679.611.594,00
Jumlah	**51.836.289.741,00**	**(210.281.905,00)**	**558.671.508,00**	**0,00**	**52.184.679.344,00**

Penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*). Metode biaya dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada Bank Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2025 sebesar 0,36% dan pada BPR Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 sebesar 0,98%. Dengan metode biaya, nilai penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya.

Sedangkan metode ekuitas dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada PDAM dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100%.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Jatim, Penyertaan Modal pada BPR Jatim, Penyertaan Modal pada PDAM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Investasi Permanen pada BPD Jatim sebesar Rp13.380.067.750,00

   Penyertaan Modal pada Bank Jatim berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim dinyatakan dalam bentuk uang sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp13.380.067.750,00. Selanjutnya tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

   Setelah Bank Jatim memberlakukan pencatatan saham IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012, maka mekanisme pembelian saham tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Pasca IPO, pembelian saham PT Bank Jatim harus melalui Bursa Efek.

   Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejak tahun 2012 sampai saat ini sejumlah 53.520.271 lembar saham dengan nilai investasi sebesar Rp13.380.067.750,00.

Tabel 101 Rincian Investasi Bank Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	Saldo Investasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
saldo 2007	2.423.102.608,00		2.423.102.608,00	Prosentase Kepemilikan Se-JawaTimur	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	750.000.000,00		3.173.102.608,00	0,47%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	750.000.000,00		3.923.102.608,00	0,56%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	750.497.648,89		4.673.600.256,89	0,58%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2011	1.500.000.000,00		6.173.600.256,89	0,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	Saldo Investasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
2012	7.207.067.750,00	600.256,89	13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2013	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2014	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2015	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2016	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2017	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2018	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2019	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2020	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2021	0,00		13.380.067.750,00	**0,36%**	Cost Metode(MetodeBiaya)
2022	0,00		13.380.067.750,00	**0,36%**	Cost Metode(MetodeBiaya)
2022	0,00		13.380.067.750,00	**0,36%**	Cost Metode(MetodeBiaya)
2023	0,00		13.380.067.750,00	**0,36%**	Cost Metode(MetodeBiaya)
2024	0,00		13.380.067.750,00	**0,36%**	Cost Metode(MetodeBiaya)
2025	0,00		13.380.067.750,00	**0,36%**	Cost Metode(MetodeBiaya)

1) Investasi Permanen pada BPR Jatim sebesar Rp4.125.000.000,00

Penyertaan modal pada BPR Jatim Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan Modal pada BPR Jatim sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp4.125.000.000,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.125.000.000,00 dan tidak ada penambahan investasi tahun 2025 dikarenakan berdasarkan Laporan Kajian Investasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Tim Penasihat Investasi atas dasar Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/579/KPTS/408.12/2022 memberikan kesimpulan berdasarkan aspek keuangan dengan menggunakan alat analisis investasi dan rasio keuangan menunjukkan bahwa investasi tidak layak dilakukan. Dari hasil Laporan Kajian Investasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur tersebut sebagai dasar terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejumlah 41.250 lembar saham yaitu 0,98%. dengan nilai investasi sebesar Rp4.125.000.000,00.

Tabel 102 Investasi Permanen pada BPR Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
saldo 2007	525.000.000,00		525.000.000,00	0,46%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	300.000.000,00		825.000.000,00	0,94%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	300.000.000,00		1.125.000.000,00	1,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	300.000.000,00		1.425.000.000,00	1,65%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2011	300.000.000,00		1.725.000.000,00	1,44%	Cost Metode(MetodeBiaya)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
2012	300.000.000,00		2.025.000.000,00	1,60%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2013	300.000.000,00		2.325.000.000,00	1,74%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2014	300.000.000,00		2.625.000.000,00	1,40%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2015	300.000.000,00		2.925.000.000,00	0,73%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2016	300.000.000,00		3.225.000.000,00	0,79%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2017	300.000.000,00		3.525.000.000,00	0,86%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2018	300.000.000,00		3.825.000.000,00	0,92%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2019	300.000.000,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2020	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2021	0,00		4.125.000.000,00	**0,99%**	Cost Metode(MetodeBiaya)
2022	0,00		4.125.000.000,00	**0,99%**	Cost Metode(MetodeBiaya)
2023	0,00		4.125.000.000,00	**0,99%**	Cost Metode(MetodeBiaya)
2024	0,00		4.125.000.000,00	**0,99%**	Cost Metode(MetodeBiaya)
2025	0,00		4.125.000.000,00	**0,98%**	Cost Metode(MetodeBiaya)

1) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp34.679.611.594,00

Tabel 103 Investasi Permanen pada PDAM

(dalam Rupiah)

InvestasiPermanen	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan Rp	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
PDAM	34.331.221.991,00	(210.281.905,00)	558.671.508,00	0,00	34.679.611.594,00
Jumlah	**34.331.221.991,00**	**(210.281.905,00)**	**558.671.508,00**	**0,00**	**34.679.611.594,00**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan, dijelaskan adanya penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang pada Tahun 2021-2023 sebesar Rp2.010.000.000,00.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp34.679.611.594,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp34.331.221.991,00 ada pengurangan sebesar 210.281.905,00 karena koreksi ekuitas menyesuaikan Laporan Keuangan PDAM dan penambahan investasi dari laba tahun berjalan sebesar 558.671.508,00 yang menambah nilai investasi atas nilai kepemilikan 100%.

Adapun rincian penambahan investasi pada PDAM dari Tahun 2007 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 104 Rincian Investasi PDAM

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	Saldo Investasi
saldo 2007	6.374.304.823,20		6.374.304.823,20
2008	250.000.000,00		6.624.304.823,20
2009	822.000.000,00		7.446.304.823,20
2010	100.000.000,00		7.546.304.823,20
2011	100.000.000,00	(5.103.266.911,04)	2.543.037.912,16
2012	100.000.000,00	(2.643.037.912,16)	0,00
2013	420.000.000,00		420.000.000,00
2014	100.000.000,00		520.000.000,00
2015	300.000.000,00		820.000.000,00
2016	300.000.000,00		1.120.000.000,00

Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	Saldo Investasi
2017	300.000.000,00		1.420.000.000,00
koreksi	7.746.304.823,20		9.166.304.823,20
2018	300.000.000,00		9.466.304.823,20
2019	300.000.000,00		9.766.304.823,20
koreksi	21.656.930.503,00		31.423.235.326,20
2020	0	319.669.261,91	31.742.904.588,11
koreksi		(1,11)	31.742.904.587,00
2021	0	863.742.043,00	32.606.646.630,00
2022	0	372.400.946,00	32.979.047.576,00
2023	0	904.034.389,00	33.883.081.965,00
koreksi		(29.682.947,00)	33.853.399.018,00
2024	0	477.822.973,00	34.331.221.991,00
koreksi		(210.281.905,00)	34.120.940.086,00
2025	0	558.671.508,00	34.679.611.594,00

Adapun Laporan Keuangan Audited PDAM Tahun Anggaran 2025 disajikan pada **Lampiran 11.**

1.3 ASET TETAP

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tetap	**1.925.354.316.964,26**	**1.886.473.769.518,30**	**38.880.547.445,96**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Adapun rincian mutasi aset tetap per golongan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 105 Mutasi Aset Tetap

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	**TANAH**	**504.177.530.580,49**	**29.577.068.050,00**	**29.900.000,00**	**533.724.698.630,49**
1	Tanah	504.177.530.580,49	29.577.068.050,00	29.900.000,00	533.724.698.630,49
KIB B	**PERALATAN DAN MESIN**	**722.564.226.484,43**	**31.624.052.121,62**	**19.736.069.394,51**	**734.452.209.211,54**
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	39.515.712.898,49	216.716.927,00	87.045.000,00	39.645.384.825,49
3	Alat Angkutan	109.553.582.243,20	2.014.071.696,87	1.029.015.000,00	110.538.638.940,07
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.890.782.754,00	249.709.534,00	3.561.310.575,00	6.579.181.713,00
5	Alat Pertanian	4.729.551.388,00	1.558.498.672,00	44.023.312,00	6.244.026.748,00
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	128.073.149.507,97	8.814.204.526,14	2.265.759.278,94	134.621.594.755,17
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	17.107.176.216,10	1.249.753.198,70	816.598.654,00	17.540.330.760,80
8	Alat Kedokteran	191.476.428.222,47	5.836.699.608,19	6.275.855.395,10	191.037.272.435,56
9	Alat Laboratorium	53.333.871.648,83	3.401.338.946,74	3.283.824.274,34	53.451.386.321,23
10	Alat Keamanan	2.561.095.974,00	2.519.700,00	0,00	2.563.615.674,00
11	Alat Komputer	152.994.863.861,10	6.142.674.058,78	1.796.080.424,58	157.341.457.495,30
12	Alat Eksplorasi	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00
13	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	213.725.800,00	416.000.000,00	0,00	629.725.800,00
15	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat Keselamatan Kerja	3.438.070.492,98	898.434.603,00	124.972.000,00	4.211.533.095,98
17	Alat Peraga	297.920.000,00	1.200.000,00	299.120.000,00	0,00
18	Peralatan Proses/Produksi	385.466.650,00	0,00	0,00	385.466.650,00
19	Rambu-Rambu	6.338.829.858,87	442.773.547,00	59.986.620,00	6.721.616.785,87
20	Peralatan Olahraga	2.640.248.968,42	379.457.103,20	92.478.860,55	2.927.227.211,07
KIB C	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**1.190.076.045.774,33**	**46.717.229.476,57**	**23.903.290.417,71**	**1.212.889.984.833,19**
21	Bangunan Gedung	1.147.455.174.786,54	43.524.205.793,91	23.903.290.417,71	1.167.076.090.162,74
22	Monumen	5.432.113.600,00	0,00	0,00	5.432.113.600,00
23	Bangunan Menara	3.440.078.692,96	129.904.114,84	0,00	3.569.982.807,80
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.748.678.694,83	3.063.119.567,82	0,00	36.811.798.262,65
KIB D	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**2.095.193.232.656,62**	**136.109.007.192,98**	**39.224.249.651,31**	**2.192.077.990.198,29**
25	Jalan dan Jembatan	1.534.317.598.748,74	25.197.082.449,00	0,00	1.559.514.681.197,74
26	Bangunan Air	334.878.937.114,29	46.415.055.399,37	62.273.195,00	381.231.719.318,66
27	Instalasi	53.180.639.668,19	64.348.934.877,07	426.456.028,00	117.103.118.517,26
28	Jaringan	172.816.057.125,40	147.934.467,54	38.735.520.428,31	134.228.471.164,63
KIB E	**ASET TETAP LAINNYA**	**94.223.186.046,87**	**7.576.478.305,19**	**3.294.709.518,00**	**98.504.954.834,06**
29	Bahan Perpustakaan	75.559.438.581,57	4.796.538.633,19	217.463.055,00	80.138.514.159,76
30	Bahan Bercorak Kebudayaan	15.130.985.146,30	782.681.565,00	0,00	15.913.666.711,30
31	Hewan	11.811.056,00	0,00	0,00	11.811.056,00
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	443.304.800,00	0,00	0,00	443.304.800,00
34	Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.077.246.463,00	1.997.258.107,00	3.077.246.463,00	1.997.258.107,00
KIB F	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**13.503.904.396,45**	**3.395.560.757,00**	**22.114.902,00**	**16.877.350.251,45**
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.503.904.396,45	3.395.560.757,00	22.114.902,00	16.877.350.251,45
	AKUMULASI PENYUSUTAN	**(2.733.264.356.420,89)**	**(210.211.824.336,74)**	**(80.303.309.762,87)**	**(2.863.172.870.994,76)**
	JUMLAH ASET TETAP	**1.886.473.769.518,30**	**44.787.571.566,62**	**5.907.024.120,66**	**1.925.354.316.964,26**

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.925.354.316.964,26 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**Rp**	**4.619.738.125.939,19**
Penambahan Tahun 2025	Rp	254.999.395.903,36
Pengurangan Tahun 2025	Rp	(86.210.333.883,53)
Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2025	Rp	**4.788.527.187.959,02**
Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp	(2.863.172.870.994,76)
Saldo Nilai Buku per 31 Desember 2025	**Rp**	**1.925.354.316.964,26**

Nilai Perolehan Aset Tetap senilai Rp4.619.738.125.939,19 belum termasuk di dalamnya Bantuan Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Sebesar Rp12.308.548.000,00 yang belum dapat diakui sebagai aset tetap dikarenakan belum adanya Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Dinas

Pendidikan. Penerima bantuan Satuan Pendidikan Negeri pada masing-masing jenjang yaitu:

1) PAUD Negeri sebanyak 4 (empat) Satuan Pendidikan yang masing-masing menerima barang berupa Interactive Flat Panel (IFP), Laptop dan Hardisk.
2) SD Negeri sebanyak 400 (empat ratus) Satuan Pendidikan yang seluruhnya telah menerima barang berupa IFP dan terdapat 7 (tujuh) SD Negeri yang menerima 2 (dua) buah karena dilakukan regrouping.
3) SMP Negeri sebanyak 50 (lima puluh) satuan pendidikan yang masing-masing menerima barang berupa IFP.

Nilai Aset *extracomptabel* dan akumulasi penyusutan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagaimana **Lampiran 12.**

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan *entry* data dan penjurnalan aset pada Aplikasi Terintegrasi Akuntansi.

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2025 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1 Tanah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Tanah	**533.724.698.630,49**	**504.177.530.580,49**	**29.547.168.050,00**

Jumlah tersebut merupakan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 106 Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Tanah	504.177.530.580,49	29.577.068.050,00	29.900.000,00	533.724.698.630,49
JUMLAH	**504.177.530.580,49**	**29.577.068.050,00**	**29.900.000,00**	**533.724.698.630,49**

Dengan rincian mutasi aset tanah per Perangkat Daerah sebagai berikut.

Tabel 107 Mutasi Tanah Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	32.247.942.762,00	717.153.000,00	0,00	32.965.095.762,00
Dinas Kesehatan	8.476.379.935,00	996.720.000,00	0,00	9.473.099.935,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.795.611.000,00	2.021.823.000,00	0,00	10.817.434.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.509.276.278,00	0,00	0,00	121.509.276.278,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.738.512.630,00	3.933.608.350,00	0,00	9.672.120.980,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Dinas Sosial	3.045.517.000,00	493.250.000,00	994.240.000,00	2.544.527.000,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.872.443.750,00	31.200.000,00	0,00	19.903.643.750,00
Dinas Lingkungan Hidup	14.827.776.763,00	1.357.709.000,00	0,00	16.185.485.763,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	791.036.000,00	0,00	0,00	791.036.000,00
Dinas Perhubungan	14.138.320.172,00	0,00	0,00	14.138.320.172,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	1.554.144.012,00	280.500.000,00	280.500.000,00	1.554.144.012,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	375.000.000,00	0,00	0,00	375.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.418.400.000,00	0,00	0,00	1.418.400.000,00

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Perikanan	987.741.300,00	26.662.000,00	0,00	1.014.403.300,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	96.178.259.676,99	0,00	29.900.000,00	96.148.359.676,99
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	28.789.429.010,00	498.855.000,00	0,00	29.288.284.010,00
Badan Keuangan Daerah	69.221.391.418,95	28.354.088.700,00	5.531.572.000,00	92.043.908.118,95
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	493.250.000,00	0,00	493.250.000,00	0,00
Inspektorat Daerah	261.100.000,00	4.460.683.000,00	3.328.178.000,00	1.393.605.000,00
Sekretariat Daerah	24.825.065.300,00	0,00	0,00	24.825.065.300,00
Sekretariat DPRD	2.007.850.000,00	0,00	0,00	2.007.850.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	392.250.000,00	0,00	0,00	392.250.000,00
Kecamatan Donorojo	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00
Kecamatan Punung	796.250.000,00	0,00	0,00	796.250.000,00
Kecamatan Pacitan	41.793.308.572,55	261.100.000,00	3.228.544.000,00	38.825.864.572,55
Kecamatan Kebonagung	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Kecamatan Arjosari	297.000.000,00	0,00	0,00	297.000.000,00
Kecamatan Nawangan	237.450.000,00	0,00	0,00	237.450.000,00
Kecamatan Bandar	181.950.000,00	0,00	0,00	181.950.000,00
Kecamatan Tegalombo	810.000.000,00	0,00	0,00	810.000.000,00
Kecamatan Tulakan	354.100.000,00	0,00	0,00	354.100.000,00
Kecamatan Ngadirojo	2.717.400.000,00	0,00	0,00	2.717.400.000,00
Kecamatan Sudimoro	333.375.000,00	0,00	0,00	333.375.000,00
JUMLAH	**504.177.530.580,49**	**43.433.352.050,00**	**13.886.184.000,00**	**533.724.698.630,49**

Adapun rincian mutasi aset tanah sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset tanah antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp13.856.284.000,00

Sedangkan mutasi aset tanah selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

Tanah				
Saldo Awal			**Rp**	**504.177.530.580,49**
Penambahan			**Rp**	**29.577.068.050,00**
Pengadaan	Rp	3.933.608.350,00		
Reklas dari Properti Investasi	Rp	280.500.000,00		
Hibah Masuk	Rp	19.302.326.700,00		
Kurang Catat	Rp	6.060.633.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**29.900.000,00**
Hibah Keluar	Rp	29.900.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**533.724.698.630,49**

Penambahan nilai tanah selama Tahun 2025 berasal dari:

1) Pengadaan belanja modal tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp3.933.608.350,00.
2) Reklas dari Properti Investasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian senilai Rp280.500.000,00.
3) Hibah Masuk tanah pada Badan Keuangan Daerah senilai Rp19.302.326.700,00 berupa Tanah Jalan dari Kementerian PUPR.

4) Kurang catat tanah senilai Rp6.060.633.000,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

   a. Dinas Kesehatan senilai Rp872.900.000,00
   b. Badan Keuangan Daerah senilai Rp727.050.000,00.
   c. Inspektorat Daerah senilai Rp4.460.683.000,00

Sedangkan pengurangan tanah selama Tahun 2025 berasal dari:

1) Hibah Keluar Tanah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp29.900.000,00 dihibahkan ke Polres.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Peralatan Dan Mesin	**734.452.209.211,54**	**722.564.226.484,43**	**11.887.982.727,11**

Dengan rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah sebagai berikut.

Tabel 108 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	39.515.712.898,49	216.716.927,00	87.045.000,00	39.645.384.825,49
Alat Angkutan	109.553.582.243,20	2.014.071.696,87	1.029.015.000,00	110.538.638.940,07
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.890.782.754,00	249.709.534,00	3.561.310.575,00	6.579.181.713,00
Alat Pertanian	4.729.551.388,00	1.558.498.672,00	44.023.312,00	6.244.026.748,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	128.073.149.507,97	8.814.204.526,14	2.265.759.278,94	134.621.594.755,17
Alat Studio dan Alat Komunikasi	17.107.176.216,10	1.249.753.198,70	816.598.654,00	17.540.330.760,80
Alat Kedokteran	191.476.428.222,47	5.836.699.608,19	6.275.855.395,10	191.037.272.435,56
Alat Laboratorium	53.333.871.648,83	3.401.338.946,74	3.283.824.274,34	53.451.386.321,23
Alat Keamanan	2.561.095.974,00	2.519.700,00	0,00	2.563.615.674,00
Alat Komputer	152.994.863.861,10	6.142.674.058,78	1.796.080.424,58	157.341.457.495,30
Alat Eksplorasi	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	213.725.800,00	416.000.000,00	0,00	629.725.800,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	3.438.070.492,98	898.434.603,00	124.972.000,00	4.211.533.095,98
Alat Peraga	297.920.000,00	1.200.000,00	299.120.000,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	385.466.650,00	0,00	0,00	385.466.650,00
Rambu-Rambu	6.338.829.858,87	442.773.547,00	59.986.620,00	6.721.616.785,87
Peralatan Olahraga	2.640.248.968,42	379.457.103,20	92.478.860,55	2.927.227.211,07
JUMLAH	**722.564.226.484,43**	**31.624.052.121,62**	**19.736.069.394,51**	**734.452.209.211,54**

Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin per golongan diatas masih memperhitungkan nilai reklas tambah dan reklas kurang per golongan peralatan dan mesin sebesar Rp3.038.307.595,46.

Rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 109 Mutasi Peralatan dan Mesin Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	182.723.653.968,06	5.144.668.830,00	305.371.862,91	187.562.950.935,15

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan	122.578.510.105,71	9.830.585.606,00	10.373.870.106,45	122.035.225.605,26
Rumah Sakit Umum Daerah	195.406.384.278,17	5.163.627.212,00	0,00	200.570.011.490,17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.287.909.688,00	1.916.651.720,00	1.776.000,00	24.202.785.408,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.544.772.863,00	388.762.221,00	12.690.000,00	3.920.845.084,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.160.733.381,05	259.585.345,00	0,00	7.420.318.726,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.014.288.372,00	513.143.327,00	385.633.000,00	7.141.798.699,00
Dinas Sosial	2.164.602.125,00	99.594.280,00	152.091.400,00	2.112.105.005,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.575.983.969,16	749.298.724,00	2.348.100,00	9.322.934.593,16
Dinas Lingkungan Hidup	17.661.190.846,00	529.166.260,20	432.490.700,00	17.757.866.406,20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.136.337.618,00	79.421.150,00	283.275.300,00	4.932.483.468,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.380.506.165,00	106.859.700,00	0,00	1.487.365.865,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.811.853.180,51	88.816.500,00	693.225.999,00	7.207.443.681,51
Dinas Perhubungan	11.614.617.235,00	136.407.708,00	84.826.000,00	11.666.198.943,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.356.466.896,00	255.740.900,00	325.074.750,00	6.287.133.046,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	3.132.135.404,00	62.234.620,00	175.087.500,00	3.019.282.524,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.892.179.590,00	27.572.800,00	1.000.000,00	2.918.752.390,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.458.593.460,00	247.034.267,96	32.663.970,00	3.672.963.757,96
Dinas Perikanan	5.845.079.960,00	35.562.580,00	1.674.750.000,00	4.205.892.540,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	8.236.872.801,85	462.929.392,00	24.975.000,00	8.674.827.193,85
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	6.881.092.502,00	371.520.425,00	16.905.754,00	7.235.707.173,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.097.692.936,00	216.715.050,00	25.688.750,00	4.288.719.236,00
Badan Keuangan Daerah	25.197.512.825,69	4.771.754.070,00	10.594.966.518,69	19.374.300.377,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.013.702.225,00	310.520.000,00	639.352.080,00	2.684.870.145,00
Inspektorat Daerah	2.820.979.395,05	1.757.605.272,00	304.000.000,00	4.274.584.667,05
Sekretariat Daerah	27.067.042.251,00	1.369.993.797,00	153.638.350,00	28.283.397.698,00
Sekretariat DPRD	9.360.955.573,00	2.595.882.952,00	342.718.405,00	11.614.120.120,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.508.317.791,00	79.915.800,00	215.250.000,00	1.372.983.591,00
Kecamatan Donorojo	1.322.183.346,33	113.683.830,00	0,00	1.435.867.176,33
Kecamatan Punung	1.241.432.507,33	83.694.000,00	95.576.900,00	1.229.549.607,33
Kecamatan Pringkuku	1.087.216.126,00	42.111.258,00	0,00	1.129.327.384,00
Kecamatan Pacitan	3.338.131.500,00	975.052.443,00	109.899.300,00	4.203.284.643,00
Kecamatan Kebonagung	1.822.191.182,00	142.585.340,00	0,00	1.964.776.522,00
Kecamatan Arjosari	1.346.076.876,00	9.615.000,00	0,00	1.355.691.876,00
Kecamatan Nawangan	1.019.215.753,33	0,00	0,00	1.019.215.753,33
Kecamatan Bandar	1.002.270.460,53	26.850.000,00	0,00	1.029.120.460,53
Kecamatan Tegalombo	1.317.353.573,33	49.968.018,00	814.000,00	1.366.507.591,33
Kecamatan Tulakan	1.560.120.216,33	76.921.190,00	34.097.600,00	1.602.943.806,33
Kecamatan Ngadirojo	1.407.819.905,00	237.223.485,00	0,00	1.645.043.390,00
Kecamatan Sudimoro	1.170.247.633,00	52.765.000,00	0,00	1.223.012.633,00
JUMLAH	**722.564.226.484,43**	**39.382.040.073,16**	**27.494.057.346,05**	**734.452.209.211,54**

Adapun rincian mutasi aset peralatan dan mesin sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset peralatan dan mesin antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp10.796.295.547,00. Sedangkan mutasi

peralatan dan mesin selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN				
Saldo Awal			**Rp**	**722.564.226.484,43**
Penambahan			**Rp**	**28.585.744.526,16**
Pengadaan	Rp	26.626.928.884,20		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	430.854.962,00		
Reklas dari Aset Lain	Rp	12.000.000,00		
Hibah Masuk	Rp	1.354.796.261,96		
Kurang Catat	Rp	74.530.000,00		
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	86.634.418,00		
Pengurangan			**Rp**	**16.697.761.799,05**
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	31.375.000,00		
Extracomptable	Rp	701.593.871,51		
Lebih Catat	Rp	70.004.250,00		
Penghapusan Penjualan	Rp	11.919.115.592,54		
Penghapusan Hibah	Rp	3.975.673.085,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**734.452.209.211,54**

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 berasal dari:

1) Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp26.626.928.884,20. Pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	4.977.690.302,00
Dinas Kesehatan	Rp	9.467.762.471,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	4.935.324.712,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	216.951.720,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	388.762.221,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	153.253.045,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	100.036.400,00
Dinas Sosial	Rp	87.632.280,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	113.081.524,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	456.122.710,20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	79.421.150,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	106.859.700,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	88.816.500,00
Dinas Perhubungan	Rp	136.407.708,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	225.790.900,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Rp	62.234.620,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	26.074.300,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	212.519.268,00
Dinas Perikanan	Rp	35.562.580,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	306.180.750,00

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	229.735.008,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	216.715.050,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	77.604.540,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	83.720.000,00
Inspektorat Daerah	Rp	1.416.768.032,00
Sekretariat Daerah	Rp	888.202.797,00
Sekretariat DPRD	Rp	657.482.952,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	52.713.300,00
Kecamatan Donorojo	Rp	105.525.330,00
Kecamatan Punung	Rp	52.725.000,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	37.604.258,00
Kecamatan Pacitan	Rp	307.596.443,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	142.585.340,00
Kecamatan Arjosari	Rp	4.440.000,00
Kecamatan Bandar	Rp	26.850.000,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	46.660.218,00
Kecamatan Tulakan	Rp	64.231.190,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	26.519.565,00
Kecamatan Sudimoro	Rp	12.765.000,00
JUMLAH	**Rp**	**26.626.928.884,20**

2) Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp430.854.962,00 pada Perangkat Daerah:

a. Dinas Pendidikan senilai Rp29.187.350,00 berupa Alat Pendingin, Mebel, Pompa dan Alat Rumah Tangga dari Beban Alat/Bahan Perabot Kantor, Bahan Komputer dan Alat Listrik.

b. Dinas Kesehatan senilai Rp17.205.000,00 berupa Mebel dan Alat Kantor Lainnya dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya, Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi dan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.

c. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp10.367.400,00 berupa Alat Ukur Faslestrik dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.

d. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp73.043.550,00 berupa Tempat Sampah dari Beban Alat Bahan Perabot Kantor.

e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.498.500,00 berupa Hardisk dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Bahan Komputer.

f. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp16.681.042,00 berupa Alat Rumah Tangga, Peralatan Personal Komputer , dan Pompa dari Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi dan Beban Alat Bahan Kegiatan KantorBahan Komputer.

g. Kecamatan Punung senilai Rp30.969.000,00 berupa Backdrop dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.

h. Kecamatan Pringkuku senilai Rp4.507.000,00 berupa Backdrop dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.

i. Kecamatan Ngadirojo senilai Rp207.396.120,00 berupa Pakaian Olahraga, Alat Rumah Tangga dan Mebel dari Beban Alat Bahan Perlengkapan Dinas dan Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.

j. Kecamatan Sudimoro senilai Rp40.000.000,00 berupa Backdrop dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.

3) Reklas dari Aset Lain lain senilai Rp12.000.000,00 berupa Sepeda Motor.

4) Hibah masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp1.354.796.261,96 yaitu pada Perangkat Daerah berikut:

a. Dinas Pendidikan senilai Rp96.094.000,00 berupa Mebel dan Alat Kantor dari Pemerintah Pusat.
b. Dinas Kesehatan senilai Rp332.213.135,00 berupa Alat Kedokteran Umum dari Kementerian Kesehatan dan Penyedia.
c. RSUD dr. Darsono senilai Rp29.650.000,00 berupa Mebel dari Bank Jatim.
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp.413.106.927,00 berupa Rambu dari BNPB dan Alat Keselamatan Kerja dari BPBD Provinsi.
e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp449.217.200 berupa Sepeda Motor dari Kementerian Pertanian.
f. Dinas Perpustakaan senilai Rp34.514.999,96 berupa Sepeda Motor Keliling dan Alat Penyimpanan dari Perpustakaan RI.

5) Kurang Pencatatan Peralatan dan Mesin senilai Rp74.530.000,00 berupa Mobil pada Badan Keuangan Daerah.

6) Reklas tambah antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp86.634.418,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	Rp	41.697.178,00
Inspektorat Daerah	Rp	44.937.240,00
JUMLAH	**Rp**	**86.634.418,00**

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 terdiri dari:

1) Reklas kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp31.375.000,00 pada Sekretariat Daerah.

2) Belanja Modal Masuk *Extracomptable* Aset Peralatan Mesin Tahun 2025 yang nilainya dibawah batas kapitalisasi senilai Rp701.593.871,51 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	305.371.862,91
Dinas Kesehatan	Rp	332.270.734,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.776.000,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	2.348.100,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	350.700,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	32.663.970,00

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	2.105.754,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	7.908.750,00
Sekretariat Daerah	Rp	15.984.000,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	814.000,00
JUMLAH	**Rp**	**701.593.871,51**

3) Lebih Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp70.004.250,00 merupakan Aset Tahun Lalu yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi asset tetap dan seharusnya masuk Extracomptable.pada Perangkat Daerah :
   a. BPBD senilai Rp39.903.000,00 berupa Peralatan Jaringan, Mebel dan Alat SAR.
   b. Dinas Perhubungan senilai Rp3.996.000,00 berupa Mebel.
   c. Dinas Penananaman Modal senilai Rp1.000.000,00 berupa Mebel.
   d. Sekretariat Daerah senilai Rp25.105.250,00 berupa Peralatan Studio Audio.
4) Penghapusan Aset Tetap karena Penjualan untuk Peralatan dan Mesin sesuai SK Penghapusansenilai Rp11.919.115.592,54 pada Perangkat Daerah :

Dinas Kesehatan	Rp	9.715.586.871,85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	345.730.000,00
Dinas Sosial	Rp	152.091.400,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	84.653.300,00
Dinas PPKB PPPA	Rp	359.935.999,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	746.317.416,69
Sekretariat DPRD	Rp	320.824.405,00
Kecamatan Punung	Rp	95.576.900,00
Kecamatan Pacitan	Rp	98.399.300,00
JUMLAH	**Rp**	**11.919.115.592,54**

5) Penghapusan Aset Tetap karena Hibah keluar Peralatan dan Mesin sesuai SK Penghapusan senilai Rp3.975.673.085,00 pada Perangkat Daerah:
   a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp297.920.000 berupa BKB Kit ke Desa.
   b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp17.780.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer ke Sekolah dan Desa.
   c. Badan Keuangan Daerah senilai Rp3.659.973.085 berupa Perkakas Bengkel, Alat Rumah Tangga dan Mobil.

Nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp734.452.209.211,54 belum termasuk didalamnya bantuan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp3.996.516.000 yang belum terdapat Berita Acara Serah Terima yang sah sebagai dasar pemindahtanganan dari BMN menjadi BMD sebagaimana **Lampiran 18.**

1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	Rp
Gedung dan Bangunan	**1.212.889.984.833,19**	**1.190.076.045.774,33**	**22.813.939.058,86**

Jumlah tersebut merupakan total nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 110 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bangunan Gedung	1.147.455.174.786,54	43.524.205.793,91	23.903.290.417,71	1.167.076.090.162,74
Monumen	5.432.113.600,00	0,00	0,00	5.432.113.600,00
Bangunan Menara	3.440.078.692,96	129.904.114,84	0,00	3.569.982.807,80
Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.748.678.694,83	3.063.119.567,82	0,00	36.811.798.262,65
JUMLAH	**1.190.076.045.774,33**	**46.717.229.476,57**	**23.903.290.417,71**	**1.212.889.984.833,19**

Adapun rincian mutasi gedung dan bangunan per golongan diatas masih memperhitungkan nilai reklas tambah dan reklas kurang per golongan gedung dan bangunan sebesar Rp1.706.928.629,66.

Rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 111 Mutasi Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	480.627.644.210,40	12.739.125.390,94	1.608.066.240,90	491.758.703.360,44
Dinas Kesehatan	136.206.526.959,90	7.229.403.362,97	1.373.406.990,18	142.062.523.332,69
Rumah Sakit Umum Daerah	122.955.127.408,51	6.031.481.965,00	2.937.611.081,00	126.048.998.292,51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.203.913.297,52	2.954.775.594,00	1.632.798.237,00	12.525.890.654,52
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	721.090.022,00	271.132.700,00	0,00	992.222.722,00
Satuan Polisi Pamong Praja	609.873.661,02	225.723.614,05	0,00	835.597.275,07
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.213.037.000,00	145.951.332,00	0,00	1.358.988.332,00
Dinas Sosial	1.954.029.254,85	1.320.126.117,00	20.790.000,00	3.253.365.371,85
Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.214.137.172,17	111.869.000,00	111.869.000,00	18.214.137.172,17
Dinas Lingkungan Hidup	19.014.031.972,01	1.176.846.592,00	24.934.762,00	20.165.943.802,01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.779.899.702,00	0,00	0,00	2.779.899.702,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.292.509.872,00	0,00	0,00	1.292.509.872,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.575.353.784,11	248.781.832,00	248.781.832,00	7.575.353.784,11
Dinas Perhubungan	9.043.810.408,38	2.446.696.491,00	4.964.848.700,00	6.525.658.199,38
Dinas Komunikasi dan Informatika	789.047.200,00	0,00	0,00	789.047.200,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	5.944.275.795,36	20.295.000,00	45.466.000,00	5.919.104.795,36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.811.095.157,24	86.204.412,00	0,00	2.897.299.569,24
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.350.102.544,15	359.969.990,85	0,00	5.710.072.535,00
Dinas Perikanan	13.775.317.600,14	216.845.000,00	1.498.109.555,40	12.494.053.044,74
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	169.049.906.768,83	7.035.163.716,00	7.648.164.043,57	168.436.906.441,26
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	87.889.780.587,86	803.893.500,00	71.780.000,00	88.621.894.087,86
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.711.285.313,00	0,00	0,00	4.711.285.313,00

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Badan Keuangan Daerah	22.629.543.169,40	2.016.199.814,05	2.197.270.296,90	22.448.472.686,55
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.916.133.307,00	0,00	1.232.641.930,00	2.683.491.377,00
Inspektorat Daerah	692.064.354,59	2.422.747.550,00	349.707.940,00	2.765.103.964,59
Sekretariat Daerah	22.412.316.025,36	99.513.398,00	0,00	22.511.829.423,36
Sekretariat DPRD	7.829.365.986,00	0,00	0,00	7.829.365.986,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	709.571.850,00	0,00	0,00	709.571.850,00
Kecamatan Donorojo	2.467.668.747,92	0,00	0,00	2.467.668.747,92
Kecamatan Punung	1.995.747.372,41	0,00	225.723.614,05	1.770.023.758,36
Kecamatan Pringkuku	1.881.102.947,26	0,00	0,00	1.881.102.947,26
Kecamatan Pacitan	8.768.438.082,38	247.412.662,00	0,00	9.015.850.744,38
Kecamatan Kebonagung	1.689.293.316,00	205.602.139,00	0,00	1.894.895.455,00
Kecamatan Arjosari	2.020.185.017,67	0,00	0,00	2.020.185.017,67
Kecamatan Nawangan	1.032.709.660,00	0,00	0,00	1.032.709.660,00
Kecamatan Bandar	1.738.811.962,58	0,00	0,00	1.738.811.962,58
Kecamatan Tegalombo	1.686.891.408,18	0,00	0,00	1.686.891.408,18
Kecamatan Tulakan	1.402.489.408,56	0,00	0,00	1.402.489.408,56
Kecamatan Ngadirojo	2.200.316.180,57	590.148.109,00	0,00	2.790.464.289,57
Kecamatan Sudimoro	1.271.601.287,00	0,00	0,00	1.271.601.287,00
JUMLAH	**1.190.076.045.774,33**	**49.005.909.281,86**	**26.191.970.223,00**	**1.212.889.984.833,19**

Adapun rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset Gedung dan Bangunan antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp3.995.608.434,95. Sedangkan mutasi aset Gedung dan Bangunan selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut

GEDUNG DAN BANGUNAN				
Saldo Awal			**Rp**	**1.190.076.045.774,33**
Penambahan			**Rp**	**45.010.300.846,91**
Pengadaan	Rp	29.602.423.738,88		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	236.526.986,09		
Reklas dari Properti Investasi		5.879.288.127,00		
Pencatatan Aset dari Utang Belanja Modal	Rp	15.704.280,00		
Hibah Masuk	Rp	6.301.659.714,94		
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	2.974.698.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**22.196.361.788,05**
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	6.824.163.108,61		
Reklas ke Pemeliharaan	Rp	508.320.642,38		
Tercatat Tahun Lalu karena Utang Belanja Modal	Rp	27.169.470,00		
Lebih Catat	Rp	4.465.211.309,18		
Penghapusan	Rp	9.122.842.702,48		
Hibah Keluar	Rp	1.248.654.555,40		
Saldo Akhir			**Rp**	**1.212.889.984.833,19**

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 berasal dari:

1) Pengadaan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp29.602.423.738,88 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	6.297.513.576,00
Dinas Kesehatan	Rp	7.140.759.426,88
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	6.015.777.685,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.954.775.594,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	271.132.700,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	145.951.332,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	111.869.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	544.846.892,00
Dinas Perikanan	Rp	216.845.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	2.590.185.121,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	649.893.500,00
Inspektorat Daerah	Rp	2.422.747.550,00
Kecamatan Pacitan	Rp	222.477.900,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	17.648.462,00
JUMLAH	**Rp**	**29.602.423.738,88**

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset Gedung dan Bangunan berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek.

2) Pengakuan aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp236.526.986,09 terdiri dari :

   a. Dinas Pendidikan senilai Rp139.952.100,00 berupa Taman dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung.
   b. Dinas Kesehatan senilai Rp88.643.936,09 berupa Bangunan Parkir dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung.
   c. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp7.930.950,00 berupa Bangunan Fasilitas Umum dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan.

3) Reklas dari Properti Investasi senilai Rp5.879.288.127,00 pada Perangkat Daerah:

   a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp.248.781.832,00 berupa Bangunan Gedung Kantor.
   b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Olahraga senilai Rp4.444.978.595,00 berupa Gedung Pertemuan.
   c. Dinas Perhubungan senilai Rp1.165.232.700,00 berupa Bangunan Gedung.
   d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Mikro senilai Rp20.295.000,00 berupa Bangunan Gedung Pertokoan.

4) Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan pada RSUD dr. Darsono senilai Rp15.704.280,00 dari Utang Belanja Modal Bangunan Gedung.

5) Hibah masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp6.301.659.714,94 pada Dinas Pendidikan berupa Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Pendidikan.

6) Reklas tambah antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp2.974.698.000,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Sosial	Rp	87.484.187,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	624.068.750,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.081.463.791,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	86.204.412,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	217.861.676,00
Sekretariat Daerah	Rp	99.513.398,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	187.953.677,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	590.148.109,00
JUMLAH	**Rp**	**2.974.698.000,00**

Adapun pengurangan nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 berasal dari:

1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp6.824.163.108,61 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Inspektorat Daerah	Rp	1.031.116.699,00
Dinas Kesehatan	Rp	485.119.146,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	2.910.441.611,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.632.798.237,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	103.587.400,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	544.382.775,61
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	71.780.000,00
Inspektorat Daerah	Rp	44.937.240,00
JUMLAH	**Rp**	**6.824.163.108,61**

2) Reklas ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp508.320.642,38 pada Perangkat Daerah:

   a. Dinas Pendidikan sebesar Rp350.786.380,90.
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp68.635.535,00.
   c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp8.281.600,00.
   d. Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp80.617.126,48.

3) Pencatatan aset Gedung dan Bangunan Utang Belanja Gedung senilai Rp27.169.470,00 pada RSUD dr. Darsono yang dibayarkan pada Tahun 2025, Sehingga Belanja Modalnya digunakan untuk Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun Lalu tidak Menambah Aset di 2025.

4) Lebih Catat Gedung dan Bangunan senilai Rp4.465.211.309,18 pada Perangkat Daerah:

   a. Dinas Kesehatan senilai Rp665.595.309,18 berupa Bangunan yang dobel pencatatan dengan Desa.

b. Dinas Perhubungan senilai Rp3.799.616.000,00 berupa Bangunan Parkir dan Gedung Kantor.

5) Penghapusan Aset Tetap karena Penjualan dan Pemusnahan untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp9.122.842.702,48 sesuai SK Penghapusan terdiri dari :

Dinas Pendidikan	Rp	226.163.161,00
Dinas Kesehatan	Rp	154.057.000,00
Dinas Perikanan	Rp	249.455.000,00
Inspektorat Daerah	Rp	304.770.700,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.165.232.700,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	7.023.164.141,48
JUMLAH	**Rp**	**9.122.842.702,48**

6) Penghapusan Aset Tetap karena Hibah Keluar Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp1.248.654.555,40 pada Dinas Perikanan berupa Bangunan Peternakan, Bangunan Gudang dan Gedung Kantor yang dihibahkan ke Pokdahkan, Poklahsar, SDIT dan Ke Desa.

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**2.192.077.990.198,29**	**2.095.193.232.656,62**	**96.884.757.541,67**

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 112 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Jalan dan Jembatan	1.534.317.598.748,74	25.197.082.449,00	0,00	1.559.514.681.197,74
Bangunan Air	334.878.937.114,29	46.415.055.399,37	62.273.195,00	381.231.719.318,66
Instalasi	53.180.639.668,19	64.348.934.877,07	426.456.028,00	117.103.118.517,26
Jaringan	172.816.057.125,40	147.934.467,54	38.735.520.428,31	134.228.471.164,63
JUMLAH	**2.095.193.232.656,62**	**136.109.007.192,98**	**39.224.249.651,31**	**2.192.077.990.198,29**

Adapun rincian mutasi jalan, irigasi, dan jaringan per golongan diatas masih memperhitungkan nilai reklas tambah dan reklas kurang per golongan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp. 38.874.995.488,31.

Rincian mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 113 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	41.151.918.772,73	2.091.804.807,06	0,00	43.243.723.579,79
Dinas Kesehatan	8.147.716.023,15	0,00	0,00	8.147.716.023,15
Rumah Sakit Umum Daerah	15.331.549.974,15	351.246.313,00	6.909.195,00	15.675.887.092,15
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.751.950.435.631,97	24.600.202.753,00	442.071.645,00	1.776.108.566.739,97
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	48.122.505.352,70	3.059.627.962,00	0,00	51.182.133.314,70
Satuan Polisi Pamong Praja	33.980.650,00	0,00	0,00	33.980.650,00

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.955.000,00	0,00	0,00	9.955.000,00
Dinas Sosial	18.876.000,00	57.712.600,00	0,00	76.588.600,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	97.896.850.910,06	136.260.390,00	0,00	98.033.111.300,06
Dinas Lingkungan Hidup	7.535.650.989,14	13.886.256.450,00	2.434.161.987,14	18.987.745.452,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	71.925.000,00	0,00	0,00	71.925.000,00
Dinas Perhubungan	26.156.623.387,00	0,00	0,00	26.156.623.387,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	13.860.000,00	0,00	0,00	13.860.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.809.022,00	0,00	0,00	34.809.022,00
Dinas Perikanan	19.041.693.338,02	25.486.500,00	0,00	19.067.179.838,02
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	30.459.173.894,71	1.449.720.453,61	0,00	31.908.894.348,32
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	898.330.690,00	71.780.000,00	0,00	970.110.690,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	57.297.737,35	0,00	0,00	57.297.737,35
Badan Keuangan Daerah	44.011.267.848,64	69.609.809.266,14	18.910.193.175,14	94.710.883.939,64
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	57.712.600,00	0,00	57.712.600,00	0,00
Inspektorat Daerah	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
Sekretariat Daerah	801.293.295,00	0,00	0,00	801.293.295,00
Sekretariat DPRD	95.852.840,00	0,00	0,00	95.852.840,00
Kecamatan Pacitan	3.219.503.700,00	3.378.250.187,14	0,00	6.597.753.887,14
Kecamatan Kebonagung	0,00	17.648.462,00	0,00	17.648.462,00
Kecamatan Ngadirojo	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Kecamatan Sudimoro	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
JUMLAH	**2.095.193.232.656,62**	**118.735.806.143,95**	**21.851.048.602,28**	**2.192.077.990.198,29**

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp2.192.077.990.198,29 belum termasuk didalamnya terdapat jembatan yang berada di Goa Gong yang dibangun sekitar tahun 2017 oleh Kementerian PUPR, namun sampai saat ini belum ada Berita Acara Serah Terima dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga asset tersebut belum dicatat asset Pemerintah Kabupaten Pacitan di perangkat daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Adapun rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp21.501.794.439,28. Sedangkan mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Awal			**Rp**	**2.095.193.232.656,62**
Penambahan			**Rp**	**97.234.011.704,67**
Pengadaan	Rp	27.094.777.231,00		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	1.582.223.787,00		
Hibah Masuk	Rp	66.703.595.349,06		
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	1.853.415.337,61		
Pengurangan			**Rp**	**349.254.163,00**

Koreksi/Reklas Kurang Tercatat Tahun Lalu karena Utang Belanja Modal	Rp	342.344.968,00		
	Rp	6.909.195,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**2.192.077.990.198,29**

Penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2025 berasal dari:

1) Pengadaan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp27.094.777.231,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	351.246.313,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	22.233.615.592,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	2.805.579.262,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	14.050.364,00
Dinas Perikanan	Rp	25.486.500,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	720.711.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	944.088.200,00
JUMLAH	Rp	**27.094.777.231,00**

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek

2) Kapitalisasi dari Belanja barang dan jasa aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp1.582.223.787,00 pada Perangkat Daerah :

   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp188.300.400,00 berupa Jalan dari Beban Jasa Konsultansi Jalan Desa.

   b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp18.622.626,00 berupa Jalan Desa dari Beban Pemeliharaan Jalan Desa.

   c. Badan Keuangan Daerah senilai Rp1.375.300.761,00 berupa Jalan Jembatan Kabupaten dan Bangunan Irigasi dari Beban Tidak Terduga.

3) Hibah masuk senilai Rp66.703.595.349,06 pada Perangkat Daerah :

   a. Dinas Pendidikan senilai Rp1.060.688.108,06 berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih yang merupakan Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Pemerintah Pusat.
   b. Badan Keuangan Daerah senilai Rp65.642.907.241,00 berupa Instalasi Air Bersih, Bangunan Penampung Sampah, Bangunan Pelengkap Air Bersih dan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai dari Kementerian PUPR.

4) Reklas tambah senilai Rp1.853.415.337,61 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	1.031.116.699,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	103.587.400,00

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	629.282.776,61
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	71.780.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	17.648.462,00
JUMLAH	**Rp**	**1.853.415.337,61**

Adapun pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2025 berasal dari:

1) Reklas kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp342.344.968,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2) Pencatatan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Utang Belanja Modal senilai Rp6.909.195,00 pada RSUD dr. Darsono yang dibayarkan pada Tahun 2025, Sehingga Belanja Modalnya digunakan untuk Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun Lalu tidak Menambah Aset di 2025.

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tetap Lainnya	**98.504.954.834,06**	**94.223.186.046,87**	**4.281.768.787,19**

Rincian Aset Tetap Lainnya Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 114 Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bahan Perpustakaan	75.559.438.581,57	4.796.538.633,19	217.463.055,00	80.138.514.159,76
Bahan Bercorak Kebudayaan	15.130.985.146,30	782.681.565,00	0,00	15.913.666.711,30
Hewan	11.811.056,00	0,00	0,00	11.811.056,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	443.304.800,00	0,00	0,00	443.304.800,00
Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	3.077.246.463,00	1.997.258.107,00	3.077.246.463,00	1.997.258.107,00
JUMLAH	**94.223.186.046,87**	**7.576.478.305,19**	**3.294.709.518,00**	**98.504.954.834,06**

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya per golongan diatas masih memperhitungkan nilai reklas tambah dan reklas kurang per golongan aset tetap lainnya sebesar Rp206.177.535,00.

Rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan per Perangkat Daerah TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 115 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	79.808.815.026,57	5.295.298.936,00	42.660.520,00	85.061.453.442,57
Dinas Kesehatan	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.175.046.463,00	1.997.258.107,00	3.077.246.463,00	2.095.058.107,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	122.859.000,00	0,00	0,00	122.859.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Dinas Sosial	0,00	87.484.187,00	87.484.187,00	0,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.811.056,00	0,00	0,00	11.811.056,00
Dinas Lingkungan Hidup	157.896.000,00	624.068.750,00	624.068.750,00	157.896.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	1.081.463.791,00	1.081.463.791,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	86.204.412,00	86.204.412,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.715.833.477,30	27.793.727,19	0,00	1.743.627.204,49
Dinas Perikanan	168.923.000,00	0,00	0,00	168.923.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	7.760.790.024,00	84.900.001,00	84.900.001,00	7.760.790.024,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.985.000,00	0,00	0,00	4.985.000,00
Badan Keuangan Daerah	0,00	2.995.146.462,00	2.995.146.462,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	27.440.000,00	0,00	2.800.000,00	24.640.000,00
Sekretariat Daerah	1.135.846.000,00	149.463.398,00	68.138.398,00	1.217.171.000,00
Sekretariat DPRD	63.536.000,00	0,00	0,00	63.536.000,00
Kecamatan Pringkuku	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kecamatan Pacitan	57.955.000,00	0,00	0,00	57.955.000,00
Kecamatan Kebonagung	0,00	205.602.139,00	205.602.139,00	0,00
Kecamatan Ngadirojo	0,00	590.148.109,00	590.148.109,00	0,00
Kecamatan Sudimoro	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
JUMLAH	**94.223.186.046,87**	**13.227.632.019,19**	**8.945.863.232,00**	**98.504.954.834,06**

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya sebagaiman tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset tetap lainnya antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp5.857.331.249,00. Sedangkan mutasi aset tetap lainnya selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut:

ASET TETAP LAINNYA				
Saldo Awal			**Rp**	**94.223.186.046,87**
Penambahan			**Rp**	**7.370.300.770,19**
Pengadaan	Rp	5.359.748.936,00		
Hibah Masuk	Rp	13.293.727,19		
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	1.997.258.107,00		
Pengurangan			**Rp**	**3.088.531.983,00**
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	3.087.568.641,00		
Extracomtable	Rp	963.342,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**98.504.954.834,06**

Penambahan nilai aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 berasal dari:

1) Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp5.359.748.936,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	5.295.298.936,00

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	14.500.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	49.950.000,00
JUMLAH	**Rp**	**5.359.748.936,00**

2) Hibah masuk Aset Tetap Lainnya senilai Rp13.293.727,19 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku dari Perpustakaan RI.

3) Reklas tambah Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.997.258.107,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 berasal dari:

1) Reklas kurang senilai Rp3.087.568.641,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	41.697.178,00
Dinas Sosial	Rp	87.484.187,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	624.068.750,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.081.463.791,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	86.204.412,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	84.900.001,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	217.861.676,00
Sekretariat Daerah	Rp	68.138.398,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	205.602.139,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	590.148.109,00
JUMLAH	Rp	**3.087.568.641,00**

2) Extracomptable Aset Tetap Lainnya senilai Rp963.342,00 berupa Audio Visual pada Dinas Pendidikan.

Aset Tetap Renovasi Sebesar Rp3.077.246.463,00 pada Dinas PUPR Tahun 2024 telah dimutasi dan dikapitalisasi dengan aset induk di Tahun 2025, Adapun pengadaan Tahun 2025 yang berupa Aset Renovasi sebesar Rp1.997.258.107,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Renovasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp 529.595.816,00 dan Renovasi Jalan, Irigasi, dan jaringan renovasi sebesar Rp 1.467.662.291,00. Adapun rincian Aset Tetap Renovasi dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**16.877.350.251,45**	**13.503.904.396,45**	**3.373.445.855,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2024 sebesar Rp16.877.350.251,45 tersebut merupakan nilai dari saldo awal Tahun 2024 sebesar Rp13.503.904.396,45 ditambah pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 sebesar Rp4.344.637.396,00 dan adanya pengurangan karena proses kapitalisasi sebesar Rp971.191.541,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116 Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

OPD/Jenis Konstruksi	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	**7.735.417.152,45**	**4.344.637.396,00**	**949.076.639,00**	**11.130.977.909,45**
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung	**7.234.230.508,45**	**4.344.637.396,00**	**949.076.639,00**	**10.629.791.265,45**
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja	**915.231.589,45**	**0,00**	**0,00**	**915.231.589,45**
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	915.231.589,45	0	0	915.231.589,45
Kontruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kesehatan	**6.318.998.919,00**	**4.344.637.396,00**	**949.076.639,00**	**9.714.559.676,00**
- RSUD	6.318.998.919,00	3.859.518.250,00	949.076.639,00	9.229.440.530,00
- Dinas Kesehatan		485.119.146,00		485.119.146,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	**501.186.644,00**	**0,00**	**0,00**	**501.186.644,00**
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	**501.186.644,00**	**0,00**	**0,00**	**501.186.644,00**
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	501.186.644,00	0,00	0,00	501.186.644,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**5.768.487.244,00**	**0,00**	**22.114.902,00**	**5.746.372.342,00**
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	**5.768.487.244,00**	**0,00**	**22.114.902,00**	**5.746.372.342,00**
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	210.222.900,00	0,00	22.114.902,00	188.107.998,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	210.222.900,00	0,00	22.114.902,00	188.107.998,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.558.264.344,00	0,00	0,00	5.558.264.344,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	5.558.264.344,00	0,00	0,00	5.558.264.344,00
Total	**13.503.904.396,45**	**4.344.637.396,00**	**971.191.541,00**	**16.877.350.251,45**

Saldo akhir Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp16.877.350.251,45 berada pada masing-masing Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 14**.

1.3.2 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Penyusutan	**(2.863.172.870.994,76)**	**(2.733.264.356.420,89)**	**(129.908.514.573,87)**

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Berdasarkan ketentuan diatas maka diperoleh nilai penyusutan sebagai berikut.

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Akumulasi Penyusutan	**(2.733.264.356.420,89)**	**(210.211.824.336,74)**	**(80.303.309.762,87)**	**(2.863.172.870.994,76)**

Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per kode barang sebagai berikut.

Tabel 117 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan

(dalam Rupiah)

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	**TANAH**	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
KIB B	**PERALATAN DAN MESIN**	**(574.708.429.238,89)**	**(62.708.451.077,18)**	**(20.570.598.093,12)**	**(616.846.282.222,95)**
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	(27.377.607.946,06)	(2.680.579.833,17)	(1.725.291.543,16)	(28.332.896.236,07)
3	Alat Angkutan	(84.769.283.618,73)	(5.549.859.112,74)	(1.806.294.365,62)	(88.512.848.365,86)
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	(9.525.177.036,25)	(177.120.825,97)	(3.345.488.135,00)	(6.356.809.727,22)
5	Alat Pertanian	(3.479.642.556,33)	(479.444.176,10)	(2.328.687,51)	(3.956.758.044,92)
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	(101.387.705.743,31)	(11.675.739.747,14)	(2.436.254.365,46)	(110.627.191.124,99)
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	(13.940.809.000,26)	(1.496.894.805,38)	(584.265.498,19)	(14.853.438.307,45)
8	Alat Kedokteran	(157.087.670.393,46)	(16.405.385.172,67)	(6.110.957.426,20)	(167.382.098.139,93)
9	Alat Laboratorium	(44.430.048.114,12)	(3.707.909.190,52)	(2.484.744.399,70)	(45.653.212.904,94)
10	Alat Keamanan	(1.036.320.112,95)	(721.668.743,51)	0,00	(1.757.988.856,46)
11	Alat Komputer	(121.354.432.875,49)	(18.632.404.710,81)	(1.693.095.770,06)	(138.293.741.816,24)
12	Alat Eksplorasi	(10.175.000,00)	(1.787.500,00)	0,00	(11.962.500,00)
13	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(213.725.800,00)	(26.000.000,00)	0,00	(239.725.800,00)
15	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat Keselamatan Kerja	(1.934.871.775,00)	(602.975.879,35)	(159.949.737,62)	(2.377.897.916,73)
17	Alat Peraga	0,00	0,00	(24.826.666,58)	24.826.666,58
18	Peralatan Proses/Produksi	(340.262.071,67)	(20.117.499,58)	0,00	(360.379.571,25)
19	Rambu-Rambu	(5.681.046.413,24)	(273.024.948,40)	0,00	(5.954.071.361,64)
20	Peralatan Olahraga	(2.139.650.782,02)	(257.538.931,84)	(197.101.498,03)	(2.200.088.215,83)
KODE	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**(357.923.301.902,02)**	**(35.939.190.694,21)**	**(5.177.192.465,57)**	**(388.685.300.130,66)**
21	Bangunan Gedung	(330.762.278.389,74)	(32.511.054.715,71)	(4.665.812.591,51)	(358.607.520.513,94)
22	Monumen/Bangunan Bersejarah	(4.196.291.700,00)	(617.910.950,00)	0,00	(4.814.202.650,00)
23	Bangunan Menara	(2.367.235.706,22)	(295.566.273,11)	(126.160.546,48)	(2.536.641.432,85)
24	Tugu Tanda Batas	(20.597.496.106,06)	(2.514.658.755,39)	(385.219.327,58)	(22.726.935.533,87)
KIB D	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**(1.796.083.427.974,33)**	**(111.073.547.162,67)**	**(54.204.361.888,49)**	**(1.852.952.613.248,51)**
25	Jalan dan Jembatan	(1.298.329.471.758,61)	(80.729.195.330,82)	(54.182.783.300,13)	(1.324.875.883.789,30)
26	Bangunan Air	(291.796.084.293,87)	(15.401.407.222,34)	(20.728.588,36)	(307.176.762.927,85)
27	Instalasi	(41.478.721.392,40)	(10.452.464.744,68)	(850.000,00)	(51.930.336.137,08)
28	Jaringan	(164.479.150.529,45)	(4.490.479.864,83)	0,00	(168.969.630.394,28)
KIB E	**ASET TETAP LAINNYA**	**(4.549.197.305,65)**	**(490.635.402,68)**	**(351.157.315,69)**	**(4.688.675.392,64)**
29	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Bahan Bercorak Kesenian	(4.198.039.989,96)	(371.253.105,85)	0,00	(4.569.293.095,81)
31	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	(351.157.315,69)	(119.382.296,83)	(351.157.315,69)	(119.382.296,83)
KIB F	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	**(2.733.264.356.420,89)**	**(210.211.824.336,74)**	**(80.303.309.762,87)**	**(2.863.172.870.994,76)**

Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut:

AKUMULASI PENYUSUTAN				
Saldo Awal			**Rp**	**(2.733.264.356.420,89)**
Penambahan			**Rp**	**(210.211.824.336,74)**
Beban Penyusutan	Rp	(204.117.221.355,43)		
Reklas dari Aset Lain lain	Rp	(12.000.000,00)		
Reklas dari Aset Properti Investasi	Rp	(1.447.067.297,03)		
Kurang Catat	Rp	(74.530.000,00)		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(4.561.005.684,28)		
Pengurangan				
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(60.860.294.690,91)	**Rp**	**(80.303.309.762,87)**
Lebih Catat	Rp	(460.789.341,35)		
Penghapusan	Rp	(14.918.950.695,06)		
Hibah Keluar	Rp	(4.063.275.035,55)		
Saldo Akhir				
			Rp	**(2.863.172.870.994,76)**

Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp**210.211.824.336,74** berasal dari :

1) Beban Penyusutan senilai Rp204.117.221.355,43 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	61.506.524.885,19
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	31.680.526.492,80
Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp	110.521.495.000,21
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	408.674.977,23
Jumlah	**Rp**	**204.117.221.355,43**

2) Reklas dari Aset Lain Lain senilai Rp12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Reklas dari Aset Lain Lain Peralatan dan Mesin	Rp	12.000.000,00
Jumlah	**Rp**	**12.000.000,00**

3) Reklas dari Aset Properti Investasi senilai Rp1.447.067.297,03 dengan rincian sebagai berikut.

Reklas dari Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Rp	1.447.067.297,03
Jumlah	**Rp**	**1.447.067.297,03**

4) Kurang Catat senilai Rp74.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Kurang Catat Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	74.530.000,00
Jumlah	**Rp**	**74.530.000,00**

5) Koreksi/Reklas senilai Rp4.561.005.684,28 dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi/ Reklas Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	1.115.396.191,99
Koreksi/ Reklas Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	2.811.596.904,38
Koreksi/ Reklas Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	552.052.162,46
Koreksi/ Reklas Penyusutan Aset Tetap Lainnya		81.960.425,45
Jumlah	**Rp**	**4.561.005.684,28**

Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp80.303.309.762,87 berasal dari :

1) Koreksi/Reklas Penyusutan senilai Rp60.860.294.690,91 dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi/ Reklas Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	5.067.349.983,06
Koreksi/ Reklas Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	1.237.425.503,67
Koreksi/ Reklas Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	54.204.361.888,49

Koreksi/ Reklas Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	351.157.315,69
Jumlah	**Rp**	**60.860.294.690,91**

2) Lebih Catat Penyusutan senilai Rp460.789.341,35 dengan rincian sebagai berikut.

Lebih Catat Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	30.070.566,65
Lebih Catat Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	430.718.774,70
Jumlah	**Rp**	**460.789.341,35**

3) Penghapusan Penyusutan senilai Rp14.918.950.695,06 dengan rincian sebagai berikut.

Penghapusan Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	11.787.636.958,48
Penghapusan Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	3.131.313.736,58
Jumlah	**Rp**	**14.918.950.695,06**

4) Hibah Keluar Penyusutan senilai Rp4.063.275.035,55 dengan rincian sebagai berikut.

Hibah Keluar Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	3.685.540.584,93
Hibah Keluar Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	377.734.450,62
Jumlah	**Rp**	**4.063.275.035,55**

1.4 ASET LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lainnya	**23.308.555.555,00**	**23.594.275.368,34**	**(285.719.813,34)**

Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.308.555.555,00 terdiri dari:

Tabel 118 Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**24.507.527.700,00**	0,00	0,00	**24.507.527.700,00**
1	Kerjasama Pemanfaatan	23.146.466.900,00	0,00	0,00	23.146.466.900,00
2	Bangun guna serah	1.361.060.800,00	0,00	0,00	1.361.060.800,00
B	**Aset Tidak Berwujud**	**4.699.854.850,00**	**624.022.700,00**	**99.655.800,00**	**5.224.221.750,00**
3	Sofware	4.699.854.850,00	624.022.700,00	99.655.800,00	5.224.221.750,00
C	**Aset Lain-lain**	**1.217.934.650,00**	**0,00**	**74.899.900,00**	**1.143.034.750,00**
4	Aset Rusak Berat/Usang	954.345.000,00	0,00	67.595.000,00	886.750.000,00
5	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	263.589.650,00	0,00	7.304.900,00	256.284.750,00
D	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**(4.173.864.640,00)**	**(245.888.440,00)**	**19.931.160,00**	**(4.399.821.920,00)**
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(4.173.864.640,00)	(245.888.440,00)	19.931.160,00	(4.399.821.920,00)
E	**Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**	**(3.113.192.191,66)**	**(120.472.762,50)**	**(67.258.229,16)**	**(3.166.406.725,00)**
7	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(2.157.938.962,50)	(120.472.762,50)	0,00	(2.278.411.725,00)
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(954.008.229,16)	0,00	(67.258.229,16)	(886.750.000,00)
9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
F	**Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)**	**456.015.000,00**	**0,00**	**456.015.000,00**	**0,00**
10	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	**456.015.000,00**	**0,00**	456.015.000,00	**0,00**
Jumlah		**23.594.275.368,34**	**257.661.497,50**	**543.381.310,84**	**23.308.555.555,00**

Rincian Aset lainnya Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp24.507.527.700,00 terdiri dari:

1. **Kerja Sama Operasi (KSO)**

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi aset daerah dengan bentuk kerjasama Pemanfaatan atau Kerja Sama Operasi. Objek Kerja Sama Operasi (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT El John Tirta Mas berupa tanah dan gedung/bangunan di kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kelurahan Sidoharjo senilai Rp23.146.466.900,00.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Pantai Teleng Ria. Penunjukkan PT El John Tirta Mas, dilakukan melalui lelang dan penetapan pemenang dilakukan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/920/KPTS/408.21/2013.

Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian Nomor 181/20/408.21/2013 dan Nomor 048/PCT-ELJHON/TEW/ PKS/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dengan kewajiban kontribusi yang harus dibayar PT El John Tirta Mas sebesar Rp350.000.000,00 per tahun dengan kenaikan 5% tiap tiga tahun dan *profit sharing* sebesar 7,50% per tahun. Mitra kerja juga berkewajiban melakukan investasi pengembangan kawasan wisata minimal Rp15.000.262.000,00.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2043. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Toto Suharto dan rekan dengan Nomor COT.13.00.0022 Tertanggal 3 Juni 2013 dapat diketahui nilai aset yang dikerjasamakan senilai sebagai berikut.

a.	Ex *Cotage Happy Bay*	Rp	420.433.000,00
b.	Bangunan dan fasilitas lainnya	Rp	4.500.908.900,00
c.	Tanah seluas 135.001 m^2	Rp	18.225.125.000,00
	Total	Rp	23.146.466.900,00

Perubahan terjadi pada nilai tanah berdasarkan penilaian nilai tanah per m^2 Rp135.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penetapan jenis dan nilai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, maka nilai aset yang dikerjasamakan tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/740/KPTS/ 408.21/2013, sehingga nilai aset yang dikerjasamakan pada Tahun 2013 sebesar Rp23.146.466.900,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 119 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Tanah Lingkungan Teleng Ria	1	18.225.125.000,00
2	*Cottage happy bay*	1	420.433.000,00
3	Ruang pamer produk wisata	1	165.502.000,00

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
4	Amusement park	1	172.165.000,00
5	Gazebo 1 *Amusement park*	1	1.215.000,00
6	Gazebo 2 *Amusement park*	1	1.215.000,00
7	Gazebo 3 *Amusement park*	1	1.518.000,00
8	Gazebo 4 *Amusement park*	1	1.518.000,00
9	Gazebo 5 *Amusement park*	1	1.215.000,00
10	Gazebo 6 *Amusement park*	1	1.215.000,00
11	Gazebo 7 *Amusement park*	1	911.000,00
12	Gazebo 8 *Amusement park*	1	911.000,00
13	Gazebo 9 *Amusement park*	1	2.733.000,00
14	Gedung *Baywatch*	1	32.510.000,00
15	Joglo	1	18.539.000,00
16	Kamar bilas 1	1	8.929.000,00
17	Kamar bilas 2	1	8.929.000,00
18	Kios pasar ikan masak	1	95.999.000,00
19	Kios pertokoan	1	101.404.000,00
20	Loket wisata air	1	15.544.000,00
21	Masjid	1	160.231.000,00
22	Mushola wisata air	1	6.716.000,00
23	Panggung sanggar budaya	1	371.018.000,00
24	Bangunan pengolah sampah	1	11.733.000,00
25	Ruang pertemuan, toilet dan mushola	1	539.807.000,00
26	*Shelter* tipe 1	10	57.590.000,00
27	*Shelter* tipe 2	1	8.337.000,00
28	*Shelter* tipe 3	1	13.410.000,00
29	Toilet	1	35.198.000,00
30	Toilet wisata air	1	4.762.000,00
31	*Tribune*	1	76.518.000,00
32	Kolam renang dewasa	1	769.675.000,00
33	Kolam renang anak	1	264.276.900,00
34	Kolam bermain	1	254.813.000,00
35	Loket *water park*	1	213.601.000,00
36	Mushola *water park*	1	69.959.000,00
37	Toilet *water park*	1	33.545.000,00
38	Kios pedagang kaki lima 1	1	166.685.000,00
39	Kios pedagang kaki lima 2	1	49.624.000,00
40	Area parkir	1	277.856.000,00
41	Pintu gerbang dan loket	1	43.904.000,00
42	*Waterboom*	1	424.600.000,00
43	Air mancur	1	15.078.000,00
Jumlah		**52**	**23.146.466.900,00**

2. Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)

Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) sebesar Rp1.361.060.800,00 merupakan:

a. Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)atas aset tanah sebesar Rp1.361.060.800,00 milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT.HM Sampoerna. Kerjasama dimulai dengan Perjanjian Guna Usaha Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam bentuk Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera Nomor 181.1/707A/408.11/2005 dan Nomor 022/PPIS/IX/2005 Tanggal 09 September 2005 selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan kontribusi sebesar

Rp2.000.000,00 per tahun. Kemudian diubah dengan *addendum* Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 33 tanggal 16 Maret 2009 selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung 09 September 2009 s.d 09 September 2030 dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun yang telah dibayar dimuka, kemudian ditambah Rp10.000.000,00 per tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir perjanjian di-*adendum* dalam Akta Notaris Yanti Komalawati, SH Nomor 170 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Perjanjian Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tenaga yang terserap cukup banyak sehingga mampu meringankan beban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain penambahan PAD yang dihasilkan dari kerjasama ini. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka konstruksi pabrik menjadi milik Pemerintah Daerah.

b. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT Esrandev Co. LTD dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan yang berakhir pada Tahun 2019 dan tidak diperpanjang lagi. Pengurangan Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar Rp945.750.000,00 telah direklas masuk aset tetap tanah di KIP. Konstruksi yang berada di atas pemerintah daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dibongkar dan dilelang senilai Rp90.200.000,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 6 Desember 2019.

Tabel 120 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Saldo Awal (Rp)		Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna	1	1.361.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.361.060.800,00
	JUMLAH	**1**	**1.361.060.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**	**1.361.060.800,00**

1.4.2 Aset Tidak Berwujud – Software

Jumlah Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebesar Rp**5.224.221.750,00 b**erupa *software* antara lain:

Tabel 121 Aset Tidak Berwujud - *Software*

(dalam Rupiah)

NO	Perangkat Daerah	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	604.468.286,00	0,00	0,00	604.468.286,00
2	Dinas Kesehatan	135.960.000,00	0,00	0,00	135.960.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.370.100,00	0,00	0,00	154.370.100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.512.081.300,00	99.999.900,00	99.655.800,00	1.512.425.400,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.111.264,00	0,00	0,00	99.111.264,00
7	Dinas Perhubungan	99.789.000,00	0,00	0,00	99.789.000,00
8	Dinas Perikanan	17.820.000,00	0,00	0,00	17.820.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	46.794.000,00	0,00	0,00	46.794.000,00
10	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	205.499.300,00	0,00	0,00	205.499.300,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	83.886.000,00	50.000.000,00	0,00	133.886.000,00
12	Badan Keuangan Daerah	550.918.400,00	0,00	0,00	550.918.400,00
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	552.815.200,00	99.655.800,00	0,00	652.471.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00
15	Sekretariat Daerah	586.342.000,00		0,00	586.342.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
17	Dinas Sosial	0,00	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	99.567.000,00	0,00	99.567.000,00
Jumlah		**4.699.854.850,00**	**624.022.700,00**	**99.655.800,00**	**5.224.221.750,00**

Adapun Mutasi Aset Tidak Berwujud – *software* karena penyesuaian sebagai berikut.

SOFTWARE			
Saldo Awal		**Rp**	**4.699.854.850,00**
Penambahan		**Rp**	**524.366.900,00**
Pengadaan Belanja Modal	Rp **524.366.900,00**		
Saldo Akhir		**Rp**	**5.224.221.750,00**

Penambahan nilai Aset Tidak Berwujud – *software* selama Tahun 2025 berasal dari:

Pengadaan Belanja Modal *Software* yang dikapitalisasi senilai Rp524.366.900,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

a) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp99.999.900,00
b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp99.900.000,00.
c) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp50.000.000,00.
d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp75.000.000,00.
e) Dinas Sosial sebesar Rp99.900.000,00.

f) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp99.567.000,00.

1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(4.399.821.920,00)**	**(4.173.864.640,00)**	**(225.957.280,00)**

Penerapan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan 72 Tahun 2022 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Daerah adalah dengan menggunakan metode garis lurus yaitu untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai amortisasi sebagai berikut.

Tabel 122 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	**(4.173.864.640,00)**	**(225.957.280,00)**	**0,00**	**(4.399.821.920,00)**

Sedangkan rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per golongan di masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 123 Rincian Akumulasi Amortisasi per Perangkat Daerah

(dalam Rupiah)

NO	Perangkat Daerah	Saldo Awal (Rp)	Bertambah Rp	Berkurang Rp	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(604.468.286,00)			(604.468.286,00)
2	Dinas Kesehatan	(135.960.000,00)			(135.960.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(111.678.433,33)	(10.900.000,00)		(122.578.433,33)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(50.000.000,00)			(50.000.000,00)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.368.376.260,00)	(35.995.080,00)	(19.931.160,00)	(1.384.440.180,00)
6	Dinas Perhubungan	(46.568.200,00)	(19.957.800,00)		(66.526.000,00)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(99.111.264,00)			(99.111.264,00)
8	Dinas Perikanan	(17.820.000,00)			(17.820.000,00)
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(46.794.000,00)			(46.794.000,00)
10	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	(161.099.300,00)	(11.100.000,00)		(172.199.300,00)
11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(83.886.000,00)	(2.500.000,00)		(86.386.000,00)
12	Badan Keuangan Daerah	(537.029.030,00)	(13.889.370,00)		(550.918.400,00)
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(552.815.200,00)	(29.896.740,00)		(582.711.940,00)
14	Sekretariat Daerah	(358.258.666,67)	(105.000.000,00)		(463.258.666,67)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	(5.000.000,00)		(5.000.000,00)
16	Dinas Sosial	0,00	(4.995.000,00)		(4.995.000,00)
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	(1.659.450,00)		(1.659.450,00)

18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	(4.995.000,00)		(4.995.000,00)
	Jumlah	**(4.173.864.640,00)**	**(245.888.440,00)**	**(19.931.160,00)**	**(4.399.821.920,00)**

Perubahan akumulasi Amortisasi terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut.

Saldo Awal	**Rp**	**(4.173.864.640,00)**
Penambahan	Rp	**((225.957.280,00)**
Saldo Akhir	**Rp**	**(4.399.821.920,00)**

1.4.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.143.034.750,00.

Perbandingan dengan saldo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Lain-Lain	**1.143.034.750,00**	**1.217.934.650,00**	**(74.899.900,00)**

Aset lain-lain sebesar Rp1.143.034.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 124 Mutasi Aset Lain-lain 2025

(dalam Rupiah)

NO	SATKER	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	**263.589.650,00**	**0,00**	**7.304.900,00**	**256.284.750,00**
1	Dinas Pendidikan	247.641.150,00	**0,00**	**0,00**	247.641.150,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	8.643.600,00	**0,00**	**0,00**	8.643.600,00
3	Dinas Perikanan	7.304.900,00	**0,00**	7.304.900,00	**0,00**
	Aset Rusak Berat/Usang	**954.345.000,00**	**0,00**	**67.595.000,00**	**886.750.000,00**
5	RSUD dr. Darsono	860.750.000,00	**0,00**	**0,00**	860.750.000,00
6	Badan Keuangan Daerah	38.000.000,00	**0,00**	12.000.000,00	26.000.000,00
7	Kecamatan Kebonagung	55.595.000,00	**0,00**	55.595.000,00	**0,00**
Jumlah		**1.217.934.650,00**	**0,00**	**74.899.900,00**	**1.143.034.750,00**

1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**(3.166.406.725,00)**	**(3.113.192.191,66)**	**(53.214.533,34)**

Penerapan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tentang Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Daerah adalah dengan menggunakan metode garis lurus yaitu untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau

kontrak adalah 5 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 125 Mutasi Aset Lain-lain 2025

(dalam Rupiah)

SATKER	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaata	**(2.157.938.962,50)**	**0,00**	**(120.472.762,50)**	**(2.278.411.725,00)**
Badan Keuangan Daerah	(2.157.938.962,50)	0,00	(120.472.762,50)	(2.278.411.725,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	**(954.008.229,16)**	**67.258.229,16**	**0,00**	**(886.750.000,00)**
RSUD dr. Darsono	(860.750.000,00)	0,00	0,00	(860.750.000,00)
Badan Keuangan Daerah	(38.000.000,00)	12.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)
Kecamatan Kebonagung	(55.258.229,16)	55.258.229,16	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	**(1.245.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.245.000,00)**
Dinas Pendidikan	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
Jumlah	**(3.113.192.191,66)**	**67.258.229,16**	**(120.472.762,50)**	**(3.166.406.725,00)**

1.4.6 *Dana Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 mempunyai Saldo pada rekening TDF sebesar Rp0,00

Pada Tahun 2024 terdapat saldo kas yang merupakan penyaluran DBH/DAU dari RKUN dalam bentuk T*reasury Deposit Facility* (TDF-TKD) yang disalurkan pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

Untuk Tahun 2025 bernilai nol dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tanggal 31 Desember 2025 tidak mempunyai saldo pada rekening TDF semua telah ditransfer ke RKUD.

1.5 PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Poperti Investasi	**18.565.637.644,77**	**23.393.047.410,92**	**(4.827.409.766,15)**

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.565.637.644,77 yang terdiri dari

Tabel 126 Mutasi Properti Investasi Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Golongan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Properti Investasi Tanah**	**18.318.004.661,94**	**0,00**	**280.500.000,00**	**18.037.504.661,94**
1	Properti Investasi Tanah	18.318.004.661,94	0,00	280.500.000,00	18.037.504.661,94
B	**Properti Investasi Gedung Dan Bangunan**	**6.747.760.375,36**	**0,00**	**5.879.288.127,00**	**868.472.248,36**
1	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	6.747.760.375,36	0,00	5.879.288.127,00	868.472.248,36
	Total Properti Investasi (harga perolehan)	**25.065.765.037,30**	**0,00**	**6.159.788.127,00**	**18.905.976.910,30**
C	**Akumulasi Penyusutan**	**-1.672.717.626,38**	**1.447.067.297,03**	**114.688.936,18**	**-340.339.265,53**
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	**-1.672.717.626,38**	1.447.067.297,03	114.688.936,18	-340.339.265,53
	Jumlah	**23.393.047.410,92**	**1.447.067.297,03**	**6.274.477.063,18**	**18.565.637.644,77**

Nilai buku Properti Investasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.565.637.644,77 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	**25.065.765.037,30**
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**25.065.765.037,30**
Pengurangan Tahun 2025	Rp	**6.159.788.127,00**
Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp	**18.905.976.910,30**
Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp	(340.339.265,53)
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**18.565.637.644,77**

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Properti Investasi per 31 Desember 2025 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.5.1 Properti Investasi Tanah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Properti Investasi Tanah	**18.037.504.661,94**	**18.318.004.661,94**	**(280.500.000,00)**

Jumlah tersebut merupakan Properti Investasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berasal dari reklasifikasi asset tetap Tanah ke Properti Investasi dengan kreteria yang ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 10.3.3.2/657/KTSP/40812/2024 oleh Panitia Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Adapun nilai property investasi Rp18.318.004.661,94 terdapat pada Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 127 Mutasi Poperti Investasi Tanah

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	19.025.000,00	0,00	0,00	19.025.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	182.017.600,00	0,00	0,00	182.017.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	58.625.000,00	0,00	0,00	58.625.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	280.500.000,00	0,00	280.500.000,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	564.600.000,00	0,00	0,00	564.600.000,00
Badan Keuangan Daerah	17.119.637.061,94	0,00	0,00	17.119.637.061,94
Kecamatan Pacitan	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Dinas Kesehatan	72.600.000,00	0,00	0,00	72.600.000,00
Jumlah	**18.318.004.661,94**	**0,00**	**280.500.000,00**	**18.037.504.661,94**

Adapun penjelasan informasi dan posisi detail masing-masing Properti Investasi Tanah dapat dilihat di **Lampiran 15.**

1.5.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan Properti Investasi Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap Tanah ke Properti Investasi dengan kriteria yang ditentukan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 10.3.3.2/657/KTSP/40812/2024 oleh Panitia Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah kabupaten Pacitan. Adapun nilai properti investasi sebesar Rp868.472.248,36 terdapat pada Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 128 Mutasi Poperti Investasi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	248.781.832,00	0,00	248.781.832,00	0,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	20.295.000,00	0,00	20.295.000,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.444.978.595,00	0,00	4.444.978.595,00	0,00
Kecamatan Pringkuku	145.301.000,00	0,00	0,00	145.301.000,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	372.684.866,00	0,00	0,00	372.684.866,00
Dinas Perhubungan	1.165.232.700,00	0,00	1.165.232.700,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Badan Keuangan Daerah	338.486.382,36	0,00	0,00	338.486.382,36
Jumlah	**6.747.760.375,36**	**0,00**	**5.879.288.127,00**	**868.472.248,36**

Nilai Perolehan Properti Investasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp868.472.248,36 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	**6.747.760.375,36**
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**6.747.760.375,36**
Pengurangan Tahun 2024	Rp	5.879.288.127,00
Aset Properti Invvestasi per 31 Desember 2025	Rp	**868.472.248,36**

Terdapat pengurangan properti investasi gedung dan bangunan sebesar Rp5.879.288.127,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak terdapat pengurangan properti investasi gedung dan bangunan sebesar Rp248.781.832,00 dikarenakan direklas ke Aset Tetap.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian terdapat pengurangan propergi investasi gedung dan bangunan dikarenakan Rp20.295.000,00 dikarenakan direklas ke Aset Tetap.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdapat pengurangan propergi investasi gedung dan bangunan dikarenakan. 4.444.978.595,00 dikarenakan direklas ke Aset Tetap dan selanjutkan dihapus dengan SK Penghapusan.

Dinas Perhubungan terdapat pengurangan propergi investasi gedung dan bangunan dikarenakan. 1.165.232.700,00 dikarenakan direklas ke Aset Tetap dan selanjutnya dihapus dengan SK Penghapusan.

Adapun penjelasan informasi dan posisi detail masing-masing Properti Investasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat di **Lampiran 15.**

1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	**(340.339.265,53)**	**(1.672.717.626,38)**	**1.332.378.360,85**

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan pada Properti Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 129 Nilai Akumulasi Penyusutan Poperti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	Nilai Penyusutan (Rp)
Kecamatan Pringkuku	(145.301.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	0,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	(69.668.031,70)
Dinas Perhubungan	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	(6.900.000,00)
Badan Keuangan Daerah	(118.470.233,83)
Jumlah	**(340.339.265,53)**

2. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pacitan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.131.590.799,23. Yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kewajiban Jangka pendek	**20.131.590.799,23**	**20.347.883.124,23**	**(216.292.325,00)**

Kewajiban senilai Rp20.131.590.799,23 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut

Tabel 130 Kewajiban Jangka Pendek 2025

(dalam Rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
Pendapatan Diterima Di Muka	736.967.103,72	0,00	458.095.493,95	400.975.249,58	679.846.859,35
Utang Belanja	16.923.960.205,51	0,00	16.923.960.205,51	16.015.151.429,88	16.015.151.429,88
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.686.955.815,00	0,00	2.686.955.815,00	3.436.592.510,00	3.436.592.510,00
JUMLAH	**20.347.883.124,23**	0,00	**20.069.011.514,46**	**19.852.719.189,46**	**20.131.590.799,23**

2.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka milik Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 sebesar Rp679.846.859,35. Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 131 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	345.030.128,66	0,00	344.811.030,30	295.343.107,23	295.562.205,59
2	Pajak Reklame Kain	14.042.387,91	0,00	14.042.387,91	10.473.553,55	10.473.553,55
3	Pajak Reklame Berjalan	16.136.187,62	0,00	16.136.187,62	13.773.184,88	13.773.184,88
4	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	10.558.333,33	0,00	10.558.333,33	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	15.625.000,00	0,00	7.375.000,00	606.892,50	8.856.892,50
6	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama	335.575.066,20	0,00	65.172.554,79	80.778.511,42	351.181.022,83
TOTAL		**736.967.103,72**	**0,00**	**458.095.493,95**	**400.975.249,58**	**679.846.859,35**

2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* pada BKD sebesar Rp295.562.205,59

Saldo Awal sebesar Rp345.030.128,66 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp344.811.030,30 serta penambahan tahun ini sebesar Rp295.343.107,23.

2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Kain pada BKD sebesar Rp10.473.553,55

Saldo Awal sebesar Rp14.042.387,91 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2025 sebesar Rp14.042.387,91 dan penambahan tahun ini sebesar Rp10.473.553,55 menjadi saldo akhir tahun.

2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Berjalan pada BKD sebesar Rp13.773.184,88

Saldo Awal sebesar Rp16.136.187,62 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2025 sebesar Rp16.136.187,62 dan penambahan tahun ini sebesar Rp13.773.184,88 menjadi saldo akhir tahun.

2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Bunga Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp0,00.

Saldo Awal sebesar Rp10.558.333,33 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2025 10.558.333,33 dan tidak ada

penambahan di tahun ini.

2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada RSUD sebesar Rp8.856.892,50

Saldo awal sebesar Rp15.625.000,00 terdapat pengurangan yang menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2025 sebesar Rp7.375.000,00 dan penambahan sebesar Rp606.892,50 sehingga total saldo akhir tahun 2025 sebesar Rp8.856.892,50.

2.1.6 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama pada BKD dan Dinas Perdagangan sebesar Rp351.181.022,83

Saldo Awal sebesar Rp335.575.066,20 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp65.172.554,79 serta penambahan tahun berjalan sebesar Rp80.778.511,42 sehingga saldo akhir tahun sebesar Rp351.181.022,83.

Dari saldo tersebut termasuk di dalamnya Laba PDAM Diterima Dimuka sebesar Rp229.300.000,00. Periode Tahun 2023 pendapatan diterima dimuka tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif pembayaran uang muka pembagian laba sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pacitan yang akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut.

(a)Tahun 1995	Rp	5.000.000,00
(b)Tahun 1996	Rp	7.500.000,00
(c)Tahun 1997	Rp	7.300.000,00
(d)Tahun 2000	Rp	2.000.000,00
(e)Tahun 2002	Rp	5.000.000,00
(f)Tahun 2003	Rp	12.500.000,00
(g)Tahun 2004	Rp	15.000.000,00
(h)Tahun 2005	Rp	20.000.000,00
(i)Tahun 2006	Rp	25.000.000,00
(j)Tahun 2007	Rp	35.000.000,00
(k)Tahun 2008	Rp	45.000.000,00
(l)Tahun 2009	Rp	45.000.000,00
(m)Tahun 2010	Rp	5.000.000,00
Jumlah s/d 2010	**Rp**	**229.300.000,00**

Atas Laporan Audit Independen Nomor LAI-8472/PW13/4/2011 pembayaran uang muka pembagian laba tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh:

1) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bahwa pembagian laba diberikan setelah perusahaan memperoleh laba.
2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, bahwa Pemerintah Daerah diinstruksikan agar membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah

administratif daerah kab/kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD dengan tujuan digunakannya setoran laba bersih oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali. Maka sejak Laporan Audit Independen tersebut, kompensasi berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihentikan sampai dengan 31 Desember 2025.

2.2 Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp16.015.151.429,88 merupakan beban Tahun 2025 yang masih belum dibayarkan, yang dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 132 Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	**Utang Belanja Pegawai**	**4.918.998.876,00**	**4.918.998.876,00**	**5.894.903.112,54**	**5.894.903.112,54**
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	588.508.182,00	588.508.182,00	188.782.683,00	188.782.683,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.030.000,00	11.030.000,00	21.706.000,00	21.706.000,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.319.460.694,00	4.319.460.694,00	5.684.414.429,54	5.684.414.429,54
2	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**9.798.532.077,51**	**9.798.532.077,51**	**7.354.558.227,34**	**7.354.558.227,34**
	Utang Belanja Barang	7.406.549.589,51	7.406.549.589,51	6.149.692.442,34	6.149.692.442,34
	Utang Belanja Jasa	1.614.545.438,00	1.614.545.438,00	1.062.841.689,00	1.062.841.689,00
	Utang Belanja Pemeliharaan	744.817.650,00	744.817.650,00	112.948.296,00	112.948.296,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas	9.412.000,00	9.412.000,00	6.970.000,00	6.970.000,00
	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.207.400,00	23.207.400,00	22.105.800,00	22.105.800,00
3	**Utang Belanja Modal**	**34.078.665,00**	**34.078.665,00**	**15.704.280,00**	**15.704.280,00**
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.169.470,00	27.169.470,00	15.704.280,00	15.704.280,00
	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.909.195,00	6.909.195,00	0,00	0,00
4	**Utang Belanja Bagi Hasil**	**1.461.925.893,00**	**1.461.925.893,00**	**2.489.713.959,00**	**2.489.713.959,00**
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	962.353.386,00	962.353.386,00	1.885.375.718,00	1.885.375.718,00
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	499.572.507,00	499.572.507,00	604.338.241,00	604.338.241,00
5	**Utang Belanja Bantuan Keuangan**	**710.424.694,00**	**710.424.694,00**	**260.271.851,00**	**260.271.851,00**
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi	710.424.694,00	710.424.694,00	260.271.851,00	260.271.851,00
Jumlah		**16.923.960.205,51**	**16.923.960.205,51**	**16.015.151.429,88**	**16.015.151.429,88**

2.2.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp5.894.903.112,54 merupakan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp188.782.683,00 yang terdiri dari Utang Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp8.226.844,00 yang seluruhnya dimiliki oleh Inspektorat Daerah, Utang Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebesar Rp602.760,00 yang seluruhnya dimiliki oleh

Inspektorat Daerah, Utang Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp4.900.000,00 seluruhnya dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian, Utang Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp545.000,00 yang seluruhnya dimiliki oleh Inspektorat Daerah, Utang Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp506.940,00 yang seluruhnya dimiliki oleh Inspektorat Daerah, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp121.941.407,00 yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas) dan RSUD dr Darsono, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp51.980.755,00 yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas) dan RSUD dr Darsono, Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp19.745,00 dan Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebesar Rp59.232,00 yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp21.706.000,00 merupakan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp1.974.400,00 yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp19.731.600 yang dimiliki oleh Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian sebesar Rp2.961.600,00 dan dinas Sosial sebesar Rp16.770.000,00.

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp5.684.414.429,54 yang merupakan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, terdiri dari Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas) sebesar Rp2.335.236.533,54 dan RSUD dr.Darsono sebesar Rp3.349.177.896,00.

2.2.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.354.558.227,34 merupakan saldo dari Utang Belanja Barang, Utang Belanja Jasa, Utang Pemeliharaan, Utang Perjalanan Dinas, dan Utang Belanja Uang dan/ Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1) Utang belanja barang senilai Rp6.149.692.442,34 merupakan saldo utang belanja barang yang dimiliki oleh BLUD Puskesmas maupun BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono.

Tabel 133 Utang Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	1.063.938.913,00	1.063.938.913,00	565.258.428,02	565.258.428,02
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.590.900,00	12.590.900,00	28.924.300,00	28.924.300,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	1.020.000,00	1.020.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	321.400.000,00	321.400.000,00	184.110.000,00	184.110.000,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.943.160,00	7.943.160,00	15.511.751,00	15.511.751,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	42.685.050,00	42.685.050,00	49.707.615,00	49.707.615,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	119.752.350,00	119.752.350,00	72.324.250,00	72.324.250,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	5.181.980,00	5.181.980,00
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	60.295.256,00	60.295.256,00	95.437.063,00	95.437.063,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.950.040,00	9.950.040,00	20.408.230,00	20.408.230,00
12	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.636.275,00	19.636.275,00	30.619.790,00	30.619.790,00
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	3.009.697.321,57	3.009.697.321,57	2.680.608.494,34	2.680.608.494,34
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.597.128.047,94	2.597.128.047,94	2.272.055.340,98	2.272.055.340,98
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	98.943.791,00	98.943.791,00	126.885.200,00	126.885.200,00
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	4.091.000,00	4.091.000,00	0,00	0,00
17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	103.290,00	103.290,00	0,00	0,00
18	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	35.124.195,00	35.124.195,00	0,00	0,00
Total		**7.406.549.589,51**	**7.406.549.589,51**	**6.149.692.442,34**	**6.149.692.442,34**

Utang belanja barang senilai Rp6.149.692.442,34 terdapat pada SKPD :

Dinas Kesehatan terdapat utang belanja barang sebesar Rp178.352.638,00 dengan rincian sebagai berikit:

a. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp16.684.302,00
b. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp28.339.000,00
c. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas Rp2.660.000,00
d. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp8.949.986,00
e. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp4.699.890,00
f. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp13.599.960,00
g. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp8.699.950,00
h. Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp5.944.490,00

i. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Rp31.198.300,00
j. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura Rp57.576.760,00

RSUD dr. Darsono terdapat utang belanja barang sebesar Rp5.971.339.804,34 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp548.574.126,02
b. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp585.300,00
c. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp184.110.000,00
d. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp6.561.765,00
e. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp45.007.725,00
f. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp72.324.250,00
g. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp5.181.980,00
h. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp81.837.103,00
i. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp11.708.280,00
j. Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp24.675.300,00
k. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Rp2.649.410.194,34
l. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp2.272.055.340,98
m. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura Rp69.308.440,00

2) Utang belanja jasa senilai Rp1.062.841.689,00 merupakan saldo utang belanja jasa yang terdapat di beberapa SKPD termasuk 24 BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 134 Utang Belanja Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	6.704.260,00	6.704.260,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.149.738,00	54.149.738,00	53.771.796,00	53.771.796,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	91.045.000,00	91.045.000,00	221.000,00	221.000,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	112.211.853,00	112.211.853,00	115.309.552,00	115.309.552,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	161.007.277,00	161.007.277,00	116.864.137,00	116.864.137,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.209.677,00	6.209.677,00	2.819.355,00	2.819.355,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	5.103.819,00	5.103.819,00	5.495.100,00	5.495.100,00
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.206.740,00	1.206.740,00	3.784.050,00	3.784.050,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	183.634.768,00	183.634.768,00	185.054.364,00	185.054.364,00
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.587.083,00	8.587.083,00	9.452.223,00	9.452.223,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	526.500,00	526.500,00	0,00	0,00
18	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.123.446,00	22.123.446,00	4.244.669,00	4.244.669,00
19	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00
20	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
21	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	936.249.537,00	936.249.537,00	524.044.683,00	524.044.683,00
22	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	14.490.000,00	14.490.000,00
23	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
Total		**1.614.545.438,00**	**1.614.545.438,00**	**1.062.841.689,00**	**1.062.841.689,00**

3) Utang Belanja Pemeliharaan senilai Rp112.948.296,00 merupakan saldo utang belanja jasa yang terdapat di SKPD BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono sebesar Rp107.728.296,00 Puskesmas Bubakan Rp4.200.000,00 dan Puskesmas Nawangan Rp1.020.000,00.

4) Utang Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp6.970.000,00 merupakan saldo utang belanja jasa yang terdapat di SKPD Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas)

5) Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp22.105.800,00 yang berada pada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang merupakan kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp15.965.300,00 dan Polres Pacitan Sebesar Rp6.140.500,00

2.2.3 Utang belanja Modal

Utang belanja Modal senilai Rp15.704.280,00 merupakan saldo utang yang terdapat di Rumah Sakit dr. Darsono dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Utang Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	**Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**27.169.470,00**	**27.169.470,00**	**15.704.280,00**	**15.704.280,00**
-	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	27.169.470,00	27.169.470,00	15.704.280,00	15.704.280,00

2	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**6.909.195,00**	**6.909.195,00**	**0,00**	**0,00**
-	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.386.945,00	1.386.945,00	0,00	0,00
-	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.522.250,00	5.522.250,00	0,00	0,00
Total		**34.078.665,00**	**34.078.665,00**	**15.704.280,00**	**15.704.280,00**

2.2.4 Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Utang Bagi Hasil Retribusi terdapat sebesar Rp2.489.713.959,00 pada SKPD Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Bagi Hasil Pajak

Pada Tahun 2025 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp1.885.375.718,00.

2) Utang Bagi Hasil Retribusi

Pada Tahun 2025 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp604.338.241,00.

2.2.5 Utang Belanja Bantuan Keuangan.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Kuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 900.1.15.3/Kabupaten Pacitan/BA-Tripartit/2026 terdapat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi sebesar Rp260.271.851,00 yang merupakan saldo BKK Tahun Anggaran 2025. Kewajiban pemerintah daerah atas sisa penggunaan belanja bantuan keuangan khusus Tahun 2025 akan di setor Kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 melalui belanja tidak terduga.

2.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.436.592.510,00 terdiri dari utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD RSUD dr Darsono sebesar Rp19.765.510 dan utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sesuai dengan PMK.120/2025 sebesar Rp3.416.827.000,00 yang merupakan utang kelebihan pembayaran transfer dana bagi hasil.

3. EKUITAS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Ekuitas	**2.136.653.177.396,05**	**2.076.102.226.317,07**	**60.550.951.078,98**

Ekuitas Dana merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 sebesar Rp**2.136.653.177.396,05**

Saldo akhir tersebut merupakan kenaikan dari saldo akhir ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp60.550.951.078,98 yaitu yang terdiri dari :

Surplus pada LO selama tahun berjalan	Rp	9.610.446.078,95
Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	50.940.505.000,03
Jumlah	Rp	**60.550.951.078,98**

5.1.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Kegiatan Operasional

	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang
1. Pendapatan-LO	**(Rp)**	**(Rp)**	**(Rp)**
	1.653.091.587.173,86	**1.644.340.729.356,69**	**8.750.857.817,17**

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada tahun 2025, Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebesar Rp1.653.091.587.173,86.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2024 yang sebesar Rp1.644.340.729.356,69 maka Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.750.857.817,17 atau sebesar 0,53%.

Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Pendapatan LO Tahun 2025 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 136 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	256.269.416.002,47	228.105.118.005,64	28.164.297.996,83	12,35
2	Pendapatan Transfer	1.283.017.858.842,00	1.348.612.229.211,00	(65.594.370.369,00)	(4,86)
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	113.804.312.329,39	67.623.382.140,05	46.180.930.189,34	68,29
Jumlah		**1.653.091.587.173,86**	**1.644.340.729.356,69**	**8.750.857.817,17**	**0,53**

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp256.269.416.002,47 mengalami kenaikan sebesar Rp28.164.297.996,83 atau 12,35% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Rincian masing-masing jenis PAD-LO dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 137 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	79.830.277.865,00	52.331.058.446,72	27.499.219.418,28	52,55
2	Pendapatan Retribusi Daerah	168.376.496.668,87	137.029.392.180,25	31.347.104.488,62	22,88
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.683.670.333,41	3.579.159.141,69	104.511.191,72	2,92
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.378.971.135,19	35.165.508.236,98	(30.786.537.101,79)	(87,55)
Jumlah		**256.269.416.002,47**	**228.105.118.005,64**	**28.164.297.996,83**	**12,35**

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagaimana berikut.

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp79.830.277.865,00 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 138 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Reklame-LO	740.806.883,17	588.900.566,45	151.906.316,72	25,79
2	Pajak Air Tanah-LO	159.570.004,00	158.623.028,00	946.976,00	0,60
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	864.518.873,97	383.503.453,94	481.015.420,03	125,43
4	PBBP2-LO	26.318.450.126,00	26.121.022.379,00	197.427.747,00	0,76
5	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	3.826.582.792,00	2.042.282.031,00	1.784.300.761,00	87,37
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	22.130.563.285,86	23.036.726.988,33	(906.163.702,47)	(3,93)
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	19.819.723.300,00	0,00	19.819.723.300,00	0,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	5.970.062.600,00	0,00	5.970.062.600,00	0,00
Jumlah		**79.830.277.865,00**	**52.331.058.446,72**	**27.499.219.418,28**	**52,55**

1) Pajak Reklame-LO

Realisasi Pajak Reklame-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp740.806.883,17 yang terdiri dari:

Tabel 139 Pajak Reklame - LO Tahun 2025 dan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	611.589.839,07	489.113.571,69	122.476.267,38	25,04
2	Pajak Reklame Kain-LO	100.458.639,36	74.747.456,81	25.711.182,55	34,40
3	Pajak Reklame Berjalan-LO	28.758.404,74	25.039.537,95	3.718.866,79	14,85
Jumlah		**740.806.883,17**	**588.900.566,45**	**151.906.316,72**	**25,79**

Terdapat kenaikan atas realisasi Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2025 sebesar Rp151.906.316,72 atau 25,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

2) Pajak Air Tanah-LO
Pajak Air Tanah-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp159.570.004,00 mengalami kenaikan sebesar Rp946.976,00 atau 0,6% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp158.623.028,00.

3) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO
Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp864.518.873,97 mengalami kenaikan sebesar Rp481.015.420,03 atau 125,43% dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp383.503.453,94.

4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp26.318.450.126,00 mengalami peningkatan sebesar Rp197.427.747,00 atau 0,75% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp26.121.022.379,00.

5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp3.826.582.792,00 mengalami

peningkatan sebesar Rp1.784.300.761,00 atau 87,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.042.282.031,00.

6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada Tahun 2025 sebesar Rp22.130.563.285,86 mengalami penurunan sebesar Rp906.163.702,47 atau 3,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp23.036.726.988,33.

7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tambahan pungutan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan secara nasional pada Januari 2025. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2025 sebesar Rp19.819.723.300,00.

8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan tambahan pungutan pajak yang dikenakan saat terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti jual beli kendaraan, hibah, atau warisan. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Tahun 2025 sebesar Rp5.970.062.600,00.

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 32,97% atau sebesar Rp26.318.450.126,00 diperoleh dari Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2025.

Dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp79.830.277.865,00 terdapat penerimaan kas sebesar Rp77.172.106.680,17 dan penerimaan non kas sebesar Rp2.658.171.184,83.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah (LRA) sebesar Rp79.258.618.063,83 dikurangi :

1) Penerimaan Pembayaran Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.766.921.538,00, dan

2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp319.589.845,66.

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp2.658.171.184,83 terdiri dari :

1) Penambahan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.283.181.579,00 dan

2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp374.989.605,83.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp168.376.496.668,87 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 140 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
A	**Retribusi Jasa Umum-LO**	**154.841.816.218,00**	**123.881.462.448,84**	**30.960.353.769,16**	**24,99**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	149.461.360.218,00	118.493.237.448,84	30.968.122.769,16	26,13
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.053.436.000,00	3.059.424.000,00	(5.988.000,00)	(0,20)
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.222.950.000,00	2.253.426.000,00	(30.476.000,00)	(1,35)
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	104.070.000,00	75.375.000,00	28.695.000,00	38,07
B	**Retribusi Jasa Usaha-LO**	**13.041.489.225,37**	**12.535.466.731,41**	**506.022.493,96**	**4,04**
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	57.148.200,00	(57.148.200,00)	(100,00)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	22.722.000,00	(22.722.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	2.650.000,00	1.750.000,00	900.000,00	51,43
5	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	248.313.863,01	242.163.173,52	6.150.689,49	2,54
6	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO	240.764.550,00	621.550.970,00	(380.786.420,00)	(61,26)
7	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	1.460.510.500,00	1.268.045.000,00	192.465.500,00	15,18
8	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	23.750.000,00	29.175.000,00	(5.425.000,00)	(18,59)
9	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	8.926.135.000,00	7.864.390.000,00	1.061.745.000,00	13,50
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	77.605.000,00	62.088.750,00	15.516.250,00	24,99
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.061.760.312,36	2.344.233.637,89	(282.473.325,53)	(12,05)
C	**Retribusi Perizinan Tertentu-LO**	**493.191.225,50**	**612.463.000,00**	**(119.271.774,50)**	**(19,47)**
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	493.191.225,50	612.463.000,00	(119.271.774,50)	(19,47)
Jumlah		**168.376.496.668,87**	**137.029.392.180,25**	**31.347.104.488,62**	**22,88**

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut, sebesar 88,77% dihasilkan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang total realisasinya mencapai Rp149.461.360.218,00. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024, Retribusi Daerah-LO mengalami peningkatan sebesar Rp31.347.104.488,62 atau 22,88%.

Dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp168.376.496.668,87 terdapat penerimaan kas sebesar Rp158.610.779.877,08 dan penerimaan non kas sebesar Rp9.765.716.791,79.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah (LRA) sebesar Rp167.299.910.680,00 dikurangi :

1) Pelunasan Piutang Retribusi sebesar Rp8.608.352.291,50;
2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp80.778.511,42.

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp9.765.716.791,79

terdiri dari :

1) Penambahan Piutang Retribusi sebesar Rp9.700.544.237,00;
2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp65.172.554,79.

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.683.670.333,41 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 141 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO**	**3.038.168.026,41**	**3.018.883.539,69**	**19.284.486,72**	**0,64**
	- Bank Jatim	2.928.094.026,41	2.910.967.539,69	17.126.486,72	0,59
	- Bank Perkreditan Rakyat	110.074.000,00	107.916.000,00	2.158.000,00	2,00
2	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO**	**645.502.307,00**	**560.275.602,00**	**85.226.705,00**	**15,21**
	- PDAM- Laba yang disetor tunai	86.830.799,00	82.452.629,00	4.378.170,00	5,31
	- PDAM	558.671.508,00	477.822.973,00	80.848.535,00	16,92
Jumlah		**3.683.670.333,41**	**3.579.159.141,69**	**104.511.191,72**	**2,92**

Jumlah realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dari objek penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar Rp2.928.094.026,41.

Dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024, pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa deviden atas penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp17.126.486,72 atau 0,59%.

Penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp110.074.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.158.000,00 atau 2% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp645.502.307,00 yang terdiri dari pendapatan dividen dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp86.830.799,00 dan pengakuan laba tahun berjalan PDAM sebesar Rp558.671.508,00. Dibandingkan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp167.679.334,00 atau 35,09%.

Dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp3.683.670.333,41 terdapat

penerimaan kas sebesar Rp3.124.998.825,41 dan penerimaan non kas sebesar Rp558.671.508,00.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) sebesar Rp3.124.998.825,41. Adapun penerimaan non kas sebesar Rp558.671.508,00 merupakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari pengakuan atas laba atau rugi pada PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah daerah dengan kepemilikan 100%.

1.1.4 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tahun 2025 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp4.378.971.135,19. Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 142 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	241.150.400,00	480.546.521,00	(239.396.121,00)	(49,82)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	3.478.000,00	(3.478.000,00)	(100,00)
3	Jasa Giro-LO	381.022.268,53	358.094.770,73	22.927.497,80	6,40
4	Pendapatan Bunga-LO	2.100.397.294,41	4.008.340.812,82	(1.907.943.518,41)	(47,60)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	169.571.276,28	204.320.288,00	(34.749.011,72)	(17,01)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	40.952.915,00	31.334.819,00	9.618.096,00	30,69
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	761.440.869,04	504.822.572,50	256.618.296,54	50,83
8	Pendapatan dari BLUD-LO	673.877.778,60	29.399.545.452,93	(28.725.667.674,33)	(97,71)
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	10.558.333,33	175.025.000,00	(164.466.666,67)	(93,97)
Jumlah		**4.378.971.135,19**	**35.165.508.236,98**	**(30.786.537.101,79)**	**(87,55)**

1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO

   Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp241.150.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp239.396.121,00 atau 49,82% dibandingkan Tahun 2024.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

   Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.478.000,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024.

3) Jasa Giro - LO

   Jasa Giro - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp381.022.268,53 mengalami kenaikan sebesar Rp22.927.497,80 atau 6,40% dibandingkan Tahun 2024.

4) Pendapatan Bunga - LO

   Pendapatan Bunga - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp2.100.397.294,41 merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dalam bentuk deposito pada Bank Jatim. Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.907.943.518,41 atau 47,60% dibandingkan penerimaan tahun lalu.

5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan LO terealisasi sebesar Rp169.571.276,28 hal ini mengalami penurunan sebesar Rp34.749.011,72 atau 17,01% dari tahun 2024.

6) Pendapatan Denda Pajak - LO

Pendapatan Denda Pajak - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp40.952.915,00.

Terdapat kenaikan sebesar Rp9.618.096,00 atau 30,69% dibandingkan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 143 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	1.322.740,00	(1.322.740,00)	(100,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	0,00	1.773.018,00	(1.773.018,00)	(100,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	0,00	576.546,00	(576.546,00)	(100,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	1.413.636,00	3.869.961,00	(2.456.325,00)	(63,47)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	122.353,00	(122.353,00)	(100,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	250.020,00	306.556,00	(56.536,00)	(18,44)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	20.160,00	1.453.529,00	(1.433.369,00)	(98,61)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	23.320.990,00	21.910.116,00	1.410.874,00	6,44
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	2.948.109,00	0,00	2.948.109,00	100,00
Jumlah		**40.952.915,00**	**31.334.819,00**	**9.618.096,00**	**30,69**

7) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan dari Pengembalian - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp761.440.869,04. Terdapat kenaikan sebesar Rp256.618.296,54 atau 50,83% dibandingkan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 144 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	49.225.000,00	3.660.000,00	45.565.000,00	1.244,95
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	263.958.308,00	252.054.265,00	11.904.043,00	4,72
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO	0,00	803.484,00	(803.484,00)	(100,00)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	465.000,00	5.042.445,00	(4.577.445,00)	(90,78)
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	0,00	8.192.000,00	(8.192.000,00)	(100,00)
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	282.241.875,00	0,00	282.241.875,00	100,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	52.612.135,01	0,00	52.612.135,01	100,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO	0,00	57.886,50	(57.886,50)	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	58.422.943,03	0,00	58.422.943,03	100,00

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO				
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	0,00	235.012.492,00	(235.012.492,00)	(100,00)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	54.515.608,00	0,00	54.515.608,00	100,00
	Jumlah	**761.440.869,04**	**504.822.572,50**	**256.618.296,54**	**50,83**

8) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp673.877.778,60. Terdapat penurunan sebesar Rp28.725.667.674,33 atau 97,71% dibandingkan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 145 Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	81.229.400,00	0,00	81.229.400,00	100,00
2	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	88.960.000,00	3.127.457.358,98	(3.038.497.358,98)	(97,16)
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	46.368.107,50	25.575.629.547,95	(25.529.261.440,45)	(99,82)
4	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	457.320.271,10	696.458.546,00	(239.138.274,90)	(34,34)
Jumlah		**673.877.778,60**	**29.399.545.452,93**	**(28.725.667.674,33)**	**(97,71)**

a) Pendapatan BLUD atas Jasa Layanan sebesar Rp81.229.400,00.

b) Pendapatan BLUD dari Hibah-LO sebesar RP88.960.000,00 yang terdiri atas Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO sebesar Rp59.310.000,00 dan Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat-LO sebesar Rp29.650.000,00.

c) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO sebesar Rp46.368.107,50. Jika dibandingkan Tahun 2024, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 99,82%.

d) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO sebesar Rp457.320.271,10 terdiri dari: Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO, Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga-LO, Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO dan Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha-LO.

9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO pada Tahun 2025 sebesar Rp10.558.333,33. Terdapat penurunan sebesar Rp164.466.666,67 atau 93,97% dibandingkan Tahun 2024.

Dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah–LO sebesar Rp4.378.971.135,19 terdapat penerimaan kas sebesar Rp4.271.612.801,86 dan penerimaan non kas sebesar Rp107.358.333,33.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Lain-lain PAD yang Sah (LRA) sebesar Rp4.305.755.125,11 dikurangi pelunasan

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp33.535.430,75 dan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp606.892,50.

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp107.358.333,33 terdiri dari :

1) Penambahan Piutang sebesar Rp465.000,00;
2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp17.933.333,33;
3) Pendapatan BLUD dari Hibah-LO berupa barang persediaan yaitu susu dari Kementerian Kesehatan dalam rangka program *stunting* sebesar Rp59.310.000,00;
4) Pendapatan BLUD dari Hibah-LO berupa aset yaitu kursi tunggu di Gedung penunjang farmasi dan loket pembayaran dari Bank Jatim sebesar Rp29.650.000,00.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024, penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO mengalami penurunan sebesar Rp30.786.537.101,79 atau 87,55%.

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer senilai Rp1.283.017.858.842,00 Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp65.594.370.369,00 atau 4,86% dibandingkan Tahun 2025.

Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 146 Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.177.528.982.488,00	1.177.635.482.602,00	(106.500.114,00)	(0,01)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	14.664.399.000,00	36.782.443.000,00	(22.118.044.000,00)	(60,13)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	90.824.477.354,00	134.194.303.609,00	(43.369.826.255,00)	(32,32)
Jumlah		**1.283.017.858.842,00**	**1.348.612.229.211,00**	**(65.594.370.369,00)**	**(4,86)**

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan–LO sebesar Rp1.177.528.982.488,00. Berdasarkan obyek penerimaan terdiri atas:

Tabel 147 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	74.210.118.900,00	46.444.736.000,00	27.765.382.900,00	59,78
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	50.304.763.000,00	28.021.090.000,00	22.283.673.000,00	79,52
3	Dana Alokasi Umum	806.723.447.714,00	821.297.336.554,00	(14.573.888.840,00)	(1,77)
4	Dana Alokasi Khusus	246.290.652.874,00	281.872.320.048,00	(35.581.667.174,00)	(12,62)
Jumlah		**1.177.528.982.488,00**	**1.177.635.482.602,00**	**(106.500.114,00)**	**(0,01)**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sejumlah Rp1.177.528.982.488,00 tersebut terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak
   Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2025 sebesar Rp74.210.118.900,00 yang terdiri dari:

Tabel 148 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	DBH PBB-LO	6.142.181.500,00	3.631.082.000,00	2.511.099.500,00	69,16
2	DBH PPh Pasal 21-LO	21.716.110.700,00	11.831.795.000,00	9.884.315.700,00	83,54
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	3.382.540.700,00	1.155.413.000,00	2.227.127.700,00	192,76
4	DBH CHT-LO	42.969.286.000,00	29.826.446.000,00	13.142.840.000,00	44,06
Jumlah		**74.210.118.900,00**	**46.444.736.000,00**	**27.765.382.900,00**	**59,78**

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
   Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp50.304.763.000,00 terdiri dari:

Tabel 149 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	42.824.503.000,00	22.118.334.000,00	20.706.169.000,00	93,62
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	2.867.329.000,00	3.243.840.000,00	(376.511.000,00)	(11,61)
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	22.313.000,00	29.005.000,00	(6.692.000,00)	(23,07)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	41.009.000,00	66.241.000,00	(25.232.000,00)	(38,09)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.305.717.000,00	935.939.000,00	2.369.778.000,00	253,20
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	152.437.000,00	191.554.000,00	(39.117.000,00)	(20,42)
7	DBH SDA Perikanan-LO	1.091.455.000,00	1.436.177.000,00	(344.722.000,00)	(24,00)
Jumlah		**50.304.763.000,00**	**28.021.090.000,00**	**22.283.673.000,00**	**79,52**

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp**22.283.673.000,00** atau 79,52% dibandingkan Tahun 2024.

3) Dana Alokasi Umum
   Dana Alokasi Umum Tahun 2025 sebesar Rp806.723.447.714,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.573.888.840,00 atau 1,77% dibandingkan dengan Tahun 2024.

4) Dana Alokasi Khusus
   Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 sebesar Rp246.290.652.874,00 merupakan Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari:
   a) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp9.233.785.810,00
   b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp237.056.867.064,00

Dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.177.528.982.488,00 terdapat penerimaan kas sebesar Rp1.137.673.154.488,00 dan penerimaan non kas sebesar Rp39.855.828.000,00.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LRA) sebesar Rp1.144.424.391.488,00 dikurangi Penerimaan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Rp6.725.132.000,00 dan Penambahan Utang Pengembalian Pendapatan Dana BOP PAUD sebesar Rp26.105.000,00

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp39.855.828.000,00 merupakan penambahan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil.

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pusat – Lainnya – LO sebesar Rp14.664.399.000,00 merupakan dana yang diberikan atas penghargaan kinerja tahun sebelumnya Tahun 2024. Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2025 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp14.664.399.000,00. Terjadi penurunan sebesar Rp22.118.044.000,00 atau 60,13% dibandingkan dengan Tahun 2024

Tabel 150 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Insentif Fiskal-LO	14.664.399.000,00	36.782.443.000,00	(22.118.044.000,00)	(60,13)
Jumlah		**14.664.399.000,00**	**36.782.443.000,00**	**(22.118.044.000,00)**	**(60,13)**

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp90.824.477.354,00 yang terdiri dari:

Tabel 151 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	85.777.645.205,00	119.231.048.987,00	(33.453.403.782,00)	(28,06)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.046.832.149,00	14.963.254.622,00	(9.916.422.473,00)	(66,27)
Jumlah		**90.824.477.354,00**	**134.194.303.609,00**	**(43.369.826.255,00)**	**(32,32)**

Terjadi penurunan sebesar Rp43.369.826.255,00 atau 32,32% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
   Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 sebesar Rp85.777.645.205,00 berupa transaksi kas. Dan mengalami penurunan sebesar Rp33.453.403.782,00 atau 28,06% dibandingkan Tahun 2024.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
   Pendapatan ini merupakan pos Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebesar Rp5.046.832.149,00 berupa transaksi kas. Dibandingkan dengan Tahun 2024, penerimaan tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp9.916.422.473,00 atau 66,27%

Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp90.824.477.354,00 keseluruhannya merupakan penerimaan

kas. Penerimaan kas tersebut berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan (LRA) sebesar Rp91.084.749.205,00 dikurangi pengakuan atas penambahan Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp260.271.851,00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 senilai Rp113.804.312.329,39 mengalami kenaikan sebesar Rp46.180.930.189,34 atau 68,29% yang terdiri dari:

Tabel 152 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah	107.323.542.573,08	67.572.096.140,05	39.751.446.433,03	58,83
2	Pendapatan Lainnya	6.480.769.756,31	51.286.000,00	6.429.483.756,31	12.536,53
Jumlah		**113.804.312.329,39**	**67.623.382.140,05**	**46.180.930.189,34**	**68,29**

1.3.1 Pendapatan Hibah– LO

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 sebesar Rp107.323.542.573,08 merupakan pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 153 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	93.639.906.158,15	17.779.307.485,60	75.860.598.672,55	426,68
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	13.385.717.887,54	34.904.027.254,32	(21.518.309.366,78)	(61,65)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	27,39	0,00	27,39	100,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	297.918.500,00	14.888.761.400,13	(14.590.842.900,13)	(98,00)
Jumlah		**107.323.542.573,08**	**67.572.096.140,05**	**39.751.446.433,03**	**58,83**

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp93.639.906.158,15 merupakan pendapatan hibah berupa barang dengan rincian sebagai berikut:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp216.173.832,00 merupakan hibah masuk obat dari Kementerian Kesehatan.
   b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp488 736 000,00 hibah dari Kementerian Dalam Negeri berupa blangko e-KTP.
   c) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp84.945.233.941,00 hibah dari Kementerian PUPR.
   d) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp449.217.200,00 berupa motor
   e) Dinas Perpustakaan berupa motor, box dan buku sebesar Rp47.808.727,15 dari Perpustakaan RI.
   f) Dinas Kesehatan termasuk di 24 UPT Puskesmas sebesar Rp34.294.635,00 hibah alat kedokteran dari Kemenkes.
   g) Dinas Pendidikan sebesar Rp7.458.441.823,00 yaitu bantuan revitalisasi satuan pendidikan untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan pendidikan.

2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp13.385.717.887,54 merupakan pendapatan hibah berupa barang dengan rincian sebagai berikut:
   a) Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas sebesar Rp9.266.106.870,14 merupakan hibah dari Propinsi berupa obat sebesar Rp8.806.331.735,14 dan berupa Alkon sebesar Rp459.775.135,00.
   b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp105.228.000,00 hibah masuk dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berupa bronjong.
   c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.241.115.009,00 hibah masuk dari BPBD Provinsi berupa Aset sebesar Rp431.224767,00 dan Persediaan Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp809.890.242,00.
   d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp560.865.795,00 hibah dari BKKBN Propinsi berupa obat-obatan lainnya.
   e) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian sebesar Rp2.212.402.213,40 hibah masuk berupa persediaan obat hewan.
3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp27,39 merupakan Pendapatan Hibah berupa penerimaan kas dari pengembalian sisa dana BOP PAUD.
4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp297.918.500,00 merupakan hibah masuk berupa alat kedokteran.

1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pada Tahun 2025 Pendapatan Lainnya LO sebesar Rp6.480.769.756,3 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.429.483.756,31atau 12.536,53% dari tahun 2024.

Tabel 154 Rincian Lain-lain Pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	6.480.769.756,31	51.286.000,00	6.429.483.756,31	12.536,53
Jumlah		**6.480.769.756,31**	**51.286.000,00**	**6.429.483.756,31**	**12.536,53**

Pendapatan Lainnya -LO sebesar Rp6.480.769.756,31 merupakan transaksi kas dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengembalian dana hibah dari KPU sebesar Rp4.972.287.582,46
2) Pengembalian dana hibah dari BAWASLU sebesar Rp1.502.529.323,60
3) Pengembalian dana hibah atas pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp5.952.850,25.

	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2. Beban	**1.639.965.773.316,62**	**1.696.576.711.890,80**	**(56.610.938.574,18)**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada Tahun 2025 beban terealisasi sebesar Rp1.639.965.773.316,62. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp1.696.576.711.890,80 tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp56.610.938.574,18 atau sebesar 3,34%. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 155 Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	797.581.855.518,54	759.676.932.402,45	37.904.923.116,09	4,99
2	Beban Persediaan	248.692.959.416,17	228.564.471.193,88	20.128.488.222,29	8,81
3	Beban Jasa	184.981.741.248,35	227.072.004.217,44	(42.090.262.969,09)	(18,54)
4	Beban Pemeliharaan	11.520.226.120,23	17.797.292.641,90	(6.277.066.521,67)	(35,27)
5	Beban Perjalanan Dinas	33.314.716.507,00	54.115.711.352,00	(20.800.994.845,00)	(38,44)
6	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - LO	11.310.156.732,00	8.202.112.433,00	3.108.044.299,00	37,89
7	Beban Hibah	33.216.122.086,85	73.919.078.635,12	(40.702.956.548,27)	(55,06)
8	Beban Bantuan Sosial	779.800.000,00	674.200.000,00	105.600.000,00	15,66
9	Beban Penyisihan	611.320.343,34	687.954.214,60	(76.633.871,26)	(11,14)
10	Beban Penyusutan	204.460.730.679,14	218.485.568.845,41	(14.024.838.166,27)	(6,42)
11	Beban Transfer	113.496.144.665,00	107.381.385.955,00	6.114.758.710,00	5,69
Jumlah		**1.639.965.773.316,62**	**1.696.576.711.890,80**	**(56.610.938.574,18)**	**(3,34)**

2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp797.581.855.518,54 mengalami kenaikan sebesar Rp37.904.923.116,09 atau 4,99% dari realisasi tahun sebelumnya. Beban Pegawai terdiri dari.

Tabel 156 Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	495.739.932.198,00	495.373.235.143,00	366.697.055,00	0,07
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	279.737.772.054,54	43.001.648.068,00	236.736.123.986,54	550,53
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	178.609.528.895,21	(178.609.528.895,21)	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.090.869.982,00	20.078.991.138,00	11.878.844,00	0,06
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.161.281.284,00	806.728.637,00	354.552.647,00	43,95
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	831.000.000,00	21.000.000,00	2,53
7	Beban Pegawai BLUD	0,00	20.975.800.521,24	(20.975.800.521,24)	(100,00)
JUMLAH		**797.581.855.518,54**	**759.676.932.402,45**	**37.904.923.116,09**	**4,99**

Dibandingkan dengan Tahun 2024, kenaikan beban pegawai Tahun 2025 terbesar yaitu Beban Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 sebesar Rp495.739.932.198,00 yang terdiri dari:

Tabel 157 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Gaji Pokok ASN	379.030.872.679,00	379.502.709.632,00	(471.836.953,00)	(0,12)
2	Tunjangan Keluarga - LO	34.655.695.103,00	34.661.524.441,00	(5.829.338,00)	(0,02)
3	Tunjangan Jabatan - LO	3.609.030.000,00	4.727.244.943,00	(1.118.214.943,00)	(23,65)
4	Tunjangan Fungsional - LO	21.736.922.190,00	22.244.382.770,00	(507.460.580,00)	(2,28)
5	Tunjangan Fungsional Umum - LO	7.949.774.583,00	7.309.070.000,00	640.704.583,00	8,77
6	Tunjangan Beras - LO	19.715.799.379,00	19.856.659.996,00	(140.860.617,00)	(0,71)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	936.673.074,00	983.695.137,00	(47.022.063,00)	(4,78)
8	Pembulatan Gaji - LO	5.286.184,00	5.351.665,00	(65.481,00)	(1,22)
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	24.976.286.708,00	22.964.437.117,00	2.011.849.591,00	8,76
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	780.901.477,00	779.228.170,00	1.673.307,00	0,21
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.342.690.821,00	2.338.931.272,00	3.759.549,00	0,16
Jumlah		**495.739.932.198,00**	**495.373.235.143,00**	**366.697.055,00**	0,07

Terdapat kenaikan sebesar Rp366.697.055,00 atau 0,07 % dari Tahun 2024.

Dari saldo Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp495.739.932.198,00, terdapat pengeluaran kas sebesar Rp493.654.456.284,00 dan transaksi non kas sebesar Rp2.085.475.914,00.

Dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (LRA) sebesar Rp494.242.963.393.00, yang tidak diakui sebagai Beban Gaji dan Tunjangan LO adalah pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp588.507.109,00. Adapun transaksi non kas sebesar Rp2.085.475.914,00 terdiri dari :

1) Penambahan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp188.782.683,00, dan
2) Reklasifikasi Beban Gaji dan Tunjangan dari Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp1.896.693.231,00.

2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025 sebesar Rp279.737.772.054,54 yang terdiri dari:

Tabel 158 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.988.750.194,00	15.934.074.817,00	(1.945.324.623,00)	(12,21)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.903.279.500,00	2.755.583.400,00	147.696.100,00	5,36
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.327.850.552,00	24.311.989.851,00	(2.984.139.299,00)	(12,27)
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	241.517.891.808,54	0,00	241.517.891.808,54	100,00
Jumlah		**279.737.772.054,54**	**43.001.648.068,00**	**236.736.123.986,54**	**550,53**

Terdapat kenaikan sebesar Rp236.736.123.986,54 atau 550,53% dari realisasi Tahun 2024.

Terdapat selisih sebesar Rp53.507.671.885,54 antara realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada LRA sebesar Rp226.230.100.169,00 dengan realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN LO sebesar Rp279.737.772.054,54 dengan penjelasan sebagai berikut.

Terdapat Pelunasan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp3.072.000,00, Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN- sebesar Rp3.350.000,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp4.608.000,00. Dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp4.319.460.694,00.

Dari saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp279.737.772.054,54 terdapat pengeluaran kas sebesar Rp221.899.609.475,00 yang merupakan Belanja Tambahan Penghasilan ASN (LRA) dan transaksi non kas sebesar Rp57.838.162.579,54 yang terdiri dari penambahan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp5.706.120.429,54 dan merupakan reklasifikasi dari Beban Pegawai BLUD sebesar Rp52.132.042.150,00.

2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Tabel 159 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	1.299.693.000,00	(1.299.693.000,00)	(100,00)
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	350.230.850,00	(350.230.850,00)	(100,00)
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	134.390.366.600,00	(134.390.366.600,00)	(100,00)
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	5.537.750.000,00	(5.537.750.000,00)	(100,00)
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	32.934.110.095,21	(32.934.110.095,21)	(100,00)
6	Beban Honorarium	0,00	4.097.378.350,00	(4.097.378.350,00)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**178.609.528.895,21**	**(178.609.528.895,21)**	**(100,00)**

Terdapat penurunan sebesar Rp178.609.528.895,21 atau 100% dari realisasi Tahun 2024.

2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp20.090.869.982,00 yang terdiri dari:

Tabel 160 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	994.560.000,00	996.030.000,00	(1.470.000,00)	(0,15)
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	98.424.900,00	91.329.000,00	7.095.900,00	7,77
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	112.033.740,00	109.499.040,00	2.534.700,00	2,31
4	Beban Uang Paket DPRD	85.743.000,00	85.890.000,00	(147.000,00)	(0,17)
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.442.112.000,00	1.444.243.500,00	(2.131.500,00)	(0,15)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	139.948.300,00	116.867.100,00	23.081.200,00	19,75
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	3.197.250,00	(3.197.250,00)	(100,00)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.649.000.000,00	5.670.000.000,00	(21.000.000,00)	(0,37)
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.407.000.000,00	934.500.000,00	472.500.000,00	50,56
10	Beban Pembebanan PPh kepada	63.126,00	24.168,00	38.958,00	161,20

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Pimpinan				
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.401.109.916,00	5.369.171.080,00	31.938.836,00	0,59
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.753.000.000,00	4.850.000.000,00	(97.000.000,00)	(2,00)
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	7.875.000,00	408.240.000,00	(400.365.000,00)	(98,07)
Jumlah		**20.090.869.982,00**	**20.078.991.138,00**	**11.878.844,00**	**0,06**

Terdapat penurunan sebesar Rp11.878.844,00 atau 0,06% dari realisasi Tahun 2024. Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp20.078.991.138,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp1.161.281.284,00 yang terdiri dari :

Tabel 161 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.420.000,00	98.420.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	3.765.840,00	289.680,00	7,69
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	428.634,00	487.737,00	(59.103,00)	(12,12)
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.440,00	1.320,00	120,00	9,09
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.367.360,00	5.367.360,00	0,00	0,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	836.348.850,00	506.502.650,00	329.846.200,00	65,12
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	158.082.200,00	133.606.450,00	24.475.750,00	18,32
Jumlah		**1.161.281.284,00**	**806.728.637,00**	**354.552.647,00**	**43,95**

Terdapat kenaikan sebesar Rp354.552.647,00 atau 43,95% dari realisasi Tahun 2024. Dari Belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp1.161.281.284,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada Beban LO.

2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp852.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 162 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	231.000.000,00	21.000.000,00	9,09
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH – LO	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**852.000.000,00**	**831.000.000,00**	**21.000.000,00**	**2,53**

Dari Belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp852.000.000,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas

pada Beban LO.

2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2025 senilai Rp248.692.959.416,17 yang terdiri dari:

Tabel 163 Beban Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	247.686.107.047,66	227.840.298.111,26	19.845.808.936,40	8,71
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	110.301.009,00	234.144.930,00	(123.843.921,00)	(52,89)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	896.551.359,51	490.028.152,62	406.523.206,89	82,96
Jumlah		**248.692.959.416,17**	**228.564.471.193,88**	**20.128.488.222,29**	**8,81**

Beban Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp248.692.959.416,17 terdapat kenaikan sebesar Rp20.128.488.222,29 atau 8,81 % dibandingkan dengan saldo beban tahun lalu. Saldo Beban Persediaan tersebut terdiri atas pengeluaran kas sebesar Rp131.735.080.502,48 dan transaksi non kas sebesar Rp116.957.878.913,69.Dari Belanja Barang (LRA) sebesar Rp153,838,983,746.00, yang tidak diakui sebagai Beban Persediaan sebesar Rp22.103.903.243,52 yang terdiri dari :

1) Pelunasan Utang Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp7.407.549.589,51;
2) Belanja Barang tahun berjalan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp421.561.462,00;
3) Belanja Barang tahun berjalan yang menjadi sisa Persediaan pada akhir tahun sebesar Rp14.155.384.054,79.
4) Belanja Barang yang dihapus senilai Rp119.408.137,22.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp116.957.878.913,69 terdiri dari:

1) Penambahan Utang Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp6.149.692.442,34;
2) Belanja Modal yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset (Extracomptable) sebesar Rp777.111.635,51;
3) Penggunaan persediaan awal sebesar Rp22.772.359.108,81;
4) Penggunaan persediaan yang diperoleh dari pendapatan hibah sebesar Rp10.188.856.383,40;
5) Reklas antar beban LO sebesar Rp77.069.859.343,63;

Adapun rincian dari beban persediaan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis Tahun 2025 sebesar Rp247.686.107.047,66 yang terdiri dari :

Tabel 164 Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.513.990.501,42	15.295.332.522,00	(1.781.342.020,58)	(11,65)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	11.339.866.482,43	10.369.698.041,25	970.168.441,18	9,36
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.980.052.321,00	4.839.464.081,50	140.588.239,50	2,91
4	Beban Bahan-Bahan Baku	379.204.419,00	270.986.310,00	108.218.109,00	39,93
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit	157.268.348,00	301.181.420,00	(143.913.072,00)	(47,78)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Tanaman				
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	86.101.851,00	28.223.672,00	57.878.179,00	205,07
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	360.549.004,00	184.109.572,00	176.439.432,00	95,83
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	22.251.832,00	168.705.448,44	(146.453.616,44)	(86,81)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.118.785.110,00	2.110.575.400,00	8.209.710,00	0,39
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.454.136.422,00	1.221.352.370,00	232.784.052,00	19,06
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	260.292.891,00	131.684.400,00	128.608.491,00	97,66
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	29.557.080,00	67.250.000,00	(37.692.920,00)	(56,05)
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.527.305.158,03	2.866.466.855,98	3.660.838.302,05	127,71
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.096.328.047,70	3.282.498.134,55	2.813.829.913,15	85,72
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.909.633.116,50	7.204.518.540,50	4.705.114.576,00	65,31
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	314.224.235,00	263.770.140,00	50.454.095,00	19,13
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.287.508.847,26	2.662.863.181,16	1.624.645.666,10	61,01
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.342.812.616,21	2.689.101.384,60	2.653.711.231,61	98,68
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.615.667.614,73	1.181.746.323,54	433.921.291,19	36,72
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.977.006.901,34	2.593.063.377,00	(616.056.475,66)	(23,76)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.692.098.957,00	1.091.870.747,00	600.228.210,00	54,97
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.042.584.424,80	1.568.450.738,00	(525.866.313,20)	(33,53)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.144.770.269,47	9.736.410.149,48	(4.591.639.880,01)	(47,16)
24	Beban Obat-Obatan-Obat	30.935.312.576,09	41.660.764.505,41	(10.725.451.929,32)	(25,74)
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	19.415.841.255,80	22.073.614.849,37	(2.657.773.593,57)	(12,04)
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.861.181.435,50	17.608.836.065,00	(1.747.654.629,50)	(9,92)
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	69.317.506.295,60	49.374.009.987,64	19.943.496.307,96	40,39
28	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	25.243.160,55	116.699.950,00	(91.456.789,45)	(78,37)
29	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.664.129.747,35	4.319.856.766,22	344.272.981,13	7,97
30	Beban Natura dan Pakan-Pakan	111.067.944,00	131.229.350,00	(20.161.406,00)	(15,36)
31	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	14.414.966,88	389.986,12	14.024.980,76	3.596,28
32	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	68.426.845,00	34.156.500,00	34.270.345,00	100,33
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.327.593.014,00	16.975.107.687,50	352.485.326,50	2,08
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.232.887.962,00	1.301.891.959,00	(69.003.997,00)	(5,30)
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	750.777.000,00	0,00	750.777.000,00	100,00
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.287.231.127,00	1.107.914.776,00	3.179.316.351,00	286,96
37	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.267.054.500,00	1.886.629.375,00	380.425.125,00	20,16
38	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	193.997.500,00	165.260.000,00	28.737.500,00	17,39
39	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	305.394.300,00	649.080.000,00	(343.685.700,00)	(52,95)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	3.885.000,00	(3.885.000,00)	(100,00)
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	3.330.000,00	(3.330.000,00)	(100,00)
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.258.400,00	0,00	8.258.400,00	100,00
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00
44	Beban Pakaian Adat Daerah	98.541.000,00	48.606.900,00	49.934.100,00	102,73
45	Beban Pakaian Batik Tradisional	12.950.062,00	0,00	12.950.062,00	100,00
46	Beban Pakaian Olahraga	103.706.206,00	54.123.045,00	49.583.161,00	91,61
47	Beban Pakaian Paskibraka	2.400.000,00	192.258.600,00	(189.858.600,00)	(98,75)
48	Beban Pakaian Jas/Safari	23.250.000,00	0,00	23.250.000,00	100,00
49	Beban Barang Sampel Pangan	3.615.300,00	0,00	3.615.300,00	100,00
	Jumlah	**247.686.107.047,66**	**227.840.298.111,26**	**19.845.808.936,40**	**8,71**

Terjadi kenaikan sebesar Rp19.845.808.936,40 atau 8,71% dari Beban Habis Pakai Tahun 2024.

2.2.5 Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025 sebesar Rp110.301.009,00 terdiri dari:

Tabel 165 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	110.301.009,00	52.237.430,00	58.063.579,00	111,00
2	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	180.315.000,00	(180.315.000,00)	(100,00)
3	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	1.592.500,00	(1.592.500,00)	(100,00)
Jumlah		**110.301.009,00**	**234.144.930,00**	**(123.843.921,00)**	**(52,89)**

Terjadi penurunan sebesar Rp123.843.921,00 atau 52,89 % dari beban habis pakai Tahun 2024.

2.3 Beban Jasa

Belanja Jasa Tahun 2025 mencapai Rp184.981.741.248,35. Terjadi penurunan Rp42.090.262.969,09 atau 18,54% dari Tahun sebelumnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 166 Beban Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Jasa	184.841.176.948,00	160.451.629.400,00	24.389.547.549,00	15,20
2	Beban Barang dan Jasa BOSP	140.564.300,00	37.149.215.340,00	(37.008.651.040,00)	(99,62)
3	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	14.395.872.337,00	(14.395.872.337,00)	(100,00)
4	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	15.075.287.141,00	(15.075.287.141,00)	(100,00)
Jumlah		**184.981.741.248,35**	**227.072.004.217,44**	**(42.090.262.969,09)**	**(18,54)**

2.3.1 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Tahun 2025 sebesar Rp140.643.567,149,26 yang terdiri dari:

Tabel 167 Beban Jasa Kantor Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.114.542.500,00	5.201.152.500,00	(86.610.000,00)	(1,67)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.673.655.000,00	2.382.415.000,00	291.240.000,00	12,22
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	391.600.000,00	577.200.000,00	(185.600.000,00)	(32,16)
5	Beban Honorarium Rohaniwan	1.500.000,00	2.800.000,00	(1.300.000,00)	(46,43)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	18.600.000,00	(18.600.000,00)	(100,00)
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	318.565.000,00	0,00	318.565.000,00	100,00
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	156.150.000,00	628.500.000,00	(472.350.000,00)	(75,16)
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	433.500.000,00	450.000.000,00	(16.500.000,00)	(3,67)
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	10.281.412.350,00	8.405.500.000,00	1.875.912.350,00	22,32
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	17.636.284.209,26	13.638.227.889,35	3.998.056.319,91	29,32
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	86.572.260,00	36.000.000,00	50.572.260,00	140,48
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.678.940.000,00	4.413.814.500,00	265.125.500,00	6,01
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.116.500.000,00	1.015.950.000,00	100.550.000,00	9,90
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	271.400.000,00	242.800.000,00	28.600.000,00	11,78
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	422.700.000,00	1.483.600.000,00	(1.060.900.000,00)	(71,51)
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	593.980.000,00	218.400.000,00	375.580.000,00	171,97
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	264.040.000,00	77.550.000,00	186.490.000,00	240,48
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	15.139.756.500,00	13.015.350.646,00	2.124.405.854,00	16,32
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	445.412.100,00	594.926.913,00	(149.514.813,00)	(25,13)
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.696.429.857,00	1.620.063.083,00	76.366.774,00	4,71
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	5.355.356.700,00	3.910.629.360,22	1.444.727.339,78	36,94
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.676.877.624,00	3.680.886.538,00	995.991.086,00	27,06
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.113.566.000,00	971.100.000,00	142.466.000,00	14,67
25	Beban Jasa Tenaga Supir	222.600.000,00	206.800.000,00	15.800.000,00	7,64
26	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	259.254.589,00	214.800.000,00	44.454.589,00	20,70
28	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	74.378.400,00	54.834.000,00	19.544.400,00	35,64
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	163.185.000,00	153.250.000,00	9.935.000,00	6,48
30	Beban Jasa Tata Rias	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	659.200.000,00	1.037.515.789,00	(378.315.789,00)	(36,46)
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.698.300,00	87.592.452,00	(77.894.152,00)	(88,93)
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	10.459.450,00	891.800,00	9.567.650,00	1.072,85
34	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	42,86
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	16.445.760.703,00	16.918.260.171,00	(472.499.468,00)	(2,79)
36	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
37	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	122.847.170,00	142.064.825,00	(19.217.655,00)	(13,53)
38	Beban Jasa Kalibrasi	287.498.000,00	210.597.000,00	76.901.000,00	36,52
39	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.384.666.178,00	1.267.832.817,00	116.833.361,00	9,22
40	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	63.988.114,00	71.078.677,00	(7.090.563,00)	(9,98)
41	Beban Jasa Pengukuran Tanah	2.000.000,00	108.000.000,00	(106.000.000,00)	(98,15)
42	Beban Jasa Jalan/Tol	52.245.900,00	22.454.000,00	29.791.900,00	132,68
43	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.446.373.632,00	1.374.311.400,00	72.062.232,00	5,24
44	Beban Tagihan Telepon	384.397.796,00	350.032.015,00	34.365.781,00	9,82
45	Beban Tagihan Air	298.621.439,00	105.966.290,00	192.655.149,00	181,81
46	Beban Tagihan Listrik	7.147.786.279,00	6.306.294.040,00	841.492.239,00	13,34
47	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	248.282.000,00	130.760.000,00	117.522.000,00	89,88
48	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.198.775.843,00	3.099.421.118,00	2.099.354.725,00	67,73
49	Beban Paket/Pengiriman	9.805.645,00	6.291.502,00	3.514.143,00	55,86
50	Beban Penambahan Daya	216.188.976,00	1.073.240.200,00	(857.051.224,00)	(79,86)
51	Beban Registrasi/Keanggotaan	541.010.346,00	6.600.000,00	534.410.346,00	8.097,13
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	839.115.587,00	470.421.878,00	368.693.709,00	78,38
53	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	10.205.993.732,00	10.142.281.096,00	63.712.636,00	0,63
54	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	11.409.135,00	(11.409.135,00)	(100,00)
55	Beban Lembur	5.323.204.200,00	3.792.590.100,00	1.530.614.100,00	40,36
56	Beban Medical Check Up	78.213.496,00	51.151.300,00	27.062.196,00	52,91
57	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	10.874.617.077,00	9.420.823.183,34	1.453.793.893,66	15,43
58	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan	84.076.447,00	0,00	84.076.447,00	100,00
59	Beban Honorarium Penanggung Jawab	4.071.920.000,00	0,00	4.071.920.000,00	100,00

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Pengelola Keuangan				
60	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.021.137.750,00	0,00	1.021.137.750,00	100,00
	Jumlah	**140.643.567.149,26**	**119.470.031.217,91**	**21.173.535.931,35**	**17,72**

Terjadi kenaikan sebesar Rp21.173.535.931,35 atau 17,72% dari tahun sebelumnya.

Dari saldo Beban Jasa Kantor sebesar Rp140.643.567.149,26 terdapat pengeluaran kas sebesar Rp98.711.869.258,67 dan transaksi non kas sebesar Rp41.931.697.890,59.

Dari Belanja Jasa Kantor

(LRA) sebesar Rp100.311.929.584.00, yang tidak diakui sebagai Beban Beban Jasa sebesar Rp1.600.060.325,33 yang terdiri dari :

1) Pelunasan Utang Belanja Jasa Kantor Tahun 2023 sebesar Rp1.565.771.992,00,
2) Penambahan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 Rp34.288.333,33.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp41.931.697.890,59 terdiri dari :

1) Penambahan Utang Belanja Jasa Tahun 2025 sebesar Rp1.058.597.020,00;
2) Beban Dibayar dimuka sebesar Rp33.115.833,33;
3) Reklas dari Beban Jasa (LO) ke jenis beban yang lain sebesar Rp40.839.985.037,26.

2.3.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 sebesar Rp28.418.856.696,09 yang terdiri dari:

Tabel 168 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.612.758.372,00	2.449.224.528,00	163.533.844,00	6,68
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.300.395.000,00	20.346.343.500,00	(45.948.500,00)	(0,23)
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.995.113.900,00	2.079.724.500,00	(84.610.600,00)	(4,07)
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.643.444.722,12	1.046.799.644,16	596.645.077,96	57,00
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	150.686.547,72	116.784.988,42	33.901.559,30	29,03
6	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	121.214.412,43	75.509.777,21	45.704.635,22	60,53
7	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	129.518.058,00	134.367.200,00	(4.849.142,00)	(3,61)
8	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	215.284.883,82	0,00	215.284.883,82	100,00
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	744.310.000,00	487.670.000,00	256.640.000,00	52,63
10	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	506.130.800,00	331.615.600,00	174.515.200,00	52,63
Jumlah		**28.418.856.696,09**	**27.068.039.737,79**	**1.350.816.958,30**	**4,99**

Terjadi kenaikan sebesar Rp1.350.816.958,30 atau 4,99% dari tahun sebelumnya.

Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 sebesar Rp28.418.856.696,09 terdiri dari pengeluaran kas sebesar Rp27.236.949.684,00 dan beban non kas sebesar

Rp1.181.907.012,09 yang merupaka Reklas antar beban LO.

2.3.3 Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah Tahun 2025 sebesar Rp516.500.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 169 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	405.500.000,00	400.500.000,00	5.000.000,00	1,25
2	Beban Sewa Tanah Basah	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	100,00
Jumlah		**516.500.000,00**	**400.500.000,00**	**116.000.000,00**	**28,96**

Terjadi kenaikan sebesar Rp116.000.000,00 atau 28,96% dari tahun sebelumnya.
Dari realisasi sebesar Rp516.500.000,00 merupakan transaksi pegeluaran kas sebesar Rp511.500.000,00 dan transaksi non kas sebesar Rp5.000.000,00.

2.3.4 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin 2025 sebesar Rp890.180.782,00 yang terdiri dari :

Tabel 170 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Excavator	15.767.600,00	80.535.003,00	(64.767.403,00)	(80,42)
2	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	99.630.000,00	0,00	99.630.000,00	100,00
3	Beban Sewa Electric Generating Set	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.245.000,00	0,00	6.245.000,00	100,00
5	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.151.000,00	23.995.000,00	(6.844.000,00)	(28,52)
6	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.610.000,00	0,00	10.610.000,00	100,00
7	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	59.999.995,00	104.955.000,00	(44.955.005,00)	(42,83)
8	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	539.500,00	0,00	539.500,00	100,00
9	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	526.727.687,00	670.635.215,00	(143.907.528,00)	(21,46)
10	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.385.000,00	2.035.000,00	(650.000,00)	(31,94)
11	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00
12	Beban Sewa Peralatan Jaringan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
Jumlah		**890.180.782,00**	**882.155.218,00**	**8.025.564,00**	**0,91**

Terjadi kenaikan sebesar Rp8.025.564,00 atau 0,91% dari tahun sebelumnya.Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp890.180.782,00 terdiri dari transaksi kas (dari Belanja Sewa Peralatan dan Mesin LRA) sebesar Rp866.685.382,00 dan transaksi reklas dari jenis Beban Jasa yang lain sebesar Rp23.495.400,00.

2.3.5 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp455.549.190,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp16.320.690,00 atau 3,72% dari Tahun 2024.

Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp455.549.190,00 terdiri dari transaksi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan LRA sebesar Rp436.739.190,00 dan transaksi

reklas dari jenis Beban Jasa yang lain sebesar Rp18.810.000,00.

Tabel 171 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	295.691.990,00	330.599.000,00	(34.907.010,00)	(10,56)
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00	100,00
3	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	103.252.200,00	62.900.000,00	40.352.200,00	64,15
4	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.210.000,00	4.284.500,00	(3.074.500,00)	(71,76)
5	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	38.295.000,00	41.445.000,00	(3.150.000,00)	(7,60)
Jumlah		**455.549.190,00**	**439.228.500,00**	**16.320.690,00**	**3,72**

2.3.6 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban Sewa Aset tetap Lainnya sebesar Rp0. Terjadi penurunan sebesar Rp4.268.000,00 atau 100% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 172 Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	4.268.000,00	(4.268.000,00)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**4.268.000,00**	**(4.268.000,00)**	**(100,00)**

2.3.7 Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Sebesar Rp3.690.077.555,00. Terjadi penurunan sebesar Rp152.889.607,00 atau 3,98% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 173 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 Dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	97.569.000,00	14.883.102,00	82.685.898,00	555,57
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	12.344.700,00	233.441.880,00	(221.097.180,00)	(94,71)
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	99.389.400,00	(99.389.400,00)	(100,00)
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	447.535.350,00	17.171.700,00	430.363.650,00	2.506,24
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	32.997.525,00	0,00	32.997.525,00	100,00
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	102.040.080,00	31.593.930,00	70.446.150,00	222,97
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	381.124.000,00	453.211.750,00	(72.087.750,00)	(15,91)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	774.169.500,00	391.574.550,00	382.594.950,00	97,71
9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.081.078.950,00	810.049.750,00	271.029.200,00	33,46
10	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	119.386.050,00	119.131.500,00	254.550,00	0,21
11	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	20.000.000,00	49.755.750,00	(29.755.750,00)	(59,80)
12	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	295.593.000,00	354.867.000,00	(59.274.000,00)	(16,70)
13	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.669.100,00	18.759.000,00	(10.089.900,00)	(53,79)
14	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.634.400,00	151.883.850,00	(150.249.450,00)	(98,92)
15	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	54.383.000,00	(54.383.000,00)	(100,00)
16	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	266.596.400,00	348.998.900,00	(82.402.500,00)	(23,61)
17	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	49.339.500,00	693.872.100,00	(644.532.600,00)	(92,89)
Jumlah		**3.690.077.555,00**	**3.842.967.162,00**	**(152.889.607,00)**	**(3,98)**

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Sebesar Rp3.690.077.555,00 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp3.668.635.555,00 dan non sebesar Rp21.442.000,00.

Transaksi kas tersebut berasal dari Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi (LRA) sebesar Rp3.881.516.905,00 dikurangi pelunasan Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp16.650.000,00 dan kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi (LRA) menjadi Aset Tetap sebesar Rp196.231.350.00.

Adapun transaksi non kas (LRA) yang diakui sebagai Beban Jasa Konsultasi Kontruksi yaitu reklas antar rekening Beban LO sebesar Rp21.442.000,00.

2.3.8 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Sebesar Rp3.011.383.514,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp32.419.894,00 atau 1,09% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 174 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	197.724.300,00	247.863.000,00	(50.138.700,00)	(20,23)
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	482.000.000,00	295.300.000,00	186.700.000,00	63,22
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	99.350.550,00	99.333.900,00	16.650,00	0,02

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	10.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	24.809.000,00	0,00	24.809.000,00	100,00
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	0,00	9.990.000,00	(9.990.000,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	460.794.200,00	447.760.500,00	13.033.700,00	2,91
8	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.045.427.520,00	1.091.830.450,00	(46.402.930,00)	(4,25)
9	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	501.817.500,00	347.194.300,00	154.623.200,00	44,54
10	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	139.810.144,00	283.345.720,00	(143.535.576,00)	(50,66)
11	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	49.650.300,00	126.345.750,00	(76.695.450,00)	(60,70)
Jumlah		**3.011.383.514,00**	**2.978.963.620,00**	**32.419.894,00**	**1,09**

Terjadi kenaikan sebesar Rp32.419.894,00 atau 1,09% dari tahun sebelumnya.

Transaksi kas Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp2.729.718.014,00. Transaksi kas tersebut berasal dari Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (LRA) sebesar Rp2.739.718.014,00 dikurangi pelunasan utang sebesar Rp10.000.000,00. Adapun transaksi non kas sebesar Rp281.665.500,00 merupakan reklas antar beban LO.

2.3.9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2025 sebesar Rp6.714.314.962,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.978.632.268,00 atau 41,78% dari Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 175 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.391.265.962	2.089.027.694	302.238.268	14,47
2	Beban Bimbingan Teknis	4.197.269.000	2.469.875.000	1.727.394.000	69,94
3	Beban Diklat Kepemimpinan	125.780.000	176.780.000	(51.000.000)	(28,85)
Jumlah		**6.714.314.962,00**	**4.735.682.694,00**	**1.978.632.268,00**	**41,78**

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2025 sebesar Rp6.714.314.962,00 terdiri transaksi kas sebesar Rp5.509.681.900,00 dan transaksi non kas sebesar Rp1.204.633.062,00.

Transaski kas tersebut merupakan transaksi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (LRA) sebesar Rp5.531.581.900,00 dikurangi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp21.900.000,00. Sedangkan transaksi non kas sebesar Rp1.204.633.062,00 merupakan reklas dari jenis Beban Jasa yang lain dan Beban dibayar dimuka.

2.3.10 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 sebesar Rp 424.542.900,00. Terjadi

penurunan sebesar Rp 133.244.200,00 atau 23,89% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 176 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	10.647.600,00	(10.647.600,00)	(100,00)
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.405.000,00	4.431.200,00	973.800,00	21,98
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	148.506.200,00	(148.506.200,00)	(100,00)
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.280.000,00	1.033.600,00	246.400,00	23,84
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.230.000,00	2.395.400,00	1.834.600,00	76,59
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	164.500.000,00	131.635.000,00	32.865.000,00	24,97
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.210.000,00	10.177.500,00	10.032.500,00	98,58
8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	408.500,00	407.400,00	1.100,00	0,27
9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
10	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	2.415.000,00	5.718.000,00	(3.303.000,00)	(57,80)
11	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	21.381.400,00	14.818.800,00	6.562.600,00	44,29
12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	177.400.000,00	199.155.000,00	(21.755.000,00)	(10,90)
13	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	768.000,00	771.600,00	(3.600,00)	(0,47)
14	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	26.120.000,00	28.089.800,00	(1.969.800,00)	(7,01)
Jumlah		**424.542.900,00**	**557.787.100,00**	**(133.244.200,00)**	**(23,89)**

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp424.542.900,00 merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp195.625.000,00 dan transaksi non kas sebesar Rp228.917.900,00 yang merupakan reklas antar beban LO.

2.3.11 Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN sebesar Rp76.204.200,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp4.198.050,00 atau 5,83% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 177 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	28.629.000,00	25.105.500,00	3.523.500,00	14,03

2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.795.200,00	39.744.000,00	1.051.200,00	2,64
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	280.650,00	-280.650,00	(100,00)
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	6.780.000,00	6.876.000,00	(96.000,00)	(1,40)
Jumlah		**76.204.200,00**	**72.006.150,00**	**4.198.050,00**	**5,83**

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp76.204.200,00 merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp305.122.100,00 dan transaksi non kas sebesar Rp(228.917.900,00) yang merupakan reklas ke Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN.

2.3.12 Beban Barang dan Jasa BOSP

Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 sebesar Rp140.564.300,00 yang merupakan Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler.

2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp11.520.226.120,23 mengalami penurunan sebesar Rp6.277.066.521,67 atau 35,27 % jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 178 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	2.877.000,00	3.564.000,00	(687.000,00)	(19,28)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.657.313.282,00	7.486.161.018,00	(828.847.736,00)	(11,07)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.247.806.549,00	5.821.578.331,00	(2.573.771.782,00)	(44,21)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.418.095.539,00	4.401.034.293,00	(2.982.938.754,00)	(67,78)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.314.300,00	34.965.000,00	(15.650.700,00)	(44,76)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	174.819.450,00	49.990.000,00	124.829.450,00	250,00
Jumlah		**11.520.226.120,23**	**17.797.292.641,90**	**(6.277.066.521,67)**	**(35,27)**

Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.520.226.120,23 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp5.627.290.798,85 dan transaksi non kas sebesar Rp5.892.935.321,38. Transaksi kas tersebut merupakan transaksi Belanja Pemeliharaan (LRA) sebesar Rp6.623.323.100,94 dikurangi transaksi pelunasan utang Rp744.817.640,00 dan dikurangi kapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp251.214.662,09. Adapun transaksi non kas sebesar Rp5.892.935.321,38 terdiri dari:

1) Penambahan utang tahun berjalan sebesar Rp112.948.296,00;
2) Reklas dari jenis beban yang lain ke beban pemeliharaan (LO) sebesar Rp5.714.497.721,80;
3) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dari Hibah sebesar Rp65.489.303,58.

2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp33.314.716.507,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp20.800.994.845,00 atau 38,44% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 179 Beban Perjalanan Dinas Tahun Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.878.689.151,00	34.561.832.591,00	(18.683.143.440,00)	(54,06)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.432.454.556,00	13.615.961.002,00	816.493.554,00	6,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.971.542.800,00	5.436.415.859,00	(2.464.873.059,00)	(45,34)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.030.000,00	501.501.900,00	(469.471.900,00)	(93,61)
Jumlah		**33.314.716.507,00**	**54.115.711.352,00**	**(20.800.994.845,00)**	(38,44)

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp33.314.716.507,00 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp24.283.390.275,00 dan transaksi non kas sebesar Rp9.031.326.232,00. Transaksi non kas tersebut terdiri dari:

1) Penambahan utang Belanja Persediaan/Jasa sebesar Rp6.970.000,00; dan
2) Reklas antar beban (LO) sebesar Rp9.024.356.232,00.

2.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp11.310.156.732,00 terdiri dari:

1. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp10.362.293.000,00

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp10.362.293.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp2.840.689.356 atau 37,77% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 180 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	999.193.000,00	446.173.500,00	553.019.500,00	123,95
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	34.200.000,00	47.850.000,00	(13.650.000,00)	(28,53)
3	Beban Beasiswa	471.100.000,00	96.000.000,00	375.100.000,00	390,73
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	176.280.144,00	(176.280.144,00)	(100,00)
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.857.800.000,00	6.755.300.000,00	2.102.500.000,00	31,12
Jumlah		**10.362.293.000,00**	**7.521.603.644,00**	**2.840.689.356,00**	**37,77**

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat sebesar Rp10.362.293.000,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp947.863.732

Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp947.863.732. Terjadi kenaikan sebesar Rp267.354.943 atau 39,29% jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp680.508.789,00.

Beban tersebut terdiri dari transaksi kas sebesar Rp925.757.932,00 dan transaksi non kas sebesar Rp22.105.800,00. Transaksi kas tersebut berasal dari Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (LRA) sebesar Rp948.965.332,00 dikurangi pelunasan Utang

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp23.207.400,00. Adapun transaksi non kas sebesar Rp22.105.800,00 merupakan penambahan Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025.

2.7 Beban Hibah

Beban Hibah kepada Pemerintah Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.216.122.086,85 dan terjadi penurunan sebesar Rp40.702.956.548,27 atau 55,06 % jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 181 Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	34.805.000.000,00	(33.805.000.000,00)	(97,13)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.806.083.606,85	22.018.972.273,12	(6.212.888.666,27)	(28,22)
3	Beban Hibah Dana BOS	4.162.008.725,00	4.304.693.067,00	(142.684.342,00)	(3,31)
4	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.101.984.255,00	1.047.839.295,00	54.144.960,00	5,17
5	Beban Hibah Dana BOSP	11.146.045.500,00	11.742.574.000,00	(596.528.500,00)	(5,08)
Jumlah		**33.216.122.086,85**	**73.919.078.635,12**	**(40.702.956.548,27)**	**(55,06)**

2.8.1 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan transaksi hibah berupa kas tahun 2025.

2.8.2 Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 15.806.083.606,85 yang terdiri dari:

Hibah Uang dan Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp8.073.559.229,26.

Beban Hibah Uang dan Barang Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.320.031.250,00.

Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.412.493.127,59.

Terdapat selisih sebesar Rp(1.577.182.206,85) antara realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan (LRA) dengan Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dikarenakan terdapat pemberian hibah berupa barang (aset) dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp669.159.229,26;
2) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat

Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.031.250,00

3) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp902.991.727,59.

2.8.3 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Beban Hibah Uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar kas Rp4.162.008.725,00.
Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp4.162.008.725,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.8.4 Beban Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Beban Hibah kepada Partai Politik Tahun 2024 sebesar Rp1.101.984.255,00. Beban tersebut merupakan beban hibah dari APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pacitan.
Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp1.101.984.255,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.8.5 Beban Hibah pada BOSP

Beban Hibah BOSP diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar kas Rp11.146.045.500,00. Merupakan beban Tahun 2025 kepada Lembaga swasta Tahun 2025 Terjadi penurunan sebesar Rp 596.528.500,00 atau 5,08% dari tahun 2024.

2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp779.800.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp105.600.000,00 atau 15,66% dibandingkan dengan beban tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 182 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	117.300.000,00	139.200.000,00	(21.900.000,00)	(15,73)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	662.500.000,00	535.000.000,00	127.500.000,00	23,83
Jumlah		**779.800.000,00**	**674.200.000,00**	**105.600.000,00**	**15,66**

2.9.1 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu

Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp117.300.000,00 yang ditangani oleh Dinas Sosial.
Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp117.300.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.9.2 Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga sebesar Rp662.500.000,00 yang ditangani oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan berupa kas.
Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp662.500.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.10 Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp611.320.343,34 merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Pada tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp76.633.871,26 atau 11,14% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 183 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	114.190.564,96	198.456.909,75	(84.266.344,79)	(42,46)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	122.244.748,38	110.285.590,41	11.959.157,97	10,84
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	265.685,00	379.211.714,44	(378.946.029,44)	-99,93
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	374.619.345,00	0,00	374.619.345,00	100,00
Jumlah		**611.320.343,34**	**687.954.214,60**	**(76.633.871,26)**	**(11,14)**

Beban Penyisihan sebesar Rp611.320.343,34 merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 184 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	**Beban Penyisihan Piutang Pajak**	**114.190.564,96**	**198.456.909,75**	**(84.266.344,79)**	**(42,46)**
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	77.325,00	(77.325,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	480.810,00	(480.810,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	520.784,00	(520.784,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	106.109.756,92	0,00	106.109.756,92	100,00
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	46.118,80	(46.118,80)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	190.083.617,55	(190.083.617,55)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.080.808,04	7.248.254,40	832.553,64	11,49
2	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi**	**122.244.748,38**	**110.285.590,41**	**11.959.157,97**	**10,84**
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	120.141.001,38	89.407.041,91	30.733.959,47	34,38
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.103.747,00	20.878.548,50	(18.774.801,50)	(89,92)
3	**Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**265.685,00**	**379.211.714,44**	**(378.946.029,44)**	**(99,93)**
	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	10.777.500,00	(10.777.500,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	368.367.000,00	(368.367.000,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	263.360,00	62.548,00	200.812,00	321,05
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	2.325,00	0,00	2.325,00	100,00
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	4.666,44	(4.666,44)	(100,00)
4	**Beban Penyisihan Piutang Lainnya**	**374.619.345,00**	**0,00**	**374.619.345,00**	**100,00**
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	374.619.345,00	0,00	374.619.345,00	100,00
Jumlah		**611.320.343,34**	**687.954.214,60**	**(76.633.871,26)**	**(11,14)**

Beban Penyisihan sebesar Rp611.320.343,34 merupakan transaksi non kas pada beban LO.

2.11 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan aset tidak berwujud berupa *Software* selama masa manfaat aset

yang bersangkutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp204.460.730.679,14 dan terdapat pernurunan sebesar Rp14.024.838.166,27 atau 6,42% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 185 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	61.506.524.885,19	66.423.860.225,12	(4.917.335.339,93)	(7,40)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.680.526.492,80	29.157.650.748,15	2.522.875.744,65	8,65
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	110.521.495.000,21	121.469.106.318,73	(10.947.611.318,52)	(9,01)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	408.674.977,23	965.972.024,08	(557.297.046,85)	(5)7,69
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	120.472.762,50	120.472.762,50	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	204.957.280,00	185.847.348,33	19.109.931,67	10,28
7	Beban Penyusutan Properti Investasi	18.079.281,21	162.659.418,50	(144.580.137,29)	(88,89)
Jumlah		**204.460.730.679,14**	**218.485.568.845,41**	**(14.024.838.166,27)**	**(6,42)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp204.460.730.679,14 merupakan transaksi non kas pada beban LO.

2.12 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp113.496.144.665,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.114.758.710,00 atau 5,69% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 186 Beban Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.925.861.806,00	5.233.620.788,00	2.692.241.018,00	51,44
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.869.229.359,00	1.844.452.375,00	24.776.984,00	1,34
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	103.701.053.500,00	100.303.312.792,00	3.397.740.708,00	3,39
Jumlah		**113.496.144.665,00**	**107.381.385.955,00**	**6.114.758.710,00**	**5,69**

Beban Transfer sebesar Rp113.496.144.665,00 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp111.006.430.706,00 dan transaksi non kas sebesar Rp2.489.713.959,00. Transaksi kas tersebut merupakan Belanja Transfer (LRA) sebesar Rp266.609.707.739,00 dikurangi:

1) Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp1.461.925.893,00; dan
2) Dana Desa sebesar Rp154.141.351.140,00.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp2.489.713.959,00 merupakan penambahan Utang Belanja Transfer tahun berjalan yang merupakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Utang Bagi Hasil Retribusi pada SKPD Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Bagi Hasil Pajak

Pada Tahun 2024 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp1.885.375.718,00.

2) Utang Bagi Hasil Retribusi

Pada Tahun 2024 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp604.338.241,00.

3. Surplus/Defisit Non Operasional dari Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**390.738.140,71**	**(3.196.814.327,58)**	**3.587.552.468,29**

Selama Tahun 2025 terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional

sebesar Rp390.738.140,71. Dibandingkan dengan tahun lalu defisit sebesar Rp3.196.814.327,58, tahun ini mengalami kenaikan surplus sebesar Rp3.587.552.468,29 atau 112,22%. Surplus tersebut merupakan selisih dari Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terhadap Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 187 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	510.146.277,93	388.137.743,65	122.008.534,28	31,43
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	119.408.137,22	3.584.952.071,23	(3.465.543.934,01)	(96,67)
Jumlah		**390.738.140,71**	**(3.196.814.327,58)**	**3.587.552.468,29**	**(112,22)**

3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp510.146.277,93 merupakan Surplus dari Pendapatan penyisihan piutang awal yang dilunasi pada Tahun 2025.

3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2025 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp119.408.137,22 terdiri dari:

Tabel 188 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Defisit Pelepasan Aset Lancar-LO	119.408.137,22	110.018.596,44	9.389.540,78	8,53
2	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	3.474.933.474,79	(3.474.933.474,79)	(100,00)
Jumlah		**119.408.137,22**	**3.584.952.071,23**	**(3.465.543.934,01)**	**(96,67)**

3.2.1 Defisit Pelepasan Aset Lancar

Defisit Pelepasan Aset Lancar terdiri dari Penghapusan persediaan *expired* pada SKPD RSUD dr. Darsono sebesar Rp119.408.137,22.

3.2.2 Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya –LO

Defisit pada Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00

4. Pos Luar Biasa

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
Beban Luar Biasa	**3.906.105.919,00**	**1.733.671.899,00**	**2.172.434.020,00**

Pada Tahun 2025 Beban Luar Biasa sebesar Rp3.906.105.919,00. Saldo tersebut berasal dari saldo Belanja Tidak Terduga (LRA) sebesar Rp5.991.831.374,00 dikurangi pelunasan utang belanja tahun 2024 sebesar Rp710.424.694,00 dan kapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.375.300.761,00. Dibandingkan saldo tahun lalu Pos Luar Biasa sebesar Rp1.733.671.899,00, tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.172.434.020,00 atau 125,31%.

5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 89.673.713.527,13 yang terdiri dari arus masuk kas sebesar Rp1.664.543.792.911,05 dan arus keluar kas sebesar Rp1.574.870.079.383,92, dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.664.543.792.911,05 yang terdiri dari:

1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	Rp	79.258.618.063,83
1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	167.299.910.680,00
1.1.3	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	3.124.998.825,41
1.1.4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Rp	4.064.604.725,11
1.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	57.784.574.900,00
1.1.6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	33.599.611.000,00
1.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	806.723.447.714,00
1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	246.316.757.874,00
1.1.9	Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp	168.805.750.140,00
1.1.10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	85.777.645.205,00
1.1.11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp	5.307.104.000,00
1.1.12	Penerimaan Hibah	Rp	27,39
1.1.13	Penerimaan Lainnya	Rp	6.480.769.756,31
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	Rp	**1.664.543.792.911,05**

1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.574.870.079.383,92 yang terdiri dari ;

1.2.1	Pembayaran Pegawai	Rp	796.605.950.209,00
1.2.2	Pembayaran Barang	Rp	473.243.850.181,92
1.2.3	Pembayaran Hibah	Rp	31.638.939.880,00
1.2.4	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	779.800.000,00
1.2.5	Pembayaran Tidak Terduga	Rp	5.991.831.374,00
1.2.6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp	7.002.839.474,00
1.2.7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp	1.764.463.625,00
1.2.8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya /Bantuan Keuangan	**Rp**	257.842.404.640,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**Rp**	**1.574.870.079.383,92**

Dibandingkan dengan jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp148.514.130.485,96 Tahun 2025 sebesar Rp89.673.713.527.17 mengalami penurunan sebesar Rp58.840.416.958,79 atau 39,62%.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp(92.900.703.640,08) yang terdiri dari arus masuk kas sebesar Rp241.150.400,00 dan arus Keluar kas sebesar Rp93.141.854.040,08

Jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari aktivitas investasi.

2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas Investasi sebesar Rp241.150.400,00 yang terdiri dari

2.1.1	Penjualan Aset Tetap Lainnya	Rp	0
2.1.2	Penjualan Aset Lain-Lain	Rp	241.150.400,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**Rp**	**241.150.400,00**

2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Jumlah arus Keluar kas Aktivitas Investasi sebesar Rp93.141.854.040,08 yang terdiri dari:

2.2.1	Perolehan Tanah	Rp	3.933.608.350,00
2.2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	26.626.928.884,20
2.2.3	Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	29.602.423.738,88
2.2.4	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	27.094.777.231,00
2.2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	5.359.748.936,00
2.2.6	Perolehan Aset Lainnya	Rp	524.366.900,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	Rp	**93.141.854.040,08**

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas investasi tahun lalu, yaitu sebesar (Rp207.650.323.482,14), pada tahun berjalan adalah sebesar (Rp92.900.703.640,08) mengalami kenaikan sebesar Rp114.749.619.842,06 atau 55,26%.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah total Arus Kas Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp611.643.517,73 yang terdiri arus masuk kas sebesar Rp 611.643.517,73 dan arus keluar kas sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

Jumlah arus masuk kas aktivitas pendanaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 611.643.517,73

1) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp499.236.572,32
2) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi sebesar Rp112.406.945,41

3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp0,00.

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas pendanaan tahun lalu, yaitu sebesar Rp1.807.233.999,69 pada tahun berjalan adalah sebesar Rp611.643.517,73 mengalami penurunan sebesar Rp1.195.590.481,96 atau 66,16%.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp0,00 yang terdiri dari arus masuk kas dari perhitungan fihak ketiga sebesar potongan PFK dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp52.980.780.725,00 dan nilai arus keluar kas sebesar Rp52.980.780.725,00.

4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

Nilai arus masuk kas aktivitas transitoris sebesar Rp Rp52.980.780.725,00 yang merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Potongan PFK dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) dengan rincian sebagai berikut:

Iuran Wajib Pegawai 8%	Rp	21.363.098.128,00
Iuran Jaminan Kesehatan 4%	Rp	23.587.081.147,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	783.059.274,00
Iuran Jaminan Kematian	Rp	2.349.164.215,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	Rp	4.898.377.961,00
Total	Rp	**52.980.780.725,00**

4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Nilai arus keluar kas aktivitas transitoris sebesar Rp52.980.780.725,00 yang merupakan pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Potongan PFK dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) dengan rincian sebagai berikut:

Iuran Wajib Pegawai 8%	Rp	21.363.098.128,00
Iuran Jaminan Kesehatan 4%	Rp	23.587.081.147,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	783.059.274,00
Iuran Jaminan Kematian	Rp	2.349.164.215,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	Rp	4.898.377.961,00
Total	Rp	**52.980.780.725,00**

5. Saldo Awal Kas (Laporan Arus Kas)

Saldo awal kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp59.179.887.105,27 yang terdiri dari saldo awal kas Tahun 2024 sebesar Rp116.508.846.101,76 dikurangi penurunan kas tahun 2024 sebesar Rp57.328.958.996,49

Adapun rincian saldo awal kas setara kas adalah sebagai berikut:

5.1	Kas di Kas Daerah	Rp	45.488.560.813,25
5.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
5.3	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	8.473.734,00
5.4	Kas di BLUD	Rp	11.990.173.850,02
5.5	Kas Dana BOSP	Rp	54.447.482,00
5.6	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	1.638.231.226,00
5.7	Kas Lainnya	Rp	28.608.815,00
	Total saldo awal	**Rp**	59.208.495.920,27

Terjadi selisih antara saldo awal kas di Laporan Arus kas dengan Saldo Kas dan Setara Kas di Neraca sebesar Rp28.608.815,00 yang merupakan dana titipan pasien pada RSUD dr Darsono Tahun 2024.

6. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp56.564.540.510,00 yang terdiri dari saldo awal kas Tahun 2025 sebesar Rp59.179.887.105,27 dikurangi penurunan kas tahun 2025 sebesar Rp2.615.346.595,22.

Adapun rincian saldo akhir kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

6.1	Kas di Kas Daerah	Rp	43.333.425.109,79
6.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
6.3	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	2.031.000,00
6.4	Kas di BLUD	Rp	11.916.222.402,26
6.5	Kas Dana BOSP	Rp	121.317.601,00
6.6	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	1.191.544.397,00
6.7	Kas Lainnya	Rp	19.765.510,00
	Total saldo akhir	**Rp**	56.584.306.020,050

Terjadi selisih antara saldo akhir kas di Laporan Arus kas dengan Saldo Kas dan Setara Kas di Neraca sebesar Rp19.765.510,00 yang merupakan dana titipan pasien pada RSUD dr Darsono Tahun 2025.

5.1.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp2.136.653.177.396,05 terdiri dari:

Tabel 189 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Ekuitas Awal	2.076.102.226.317,07	2.123.464.533.034,41	(47.362.306.717,34)
Surplus/Defisit - LO	9.610.446.078,95	(57.166.468.760,69)	66.776.914.839,64
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	50.940.505.000,03	9.804.162.043,35	41.136.342.956,68
JUMLAH	**2.136.653.177.396,05**	**2.076.102.226.317,07**	**60.550.951.078,98**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal sebesar Rp2.076.102.226.317,07 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2024 pada Neraca *Audited* tahun 2024.

5.1.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO pada Tahun 2025 sebesar Rp9.610.446.078,95 merupakan nilai Surplus pada Laporan Operasional Tahun 2025 yang berasal dari:

PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah LO	Rp	256.269.416.002,47
Pendapatan Transfer LO	Rp	1.283.017.858.842,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO	Rp	113.804.312.329,39
Total Pendapatan LO	**Rp**	**1.653.091.587.173,86**
BEBAN		
Beban Operasi	Rp	1.322.008.897.972,48
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	204.460.730.679,14
Beban Transfer	Rp	113.496.144.665,00
Beban Tidak Terduga	Rp	3.906.105.919,00
Total Beban	**Rp**	**1.643.871.879.235,62**
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	9.219.707.938,24
Surplus Non Operasional LO	Rp	510.146.277,93
Defisit Non Operasional - LO	Rp	(119.408.137,22)
Surplus/Defisit	Rp	**9.610.446.078,95**

5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2025, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dan Nilai Buku Penghapusan Aset Tetap yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sejumlah Rp50.940.505.000,03 terdiri dari:

1) Koreksi kesalahan koreksi piutang tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan

mendasar sebesar Rp(176.526.041,00) terdapat pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1) Koreksi Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Tahun 2024 sebesar Rp(50.000.000,00), didasarkan pada bukti transfer tanggal 8 Agustus 2024, nilai tersebut merupakan pelunasan piutang yang telah dibayarkan pada tahun 2024, yang sebelumnya dicatat dan dilaporkan sebagai penerimaan pendapatan tahun berjalan. sehingga pada tahun 2025 dilakukan koreksi ekuitas atas pelunasan piutang tersebut.
2) Koreksi Pengurangan Piutang Pendapatan Denda PBBP2 karena ada pemutihan sebesar Rp (126.526.041,00).
   a. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2018 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2014	2	73.316	35.192
2	2015	4	98.454	47.258
3	2016	80	4.765.996	2.287.678
4	2017	28	1.828.740	548.622
Jumlah Total		114	6.766.506	2.918.750

   b. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/894/KPTS/408.12/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2011	7	263.358	126.412
2	2012	8	484.185	232.409
3	2013	11	1.118.890	537.067
4	2014	18	1.411.402	677.473
5	2015	32	1.362.659	654.076
6	2016	49	2.682.315	1.287.511
7	2017	52	2.983.782	1.432.215
8	2018	50	4.135.429	1.985.006
9	2019	192	11.375.117	3.084.204
Jumlah Total		419	25.817.137	10.016.373

   c. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2021 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2011	17	712.184	341.848
2	2012	10	569.268	273.249
3	2013	9	294.687	141.450
4	2014	15	447.771	214.930
5	2015	11	591.280	283.814
6	2016	40	2.188.324	1.050.396
7	2017	40	2.121.237	1.018.194

8	2018	40	2.954.716	1.418.264
9	2019	59	7.130.907	3.422.835
10	2020	4.179	143.292.285	37.564.108
Jumlah Total		4.420	160.302.659	45.729.088

d. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pemberian Keringanan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2022 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2012	7	329.671	158.242
2	2013	2	119.084	57.160
3	2014	6	928.212	445.542
4	2015	13	894.536	429.377
5	2016	12	463.543	222.501
6	2017	13	906.519	435.129
7	2018	12	925.911	444.437
8	2019	15	1.910.624	917.100
9	2020	16	1.154.300	554.064
10	2021	31	24.447.925	7.334.378
Jumlah Total		127	32.080.325	10.997.930

e. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/773/KPTS/408.12/ 2024 tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Pemberian Insentif Fiskal di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2011	5	76.240	36.595
2	2012	5	75.240	36.115
3	2013	5	84.112	40.374
4	2014	206	3.099.513	1.487.766
5	2015	300	6.548.469	3.143.265
6	2016	535	12.372.762	5.938.926
7	2017	182	5.398.685	2.591.369
8	2018	638	14.719.311	7.065.269
9	2019	122	5.272.503	2.530.801
10	2020	546	21.373.941	10.259.492
11	2021	316	9.474.906	4.547.955
Jumlah Total		2.860	78.495.682	37.677.927

f. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/485/KPTS/408.12/ 2025 tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Pemberian Insentif Fiskal di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	sd. 2001	3	21.299	10.224
2	2011	17	572.090	274.603

3	2012	9	339.758	163.084
4	2013	9	274.555	131.786
5	2014	11	414.201	198.816
6	2015	40	1.653.394	793.629
7	2016	36	1.493.829	717.038
8	2017	44	3.500.359	1.680.172
9	2018	33	2.161.073	1.037.315
10	2019	458	8.893.244	4.268.757
11	2020	593	15.549.395	7.463.710
12	2021	71	5.097.581	2.446.839
Jumlah Total		1.324	39.970.778	19.185.973

Berdasarkan pembayaran Piutang PBB-P2 pada kurun waktu penerbitan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pacitan terkait Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Denda pada tahun 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 dan 2025 terdapat akumulasi Piutang Denda senilai Rp. 126.526.041,- sebagai dasar Koreksi Pengurangan Piutang Pendapatan Denda PBBP2 di tahun 2025.

2) Koreksi Persediaan

Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp23.450.000,00 di BPBD berupa Pakaian APD sejumlah 134 unit dengan nilai @ Rp175.000.

3) Koreksi Penyertaan Modal

Koreksi Nilai Investasi Tahun 2024 pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp(107.105.176,00) merupakan koreksi nilai investasi pada LKPD Tahun 2024 menyesuaikan LK PDAM Audited KAP 2024, sedangkan koreksi nilai investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum tahun 2025 sebesar Rp(103.176.729,00) merupakan koreksi nilai investasi pada LKPD Tahun 2025 menyesuaikan LK PDAM Audited KAP Tahun 2025, sehingga total koreksi nilai investasi pada PDAM pada LKPD Tahun 2025 sebesar Rp(210.281.905,00).

4) Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan Aset Tetap yang tercatat dalam dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(6.130.649.270,81) merupakan nilai buku aset tetap yang dihapus karena Penjualan dan Pemusnahan sesuai SK Penghapusan Nomor 100.3.3.4/10/KPTS/2025, SK Nomor 188.45/18/KPTS/408.12/2025, SK Nomor 100.3.3.2/227/KPTS/408.12/2025, SK Nomor 100.3.3.5/20/KPTS/408.12/2025 dan 100.3.3.5/21/KPTS/408.12/2025 dan dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Dinas Kesehatan senilai Rp(131.958.312,50) merupakan nilai buku aset karena Penghapusan Penjualan berupa Stelisisator, kursi dorong, bed pasien, matras dan Bangunan klinik dengan tahun perolehan aset 2008- 2023.
b. Badan Keuangan Daerah senilai Rp(87.495.634,07) merupakan nilai buku aset tetap karena penghapusan penjualan berupa Mobil tahun perolehan 2017.
c. Dinas Perhubungan senilai Rp(723.543.468,59) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Penjualan berupa 2

Bangunan Gedung Kantor permanen tahun perolehan 1998 dan tahun 2012.

d. Dinas Perikanan senilai Rp(157.205.650,00) merupakan nilai buku aset karena penghapusan yang terdiri dari nilai buku Penghapusan Penjualan senilai Rp(81.318.050) berupa Bangunan Gudang tahun perolehan 2007, Nilai Buku Penghapusan Pemusnahan Rp(68.582.700,00) berupa Gedung Pertokoan Koperasi tahun perolehan 2012 dan Nilai Buku Penghapusan Aset Lainnya Rp(7.304.900,00) berupa KDP yang tidak dilanjutkan.
e. Kecamatan Punung senilai Rp(583.000,00) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Penjualan berupa note book (PC) tahun perolehan 2021.
f. Kecamatan Kebonagung senilai Rp(336.770,84) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Penjualan berupa External Hardisk tahun perolehan 2020.
g. Insepktorat Daerah senilai Rp(122.392.547,49) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Pemusnahan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen tahun perolehan 2002.
h. Dinas Pendidikan senilai Rp(146.817.995,32) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Penjualan berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen tahun perolehan 2008 dan Bangunan Gedung Perpustakaan tahun perolehan 2015.
i. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga senilai Rp(4.760.315.892,00 merupakan nilai buku aset karena Penghapusan yang terdiri dari Penghapusan Penjualan Rp(4.731.515.892,00) berupa Gedung Pertemuan tahun 2016 dan 2 Bangunan Olahraga tahun 2013 serta Penghapusan Pemusnahan Rp(28.800.000) berupa gedung pos jaga permanen tahun 2009.

5) Koreksi Aset Tetap

Koreksi aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.986.206.782,18 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah senilai Rp(23.013.145,83) merupakan nilai buku aset tetap tahun lalu yang tidak memenuhi kriteria aset tetap karena dibawah batas minimal kapitalisasi sehingga dikeluarkan dari KIB berupa kabel, jack gitar, shocket, stand microphone tahun perolehan 2024.
b. Inspektorat Daerah senilai Rp4.460.683.000,00 merupakan nilai buku tanah yang kurang catat sehingga tahun 2025 dikoreksi di masukkan ke KIB berupa tanah untuk bangunan tempat kerja tahun perolehan 2025.
c. Badan Keuangan Daerah senilai Rp727.050.000,00 merupakan nilai tanah yang kurang catat sehingga tahun 2025 dikoreksi di masukkan ke KIB berupa tanah untuk pembibitan tahun perolehan 2014.
d. Dinas Perhubungan senilai Rp(3.638.215.973,33) merupakan nilai buku aset tetap tanah dan bangunan yang kelebihan pencatatan pada tahun lalu sehingga tahun 2025 dikeluarkan dari KIB berupa Bangunan Parkir dan Bangunan Gedung kantor permanen tahun perolehan 2023.
e. Dinas Kesehatan senilai Rp476.623.438,86 merupakan nilai buku gedung bangunan kesehatan yang dobel catat dengan desa

sehingga dikeluarkan dari KIB berupa 4 bangunan klinik puskesmas tahun 2008 dan 2012 senilai Rp(396.276.561,14) dan nilai buku aset kurang catat tanah bangunan puskesmas tahun perolehan 2025 yang belum dicatat di tahun sebelumnya senilai Rp872.900.000,00.

f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp(14.817.954,16) merupakan nilai buku aset tetap pengadaan tahun sebelumnya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap karena dibawah batas minimal kapitalisasi sehingga dikeluarkan dari KIB berupa tali kamantel static dan webbing tahun perolehan 2018, kursi lipat tahun perolehan 2024 dan repeater tahun 2023.

g. Dinas Penanaman Modal senilai Rp(520.833,33) merupakan nilai buku aset tetap pengadaan tahun sebelumnya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap karena dibawah batas minimal kapitalisasi sehingga dikeluarkan dari KIB berupa kursi tamu tahun perolehan 2023.

h. Dinas Perhubungan senilai Rp(1.581.750,03) merupakan nilai buku aset tetap tahun lalu yang tidak memenuhi kriteria aset tetap karena dibawah batas minimal kapitalisasi sehingga dikeluarkan dari KIB berupa kursi plastik tahun perolehan 2022.

6) Koreksi Akumulasi Penyusutan

Koreksi Akumulasi Penyusutan yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sebesar Rp56.299.289.006,63 terdapat pada SKPD sebagai berikut.

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM senilai Rp(27.684.937,51) yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Note book tahun perolehan 2021 senilai Rp(3.044.937,51) karena perbedaan tarif penyusutan dan Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat music tahun perolehan 2015 senilai Rp(24.640.000,00) karena belum dicatat di Tahun Lalu.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp(143.912,50) dikarenakan ada Bangunan parkir tahun perolehan 2024 belum disusutkan di tahun 2024 sehingga dikoreksi dicatat sesuai tarif penyusutannya di 2025.
3. Badan Keuangan Daerah senilai Rp(377.315.453,11) dikarenakan koreksi penyesuaian tarif penyusutan kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor permanen tahun perolehan 2024 dan tahun 2004.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp(17.671.491,56) yang merupakan Koreksi tarif Penyusutan Tahun Lalu berupa Screen house tahun perolehan 2016.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp(623.958,33) yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa server tahun 2022.
6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp38.900.360,03 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa panel dinding, wallpaper, kabel Listrik, barcode, fitting room, standing mirror tahun 2024 dan bangunan Gedung tahun 2018.
7. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp306.987.648,31 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena

Kapitalisasi berupa Gedung TPA, Bangunan MCK, Rumah kompos, Bangunan Olahraga, Gudang yang merupakan bangunan 2008 – 2023 dan Koreksi Penyusutan Printer tahun 2024.

8. Dinas Pariwisata, Kebudayan dan Olahraga sebesar Rp669.246.916,59 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan karena kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan tahun lalu berupa papan visual tahun 2023, bangunan flat tahun 013, Gedung olahraga tahun 2012, dan bangunan musium tahun 2012.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp56.687.801.866,14 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena koreksi tarif penyusutan dan Kapitalisasi Jalan Irigasi Jembatan tahun tahun sebelumnya.
10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sebesar Rp6.500.796,58 yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena Kapitalisasi ATR dengan induknya berupa pagar permanen tahun 2024 dan koreksi penyusutan peralatan mesin berupa digital signage dan televisi tahun 2023 dan 2024.
11. Dinas Pendidikan sebesar Rp(371.566.341,21) yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen tahun 1984 – 2023.
12. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp(153.391.699,99) yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Bangunan Pertokoan Koperasi tahun 1998, 2013 , 2014, dan 2023.
13. Dinas Perikanan sebesar Rp(324.084.505,13) yang merupakan koreksi tarif Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Bangunan Gedung kantor tahun 1970, Bangunan Parkir tahun 2024 dan Portable Harddisk tahun 2024.
14. Dinas Perpustakaan sebesar Rp(10.000.000,00) yang merupakan koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Musik tahun perolehan 2014 yang belum disusutkan di tahun sebelumnya.
15. Dinas Perhubungan sebesar Rp42.542.311,41 yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu Kapitalisasi Gedung berupa Bangunan Gedung Terminal tahun 2003 dan 1990 serta koreksi penyusutan Micro Bus tahun 2018 dan Jaringan CCTV tahun 2022.
16. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp(2.989.201,05) yang merupakan koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Musik tahun 2024 yang belum tercatat Tahun Lalu.
17. Dinas Sosial sebesar Rp3.037.645,38 yang merupakan Koreksi Akumulasi Tahun Lalu kapitalisasi ATR dengan Bangunan Gedung induk tahun 1989.
18. Kecamatan Bandar sebesar Rp0,01 yang merupakan Koreksi Pembulatan Akumulasi Penyusutan Gedung Tahun Lalu berupa Pagar Permanen tahun perolehan 2019.
19. Kecamatan Donorojo sebesar Rp349.781,25 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa kain penghias ruangan tahun perolehan 2024.
20. Kecamatan Kebonagung sebesar Rp(7.100.883,91) yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena

Kapitalisasi ATR berupa Rehabilitasi pendopo kecamatan Kebonagung tahun 2024 dengan Aset Induknya.

21. Kecamatan Ngadirojo sebesar Rp55.934.305,02 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena Kapitalisasi ATR berupa penataan Kawasan Ex Kawedanan Lorok tahun 2024 dengan Aset Induknya Bangunan Gedung Kantor tahun 2023.
22. Kecamatan Pacitan sebesar Rp38.058.358,46 yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Bangunan Gedung tahun 2017 dan 2024 serta Sepeda Motor tahun 2023.
23. Kecamatan Punung sebesar Rp(146.520.991,70) yang merupakan koreksi kode barang sehingga mempengaruhi Akumulasi Penyusutan tahun lalu berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen tahun 2017.
24. Kecamatan Tegalombo sebesar Rp(162.281,26) yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan tahun lalu berupa kursi roda tahun 2024 yang belum tercatat penyusutan.
25. RSUD dr. Darsono sebesar Rp669.791,66 yang merupakan koreksi akumulasi penyusutan berupa printer yang awalnya tahun perolehan tahun saja 2024 dikoreksi menjadi 13-11-2024.
26. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp25.198.295,87 yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Gedung garasi tahun 2017, Sepatu Pemadam tahun 2024, dan Hooligan Tool 2024.
27. Sekretariat Daerah sebesar Rp84.189.839,32 yang merupakan koreksi tarif penyusutan dan Tahun Perolehan tahun lalu berupa Gedung garasi tahun 1995, 2018, 2019, 2024 , alat music tahun 2024 serta barang lain berupa televise, sprei, pompa air , jam dinding tahun 2021 – 2024.
28. Sekretariat DPRD sebesar Rp4.826.214,93 yang merupakan Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Musik yang belum tercatat tahun 2024.
29. Dinas Kesehatan sebesar Rp(225.699.467,07) yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tahun Lalu berupa Bangunan Klinik/Puskesmas tahun perolehan 1991 sampai dengan 2022.

7) Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Koreksi kesalahan akumulasi amortisasi tahun sebelumnya sebesar Rp(21.000.000,00) terdapat pada Sekretariat Daerah dikarenakan kesalahan perhitungan akumulasi amortisasi berupa software Monev, ANJAB, SKJ AKB, SAKIP tahun perolehan 2022 sehingga di 2025 dikoreksi perhitungannya.

8) Koreksi Akumulasi Properti Investasi

Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Properti Investasi pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp(96.609.654,97).

9) Koreksi Utang

Koreksi kesalahan koreksi Utang tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan

mendasar sebesar Rp(733.373.917,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan senilai Rp(998.927,00) terdiri dari Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Puskesmas Punung senilai Rp1.073,00 dan Koreksi Utang Belanja Bahan Kimia Puskesmas Gemaharjo senilai Rp(1.000.000) dikarenakan Puskesmas Punung ada kesalahan menghitung nilai jasa pelayanan kesehatan baik jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan khusus sehingga mempengaruhi jumlah perhitungan potongan 4% untuk PPPK, sedangkan untuk Puskesmas Gemaharjo karena kesalahan pencatatan yang dilakukan bendahara, sehingga nilai yang tercantum dalam pengakuan utang belanja tidak sama dengan faktur yg diterima dari penyedia.
b. RSUD dr. Darsono senilai Rp10,00 merupakan Koreksi Saldo Awal Utang Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk pekerjaan pengawasan pemeliharaan gedung dengan no kontrak 03/PPK_PPBKT1_CLB/III/2024 jangka waktu 29 Juli 2024 s/d 27 Agustus 2024 besaran nilai kontrak Rp.17.254.950,00 Sesuai permen PUPR no 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara pasal 24 ayat 5.
   Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan dengan:
   a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
   b. pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (*Final Hand Over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).
   c. Sesuai dengan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik yang telah serah terima pertama maka pekerjaan pengawasan dibayarkan 90 % sebesar Rp. 15.529.455,00 dengan no SPD no 02299/SPD/LS/1.02.02/2024 tanggal 04 Oktober 2024 dan per 31 Desember dicatat hutang sebesar Rp.1.725.505,00 dengan no BAST/02/PPK_PWSPBKTI/CLB_JUL1/VII/2024, setelah pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan serah terima akhir, maka pekerjaan pengawasan dibayarkan 10 % dengan no SPD 02826/SPD-LS/1.02.02./2025 tanggal 5 Desember 2025 sebesar Rp. 1.725.495,00 sehingga terdapat selisih pencatatan sebesar Rp. 10,00 maka dilakukan koreksi saldo awal utang pemeliharaan bangunan Gedung.
c. Badan Keuangan Daerah senilai Rp(732.375.000,00) merupakan Penambahan Utang Transfer DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp455.412.000,00 DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp7.144.000,00 dan DBH SDA Perikanan sebesar Rp269.819.000,00 nilai tersebut dicatat berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2025 pada rincian penetapan lebih bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024.

5.1.6.3 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.136.653.177.396,05 Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp60.550.951.078,98 atau 2,92% jika dibandingkan dengan Ekuitas tahun lalu sebesar Rp2.076.102.226.317,07.

5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas pada Pendapatan

Penerapan Basis Kas dan Basis Akrual pada Pendapatan akan tampak pada perbedaan antara saldo Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan saldo Pendapatan pada Laporan Operasional (LO). Pendapatan dalam LRA diartikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam LO, Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pada Tahun 2025 Pendapatan-LRA sebesar Rp1.664.784.943.311,05 sedangkan pada Pendapatan-LO sebesar Rp1.653.091.587.173,86. Selisih sebesar Rp11.693.356.137,19 terdiri dari:

Tabel 190 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Asli Daerah	253.989.282.694,35	256.269.416.002,47	(2.280.133.308,12)
2	Pendapatan Transfer	1.404.314.890.833,00	1.283.017.858.842,00	121.297.031.991,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.480.769.783,70	113.804.312.329,39	(107.323.542.545,69)
	Jumlah	**1.664.784.943.311,05**	**1.653.091.587.173,86**	**11.693.356.137,19**

Berikut penjelasan masing-masing selisih pendapatan yang berjumlah Rp11.693.356.137,19 adalah:

1. Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp(2.280.133.308,12) terdiri dari:

Tabel 191 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	79.258.618.063,83	79.830.277.865,00	(571.659.801,17)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	167.299.910.680,00	168.376.496.668,87	(1.076.585.988,87)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.124.998.825,41	3.683.670.333,41	(558.671.508,00)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	4.305.755.125,11	4.378.971.135,19	(73.216.010,08)
	Jumlah	**253.989.282.694,35**	**256.269.416.002,47**	**(2.280.133.308,12)**

1.1 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Selisih Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan LO Tahun 2025 sebesar Rp(571.659.801,17) tersebut dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan merupakan transaksi pada LO sebesar Rp2.086.511.383,66 yang terdiri dari :

1) Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp1.766.921.538,00 diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2025 karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu.

2) Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp319.589.845,66 yang diakui sebagai Pendapatan LRA, sedangkan pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun berikutnya.

Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp2.658.171.184,83 yang terdiri dari :

1) Penambahan piutang sebesar Rp2.283.181.579,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.
2) Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp374.989.605,83 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.

1.2 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah antara saldo pada LRA dan LO Tahun 2025 sebesar Rp(1.076.585.988,87) dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan merupakan transaksi pada LO sebesar Rp8.689.130.802,92 yang terdiri dari :

1) Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp8.608.352.291,50 diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2025 karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu.

2) Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp80.778.511,42 yang diakui sebagai Pendapatan LRA, sedangkan pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun berikutnya.

Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp9.765.716.791,79 yang terdiri dari :

1) Penambahan piutang sebesar Rp9.700.544.237,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.
2) Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp65.172.554,79 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp(558.671.508,00) merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum). Transaksi tersebut diakui sebagai Pendapatan LO yang merupakan Bagian Laba PDAM yang menambah Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.4 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

Selisih Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(73.216.010,08) antara saldo pada LRA dan LO Tahun 2025 dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan merupakan transaksi pada LO sebesar Rp34.142.323,25 yang terdiri dari :

1) Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp33.535.430,75 yang diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2025 karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu.

2) Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp606.892,50 yang diakui sebagai Pendapatan LRA, sedangkan pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun berikutnya.

Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp107.358.333,33 yang terdiri dari :

1) Penambahan piutang sebesar Rp465.000,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.

2) Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp17.933.333,33 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.
3) Pendapatan hibah berupa persediaan pada BLUD sebesar Rp59.310.000,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025.
4) Pendapatan hibah berupa aset pada BLUD sebesar Rp29.650.000,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025.

2. Selisih Pendapatan Transfer

Selisih Pendapatan Transfer sebesar Rp121.297.031.991,00 terdiri dari:

Tabel 192 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.144.424.391.488,00	1.177.528.982.488,00	(33.104.591.000,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	168.805.750.140,00	14.664.399.000,00	154.141.351.140,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	91.084.749.205,00	90.824.477.354,00	260.271.851,00
	Jumlah	**1.404.314.890.833,00**	**1.283.017.858.842,00**	**121.297.031.991,00**

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan antara saldo LRA dan saldo LO sebesar Rp(33.104.591.000,00) dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 193 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Dana Bagi Hasil Pajak	57.784.574.900,00	74.210.118.900,00	(16.425.544.000,00)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.599.611.000,00	50.304.763.000,00	(16.705.152.000,00)
3	Dana Alokasi Umum	806.723.447.714,00	806.723.447.714,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus	246.316.757.874,00	246.290.652.874,00	26.105.000,00
	Jumlah	**1.144.424.391.488,00**	**1.177.528.982.488,00**	**(33.104.591.000,00)**

Selisih Dana Bagi Hasil Pajak pada LRA dan LO

sebesar Rp(16.425.544.000,00) tersebut dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan merupakan transaksi pada LO yaitu penerimaan piutang transfer sebesar Rp3.465.627.000,00 yang diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu. Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp19.891.171.000,00 yaitu penambahan piutang tahun 2025.

Selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada LRA dan LO sebesar Rp(16.705.152.000,00) tersebut dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan merupakan transaksi pada LO yaitu penerimaan piutang transfer sebesar Rp3.259.505.000,00 yang diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu. Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp19.964.657.000,00 yaitu penambahan piutang tahun 2025.

Selisih Dana Alokasi Khusus pada LRA dan LO sebesar Rp26.105.000,00 tersebut dikarenakan adanya pengembalian atas transaksi penerimaan kas (LO) yaitu atas pendapatan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO.

2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada LRA dan LO sebesar Rp154.141.351.140,00 merupakan Pendapatan Dana Desa yang hanya diakui pada LRA. Pemerintah kabupaten/kota tdk mencatat penerimaan dana desa pada LO dikarenakan kinerja

pemanfaatannya ada di Desa yang bukan bagian dari pemerintah kabupaten/kota.

2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan pada LRA dan LO sebesar Rp260.271.851,00 merupakan penambahan utang tahun 2025 atas pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi.

3. Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selisih Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp(107.323.542.545,69) terdiri dari:

Tabel 194 Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah	27,39	107.323.542.573,08	(107.323.542.545,69)
2	Pendapatan Lainnya	6.480.769.756,31	6.480.769.756,31	0,00
	Jumlah	**6.480.769.783,70**	**113.804.312.329,39**	**(107.323.542.545,69)**

Selisih Pendapatan Hibah sebesar Rp(107.323.542.545,69) tersebut dikarenakan adanya pendapatan hibah berupa barang yang diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp(93.639.906.158,15) terdiri dari :
   - Penerimaan hibah berupa barang persediaan sebesar Rp704.909.832,00 yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp488.736.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp216.173.832,00;
   - Penerimaan hibah berupa aset tetap sebesar Rp92.934.996.326,15 yaitu pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp84.945.233.941,00, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp449.217.200,00, Dinas Kesehatan sebasar Rp34.294.635,00, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp7.458.441.823,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp47.808.727,15.
2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO Rp(13.385.717.887,54) terdiri dari :
   - Penerimaan hibah berupa barang persediaan sebesar Rp12.972.610.960,54 yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp828.008.082,00, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp560.865.795,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp9.266.106.870,14, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp2.212.402.213,40 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp105.228.000,00.
   - Penerimaan hibah berupa aset tetap sebesar Rp413.106.927,00 yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO Rp(297.918.500,00) merupakan Penerimaan hibah berupa aset tetap pada Dinas Kesehatan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Pendapatan pada LRA (penerimaan kas) sebesar Rp1.664.784.943.311,05 yang menjadi pendapatan LO sebesar Rp1.492.822.298.810,22. Selisih penerimaan kas yang tidak diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp171.962.644.500,83 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pelunasan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp17.133.941.260,25;
2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp400.975.249,58;

3) Penambahan utang atas pengembalian pendapatan Rp286.376.851,00;
4) Penerimaan Dana Desa Rp154.141.351.140,00.

Sedangkan penerimaan non kas (bukan pendapatan LRA) yang hanya diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp160.269.288.363,64 terdiri dari:

1) Penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp51.840.018.816,00;
2) Pengurangan Diterima Dimuka Tahun 2024 Rp458.095.493,95;
3) Hibah Masuk (Barang Persediaan dan Aset Tetap) Rp107.412.502.545,69;
4) Bagian Laba PDAM yang menambah Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp558.671.508,00.

5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)

Penerapan Basis Akrual Pada Beban termasuk didalamnya Beban Luar Biasa (LO) serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA) akan tampak pada perbedaan saldo pengeluaran berupa Belanja dan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban (termasuk Beban Luar Biasa) pada Laporan Operasional (LO).

Belanja dan Transfer pada LRA adalah sebesar Rp1.668.011.933.424,00 sedangkan Beban Operasional dan Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.643.871.879.235,62. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp24.140.054.188,38 yang terdiri dari:

Tabel 195 Selisih Saldo Belanja dan Transfer LRA dengan Beban Operasional dan Beban Luar Biasa pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja Pegawai - Beban Pegawai	796.605.950.209,00	797.581.855.518,54	(975.905.309,54)
2	Belanja Barang - Beban Persediaan	153.838.983.746,00	248.692.959.416,17	(94.853.975.670,17)
3	Belanja Jasa - Beban Jasa	277.177.482.727,98	184.981.741.248,35	92.195.741.479,63
4	Belanja Pemeliharaan - Beban Pemeliharaan	6.623.323.100,94	11.520.226.120,23	(4.896.903.019,29)
5	Belanja Perjalanan Dinas - Beban Perjalanan Dinas	24.292.802.275,00	33.314.716.507,00	(9.021.914.232,00)
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Beban	11.311.258.332,00	11.310.156.732,00	1.101.600,00
7	Belanja Hibah - Hibah	31.638.939.880,00	33.216.122.086,85	(1.577.182.206,85)
8	Belanja Bantuan Sosial - Bantuan Sosial	779.800.000,00	779.800.000,00	0,00
9	Belanja Modal	93.141.854.040,08	0,00	93.141.854.040,08
10	Beban Penyisihan	0,00	611.320.343,34	(611.320.343,34)
11	Beban Penyusutan	0,00	204.460.730.679,14	(204.460.730.679,14)
12	Belanja Transfer - Transfer	266.609.707.739,00	113.496.144.665,00	153.113.563.074,00
13	Belanja Tak Terduga -Beban Luar Biasa	5.991.831.374,00	3.906.105.919,00	2.085.725.455,00
	Jumlah	**1.668.011.933.424,00**	**1.643.871.879.235,62**	**24.140.054.188,38**

1. Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp(975.905.309,54) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas (Belanja Pegawai LRA) yang bukan transaksi Beban Pegawai LO sebesar Rp4.918.997.803,00 yang merupakan pelunasan utang tahun 2024.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Pegawai LO sebesar Rp5.894.903.112,54 yang merupakan penambahan utang Tahun 2025. Pengakuan Belanja pada LRA dilakukan pada periode pelunasan utang tersebut.

2. Selisih Belanja Barang dengan Beban Persediaan

Selisih Belanja Barang dan Beban Persediaan sebesar Rp(94.853.975.670,17) terdiri dari :

Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Belanja Belanja Barang pada LRA dan Beban Persediaan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja Barang Pakai Habis - Beban Barang Pakai Habis	153.642.686.177,00	247.686.107.047,66	(94.043.420.870,66)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai - Beban Barang Tak Habis Pakai	110.301.009,00	110.301.009,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi - Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	85.996.560,00	896.551.359,51	(810.554.799,51)
	Jumlah	**153.838.983.746,00**	**248.692.959.416,17**	**(94.853.975.670,17)**

2.1 Belanja Barang Pakai Habis - Beban Barang Pakai Habis

Selisih Belanja Barang Pakai Habis dan Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp(94.043.420.870,66) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas (Belanja Barang LRA) yang bukan transaksi Beban Persediaan LO sebesar Rp22.103.903.243,52 yang terdiri dari :

1) Pelunasan utang tahun 2024 sebesar Rp7.407.549.589,51. Utang tersebut digunakan untuk pengadaan barang persediaan yang diakui sebagai Beban Persediaan tahun 2024.
2) Belanja barang tahun 2025 yang tidak habis digunakan dan menjadi sisa persediaan akhir tahun 2025 sebesar Rp14.155.384.054,79.
3) Belanja barang tahun 2025 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp421.561.462,00 karena memenuhi kriteria Aset Tetap baik dari umur ekonomis maupun batas minimal kapitalisasi.
4) Penghapusan Barang Pakai Habis sebesar Rp119.408.137,22.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Persediaan LO sebesar Rp116.147.324.114,18 terdiri dari :

1) Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp6.149.692.442,34. Penambahan utang tersebut dalam rangka pengadaan barang persediaan diakui sebagai Beban Persediaan LO Tahun 2025 sedangkan Belanja LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.
2) Penggunaan persediaan awal tahun 2025 sebesar Rp22.772.359.108,81. Persediaan tersebut berasal dari Belanja LRA tahun sebelumnya yang tidak habis digunakan sampai dengan tahun anggaran belanja berjalan.
3) Penggunaan persediaan yang diperoleh dari Pendapatan Hibah Tahun 2025 sebesar Rp10.188.856.383,40.
4) Reklas dari beban jasa sebesar Rp77.036.416.179,63.

2.2 Belanja Barang Tak Habis Pakai - Beban Barang Tak Habis Pakai

Tidak terdapat selisih Belanja Barang Tak Pakai Habis dan Beban Barang Tak Pakai Habis.

2.3 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi - Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Selisih Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp(810.554.799,51) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Persediaan LO yang terdiri dari :

1) Reklas dari Belanja Modal (Aset) dan Beban Barang Pakai Habis ke extracomptable sebesar Rp 777.111.635,51.

2) Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp33.443.164,00.

3. Selisih Belanja dan Beban Jasa

Selisih Belanja Jasa dan Beban Jasa sebesar Rp92.195.741.479,63 terdiri dari :

Tabel 197 Rincian Selisih Saldo Belanja Jasa pada LRA dan Beban Jasa pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja /Beban Jasa	142.039.491.205,00	184.841.176.948,35	(42.801.685.743,35)
2	Belanja / Beban Barang dan Jasa BOSP	34.530.508.398,00	140.564.300,00	34.389.944.098,00
3	Belanja /Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.042.430.780,00	0,00	13.042.430.780,00
4	Belanja / Beban Barang dan Jasa BLUD	87.565.052.344,98	0,00	87.565.052.344,98
	Jumlah	**277.177.482.727,98**	**184.981.741.248,35**	**92.195.741.479,63**

3.1 Belanja /Beban Jasa

Selisih Belanja Jasa dan Beban Jasa sebesar Rp(42.801.685.743,35) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Jasa pada LRA yang bukan transaksi Beban Jasa pada LO sebesar Rp1.866.965.121,33 yang terdiri dari :

1) Pelunasan utang tahun 2024 sebesar Rp1.614.545.438,00. Utang tersebut digunakan untuk Belanja Jasa Tahun 2025 yang diakui sebagai Beban Jasa tahun 2024.

2) Beban dibayar dimuka yang merupakan Belanja Jasa LRA Tahun 2025 tetapi tidak menambah Beban Jasa LO tahun ini Rp56.188.333,33.

3) Belanja jasa tahun 2025 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp196.231.350,00 karena memenuhi kriteria Aset Tetap baik dari umur ekonomis maupun batas minimal kapitalisasi.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Jasa pada LO sebesar Rp44.668.650.864,68 terdiri dari :

1) Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp1.062.841.689,00. Penambahan utang tersebut dalam merupakan Beban Persediaan LO Tahun 2025 sedangkan Belanja LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.

2) Beban dibayar dimuka tahun lalu yang di menjadi Beban Jasa LO tahun 2025 Rp54.115.833,33. Belanja Jasa pada LRA dilakukan pada tahun lalu.

3) Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOSP, Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp43.551.693.342,35.

3.2 Belanja / Beban Barang dan Jasa BOSP

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOSP dan Beban Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp34.389.944.098,00 dikarenakan adanya reklas ke jenis beban yang lain.

3.3 Belanja /Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp13.042.430.780,00 dikarenakan adanya reklas ke jenis beban yang lain.

3.4 Belanja / Beban Barang dan Jasa BLUD

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp 87.565.052.344,98 dikarenakan adanya reklas ke jenis beban yang lain.

4. Selisih Belanja Pemeliharaan - Beban Pemeliharaan

Selisih Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan sebesar Rp(4.896.903.019,29) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Pemeliharaan pada LRA yang bukan transaksi Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp996.032.302,09 yang terdiri dari :

1) Pelunasan utang tahun 2024 sebesar Rp744.817.640,00. Utang tersebut digunakan untuk Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang diakui sebagai Beban Pemeliharaan tahun 2024.

2) Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp251.214.662,09 karena memenuhi kriteria Aset Tetap baik dari umur ekonomis maupun batas minimal kapitalisasi.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp5.892.935.321,38 terdiri dari :

1) Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp112.948.296,00 Penambahan utang tersebut dalam merupakan Beban Pemeliharaan pada LO Tahun 2025 sedangkan Belanja Pemeliharaan pada LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.

2) Pendapatan Hibah yang digunakan untuk Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp65.489.303,58.

3) Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOSP, Beban Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal Gedung/Bangunan sebesar Rp5.714.497.721,80.

5. Selisih Belanja Perjalanan Dinas - Beban Perjalanan Dinas

Selisih Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp(9.021.914.232,00) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Perjalanan Dinas pada LRA yang bukan transaksi Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp9.412.000,00 yaitu transaksi belanja untuk pelunasan utang tahun 2024.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp9.031.326.232,00 terdiri dari :

1) Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp6.970.000,00. Penambahan utang tersebut dalam merupakan Beban Perjalanan Dinas pada LO Tahun 2025 sedangkan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.

2) Reklas dari jenis beban yang lain ke Beban Perjalanan Dinas (LO) Rp9.024.356.232,00.

6. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Selisih Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp1.101.600,00 dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada LRA yang bukan transaksi Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada LO sebesar Rp23.207.400,00 yaitu transaksi belanja untuk pelunasan utang tahun 2024.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada LO sebesar Rp22.105.800,00 merupakan penambahan utang tahun 2025 yang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.

7. Belanja - Beban Hibah

Selisih Belanja Hibah dengan Beban Hibah sebesar Rp(1.577.182.206,85) dikarenakan adanya hibah berupa barang yang terdiri dari :

1) Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp669.159.229,26.

2) Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.031.250,00.

3) Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp902.991.727,59.

8. Bantuan Sosial - Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial tidak terdapat selisih antara saldo LRA dan saldo LO.

9. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp93.141.854.040,08 tidak dilaporkan dalam Beban LO, akan tetapi dipergunakan untuk pengadaan Aset Tetap yang berdampak pada penambahan nilai Aset pada Neraca sebesar Rp91.931.885.385,19 selisihnya sebesar Rp1.209.968.654,89 tidak dikapitalisasi karena direklas ke Beban Persediaan sebesar Rp767.137.316,09 dan direklas ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp442.831.338,80.

10. Beban Penyisihan

Beban Penyisihan sebesar Rp611.320.343,34 tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban Penyisihan merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

11. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan sebesar Rp204.460.730.679,14 tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban penyusutan tersebut merupakan penambahan saldo akumulasi penyusutan aset tetap selama periode Tahun 2025.

12. Transfer - Beban Transfer

Selisih Beban Transfer dan Belanja Transfer sebesar Rp153.113.563.074,00 dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Transfer pada LRA yang bukan transaksi Beban Transfer pada LO sebesar Rp155.603.277.033,00 yang terdiri dari :

1) Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp1.461.925.893,00. Utang tersebut digunakan untuk Belanja Transfer Tahun 2025 yang diakui sebagai Beban Transfer Tahun 2024.

2) Dana Desa sebesar Rp154.141.351.140,00. Dana Desa dilaporkan pada LRA dan tidak dilaporkan pada LO.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Transfer pada LO sebesar Rp2.489.713.959,00.

13. Selisih Belanja Tak Terduga

Selisih Belanja Tak Terduga dan Beban Luar Biasa sebesar Rp2.085.725.455,00 dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Tak Terduga pada LRA yang bukan transaksi Beban Luar Biasa pada LO yang terdiri dari :

1) Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp710.424.694,00. Utang tersebut digunakan untuk pengembalian atas penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi yang anggaran dan realisasinya pada Belanja Tak Terduga Tahun 2025 yang diakui sebagai Beban Luar Biasa Tahun 2024.

2) Kapitalisasi ke Aset Tetap dari Belanja Tak Terduga yang mengurangi Beban Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp1.375.300.761,00.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Belanja dan Transfer pada LRA (pengeluaran kas) sebesar Rp1.668.011.933.424,00 yang diakui sebagai Beban pada LO (termasuk Beban Luar Biasa) adalah sebesar Rp1.387.262.559.025,98. Transaksi kas yang tidak diakui sebagai Beban LO sebesar Rp280.749.374.398,02 terdiri dari:

1. Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp16.890.880.457,51;
2. Penambahan beban dibayar dimuka sebesar Rp56.188.333,33;
3. Persediaan akhir dari pengadaan tahun berjalan sebesar Rp14.155.384.054,79;
4. Belanja barang dan jasa dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp2.244.308.235,09;
5. Belanja Modal sebesar Rp93.141.854.040,08;
6. Dana Desa sebesar Rp154.141.351.140,00.
7. Penghapusan Barang Persediaan Expired reklas ke Rekening Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp119.408.137,22.

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO dan tidak menjadi Belanja LRA sejumlah Rp256.609.320.209,64 antara lain :

1. Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp15.739.175.298,88;
2. Pengurangan beban dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp54.115.833,33;
3. Penggunaan sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp22.772.359.108,81;
4. Reklas Aset Tetap yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi ke Beban Persediaan (extracomptable) sebesar Rp777.111.635,51;
5. Penggunaan persediaan dari pendapatan hibah sebesar Rp10.188.856.383,40;
6. Pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan dari pendapatan hibah sebesar Rp65.489.303,58;
7. Beban Hibah berupa Persediaan sebesar Rp386.229.602,00;
8. Beban Hibah berupa Aset Tetap sebesar Rp1.190.952.604,85;
9. Beban penyisihan piutang sebesar Rp611.320.343,34;
10. Beban penyusutan aset tetap dan amortisasi sebesar Rp204.460.730.679,14;
11. Reklas dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp362.979.416,80;

5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan

Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan akan tampak pada:

1. Penambahan Kas pada Neraca karena adanya SILPA Tahun Lalu (LRA) sebesar Rp59.179.887.105,27 dan
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (LRA) sebesar Rp611.643.517,73 yang merupakan Penerimaan Kembali Dana Bergulir dan Dana Revolping yang mengurangi saldo Piutang pada Neraca.

5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp390.738.140,71 merupakan selisih dari :

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp510.146.277,93 merupakan surplus dari cadangan penyisihan piutang tak tertagih akhir Tahun 2024 yang dilunasi pada Tahun 2025. Cadangan penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui sebagai beban pada tahun sebelumnya. Karena

terdapat pengurangan/pembayaran angsuran pada tahun berjalan, maka penyisihan piutang tak tertagih yang sudah dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2025 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp119.408.137,22 penghapusan persediaan *expired*.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Umum Daerah

6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Pacitan secara astronomis terletak pada 7º 92’ - 8º 29’ Lintang Selatan 110º 90’ - 111º 43’ Bujur Timur yang memiliki luas 1.389,87 km^2 dengan batas wilayah meliputi:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);
2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur);
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).

Gambar 6 Peta Administrasi Kabupaten Pacitan

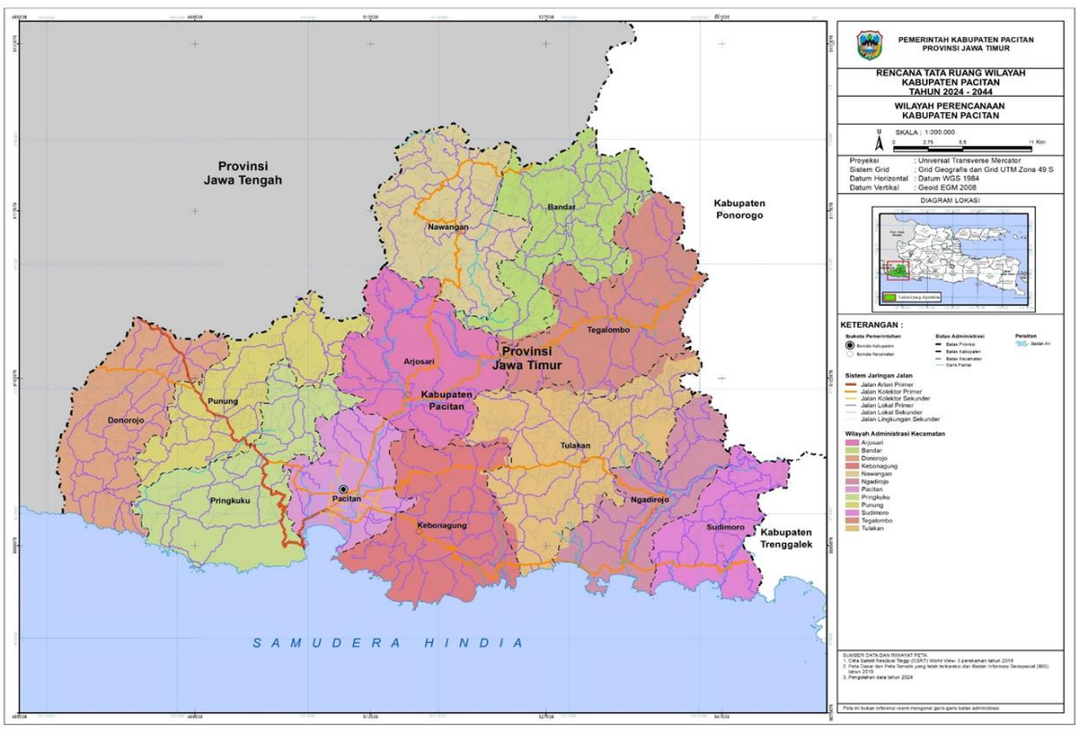

Sumber: RTRW Kab. Pacitan Tahun 2024-2044

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan berupa perbukitan 85%, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa, sedangkan selebihnya merupakan dataran rendah. Keseimbangan daerah pantai, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan yang dikelola dalam sebuah bingkai kesejahteraan masyarakat telah menjadi suatu ciri khas dalam keanekaragaman yang ada. Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar untuk pertanian dan kehutanan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum.

6.1.2 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sebagaimana umumnya, wilayah perkotaan penggunaan lahan lebih didominasi untuk pemukiman, pertokoan, pasar, fasilitas pendidikan, perhotelan dan perkantoran sedangkan wilayah pedesaan kawasan pemukiman tidak terlalu luas bahkan di sekitar perumahan juga masih dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan tercantum sebagai berikut dan gambar di bawah ini (LKPJ Kabupaten Pacitan Tahun 2021):

1. Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 ha
2. Pemukiman penduduk : 4,43% atau 6.157,33 ha
3. Hutan : 57,13% atau 79.397,00 ha
4. Sawah : 9,00% atau 12.509,26 ha
5. Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 ha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, rencana pola ruang wilayah bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut:
   a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri:
      1) Kawasan Hutan Lindung;
      2) Kawasan Karst kelas I.
   b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
      1) Kawasan sempadan pantai;
      2) Kawasan sempadan sungai;
      3) Kawasan sekitar mata air;
      4) Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
   c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yaitu:
      1) Kawasan Cagar Alam;
      2) Kawasan Cagar Budaya.
   d. Kawasan Rawan Bencana Alam, yaitu:
      1) Kawasan rawan gempa bumi;
      2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
      3) Kawasan gelombang pasang tsunami; dan
      4) Kawasan rawan banjir.
   e. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
      1) Kawasan ruang terbuka hijau;
      2) Kawasan terumbu karang.
2. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
      a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
      b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. Kawasan peruntukan pertanian;

d. Kawasan peruntukan perikanan;

e. Kawasan peruntukan pertambangan;

f. Kawasan peruntukan industri;

g. Kawasan peruntukan pariwisata;

h. Kawasan peruntukan permukiman; dan

i. Kawasan peruntukan lainnya.

6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Penggunaan wilayah merupakan salah satu bentuk fokus dari pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan daerah, termasuk pembangunan wilayah yang ada di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berpotensi dalam kegiatan penggunaan wilayah perlu dipetakan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengembangan. Secara umum, berbagai komoditas yang terkait dengan potensi penggunaan wilayah di Kabupaten Pacitan diantaranya sebagai berikut:

1. Pertanian
2. Tanaman Perkebunan
3. Ternak
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
   1) Batu bara;
   2) Mineral logam, mencakup timah putih, timah hitam, nikel, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi, serta batu besi;
   3) Mineral bukan logam, yaitu batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, phosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophylit, fosil kayu, kalsedon/agate, kristal kuarsa, rijang, dan juga jasper; dan
   4) Batuan, seperti ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/tanah liat.
6. Pariwisata
7. Kelautan dan Sektor Perdangangan

6.1.4 Jumlah Penduduk

Populasi manusia dalam suatu wilayah yang di dalamnya mencakup aspek-aspek seperti jumlah penduduk, distribusi, struktur, dan dinamika populasi. Secara keseluruhan, kondisi demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik penduduk dalam suatu wilayah dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Berikut merupakan kondisi demografi Kabupaten Pacitan Tahun 2025:

Tabel 198 Perkembangan Penduduk Kabupaten Pacitan

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Luas Wilayah*	km^2	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87
2.	Penduduk Laki-laki*	Jiwa	**295.163**	**297.014**	**299.170**	**294.808**	**295.272**
3.	Penduduk Perempuan*	Jiwa	**293.945**	**295.902**	**298.220**	**293.910**	**294.804**
4.	Jumlah Penduduk*	Jiwa	**589.108**	**592.916**	**597.390**	**588.718**	**590.076**

5.	Kepadatan Penduduk	jiwa/km	424	427	430	423,57	424,50
6.	Pertumbuhan Penduduk	%	0,51	0,65	0,75	0.09	0,68
7.	*Sex Ratio*	%	100,41	100,38	100,32	100	100

*Sumber: *BPS Kab. Pacitan, 2025.*

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Laju ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta migrasi masuk dan keluar. Berikut merupakan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan Tahun 2025. Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 590.076 ribu jiwa. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Pacitan mengalami laju pertumbuhan penduduk, yakni sebesar 0,68% per tahun. Beberapa kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk.

6.1.5 Kondisi Demografi

Rasio penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan variabel tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk usia produktif, atau jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang digunakan untuk menganalisis distribusi dan keseimbangan demografi dalam suatu wilayah. Secara keseluruhan, rasio penduduk Kabupaten Pacitan adalah 100, menunjukkan keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Terdapat variasi antar kecamatan, dengan rasio penduduk tertinggi di Kecamatan Kebonagung (104) dan terendah di Kecamatan Punung (97).

Gambar 7 Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan

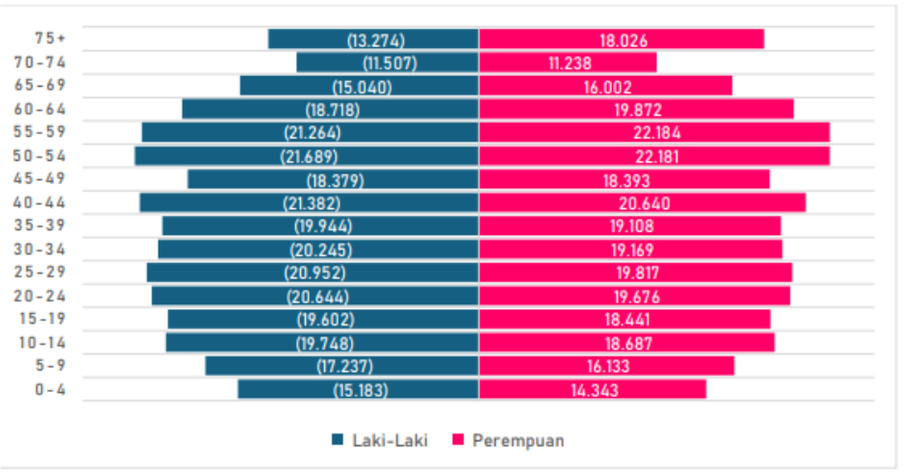

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2025

Jika dilihat dari postur piramida penduduk berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2025, Kabupaten Pacitan memiliki distribusi penduduk dengan jumlah laki-laki dan perempuan tampak hampir seimbang di sebagian besar kelompok usia, dengan sedikit dominasi perempuan pada kelompok usia lanjut. Hal ini mengindikasikan adanya tren penuaan penduduk, yang berarti jumlah penduduk usia tua mulai meningkat, sementara kelompok usia muda tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Fenomena ini umum terjadi di daerah dengan tingkat kelahiran yang mulai menurun serta harapan hidup yang meningkat. Dari perspektif perencanaaan pembangunan daerah, kondisi ini memiliki implikasi terhadap kebijakan ekonomi dan sosial. Dengan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun), Kabupaten Pacitan memiliki potensi

bonus demografi, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja produktif memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang baik. Namun, dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan terkait kesehatan lansia, jaminan sosial, dan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Pj. Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1 / 973 / KPTS / 011.2 / 2024, ditetapkan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan periode 2024 – 2029, yaitu:

Tabel 199 Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan

No.	Nama	Jabatan	Partai Politik (Pengusung)
1.	Dr. Arif Setia Budi, S.Sos, M.P.A.	Ketua DPRD	Partai Demokrat
2.	Lancur Susanto, S.Sos.	Wakil Ketua DPRD	Partai Golongan Karya
3.	Heru Setyanto	Wakil Ketua DPRD	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Fibi Irawan, S.E, M.M.	Wakil Ketua DPRD	Partai Kebangkitan Bangsa

Pelantikan dan pengambilan sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan periode 2024-2029 dilaksanakan pada 9 Oktober 2024. Susunan anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 2024-2029 menurut fraksi adalah sebagai berikut.

Tabel 200 Susunan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2024-2029 per Fraksi

Fraksi	No.	Nama	Jabatan
Partai Demokrat	1.	BAGINDA RAHADIAN PRATAMA, S.Kom.	Ketua
	2.	PUJO SETYO HADI, S.Pt.	Wakil Ketua
	3.	RAKHMAN WIJAYANTO	Sekretaris
	4.	ANUNG DWI RISTANTO, S.H., M.M.	Anggota
	5.	JOKO SUSILO HADI, S.H.	Anggota
	6.	SUHADI, S,T.	Anggota
	7.	WILLY RIZKI CAHYA PAMBUDI, S.E.	Anggota
	8.	BAGUS SURYA PRATIKNA, S.H., M.M.	Anggota
	9.	SUPRIHATI WINARCAHYANI	Anggota
	10.	BOIMIN, S.Pd.	Anggota
	11.	WAHIDIN	Anggota
	12.	TUMARDI	Anggota
	13.	HERU PUSPO HANDOYO	Anggota
	14.	Dr. ARIF SETIA BUDI, S.Sos., M.P.A.	Anggota
	15.	RUDI HANDOKO, S.Sos., M.M.	Anggota
	16.	WINARDI	Anggota
	17.	dr. H. WARKIM SUTARTO, MARS.	Anggota
	18.	SUWARSO	Anggota
	19.	SUTIKNO	Anggota
	20.	RUDI HARTOYO, S.E.	Anggota
	21.	BAMBANG MARGONO, S.Sos.	Anggota
Partai Golongan Karya	1.	PRABOWO, S.E.	Ketua
	2.	BAMBANG SUSENO, A.Ma. Pd.	Wakil Ketua
	3.	SRI WIDOWATI, S.M.	Sekretaris
	4.	LANCUR SUSANTO. S.Sos.	Anggota
	5.	SUNARKO, S.T., M.M.	Anggota
	6.	WURI ESTYANA NASIRA, S.M., M.M.	Anggota
	7.	ARIEF NURMAN HIDAYAT, S.H.	Anggota

Fraksi	No.	Nama	Jabatan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.	WIDADI	Ketua
	2.	MARDIYANTO, S.I.P.	Wakil Ketua
	3.	HERIYANTO, S.Pd.	Sekretaris
	4.	HERU SETYANTO	Anggota
	5.	LILIK HIDAYAT	Anggota
Partai Kebangkitan Bangsa	1.	ARIFIN, S.E.	Anggota
	2.	ADI SUBROTO, S.Pd., M.Pd.	Ketua
	3.	WAHYU PUJIONO, S.E.	Wakil Ketua
	4.	FIBI IRAWAN, S.E., M.M.	Sekretaris
	5.	DODIK PRAHCOYO	Anggota
Gabuungan PKS NASDEM PPP	1.	BAMBANG SETYABUDI	Ketua
	2.	AGUS SETIYANTO, S.Sos.	Wakil Ketua
	3.	RIRIN SUBIANTI, S.Pd., M.M.	Sekretaris
	4.	PUJO HARTONO	Anggota
	5.	SAMSURI, S.H.	Anggota
	6.	HARIAWAN, S.T.	Anggota

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pemilihan umum serentak tahun 2024, yaitu:

Tabel 201 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Nama	Jabatan	Partai Politik (Kader)
INDRATA NUR BAYUAJI, S.S.	Bupati	Partai Demokrat
GAGARIN SUMRAMBAH, S.Sos., M.HP.	Wakil Bupati	Partai Golongan Karya

Pasangan tersebut adalah petahana yang kembali memenangkan Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi 6 partai politik, yaitu: Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKB, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Keduanya dilantik pada tanggal 6 Februari 2025.

1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Eksekutif di Pemerintah Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Bupati dalam memimpin Pemerintah Kabupaten Pacitan membentuk perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah meliputi:

Tabel 202 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan

No.	Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah	9 Bagian terdiri dari: a. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama b. Bagian Kesejahteraan Rakyat c. Bagian Hukum d. Bagian Administrasi Pembangunan e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa f. Bagian Umum g. Bagian Organisasi

No.	Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah
		h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan i. Bagian Perekonomian
2.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat	Inspektorat
4.	Dinas	19 Dinas terdiri dari: a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Dinas Kesehatan c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian d. Dinas Komunikasi dan Informatika e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu k. Dinas Pendidikan l. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak m. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja n. Dinas Perhubungan o. Dinas Perikanan p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan q. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan r. Dinas Sosial s. Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Badan	5 Badan terdiri dari: a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik c. Badan Keuangan Daerah d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah e. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
6.	Kecamatan	12 Kecamatan terdiri dari: a. Kecamatan Arjosari b. Kecamatan Bandar c. Kecamatan Donorojo d. Kecamatan Kebonagung e. Kecamatan Nawangan f. Kecamatan Ngadirojo g. Kecamatan Pacitan h. Kecamatan Pringkuku i. Kecamatan Punung j. Kecamatan Sudimoro k. Kecamatan Tegalombo l. Kecamatan Tulakan

Dalam menjalankan pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan dan Inspektur Daerah dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 203 Nama Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

Nama	Jabatan
Dr. Ir.. HERU WIWOHO SUPADI PUTRA, M.Si	Sekretaris Daerah
dr. DARU MUSTIKOAJI	Kepala Dinas Kesehatan
Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos., M.Si	Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
PRAYITNO, ST, M.T.	Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
Dr.Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, M.M.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Drs. ACEP SUHERMAN, M.M.	Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
Ir.. T ANDI FALIANDRA, M.M.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TURMUDI, S.Sos, M.Si.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
DENI CAHYANTORO, SH, M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah
ERWIN ANDRI ATMOKO, S.STP, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TRI MUDJIHARTO, S.Sos, M.M.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SUGENG SANTOSO, S.P., M.Sc.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
DODIK SOEMARSONO, AP, M.Sc.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, M.M.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
SUPARLAN, S.Sos, ST, M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP	Kepala Dinas Pendidikan
BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt., M.M.	Kepala Dinas Perhubungan
AMAT TAUFAN, S.Sos	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
HERU TUNGGUL WIDODO, ST, M.M	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Sosial
MAHMUD, S.Pd., M.Pd.	Inspektur Daerah
MUNIIRUL ICHWAN, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
ARDYAN WAHYUDI, S.STP, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
DIDIK ALIH WIBOWO, ST, M.M.	Sekretaris DPRD
DIDIK DARMAWAN, S.STP, MM, S.STP	Camat Arjosari
SUKARWAN, S.Sos, M.Si	Camat Nawangan
NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Ngadirojo
SUGIYEM, AP, M.Si.	Camat Pacitan
PUDJI HARYONO, S.Sos, M.Si.	Camat Punung
MUHAMMAD TAUFIK EFFENDI, M.Si, S.STP, M.Si, S.STP, S.STP	Camat Sudimoro
DJOKO HARIJANTO, SP, M.M.	Camat Tulakan

Berdasarkan data tabel per 31 Desember 2025 terdapat 11 perangkat daerah yang belum diisi oleh Pajabat terkait dan dirangkap jabatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 204 Daftar Rangkap Jabatan

No	Nama	Jabatan	Merangkap Jabatan
1	DENI CAHYANTORO, SH, M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

Tabel 204 Daftar Rangkap Jabatan

No	Nama	Jabatan	Merangkap Jabatan
2	KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP	Kepala Dinas Pendidikan	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
3	IKA WAHYUNINGTIYAS, S.STP, M.PSDM.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	SRI KUSUMO, SIP, MM	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
5	DEWI ANDRIYANI, S.Pt.	Sekretaris Dinas Perikanan	Plt. Kepala Dinas Perikanan
6	SIGIT PRABOWO, ST, M.M	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7	SURONO, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	UDIN WAHYUDI, S.Sos, MM	Sekretaris Kecamatan Kebonagung	Plt. Camat Kebonagung
9	NASRUL HIDAYAT, S.STP, M.Si.	Sekretaris Kecamatan Donorojo	Plt. Camat Donorojo
10	EDY WASANA, SE	Sekretaris Kecamatan Tegalombo	Plt. Camat Tegalombo
11	SUMARDI, S.E., M.Si.	Sekretaris Kecamatan Pringkuku	Plt. Camat Pringkuku
12	MUHAMAD ILYAS, S.Pd	Sekretaris Kecamatan Bandar	Plt. Camat Bandar

Data per 31 Desember 2025

6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perkara Perdata Nomor: 19/PTUN.SBY tanggal 26 Februari 2019; dan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 03/Pen.Eks/P/FP/2019/PTUN.SBY tanggal 23 Januari 2025 tentang Gugatan atas Penggantian Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 886/290/408.47/2004 tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun. Langkah-Langkah yang diambil Pemerintah Daerah:

   Berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 03/Pen.Eks/P/FP/2019/PTUN.SBY tanggal 23 Januari 2025 atas pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 03/P/FP/19/PTUN.SBY tanggal 26 Februari 2019, dengan amar putusan yang berbunyi:

   a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

   b. Mewajibkan Kepada Termohon untuk mengurus proses penerbitan Surat Keputusan Pengganti dari:

      - Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 886/290/408.47/2004 tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun yang ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2024;
      - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 33944/A2.5/KP/2023 tanggal 30 Desember 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

        a) Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan sesungguhnya telah menyerahkan 2 (dua) dokumen Keputusan Asli Kepada Pemohon

namum Pemohon tidak berada di tempat domisili sehingga dokumen dimaksud dikembalikan lagi ke arsip BKD Kabupaten Pacitan.

b) Pada Tahun 2019 sebelum diajukannya gugatan fiktif positif di PTUN Surabaya, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah merespon permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen tersebut dengan menyerahkan dokumen berupa salinan/fotokopi legalisir disertai tanda terima dikarenakan naskah aslinya diterangkan hilang dan penyerahan tersebut sudah disertai tanda terima.

c) Pada akhirnya berdasarkan Surat Bupati Pacitan Nomor: 800.1.6.2/586/408.54/2025 tanggal 24 Februari 2025 Perihal Laporan Pelaksanaan Putusan, yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Pemerintah Kabupaten Pacitan telah:

c. Menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati Nomor 886/290/408.47/2024:

d. Menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1.6.2/516/408.54/2025 tanggal 18 Februari 2025 Perihal Mendorong Penerbitan Kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 33944/A2.5/KP/2003; dan

e. Menyampaikan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 800.1.6.2/517/408.54/2025 tanggal 18 Februari 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 33944/A2.5/KP/2003.

Permasalahan hukum yang masih Litigasi pada Tahun 2025.

Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 169/G/TF/2025/PTUN.SBY tentang Gugatan Sengketa Tanah di Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan antara Winih, dkk (Penggugat) dan Kepala Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan (Tergugat) dengan pihak yang bersegketa Winih, Tuni, Suyatmi, Suyatno, Suyati, Yadianto, Imam Suciono, Minarseh, Joko Setiaji, Sri Puji Lestari (Penggugat);Kepala Desa Watukarung (Sebagai Tergugat); dan Andry Hermansyah, S.H (Kuasa dari Penggugat).

Langkah-Langkah yang diambil Pemerintah Daerah:

a. Sehubungan dengan adanya Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 169/G/TF/2025/PTUN.SBY, Kepala Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan terkait Surat Panggilan Panitera Pengganti PTUN Surabaya tanggal 22 Desember 2025, dengan maksud agar Pemerintah Daerah bersedia memberikan pendampingan hukum kepada Pemerintah Desa Watukarung atas gugatan tersebut.

b. Pemerintah Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan disarankan untuk mengajukan surat permohonan pendampingan hukum kepada Bupati Pacitan.

VII. PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mencoba memenuhi komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang seiring dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Perbaikan kinerja yang telah dicapai, akan menjadi pondasi yang proporsional dalam rangka memenuhi sasaran strategis rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan di Tahun 2025. Meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai. berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan akan dijadikan modal dalam rangka melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025, disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam Penyampaian Laporan Keuangan.

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

Lampiran 1

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	PENDAPATAN BLUD		RETRIBUSI DAERAH		TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA BLUD	
		PENDAPATAN JASA LAYANAN	JASA GIRO	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		PEGAWAI	BARANG JASA
1	2	3	4	5	6	6=3+4+5	7	8
1	RSUD dr. DARSONO	537.751.148,76			103.524.417.820,00	104.062.168.968,76	30.004.987.916,00	69.925.513.622,98
2	PUSK PACITAN		1.809.605,00	1.367.221.443,00		1.369.031.048,00	751.245.132,00	481.029.150,00
3	PUSK TANJUNGSARI		3.382.193,00	2.395.001.188,00		2.398.383.381,00	1.354.470.430,00	823.768.265,00
4	PUSK KEBONAGUNG		720.546,00	1.737.065.767,00		1.737.786.313,00	917.462.642,00	663.938.721,00
5	PUSK KETROWONOJOYO		618.072,71	1.188.848.334,00		1.189.466.406,71	566.691.587,00	499.691.583,00
6	PUSK ARJOSARI		4.229.625,80	2.764.331.459,00		2.768.561.084,80	1.328.489.854,00	1.194.248.079,00
7	PUSK KEDUNGBENDO		383.503,00	604.229.539,00		604.613.042,00	229.089.817,00	236.722.772,00
8	PUSK PUNUNG		2.095.552,00	1.948.591.910,00		1.950.687.462,00	977.163.292,00	816.359.585,00
9	PUSK GONDOSARI		1.355.003,75	1.409.360.408,00		1.410.715.411,75	614.409.054,00	658.046.265,00
10	PUSK PRINGKUKU		1.142.559,00	1.074.321.086,00		1.075.463.645,00	623.938.705,00	397.837.848,00
11	PUSK CANDI		259.094,22	748.901.470,00		749.160.564,22	429.572.184,00	228.973.796,00
12	PUSK DONOROJO		407.640,37	1.646.424.560,00		1.646.832.200,37	877.345.433,00	639.628.708,00
13	PUSK KALAK		176.067,97	756.546.576,00		756.722.643,97	433.463.742,00	309.012.101,00
14	PUSK NGADIROJO		3.283.191,35	3.649.825.295,00		3.653.108.486,35	2.193.894.778,00	1.413.095.364,00
15	PUSK WONOKARTO		1.393.211,28	932.886.640,00		934.279.851,28	499.086.040,00	355.488.942,00
16	PUSK TULAKAN		2.543.671,31	4.838.456.158,00		4.840.999.829,31	2.409.185.498,00	1.979.626.671,00
17	PUSK BUBAKAN		1.567.812,79	2.549.514.708,00		2.551.082.520,79	1.137.604.387,00	916.121.178,00
18	PUSK SUDIMORO		2.960.919,38	1.348.045.942,00		1.351.006.861,38	656.690.518,00	522.757.094,00
19	PUSK SUKOREJO		1.119.702,32	1.112.084.404,00		1.113.204.106,32	606.845.246,00	460.975.188,00
20	PUSK TEGALOMBO		3.209.965,00	3.098.718.960,00		3.101.928.925,00	1.672.576.847,00	1.175.528.910,00
21	PUSK GEMAHARJO		2.398.945,00	2.089.827.343,00		2.092.226.288,00	1.442.942.158,00	899.453.071,00
22	PUSK NAWANGAN		1.035.062,52	2.344.339.513,00		2.345.374.575,52	1.116.545.445,00	983.753.028,00
23	PUSK PAKISBARU		2.302.671,98	2.376.636.804,00		2.378.939.475,98	1.335.554.330,00	771.906.370,00
24	PUSK BANDAR		2.126.206,96	1.932.527.256,00		1.934.653.462,96	1.179.629.403,00	791.778.791,00
25	PUSK JERUK		810.986,63	1.169.492.507,00		1.170.303.493,63	669.850.943,00	419.797.242,00
	TOTAL	537.751.148,76	41.331.809,34	45.083.199.270,00	103.524.417.820,00	149.186.700.048,10	54.028.735.381,00	87.565.052.344,98

Lampiran 1.1

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	BELANJA BLUD		SURPLUS/DEFISIT	PEMBIAYAAN			SILPA
		MODAL	BELANJA S/D DESEMBER		PENERIMAAN PEMBIAYAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN NETO	
1	2	9	10=7+8+9	11=6-10	12	13	14=12-13	15= 11+14
1	RSUD dr. DARSONO	4.061.018.172,00	103.991.519.710,98	70.649.257,78		0,00	0,00	70.649.257,78
2	PUSK PACITAN	180.717.260,00	1.412.991.542,00	-43.960.494,00	164.441.896,00		164.441.896,00	120.481.402,00
3	PUSK TANJUNGSARI	79.908.773,00	2.258.147.468,00	140.235.913,00	226.606.459,00		226.606.459,00	366.842.372,00
4	PUSK KEBONAGUNG	162.644.103,00	1.744.045.466,00	-6.259.153,00	74.880.269,00		74.880.269,00	68.621.116,00
5	PUSK KETROWONOJOYO	19.197.400,00	1.085.580.570,00	103.885.836,71	7.740.568,52		7.740.568,52	111.626.405,23
6	PUSK ARJOSARI	659.211.792,88	3.181.949.725,88	-413.388.641,08	501.633.712,39		501.633.712,39	88.245.071,31
7	PUSK KEDUNGBENDO	58.792.200,00	524.604.789,00	80.008.253,00	11.131.820,00		11.131.820,00	91.140.073,00
8	PUSK PUNUNG	220.587.277,00	2.014.110.154,00	-63.422.692,00	126.495.664,00		126.495.664,00	63.072.972,00
9	PUSK GONDOSARI	55.775.640,00	1.328.230.959,00	82.484.452,75	158.829.884,73		158.829.884,73	241.314.337,48
10	PUSK PRINGKUKU	61.271.041,00	1.083.047.594,00	-7.583.949,00	71.895.563,00		71.895.563,00	64.311.614,00
11	PUSK CANDI	66.542.902,00	725.088.882,00	24.071.682,22	10.740.645,66		10.740.645,66	34.812.327,88
12	PUSK DONOROJO	86.391.300,00	1.603.365.441,00	43.466.759,37	5.950.323,59		5.950.323,59	49.417.082,96
13	PUSK KALAK	5.369.060,00	747.844.903,00	8.877.740,97	10.371.701,51		10.371.701,51	19.249.442,48
14	PUSK NGADIROJO	330.375.555,00	3.937.365.697,00	-284.257.210,65	526.504.172,93		526.504.172,93	242.246.962,28
15	PUSK WONOKARTO	65.945.429,00	920.520.411,00	13.759.440,28	146.690.354,24		146.690.354,24	160.449.794,52
16	PUSK TULAKAN	247.373.528,00	4.636.185.697,00	204.814.132,31	297.290.115,01		297.290.115,01	502.104.247,32
17	PUSK BUBAKAN	169.253.971,00	2.222.979.536,00	328.102.984,79	215.167.406,10		215.167.406,10	543.270.390,89
18	PUSK SUDIMORO	54.506.000,00	1.233.953.612,00	117.053.249,38	360.539.462,34		360.539.462,34	477.592.711,72
19	PUSK SUKOREJO	54.838.830,00	1.122.659.264,00	-9.455.157,68	124.127.922,14		124.127.922,14	114.672.764,46
20	PUSK TEGALOMBO	112.842.300,00	2.960.948.057,00	140.980.868,00	259.880.390,00		259.880.390,00	400.861.258,00
21	PUSK GEMAHARJO	133.268.506,00	2.475.663.735,00	-383.437.447,00	426.735.692,00		426.735.692,00	43.298.245,00
22	PUSK NAWANGAN	211.590.094,00	2.311.888.567,00	33.486.008,52	183.864.703,35		183.864.703,35	217.350.711,87
23	PUSK PAKISBARU	278.253.548,00	2.385.714.248,00	-6.774.772,02	219.328.404,63		219.328.404,63	212.553.632,61
24	PUSK BANDAR	143.520.739,00	2.114.928.933,00	-180.275.470,04	266.101.999,28		266.101.999,28	85.826.529,24
25	PUSK JERUK	147.668.349,00	1.237.316.534,00	-67.013.040,37	105.058.678,98		105.058.678,98	38.045.638,61
	TOTAL	7.666.863.769,88	149.260.651.495,86	-73.951.447,76	4.502.007.808,40	0,00	4.502.007.808,40	4.428.056.360,64

REKAPITULASI REALISASI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD
TAHUN 2025

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN									SISA DANA		
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV		JUMLAH	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
			JUMLAH	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA	BOS REGULER	BOS KINERJA					
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	4	14	18	22	30	34	38	42	46	50	53	56	57
			27.742.065.986,00	**5.667.979.537,00**	**6.118.762.397,00**	**6.133.841.660,00**	**406.793.300,00**	**757.662.795,00**	**663.492.455,00**	**26.023.240.152,00**	**1.597.551.950,00**	**119.678.798,00**	**1.595.086,00**	**121.273.884,00**
20511270	SD NEGERI 1 BELAH	Donorojo	122.400.000,00	19.723.500,00	25.727.180,00	41.817.170,00	18.480.700	11.933.870,00	4.019.300,00	99.201.720,00	22.500.000,00	698.280,00	-	698.280,00
20511500	SD NEGERI 1 CEMENG	Donorojo	58.500.000,00	5.400.000,00	6.153.000,00	3.014.000,00	-	21.433.000,00	10.931.300,00	36.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511469	SD NEGERI 1 DONOROJO	Donorojo	120.600.000,00	27.213.150,00	32.730.230,00	38.706.430,00	-	21.764.040,00	-	120.413.850,00	-	186.150,00	-	186.150,00
20511478	SD NEGERI 1 GEDOMPOL	Donorojo	69.300.000,00	10.104.800,00	13.218.300,00	4.427.900,00	33.192.100	18.948.800,00	22.500.000,00	46.699.800,00	22.500.000,00	100.200,00	-	100.200,00
20511539	SD NEGERI 1 GENDARAN	Donorojo	60.300.000,00	9.825.800,00	20.234.400,00	13.206.900,00	32.120.000	17.032.900,00	-	60.300.000,00	-	-	-	-
20511405	SD NEGERI 1 KALAK	Donorojo	31.500.000,00	8.384.600,00	7.365.400,00	10.479.200,00	-	5.270.800,00	-	31.500.000,00	-	-	-	-
20551732	SD NEGERI 1 KLEPU	Donorojo	45.900.000,00	10.045.400,00	9.249.800,00	8.513.400,00	-	17.929.500,00	-	45.738.100,00	-	161.900,00	-	161.900,00
20510776	SD NEGERI 1 SAWAHAN	Donorojo	33.300.000,00	10.018.200,00	4.769.700,00	8.415.900,00	35.000.000	10.096.200,00	-	33.300.000,00	-	-	-	-
20510784	SD NEGERI 1 SEKAR	Donorojo	49.500.000,00	10.461.800,00	14.224.400,00	12.269.900,00	-	12.217.600,00	-	49.173.700,00	-	326.300,00	-	326.300,00
20510839	SD NEGERI 1 SENDANG	Donorojo	67.500.000,00	13.337.758,00	4.273.698,00	3.091.758,00	34.040.000	24.296.786,00	22.500.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510812	SD NEGERI 1 SUKODONO	Donorojo	78.300.000,00	13.352.366,00	23.801.716,00	2.520.656,00	35.000.000	38.479.442,00	-	78.154.180,00	-	145.820,00	-	145.820,00
20511033	SD NEGERI 1 WIDORO	Donorojo	45.900.000,00	10.521.600,00	1.178.400,00	1.076.100,00	-	10.623.900,00	11.031.300,00	23.400.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511269	SD NEGERI 2 BELAH	Donorojo	74.700.000,00	10.817.005,00	25.687.293,00	15.072.042,00	35.000.000	21.804.240,00	-	73.380.580,00	-	1.319.420,00	-	1.319.420,00
20511499	SD NEGERI 2 CEMENG	Donorojo	33.300.000,00	5.479.000,00	9.796.000,00	2.199.000,00	-	15.826.000,00	-	33.300.000,00	-	-	-	-
20511468	SD NEGERI 2 DONOROJO	Donorojo	53.100.000,00	6.504.700,00	19.550.974,00	6.672.258,00	-	20.145.444,00	-	52.873.376,00	-	226.624,00	-	226.624,00
20511477	SD NEGERI 2 GEDOMPOL	Donorojo	36.900.000,00	2.505.000,00	10.571.400,00	2.505.000,00	-	21.318.600,00	-	36.900.000,00	-	-	-	-
20511547	SD NEGERI 2 GENDARAN	Donorojo	56.700.000,00	6.809.900,00	8.687.200,00	15.295.300,00	-	3.407.600,00	4.309.500,00	34.200.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511404	SD NEGERI 2 KALAK	Donorojo	83.700.000,00	25.594.500,00	4.499.500,00	41.766.950,00	-	11.839.050,00	-	83.700.000,00	-	-	-	-
20511431	SD NEGERI 2 KLEPU	Donorojo	69.300.000,00	7.855.810,00	15.380.580,00	9.354.910,00	-	14.186.700,00	2.939.000,00	46.778.000,00	22.500.000,00	22.000,00	-	22.000,00
20510778	SD NEGERI 2 SAWAHAN	Donorojo	24.300.000,00	8.870.600,00	3.272.400,00	6.986.800,00	32.600.000	5.163.200,00	-	24.293.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00
20510783	SD NEGERI 2 SEKAR	Donorojo	48.600.000,00	15.695.400,00	8.604.600,00	21.668.400,00	33.500.000	2.631.600,00	-	48.600.000,00	-	-	-	-
20510838	SD NEGERI 2 SENDANG	Donorojo	23.400.000,00	10.399.010,00	970.410,00	970.410,00	-	11.060.170,00	-	23.400.000,00	-	-	-	-
20510820	SD NEGERI 2 SUKODONO	Donorojo	27.000.000,00	6.560.494,00	4.642.530,00	1.672.560,00	-	14.106.143,00	-	26.981.727,00	-	18.273,00	-	18.273,00
20511022	SD NEGERI 2 WIDORO	Donorojo	90.900.000,00	21.052.650,00	19.803.250,00	7.210.000,00	-	42.825.100,00	-	90.891.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
20511268	SD NEGERI 3 BELAH	Donorojo	32.400.000,00	13.836.000,00	2.114.000,00	1.415.500,00	35.000.000	15.034.500,00	-	32.400.000,00	-	-	-	-
20511498	SD NEGERI 3 CEMENG	Donorojo	24.300.000,00	6.139.000,00	6.011.000,00	9.594.000,00	-	2.556.000,00	-	24.300.000,00	-	-	-	-
20511467	SD NEGERI 3 DONOROJO	Donorojo	35.100.000,00	12.710.900,00	4.831.900,00	8.411.850,00	-	9.125.150,00	-	35.079.800,00	-	20.200,00	-	20.200,00
20511466	SD NEGERI 3 GEDOMPOL	Donorojo	67.500.000,00	8.800.280,00	12.445.380,00	2.245.000,00	-	21.509.340,00	22.500.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20551733	SD NEGERI 3 KLEPU	Donorojo	25.200.000,00	4.446.900,00	8.142.900,00	2.511.200,00	-	-	-	15.101.000,00	-	10.099.000,00	-	10.099.000,00
20510837	SD NEGERI 3 SENDANG	Donorojo	42.300.000,00	13.157.155,00	3.057.345,00	22.307.630,00	-	3.777.870,00	-	42.300.000,00	-	-	-	-
20510821	SD NEGERI 3 SUKODONO	Donorojo	63.900.000,00	11.862.938,00	8.799.671,00	3.407.400,00	-	17.292.600,00	12.131.300,00	41.362.609,00	22.500.000,00	37.391,00	-	37.391,00
20511428	SD NEGERI 4 KLEPU	Donorojo	103.500.000,00	15.708.890,00	20.705.040,00	27.503.130,00	-	16.949.020,00	2.472.000,00	80.866.080,00	22.500.000,00	133.920,00	-	133.920,00
20511494	SD NEGERI 1 BOMO	Punung	72.000.000,00	10.439.635,00	13.614.810,00	14.248.745,00	-	11.196.810,00	6.650.295,00	49.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511540	SD NEGERI 1 GONDOSARI	Punung	70.200.000,00	10.366.155,00	22.581.850,00	29.970.695,00	-	7.281.300,00	-	70.200.000,00	-	-	-	-
20511434	SD NEGERI 1 MANTREN	Punung	45.900.000,00	10.867.640,00	12.082.360,00	13.172.855,00	-	9.777.145,00	-	45.900.000,00	-	-	-	-
20510881	SD NEGERI 1 MENDOLO KIDUL	Punung	34.200.000,00	2.457.450,00	11.363.690,00	-	-	20.308.660,00	-	34.129.800,00	-	70.200,00	-	70.200,00
20510879	SD NEGERI 1 MENDOLO LOR	Punung	85.500.000,00	10.934.350,00	13.389.485,00	13.907.420,00	-	24.768.745,00	4.834.000,00	63.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510911	SD NEGERI 1 PITON	Punung	55.800.000,00	13.193.150,00	12.390.410,00	21.896.110,00	24.436.800	7.980.830,00	-	55.460.500,00	-	339.500,00	-	339.500,00
20510907	SD NEGERI 1 PLOSO	Punung	86.400.000,00	13.775.405,00	26.174.785,00	31.145.490,00	-	15.304.320,00	-	86.400.000,00	-	-	-	-
20510802	SD NEGERI 1 PUNUNG	Punung	93.600.000,00	16.275.455,00	17.792.035,00	38.601.320,00	-	20.884.970,00	-	93.553.780,00	-	46.220,00	-	46.220,00
20510832	SD NEGERI 1 SOOKA	Punung	52.200.000,00	11.638.664,00	3.069.285,00	4.624.030,00	-	10.317.715,00	22.500.000,00	29.649.694,00	22.500.000,00	50.306,00	-	50.306,00
20511054	SD NEGERI 1 TINATAR	Punung	67.500.000,00	13.319.450,00	18.268.055,00	2.270.000,00	-	33.642.495,00	-	67.500.000,00	-	-	-	-
20511493	SD NEGERI 2 BOMO	Punung	54.000.000,00	14.697.300,00	11.931.290,00	24.228.610,00	35.000.000	3.096.360,00	-	53.953.560,00	-	46.440,00	-	46.440,00
20511528	SD NEGERI 2 GONDOSARI	Punung	37.800.000,00	15.534.000,00	2.616.000,00	17.034.000,00	-	2.616.000,00	-	37.800.000,00	-	-	-	-
20511423	SD NEGERI 2 MANTREN	Punung	49.500.000,00	7.187.100,00	5.864.200,00	800.000,00	-	35.648.700,00	-	49.500.000,00	-	-	-	-
20510880	SD NEGERI 2 MENDOLO KIDUL	Punung	53.100.000,00	7.629.200,00	5.956.640,00	1.841.400,00	-	15.172.760,00	10.751.300,00	30.600.000,00	22.500.000,00	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN								REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV		JUMLAH	JUMLAH	SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA	BOS REGULER	BOS KINERJA			JUMLAH	JUMLAH	
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH					
1	2	4	14	18	22	30	34	38	42	46	50	53	56	57
20510878	SD NEGERI 2 MENDOLO LOR	Punung	40.500.000,00	7.984.150,00	12.262.210,00	15.531.130,00	23.423.700	4.722.510,00	-	40.500.000,00	-	-	-	-
20510910	SD NEGERI 2 PITON	Punung	71.100.000,00	7.620.670,00	16.446.385,00	1.860.750,00	-	22.562.260,00	6.224.820,00	48.490.065,00	22.500.000,00	109.935,00	-	109.935,00
20510895	SD NEGERI 2 PLOSO	Punung	50.400.000,00	9.252.000,00	13.511.100,00	18.407.300,00	-	9.229.600,00	-	50.400.000,00	-	-	-	-
20510791	SD NEGERI 2 PUNUNG	Punung	40.500.000,00	4.995.215,00	7.662.520,00	5.260.715,00	-	22.566.450,00	-	40.484.900,00	-	15.100,00	-	15.100,00
20510831	SD NEGERI 2 SOOKA	Punung	46.800.000,00	10.192.520,00	1.916.000,00	4.566.500,00			10.811.300,00	24.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511043	SD NEGERI 2 TINATAR	Punung	94.500.000,00	11.743.950,00	24.181.550,00	9.713.100,00			22.500.000,00	72.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511492	SD NEGERI 3 BOMO	Punung	35.100.000,00	5.693.540,00	8.310.160,00	12.058.460,00			-	34.281.180,00	-	818.820,00	-	818.820,00
20511527	SD NEGERI 3 GONDOSARI	Punung	96.300.000,00	24.230.270,00	21.394.750,00	29.445.890,00			-	96.300.000,00	-	-	-	-
20510799	SD NEGERI 3 PLOSO	Punung	63.900.000,00	14.454.190,00	16.611.460,00	16.411.595,00			-	63.900.000,00	-	-	-	-
20510790	SD NEGERI 3 PUNUNG	Punung	54.000.000,00	8.767.470,00	16.624.220,00	18.444.154,00			-	53.834.834,00	-	165.166,00	-	165.166,00
20511042	SD NEGERI 3 TINATAR	Punung	21.600.000,00	7.552.220,00	2.873.000,00	5.038.780,00			-	15.464.000,00	-	6.136.000,00	-	6.136.000,00
20510797	SD NEGERI 4 PLOSO	Punung	68.400.000,00	9.947.250,00	12.363.410,00	11.889.330,00			6.337.150,00	45.900.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510788	SD NEGERI 4 PUNUNG	Punung	90.900.000,00	14.067.145,00	31.364.940,00	29.094.875,00			-	90.900.000,00	-	-	-	-
20510775	SD NEGERI 6 PUNUNG	Punung	29.700.000,00	6.404.400,00	8.345.200,00	9.746.950,00			-	29.694.350,00	-	5.650,00	-	5.650,00
20511397	SD NEGERI KEBONSARI	Punung	66.600.000,00	15.372.700,00	16.041.780,00	17.417.170,00			-	66.600.000,00	-	-	-	-
20511452	SD NEGERI KENDAL	Punung	63.900.000,00	22.908.710,00	8.695.750,00	18.466.035,00			-	63.900.000,00	-	-	-	-
20511039	SD NEGERI WARENG	Punung	67.500.000,00	11.195.720,00	17.983.572,00	13.455.466,00			-	67.378.419,00	-	121.581,00	-	121.581,00
20511505	SD NEGERI 1 CANDI	Pringkuku	27.000.000,00	7.390.400,00	4.954.700,00	8.835.300,00			-	21.180.400,00	-	5.819.600,00	-	5.819.600,00
20511473	SD NEGERI 1 DADAPAN	Pringkuku	37.800.000,00	17.832.400,00	1.044.400,00	14.128.400,00			-	37.667.000,00	-	133.000,00	-	133.000,00
20511471	SD NEGERI 1 DERSONO	Pringkuku	77.400.000,00	14.893.500,00	18.973.160,00	12.647.000,00			-	77.327.980,00	-	72.020,00	-	72.020,00
20511546	SD NEGERI 1 GLINGGANGAN	Pringkuku	37.800.000,00	2.470.500,00	13.715.010,00	14.772.120,00			-	30.957.630,00	-	6.842.370,00	-	6.842.370,00
20511407	SD NEGERI 1 JLUBANG	Pringkuku	52.200.000,00	11.674.600,00	12.010.800,00	14.913.900,00			-	52.156.800,00	-	43.200,00	-	43.200,00
20510902	SD NEGERI 1 PELEM	Pringkuku	57.600.000,00	17.066.680,00	11.721.320,00	15.459.860,00			-	57.597.360,00	-	2.640,00	-	2.640,00
20510793	SD NEGERI 1 PRINGKUKU	Pringkuku	44.100.000,00	7.631.100,00	14.345.100,00	14.948.700,00			-	44.072.000,00	-	28.000,00	-	28.000,00
20510815	SD NEGERI 1 SUGIHWARAS	Pringkuku	24.300.000,00	7.272.900,00	4.183.900,00	8.110.000,00			-	24.300.000,00	-	-	-	-
20511062	SD NEGERI 1 TAMANASRI	Pringkuku	63.000.000,00	17.989.000,00	10.847.500,00	16.541.000,00			-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511504	SD NEGERI 2 CANDI	Pringkuku	49.500.000,00	18.558.550,00	6.127.500,00	19.964.700,00			-	49.030.700,00	-	469.300,00	-	469.300,00
20511474	SD NEGERI 2 DADAPAN	Pringkuku	73.800.000,00	9.701.180,00	12.801.900,00	21.170.520,00			-	51.279.000,00	22.500.000,00	21.000,00	-	21.000,00
20511470	SD NEGERI 2 DERSONO	Pringkuku	20.700.000,00	6.276.600,00	4.044.800,00	1.965.400,00			-	20.665.600,00	-	34.400,00	-	34.400,00
20511545	SD NEGERI 2 GLINGGANGAN	Pringkuku	50.402.520,00	13.970.950,00	11.112.800,00	9.255.650,00			-	50.198.400,00	-	201.600,00	2.520,00	204.120,00
20511406	SD NEGERI 2 JLUBANG	Pringkuku	44.100.000,00	15.678.500,00	6.165.000,00	15.777.500,00			-	43.740.000,00	-	360.000,00	-	360.000,00
20510903	SD NEGERI 2 PELEM	Pringkuku	55.800.000,00	18.177.812,00	9.465.900,00	15.467.180,00			-	54.742.802,00	-	1.057.198,00	-	1.057.198,00
20510792	SD NEGERI 2 PRINGKUKU	Pringkuku	32.400.000,00	5.024.800,00	11.083.500,00	2.291.100,00			-	32.400.000,00	-	-	-	-
20510814	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	Pringkuku	26.100.000,00	7.814.500,00	4.654.000,00	2.307.000,00			-	26.100.000,00	-	-	-	-
20511051	SD NEGERI 2 TAMANASRI	Pringkuku	63.000.000,00	28.570.000,00	2.735.000,00	21.714.000,00			-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511503	SD NEGERI 3 CANDI	Pringkuku	28.800.000,00	5.608.790,00	2.620.400,00	9.180.460,00			-	28.800.000,00	-	-	-	-
20511472	SD NEGERI 3 DERSONO	Pringkuku	43.200.000,00	10.247.350,00	11.345.950,00	14.734.100,00			-	42.888.930,00	-	311.070,00	-	311.070,00
20511544	SD NEGERI 3 GLINGGANGAN	Pringkuku	30.600.000,00	4.627.300,00	10.654.922,00	8.770.200,00			-	30.590.250,00	-	9.750,00	-	9.750,00
20510901	SD NEGERI 3 PELEM	Pringkuku	51.300.000,00	7.908.000,00	17.273.300,00	6.376.600,00			-	51.298.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
20510800	SD NEGERI 3 PRINGKUKU	Pringkuku	25.200.000,00	6.247.200,00	5.916.300,00	7.902.700,00			-	25.200.000,00	-	-	-	-
20511502	SD NEGERI 4 CANDI	Pringkuku	30.600.000,00	13.334.360,00	1.890.660,00	8.788.750,00			-	30.600.000,00	-	-	-	-
20555437	SD NEGERI NGADIREJAN	Pringkuku	116.100.000,00	17.690.800,00	37.286.950,00	46.657.900,00			-	116.100.000,00	-	-	-	-
20510795	SD NEGERI POKO	Pringkuku	52.200.000,00	18.449.300,00	7.548.200,00	12.538.100,00			-	52.200.000,00	-	-	-	-
20510843	SD NEGERI SOBO	Pringkuku	52.200.000,00	5.116.340,00	18.590.290,00	21.263.820,00			-	52.050.178,00	-	149.822,00	-	149.822,00
20511038	SD NEGERI WATU KARUNG	Pringkuku	105.300.000,00	21.634.100,00	18.738.000,00	27.174.200,00			1.232.000,00	82.782.600,00	22.500.000,00	17.400,00	-	17.400,00
20511264	SD NEGERI 1 BALEHARJO	Pacitan	108.900.000,00	18.924.795,00	34.772.635,00	27.112.060,00			-	80.809.490,00	-	28.090.510,00	-	28.090.510,00
20511391	SD NEGERI 1 KAYEN	Pacitan	68.400.000,00	10.349.800,00	19.265.100,00	18.703.295,00			-	68.395.680,00	-	4.320,00	-	4.320,00
20510909	SD NEGERI 1 PLOSO	Pacitan	240.300.000,00	59.976.241,00	55.544.289,00	61.830.671,00			-	240.300.000,00	-	-	-	-
20510771	SD NEGERI 1 SAMBONG	Pacitan	27.900.000,00	7.021.000,00	5.395.000,00	2.300.000,00			-	27.900.000,00	-	-	-	-
20510786	SD NEGERI 1 SEDENG	Pacitan	80.100.000,00	12.538.550,00	15.752.550,00	11.602.200,00			6.532.480,00	57.600.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510846	SD NEGERI 1 SIRNOBOYO	Pacitan	54.000.010,00	9.755.050,00	13.946.650,00	4.226.050,00			-	54.000.000,00	-	-	10,00	10,00
20511050	SD NEGERI 1 TAMBAKREJO	Pacitan	85.500.000,00	14.999.840,00	16.169.010,00	21.090.800,00			585.000,00	63.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511263	SD NEGERI 2 BALEHARJO	Pacitan	306.000.000,00	81.353.323,00	62.532.267,00	118.685.750,00			-	305.917.560,00	-	82.440,00	-	82.440,00
20511392	SD NEGERI 2 KAYEN	Pacitan	43.200.000,00	7.876.151,00	13.507.787,00	11.979.152,00			-	43.200.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN								SISA DANA		
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV		JUMLAH	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA	BOS REGULER	BOS KINERJA					
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	4	14	18	22	30	34	38	42	46	50	53	56	57
20510906	SD NEGERI 2 PLOSO	Pacitan	53.100.000,00	8.907.500,00	12.363.600,00	18.980.300,00			-	40.251.400,00	-	12.848.600,00	-	12.848.600,00
20510770	SD NEGERI 2 SAMBONG	Pacitan	65.700.000,00	8.318.272,00	15.975.584,00	4.622.040,00			-	65.571.237,00	-	128.763,00	-	128.763,00
20510785	SD NEGERI 2 SEDENG	Pacitan	66.600.000,00	13.096.910,00	18.058.760,00	14.205.420,00			-	66.273.215,00	-	326.785,00	-	326.785,00
20510845	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	Pacitan	154.800.000,00	25.987.800,00	40.162.200,00	33.703.000,00			3.965.000,00	132.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511049	SD NEGERI 2 TAMBAKREJO	Pacitan	34.200.000,00	11.885.500,00	4.934.600,00	9.648.200,00			-	34.200.000,00	-	-	-	-
20510844	SD NEGERI 3 SIRNOBOYO	Pacitan	57.600.000,00	6.393.100,00	20.079.205,00	10.949.800,00			-	57.507.400,00	-	92.600,00	-	92.600,00
20511276	SD NEGERI ARJOWINANGUN	Pacitan	177.300.000,00	13.069.206,00	67.541.218,00	28.308.370,00			-	177.266.144,00	-	33.856,00	-	33.856,00
20555436	SD NEGERI BANGUNSARI	Pacitan	189.077.291,00	22.549.700,00	56.785.000,00	59.962.200,00			8.468.800,00	166.500.000,00	22.500.000,00	-	77.291,00	77.291,00
20511271	SD NEGERI BANJARSARI	Pacitan	55.800.000,00	16.743.450,00	11.156.550,00	20.265.300,00			-	55.800.000,00	-	-	-	-
20537131	SD NEGERI BOLOSINGO	Pacitan	81.000.000,00	20.245.861,00	20.248.498,00	15.033.405,00			-	81.000.000,00	-	-	-	-
20511394	SD NEGERI KEMBANG	Pacitan	67.500.000,00	15.367.354,00	17.723.467,00	19.466.924,00			-	67.457.834,00	-	42.166,00	-	42.166,00
20510894	SD NEGERI MENADI	Pacitan	97.200.000,00	17.703.623,00	23.119.633,00	34.403.974,00			-	97.164.390,00	-	35.610,00	-	35.610,00
20510877	SD NEGERI MENTORO	Pacitan	106.200.000,00	29.351.478,00	23.745.966,00	33.464.198,00			-	106.200.000,00	-	-	-	-
20510892	SD NEGERI NANGGUNGAN	Pacitan	101.700.000,00	15.930.250,00	33.321.250,00	5.176.650,00			-	101.662.000,00	-	38.000,00	-	38.000,00
20510921	SD NEGERI PACITAN	Pacitan	437.400.000,00	92.886.788,00	125.129.276,00	52.187.338,00			-	437.400.000,00	-	-	-	-
20510794	SD NEGERI PONGGOK	Pacitan	76.500.000,00	9.153.592,00	28.917.747,00	10.357.388,00			-	76.492.982,00	-	7.018,00	-	7.018,00
20510805	SD NEGERI PUCANGSEWU	Pacitan	109.800.000,00	16.797.856,00	36.145.847,00	26.575.776,00			-	109.788.320,00	-	11.680,00	-	11.680,00
20510772	SD NEGERI PURWOREJO	Pacitan	73.800.000,00	13.207.685,00	22.484.150,00	15.157.130,00			-	73.800.000,00	-	-	-	-
20510782	SD NEGERI SEMANTEN	Pacitan	32.400.000,00	6.413.855,00	9.392.245,00	7.225.745,00			-	32.400.000,00	-	-	-	-
20510836	SD NEGERI SIDOHARJO	Pacitan	101.700.000,00	17.911.092,00	20.428.728,00	1.254.707,00			9.329.800,00	79.089.230,00	22.500.000,00	110.770,00	-	110.770,00
20510813	SD NEGERI SUKOHARJO	Pacitan	81.000.000,00	19.220.250,00	19.349.950,00	16.712.500,00			-	80.861.050,00	-	138.950,00	-	138.950,00
20510825	SD NEGERI SUMBERHARJO	Pacitan	60.300.000,00	15.543.350,00	10.383.200,00	21.894.950,00			-	60.299.100,00	-	900,00	-	900,00
20511044	SD NEGERI TANJUNGSARI	Pacitan	61.200.000,00	16.595.432,00	13.769.362,00	22.430.226,00			-	61.179.561,00	-	20.439,00	-	20.439,00
20511034	SD NEGERI WIDORO	Pacitan	81.900.000,00	15.613.305,00	20.880.211,00	9.537.900,00			-	81.868.551,00	-	31.449,00	-	31.449,00
20511484	SD NEGERI 1 GAWANG	Kebonagung	32.400.000,00	13.308.558,00	2.690.000,00	7.974.758,00			-	32.400.000,00	-	-	-	-
20511537	SD NEGERI 1 GEMBUK	Kebonagung	45.000.000,00	7.382.550,00	15.105.200,00	11.152.750,00			-	45.000.000,00	-	-	-	-
20511418	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	Kebonagung	46.800.000,00	6.005.500,00	5.292.000,00	7.447.300,00			5.560.500,00	24.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511402	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	Kebonagung	43.200.000,00	9.856.400,00	11.531.600,00	13.708.400,00			-	43.200.000,00	-	-	-	-
20511384	SD NEGERI 1 KATIPUGAL	Kebonagung	39.600.000,00	9.560.736,00	10.008.098,00	6.740.132,00			-	39.567.008,00	-	32.992,00	-	32.992,00
20511447	SD NEGERI 1 KETEPUNG	Kebonagung	99.000.000,00	25.917.050,00	12.510.650,00	34.013.450,00			-	99.000.000,00	-	-	-	-
20511455	SD NEGERI 1 KETRO	Kebonagung	126.900.000,00	18.931.500,00	32.506.200,00	7.842.500,00			152.000,00	104.336.100,00	22.500.000,00	63.900,00	-	63.900,00
20511425	SD NEGERI 1 KLESEM	Kebonagung	44.100.000,00	11.212.500,00	10.775.500,00	4.181.450,00			-	44.082.900,00	-	17.100,00	-	17.100,00
20510804	SD NEGERI 1 PUNJUNG	Kebonagung	27.900.000,00	7.370.100,00	6.565.900,00	8.789.900,00			-	27.900.000,00	-	-	-	-
20510774	SD NEGERI 1 PURWOASRI	Kebonagung	60.300.000,00	15.566.396,00	11.858.448,00	8.080.098,00			-	59.669.000,00	-	631.000,00	-	631.000,00
20510769	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	Kebonagung	27.900.000,00	5.655.300,00	7.794.700,00	7.046.800,00			-	27.900.000,00	-	-	-	-
20510833	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	Kebonagung	55.800.000,00	4.850.010,00	9.971.594,00	3.781.530,00			8.598.900,00	33.291.380,00	22.500.000,00	8.620,00	-	8.620,00
20511094	SD NEGERI 1 WONOGONDO	Kebonagung	105.300.000,00	18.289.000,00	29.944.000,00	23.263.000,00			-	105.280.800,00	-	19.200,00	-	19.200,00
20511069	SD NEGERI 1 WORAWARI	Kebonagung	64.800.000,00	20.602.000,00	11.790.000,00	6.162.000,00			-	64.800.000,00	-	-	-	-
20511483	SD NEGERI 2 GAWANG	Kebonagung	41.400.000,00	18.299.800,00	2.389.738,00	902.511,00			-	41.341.405,00	-	58.595,00	-	58.595,00
20511538	SD NEGERI 2 GEMBUK	Kebonagung	85.500.000,00	8.021.583,00	23.497.559,00	32.472.458,00			-	85.440.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
20511417	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	Kebonagung	27.000.000,00	4.595.200,00	8.704.100,00	4.724.100,00			-	26.997.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
20511401	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	Kebonagung	55.800.000,00	16.502.375,00	11.239.275,00	5.786.625,00			-	55.798.550,00	-	1.450,00	-	1.450,00
20511383	SD NEGERI 2 KATIPUGAL	Kebonagung	65.700.000,00	14.116.000,00	18.371.000,00	13.805.200,00			-	65.700.000,00	-	-	-	-
20511446	SD NEGERI 2 KETEPUNG	Kebonagung	72.000.000,00	11.048.000,00	12.229.800,00	6.793.900,00			-	71.959.000,00	-	41.000,00	-	41.000,00
20511463	SD NEGERI 2 KETRO	Kebonagung	33.300.000,00	6.255.790,00	8.236.960,00	12.612.382,00			-	33.129.685,00	-	170.315,00	-	170.315,00
20511424	SD NEGERI 2 KLESEM	Kebonagung	117.000.000,00	13.974.000,00	23.267.000,00	36.305.200,00			-	117.000.000,00	-	-	-	-
20510803	SD NEGERI 2 PUNJUNG	Kebonagung	16.200.000,00	1.369.000,00	6.598.500,00	5.863.100,00			-	16.200.000,00	-	-	-	-
20510773	SD NEGERI 2 PURWOASRI	Kebonagung	65.700.000,00	12.982.400,00	13.355.100,00	29.555.750,00			-	65.438.000,00	-	262.000,00	-	262.000,00
20510768	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	Kebonagung	69.300.000,00	16.287.900,00	18.333.500,00	17.584.100,00			-	69.300.000,00	-	-	-	-
20510842	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	Kebonagung	120.600.000,00	26.105.160,00	23.912.240,00	34.934.300,00			-	120.136.200,00	-	463.800,00	-	463.800,00
20511202	SD NEGERI 2 WONOGONDO	Kebonagung	54.900.000,00	22.586.894,00	4.915.196,00	15.992.788,00			-	54.878.223,00	-	21.777,00	-	21.777,00
20511068	SD NEGERI 2 WORAWARI	Kebonagung	99.900.000,00	21.426.100,00	16.798.600,00	22.983.600,00			-	99.792.375,00	-	107.625,00	-	107.625,00
20510850	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	Kebonagung	68.400.000,00	12.206.700,00	9.479.100,00	7.250.000,00			2.694.200,00	45.900.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511272	SD NEGERI BANJARJO	Kebonagung	82.800.000,00	21.978.200,00	18.945.100,00	20.459.500,00			-	82.800.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN								SISA DANA		
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV		JUMLAH	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA	BOS REGULER	BOS KINERJA					
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	4	14	18	22	30	34	38	42	46	50	53	56	57
20511419	SD NEGERI KALIPELUS	Kebonagung	133.200.000,00	21.772.800,00	32.166.300,00	16.681.200,00			-	133.143.900,00	-	56.100,00	-	56.100,00
20511400	SD NEGERI KEBONAGUNG	Kebonagung	45.000.000,00	6.589.050,00	15.362.650,00	2.333.850,00			-	44.698.240,00	-	301.760,00	-	301.760,00
20511435	SD NEGERI MANTREN	Kebonagung	63.900.000,00	16.846.500,00	7.890.000,00	3.999.000,00			-	63.900.000,00	-	-	-	-
20510796	SD NEGERI PLUMBUNGAN	Kebonagung	49.500.000,00	6.876.000,00	16.583.000,00	7.849.000,00			-	49.500.000,00	-	-	-	-
20511491	SD NEGERI 1 BORANG	Arjosari	38.700.000,00	6.424.040,00	11.499.480,00	10.119.902,00			-	38.410.400,00	-	289.600,00	-	289.600,00
20511530	SD NEGERI 1 GEMBONG	Arjosari	82.800.000,00	18.837.719,00	22.062.275,00	26.224.000,00			-	82.539.544,00	-	260.456,00	-	260.456,00
20511526	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	Arjosari	82.800.000,00	10.335.378,00	30.313.450,00	12.027.950,00			-	82.401.000,00	-	399.000,00	-	399.000,00
20511409	SD NEGERI 1 JETISKIDUL	Arjosari	78.300.000,00	8.351.700,00	17.317.450,00	24.472.250,00			-	78.300.000,00	-	-	-	-
20511416	SD NEGERI 1 KARANGGEDE	Arjosari	71.100.000,00	7.926.266,00	11.055.363,00	18.622.087,00			-	71.087.244,00	-	12.756,00	-	12.756,00
20511390	SD NEGERI 1 KARANGREJO	Arjosari	73.800.000,00	13.045.726,00	12.553.272,00	11.726.106,00			13.721.700,00	51.209.202,00	22.500.000,00	90.798,00	-	90.798,00
20511396	SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO	Arjosari	55.800.000,00	18.154.688,00	7.786.300,00	18.857.200,00			-	55.796.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
20510876	SD NEGERI 1 MLATI	Arjosari	92.700.000,00	18.106.550,00	20.313.150,00	18.153.550,00			-	92.700.000,00	-	-	-	-
20510779	SD NEGERI 1 SEDAYU	Arjosari	81.000.000,00	9.592.420,00	14.089.560,00	11.153.330,00			-	80.702.590,00	-	297.410,00	-	297.410,00
20511058	SD NEGERI 1 TEMON	Arjosari	63.000.000,00	11.128.000,00	17.151.000,00	8.464.500,00			-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511490	SD NEGERI 2 BORANG	Arjosari	50.400.000,00	8.874.150,00	7.649.000,00	8.015.650,00			-	50.400.000,00	-	-	-	-
20511529	SD NEGERI 2 GEMBONG	Arjosari	9.900.000,00	-	4.338.900,00	666.000,00			-	9.900.000,00	-	-	-	-
20511515	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI	Arjosari	36.000.000,00	6.745.350,00	9.836.250,00	7.458.450,00			-	35.913.900,00	-	86.100,00	-	86.100,00
20511408	SD NEGERI 2 JETISKIDUL	Arjosari	23.400.000,00	4.906.750,00	6.752.600,00	7.109.800,00			-	23.400.000,00	-	-	-	-
20511415	SD NEGERI 2 KARANGGEDE	Arjosari	40.500.000,00	6.841.560,00	12.867.054,00	15.038.686,00			-	40.480.380,00	-	19.620,00	-	19.620,00
20511389	SD NEGERI 2 KARANGREJO	Arjosari	63.900.000,00	11.908.420,00	19.059.714,00	11.344.010,00			-	63.230.384,00	-	669.616,00	-	669.616,00
20511395	SD NEGERI 2 KEDUNGBENDO	Arjosari	18.000.000,00	2.722.000,00	6.261.000,00	2.504.000,00			-	17.992.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00
20510875	SD NEGERI 2 MLATI	Arjosari	60.300.000,00	10.071.800,00	14.776.660,00	15.972.700,00			-	60.216.460,00	-	83.540,00	-	83.540,00
20510787	SD NEGERI 2 SEDAYU	Arjosari	59.118.950,00	10.106.800,00	14.262.330,00	17.687.220,00			-	59.118.950,00	-	-	-	-
20511057	SD NEGERI 2 TEMON	Arjosari	112.500.000,00	16.090.840,00	20.893.260,00	29.013.600,00			3.057.300,00	89.749.200,00	22.500.000,00	250.800,00	-	250.800,00
20511514	SD NEGERI 3 GUNUNGSARI	Arjosari	7.200.000,00	-	2.900.000,00	2.481.900,00			-	7.200.000,00	-	-	-	-
20511414	SD NEGERI 3 KARANGGEDE	Arjosari	27.900.000,00	4.500.577,00	9.328.326,00	7.222.901,00			-	27.877.904,00	-	22.096,00	-	22.096,00
20511436	SD NEGERI 3 MANGUNHARJO	Arjosari	13.500.000,00	3.283.785,00	2.630.745,00	5.476.275,00			-	13.500.000,00	-	-	-	-
20510874	SD NEGERI 3 MLATI	Arjosari	17.100.000,00	3.998.750,00	4.551.250,00	584.250,00			-	17.100.000,00	-	-	-	-
20511056	SD NEGERI 3 TEMON	Arjosari	57.600.000,00	7.657.500,00	5.325.000,00	1.168.000,00			22.500.000,00	35.100.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511403	SD NEGERI 4 KARANGGEDE	Arjosari	19.800.000,00	3.150.000,00	3.933.052,00	2.360.400,00			-	19.736.752,00	-	63.248,00	-	63.248,00
20511055	SD NEGERI 4 TEMON	Arjosari	20.898.650,00	2.113.000,00	8.171.750,00	5.306.900,00			-	20.615.200,00	-	84.800,00	198.650,00	283.450,00
20511288	SD NEGERI ARJOSARI	Arjosari	124.200.000,00	40.552.650,00	20.256.111,00	23.036.802,00			-	124.080.657,00	-	119.343,00	-	119.343,00
20511482	SD NEGERI GAYUHAN	Arjosari	76.500.000,00	19.087.500,00	16.814.900,00	15.206.900,00			-	76.493.200,00	-	6.800,00	-	6.800,00
20511536	SD NEGERI GEGERAN	Arjosari	87.470.110,00	11.241.620,00	13.853.220,00	31.183.350,00			10.041.800,00	63.900.000,00	22.500.000,00	-	1.070.110,00	1.070.110,00
20555441	SD NEGERI JATIMALANG	Arjosari	115.200.000,00	8.488.200,00	19.583.200,00	17.409.700,00			10.811.300,00	92.692.800,00	22.500.000,00	7.200,00	-	7.200,00
20555439	SD NEGERI MANGUNHARJO	Arjosari	55.800.000,00	11.064.100,00	10.004.300,00	8.685.200,00			-	55.756.450,00	-	43.550,00	-	43.550,00
20510927	SD NEGERI PAGUTAN	Arjosari	72.900.000,00	12.305.010,00	21.321.090,00	12.191.550,00			-	72.888.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00
20511026	SD NEGERI TREMAS	Arjosari	168.300.000,00	9.978.320,00	44.929.920,00	21.287.440,00			22.500.000,00	145.640.900,00	22.500.000,00	159.100,00	-	159.100,00
20511543	SD NEGERI 1 GONDANG	Nawangan	79.200.000,00	17.979.938,00	21.135.356,00	4.104.782,00			-	77.632.186,00	-	1.567.814,00	-	1.567.814,00
20511422	SD NEGERI 1 JETIS LOR	Nawangan	96.300.000,00	6.110.626,00	17.228.900,00	9.896.175,00			22.500.000,00	73.558.406,00	22.500.000,00	241.594,00	-	241.594,00
20510882	SD NEGERI 1 MUJING	Nawangan	100.800.000,00	22.835.420,00	14.226.745,00	42.364.850,00			-	100.255.400,00	-	544.600,00	-	544.600,00
20510891	SD NEGERI 1 NAWANGAN	Nawangan	196.200.000,00	31.483.860,00	42.533.660,00	46.988.560,00			10.742.300,00	173.659.000,00	22.500.000,00	41.000,00	-	41.000,00
20510869	SD NEGERI 1 NGROMO	Nawangan	40.500.000,00	8.546.960,00	13.304.040,00	2.514.800,00			-	40.387.806,00	-	112.194,00	-	112.194,00
20510916	SD NEGERI 1 PAKIS BARU	Nawangan	99.000.000,00	22.772.300,00	9.157.300,00	33.616.300,00			926.000,00	76.433.600,00	22.500.000,00	66.400,00	-	66.400,00
20510900	SD NEGERI 1 PENGGUNG	Nawangan	50.400.000,00	10.084.500,00	3.183.000,00	1.215.000,00			779.500,00	27.900.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510781	SD NEGERI 1 SEMPU	Nawangan	110.700.000,00	31.482.511,00	12.193.600,00	10.262.150,00			2.221.400,00	88.058.658,00	22.500.000,00	141.342,00	-	141.342,00
20511041	SD NEGERI 1 TOKAWI	Nawangan	79.200.000,00	25.775.100,00	13.816.500,00	27.369.500,00			-	79.200.000,00	-	-	-	-
20511542	SD NEGERI 2 GONDANG	Nawangan	84.600.000,00	30.069.300,00	6.230.700,00	12.679.700,00			-	84.600.000,00	-	-	-	-
20511411	SD NEGERI 2 JETIS LOR	Nawangan	44.100.000,00	6.903.000,00	12.562.500,00	6.015.000,00			-	44.100.000,00	-	-	-	-
20510883	SD NEGERI 2 MUJING	Nawangan	108.900.000,00	22.018.860,00	30.008.060,00	8.416.800,00			-	108.900.000,00	-	-	-	-
20510889	SD NEGERI 2 NAWANGAN	Nawangan	35.100.000,00	7.203.000,00	6.523.000,00	5.967.500,00			-	35.100.000,00	-	-	-	-
20510868	SD NEGERI 2 NGROMO	Nawangan	113.400.000,00	14.205.480,00	21.729.420,00	39.200.830,00			-	90.828.800,00	22.500.000,00	71.200,00	-	71.200,00
20510915	SD NEGERI 2 PAKIS BARU	Nawangan	81.900.000,00	21.142.000,00	11.521.200,00	33.872.900,00			-	81.900.000,00	-	-	-	-
20510899	SD NEGERI 2 PENGGUNG	Nawangan	52.200.000,00	13.949.000,00	11.705.000,00	23.446.000,00			-	52.200.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN								SISA DANA		
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV		JUMLAH	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA	BOS REGULER	BOS KINERJA					
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	4	14	18	22	30	34	38	42	46	50	53	56	57
20510780	SD NEGERI 2 SEMPU	Nawangan	62.100.000,00	19.990.500,00	8.961.000,00	27.644.400,00			-	62.071.100,00	-	28.900,00	-	28.900,00
20511030	SD NEGERI 2 TOKAWI	Nawangan	95.400.000,00	20.622.500,00	15.645.000,00	29.976.500,00			-	95.400.000,00	-	-	-	-
20511541	SD NEGERI 3 GONDANG	Nawangan	88.200.000,00	27.109.710,00	10.556.960,00	19.056.758,00			-	86.914.560,00	-	1.285.440,00	-	1.285.440,00
20511410	SD NEGERI 3 JETIS LOR	Nawangan	24.300.000,00	10.427.000,00	1.065.000,00	2.265.000,00			-	24.300.000,00	-	-	-	-
20510893	SD NEGERI 3 MUJING	Nawangan	71.100.000,00	15.191.748,00	7.281.500,00	1.026.380,00			12.131.300,00	48.595.078,00	22.500.000,00	4.922,00	-	4.922,00
20510887	SD NEGERI 3 NAWANGAN	Nawangan	82.800.000,00	26.023.900,00	14.271.000,00	6.823.600,00			-	82.800.000,00	-	-	-	-
20510867	SD NEGERI 3 NGROMO	Nawangan	62.100.000,00	15.529.000,00	10.451.500,00	26.465.000,00			-	62.100.000,00	-	-	-	-
20510914	SD NEGERI 3 PAKIS BARU	Nawangan	51.300.000,00	5.975.100,00	8.397.000,00	1.675.500,00			12.131.300,00	28.800.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510898	SD NEGERI 3 PENGGUNG	Nawangan	85.500.000,00	26.755.000,00	15.860.500,00	9.040.500,00			-	85.500.000,00	-	-	-	-
20510851	SD NEGERI 3 SEMPU	Nawangan	70.200.000,00	19.510.500,00	10.518.500,00	26.032.750,00			-	70.200.000,00	-	-	-	-
20511029	SD NEGERI 3 TOKAWI	Nawangan	83.700.000,00	7.839.800,00	17.051.100,00	18.218.500,00			-	83.700.000,00	-	-	-	-
20510886	SD NEGERI 4 NAWANGAN	Nawangan	25.200.000,00	3.807.000,00	5.381.000,00	8.519.600,00			-	25.200.000,00	-	-	-	-
20510897	SD NEGERI 4 PENGGUNG	Nawangan	99.000.000,00	25.066.500,00	10.612.500,00	47.636.500,00			-	99.000.000,00	-	-	-	-
20510840	SD NEGERI 4 SEMPU	Nawangan	27.000.000,00	3.211.928,00	7.372.734,00	2.741.958,00			-	26.969.570,00	-	30.430,00	-	30.430,00
20511028	SD NEGERI 4 TOKAWI	Nawangan	110.700.000,00	29.574.000,00	24.534.000,00	14.716.500,00			-	110.700.000,00	-	-	-	-
20510885	SD NEGERI 5 NAWANGAN	Nawangan	11.700.000,00	2.106.000,00	3.397.000,00	1.306.000,00			-	11.700.000,00	-	-	-	-
20555440	SD NEGERI 1 BANDAR	Bandar	140.400.001,00	21.618.850,00	37.270.400,00	17.430.500,00			9.655.000,00	117.899.599,00	22.500.000,00	401,00	1,00	402,00
20511257	SD NEGERI 1 BANGUNSARI	Bandar	72.900.000,00	16.562.460,00	16.442.360,00	11.774.970,00			-	72.899.731,00	-	269,00	-	269,00
20511523	SD NEGERI 1 JERUK	Bandar	94.500.000,00	12.854.540,00	25.021.704,00	32.308.734,00			-	94.500.000,00	-	-	-	-
20511459	SD NEGERI 1 KLEDUNG	Bandar	66.600.000,00	22.369.000,00	10.828.000,00	19.227.000,00			-	66.600.000,00	-	-	-	-
20510863	SD NEGERI 1 NGUNUT	Bandar	50.400.000,00	5.439.550,00	12.980.500,00	5.723.350,00			-	50.197.000,00	-	203.000,00	-	203.000,00
20510896	SD NEGERI 1 PETUNGSINARANG	Bandar	57.600.000,00	11.449.500,00	16.800.000,00	16.521.500,00			-	57.600.000,00	-	-	-	-
20511031	SD NEGERI 1 TUMPUK	Bandar	52.200.000,00	8.508.000,00	16.667.000,00	11.128.000,00			-	52.200.000,00	-	-	-	-
20511037	SD NEGERI 1 WATUPATOK	Bandar	135.900.000,00	38.239.740,00	18.456.400,00	22.161.900,00			9.144.100,00	113.399.740,00	22.500.000,00	260,00	-	260,00
20511261	SD NEGERI 2 BANDAR	Bandar	75.600.000,00	15.136.000,00	19.394.000,00	28.253.000,00			-	75.600.000,00	-	-	-	-
20511274	SD NEGERI 2 BANGUNSARI	Bandar	67.500.000,00	11.449.700,00	11.368.500,00	25.705.800,00			-	65.525.000,00	-	1.975.000,00	-	1.975.000,00
20511522	SD NEGERI 2 JERUK	Bandar	80.100.000,00	12.542.156,00	27.486.340,00	23.826.028,00			-	80.083.776,00	-	16.224,00	-	16.224,00
20511458	SD NEGERI 2 KLEDUNG	Bandar	51.300.000,00	11.753.500,00	11.386.500,00	17.845.500,00			-	51.300.000,00	-	-	-	-
20510852	SD NEGERI 2 NGUNUT	Bandar	60.300.000,00	13.613.000,00	8.796.000,00	15.318.200,00			-	60.297.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
20510904	SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG	Bandar	45.900.000,00	5.247.120,00	9.476.620,00	9.385.740,00			-	45.900.000,00	-	-	-	-
20511032	SD NEGERI 2 TUMPUK	Bandar	64.800.000,00	17.402.780,00	14.781.160,00	20.567.330,00			-	64.300.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
20511036	SD NEGERI 2 WATUPATOK	Bandar	83.700.000,00	10.152.650,00	10.496.200,00	19.652.300,00			9.989.500,00	61.197.000,00	22.500.000,00	3.000,00	-	3.000,00
20511260	SD NEGERI 3 BANDAR	Bandar	63.900.000,00	21.471.300,00	9.498.500,00	12.643.700,00			-	63.900.000,00	-	-	-	-
20511273	SD NEGERI 3 BANGUNSARI	Bandar	63.000.000,00	17.900.000,00	12.825.000,00	14.754.500,00			-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511521	SD NEGERI 3 JERUK	Bandar	149.400.000,00	29.943.536,00	33.785.164,00	49.579.956,00			-	148.958.952,00	-	441.048,00	-	441.048,00
20511457	SD NEGERI 3 KLEDUNG	Bandar	30.600.000,00	6.289.250,00	8.486.250,00	740.250,00			-	30.600.000,00	-	-	-	-
20510935	SD NEGERI 3 NGUNUT	Bandar	59.400.000,00	9.372.000,00	10.303.800,00	6.368.670,00			-	59.400.000,00	-	-	-	-
20510905	SD NEGERI 3 PETUNGSINARANG	Bandar	34.200.000,00	10.821.500,00	6.063.000,00	3.184.500,00			-	34.200.000,00	-	-	-	-
20511040	SD NEGERI 3 TUMPUK	Bandar	45.000.000,00	9.361.876,00	7.739.452,00	3.974.780,00			-	44.457.660,00	-	542.340,00	-	542.340,00
20511035	SD NEGERI 3 WATUPATOK	Bandar	20.700.000,00	4.626.000,00	3.298.000,00	6.670.500,00			-	20.700.000,00	-	-	-	-
20511520	SD NEGERI 4 JERUK	Bandar	83.700.000,00	15.649.500,00	14.765.000,00	14.713.200,00			3.390.300,00	61.200.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510924	SD NEGERI 4 NGUNUT	Bandar	76.500.000,00	8.097.100,00	18.631.150,00	19.033.400,00			-	76.500.000,00	-	-	-	-
20510913	SD NEGERI 4 PETUNGSINARANG	Bandar	146.700.000,00	25.766.400,00	21.320.120,00	25.722.760,00			10.708.760,00	124.200.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511258	SD NEGERI 5 BANDAR	Bandar	108.900.504,00	14.309.550,00	28.628.025,00	25.095.550,00			2.122.400,00	86.400.000,00	22.500.000,00	-	504,00	504,00
20511519	SD NEGERI 5 JERUK	Bandar	54.000.000,00	6.052.064,00	9.630.634,00	7.760.618,00			14.442.400,00	31.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510912	SD NEGERI 5 PETUNGSINARANG	Bandar	43.200.000,00	6.365.500,00	14.054.900,00	900.000,00			-	43.157.000,00	-	43.000,00	-	43.000,00
20511480	SD NEGERI 1 GEDANGAN	Tegalombo	79.200.000,00	29.578.750,00	9.860.650,00	19.700.450,00			-	79.200.000,00	-	-	-	-
20511535	SD NEGERI 1 GEMAHARJO	Tegalombo	82.800.000,00	25.329.820,00	9.116.780,00	4.308.400,00			-	82.799.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
20511388	SD NEGERI 1 KASIHAN	Tegalombo	91.800.000,00	12.111.000,00	30.809.000,00	14.106.000,00			-	91.800.000,00	-	-	-	-
20511399	SD NEGERI 1 KEBONDALEM	Tegalombo	97.200.000,00	7.206.000,00	15.608.750,00	3.065.250,00			12.131.300,00	74.700.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511393	SD NEGERI 1 KEMUNING	Tegalombo	82.800.000,00	14.966.950,00	15.183.050,00	17.731.400,00			5.862.000,00	60.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510855	SD NEGERI 1 NGRECO	Tegalombo	42.300.000,00	11.244.000,00	9.611.000,00	16.540.000,00			-	42.300.000,00	-	-	-	-
20510908	SD NEGERI 1 PLOSO	Tegalombo	67.500.000,00	5.732.200,00	11.920.850,00	4.981.900,00			22.500.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510801	SD NEGERI 1 PUCANGOMBO	Tegalombo	55.800.000,00	15.490.800,00	12.409.200,00	19.765.000,00			-	55.800.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN								SISA DANA		
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV					
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA	BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS KINERJA	
			JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34	38	42	46	50	53	56	57
20510823	SD NEGERI 1 TAHUNAN	Tegalombo	45.900.000,00	14.255.000,00	8.655.000,00	20.235.000,00			-	45.900.000,00	-	-	-	-
20510824	SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU	Tegalombo	112.500.000,00	26.465.250,00	29.716.000,00	9.822.320,00			-	112.500.000,00	-	-	-	-
20511052	SD NEGERI 1 TEGALOMBO	Tegalombo	92.700.000,00	14.558.416,00	31.146.798,00	29.512.261,00			-	92.676.741,00	-	23.259,00	-	23.259,00
20511479	SD NEGERI 2 GEDANGAN	Tegalombo	94.500.000,00	20.656.500,00	26.593.500,00	24.476.250,00			-	94.500.000,00	-	-	-	-
20511534	SD NEGERI 2 GEMAHARJO	Tegalombo	33.300.000,00	13.417.500,00	3.097.000,00	12.647.500,00			-	33.300.000,00	-	-	-	-
20511387	SD NEGERI 2 KASIHAN	Tegalombo	63.900.000,00	12.306.000,00	14.843.500,00	1.077.000,00			-	63.900.000,00	-	-	-	-
20511398	SD NEGERI 2 KEBONDALEM	Tegalombo	68.400.000,00	14.230.880,00	18.004.880,00	25.840.280,00			-	68.400.000,00	-	-	-	-
20511382	SD NEGERI 2 KEMUNING	Tegalombo	69.300.000,00	10.608.500,00	6.180.000,00	19.882.500,00			4.745.000,00	46.800.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510854	SD NEGERI 2 NGRECO	Tegalombo	52.200.000,00	9.911.750,00	15.307.000,00	15.373.250,00			-	52.200.000,00	-	-	-	-
20510810	SD NEGERI 2 PLOSO	Tegalombo	97.200.000,00	16.834.000,00	20.648.000,00	23.872.000,00			-	97.200.000,00	-	-	-	-
20510809	SD NEGERI 2 PUCANGOMBO	Tegalombo	36.000.000,00	12.146.500,00	5.662.000,00	15.796.500,00			-	36.000.000,00	-	-	-	-
20510822	SD NEGERI 2 TAHUNAN	Tegalombo	63.000.000,00	7.819.000,00	12.299.000,00	4.947.000,00			22.500.000,00	40.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510811	SD NEGERI 2 TAHUNAN BARU	Tegalombo	63.900.000,00	13.766.000,00	6.934.000,00	12.338.400,00			22.500.000,00	41.400.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511053	SD NEGERI 2 TEGALOMBO	Tegalombo	87.300.000,00	19.307.530,00	5.504.470,00	24.518.370,00			4.230.800,00	64.782.000,00	22.500.000,00	18.000,00	-	18.000,00
20511533	SD NEGERI 3 GEMAHARJO	Tegalombo	142.251.950,00	33.641.237,00	26.032.513,00	1.582.528,00			12.183.250,00	119.700.000,00	22.551.950,00	-	-	-
20511386	SD NEGERI 3 KASIHAN	Tegalombo	53.100.000,00	17.181.000,00	9.351.500,00	17.777.000,00			-	53.100.000,00	-	-	-	-
20511465	SD NEGERI 3 KEMUNING	Tegalombo	27.000.000,00	4.580.000,00	6.518.500,00	11.899.000,00			-	27.000.000,00	-	-	-	-
20510853	SD NEGERI 3 NGRECO	Tegalombo	92.700.000,00	15.856.100,00	16.063.900,00	7.057.000,00			11.212.400,00	70.200.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510798	SD NEGERI 3 PLOSO	Tegalombo	75.600.000,00	21.148.750,00	9.745.500,00	35.694.750,00			-	75.600.000,00	-	-	-	-
20510808	SD NEGERI 3 PUCANGOMBO	Tegalombo	81.000.000,00	31.523.000,00	8.977.000,00	19.113.000,00			-	81.000.000,00	-	-	-	-
20510936	SD NEGERI 3 TAHUNAN	Tegalombo	53.100.000,00	9.844.500,00	10.423.500,00	2.721.000,00			-	53.100.000,00	-	-	-	-
20555442	SD NEGERI 3 TEGALOMBO	Tegalombo	93.600.000,00	16.499.500,00	17.766.250,00	9.710.250,00			860.000,00	71.100.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511532	SD NEGERI 4 GEMAHARJO	Tegalombo	89.100.000,00	32.073.383,00	11.738.244,00	23.544.682,00			-	88.494.526,00	-	605.474,00	-	605.474,00
20511385	SD NEGERI 4 KASIHAN	Tegalombo	41.400.000,00	8.482.000,00	5.945.500,00	9.465.700,00			-	41.400.000,00	-	-	-	-
20511453	SD NEGERI 4 KEMUNING	Tegalombo	93.600.000,00	8.595.000,00	14.135.000,00	13.056.200,00			7.881.300,00	71.100.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510861	SD NEGERI 4 NGRECO	Tegalombo	13.500.000,00	4.450.500,00	2.100.000,00	4.135.000,00			-	13.500.000,00	-	-	-	-
20510807	SD NEGERI 4 PUCANGOMBO	Tegalombo	78.300.000,00	19.553.250,00	15.043.750,00	29.999.000,00			-	78.300.000,00	-	-	-	-
20511060	SD NEGERI 4 TEGALOMBO	Tegalombo	22.500.000,00	3.957.000,00	7.291.000,00	8.760.500,00			-	22.500.000,00	-	-	-	-
20511531	SD NEGERI 5 GEMAHARJO	Tegalombo	27.000.000,00	4.784.500,00	7.375.000,00	7.546.000,00			-	26.971.000,00	-	29.000,00	-	29.000,00
20510862	SD NEGERI 5 NGRECO	Tegalombo	35.100.000,00	8.480.700,00	7.296.950,00	7.937.100,00			-	35.067.500,00	-	32.500,00	-	32.500,00
20510806	SD NEGERI 5 PUCANGOMBO	Tegalombo	22.500.000,00	8.065.000,00	2.835.000,00	650.000,00			-	22.500.000,00	-	-	-	-
20510870	SD NEGERI 6 NGRECO	Tegalombo	59.400.000,00	8.128.000,00	21.449.000,00	17.015.700,00			-	59.400.000,00	-	-	-	-
20511489	SD NEGERI 1 BUBAKAN	Tulakan	139.500.000,00	21.240.000,00	32.771.700,00	24.158.700,00			-	139.500.000,00	-	-	-	-
20511475	SD NEGERI 1 GASANG	Tulakan	85.500.000,00	20.628.850,00	21.553.150,00	20.293.990,00			-	85.188.000,00	-	312.000,00	-	312.000,00
20511509	SD NEGERI 1 JATIGUNUNG	Tulakan	108.900.000,00	27.767.150,00	25.637.350,00	18.707.850,00			-	108.882.500,00	-	17.500,00	-	17.500,00
20511518	SD NEGERI 1 JETAK	Tulakan	88.200.000,00	16.598.000,00	27.502.000,00	25.104.500,00			-	88.200.000,00	-	-	-	-
20511412	SD NEGERI 1 KALIKUNING	Tulakan	73.800.000,00	16.849.000,00	20.051.000,00	24.787.900,00			-	73.800.000,00	-	-	-	-
20511454	SD NEGERI 1 KETRO	Tulakan	122.400.000,00	25.400.775,00	30.196.970,00	24.067.455,00			-	122.400.000,00	-	-	-	-
20511464	SD NEGERI 1 KETRO HARJO	Tulakan	83.700.000,00	7.558.100,00	32.708.850,00	9.257.950,00			-	83.194.050,00	-	505.950,00	-	505.950,00
20511432	SD NEGERI 1 KLUWIH	Tulakan	89.100.000,00	13.836.480,00	11.356.680,00	29.683.380,00			-	89.100.000,00	-	-	-	-
20511441	SD NEGERI 1 LOSARI	Tulakan	74.700.000,00	18.675.000,00	18.675.000,00	12.049.000,00			-	74.700.000,00	-	-	-	-
20510860	SD NEGERI 1 NGILE	Tulakan	61.200.000,00	11.831.800,00	17.772.050,00	12.818.350,00			-	61.034.350,00	-	165.650,00	-	165.650,00
20510858	SD NEGERI 1 NGLARAN	Tulakan	54.900.000,00	6.130.925,00	18.709.750,00	1.670.925,00			-	54.900.000,00	-	-	-	-
20510866	SD NEGERI 1 NGUMBUL	Tulakan	62.100.000,00	6.527.500,00	20.843.155,00	15.072.310,00			-	62.100.000,00	-	-	-	-
20510919	SD NEGERI 1 PADI	Tulakan	45.000.000,00	5.185.900,00	16.964.100,00	8.481.600,00			-	45.000.000,00	-	-	-	-
20511025	SD NEGERI 1 TULAKAN	Tulakan	53.100.000,00	14.914.650,00	11.010.000,00	14.301.950,00			-	53.100.000,00	-	-	-	-
20511091	SD NEGERI 1 WONOANTI	Tulakan	64.800.000,00	14.538.000,00	17.862.000,00	2.934.000,00			-	64.800.000,00	-	-	-	-
20511084	SD NEGERI 1 WONOSIDI	Tulakan	105.300.000,00	32.887.950,00	19.760.250,00	28.478.850,00			-	105.300.000,00	-	-	-	-
20511488	SD NEGERI 2 BUBAKAN	Tulakan	42.300.000,00	8.133.000,00	6.451.060,00	10.771.760,00			-	42.300.000,00	-	-	-	-
20511476	SD NEGERI 2 GASANG	Tulakan	36.000.000,00	5.161.000,00	9.699.700,00	7.991.800,00			-	36.000.000,00	-	-	-	-
20511508	SD NEGERI 2 JATIGUNUNG	Tulakan	62.100.000,00	14.370.000,00	16.680.000,00	10.702.100,00			-	62.100.000,00	-	-	-	-
20511507	SD NEGERI 2 JETAK	Tulakan	99.900.000,00	17.782.000,00	26.818.800,00	24.816.500,00			-	99.900.000,00	-	-	-	-
20511413	SD NEGERI 2 KALIKUNING	Tulakan	114.300.000,00	35.586.500,00	21.563.500,00	25.528.900,00			-	114.300.000,00	-	-	-	-
20511462	SD NEGERI 2 KETRO	Tulakan	84.600.000,00	22.910.300,00	18.436.500,00	19.320.200,00			-	84.600.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN								REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV		JUMLAH	JUMLAH	SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA	BOS REGULER	BOS KINERJA					
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			JUMLAH	JUMLAH	
1	2	4	14	18	22	30	34	38	42	46	50	53	56	57
20511461	SD NEGERI 2 KETRO HARJO	Tulakan	75.600.000,00	13.706.800,00	23.692.600,00	20.090.250,00			-	74.235.600,00	-	1.364.400,00	-	1.364.400,00
20511433	SD NEGERI 2 KLUWIH	Tulakan	26.100.000,00	6.301.700,00	5.425.200,00	5.318.600,00			-	26.100.000,00	-	-	-	-
20511440	SD NEGERI 2 LOSARI	Tulakan	84.600.000,00	16.527.000,00	23.565.300,00	13.356.860,00			-	84.600.000,00	-	-	-	-
20510859	SD NEGERI 2 NGILE	Tulakan	64.800.000,00	23.043.000,00	8.120.200,00	21.318.100,00			-	64.800.000,00	-	-	-	-
20510857	SD NEGERI 2 NGLARAN	Tulakan	42.300.000,00	6.684.440,00	8.642.900,00	5.172.660,00			-	42.300.000,00	-	-	-	-
20510865	SD NEGERI 2 NGUMBUL	Tulakan	80.100.000,00	23.382.850,00	16.456.500,00	21.717.150,00			-	80.058.800,00	-	41.200,00	-	41.200,00
20510918	SD NEGERI 2 PADI	Tulakan	54.000.000,00	13.329.600,00	12.843.400,00	10.163.300,00			-	54.000.000,00	-	-	-	-
20511024	SD NEGERI 2 TULAKAN	Tulakan	86.400.000,00	15.755.125,00	20.480.400,00	24.646.140,00			-	86.399.995,00	-	5,00	-	5,00
20511090	SD NEGERI 2 WONOANTI	Tulakan	57.600.000,00	10.248.200,00	15.120.100,00	14.316.200,00			-	57.600.000,00	-	-	-	-
20511083	SD NEGERI 2 WONOSIDI	Tulakan	72.000.000,00	17.618.925,00	16.122.045,00	5.530.945,00			-	71.992.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00
20511516	SD NEGERI 3 JATIGUNUNG	Tulakan	50.400.000,00	10.119.810,00	13.499.740,00	15.524.310,00			-	50.264.200,00	-	135.800,00	-	135.800,00
20511421	SD NEGERI 3 KALIKUNING	Tulakan	54.900.000,00	11.630.176,00	14.840.271,00	4.262.965,00			-	54.771.212,00	-	128.788,00	-	128.788,00
20511460	SD NEGERI 3 KETRO	Tulakan	49.500.000,00	7.578.600,00	16.013.800,00	1.650.600,00			-	49.498.400,00	-	1.600,00	-	1.600,00
20510856	SD NEGERI 3 NGLARAN	Tulakan	83.700.000,00	15.878.700,00	22.829.250,00	18.634.250,00			-	83.700.000,00	-	-	-	-
20510864	SD NEGERI 3 NGUMBUL	Tulakan	64.800.000,00	22.648.300,00	9.337.800,00	21.870.900,00			-	64.800.000,00	-	-	-	-
20510917	SD NEGERI 3 PADI	Tulakan	29.700.000,00	6.177.600,00	8.078.900,00	9.455.500,00			-	29.700.000,00	-	-	-	-
20511023	SD NEGERI 3 TULAKAN	Tulakan	67.500.000,00	17.302.460,00	12.486.270,00	22.447.820,00			-	67.500.000,00	-	-	-	-
20511082	SD NEGERI 3 WONOSIDI	Tulakan	48.600.000,00	8.929.150,00	8.201.300,00	5.004.600,00			-	48.600.000,00	-	-	-	-
20511517	SD NEGERI 4 JATIGUNUNG	Tulakan	54.900.000,00	6.661.250,00	16.547.710,00	20.533.740,00			-	54.900.000,00	-	-	-	-
20511420	SD NEGERI 4 KALIKUNING	Tulakan	68.400.000,00	16.069.000,00	18.130.000,00	23.374.500,00			-	68.400.000,00	-	-	-	-
20557632	SD NEGERI 4 KETRO	Tulakan	36.000.000,00	11.972.400,00	5.185.500,00	2.140.200,00			-	36.000.000,00	-	-	-	-
20511439	SD NEGERI 4 LOSARI	Tulakan	45.900.000,00	10.328.310,00	9.616.920,00	2.739.690,00			-	45.900.000,00	-	-	-	-
20511071	SD NEGERI 4 WONOSIDI	Tulakan	80.100.000,00	15.329.750,00	15.773.900,00	29.717.250,00			-	80.100.000,00	-	-	-	-
20557631	SD NEGERI 5 KALIKUNING	Tulakan	75.600.000,00	8.813.200,00	17.702.600,00	17.298.600,00			-	53.100.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511070	SD NEGERI 5 WONOSIDI	Tulakan	52.200.000,00	8.842.400,00	6.854.200,00	8.811.900,00			-	52.200.000,00	-	-	-	-
20511496	SD NEGERI BUNGUR	Tulakan	139.500.000,00	25.409.100,00	34.630.950,00	29.276.350,00			-	139.500.000,00	-	-	-	-
20511267	SD NEGERI 1 BODAG	Ngadirojo	38.700.000,00	8.703.000,00	10.632.200,00	7.334.550,00			-	38.700.000,00	-	-	-	-
20511381	SD NEGERI 1 BOGOHARJO	Ngadirojo	33.300.000,00	4.398.000,00	8.550.500,00	10.685.000,00			-	33.300.000,00	-	-	-	-
20511487	SD NEGERI 1 COKROKEMBANG	Ngadirojo	64.800.000,00	14.356.129,00	17.891.000,00	21.265.071,00			-	64.721.600,00	-	78.400,00	-	78.400,00
20511513	SD NEGERI 1 HADILUWIH	Ngadirojo	119.946.000,00	41.982.000,00	6.600.000,00	11.344.000,00			22.500.000,00	97.051.575,00	22.500.000,00	148.425,00	246.000,00	394.425,00
20511511	SD NEGERI 1 HADIWARNO	Ngadirojo	92.700.000,00	16.444.500,00	22.500.800,00	23.028.600,00			-	92.700.000,00	-	-	-	-
20510872	SD NEGERI 1 NGADIROJO	Ngadirojo	116.100.000,00	21.283.725,00	23.701.600,00	28.881.300,00			-	116.100.000,00	-	-	-	-
20510923	SD NEGERI 1 NOGOSARI	Ngadirojo	42.300.000,00	8.867.000,00	11.689.500,00	7.756.900,00			-	42.300.000,00	-	-	-	-
20510925	SD NEGERI 1 PAGEREJO	Ngadirojo	56.700.000,00	15.862.100,00	12.451.750,00	12.838.850,00			-	56.700.000,00	-	-	-	-
20510834	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	Ngadirojo	35.100.000,00	3.390.000,00	9.186.524,00	4.466.926,00			-	35.100.000,00	-	-	-	-
20511048	SD NEGERI 1 TANJUNG LOR	Ngadirojo	90.000.000,00	14.962.500,00	28.406.500,00	24.375.100,00			-	90.000.000,00	-	-	-	-
20511046	SD NEGERI 1 TANJUNGPURO	Ngadirojo	57.600.000,00	12.906.550,00	15.811.150,00	13.545.800,00			-	57.600.000,00	-	-	-	-
20511099	SD NEGERI 1 WONOASRI	Ngadirojo	94.500.000,00	8.290.150,00	30.676.950,00	20.711.250,00			-	94.500.000,00	-	-	-	-
20511089	SD NEGERI 1 WONODADI KULON	Ngadirojo	69.300.000,00	24.445.680,00	9.620.400,00	19.851.220,00			-	69.201.220,00	-	98.780,00	-	98.780,00
20511085	SD NEGERI 1 WONODADI WETAN	Ngadirojo	28.800.000,00	7.563.500,00	5.237.000,00	5.827.000,00			-	28.800.000,00	-	-	-	-
20511201	SD NEGERI 1 WONOKARTO	Ngadirojo	66.600.000,00	9.072.600,00	23.799.100,00	-			-	66.600.000,00	-	-	-	-
20511200	SD NEGERI 1 WONOSOBO	Ngadirojo	52.200.000,00	19.424.675,00	6.662.400,00	15.247.125,00			-	52.200.000,00	-	-	-	-
20511256	SD NEGERI 2 BODAG	Ngadirojo	63.000.000,00	26.401.650,00	4.888.500,00	24.550.150,00			-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511506	SD NEGERI 2 BOGOHARJO	Ngadirojo	36.900.000,00	7.862.400,00	9.666.200,00	6.624.200,00			-	36.823.600,00	-	76.400,00	-	76.400,00
20511486	SD NEGERI 2 COKROKEMBANG	Ngadirojo	47.700.000,00	13.688.950,00	10.156.700,00	9.809.400,00			-	47.632.200,00	-	67.800,00	-	67.800,00
20511512	SD NEGERI 2 HADILUWIH	Ngadirojo	23.400.000,00	4.762.450,00	3.225.950,00	6.894.650,00			-	23.400.000,00	-	-	-	-
20511510	SD NEGERI 2 HADIWARNO	Ngadirojo	56.700.000,00	21.236.250,00	6.987.100,00	11.426.300,00			-	56.691.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
20510871	SD NEGERI 2 NGADIROJO	Ngadirojo	28.800.000,00	5.847.070,00	8.495.750,00	7.255.570,00			-	28.799.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
20510922	SD NEGERI 2 NOGOSARI	Ngadirojo	50.400.000,00	10.234.950,00	14.647.750,00	10.144.450,00			-	50.400.000,00	-	-	-	-
20510926	SD NEGERI 2 PAGEREJO	Ngadirojo	52.200.000,00	11.349.000,00	12.072.300,00	13.256.550,00			-	52.200.000,00	-	-	-	-
20510841	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	Ngadirojo	38.700.000,00	4.250.000,00	14.098.550,00	11.080.000,00			-	38.700.000,00	-	-	-	-
20511047	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	Ngadirojo	37.800.000,00	9.018.381,00	5.722.050,00	2.208.000,00			-	37.800.000,00	-	-	-	-
20511045	SD NEGERI 2 TANJUNGPURO	Ngadirojo	36.900.000,00	4.459.000,00	13.826.300,00	8.529.100,00			-	36.900.000,00	-	-	-	-
20511096	SD NEGERI 2 WONOASRI	Ngadirojo	73.800.000,00	9.958.600,00	14.053.200,00	17.183.200,00			2.572.800,00	51.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN								SISA DANA		
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV					
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA	BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS KINERJA	
			JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34	38	42	46	50	53	56	57
20511088	SD NEGERI 2 WONODADI KULON	Ngadirojo	36.000.000,00	9.530.700,00	8.283.200,00	5.669.400,00			-	36.000.000,00	-	-	-	-
20511093	SD NEGERI 2 WONODADI WETAN	Ngadirojo	26.100.000,00	5.416.500,00	7.588.900,00	7.371.600,00			-	26.100.000,00	-	-	-	-
20511097	SD NEGERI 2 WONOKARTO	Ngadirojo	60.300.000,00	15.324.400,00	9.306.050,00	23.374.200,00			-	60.300.000,00	-	-	-	-
20511098	SD NEGERI 2 WONOSOBO	Ngadirojo	44.100.000,00	8.809.000,00	13.025.750,00	15.494.050,00			-	44.100.000,00	-	-	-	-
20511485	SD NEGERI 3 COKROKEMBANG	Ngadirojo	27.900.000,00	5.926.250,00	5.014.950,00	4.921.020,00			-	27.900.000,00	-	-	-	-
20510934	SD NEGERI 3 PAGEREJO	Ngadirojo	104.400.000,00	25.184.200,00	25.262.600,00	11.710.300,00			-	104.400.000,00	-	-	-	-
20510849	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	Ngadirojo	42.300.000,00	6.861.600,00	11.968.700,00	4.031.200,00			-	42.300.000,00	-	-	-	-
20511087	SD NEGERI 3 WONODADI KULON	Ngadirojo	24.300.000,00	8.462.500,00	3.249.000,00	6.179.900,00			-	17.891.400,00	-	6.408.600,00	-	6.408.600,00
20511095	SD NEGERI 3 WONOKARTO	Ngadirojo	22.500.000,00	6.291.750,00	4.948.500,00	6.092.550,00			-	22.500.000,00	-	-	-	-
20510933	SD NEGERI 4 PAGEREJO	Ngadirojo	47.700.000,00	11.784.700,00	11.589.950,00	10.432.950,00			-	47.700.000,00	-	-	-	-
20510848	SD NEGERI 4 SIDOMULYO	Ngadirojo	125.100.000,00	17.425.450,00	21.202.050,00	30.353.250,00			2.590.400,00	102.600.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511086	SD NEGERI 4 WONODADI KULON	Ngadirojo	58.500.000,00	10.886.550,00	15.855.140,00	7.312.260,00			-	58.500.000,00	-	-	-	-
20510847	SD NEGERI 5 SIDOMULYO	Ngadirojo	63.000.000,00	9.447.400,00	7.637.962,00	4.160.624,00			12.131.300,00	40.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511501	SD NEGERI CANGKRING	Ngadirojo	62.100.000,00	11.744.950,00	6.530.150,00	10.580.650,00			3.724.500,00	39.600.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511203	SD NEGERI WIYORO	Ngadirojo	81.900.000,00	16.430.200,00	18.959.000,00	18.159.100,00			-	81.808.000,00	-	92.000,00	-	92.000,00
20510819	SD NEGERI 1 GUNUNGREJO	Sudimoro	97.200.000,00	23.121.500,00	22.367.500,00	5.560.500,00			-	96.667.800,00	-	532.200,00	-	532.200,00
20511449	SD NEGERI 1 KARANGMULYO	Sudimoro	126.900.000,00	19.113.200,00	40.642.350,00	29.097.350,00			-	126.900.000,00	-	-	-	-
20511451	SD NEGERI 1 KETANGGUNG	Sudimoro	110.700.000,00	20.831.500,00	26.262.400,00	25.956.250,00			-	110.697.350,00	-	2.650,00	-	2.650,00
20511442	SD NEGERI 1 KLEPU	Sudimoro	126.900.000,00	25.479.500,00	17.074.500,00	22.368.000,00			12.129.800,00	102.930.000,00	22.500.000,00	1.470.000,00	-	1.470.000,00
20510932	SD NEGERI 1 PAGERKIDUL	Sudimoro	60.300.000,00	13.866.600,00	16.261.000,00	16.966.600,00			-	60.289.200,00	-	10.800,00	-	10.800,00
20510930	SD NEGERI 1 PAGERLOR	Sudimoro	52.200.000,00	4.559.500,00	8.605.500,00	12.471.500,00			1.080.000,00	29.700.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511495	SD NEGERI 1 SEMBOWO	Sudimoro	50.400.000,00	6.143.800,00	16.662.650,00	10.303.900,00			-	50.400.000,00	-	-	-	-
20510830	SD NEGERI 1 SUDIMORO	Sudimoro	189.900.000,00	45.684.200,00	31.143.200,00	38.753.900,00			-	189.745.000,00	-	155.000,00	-	155.000,00
20510829	SD NEGERI 1 SUKOREJO	Sudimoro	76.500.000,00	18.556.550,00	14.641.850,00	14.825.250,00			-	76.396.500,00	-	103.500,00	-	103.500,00
20510828	SD NEGERI 1 SUMBEREJO	Sudimoro	76.500.000,00	15.077.500,00	16.727.300,00	22.376.100,00			-	76.491.300,00	-	8.700,00	-	8.700,00
20510816	SD NEGERI 2 GUNUNGREJO	Sudimoro	77.400.000,00	10.656.700,00	26.576.400,00	10.517.000,00			-	77.017.200,00	-	382.800,00	-	382.800,00
20511448	SD NEGERI 2 KARANGMULYO	Sudimoro	106.200.000,00	8.877.100,00	32.351.175,00	37.121.175,00			-	106.200.000,00	-	-	-	-
20511450	SD NEGERI 2 KETANGGUNG	Sudimoro	92.700.000,00	10.241.500,00	35.914.500,00	21.114.500,00			-	92.685.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
20537132	SD NEGERI 2 KLEPU	Sudimoro	63.900.000,00	12.069.900,00	14.764.850,00	15.754.100,00			-	63.682.600,00	-	217.400,00	-	217.400,00
20510931	SD NEGERI 2 PAGERKIDUL	Sudimoro	70.200.000,00	23.690.100,00	11.343.500,00	20.255.800,00			-	70.200.000,00	-	-	-	-
20510929	SD NEGERI 2 PAGERLOR	Sudimoro	77.400.000,00	6.396.000,00	14.550.500,00	8.945.000,00			22.500.000,00	54.900.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511426	SD NEGERI 2 SEMBOWO	Sudimoro	54.900.000,00	20.948.050,00	6.501.800,00	18.653.150,00			-	54.867.500,00	-	32.500,00	-	32.500,00
20510818	SD NEGERI 2 SUDIMORO	Sudimoro	69.300.000,00	9.696.000,00	16.943.000,00	18.908.700,00			-	67.681.700,00	-	1.618.300,00	-	1.618.300,00
20510827	SD NEGERI 2 SUKOREJO	Sudimoro	95.400.000,00	19.565.550,00	19.562.000,00	30.096.350,00			-	95.281.200,00	-	118.800,00	-	118.800,00
20510826	SD NEGERI 2 SUMBEREJO	Sudimoro	86.400.000,00	12.808.700,00	26.198.300,00	8.433.900,00			-	86.365.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00
20511427	SD NEGERI 3 KLEPU	Sudimoro	23.400.000,00	2.463.400,00	9.235.600,00	5.581.200,00			-	23.400.000,00	-	-	-	-
20510928	SD NEGERI 3 PAGERLOR	Sudimoro	57.600.000,00	5.231.800,00	11.106.950,00	6.383.200,00			1.080.000,00	22.721.950,00	22.500.000,00	12.378.050,00	-	12.378.050,00
20510817	SD NEGERI 3 SUDIMORO	Sudimoro	76.500.000,00	14.725.400,00	14.055.300,00	11.939.300,00			-	76.500.000,00	-	-	-	-

Lampiran 2/Jenjang SD 1

REKAPITULASI REALISASI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD
TAHUN 2025

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
			27.742.065.986,00	**5.667.979.537,00**	**6.118.762.397,00**	**6.133.841.660,00**	**406.793.300,00**
20511270	SD NEGERI 1 BELAH	Donorojo	122.400.000,00	19.723.500,00	25.727.180,00	41.817.170,00	18.480.700
20511500	SD NEGERI 1 CEMENG	Donorojo	58.500.000,00	5.400.000,00	6.153.000,00	3.014.000,00	-
20511469	SD NEGERI 1 DONOROJO	Donorojo	120.600.000,00	27.213.150,00	32.730.230,00	38.706.430,00	-
20511478	SD NEGERI 1 GEDOMPOL	Donorojo	69.300.000,00	10.104.800,00	13.218.300,00	4.427.900,00	33.192.100
20511539	SD NEGERI 1 GENDARAN	Donorojo	60.300.000,00	9.825.800,00	20.234.400,00	13.206.900,00	32.120.000
20511405	SD NEGERI 1 KALAK	Donorojo	31.500.000,00	8.384.600,00	7.365.400,00	10.479.200,00	-
20551732	SD NEGERI 1 KLEPU	Donorojo	45.900.000,00	10.045.400,00	9.249.800,00	8.513.400,00	-
20510776	SD NEGERI 1 SAWAHAN	Donorojo	33.300.000,00	10.018.200,00	4.769.700,00	8.415.900,00	35.000.000
20510784	SD NEGERI 1 SEKAR	Donorojo	49.500.000,00	10.461.800,00	14.224.400,00	12.269.900,00	-
20510839	SD NEGERI 1 SENDANG	Donorojo	67.500.000,00	13.337.758,00	4.273.698,00	3.091.758,00	34.040.000
20510812	SD NEGERI 1 SUKODONO	Donorojo	78.300.000,00	13.352.366,00	23.801.716,00	2.520.656,00	35.000.000
20511033	SD NEGERI 1 WIDORO	Donorojo	45.900.000,00	10.521.600,00	1.178.400,00	1.076.100,00	-
20511269	SD NEGERI 2 BELAH	Donorojo	74.700.000,00	10.817.005,00	25.687.293,00	15.072.042,00	35.000.000
20511499	SD NEGERI 2 CEMENG	Donorojo	33.300.000,00	5.479.000,00	9.796.000,00	2.199.000,00	-
20511468	SD NEGERI 2 DONOROJO	Donorojo	53.100.000,00	6.504.700,00	19.550.974,00	6.672.258,00	-
20511477	SD NEGERI 2 GEDOMPOL	Donorojo	36.900.000,00	2.505.000,00	10.571.400,00	2.505.000,00	-
20511547	SD NEGERI 2 GENDARAN	Donorojo	56.700.000,00	6.809.900,00	8.687.200,00	15.295.300,00	-
20511404	SD NEGERI 2 KALAK	Donorojo	83.700.000,00	25.594.500,00	4.499.500,00	41.766.950,00	-
20511431	SD NEGERI 2 KLEPU	Donorojo	69.300.000,00	7.855.810,00	15.380.580,00	9.354.910,00	-
20510778	SD NEGERI 2 SAWAHAN	Donorojo	24.300.000,00	8.870.600,00	3.272.400,00	6.986.800,00	32.600.000
20510783	SD NEGERI 2 SEKAR	Donorojo	48.600.000,00	15.695.400,00	8.604.600,00	21.668.400,00	33.500.000
20510838	SD NEGERI 2 SENDANG	Donorojo	23.400.000,00	10.399.010,00	970.410,00	970.410,00	-
20510820	SD NEGERI 2 SUKODONO	Donorojo	27.000.000,00	6.560.494,00	4.642.530,00	1.672.560,00	-
20511022	SD NEGERI 2 WIDORO	Donorojo	90.900.000,00	21.052.650,00	19.803.250,00	7.210.000,00	-
20511268	SD NEGERI 3 BELAH	Donorojo	32.400.000,00	13.836.000,00	2.114.000,00	1.415.500,00	35.000.000
20511498	SD NEGERI 3 CEMENG	Donorojo	24.300.000,00	6.139.000,00	6.011.000,00	9.594.000,00	-
20511467	SD NEGERI 3 DONOROJO	Donorojo	35.100.000,00	12.710.900,00	4.831.900,00	8.411.850,00	-
20511466	SD NEGERI 3 GEDOMPOL	Donorojo	67.500.000,00	8.800.280,00	12.445.380,00	2.245.000,00	-
20551733	SD NEGERI 3 KLEPU	Donorojo	25.200.000,00	4.446.900,00	8.142.900,00	2.511.200,00	-
20510837	SD NEGERI 3 SENDANG	Donorojo	42.300.000,00	13.157.155,00	3.057.345,00	22.307.630,00	-
20510821	SD NEGERI 3 SUKODONO	Donorojo	63.900.000,00	11.862.938,00	8.799.671,00	3.407.400,00	-
20511428	SD NEGERI 4 KLEPU	Donorojo	103.500.000,00	15.708.890,00	20.705.040,00	27.503.130,00	-

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20511494	SD NEGERI 1 BOMO	Punung	72.000.000,00	10.439.635,00	13.614.810,00	14.248.745,00	-
20511540	SD NEGERI 1 GONDOSARI	Punung	70.200.000,00	10.366.155,00	22.581.850,00	29.970.695,00	-
20511434	SD NEGERI 1 MANTREN	Punung	45.900.000,00	10.867.640,00	12.082.360,00	13.172.855,00	-
20510881	SD NEGERI 1 MENDOLO KIDUL	Punung	34.200.000,00	2.457.450,00	11.363.690,00	-	-
20510879	SD NEGERI 1 MENDOLO LOR	Punung	85.500.000,00	10.934.350,00	13.389.485,00	13.907.420,00	-
20510911	SD NEGERI 1 PITON	Punung	55.800.000,00	13.193.150,00	12.390.410,00	21.896.110,00	24.436.800
20510907	SD NEGERI 1 PLOSO	Punung	86.400.000,00	13.775.405,00	26.174.785,00	31.145.490,00	-
20510802	SD NEGERI 1 PUNUNG	Punung	93.600.000,00	16.275.455,00	17.792.035,00	38.601.320,00	-
20510832	SD NEGERI 1 SOOKA	Punung	52.200.000,00	11.638.664,00	3.069.285,00	4.624.030,00	-
20511054	SD NEGERI 1 TINATAR	Punung	67.500.000,00	13.319.450,00	18.268.055,00	2.270.000,00	-
20511493	SD NEGERI 2 BOMO	Punung	54.000.000,00	14.697.300,00	11.931.290,00	24.228.610,00	35.000.000
20511528	SD NEGERI 2 GONDOSARI	Punung	37.800.000,00	15.534.000,00	2.616.000,00	17.034.000,00	-
20511423	SD NEGERI 2 MANTREN	Punung	49.500.000,00	7.187.100,00	5.864.200,00	800.000,00	-
20510880	SD NEGERI 2 MENDOLO KIDUL	Punung	53.100.000,00	7.629.200,00	5.956.640,00	1.841.400,00	-
20510878	SD NEGERI 2 MENDOLO LOR	Punung	40.500.000,00	7.984.150,00	12.262.210,00	15.531.130,00	23.423.700
20510910	SD NEGERI 2 PITON	Punung	71.100.000,00	7.620.670,00	16.446.385,00	1.860.750,00	-
20510895	SD NEGERI 2 PLOSO	Punung	50.400.000,00	9.252.000,00	13.511.100,00	18.407.300,00	-
20510791	SD NEGERI 2 PUNUNG	Punung	40.500.000,00	4.995.215,00	7.662.520,00	5.260.715,00	-
20510831	SD NEGERI 2 SOOKA	Punung	46.800.000,00	10.192.520,00	1.916.000,00	4.566.500,00	
20511043	SD NEGERI 2 TINATAR	Punung	94.500.000,00	11.743.950,00	24.181.550,00	9.713.100,00	
20511492	SD NEGERI 3 BOMO	Punung	35.100.000,00	5.693.540,00	8.310.160,00	12.058.460,00	
20511527	SD NEGERI 3 GONDOSARI	Punung	96.300.000,00	24.230.270,00	21.394.750,00	29.445.890,00	
20510799	SD NEGERI 3 PLOSO	Punung	63.900.000,00	14.454.190,00	16.611.460,00	16.411.595,00	
20510790	SD NEGERI 3 PUNUNG	Punung	54.000.000,00	8.767.470,00	16.624.220,00	18.444.154,00	
20511042	SD NEGERI 3 TINATAR	Punung	21.600.000,00	7.552.220,00	2.873.000,00	5.038.780,00	
20510797	SD NEGERI 4 PLOSO	Punung	68.400.000,00	9.947.250,00	12.363.410,00	11.889.330,00	
20510788	SD NEGERI 4 PUNUNG	Punung	90.900.000,00	14.067.145,00	31.364.940,00	29.094.875,00	
20510775	SD NEGERI 6 PUNUNG	Punung	29.700.000,00	6.404.400,00	8.345.200,00	9.746.950,00	
20511397	SD NEGERI KEBONSARI	Punung	66.600.000,00	15.372.700,00	16.041.780,00	17.417.170,00	
20511452	SD NEGERI KENDAL	Punung	63.900.000,00	22.908.710,00	8.695.750,00	18.466.035,00	
20511039	SD NEGERI WARENG	Punung	67.500.000,00	11.195.720,00	17.983.572,00	13.455.466,00	
20511505	SD NEGERI 1 CANDI	Pringkuku	27.000.000,00	7.390.400,00	4.954.700,00	8.835.300,00	
20511473	SD NEGERI 1 DADAPAN	Pringkuku	37.800.000,00	17.832.400,00	1.044.400,00	14.128.400,00	
20511471	SD NEGERI 1 DERSONO	Pringkuku	77.400.000,00	14.893.500,00	18.973.160,00	12.647.000,00	
20511546	SD NEGERI 1 GLINGGANGAN	Pringkuku	37.800.000,00	2.470.500,00	13.715.010,00	14.772.120,00	
20511407	SD NEGERI 1 JLUBANG	Pringkuku	52.200.000,00	11.674.600,00	12.010.800,00	14.913.900,00	
20510902	SD NEGERI 1 PELEM	Pringkuku	57.600.000,00	17.066.680,00	11.721.320,00	15.459.860,00	
20510793	SD NEGERI 1 PRINGKUKU	Pringkuku	44.100.000,00	7.631.100,00	14.345.100,00	14.948.700,00	
20510815	SD NEGERI 1 SUGIHWARAS	Pringkuku	24.300.000,00	7.272.900,00	4.183.900,00	8.110.000,00	

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20511062	SD NEGERI 1 TAMANASRI	Pringkuku	63.000.000,00	17.989.000,00	10.847.500,00	16.541.000,00	
20511504	SD NEGERI 2 CANDI	Pringkuku	49.500.000,00	18.558.550,00	6.127.500,00	19.964.700,00	
20511474	SD NEGERI 2 DADAPAN	Pringkuku	73.800.000,00	9.701.180,00	12.801.900,00	21.170.520,00	
20511470	SD NEGERI 2 DERSONO	Pringkuku	20.700.000,00	6.276.600,00	4.044.800,00	1.965.400,00	
20511545	SD NEGERI 2 GLINGGANGAN	Pringkuku	50.402.520,00	13.970.950,00	11.112.800,00	9.255.650,00	
20511406	SD NEGERI 2 JLUBANG	Pringkuku	44.100.000,00	15.678.500,00	6.165.000,00	15.777.500,00	
20510903	SD NEGERI 2 PELEM	Pringkuku	55.800.000,00	18.177.812,00	9.465.900,00	15.467.180,00	
20510792	SD NEGERI 2 PRINGKUKU	Pringkuku	32.400.000,00	5.024.800,00	11.083.500,00	2.291.100,00	
20510814	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	Pringkuku	26.100.000,00	7.814.500,00	4.654.000,00	2.307.000,00	
20511051	SD NEGERI 2 TAMANASRI	Pringkuku	63.000.000,00	28.570.000,00	2.735.000,00	21.714.000,00	
20511503	SD NEGERI 3 CANDI	Pringkuku	28.800.000,00	5.608.790,00	2.620.400,00	9.180.460,00	
20511472	SD NEGERI 3 DERSONO	Pringkuku	43.200.000,00	10.247.350,00	11.345.950,00	14.734.100,00	
20511544	SD NEGERI 3 GLINGGANGAN	Pringkuku	30.600.000,00	4.627.300,00	10.654.922,00	8.770.200,00	
20510901	SD NEGERI 3 PELEM	Pringkuku	51.300.000,00	7.908.000,00	17.273.300,00	6.376.600,00	
20510800	SD NEGERI 3 PRINGKUKU	Pringkuku	25.200.000,00	6.247.200,00	5.916.300,00	7.902.700,00	
20511502	SD NEGERI 4 CANDI	Pringkuku	30.600.000,00	13.334.360,00	1.890.660,00	8.788.750,00	
20555437	SD NEGERI NGADIREJAN	Pringkuku	116.100.000,00	17.690.800,00	37.286.950,00	46.657.900,00	
20510795	SD NEGERI POKO	Pringkuku	52.200.000,00	18.449.300,00	7.548.200,00	12.538.100,00	
20510843	SD NEGERI SOBO	Pringkuku	52.200.000,00	5.116.340,00	18.590.290,00	21.263.820,00	
20511038	SD NEGERI WATU KARUNG	Pringkuku	105.300.000,00	21.634.100,00	18.738.000,00	27.174.200,00	
20511264	SD NEGERI 1 BALEHARJO	Pacitan	108.900.000,00	18.924.795,00	34.772.635,00	27.112.060,00	
20511391	SD NEGERI 1 KAYEN	Pacitan	68.400.000,00	10.349.800,00	19.265.100,00	18.703.295,00	
20510909	SD NEGERI 1 PLOSO	Pacitan	240.300.000,00	59.976.241,00	55.544.289,00	61.830.671,00	
20510771	SD NEGERI 1 SAMBONG	Pacitan	27.900.000,00	7.021.000,00	5.395.000,00	2.300.000,00	
20510786	SD NEGERI 1 SEDENG	Pacitan	80.100.000,00	12.538.550,00	15.752.550,00	11.602.200,00	
20510846	SD NEGERI 1 SIRNOBOYO	Pacitan	54.000.010,00	9.755.050,00	13.946.650,00	4.226.050,00	
20511050	SD NEGERI 1 TAMBAKREJO	Pacitan	85.500.000,00	14.999.840,00	16.169.010,00	21.090.800,00	
20511263	SD NEGERI 2 BALEHARJO	Pacitan	306.000.000,00	81.353.323,00	62.532.267,00	118.685.750,00	
20511392	SD NEGERI 2 KAYEN	Pacitan	43.200.000,00	7.876.151,00	13.507.787,00	11.979.152,00	
20510906	SD NEGERI 2 PLOSO	Pacitan	53.100.000,00	8.907.500,00	12.363.600,00	18.980.300,00	
20510770	SD NEGERI 2 SAMBONG	Pacitan	65.700.000,00	8.318.272,00	15.975.584,00	4.622.040,00	
20510785	SD NEGERI 2 SEDENG	Pacitan	66.600.000,00	13.096.910,00	18.058.760,00	14.205.420,00	
20510845	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	Pacitan	154.800.000,00	25.987.800,00	40.162.200,00	33.703.000,00	
20511049	SD NEGERI 2 TAMBAKREJO	Pacitan	34.200.000,00	11.885.500,00	4.934.600,00	9.648.200,00	
20510844	SD NEGERI 3 SIRNOBOYO	Pacitan	57.600.000,00	6.393.100,00	20.079.205,00	10.949.800,00	
20511276	SD NEGERI ARJOWINANGUN	Pacitan	177.300.000,00	13.069.206,00	67.541.218,00	28.308.370,00	
20555436	SD NEGERI BANGUNSARI	Pacitan	189.077.291,00	22.549.700,00	56.785.000,00	59.962.200,00	
20511271	SD NEGERI BANJARSARI	Pacitan	55.800.000,00	16.743.450,00	11.156.550,00	20.265.300,00	
20537131	SD NEGERI BOLOSINGO	Pacitan	81.000.000,00	20.245.861,00	20.248.498,00	15.033.405,00	

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20511394	SD NEGERI KEMBANG	Pacitan	67.500.000,00	15.367.354,00	17.723.467,00	19.466.924,00	
20510894	SD NEGERI MENADI	Pacitan	97.200.000,00	17.703.623,00	23.119.633,00	34.403.974,00	
20510877	SD NEGERI MENTORO	Pacitan	106.200.000,00	29.351.478,00	23.745.966,00	33.464.198,00	
20510892	SD NEGERI NANGGUNGAN	Pacitan	101.700.000,00	15.930.250,00	33.321.250,00	5.176.650,00	
20510921	SD NEGERI PACITAN	Pacitan	437.400.000,00	92.886.788,00	125.129.276,00	52.187.338,00	
20510794	SD NEGERI PONGGOK	Pacitan	76.500.000,00	9.153.592,00	28.917.747,00	10.357.388,00	
20510805	SD NEGERI PUCANGSEWU	Pacitan	109.800.000,00	16.797.856,00	36.145.847,00	26.575.776,00	
20510772	SD NEGERI PURWOREJO	Pacitan	73.800.000,00	13.207.685,00	22.484.150,00	15.157.130,00	
20510782	SD NEGERI SEMANTEN	Pacitan	32.400.000,00	6.413.855,00	9.392.245,00	7.225.745,00	
20510836	SD NEGERI SIDOHARJO	Pacitan	101.700.000,00	17.911.092,00	20.428.728,00	1.254.707,00	
20510813	SD NEGERI SUKOHARJO	Pacitan	81.000.000,00	19.220.250,00	19.349.950,00	16.712.500,00	
20510825	SD NEGERI SUMBERHARJO	Pacitan	60.300.000,00	15.543.350,00	10.383.200,00	21.894.950,00	
20511044	SD NEGERI TANJUNGSARI	Pacitan	61.200.000,00	16.595.432,00	13.769.362,00	22.430.226,00	
20511034	SD NEGERI WIDORO	Pacitan	81.900.000,00	15.613.305,00	20.880.211,00	9.537.900,00	
20511484	SD NEGERI 1 GAWANG	Kebonagung	32.400.000,00	13.308.558,00	2.690.000,00	7.974.758,00	
20511537	SD NEGERI 1 GEMBUK	Kebonagung	45.000.000,00	7.382.550,00	15.105.200,00	11.152.750,00	
20511418	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	Kebonagung	46.800.000,00	6.005.500,00	5.292.000,00	7.447.300,00	
20511402	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	Kebonagung	43.200.000,00	9.856.400,00	11.531.600,00	13.708.400,00	
20511384	SD NEGERI 1 KATIPUGAL	Kebonagung	39.600.000,00	9.560.736,00	10.008.098,00	6.740.132,00	
20511447	SD NEGERI 1 KETEPUNG	Kebonagung	99.000.000,00	25.917.050,00	12.510.650,00	34.013.450,00	
20511455	SD NEGERI 1 KETRO	Kebonagung	126.900.000,00	18.931.500,00	32.506.200,00	7.842.500,00	
20511425	SD NEGERI 1 KLESEM	Kebonagung	44.100.000,00	11.212.500,00	10.775.500,00	4.181.450,00	
20510804	SD NEGERI 1 PUNJUNG	Kebonagung	27.900.000,00	7.370.100,00	6.565.900,00	8.789.900,00	
20510774	SD NEGERI 1 PURWOASRI	Kebonagung	60.300.000,00	15.566.396,00	11.858.448,00	8.080.098,00	
20510769	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	Kebonagung	27.900.000,00	5.655.300,00	7.794.700,00	7.046.800,00	
20510833	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	Kebonagung	55.800.000,00	4.850.010,00	9.971.594,00	3.781.530,00	
20511094	SD NEGERI 1 WONOGONDO	Kebonagung	105.300.000,00	18.289.000,00	29.944.000,00	23.263.000,00	
20511069	SD NEGERI 1 WORAWARI	Kebonagung	64.800.000,00	20.602.000,00	11.790.000,00	6.162.000,00	
20511483	SD NEGERI 2 GAWANG	Kebonagung	41.400.000,00	18.299.800,00	2.389.738,00	902.511,00	
20511538	SD NEGERI 2 GEMBUK	Kebonagung	85.500.000,00	8.021.583,00	23.497.559,00	32.472.458,00	
20511417	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	Kebonagung	27.000.000,00	4.595.200,00	8.704.100,00	4.724.100,00	
20511401	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	Kebonagung	55.800.000,00	16.502.375,00	11.239.275,00	5.786.625,00	
20511383	SD NEGERI 2 KATIPUGAL	Kebonagung	65.700.000,00	14.116.000,00	18.371.000,00	13.805.200,00	
20511446	SD NEGERI 2 KETEPUNG	Kebonagung	72.000.000,00	11.048.000,00	12.229.800,00	6.793.900,00	
20511463	SD NEGERI 2 KETRO	Kebonagung	33.300.000,00	6.255.790,00	8.236.960,00	12.612.382,00	
20511424	SD NEGERI 2 KLESEM	Kebonagung	117.000.000,00	13.974.000,00	23.267.000,00	36.305.200,00	
20510803	SD NEGERI 2 PUNJUNG	Kebonagung	16.200.000,00	1.369.000,00	6.598.500,00	5.863.100,00	
20510773	SD NEGERI 2 PURWOASRI	Kebonagung	65.700.000,00	12.982.400,00	13.355.100,00	29.555.750,00	
20510768	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	Kebonagung	69.300.000,00	16.287.900,00	18.333.500,00	17.584.100,00	

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20510842	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	Kebonagung	120.600.000,00	26.105.160,00	23.912.240,00	34.934.300,00	
20511202	SD NEGERI 2 WONOGONDO	Kebonagung	54.900.000,00	22.586.894,00	4.915.196,00	15.992.788,00	
20511068	SD NEGERI 2 WORAWARI	Kebonagung	99.900.000,00	21.426.100,00	16.798.600,00	22.983.600,00	
20510850	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	Kebonagung	68.400.000,00	12.206.700,00	9.479.100,00	7.250.000,00	
20511272	SD NEGERI BANJARJO	Kebonagung	82.800.000,00	21.978.200,00	18.945.100,00	20.459.500,00	
20511419	SD NEGERI KALIPELUS	Kebonagung	133.200.000,00	21.772.800,00	32.166.300,00	16.681.200,00	
20511400	SD NEGERI KEBONAGUNG	Kebonagung	45.000.000,00	6.589.050,00	15.362.650,00	2.333.850,00	
20511435	SD NEGERI MANTREN	Kebonagung	63.900.000,00	16.846.500,00	7.890.000,00	3.999.000,00	
20510796	SD NEGERI PLUMBUNGAN	Kebonagung	49.500.000,00	6.876.000,00	16.583.000,00	7.849.000,00	
20511491	SD NEGERI 1 BORANG	Arjosari	38.700.000,00	6.424.040,00	11.499.480,00	10.119.902,00	
20511530	SD NEGERI 1 GEMBONG	Arjosari	82.800.000,00	18.837.719,00	22.062.275,00	26.224.000,00	
20511526	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	Arjosari	82.800.000,00	10.335.378,00	30.313.450,00	12.027.950,00	
20511409	SD NEGERI 1 JETISKIDUL	Arjosari	78.300.000,00	8.351.700,00	17.317.450,00	24.472.250,00	
20511416	SD NEGERI 1 KARANGGEDE	Arjosari	71.100.000,00	7.926.266,00	11.055.363,00	18.622.087,00	
20511390	SD NEGERI 1 KARANGREJO	Arjosari	73.800.000,00	13.045.726,00	12.553.272,00	11.726.106,00	
20511396	SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO	Arjosari	55.800.000,00	18.154.688,00	7.786.300,00	18.857.200,00	
20510876	SD NEGERI 1 MLATI	Arjosari	92.700.000,00	18.106.550,00	20.313.150,00	18.153.550,00	
20510779	SD NEGERI 1 SEDAYU	Arjosari	81.000.000,00	9.592.420,00	14.089.560,00	11.153.330,00	
20511058	SD NEGERI 1 TEMON	Arjosari	63.000.000,00	11.128.000,00	17.151.000,00	8.464.500,00	
20511490	SD NEGERI 2 BORANG	Arjosari	50.400.000,00	8.874.150,00	7.649.000,00	8.015.650,00	
20511529	SD NEGERI 2 GEMBONG	Arjosari	9.900.000,00	-	4.338.900,00	666.000,00	
20511515	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI	Arjosari	36.000.000,00	6.745.350,00	9.836.250,00	7.458.450,00	
20511408	SD NEGERI 2 JETISKIDUL	Arjosari	23.400.000,00	4.906.750,00	6.752.600,00	7.109.800,00	
20511415	SD NEGERI 2 KARANGGEDE	Arjosari	40.500.000,00	6.841.560,00	12.867.054,00	15.038.686,00	
20511389	SD NEGERI 2 KARANGREJO	Arjosari	63.900.000,00	11.908.420,00	19.059.714,00	11.344.010,00	
20511395	SD NEGERI 2 KEDUNGBENDO	Arjosari	18.000.000,00	2.722.000,00	6.261.000,00	2.504.000,00	
20510875	SD NEGERI 2 MLATI	Arjosari	60.300.000,00	10.071.800,00	14.776.660,00	15.972.700,00	
20510787	SD NEGERI 2 SEDAYU	Arjosari	59.118.950,00	10.106.800,00	14.262.330,00	17.687.220,00	
20511057	SD NEGERI 2 TEMON	Arjosari	112.500.000,00	16.090.840,00	20.893.260,00	29.013.600,00	
20511514	SD NEGERI 3 GUNUNGSARI	Arjosari	7.200.000,00	-	2.900.000,00	2.481.900,00	
20511414	SD NEGERI 3 KARANGGEDE	Arjosari	27.900.000,00	4.500.577,00	9.328.326,00	7.222.901,00	
20511436	SD NEGERI 3 MANGUNHARJO	Arjosari	13.500.000,00	3.283.785,00	2.630.745,00	5.476.275,00	
20510874	SD NEGERI 3 MLATI	Arjosari	17.100.000,00	3.998.750,00	4.551.250,00	584.250,00	
20511056	SD NEGERI 3 TEMON	Arjosari	57.600.000,00	7.657.500,00	5.325.000,00	1.168.000,00	
20511403	SD NEGERI 4 KARANGGEDE	Arjosari	19.800.000,00	3.150.000,00	3.933.052,00	2.360.400,00	
20511055	SD NEGERI 4 TEMON	Arjosari	20.898.650,00	2.113.000,00	8.171.750,00	5.306.900,00	
20511288	SD NEGERI ARJOSARI	Arjosari	124.200.000,00	40.552.650,00	20.256.111,00	23.036.802,00	
20511482	SD NEGERI GAYUHAN	Arjosari	76.500.000,00	19.087.500,00	16.814.900,00	15.206.900,00	
20511536	SD NEGERI GEGERAN	Arjosari	87.470.110,00	11.241.620,00	13.853.220,00	31.183.350,00	

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20555441	SD NEGERI JATIMALANG	Arjosari	115.200.000,00	8.488.200,00	19.583.200,00	17.409.700,00	
20555439	SD NEGERI MANGUNHARJO	Arjosari	55.800.000,00	11.064.100,00	10.004.300,00	8.685.200,00	
20510927	SD NEGERI PAGUTAN	Arjosari	72.900.000,00	12.305.010,00	21.321.090,00	12.191.550,00	
20511026	SD NEGERI TREMAS	Arjosari	168.300.000,00	9.978.320,00	44.929.920,00	21.287.440,00	
20511543	SD NEGERI 1 GONDANG	Nawangan	79.200.000,00	17.979.938,00	21.135.356,00	4.104.782,00	
20511422	SD NEGERI 1 JETIS LOR	Nawangan	96.300.000,00	6.110.626,00	17.228.900,00	9.896.175,00	
20510882	SD NEGERI 1 MUJING	Nawangan	100.800.000,00	22.835.420,00	14.226.745,00	42.364.850,00	
20510891	SD NEGERI 1 NAWANGAN	Nawangan	196.200.000,00	31.483.860,00	42.533.660,00	46.988.560,00	
20510869	SD NEGERI 1 NGROMO	Nawangan	40.500.000,00	8.546.960,00	13.304.040,00	2.514.800,00	
20510916	SD NEGERI 1 PAKIS BARU	Nawangan	99.000.000,00	22.772.300,00	9.157.300,00	33.616.300,00	
20510900	SD NEGERI 1 PENGGUNG	Nawangan	50.400.000,00	10.084.500,00	3.183.000,00	1.215.000,00	
20510781	SD NEGERI 1 SEMPU	Nawangan	110.700.000,00	31.482.511,00	12.193.600,00	10.262.150,00	
20511041	SD NEGERI 1 TOKAWI	Nawangan	79.200.000,00	25.775.100,00	13.816.500,00	27.369.500,00	
20511542	SD NEGERI 2 GONDANG	Nawangan	84.600.000,00	30.069.300,00	6.230.700,00	12.679.700,00	
20511411	SD NEGERI 2 JETIS LOR	Nawangan	44.100.000,00	6.903.000,00	12.562.500,00	6.015.000,00	
20510883	SD NEGERI 2 MUJING	Nawangan	108.900.000,00	22.018.860,00	30.008.060,00	8.416.800,00	
20510889	SD NEGERI 2 NAWANGAN	Nawangan	35.100.000,00	7.203.000,00	6.523.000,00	5.967.500,00	
20510868	SD NEGERI 2 NGROMO	Nawangan	113.400.000,00	14.205.480,00	21.729.420,00	39.200.830,00	
20510915	SD NEGERI 2 PAKIS BARU	Nawangan	81.900.000,00	21.142.000,00	11.521.200,00	33.872.900,00	
20510899	SD NEGERI 2 PENGGUNG	Nawangan	52.200.000,00	13.949.000,00	11.705.000,00	23.446.000,00	
20510780	SD NEGERI 2 SEMPU	Nawangan	62.100.000,00	19.990.500,00	8.961.000,00	27.644.400,00	
20511030	SD NEGERI 2 TOKAWI	Nawangan	95.400.000,00	20.622.500,00	15.645.000,00	29.976.500,00	
20511541	SD NEGERI 3 GONDANG	Nawangan	88.200.000,00	27.109.710,00	10.556.960,00	19.056.758,00	
20511410	SD NEGERI 3 JETIS LOR	Nawangan	24.300.000,00	10.427.000,00	1.065.000,00	2.265.000,00	
20510893	SD NEGERI 3 MUJING	Nawangan	71.100.000,00	15.191.748,00	7.281.500,00	1.026.380,00	
20510887	SD NEGERI 3 NAWANGAN	Nawangan	82.800.000,00	26.023.900,00	14.271.000,00	6.823.600,00	
20510867	SD NEGERI 3 NGROMO	Nawangan	62.100.000,00	15.529.000,00	10.451.500,00	26.465.000,00	
20510914	SD NEGERI 3 PAKIS BARU	Nawangan	51.300.000,00	5.975.100,00	8.397.000,00	1.675.500,00	
20510898	SD NEGERI 3 PENGGUNG	Nawangan	85.500.000,00	26.755.000,00	15.860.500,00	9.040.500,00	
20510851	SD NEGERI 3 SEMPU	Nawangan	70.200.000,00	19.510.500,00	10.518.500,00	26.032.750,00	
20511029	SD NEGERI 3 TOKAWI	Nawangan	83.700.000,00	7.839.800,00	17.051.100,00	18.218.500,00	
20510886	SD NEGERI 4 NAWANGAN	Nawangan	25.200.000,00	3.807.000,00	5.381.000,00	8.519.600,00	
20510897	SD NEGERI 4 PENGGUNG	Nawangan	99.000.000,00	25.066.500,00	10.612.500,00	47.636.500,00	
20510840	SD NEGERI 4 SEMPU	Nawangan	27.000.000,00	3.211.928,00	7.372.734,00	2.741.958,00	
20511028	SD NEGERI 4 TOKAWI	Nawangan	110.700.000,00	29.574.000,00	24.534.000,00	14.716.500,00	
20510885	SD NEGERI 5 NAWANGAN	Nawangan	11.700.000,00	2.106.000,00	3.397.000,00	1.306.000,00	
20555440	SD NEGERI 1 BANDAR	Bandar	140.400.001,00	21.618.850,00	37.270.400,00	17.430.500,00	
20511257	SD NEGERI 1 BANGUNSARI	Bandar	72.900.000,00	16.562.460,00	16.442.360,00	11.774.970,00	
20511523	SD NEGERI 1 JERUK	Bandar	94.500.000,00	12.854.540,00	25.021.704,00	32.308.734,00	

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20511459	SD NEGERI 1 KLEDUNG	Bandar	66.600.000,00	22.369.000,00	10.828.000,00	19.227.000,00	
20510863	SD NEGERI 1 NGUNUT	Bandar	50.400.000,00	5.439.550,00	12.980.500,00	5.723.350,00	
20510896	SD NEGERI 1 PETUNGSINARANG	Bandar	57.600.000,00	11.449.500,00	16.800.000,00	16.521.500,00	
20511031	SD NEGERI 1 TUMPUK	Bandar	52.200.000,00	8.508.000,00	16.667.000,00	11.128.000,00	
20511037	SD NEGERI 1 WATUPATOK	Bandar	135.900.000,00	38.239.740,00	18.456.400,00	22.161.900,00	
20511261	SD NEGERI 2 BANDAR	Bandar	75.600.000,00	15.136.000,00	19.394.000,00	28.253.000,00	
20511274	SD NEGERI 2 BANGUNSARI	Bandar	67.500.000,00	11.449.700,00	11.368.500,00	25.705.800,00	
20511522	SD NEGERI 2 JERUK	Bandar	80.100.000,00	12.542.156,00	27.486.340,00	23.826.028,00	
20511458	SD NEGERI 2 KLEDUNG	Bandar	51.300.000,00	11.753.500,00	11.386.500,00	17.845.500,00	
20510852	SD NEGERI 2 NGUNUT	Bandar	60.300.000,00	13.613.000,00	8.796.000,00	15.318.200,00	
20510904	SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG	Bandar	45.900.000,00	5.247.120,00	9.476.620,00	9.385.740,00	
20511032	SD NEGERI 2 TUMPUK	Bandar	64.800.000,00	17.402.780,00	14.781.160,00	20.567.330,00	
20511036	SD NEGERI 2 WATUPATOK	Bandar	83.700.000,00	10.152.650,00	10.496.200,00	19.652.300,00	
20511260	SD NEGERI 3 BANDAR	Bandar	63.900.000,00	21.471.300,00	9.498.500,00	12.643.700,00	
20511273	SD NEGERI 3 BANGUNSARI	Bandar	63.000.000,00	17.900.000,00	12.825.000,00	14.754.500,00	
20511521	SD NEGERI 3 JERUK	Bandar	149.400.000,00	29.943.536,00	33.785.164,00	49.579.956,00	
20511457	SD NEGERI 3 KLEDUNG	Bandar	30.600.000,00	6.289.250,00	8.486.250,00	740.250,00	
20510935	SD NEGERI 3 NGUNUT	Bandar	59.400.000,00	9.372.000,00	10.303.800,00	6.368.670,00	
20510905	SD NEGERI 3 PETUNGSINARANG	Bandar	34.200.000,00	10.821.500,00	6.063.000,00	3.184.500,00	
20511040	SD NEGERI 3 TUMPUK	Bandar	45.000.000,00	9.361.876,00	7.739.452,00	3.974.780,00	
20511035	SD NEGERI 3 WATUPATOK	Bandar	20.700.000,00	4.626.000,00	3.298.000,00	6.670.500,00	
20511520	SD NEGERI 4 JERUK	Bandar	83.700.000,00	15.649.500,00	14.765.000,00	14.713.200,00	
20510924	SD NEGERI 4 NGUNUT	Bandar	76.500.000,00	8.097.100,00	18.631.150,00	19.033.400,00	
20510913	SD NEGERI 4 PETUNGSINARANG	Bandar	146.700.000,00	25.766.400,00	21.320.120,00	25.722.760,00	
20511258	SD NEGERI 5 BANDAR	Bandar	108.900.504,00	14.309.550,00	28.628.025,00	25.095.550,00	
20511519	SD NEGERI 5 JERUK	Bandar	54.000.000,00	6.052.064,00	9.630.634,00	7.760.618,00	
20510912	SD NEGERI 5 PETUNGSINARANG	Bandar	43.200.000,00	6.365.500,00	14.054.900,00	900.000,00	
20511480	SD NEGERI 1 GEDANGAN	Tegalombo	79.200.000,00	29.578.750,00	9.860.650,00	19.700.450,00	
20511535	SD NEGERI 1 GEMAHARJO	Tegalombo	82.800.000,00	25.329.820,00	9.116.780,00	4.308.400,00	
20511388	SD NEGERI 1 KASIHAN	Tegalombo	91.800.000,00	12.111.000,00	30.809.000,00	14.106.000,00	
20511399	SD NEGERI 1 KEBONDALEM	Tegalombo	97.200.000,00	7.206.000,00	15.608.750,00	3.065.250,00	
20511393	SD NEGERI 1 KEMUNING	Tegalombo	82.800.000,00	14.966.950,00	15.183.050,00	17.731.400,00	
20510855	SD NEGERI 1 NGRECO	Tegalombo	42.300.000,00	11.244.000,00	9.611.000,00	16.540.000,00	
20510908	SD NEGERI 1 PLOSO	Tegalombo	67.500.000,00	5.732.200,00	11.920.850,00	4.981.900,00	
20510801	SD NEGERI 1 PUCANGOMBO	Tegalombo	55.800.000,00	15.490.800,00	12.409.200,00	19.765.000,00	
20510823	SD NEGERI 1 TAHUNAN	Tegalombo	45.900.000,00	14.255.000,00	8.655.000,00	20.235.000,00	
20510824	SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU	Tegalombo	112.500.000,00	26.465.250,00	29.716.000,00	9.822.320,00	
20511052	SD NEGERI 1 TEGALOMBO	Tegalombo	92.700.000,00	14.558.416,00	31.146.798,00	29.512.261,00	
20511479	SD NEGERI 2 GEDANGAN	Tegalombo	94.500.000,00	20.656.500,00	26.593.500,00	24.476.250,00	

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20511534	SD NEGERI 2 GEMAHARJO	Tegalombo	33.300.000,00	13.417.500,00	3.097.000,00	12.647.500,00	
20511387	SD NEGERI 2 KASIHAN	Tegalombo	63.900.000,00	12.306.000,00	14.843.500,00	1.077.000,00	
20511398	SD NEGERI 2 KEBONDALEM	Tegalombo	68.400.000,00	14.230.880,00	18.004.880,00	25.840.280,00	
20511382	SD NEGERI 2 KEMUNING	Tegalombo	69.300.000,00	10.608.500,00	6.180.000,00	19.882.500,00	
20510854	SD NEGERI 2 NGRECO	Tegalombo	52.200.000,00	9.911.750,00	15.307.000,00	15.373.250,00	
20510810	SD NEGERI 2 PLOSO	Tegalombo	97.200.000,00	16.834.000,00	20.648.000,00	23.872.000,00	
20510809	SD NEGERI 2 PUCANGOMBO	Tegalombo	36.000.000,00	12.146.500,00	5.662.000,00	15.796.500,00	
20510822	SD NEGERI 2 TAHUNAN	Tegalombo	63.000.000,00	7.819.000,00	12.299.000,00	4.947.000,00	
20510811	SD NEGERI 2 TAHUNAN BARU	Tegalombo	63.900.000,00	13.766.000,00	6.934.000,00	12.338.400,00	
20511053	SD NEGERI 2 TEGALOMBO	Tegalombo	87.300.000,00	19.307.530,00	5.504.470,00	24.518.370,00	
20511533	SD NEGERI 3 GEMAHARJO	Tegalombo	142.251.950,00	33.641.237,00	26.032.513,00	1.582.528,00	
20511386	SD NEGERI 3 KASIHAN	Tegalombo	53.100.000,00	17.181.000,00	9.351.500,00	17.777.000,00	
20511465	SD NEGERI 3 KEMUNING	Tegalombo	27.000.000,00	4.580.000,00	6.518.500,00	11.899.000,00	
20510853	SD NEGERI 3 NGRECO	Tegalombo	92.700.000,00	15.856.100,00	16.063.900,00	7.057.000,00	
20510798	SD NEGERI 3 PLOSO	Tegalombo	75.600.000,00	21.148.750,00	9.745.500,00	35.694.750,00	
20510808	SD NEGERI 3 PUCANGOMBO	Tegalombo	81.000.000,00	31.523.000,00	8.977.000,00	19.113.000,00	
20510936	SD NEGERI 3 TAHUNAN	Tegalombo	53.100.000,00	9.844.500,00	10.423.500,00	2.721.000,00	
20555442	SD NEGERI 3 TEGALOMBO	Tegalombo	93.600.000,00	16.499.500,00	17.766.250,00	9.710.250,00	
20511532	SD NEGERI 4 GEMAHARJO	Tegalombo	89.100.000,00	32.073.383,00	11.738.244,00	23.544.682,00	
20511385	SD NEGERI 4 KASIHAN	Tegalombo	41.400.000,00	8.482.000,00	5.945.500,00	9.465.700,00	
20511453	SD NEGERI 4 KEMUNING	Tegalombo	93.600.000,00	8.595.000,00	14.135.000,00	13.056.200,00	
20510861	SD NEGERI 4 NGRECO	Tegalombo	13.500.000,00	4.450.500,00	2.100.000,00	4.135.000,00	
20510807	SD NEGERI 4 PUCANGOMBO	Tegalombo	78.300.000,00	19.553.250,00	15.043.750,00	29.999.000,00	
20511060	SD NEGERI 4 TEGALOMBO	Tegalombo	22.500.000,00	3.957.000,00	7.291.000,00	8.760.500,00	
20511531	SD NEGERI 5 GEMAHARJO	Tegalombo	27.000.000,00	4.784.500,00	7.375.000,00	7.546.000,00	
20510862	SD NEGERI 5 NGRECO	Tegalombo	35.100.000,00	8.480.700,00	7.296.950,00	7.937.100,00	
20510806	SD NEGERI 5 PUCANGOMBO	Tegalombo	22.500.000,00	8.065.000,00	2.835.000,00	650.000,00	
20510870	SD NEGERI 6 NGRECO	Tegalombo	59.400.000,00	8.128.000,00	21.449.000,00	17.015.700,00	
20511489	SD NEGERI 1 BUBAKAN	Tulakan	139.500.000,00	21.240.000,00	32.771.700,00	24.158.700,00	
20511475	SD NEGERI 1 GASANG	Tulakan	85.500.000,00	20.628.850,00	21.553.150,00	20.293.990,00	
20511509	SD NEGERI 1 JATIGUNUNG	Tulakan	108.900.000,00	27.767.150,00	25.637.350,00	18.707.850,00	
20511518	SD NEGERI 1 JETAK	Tulakan	88.200.000,00	16.598.000,00	27.502.000,00	25.104.500,00	
20511412	SD NEGERI 1 KALIKUNING	Tulakan	73.800.000,00	16.849.000,00	20.051.000,00	24.787.900,00	
20511454	SD NEGERI 1 KETRO	Tulakan	122.400.000,00	25.400.775,00	30.196.970,00	24.067.455,00	
20511464	SD NEGERI 1 KETRO HARJO	Tulakan	83.700.000,00	7.558.100,00	32.708.850,00	9.257.950,00	
20511432	SD NEGERI 1 KLUWIH	Tulakan	89.100.000,00	13.836.480,00	11.356.680,00	29.683.380,00	
20511441	SD NEGERI 1 LOSARI	Tulakan	74.700.000,00	18.675.000,00	18.675.000,00	12.049.000,00	
20510860	SD NEGERI 1 NGILE	Tulakan	61.200.000,00	11.831.800,00	17.772.050,00	12.818.350,00	
20510858	SD NEGERI 1 NGLARAN	Tulakan	54.900.000,00	6.130.925,00	18.709.750,00	1.670.925,00	

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20510866	SD NEGERI 1 NGUMBUL	Tulakan	62.100.000,00	6.527.500,00	20.843.155,00	15.072.310,00	
20510919	SD NEGERI 1 PADI	Tulakan	45.000.000,00	5.185.900,00	16.964.100,00	8.481.600,00	
20511025	SD NEGERI 1 TULAKAN	Tulakan	53.100.000,00	14.914.650,00	11.010.000,00	14.301.950,00	
20511091	SD NEGERI 1 WONOANTI	Tulakan	64.800.000,00	14.538.000,00	17.862.000,00	2.934.000,00	
20511084	SD NEGERI 1 WONOSIDI	Tulakan	105.300.000,00	32.887.950,00	19.760.250,00	28.478.850,00	
20511488	SD NEGERI 2 BUBAKAN	Tulakan	42.300.000,00	8.133.000,00	6.451.060,00	10.771.760,00	
20511476	SD NEGERI 2 GASANG	Tulakan	36.000.000,00	5.161.000,00	9.699.700,00	7.991.800,00	
20511508	SD NEGERI 2 JATIGUNUNG	Tulakan	62.100.000,00	14.370.000,00	16.680.000,00	10.702.100,00	
20511507	SD NEGERI 2 JETAK	Tulakan	99.900.000,00	17.782.000,00	26.818.800,00	24.816.500,00	
20511413	SD NEGERI 2 KALIKUNING	Tulakan	114.300.000,00	35.586.500,00	21.563.500,00	25.528.900,00	
20511462	SD NEGERI 2 KETRO	Tulakan	84.600.000,00	22.910.300,00	18.436.500,00	19.320.200,00	
20511461	SD NEGERI 2 KETRO HARJO	Tulakan	75.600.000,00	13.706.800,00	23.692.600,00	20.090.250,00	
20511433	SD NEGERI 2 KLUWIH	Tulakan	26.100.000,00	6.301.700,00	5.425.200,00	5.318.600,00	
20511440	SD NEGERI 2 LOSARI	Tulakan	84.600.000,00	16.527.000,00	23.565.300,00	13.356.860,00	
20510859	SD NEGERI 2 NGILE	Tulakan	64.800.000,00	23.043.000,00	8.120.200,00	21.318.100,00	
20510857	SD NEGERI 2 NGLARAN	Tulakan	42.300.000,00	6.684.440,00	8.642.900,00	5.172.660,00	
20510865	SD NEGERI 2 NGUMBUL	Tulakan	80.100.000,00	23.382.850,00	16.456.500,00	21.717.150,00	
20510918	SD NEGERI 2 PADI	Tulakan	54.000.000,00	13.329.600,00	12.843.400,00	10.163.300,00	
20511024	SD NEGERI 2 TULAKAN	Tulakan	86.400.000,00	15.755.125,00	20.480.400,00	24.646.140,00	
20511090	SD NEGERI 2 WONOANTI	Tulakan	57.600.000,00	10.248.200,00	15.120.100,00	14.316.200,00	
20511083	SD NEGERI 2 WONOSIDI	Tulakan	72.000.000,00	17.618.925,00	16.122.045,00	5.530.945,00	
20511516	SD NEGERI 3 JATIGUNUNG	Tulakan	50.400.000,00	10.119.810,00	13.499.740,00	15.524.310,00	
20511421	SD NEGERI 3 KALIKUNING	Tulakan	54.900.000,00	11.630.176,00	14.840.271,00	4.262.965,00	
20511460	SD NEGERI 3 KETRO	Tulakan	49.500.000,00	7.578.600,00	16.013.800,00	1.650.600,00	
20510856	SD NEGERI 3 NGLARAN	Tulakan	83.700.000,00	15.878.700,00	22.829.250,00	18.634.250,00	
20510864	SD NEGERI 3 NGUMBUL	Tulakan	64.800.000,00	22.648.300,00	9.337.800,00	21.870.900,00	
20510917	SD NEGERI 3 PADI	Tulakan	29.700.000,00	6.177.600,00	8.078.900,00	9.455.500,00	
20511023	SD NEGERI 3 TULAKAN	Tulakan	67.500.000,00	17.302.460,00	12.486.270,00	22.447.820,00	
20511082	SD NEGERI 3 WONOSIDI	Tulakan	48.600.000,00	8.929.150,00	8.201.300,00	5.004.600,00	
20511517	SD NEGERI 4 JATIGUNUNG	Tulakan	54.900.000,00	6.661.250,00	16.547.710,00	20.533.740,00	
20511420	SD NEGERI 4 KALIKUNING	Tulakan	68.400.000,00	16.069.000,00	18.130.000,00	23.374.500,00	
20557632	SD NEGERI 4 KETRO	Tulakan	36.000.000,00	11.972.400,00	5.185.500,00	2.140.200,00	
20511439	SD NEGERI 4 LOSARI	Tulakan	45.900.000,00	10.328.310,00	9.616.920,00	2.739.690,00	
20511071	SD NEGERI 4 WONOSIDI	Tulakan	80.100.000,00	15.329.750,00	15.773.900,00	29.717.250,00	
20557631	SD NEGERI 5 KALIKUNING	Tulakan	75.600.000,00	8.813.200,00	17.702.600,00	17.298.600,00	
20511070	SD NEGERI 5 WONOSIDI	Tulakan	52.200.000,00	8.842.400,00	6.854.200,00	8.811.900,00	
20511496	SD NEGERI BUNGUR	Tulakan	139.500.000,00	25.409.100,00	34.630.950,00	29.276.350,00	
20511267	SD NEGERI 1 BODAG	Ngadirojo	38.700.000,00	8.703.000,00	10.632.200,00	7.334.550,00	
20511381	SD NEGERI 1 BOGOHARJO	Ngadirojo	33.300.000,00	4.398.000,00	8.550.500,00	10.685.000,00	

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20511487	SD NEGERI 1 COKROKEMBANG	Ngadirojo	64.800.000,00	14.356.129,00	17.891.000,00	21.265.071,00	
20511513	SD NEGERI 1 HADILUWIH	Ngadirojo	119.946.000,00	41.982.000,00	6.600.000,00	11.344.000,00	
20511511	SD NEGERI 1 HADIWARNO	Ngadirojo	92.700.000,00	16.444.500,00	22.500.800,00	23.028.600,00	
20510872	SD NEGERI 1 NGADIROJO	Ngadirojo	116.100.000,00	21.283.725,00	23.701.600,00	28.881.300,00	
20510923	SD NEGERI 1 NOGOSARI	Ngadirojo	42.300.000,00	8.867.000,00	11.689.500,00	7.756.900,00	
20510925	SD NEGERI 1 PAGEREJO	Ngadirojo	56.700.000,00	15.862.100,00	12.451.750,00	12.838.850,00	
20510834	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	Ngadirojo	35.100.000,00	3.390.000,00	9.186.524,00	4.466.926,00	
20511048	SD NEGERI 1 TANJUNG LOR	Ngadirojo	90.000.000,00	14.962.500,00	28.406.500,00	24.375.100,00	
20511046	SD NEGERI 1 TANJUNGPURO	Ngadirojo	57.600.000,00	12.906.550,00	15.811.150,00	13.545.800,00	
20511099	SD NEGERI 1 WONOASRI	Ngadirojo	94.500.000,00	8.290.150,00	30.676.950,00	20.711.250,00	
20511089	SD NEGERI 1 WONODADI KULON	Ngadirojo	69.300.000,00	24.445.680,00	9.620.400,00	19.851.220,00	
20511085	SD NEGERI 1 WONODADI WETAN	Ngadirojo	28.800.000,00	7.563.500,00	5.237.000,00	5.827.000,00	
20511201	SD NEGERI 1 WONOKARTO	Ngadirojo	66.600.000,00	9.072.600,00	23.799.100,00	-	
20511200	SD NEGERI 1 WONOSOBO	Ngadirojo	52.200.000,00	19.424.675,00	6.662.400,00	15.247.125,00	
20511256	SD NEGERI 2 BODAG	Ngadirojo	63.000.000,00	26.401.650,00	4.888.500,00	24.550.150,00	
20511506	SD NEGERI 2 BOGOHARJO	Ngadirojo	36.900.000,00	7.862.400,00	9.666.200,00	6.624.200,00	
20511486	SD NEGERI 2 COKROKEMBANG	Ngadirojo	47.700.000,00	13.688.950,00	10.156.700,00	9.809.400,00	
20511512	SD NEGERI 2 HADILUWIH	Ngadirojo	23.400.000,00	4.762.450,00	3.225.950,00	6.894.650,00	
20511510	SD NEGERI 2 HADIWARNO	Ngadirojo	56.700.000,00	21.236.250,00	6.987.100,00	11.426.300,00	
20510871	SD NEGERI 2 NGADIROJO	Ngadirojo	28.800.000,00	5.847.070,00	8.495.750,00	7.255.570,00	
20510922	SD NEGERI 2 NOGOSARI	Ngadirojo	50.400.000,00	10.234.950,00	14.647.750,00	10.144.450,00	
20510926	SD NEGERI 2 PAGEREJO	Ngadirojo	52.200.000,00	11.349.000,00	12.072.300,00	13.256.550,00	
20510841	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	Ngadirojo	38.700.000,00	4.250.000,00	14.098.550,00	11.080.000,00	
20511047	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	Ngadirojo	37.800.000,00	9.018.381,00	5.722.050,00	2.208.000,00	
20511045	SD NEGERI 2 TANJUNGPURO	Ngadirojo	36.900.000,00	4.459.000,00	13.826.300,00	8.529.100,00	
20511096	SD NEGERI 2 WONOASRI	Ngadirojo	73.800.000,00	9.958.600,00	14.053.200,00	17.183.200,00	
20511088	SD NEGERI 2 WONODADI KULON	Ngadirojo	36.000.000,00	9.530.700,00	8.283.200,00	5.669.400,00	
20511093	SD NEGERI 2 WONODADI WETAN	Ngadirojo	26.100.000,00	5.416.500,00	7.588.900,00	7.371.600,00	
20511097	SD NEGERI 2 WONOKARTO	Ngadirojo	60.300.000,00	15.324.400,00	9.306.050,00	23.374.200,00	
20511098	SD NEGERI 2 WONOSOBO	Ngadirojo	44.100.000,00	8.809.000,00	13.025.750,00	15.494.050,00	
20511485	SD NEGERI 3 COKROKEMBANG	Ngadirojo	27.900.000,00	5.926.250,00	5.014.950,00	4.921.020,00	
20510934	SD NEGERI 3 PAGEREJO	Ngadirojo	104.400.000,00	25.184.200,00	25.262.600,00	11.710.300,00	
20510849	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	Ngadirojo	42.300.000,00	6.861.600,00	11.968.700,00	4.031.200,00	
20511087	SD NEGERI 3 WONODADI KULON	Ngadirojo	24.300.000,00	8.462.500,00	3.249.000,00	6.179.900,00	
20511095	SD NEGERI 3 WONOKARTO	Ngadirojo	22.500.000,00	6.291.750,00	4.948.500,00	6.092.550,00	
20510933	SD NEGERI 4 PAGEREJO	Ngadirojo	47.700.000,00	11.784.700,00	11.589.950,00	10.432.950,00	
20510848	SD NEGERI 4 SIDOMULYO	Ngadirojo	125.100.000,00	17.425.450,00	21.202.050,00	30.353.250,00	
20511086	SD NEGERI 4 WONODADI KULON	Ngadirojo	58.500.000,00	10.886.550,00	15.855.140,00	7.312.260,00	
20510847	SD NEGERI 5 SIDOMULYO	Ngadirojo	63.000.000,00	9.447.400,00	7.637.962,00	4.160.624,00	

NPSN	NAMA SEKOAH	KECAMATAN	PENERIMAAN				
			JUMLAH	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
				BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	4	14	18	22	30	34
20511501	SD NEGERI CANGKRING	Ngadirojo	62.100.000,00	11.744.950,00	6.530.150,00	10.580.650,00	
20511203	SD NEGERI WIYORO	Ngadirojo	81.900.000,00	16.430.200,00	18.959.000,00	18.159.100,00	
20510819	SD NEGERI 1 GUNUNGREJO	Sudimoro	97.200.000,00	23.121.500,00	22.367.500,00	5.560.500,00	
20511449	SD NEGERI 1 KARANGMULYO	Sudimoro	126.900.000,00	19.113.200,00	40.642.350,00	29.097.350,00	
20511451	SD NEGERI 1 KETANGGUNG	Sudimoro	110.700.000,00	20.831.500,00	26.262.400,00	25.956.250,00	
20511442	SD NEGERI 1 KLEPU	Sudimoro	126.900.000,00	25.479.500,00	17.074.500,00	22.368.000,00	
20510932	SD NEGERI 1 PAGERKIDUL	Sudimoro	60.300.000,00	13.866.600,00	16.261.000,00	16.966.600,00	
20510930	SD NEGERI 1 PAGERLOR	Sudimoro	52.200.000,00	4.559.500,00	8.605.500,00	12.471.500,00	
20511495	SD NEGERI 1 SEMBOWO	Sudimoro	50.400.000,00	6.143.800,00	16.662.650,00	10.303.900,00	
20510830	SD NEGERI 1 SUDIMORO	Sudimoro	189.900.000,00	45.684.200,00	31.143.200,00	38.753.900,00	
20510829	SD NEGERI 1 SUKOREJO	Sudimoro	76.500.000,00	18.556.550,00	14.641.850,00	14.825.250,00	
20510828	SD NEGERI 1 SUMBEREJO	Sudimoro	76.500.000,00	15.077.500,00	16.727.300,00	22.376.100,00	
20510816	SD NEGERI 2 GUNUNGREJO	Sudimoro	77.400.000,00	10.656.700,00	26.576.400,00	10.517.000,00	
20511448	SD NEGERI 2 KARANGMULYO	Sudimoro	106.200.000,00	8.877.100,00	32.351.175,00	37.121.175,00	
20511450	SD NEGERI 2 KETANGGUNG	Sudimoro	92.700.000,00	10.241.500,00	35.914.500,00	21.114.500,00	
20537132	SD NEGERI 2 KLEPU	Sudimoro	63.900.000,00	12.069.900,00	14.764.850,00	15.754.100,00	
20510931	SD NEGERI 2 PAGERKIDUL	Sudimoro	70.200.000,00	23.690.100,00	11.343.500,00	20.255.800,00	
20510929	SD NEGERI 2 PAGERLOR	Sudimoro	77.400.000,00	6.396.000,00	14.550.500,00	8.945.000,00	
20511426	SD NEGERI 2 SEMBOWO	Sudimoro	54.900.000,00	20.948.050,00	6.501.800,00	18.653.150,00	
20510818	SD NEGERI 2 SUDIMORO	Sudimoro	69.300.000,00	9.696.000,00	16.943.000,00	18.908.700,00	
20510827	SD NEGERI 2 SUKOREJO	Sudimoro	95.400.000,00	19.565.550,00	19.562.000,00	30.096.350,00	
20510826	SD NEGERI 2 SUMBEREJO	Sudimoro	86.400.000,00	12.808.700,00	26.198.300,00	8.433.900,00	
20511427	SD NEGERI 3 KLEPU	Sudimoro	23.400.000,00	2.463.400,00	9.235.600,00	5.581.200,00	
20510928	SD NEGERI 3 PAGERLOR	Sudimoro	57.600.000,00	5.231.800,00	11.106.950,00	6.383.200,00	
20510817	SD NEGERI 3 SUDIMORO	Sudimoro	76.500.000,00	14.725.400,00	14.055.300,00	11.939.300,00	

Lampiran 2/Jenjang SD 1.1

REKAPITULASI REALISASI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD
TAHUN 2025

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
		757.662.795,00	**663.492.455,00**	**26.023.240.152,00**	**1.597.551.950,00**	**119.678.798,00**	**1.595.086,00**	**121.273.884,00**
20511270	SD NEGERI 1 BELAH	11.933.870,00	4.019.300,00	99.201.720,00	22.500.000,00	698.280,00	-	698.280,00
20511500	SD NEGERI 1 CEMENG	21.433.000,00	10.931.300,00	36.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511469	SD NEGERI 1 DONOROJO	21.764.040,00	-	120.413.850,00	-	186.150,00	-	186.150,00
20511478	SD NEGERI 1 GEDOMPOL	18.948.800,00	22.500.000,00	46.699.800,00	22.500.000,00	100.200,00	-	100.200,00
20511539	SD NEGERI 1 GENDARAN	17.032.900,00	-	60.300.000,00	-	-	-	-
20511405	SD NEGERI 1 KALAK	5.270.800,00	-	31.500.000,00	-	-	-	-
20551732	SD NEGERI 1 KLEPU	17.929.500,00	-	45.738.100,00	-	161.900,00	-	161.900,00
20510776	SD NEGERI 1 SAWAHAN	10.096.200,00	-	33.300.000,00	-	-	-	-
20510784	SD NEGERI 1 SEKAR	12.217.600,00	-	49.173.700,00	-	326.300,00	-	326.300,00
20510839	SD NEGERI 1 SENDANG	24.296.786,00	22.500.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510812	SD NEGERI 1 SUKODONO	38.479.442,00	-	78.154.180,00	-	145.820,00	-	145.820,00
20511033	SD NEGERI 1 WIDORO	10.623.900,00	11.031.300,00	23.400.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511269	SD NEGERI 2 BELAH	21.804.240,00	-	73.380.580,00	-	1.319.420,00	-	1.319.420,00
20511499	SD NEGERI 2 CEMENG	15.826.000,00	-	33.300.000,00	-	-	-	-
20511468	SD NEGERI 2 DONOROJO	20.145.444,00	-	52.873.376,00	-	226.624,00	-	226.624,00
20511477	SD NEGERI 2 GEDOMPOL	21.318.600,00	-	36.900.000,00	-	-	-	-
20511547	SD NEGERI 2 GENDARAN	3.407.600,00	4.309.500,00	34.200.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511404	SD NEGERI 2 KALAK	11.839.050,00	-	83.700.000,00	-	-	-	-
20511431	SD NEGERI 2 KLEPU	14.186.700,00	2.939.000,00	46.778.000,00	22.500.000,00	22.000,00	-	22.000,00
20510778	SD NEGERI 2 SAWAHAN	5.163.200,00	-	24.293.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00
20510783	SD NEGERI 2 SEKAR	2.631.600,00	-	48.600.000,00	-	-	-	-
20510838	SD NEGERI 2 SENDANG	11.060.170,00	-	23.400.000,00	-	-	-	-
20510820	SD NEGERI 2 SUKODONO	14.106.143,00	-	26.981.727,00	-	18.273,00	-	18.273,00
20511022	SD NEGERI 2 WIDORO	42.825.100,00	-	90.891.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
20511268	SD NEGERI 3 BELAH	15.034.500,00	-	32.400.000,00	-	-	-	-
20511498	SD NEGERI 3 CEMENG	2.556.000,00	-	24.300.000,00	-	-	-	-
20511467	SD NEGERI 3 DONOROJO	9.125.150,00	-	35.079.800,00	-	20.200,00	-	20.200,00
20511466	SD NEGERI 3 GEDOMPOL	21.509.340,00	22.500.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20551733	SD NEGERI 3 KLEPU	-	-	15.101.000,00	-	10.099.000,00	-	10.099.000,00
20510837	SD NEGERI 3 SENDANG	3.777.870,00	-	42.300.000,00	-	-	-	-
20510821	SD NEGERI 3 SUKODONO	17.292.600,00	12.131.300,00	41.362.609,00	22.500.000,00	37.391,00	-	37.391,00
20511428	SD NEGERI 4 KLEPU	16.949.020,00	2.472.000,00	80.866.080,00	22.500.000,00	133.920,00	-	133.920,00

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20511494	SD NEGERI 1 BOMO	11.196.810,00	6.650.295,00	49.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511540	SD NEGERI 1 GONDOSARI	7.281.300,00	-	70.200.000,00	-	-	-	-
20511434	SD NEGERI 1 MANTREN	9.777.145,00	-	45.900.000,00	-	-	-	-
20510881	SD NEGERI 1 MENDOLO KIDUL	20.308.660,00	-	34.129.800,00	-	70.200,00	-	70.200,00
20510879	SD NEGERI 1 MENDOLO LOR	24.768.745,00	4.834.000,00	63.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510911	SD NEGERI 1 PITON	7.980.830,00	-	55.460.500,00	-	339.500,00	-	339.500,00
20510907	SD NEGERI 1 PLOSO	15.304.320,00	-	86.400.000,00	-	-	-	-
20510802	SD NEGERI 1 PUNUNG	20.884.970,00	-	93.553.780,00	-	46.220,00	-	46.220,00
20510832	SD NEGERI 1 SOOKA	10.317.715,00	22.500.000,00	29.649.694,00	22.500.000,00	50.306,00	-	50.306,00
20511054	SD NEGERI 1 TINATAR	33.642.495,00	-	67.500.000,00	-	-	-	-
20511493	SD NEGERI 2 BOMO	3.096.360,00	-	53.953.560,00	-	46.440,00	-	46.440,00
20511528	SD NEGERI 2 GONDOSARI	2.616.000,00	-	37.800.000,00	-	-	-	-
20511423	SD NEGERI 2 MANTREN	35.648.700,00	-	49.500.000,00	-	-	-	-
20510880	SD NEGERI 2 MENDOLO KIDUL	15.172.760,00	10.751.300,00	30.600.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510878	SD NEGERI 2 MENDOLO LOR	4.722.510,00	-	40.500.000,00	-	-	-	-
20510910	SD NEGERI 2 PITON	22.562.260,00	6.224.820,00	48.490.065,00	22.500.000,00	109.935,00	-	109.935,00
20510895	SD NEGERI 2 PLOSO	9.229.600,00	-	50.400.000,00	-	-	-	-
20510791	SD NEGERI 2 PUNUNG	22.566.450,00	-	40.484.900,00	-	15.100,00	-	15.100,00
20510831	SD NEGERI 2 SOOKA		10.811.300,00	24.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511043	SD NEGERI 2 TINATAR		22.500.000,00	72.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511492	SD NEGERI 3 BOMO		-	34.281.180,00	-	818.820,00	-	818.820,00
20511527	SD NEGERI 3 GONDOSARI		-	96.300.000,00	-	-	-	-
20510799	SD NEGERI 3 PLOSO		-	63.900.000,00	-	-	-	-
20510790	SD NEGERI 3 PUNUNG		-	53.834.834,00	-	165.166,00	-	165.166,00
20511042	SD NEGERI 3 TINATAR		-	15.464.000,00	-	6.136.000,00	-	6.136.000,00
20510797	SD NEGERI 4 PLOSO		6.337.150,00	45.900.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510788	SD NEGERI 4 PUNUNG		-	90.900.000,00	-	-	-	-
20510775	SD NEGERI 6 PUNUNG		-	29.694.350,00	-	5.650,00	-	5.650,00
20511397	SD NEGERI KEBONSARI		-	66.600.000,00	-	-	-	-
20511452	SD NEGERI KENDAL		-	63.900.000,00	-	-	-	-
20511039	SD NEGERI WARENG		-	67.378.419,00	-	121.581,00	-	121.581,00
20511505	SD NEGERI 1 CANDI		-	21.180.400,00	-	5.819.600,00	-	5.819.600,00
20511473	SD NEGERI 1 DADAPAN		-	37.667.000,00	-	133.000,00	-	133.000,00
20511471	SD NEGERI 1 DERSONO		-	77.327.980,00	-	72.020,00	-	72.020,00
20511546	SD NEGERI 1 GLINGGANGAN		-	30.957.630,00	-	6.842.370,00	-	6.842.370,00
20511407	SD NEGERI 1 JLUBANG		-	52.156.800,00	-	43.200,00	-	43.200,00
20510902	SD NEGERI 1 PELEM		-	57.597.360,00	-	2.640,00	-	2.640,00
20510793	SD NEGERI 1 PRINGKUKU		-	44.072.000,00	-	28.000,00	-	28.000,00
20510815	SD NEGERI 1 SUGIHWARAS		-	24.300.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20511062	SD NEGERI 1 TAMANASRI		-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511504	SD NEGERI 2 CANDI		-	49.030.700,00	-	469.300,00	-	469.300,00
20511474	SD NEGERI 2 DADAPAN		-	51.279.000,00	22.500.000,00	21.000,00	-	21.000,00
20511470	SD NEGERI 2 DERSONO		-	20.665.600,00	-	34.400,00	-	34.400,00
20511545	SD NEGERI 2 GLINGGANGAN		-	50.198.400,00	-	201.600,00	2.520,00	204.120,00
20511406	SD NEGERI 2 JLUBANG		-	43.740.000,00	-	360.000,00	-	360.000,00
20510903	SD NEGERI 2 PELEM		-	54.742.802,00	-	1.057.198,00	-	1.057.198,00
20510792	SD NEGERI 2 PRINGKUKU		-	32.400.000,00	-	-	-	-
20510814	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS		-	26.100.000,00	-	-	-	-
20511051	SD NEGERI 2 TAMANASRI		-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511503	SD NEGERI 3 CANDI		-	28.800.000,00	-	-	-	-
20511472	SD NEGERI 3 DERSONO		-	42.888.930,00	-	311.070,00	-	311.070,00
20511544	SD NEGERI 3 GLINGGANGAN		-	30.590.250,00	-	9.750,00	-	9.750,00
20510901	SD NEGERI 3 PELEM		-	51.298.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
20510800	SD NEGERI 3 PRINGKUKU		-	25.200.000,00	-	-	-	-
20511502	SD NEGERI 4 CANDI		-	30.600.000,00	-	-	-	-
20555437	SD NEGERI NGADIREJAN		-	116.100.000,00	-	-	-	-
20510795	SD NEGERI POKO		-	52.200.000,00	-	-	-	-
20510843	SD NEGERI SOBO		-	52.050.178,00	-	149.822,00	-	149.822,00
20511038	SD NEGERI WATU KARUNG		1.232.000,00	82.782.600,00	22.500.000,00	17.400,00	-	17.400,00
20511264	SD NEGERI 1 BALEHARJO		-	80.809.490,00	-	28.090.510,00	-	28.090.510,00
20511391	SD NEGERI 1 KAYEN		-	68.395.680,00	-	4.320,00	-	4.320,00
20510909	SD NEGERI 1 PLOSO		-	240.300.000,00	-	-	-	-
20510771	SD NEGERI 1 SAMBONG		-	27.900.000,00	-	-	-	-
20510786	SD NEGERI 1 SEDENG		6.532.480,00	57.600.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510846	SD NEGERI 1 SIRNOBOYO		-	54.000.000,00	-	-	10,00	10,00
20511050	SD NEGERI 1 TAMBAKREJO		585.000,00	63.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511263	SD NEGERI 2 BALEHARJO		-	305.917.560,00	-	82.440,00	-	82.440,00
20511392	SD NEGERI 2 KAYEN		-	43.200.000,00	-	-	-	-
20510906	SD NEGERI 2 PLOSO		-	40.251.400,00	-	12.848.600,00	-	12.848.600,00
20510770	SD NEGERI 2 SAMBONG		-	65.571.237,00	-	128.763,00	-	128.763,00
20510785	SD NEGERI 2 SEDENG		-	66.273.215,00	-	326.785,00	-	326.785,00
20510845	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO		3.965.000,00	132.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511049	SD NEGERI 2 TAMBAKREJO		-	34.200.000,00	-	-	-	-
20510844	SD NEGERI 3 SIRNOBOYO		-	57.507.400,00	-	92.600,00	-	92.600,00
20511276	SD NEGERI ARJOWINANGUN		-	177.266.144,00	-	33.856,00	-	33.856,00
20555436	SD NEGERI BANGUNSARI		8.468.800,00	166.500.000,00	22.500.000,00	-	77.291,00	77.291,00
20511271	SD NEGERI BANJARSARI		-	55.800.000,00	-	-	-	-
20537131	SD NEGERI BOLOSINGO		-	81.000.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20511394	SD NEGERI KEMBANG		-	67.457.834,00	-	42.166,00	-	42.166,00
20510894	SD NEGERI MENADI		-	97.164.390,00	-	35.610,00	-	35.610,00
20510877	SD NEGERI MENTORO		-	106.200.000,00	-	-	-	-
20510892	SD NEGERI NANGGUNGAN		-	101.662.000,00	-	38.000,00	-	38.000,00
20510921	SD NEGERI PACITAN		-	437.400.000,00	-	-	-	-
20510794	SD NEGERI PONGGOK		-	76.492.982,00	-	7.018,00	-	7.018,00
20510805	SD NEGERI PUCANGSEWU		-	109.788.320,00	-	11.680,00	-	11.680,00
20510772	SD NEGERI PURWOREJO		-	73.800.000,00	-	-	-	-
20510782	SD NEGERI SEMANTEN		-	32.400.000,00	-	-	-	-
20510836	SD NEGERI SIDOHARJO		9.329.800,00	79.089.230,00	22.500.000,00	110.770,00	-	110.770,00
20510813	SD NEGERI SUKOHARJO		-	80.861.050,00	-	138.950,00	-	138.950,00
20510825	SD NEGERI SUMBERHARJO		-	60.299.100,00	-	900,00	-	900,00
20511044	SD NEGERI TANJUNGSARI		-	61.179.561,00	-	20.439,00	-	20.439,00
20511034	SD NEGERI WIDORO		-	81.868.551,00	-	31.449,00	-	31.449,00
20511484	SD NEGERI 1 GAWANG		-	32.400.000,00	-	-	-	-
20511537	SD NEGERI 1 GEMBUK		-	45.000.000,00	-	-	-	-
20511418	SD NEGERI 1 KARANGANYAR		5.560.500,00	24.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511402	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO		-	43.200.000,00	-	-	-	-
20511384	SD NEGERI 1 KATIPUGAL		-	39.567.008,00	-	32.992,00	-	32.992,00
20511447	SD NEGERI 1 KETEPUNG		-	99.000.000,00	-	-	-	-
20511455	SD NEGERI 1 KETRO		152.000,00	104.336.100,00	22.500.000,00	63.900,00	-	63.900,00
20511425	SD NEGERI 1 KLESEM		-	44.082.900,00	-	17.100,00	-	17.100,00
20510804	SD NEGERI 1 PUNJUNG		-	27.900.000,00	-	-	-	-
20510774	SD NEGERI 1 PURWOASRI		-	59.669.000,00	-	631.000,00	-	631.000,00
20510769	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN		-	27.900.000,00	-	-	-	-
20510833	SD NEGERI 1 SIDOMULYO		8.598.900,00	33.291.380,00	22.500.000,00	8.620,00	-	8.620,00
20511094	SD NEGERI 1 WONOGONDO		-	105.280.800,00	-	19.200,00	-	19.200,00
20511069	SD NEGERI 1 WORAWARI		-	64.800.000,00	-	-	-	-
20511483	SD NEGERI 2 GAWANG		-	41.341.405,00	-	58.595,00	-	58.595,00
20511538	SD NEGERI 2 GEMBUK		-	85.440.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
20511417	SD NEGERI 2 KARANGANYAR		-	26.997.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
20511401	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO		-	55.798.550,00	-	1.450,00	-	1.450,00
20511383	SD NEGERI 2 KATIPUGAL		-	65.700.000,00	-	-	-	-
20511446	SD NEGERI 2 KETEPUNG		-	71.959.000,00	-	41.000,00	-	41.000,00
20511463	SD NEGERI 2 KETRO		-	33.129.685,00	-	170.315,00	-	170.315,00
20511424	SD NEGERI 2 KLESEM		-	117.000.000,00	-	-	-	-
20510803	SD NEGERI 2 PUNJUNG		-	16.200.000,00	-	-	-	-
20510773	SD NEGERI 2 PURWOASRI		-	65.438.000,00	-	262.000,00	-	262.000,00
20510768	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN		-	69.300.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20510842	SD NEGERI 2 SIDOMULYO		-	120.136.200,00	-	463.800,00	-	463.800,00
20511202	SD NEGERI 2 WONOGONDO		-	54.878.223,00	-	21.777,00	-	21.777,00
20511068	SD NEGERI 2 WORAWARI		-	99.792.375,00	-	107.625,00	-	107.625,00
20510850	SD NEGERI 3 SIDOMULYO		2.694.200,00	45.900.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511272	SD NEGERI BANJARJO		-	82.800.000,00	-	-	-	-
20511419	SD NEGERI KALIPELUS		-	133.143.900,00	-	56.100,00	-	56.100,00
20511400	SD NEGERI KEBONAGUNG		-	44.698.240,00	-	301.760,00	-	301.760,00
20511435	SD NEGERI MANTREN		-	63.900.000,00	-	-	-	-
20510796	SD NEGERI PLUMBUNGAN		-	49.500.000,00	-	-	-	-
20511491	SD NEGERI 1 BORANG		-	38.410.400,00	-	289.600,00	-	289.600,00
20511530	SD NEGERI 1 GEMBONG		-	82.539.544,00	-	260.456,00	-	260.456,00
20511526	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI		-	82.401.000,00	-	399.000,00	-	399.000,00
20511409	SD NEGERI 1 JETISKIDUL		-	78.300.000,00	-	-	-	-
20511416	SD NEGERI 1 KARANGGEDE		-	71.087.244,00	-	12.756,00	-	12.756,00
20511390	SD NEGERI 1 KARANGREJO		13.721.700,00	51.209.202,00	22.500.000,00	90.798,00	-	90.798,00
20511396	SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO		-	55.796.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
20510876	SD NEGERI 1 MLATI		-	92.700.000,00	-	-	-	-
20510779	SD NEGERI 1 SEDAYU		-	80.702.590,00	-	297.410,00	-	297.410,00
20511058	SD NEGERI 1 TEMON		-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511490	SD NEGERI 2 BORANG		-	50.400.000,00	-	-	-	-
20511529	SD NEGERI 2 GEMBONG		-	9.900.000,00	-	-	-	-
20511515	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI		-	35.913.900,00	-	86.100,00	-	86.100,00
20511408	SD NEGERI 2 JETISKIDUL		-	23.400.000,00	-	-	-	-
20511415	SD NEGERI 2 KARANGGEDE		-	40.480.380,00	-	19.620,00	-	19.620,00
20511389	SD NEGERI 2 KARANGREJO		-	63.230.384,00	-	669.616,00	-	669.616,00
20511395	SD NEGERI 2 KEDUNGBENDO		-	17.992.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00
20510875	SD NEGERI 2 MLATI		-	60.216.460,00	-	83.540,00	-	83.540,00
20510787	SD NEGERI 2 SEDAYU		-	59.118.950,00	-	-	-	-
20511057	SD NEGERI 2 TEMON		3.057.300,00	89.749.200,00	22.500.000,00	250.800,00	-	250.800,00
20511514	SD NEGERI 3 GUNUNGSARI		-	7.200.000,00	-	-	-	-
20511414	SD NEGERI 3 KARANGGEDE		-	27.877.904,00	-	22.096,00	-	22.096,00
20511436	SD NEGERI 3 MANGUNHARJO		-	13.500.000,00	-	-	-	-
20510874	SD NEGERI 3 MLATI		-	17.100.000,00	-	-	-	-
20511056	SD NEGERI 3 TEMON		22.500.000,00	35.100.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511403	SD NEGERI 4 KARANGGEDE		-	19.736.752,00	-	63.248,00	-	63.248,00
20511055	SD NEGERI 4 TEMON		-	20.615.200,00	-	84.800,00	198.650,00	283.450,00
20511288	SD NEGERI ARJOSARI		-	124.080.657,00	-	119.343,00	-	119.343,00
20511482	SD NEGERI GAYUHAN		-	76.493.200,00	-	6.800,00	-	6.800,00
20511536	SD NEGERI GEGERAN		10.041.800,00	63.900.000,00	22.500.000,00	-	1.070.110,00	1.070.110,00

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20555441	SD NEGERI JATIMALANG		10.811.300,00	92.692.800,00	22.500.000,00	7.200,00	-	7.200,00
20555439	SD NEGERI MANGUNHARJO		-	55.756.450,00	-	43.550,00	-	43.550,00
20510927	SD NEGERI PAGUTAN		-	72.888.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00
20511026	SD NEGERI TREMAS		22.500.000,00	145.640.900,00	22.500.000,00	159.100,00	-	159.100,00
20511543	SD NEGERI 1 GONDANG		-	77.632.186,00	-	1.567.814,00	-	1.567.814,00
20511422	SD NEGERI 1 JETIS LOR		22.500.000,00	73.558.406,00	22.500.000,00	241.594,00	-	241.594,00
20510882	SD NEGERI 1 MUJING		-	100.255.400,00	-	544.600,00	-	544.600,00
20510891	SD NEGERI 1 NAWANGAN		10.742.300,00	173.659.000,00	22.500.000,00	41.000,00	-	41.000,00
20510869	SD NEGERI 1 NGROMO		-	40.387.806,00	-	112.194,00	-	112.194,00
20510916	SD NEGERI 1 PAKIS BARU		926.000,00	76.433.600,00	22.500.000,00	66.400,00	-	66.400,00
20510900	SD NEGERI 1 PENGGUNG		779.500,00	27.900.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510781	SD NEGERI 1 SEMPU		2.221.400,00	88.058.658,00	22.500.000,00	141.342,00	-	141.342,00
20511041	SD NEGERI 1 TOKAWI		-	79.200.000,00	-	-	-	-
20511542	SD NEGERI 2 GONDANG		-	84.600.000,00	-	-	-	-
20511411	SD NEGERI 2 JETIS LOR		-	44.100.000,00	-	-	-	-
20510883	SD NEGERI 2 MUJING		-	108.900.000,00	-	-	-	-
20510889	SD NEGERI 2 NAWANGAN		-	35.100.000,00	-	-	-	-
20510868	SD NEGERI 2 NGROMO		-	90.828.800,00	22.500.000,00	71.200,00	-	71.200,00
20510915	SD NEGERI 2 PAKIS BARU		-	81.900.000,00	-	-	-	-
20510899	SD NEGERI 2 PENGGUNG		-	52.200.000,00	-	-	-	-
20510780	SD NEGERI 2 SEMPU		-	62.071.100,00	-	28.900,00	-	28.900,00
20511030	SD NEGERI 2 TOKAWI		-	95.400.000,00	-	-	-	-
20511541	SD NEGERI 3 GONDANG		-	86.914.560,00	-	1.285.440,00	-	1.285.440,00
20511410	SD NEGERI 3 JETIS LOR		-	24.300.000,00	-	-	-	-
20510893	SD NEGERI 3 MUJING		12.131.300,00	48.595.078,00	22.500.000,00	4.922,00	-	4.922,00
20510887	SD NEGERI 3 NAWANGAN		-	82.800.000,00	-	-	-	-
20510867	SD NEGERI 3 NGROMO		-	62.100.000,00	-	-	-	-
20510914	SD NEGERI 3 PAKIS BARU		12.131.300,00	28.800.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510898	SD NEGERI 3 PENGGUNG		-	85.500.000,00	-	-	-	-
20510851	SD NEGERI 3 SEMPU		-	70.200.000,00	-	-	-	-
20511029	SD NEGERI 3 TOKAWI		-	83.700.000,00	-	-	-	-
20510886	SD NEGERI 4 NAWANGAN		-	25.200.000,00	-	-	-	-
20510897	SD NEGERI 4 PENGGUNG		-	99.000.000,00	-	-	-	-
20510840	SD NEGERI 4 SEMPU		-	26.969.570,00	-	30.430,00	-	30.430,00
20511028	SD NEGERI 4 TOKAWI		-	110.700.000,00	-	-	-	-
20510885	SD NEGERI 5 NAWANGAN		-	11.700.000,00	-	-	-	-
20555440	SD NEGERI 1 BANDAR		9.655.000,00	117.899.599,00	22.500.000,00	401,00	1,00	402,00
20511257	SD NEGERI 1 BANGUNSARI		-	72.899.731,00	-	269,00	-	269,00
20511523	SD NEGERI 1 JERUK		-	94.500.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20511459	SD NEGERI 1 KLEDUNG		-	66.600.000,00	-	-	-	-
20510863	SD NEGERI 1 NGUNUT		-	50.197.000,00	-	203.000,00	-	203.000,00
20510896	SD NEGERI 1 PETUNGSINARANG		-	57.600.000,00	-	-	-	-
20511031	SD NEGERI 1 TUMPUK		-	52.200.000,00	-	-	-	-
20511037	SD NEGERI 1 WATUPATOK		9.144.100,00	113.399.740,00	22.500.000,00	260,00	-	260,00
20511261	SD NEGERI 2 BANDAR		-	75.600.000,00	-	-	-	-
20511274	SD NEGERI 2 BANGUNSARI		-	65.525.000,00	-	1.975.000,00	-	1.975.000,00
20511522	SD NEGERI 2 JERUK		-	80.083.776,00	-	16.224,00	-	16.224,00
20511458	SD NEGERI 2 KLEDUNG		-	51.300.000,00	-	-	-	-
20510852	SD NEGERI 2 NGUNUT		-	60.297.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
20510904	SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG		-	45.900.000,00	-	-	-	-
20511032	SD NEGERI 2 TUMPUK		-	64.300.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
20511036	SD NEGERI 2 WATUPATOK		9.989.500,00	61.197.000,00	22.500.000,00	3.000,00	-	3.000,00
20511260	SD NEGERI 3 BANDAR		-	63.900.000,00	-	-	-	-
20511273	SD NEGERI 3 BANGUNSARI		-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511521	SD NEGERI 3 JERUK		-	148.958.952,00	-	441.048,00	-	441.048,00
20511457	SD NEGERI 3 KLEDUNG		-	30.600.000,00	-	-	-	-
20510935	SD NEGERI 3 NGUNUT		-	59.400.000,00	-	-	-	-
20510905	SD NEGERI 3 PETUNGSINARANG		-	34.200.000,00	-	-	-	-
20511040	SD NEGERI 3 TUMPUK		-	44.457.660,00	-	542.340,00	-	542.340,00
20511035	SD NEGERI 3 WATUPATOK		-	20.700.000,00	-	-	-	-
20511520	SD NEGERI 4 JERUK		3.390.300,00	61.200.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510924	SD NEGERI 4 NGUNUT		-	76.500.000,00	-	-	-	-
20510913	SD NEGERI 4 PETUNGSINARANG		10.708.760,00	124.200.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511258	SD NEGERI 5 BANDAR		2.122.400,00	86.400.000,00	22.500.000,00	-	504,00	504,00
20511519	SD NEGERI 5 JERUK		14.442.400,00	31.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510912	SD NEGERI 5 PETUNGSINARANG		-	43.157.000,00	-	43.000,00	-	43.000,00
20511480	SD NEGERI 1 GEDANGAN		-	79.200.000,00	-	-	-	-
20511535	SD NEGERI 1 GEMAHARJO		-	82.799.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
20511388	SD NEGERI 1 KASIHAN		-	91.800.000,00	-	-	-	-
20511399	SD NEGERI 1 KEBONDALEM		12.131.300,00	74.700.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511393	SD NEGERI 1 KEMUNING		5.862.000,00	60.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510855	SD NEGERI 1 NGRECO		-	42.300.000,00	-	-	-	-
20510908	SD NEGERI 1 PLOSO		22.500.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510801	SD NEGERI 1 PUCANGOMBO		-	55.800.000,00	-	-	-	-
20510823	SD NEGERI 1 TAHUNAN		-	45.900.000,00	-	-	-	-
20510824	SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU		-	112.500.000,00	-	-	-	-
20511052	SD NEGERI 1 TEGALOMBO		-	92.676.741,00	-	23.259,00	-	23.259,00
20511479	SD NEGERI 2 GEDANGAN		-	94.500.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20511534	SD NEGERI 2 GEMAHARJO		-	33.300.000,00	-	-	-	-
20511387	SD NEGERI 2 KASIHAN		-	63.900.000,00	-	-	-	-
20511398	SD NEGERI 2 KEBONDALEM		-	68.400.000,00	-	-	-	-
20511382	SD NEGERI 2 KEMUNING		4.745.000,00	46.800.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510854	SD NEGERI 2 NGRECO		-	52.200.000,00	-	-	-	-
20510810	SD NEGERI 2 PLOSO		-	97.200.000,00	-	-	-	-
20510809	SD NEGERI 2 PUCANGOMBO		-	36.000.000,00	-	-	-	-
20510822	SD NEGERI 2 TAHUNAN		22.500.000,00	40.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510811	SD NEGERI 2 TAHUNAN BARU		22.500.000,00	41.400.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511053	SD NEGERI 2 TEGALOMBO		4.230.800,00	64.782.000,00	22.500.000,00	18.000,00	-	18.000,00
20511533	SD NEGERI 3 GEMAHARJO		12.183.250,00	119.700.000,00	22.551.950,00	-	-	-
20511386	SD NEGERI 3 KASIHAN		-	53.100.000,00	-	-	-	-
20511465	SD NEGERI 3 KEMUNING		-	27.000.000,00	-	-	-	-
20510853	SD NEGERI 3 NGRECO		11.212.400,00	70.200.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510798	SD NEGERI 3 PLOSO		-	75.600.000,00	-	-	-	-
20510808	SD NEGERI 3 PUCANGOMBO		-	81.000.000,00	-	-	-	-
20510936	SD NEGERI 3 TAHUNAN		-	53.100.000,00	-	-	-	-
20555442	SD NEGERI 3 TEGALOMBO		860.000,00	71.100.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511532	SD NEGERI 4 GEMAHARJO		-	88.494.526,00	-	605.474,00	-	605.474,00
20511385	SD NEGERI 4 KASIHAN		-	41.400.000,00	-	-	-	-
20511453	SD NEGERI 4 KEMUNING		7.881.300,00	71.100.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20510861	SD NEGERI 4 NGRECO		-	13.500.000,00	-	-	-	-
20510807	SD NEGERI 4 PUCANGOMBO		-	78.300.000,00	-	-	-	-
20511060	SD NEGERI 4 TEGALOMBO		-	22.500.000,00	-	-	-	-
20511531	SD NEGERI 5 GEMAHARJO		-	26.971.000,00	-	29.000,00	-	29.000,00
20510862	SD NEGERI 5 NGRECO		-	35.067.500,00	-	32.500,00	-	32.500,00
20510806	SD NEGERI 5 PUCANGOMBO		-	22.500.000,00	-	-	-	-
20510870	SD NEGERI 6 NGRECO		-	59.400.000,00	-	-	-	-
20511489	SD NEGERI 1 BUBAKAN		-	139.500.000,00	-	-	-	-
20511475	SD NEGERI 1 GASANG		-	85.188.000,00	-	312.000,00	-	312.000,00
20511509	SD NEGERI 1 JATIGUNUNG		-	108.882.500,00	-	17.500,00	-	17.500,00
20511518	SD NEGERI 1 JETAK		-	88.200.000,00	-	-	-	-
20511412	SD NEGERI 1 KALIKUNING		-	73.800.000,00	-	-	-	-
20511454	SD NEGERI 1 KETRO		-	122.400.000,00	-	-	-	-
20511464	SD NEGERI 1 KETRO HARJO		-	83.194.050,00	-	505.950,00	-	505.950,00
20511432	SD NEGERI 1 KLUWIH		-	89.100.000,00	-	-	-	-
20511441	SD NEGERI 1 LOSARI		-	74.700.000,00	-	-	-	-
20510860	SD NEGERI 1 NGILE		-	61.034.350,00	-	165.650,00	-	165.650,00
20510858	SD NEGERI 1 NGLARAN		-	54.900.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20510866	SD NEGERI 1 NGUMBUL		-	62.100.000,00	-	-	-	-
20510919	SD NEGERI 1 PADI		-	45.000.000,00	-	-	-	-
20511025	SD NEGERI 1 TULAKAN		-	53.100.000,00	-	-	-	-
20511091	SD NEGERI 1 WONOANTI		-	64.800.000,00	-	-	-	-
20511084	SD NEGERI 1 WONOSIDI		-	105.300.000,00	-	-	-	-
20511488	SD NEGERI 2 BUBAKAN		-	42.300.000,00	-	-	-	-
20511476	SD NEGERI 2 GASANG		-	36.000.000,00	-	-	-	-
20511508	SD NEGERI 2 JATIGUNUNG		-	62.100.000,00	-	-	-	-
20511507	SD NEGERI 2 JETAK		-	99.900.000,00	-	-	-	-
20511413	SD NEGERI 2 KALIKUNING		-	114.300.000,00	-	-	-	-
20511462	SD NEGERI 2 KETRO		-	84.600.000,00	-	-	-	-
20511461	SD NEGERI 2 KETRO HARJO		-	74.235.600,00	-	1.364.400,00	-	1.364.400,00
20511433	SD NEGERI 2 KLUWIH		-	26.100.000,00	-	-	-	-
20511440	SD NEGERI 2 LOSARI		-	84.600.000,00	-	-	-	-
20510859	SD NEGERI 2 NGILE		-	64.800.000,00	-	-	-	-
20510857	SD NEGERI 2 NGLARAN		-	42.300.000,00	-	-	-	-
20510865	SD NEGERI 2 NGUMBUL		-	80.058.800,00	-	41.200,00	-	41.200,00
20510918	SD NEGERI 2 PADI		-	54.000.000,00	-	-	-	-
20511024	SD NEGERI 2 TULAKAN		-	86.399.995,00	-	5,00	-	5,00
20511090	SD NEGERI 2 WONOANTI		-	57.600.000,00	-	-	-	-
20511083	SD NEGERI 2 WONOSIDI		-	71.992.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00
20511516	SD NEGERI 3 JATIGUNUNG		-	50.264.200,00	-	135.800,00	-	135.800,00
20511421	SD NEGERI 3 KALIKUNING		-	54.771.212,00	-	128.788,00	-	128.788,00
20511460	SD NEGERI 3 KETRO		-	49.498.400,00	-	1.600,00	-	1.600,00
20510856	SD NEGERI 3 NGLARAN		-	83.700.000,00	-	-	-	-
20510864	SD NEGERI 3 NGUMBUL		-	64.800.000,00	-	-	-	-
20510917	SD NEGERI 3 PADI		-	29.700.000,00	-	-	-	-
20511023	SD NEGERI 3 TULAKAN		-	67.500.000,00	-	-	-	-
20511082	SD NEGERI 3 WONOSIDI		-	48.600.000,00	-	-	-	-
20511517	SD NEGERI 4 JATIGUNUNG		-	54.900.000,00	-	-	-	-
20511420	SD NEGERI 4 KALIKUNING		-	68.400.000,00	-	-	-	-
20557632	SD NEGERI 4 KETRO		-	36.000.000,00	-	-	-	-
20511439	SD NEGERI 4 LOSARI		-	45.900.000,00	-	-	-	-
20511071	SD NEGERI 4 WONOSIDI		-	80.100.000,00	-	-	-	-
20557631	SD NEGERI 5 KALIKUNING		-	53.100.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511070	SD NEGERI 5 WONOSIDI		-	52.200.000,00	-	-	-	-
20511496	SD NEGERI BUNGUR		-	139.500.000,00	-	-	-	-
20511267	SD NEGERI 1 BODAG		-	38.700.000,00	-	-	-	-
20511381	SD NEGERI 1 BOGOHARJO		-	33.300.000,00	-	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20511487	SD NEGERI 1 COKROKEMBANG		-	64.721.600,00	-	78.400,00	-	78.400,00
20511513	SD NEGERI 1 HADILUWIH		22.500.000,00	97.051.575,00	22.500.000,00	148.425,00	246.000,00	394.425,00
20511511	SD NEGERI 1 HADIWARNO		-	92.700.000,00	-	-	-	-
20510872	SD NEGERI 1 NGADIROJO		-	116.100.000,00	-	-	-	-
20510923	SD NEGERI 1 NOGOSARI		-	42.300.000,00	-	-	-	-
20510925	SD NEGERI 1 PAGEREJO		-	56.700.000,00	-	-	-	-
20510834	SD NEGERI 1 SIDOMULYO		-	35.100.000,00	-	-	-	-
20511048	SD NEGERI 1 TANJUNG LOR		-	90.000.000,00	-	-	-	-
20511046	SD NEGERI 1 TANJUNGPURO		-	57.600.000,00	-	-	-	-
20511099	SD NEGERI 1 WONOASRI		-	94.500.000,00	-	-	-	-
20511089	SD NEGERI 1 WONODADI KULON		-	69.201.220,00	-	98.780,00	-	98.780,00
20511085	SD NEGERI 1 WONODADI WETAN		-	28.800.000,00	-	-	-	-
20511201	SD NEGERI 1 WONOKARTO		-	66.600.000,00	-	-	-	-
20511200	SD NEGERI 1 WONOSOBO		-	52.200.000,00	-	-	-	-
20511256	SD NEGERI 2 BODAG		-	63.000.000,00	-	-	-	-
20511506	SD NEGERI 2 BOGOHARJO		-	36.823.600,00	-	76.400,00	-	76.400,00
20511486	SD NEGERI 2 COKROKEMBANG		-	47.632.200,00	-	67.800,00	-	67.800,00
20511512	SD NEGERI 2 HADILUWIH		-	23.400.000,00	-	-	-	-
20511510	SD NEGERI 2 HADIWARNO		-	56.691.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
20510871	SD NEGERI 2 NGADIROJO		-	28.799.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
20510922	SD NEGERI 2 NOGOSARI		-	50.400.000,00	-	-	-	-
20510926	SD NEGERI 2 PAGEREJO		-	52.200.000,00	-	-	-	-
20510841	SD NEGERI 2 SIDOMULYO		-	38.700.000,00	-	-	-	-
20511047	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR		-	37.800.000,00	-	-	-	-
20511045	SD NEGERI 2 TANJUNGPURO		-	36.900.000,00	-	-	-	-
20511096	SD NEGERI 2 WONOASRI		2.572.800,00	51.300.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511088	SD NEGERI 2 WONODADI KULON		-	36.000.000,00	-	-	-	-
20511093	SD NEGERI 2 WONODADI WETAN		-	26.100.000,00	-	-	-	-
20511097	SD NEGERI 2 WONOKARTO		-	60.300.000,00	-	-	-	-
20511098	SD NEGERI 2 WONOSOBO		-	44.100.000,00	-	-	-	-
20511485	SD NEGERI 3 COKROKEMBANG		-	27.900.000,00	-	-	-	-
20510934	SD NEGERI 3 PAGEREJO		-	104.400.000,00	-	-	-	-
20510849	SD NEGERI 3 SIDOMULYO		-	42.300.000,00	-	-	-	-
20511087	SD NEGERI 3 WONODADI KULON		-	17.891.400,00	-	6.408.600,00	-	6.408.600,00
20511095	SD NEGERI 3 WONOKARTO		-	22.500.000,00	-	-	-	-
20510933	SD NEGERI 4 PAGEREJO		-	47.700.000,00	-	-	-	-
20510848	SD NEGERI 4 SIDOMULYO		2.590.400,00	102.600.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511086	SD NEGERI 4 WONODADI KULON		-	58.500.000,00	-	-	-	-
20510847	SD NEGERI 5 SIDOMULYO		12.131.300,00	40.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-

NPSN	NAMA SEKOAH	TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA			SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	38	42	46	50	53	56	57
20511501	SD NEGERI CANGKRING		3.724.500,00	39.600.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511203	SD NEGERI WIYORO		-	81.808.000,00	-	92.000,00	-	92.000,00
20510819	SD NEGERI 1 GUNUNGREJO		-	96.667.800,00	-	532.200,00	-	532.200,00
20511449	SD NEGERI 1 KARANGMULYO		-	126.900.000,00	-	-	-	-
20511451	SD NEGERI 1 KETANGGUNG		-	110.697.350,00	-	2.650,00	-	2.650,00
20511442	SD NEGERI 1 KLEPU		12.129.800,00	102.930.000,00	22.500.000,00	1.470.000,00	-	1.470.000,00
20510932	SD NEGERI 1 PAGERKIDUL		-	60.289.200,00	-	10.800,00	-	10.800,00
20510930	SD NEGERI 1 PAGERLOR		1.080.000,00	29.700.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511495	SD NEGERI 1 SEMBOWO		-	50.400.000,00	-	-	-	-
20510830	SD NEGERI 1 SUDIMORO		-	189.745.000,00	-	155.000,00	-	155.000,00
20510829	SD NEGERI 1 SUKOREJO		-	76.396.500,00	-	103.500,00	-	103.500,00
20510828	SD NEGERI 1 SUMBEREJO		-	76.491.300,00	-	8.700,00	-	8.700,00
20510816	SD NEGERI 2 GUNUNGREJO		-	77.017.200,00	-	382.800,00	-	382.800,00
20511448	SD NEGERI 2 KARANGMULYO		-	106.200.000,00	-	-	-	-
20511450	SD NEGERI 2 KETANGGUNG		-	92.685.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
20537132	SD NEGERI 2 KLEPU		-	63.682.600,00	-	217.400,00	-	217.400,00
20510931	SD NEGERI 2 PAGERKIDUL		-	70.200.000,00	-	-	-	-
20510929	SD NEGERI 2 PAGERLOR		22.500.000,00	54.900.000,00	22.500.000,00	-	-	-
20511426	SD NEGERI 2 SEMBOWO		-	54.867.500,00	-	32.500,00	-	32.500,00
20510818	SD NEGERI 2 SUDIMORO		-	67.681.700,00	-	1.618.300,00	-	1.618.300,00
20510827	SD NEGERI 2 SUKOREJO		-	95.281.200,00	-	118.800,00	-	118.800,00
20510826	SD NEGERI 2 SUMBEREJO		-	86.365.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00
20511427	SD NEGERI 3 KLEPU		-	23.400.000,00	-	-	-	-
20510928	SD NEGERI 3 PAGERLOR		1.080.000,00	22.721.950,00	22.500.000,00	12.378.050,00	-	12.378.050,00
20510817	SD NEGERI 3 SUDIMORO		-	76.500.000,00	-	-	-	-

REKAPITULASI REALISASI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SMP
TAHUN 2025

NPSN	NAMA SEKOAH	PENERIMAAN	PENGELUARAN								SISA DANA		
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REKAP BOS REGULER	REKAP BOS KINERJA	SISA DANA BOS REGULER	SISA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		JUMLAH	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS REGULER	BOS KINERJA	BOS REGULER	BOS KINERJA					
			JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	14	18	22	30	34	38	42	46	50	53	56	57
		15.717.700.000,00	**3.176.755.361,00**	**3.831.303.059,00**	**4.245.075.768,00**	**388.312.600,00**	**4.044.522.095,00**	**31.687.400,00**	**15.297.656.283,00**	**420.000.000,00**	**43.717,00**	**-**	**43.717,00**
		15.717.700.000,00	**3.176.755.361,00**	**3.831.303.059,00**	**4.245.075.768,00**	**388.312.600,00**	**4.044.522.095,00**	**31.687.400,00**	**15.297.656.283,00**	**420.000.000,00**	**43.717,00**	**-**	**43.717,00**
20510961	SMPN 1 ARJOSARI	834.900.000,00	137.886.967,00	238.742.820,00	250.260.070,00	-	207.979.680,00	-	834.869.537,00	-	30.463,00	-	30.463,00
20510972	SMPN 2 ARJOSARI	211.200.000,00	36.464.300,00	65.018.000,00	49.280.900,00	-	60.436.800,00	-	211.200.000,00	-	-	-	-
20549692	SMPN 3 ARJOSARI	49.500.000,00	12.424.000,00	12.159.500,00	16.752.500,00	-	8.164.000,00	-	49.500.000,00	-	-	-	-
20573295	SMPN 4 ARJOSARI SATU ATAP	62.500.000,00	6.864.850,00	6.741.450,00	9.768.450,00	33.192.100	4.124.250,00	1.807.900,00	27.499.000,00	35.000.000,00	1.000,00	-	1.000,00
20510960	SMPN 1 BANDAR	488.200.000,00	124.521.700,00	99.532.790,00	149.378.190,00	32.120.000	79.767.320,00	2.880.000,00	453.200.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20510971	SMPN 2 BANDAR	194.700.000,00	44.677.750,00	36.758.651,00	35.639.751,00	-	77.623.848,00	-	194.700.000,00	-	-	-	-
20510940	SMPN 3 BANDAR	315.700.000,00	58.405.972,00	97.842.433,00	92.127.962,00	-	67.323.633,00	-	315.700.000,00	-	-	-	-
20557250	SMPN 4 BANDAR SATAP	105.400.000,00	12.982.255,00	14.141.190,00	27.311.430,00	35.000.000	15.965.125,00	-	70.400.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20510959	SMPN 1 DONOROJO	608.300.000,00	137.830.173,00	151.569.688,00	161.331.701,00	-	157.568.438,00	-	608.300.000,00	-	-	-	-
20510970	SMPN 2 DONOROJO	319.900.000,00	72.812.162,00	67.530.804,00	87.691.314,00	34.040.000	56.865.720,00	960.000,00	284.900.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20510939	SMPN 3 DONOROJO	171.400.000,00	37.140.250,00	23.117.550,00	49.572.800,00	35.000.000	26.569.400,00	-	136.400.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20540380	SMPN 4 DONOROJO SATU ATAP	39.600.000,00	9.986.649,00	9.358.112,00	7.896.544,00	-	12.358.695,00	-	39.600.000,00	-	-	-	-
20510967	SMPN 1 KEBONAGUNG	667.500.000,00	61.529.796,00	146.020.258,00	156.796.841,00	35.000.000	268.153.105,00	-	632.500.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20510969	SMPN 2 KEBONAGUNG	464.200.000,00	101.852.910,00	107.746.044,00	129.403.687,00	-	125.197.359,00	-	464.200.000,00	-	-	-	-
20573297	SMPN 3 KEBONAGUNG SATU ATAP	73.700.000,00	10.602.500,00	21.719.200,00	28.828.600,00	-	12.549.700,00	-	73.700.000,00	-	-	-	-
20510968	SMPN 1 NAWANGAN	576.400.000,00	135.802.139,00	152.377.185,00	149.948.317,00	-	138.272.359,00	-	576.400.000,00	-	-	-	-
20510958	SMPN 2 NAWANGAN	294.800.000,00	83.086.720,00	62.955.060,00	92.035.760,00	-	56.722.460,00	-	294.800.000,00	-	-	-	-
20510938	SMPN 3 NAWANGAN	71.500.000,00	10.562.100,00	21.509.900,00	20.750.000,00	-	18.678.000,00	-	71.500.000,00	-	-	-	-
20510950	SMPN 4 NAWANGAN	211.200.000,00	48.086.587,00	54.239.558,00	70.440.048,00	-	38.433.807,00	-	211.200.000,00	-	-	-	-
20510937	SMPN 1 NGADIROJO	960.100.000,00	214.436.670,00	214.882.660,00	274.010.915,00	32.600.000	221.769.755,00	2.400.000,00	925.100.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20510957	SMPN 2 NGADIROJO	316.600.000,00	62.026.700,00	72.056.000,00	96.518.300,00	33.500.000	50.999.000,00	1.500.000,00	281.600.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20510946	SMPN 3 NGADIROJO	554.400.000,00	95.515.479,00	181.484.152,00	111.775.863,00	-	165.624.506,00	-	554.400.000,00	-	-	-	-
20540381	SMPN 4 NGADIROJO SATU ATAP	158.400.000,00	29.203.500,00	48.769.300,00	53.409.300,00	-	27.010.900,00	-	158.393.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00
20557251	SMPN 5 NGADIROJO SATU ATAP	70.400.000,00	23.844.100,00	11.214.600,00	21.045.700,00	-	14.295.600,00	-	70.400.000,00	-	-	-	-
20510976	SMPN 1 PACITAN	979.900.000,00	187.823.995,00	278.902.368,00	212.202.424,00	35.000.000	265.971.213,00	-	944.900.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20510956	SMPN 2 PACITAN	624.800.000,00	82.395.984,00	133.386.648,00	67.537.848,00	-	341.479.520,00	-	624.800.000,00	-	-	-	-
20510947	SMPN 3 PACITAN	305.800.000,00	106.762.704,00	45.564.409,00	81.103.839,00	-	72.369.048,00	-	305.800.000,00	-	-	-	-
20510949	SMPN 4 PACITAN	414.700.000,00	109.523.748,00	93.323.948,00	124.729.648,00	-	87.122.656,00	-	414.700.000,00	-	-	-	-
20570232	SMPN 5 PACITAN SATU ATAP	55.000.000,00	9.454.000,00	11.713.750,00	13.538.500,00	-	20.293.750,00	-	55.000.000,00	-	-	-	-
20510975	SMPN 1 PRINGKUKU	391.600.000,00	49.161.200,00	101.324.950,00	124.940.075,00	-	116.173.775,00	-	391.600.000,00	-	-	-	-
20510945	SMPN 2 PRINGKUKU	117.700.000,00	29.893.490,00	28.446.000,00	39.828.887,00	-	19.531.623,00	-	117.700.000,00	-	-	-	-
20510955	SMPN 3 PRINGKUKU	273.900.000,00	39.429.923,00	97.489.262,00	94.184.275,00	-	42.796.540,00	-	273.900.000,00	-	-	-	-
20510974	SMPN 1 PUNUNG	612.700.000,00	123.910.890,00	174.388.200,00	175.940.020,00	-	138.460.890,00	-	612.700.000,00	-	-	-	-
20510944	SMPN 2 PUNUNG	319.000.000,00	94.318.732,00	52.132.234,00	114.050.910,00	-	58.498.124,00	-	319.000.000,00	-	-	-	-
20510954	SMPN 3 PUNUNG	151.800.000,00	31.666.670,00	43.920.128,00	44.145.154,00	-	32.068.048,00	-	151.800.000,00	-	-	-	-
20510973	SMPN 1 SUDIMORO	222.200.000,00	35.435.410,00	61.706.100,00	90.352.150,00	-	34.706.340,00	-	222.200.000,00	-	-	-	-
20510943	SMPN 2 SUDIMORO	231.000.000,00	58.270.900,00	56.272.750,00	56.848.300,00	-	59.608.050,00	-	231.000.000,00	-	-	-	-
20510953	SMPN 3 SUDIMORO	116.400.000,00	20.639.795,00	16.181.320,00	28.034.995,00	24.436.800	16.543.890,00	10.563.200,00	81.400.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20549693	SMPN 4 SUDIMORO SATU ATAP	91.300.000,00	21.262.000,00	19.317.500,00	30.875.000,00	-	19.845.500,00	-	91.300.000,00	-	-	-	-
20570242	SMPN 5 SUDIMORO SATU ATAP	110.000.000,00	14.761.216,00	33.705.816,00	42.245.152,00	-	19.287.816,00	-	110.000.000,00	-	-	-	-
69831500	SMPN 6 SUDIMORO	138.600.000,00	27.393.710,00	28.453.710,00	48.402.710,00	-	34.349.870,00	-	138.600.000,00	-	-	-	-
20511021	SMPN 1 TEGALOMBO	332.200.000,00	72.027.040,00	66.543.020,00	103.509.786,00	-	90.120.154,00	-	332.200.000,00	-	-	-	-

20510942	SMPN 2 TEGALOMBO	288.000.000,00	68.961.868,00	55.190.896,00	62.786.282,00	35.000.000	66.060.954,00	-	253.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20510952	SMPN 3 TEGALOMBO	220.000.000,00	41.841.952,00	42.871.638,00	61.645.388,00	-	73.635.768,00	-	219.994.746,00	-	5.254,00	-	5.254,00
20573296	SMPN 4 TEGALOMBO SATU ATAP	92.400.000,00	8.638.600,00	29.287.900,00	30.560.400,00	-	23.913.100,00	-	92.400.000,00	-	-	-	-
69766201	SMPN 5 TEGALOMBO SATU ATAP	59.400.000,00	13.611.750,00	14.645.000,00	23.792.750,00	-	7.350.500,00	-	59.400.000,00	-	-	-	-
20511009	SMPN 1 TULAKAN	718.100.000,00	132.928.360,00	171.808.530,00	149.055.630,00	23.423.700	229.307.480,00	11.576.300,00	683.100.000,00	35.000.000,00	-	-	-
20510941	SMPN 2 TULAKAN	282.700.000,00	60.233.011,00	65.792.673,00	63.631.218,00	-	93.043.098,00	-	282.700.000,00	-	-	-	-
20510951	SMPN 3 TULAKAN	392.700.000,00	95.964.884,00	98.875.954,00	121.115.284,00	-	76.743.878,00	-	392.700.000,00	-	-	-	-
20510948	SMPN 4 TULAKAN	355.300.000,00	71.897.300,00	92.571.450,00	98.044.200,00	-	92.787.050,00	-	355.300.000,00	-	-	-	-

Lampiran 2/BOP PAUD

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SATUAN	KETERANGAN	SISA DANA 2024	PENYALURAN TAHUN 2024	REALISASI BELANJA	SISA DANA	KETERANGAN
1	TK NEGERI PEMBINA PRINGKUKU	AKTIF		31.800.000	31.800.000	-	
2	TK NEGERI PEMBINA PACITAN	AKTIF		77.400.000	77.400.000	-	
3	TK NEGERI PEMBINA TULAKAN	AKTIF	-	31.800.000	31.800.000	-	
4	TK NEGERI PEMBINA NGADIROJO	AKTIF		36.000.000	36.000.000	-	
5	SKB PAUD	AKTIF		12.000.000	12.000.000	-	
JUMLAH				**189.000.000**	**189.000.000**	**-**	

Lampiran 2/ BOP Penyetaraan

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SATUAN	KETERANGAN	SISA DANA 2024	PENYALURAN TAHUN 2024	REALISASI BELANJA	SISA DANA	KETERANGAN
1	SKB KESETARAAN	AKTIF	0	112.000.000	112.000.000	-	
JUMLAH				112.000.000	112.000.000	-	

Lampiran 3

DAFTAR REKLAS ASET TETAP DARI BELANJA BARANG DAN JASA

Beban Barang			**426.858.962,00**
SATUAN POLISI PAMONG	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Alat Ukur Peralatan Faslektrik	10.367.400,00
KECAMATAN NGADIROJO	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Peralatan Olahraga Lainnya	120.435.000,00
KECAMATAN NGADIROJO	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	68.100.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengakuan Aset Tempat Sampah dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.279.550,00
KECAMATAN PUNUNG	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.969.000,00
KECAMATAN PRINGKUKU	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.507.000,00
KECAMATAN NGADIROJO	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Mebel	18.861.120,00
KECAMATAN SUDIMORO	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Mebel	20.000.000,00
KECAMATAN SUDIMORO	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.764.000,00
DINAS PENDIDIKAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Alat Pendingin	1.085.570,00
DINAS PENDIDIKAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.840.000,00
DINAS PENDIDIKAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Mebel	1.261.000,00
DINAS PENDIDIKAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Alat Pendingin	4.881.780,00
DINAS PENDIDIKAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.821.500,00
DINAS PENDIDIKAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Pompa	1.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.297.500,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Peralatan Personal Computer	1.498.500,00
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.589.044,00
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Peralatan Personal Computer	1.653.000,00
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pompa	5.438.998,00
DINAS KESEHATAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat Kantor Lainnya	3.774.000,00
DINAS KESEHATAN	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Alat Kantor Lainnya	9.435.000,00
Beban Jasa			**196.231.350,00**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Bangunan Fasilitas Umum	2.991.450,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Bangunan Fasilitas Umum	4.939.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jalan Kabupaten	188.300.400,00
Beban Pemeliharaan			**251.214.662,09**
DINAS PENDIDIKAN	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Taman	139.952.100,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	Jalan Desa	18.622.626,00
DINAS KESEHATAN	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mebel	3.996.000,00
DINAS KESEHATAN	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Parkir	88.643.936,09
Jumlah Beban Barang Jasa Menjadi Aset Tetap			**874.304.974,09**
Beban Tidak Terduga			**1.375.300.761,00**
BADAN KEUANGAN	Beban Tidak Terduga	Jalan Kabupaten	806.986.823,00
BADAN KEUANGAN DAERAH	Beban Tidak Terduga	Jembatan pada Jalan Kabupaten	217.200.000,00
BADAN KEUANGAN	Beban Tidak Terduga	Bangunan Pembawa Irigasi	312.897.938,00
BADAN KEUANGAN DAERAH	Beban Tidak Terduga	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	38.216.000,00
Jumlah Beban Tidak Terduga Menjadi Aset Tetap			**1.375.300.761,00**
Total Beban Menjadi Aset Tetap			**2.249.605.735,09**

Lampiran 4

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2025

NO	KECAMATAN / DESA	JENIS PAJAK DAERAH											JUMLAH
		PBB	BPHTB	PBJT					PAJAK REKLAME	PAJAK AIR TANAH	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN	OPSEN PKB	OPSEN BBNKB	
				MAKANAN/ MINUMAN	TENAGA LISTRIK	JASA PERHOTELAN	JASA PARKIR	JASA KESENIAN						
1	2													13
	JUMLAH	**2.570.852.470,00**	**193.811.059,00**	**450.034.744,00**	**1.680.491.942,00**	**77.776.750,00**	**4.063.727,00**	**14.189.506,00**	**71.809.359,00**	**15.884.577,00**	**72.399.847,00**	**1.422.276.375,00**	**429.249.118,00**	**7.002.839.474,00**
I	**KECAMATAN DONOROJO**	**181.919.339,00**	**15.592.288,00**	**32.624.459,00**	**120.753.912,00**	**5.180.939,00**	**283.764,00**	**831.439,00**	**4.829.108,00**	**979.439,00**	**5.070.672,00**	**102.199.500,00**	**30.844.248,00**	**501.109.107,00**
1	Desa Widoro	13.508.299,00	922.057,00	2.672.547,00	10.062.826,00	421.876,00	20.688,00	111.536,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.626.454,00
2	Desa Sawahan	13.138.660,00	862.057,00	2.634.420,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.079.982,00
3	Desa Kalak	12.956.320,00	918.057,00	2.652.197,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.971.419,00
4	Desa Sendang	14.564.612,00	2.374.881,00	2.579.115,00	10.062.826,00	853.733,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	81.493,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.427.300,00
5	Desa Klepu	14.796.303,00	862.057,00	2.656.153,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.759.358,00
6	Desa Gedompol	13.666.324,00	1.202.057,00	2.537.049,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	72.173,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.858.275,00
7	Desa Cemeng	16.083.505,00	999.057,00	2.690.671,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	329.334,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.231.168,00
8	Desa Gendaran	14.645.765,00	1.032.057,00	3.251.642,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	41.374.309,00
9	Desa Sukodono	13.488.898,00	1.035.437,00	2.641.048,00	10.062.826,00	390.533,00	30.208,00	64.173,00	510.644,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.814.148,00
10	Desa Sekar	16.790.883,00	862.057,00	2.751.184,00	10.062.826,00	390.533,00	28.308,00	64.173,00	332.444,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.872.789,00
11	Desa Donorojo	18.309.617,00	3.300.457,00	2.923.412,00	10.062.826,00	390.533,00	39.056,00	64.173,00	1.100.343,00	89.486,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	47.789.438,00
12	Desa Belah	19.970.153,00	1.222.057,00	2.635.021,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	70.173,00	342.635,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	46.304.467,00
														-
II	**KECAMATAN PUNUNG**	**205.991.169,00**	**21.216.337,00**	**34.110.081,00**	**130.816.738,00**	**5.320.389,00**	**306.132,00**	**848.262,00**	**6.537.473,00**	**1.168.356,00**	**5.493.215,00**	**110.716.125,00**	**33.414.602,00**	**555.938.879,00**
1	Desa Bomo	16.223.763,00	922.057,00	2.603.880,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	317.108,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.195.409,00
2	Desa Sooko	14.612.096,00	1.078.377,00	2.620.709,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.756.027,00
3	Desa Punung	19.950.104,00	1.134.057,00	3.230.524,00	10.062.826,00	633.993,00	32.360,00	64.174,00	2.588.437,00	194.827,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	49.400.836,00
4	Desa Mendolo Kidul	13.265.100,00	939.537,00	2.732.579,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	84.223,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.385.438,00
5	Desa Mendolo Lor	16.608.914,00	1.168.057,00	2.553.704,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.775.520,00
6	Desa Kendal	12.549.159,00	912.617,00	2.473.617,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.380.238,00
7	Desa Piton	14.850.376,00	1.216.057,00	2.558.374,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	41.069.652,00
8	Desa Wareng	19.858.649,00	8.126.417,00	2.537.908,00	10.062.826,00	390.533,00	40.204,00	64.174,00	420.044,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	53.091.135,00
9	Desa Mantren	15.781.094,00	2.068.933,00	2.489.044,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.783.916,00
10	Desa Ploso	20.223.516,00	984.057,00	2.506.365,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	46.158.783,00
11	Desa Gondosari	14.733.914,00	942.057,00	2.710.487,00	10.062.826,00	390.533,00	26.688,00	78.174,00	334.712,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.869.771,00
12	Desa Tinatar	13.644.013,00	862.057,00	2.585.175,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.536.090,00
13	Desa Kebonsari	13.690.471,00	862.057,00	2.507.715,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	347.220,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.536.064,00
														-
III	**KECAMATAN PRINGKUKU**	**193.532.100,00**	**17.601.281,00**	**36.767.377,00**	**130.816.738,00**	**15.845.984,00**	**440.351,00**	**1.781.229,00**	**5.177.355,00**	**1.312.942,00**	**6.459.039,00**	**110.716.125,00**	**33.414.602,00**	**553.865.123,00**
1	Desa Watukarung	13.656.541,00	3.330.427,00	5.637.290,00	10.062.826,00	11.159.588,00	141.979,00	937.621,00	337.844,00	263.916,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	57.037.566,00
2	Desa Dersono	13.387.177,00	937.737,00	2.719.279,00	10.062.826,00	390.533,00	36.648,00	102.213,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.543.037,00
3	Desa Sugihwaras	10.989.585,00	862.057,00	2.548.494,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	36.844.980,00
4	Desa Jlubang	13.186.341,00	1.726.057,00	2.470.564,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.827.806,00
5	Desa Candi	21.168.997,00	2.237.857,00	2.714.164,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	48.565.862,00
6	Desa Poko	14.745.988,00	986.057,00	2.836.468,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	41.013.357,00
7	Desa Dadapan	13.781.278,00	926.337,00	2.541.984,00	10.062.826,00	390.533,00	52.844,00	64.173,00	447.044,00	159.720,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.936.273,00
8	Desa Pringkuku	18.836.862,00	1.931.427,00	2.517.297,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	477.821,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	45.892.007,00
9	Desa Sobo	12.214.014,00	936.857,00	2.529.578,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.125.293,00
10	Desa Ngadirejan	15.210.578,00	1.140.297,00	2.510.304,00	10.062.826,00	390.533,00	22.688,00	70.173,00	1.068.450,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.066.229,00
11	Desa Glinggangan	13.016.836,00	862.057,00	2.613.359,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.937.096,00
12	Desa Pelem	16.980.996,00	862.057,00	2.479.708,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	70.173,00	316.244,00	80.846,00	1.388.379,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.739.429,00
13	Desa Tamanasri	16.356.907,00	862.057,00	2.648.888,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	87.665,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.336.188,00
														-
IV	**KECAMATAN PACITAN**	**278.816.902,00**	**32.053.985,00**	**58.249.805,00**	**201.256.520,00**	**8.691.085,00**	**757.648,00**	**3.353.064,00**	**13.197.537,00**	**3.042.233,00**	**8.739.908,00**	**170.332.500,00**	**51.407.080,00**	**829.898.267,00**
1	Desa Kembang	13.308.134,00	2.031.075,00	2.523.918,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	77.973,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.321.772,00
2	Desa Sukoharjo	12.943.893,00	983.201,00	2.586.128,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.958.066,00
3	Desa Kayen	14.276.241,00	934.177,00	3.174.195,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	317.108,00	101.273,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.850.748,00
4	Desa Sirnoboyo	16.195.894,00	1.642.705,00	2.865.220,00	10.062.826,00	390.533,00	30.204,00	64.173,00	527.520,00	127.706,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.416.315,00
5	Desa Arjowinangun	15.844.891,00	1.699.499,00	3.809.348,00	10.062.826,00	783.700,00	67.288,00	2.039.997,00	1.951.543,00	214.818,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	47.983.444,00
6	Desa Bangunsari	17.752.733,00	6.832.139,00	3.489.320,00	10.062.826,00	390.533,00	29.856,00	87.953,00	717.829,00	1.123.611,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	51.996.334,00
7	Desa Sedeng	13.090.774,00	2.027.556,00	2.778.778,00	10.062.826,00	390.533,00	22.688,00	77.973,00	568.370,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.609.878,00
8	Desa Sumberharjo	13.113.715,00	1.166.857,00	2.802.199,00	10.062.826,00	446.375,00	26.368,00	64.173,00	349.094,00	90.696,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.631.837,00
9	Desa Tanjungsari	15.770.080,00	1.569.537,00	5.623.843,00	10.062.826,00	390.533,00	281.616,00	106.573,00	3.347.074,00	103.108,00	711.362,00	8.516.625,00	2.570.354,00	49.053.531,00
10	Desa Menadi	13.751.912,00	1.028.633,00	2.525.576,00	10.062.826,00	809.949,00	30.684,00	64.173,00	542.640,00	107.507,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.433.434,00
11	Desa Mentoro	17.151.923,00	2.252.775,00	2.561.454,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	760.937,00	137.292,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	44.912.135,00
12	Desa Purworejo	14.716.232,00	935.849,00	2.490.781,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	381.044,00	108.047,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.679.707,00
13	Desa Nanggungan	14.127.535,00	1.866.457,00	2.774.681,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	447.644,00	93.685,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	41.357.756,00
14	Desa Widoro	12.476.115,00	862.057,00	2.711.451,00	10.062.826,00	402.533,00	20.688,00	64.173,00	371.534,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.561.757,00
15	Desa Semanten	12.897.061,00	1.065.583,00	2.519.968,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	701.492,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.312.704,00
16	Desa Sambong	13.160.138,00	882.057,00	2.784.436,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.271.475,00
17	Desa Banjarsari	12.254.753,00	1.247.697,00	2.580.770,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	106.882,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.554.100,00
18	Desa Bolosingo	11.495.546,00	862.057,00	2.471.356,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.273.801,00
19	Desa Ponggok	11.876.904,00	1.222.017,00	2.659.276,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.203.039,00
20	Desa Tambakrejo	12.612.428,00	942.057,00	2.517.107,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.516.434,00
														-

NO	KECAMATAN / DESA	JENIS PAJAK DAERAH												JUMLAH
		PBB	BPHTB	PBJT					PAJAK REKLAME	PAJAK AIR TANAH	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN	OPSEN PKB	OPSEN BBNKB	
				MAKANAN/ MINUMAN	TENAGA LISTRIK	JASA PERHOTELAN	JASA PARKIR	JASA KESENIAN						
1	2													13
V	KECAMATAN KEBONAGUNG	263.053.781,00	18.734.355,00	48.066.210,00	191.193.694,00	7.420.127,00	408.360,00	1.401.957,00	7.127.077,00	1.553.599,00	8.028.564,00	161.815.875,00	48.836.726,00	757.640.325,00
1	Desa Plumbungan	12.259.143,00	1.604.457,00	2.487.651,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.173,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.796.096,00
2	Desa Karangnongko	13.653.548,00	1.930.177,00	2.398.465,00	10.062.826,00	390.533,00	28.688,00	86.174,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.457.036,00
3	Desa Kalipelus	13.338.133,00	1.056.809,00	2.427.916,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.267.704,00
4	Desa Katipugal	14.159.341,00	862.057,00	2.433.807,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.900.051,00
5	Desa Klesem	15.012.764,00	912.057,00	2.681.679,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	41.051.346,00
6	Desa Sidomulyo	16.911.979,00	862.057,00	2.820.130,00	10.062.826,00	390.533,00	23.976,00	81.742,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.059.868,00
7	Desa Worawari	13.487.115,00	862.057,00	2.485.468,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	320.294,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.283.536,00
8	Desa Mantren	14.133.031,00	862.057,00	2.633.220,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.073.154,00
9	Desa Gawang	13.858.552,00	862.057,00	2.449.391,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	326.720,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.625.322,00
10	Desa Karanganyar	13.014.410,00	862.057,00	2.683.018,00	10.062.826,00	390.533,00	24.688,00	72.174,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.016.331,00
11	Desa Kebonagung	11.346.060,00	906.057,00	2.466.472,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	734.306,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.581.497,00
12	Desa Purwoasri	12.744.091,00	1.008.057,00	2.623.384,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	104.174,00	387.566,00	98.371,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.949.225,00
13	Desa Banjarejo	11.431.794,00	862.057,00	2.656.708,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	331.732,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.410.893,00
14	Desa Gembuk	14.547.558,00	862.057,00	2.744.872,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.599.333,00
15	Desa Sanggrahan	14.464.007,00	892.057,00	2.457.639,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	76.175,00	317.540,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.271.846,00
16	Desa Punjung	12.289.621,00	862.057,00	2.415.844,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.012.369,00
17	Desa Wonogondo	13.588.493,00	902.057,00	2.461.819,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	140.494,00	362.234,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.519.525,00
18	Desa Ketepung	15.020.374,00	862.057,00	2.357.924,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	70.935,00	316.244,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.691.962,00
19	Desa Ketro	17.793.767,00	902.057,00	2.380.803,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	868.001,00	80.846,00	422.556,00	8.516.625,00	2.570.354,00	44.073.231,00
														-
VI	KECAMATAN ARJOSARI	228.524.063,00	15.629.209,00	42.887.125,00	171.068.042,00	6.639.061,00	353.102,00	1.090.975,00	6.886.592,00	1.487.940,00	7.183.435,00	144.782.625,00	43.696.018,00	670.228.187,00
1	Desa Mlati	13.659.981,00	972.057,00	2.434.164,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.511.049,00
2	Desa Sedayu	13.021.512,00	862.057,00	2.792.328,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	324.345,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.128.844,00
3	Desa Tremas	13.175.264,00	862.057,00	2.393.464,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.875.632,00
4	Desa Arjosari	12.718.847,00	1.133.257,00	2.471.344,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	1.713.515,00	161.233,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.245.952,00
5	Desa Gunungsari	13.455.691,00	898.057,00	2.392.592,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.191.187,00
6	Desa Pagotan	12.996.116,00	952.057,00	2.471.586,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	316.245,00	114.017,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.897.777,00
7	Desa Gembong	13.201.813,00	954.057,00	2.418.944,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	384.285,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.087.701,00
8	Desa Borang	13.895.538,00	979.297,00	2.532.652,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	334.470,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.870.559,00
9	Desa Gegeran	12.237.100,00	862.057,00	2.684.080,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.228.084,00
10	Desa Kedungbendo	13.096.001,00	999.857,00	2.555.446,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	318.837,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.098.743,00
11	Desa Mangunharjo	13.487.168,00	862.057,00	2.636.704,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	332.445,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.446.976,00
12	Desa Jetis Kidul	13.906.142,00	862.057,00	2.460.932,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.673.978,00
13	Desa Temon	13.554.243,00	922.057,00	2.529.744,00	10.062.826,00	390.533,00	22.088,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.452.291,00
14	Desa Jatimalang	13.413.395,00	862.057,00	2.624.322,00	10.062.826,00	390.533,00	20.688,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.344.621,00
15	Desa Gayuhan	13.096.716,00	922.057,00	2.394.519,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.858.141,00
16	Desa Karangrejo	12.182.940,00	862.057,00	2.455.564,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.945.410,00
17	Desa Karanggede	17.425.596,00	862.057,00	2.638.740,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.371.242,00
														-
VII	KECAMATAN NAWANGAN	162.848.820,00	9.238.705,00	25.710.431,00	90.565.434,00	3.525.017,00	186.210,00	747.566,00	3.402.510,00	731.847,00	3.802.995,00	76.649.625,00	23.133.186,00	400.542.346,00
1	Desa Gondang	17.139.567,00	862.057,00	3.040.363,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.486.835,00
2	Desa Mujing	18.476.857,00	905.057,00	2.784.076,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	340.883,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	44.635.476,00
3	Desa Sempu	17.038.680,00	862.057,00	2.951.855,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.297.440,00
4	Desa Nawangan	17.176.201,00	993.617,00	2.517.525,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	726.749,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.542.695,00
5	Desa Tokawi	20.171.499,00	1.092.057,00	2.707.804,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	46.416.208,00
6	Desa Jetis Lor	16.031.629,00	1.048.617,00	2.900.652,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	323.157,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.432.658,00
7	Desa Penggung	20.958.033,00	1.022.057,00	2.982.142,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	74.174,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	47.417.080,00
8	Desa Pakis Baru	17.966.025,00	1.258.057,00	2.905.302,00	10.062.826,00	400.753,00	20.690,00	224.174,00	430.496,00	85.079,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	44.862.936,00
9	Desa Ngromo	17.890.329,00	1.195.129,00	2.920.712,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.245,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	44.451.018,00
														-
VIII	KECAMATAN BANDAR	133.132.279,00	7.614.844,00	21.061.151,00	80.502.608,00	3.124.264,00	165.520,00	513.400,00	3.045.293,00	646.768,00	3.380.440,00	68.133.000,00	20.562.832,00	341.882.399,00
1	Desa Petungsinarang	20.433.806,00	862.057,00	2.738.504,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	46.479.215,00
2	Desa Ngunut	16.844.948,00	862.057,00	2.888.504,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	321.719,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.045.832,00
3	Desa Bandar	18.188.464,00	1.022.057,00	2.427.224,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	674.528,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	44.440.877,00
4	Desa Kledung	17.226.557,00	862.057,00	2.519.689,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	238.484,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.975.391,00
5	Desa Tumpuk	11.051.605,00	969.777,00	2.692.128,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.158.358,00
6	Desa Watupatok	16.523.450,00	882.725,00	2.589.510,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.440.533,00
7	Desa Bangunsari	13.590.438,00	862.057,00	2.673.376,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.570.719,00
8	Desa Jeruk	19.273.011,00	1.292.057,00	2.532.216,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	545.586,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	45.771.474,00
														-
IX	KECAMATAN TEGALOMBO	182.310.477,00	10.482.467,00	28.427.430,00	110.691.086,00	4.295.863,00	227.590,00	705.925,00	4.828.711,00	927.241,00	4.648.107,00	93.682.875,00	28.273.894,00	469.501.666,00
1	Desa Kebondalem	12.969.126,00	862.057,00	2.580.924,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	408.585,00	107.460,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.975.910,00
2	Desa Gedangan	12.106.054,00	862.057,00	2.495.203,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	324.885,00	92.185,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.928.142,00
3	Desa Ngreco	14.136.276,00	862.057,00	2.367.784,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.810.964,00
4	Desa Kasihan	14.312.931,00	862.057,00	2.648.034,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.267.869,00
5	Desa Pucangombo	23.304.109,00	862.057,00	2.580.306,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	49.191.319,00
6	Desa Gemaharjo	20.809.460,00	1.273.897,00	2.717.932,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	490.310,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	47.420.201,00
7	Desa Ploso	17.616.338,00	902.057,00	2.722.660,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.685.902,00
8	Desa Tegalombo	17.502.672,00	1.012.057,00	2.786.075,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	1.391.216,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	44.820.622,00
9	Desa Kemuning	16.561.586,00	1.200.057,00	2.420.965,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.627.455,00
10	Desa Tahunan	23.355.085,00	922.057,00	2.506.723,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	49.228.712,00
11	Desa Tahunan Baru	9.636.840,00	862.057,00	2.600.824,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.245,00	80.844,00	422.557,00	8.516.625,00	2.570.354,00	35.544.570,00

NO	KECAMATAN / DESA	JENIS PAJAK DAERAH												JUMLAH
		PBB	BPHTB	PBJT					PAJAK REKLAME	PAJAK AIR TANAH	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN	OPSEN PKB	OPSEN BBNKB	
				MAKANAN/ MINUMAN	TENAGA LISTRIK	JASA PERHOTELAN	JASA PARKIR	JASA KESENIAN						
1	2													13
														-
X	KECAMATAN TULAKAN	263.782.995,00	16.468.932,00	44.718.510,00	171.068.042,00	6.639.061,00	351.730,00	1.090.975,00	6.079.760,00	1.374.382,00	7.761.932,00	144.782.625,00	43.696.018,00	707.814.962,00
1	Desa Jetak	15.943.614,00	1.160.169,00	2.679.042,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.227.673,00
2	Desa Nglaran	16.221.373,00	862.057,00	2.566.568,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.094.846,00
3	Desa Wonoanti	17.165.936,00	862.057,00	2.618.864,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.091.705,00
4	Desa Padi	14.824.733,00	862.057,00	2.709.808,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.841.446,00
5	Desa Kluwih	12.683.504,00	862.056,00	2.343.098,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	325.478,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.342.740,00
6	Desa Bungur	15.017.426,00	1.199.048,00	2.587.597,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	499.160,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	41.431.835,00
7	Desa Tulakan	13.633.768,00	942.056,00	2.587.984,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	826.842,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.119.254,00
8	Desa Jatigunung	16.847.276,00	1.111.688,00	2.697.395,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.101.207,00
9	Desa Kalikuning	20.585.164,00	862.056,00	3.089.333,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	46.981.401,00
10	Desa Gasang	12.172.929,00	862.056,00	2.785.419,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.265.252,00
11	Desa Ngile	14.257.947,00	862.056,00	2.583.280,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.148.131,00
12	Desa Bubakan	13.422.390,00	1.022.056,00	2.492.144,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	317.108,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.382.302,00
13	Desa Losari	18.426.290,00	862.056,00	2.357.213,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	44.090.407,00
14	Desa Ngumbul	14.080.844,00	862.056,00	2.768.527,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.156.275,00
15	Desa Wonosidi	17.017.661,00	1.551.296,00	2.752.784,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	1.001.052,00	8.516.625,00	2.570.354,00	44.345.086,00
16	Desa Ketro	17.227.877,00	862.056,00	2.693.775,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	43.228.556,00
17	Desa Ketroharjo	14.254.263,00	862.056,00	2.405.679,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.175,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.966.846,00
														-
XI	KECAMATAN NGADIROJO	242.698.265,00	19.293.192,00	49.638.717,00	181.130.868,00	7.189.630,00	376.420,00	1.182.974,00	7.245.475,00	1.834.802,00	7.605.990,00	153.299.250,00	46.266.372,00	717.761.955,00
1	Desa Sidomulyo	18.495.823,00	1.715.656,00	2.477.322,00	10.062.826,00	487.613,00	24.690,00	92.016,00	316.244,00	89.804,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	45.271.528,00
2	Desa Hadiwarno	15.172.488,00	1.751.528,00	2.894.634,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	416.384,00	115.867,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.398.658,00
3	Desa Tanjungpuro	13.382.544,00	862.056,00	2.505.433,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	332.444,00	100.911,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.231.145,00
4	Desa Hadiluwih	13.345.508,00	1.014.056,00	2.995.455,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	436.694,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.920.316,00
5	Desa Pagerejo	14.067.968,00	862.056,00	2.775.457,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	339.239,00	296.132,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.388.609,00
6	Desa Wiyoro	14.463.999,00	2.649.466,00	2.518.648,00	10.062.826,00	453.489,00	20.690,00	64.174,00	885.545,00	159.694,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.788.065,00
7	Desa Ngadirojo	14.227.919,00	862.056,00	3.330.026,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	855.381,00	102.242,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	41.425.381,00
8	Desa Bogoharjo	12.107.992,00	862.056,00	2.649.434,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.064.329,00
9	Desa Cokrokembang	15.977.709,00	955.758,00	2.690.808,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	500.240,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.253.118,00
10	Desa Bodag	13.260.429,00	862.056,00	2.949.808,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.517.140,00
11	Desa Tanjung Lor	12.503.372,00	862.056,00	3.033.814,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.844.089,00
12	Desa Nogosari	12.573.969,00	862.056,00	2.442.048,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.322.920,00
13	Desa Cangkring	10.979.779,00	862.056,00	2.813.653,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	317.108,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.101.199,00
14	Desa Wonodadi Kulon	13.643.397,00	862.056,00	3.130.359,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.080.659,00
15	Desa Wonodadi Wetan	11.794.362,00	862.056,00	2.765.572,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.866.837,00
16	Desa Wonokarto	12.852.474,00	862.056,00	2.527.680,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.687.057,00
17	Desa Wonoasri	12.362.662,00	862.056,00	2.558.938,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.228.503,00
18	Desa Wonosobo	11.485.871,00	862.056,00	2.579.628,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.846,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.372.402,00
														-
XII	KECAMATAN SUDIMORO	234.242.280,00	9.885.464,00	27.773.448,00	100.628.260,00	3.905.330,00	206.900,00	641.740,00	3.452.468,00	825.028,00	4.225.550,00	85.166.250,00	25.703.540,00	496.656.258,00
1	Desa Pager Kidul	15.983.536,00	862.056,00	2.888.914,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	390.284,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	42.253.391,00
2	Desa Pager Lor	15.468.999,00	862.056,00	2.750.104,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	325.478,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	41.535.238,00
3	Desa Sukorejo	108.445.202,00	1.422.760,00	2.750.798,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	375.179,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	135.122.540,00
4	Desa Sudimoro	14.452.972,00	862.056,00	2.853.511,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	463.199,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.760.339,00
5	Desa Ketanggung	13.106.722,00	1.527.136,00	3.062.961,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	317.108,00	97.432,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	40.159.116,00
6	Desa Klepu	13.596.979,00	862.056,00	2.825.938,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.729.818,00
7	Desa Gunung Rejo	12.584.121,00	862.056,00	2.534.411,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	38.425.433,00
8	Desa Karang Mulyo	13.326.480,00	862.056,00	2.548.204,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	39.181.585,00
9	Desa Sembowo	11.453.666,00	862.056,00	2.874.984,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	37.635.551,00
10	Desa Sumberejo	15.823.603,00	901.176,00	2.683.623,00	10.062.826,00	390.533,00	20.690,00	64.174,00	316.244,00	80.844,00	422.555,00	8.516.625,00	2.570.354,00	41.853.247,00
		2.570.852.470,00	193.811.059,00	450.034.744,00	1.680.491.942,00	77.776.750,00	4.063.727,00	14.189.506,00	71.809.359,00	15.884.577,00	72.399.847,00	1.422.276.375,00	429.249.118,00	7.002.839.474,00

Lampiran 5

PENYALURAN BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN 2025

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
TOTAL		**513.479.641,00**	**1.196.728.765,00**	**54.255.219,00**	**1.764.463.625,00**
I	**KECAMATAN DONOROJO**	**36.148.092,00**	**187.440.525,00**	**3.898.584,00**	**227.487.201,00**
1	Desa Widoro	2.730.461,00	11.266.144,00	324.882,00	14.321.487,00
2	Desa Sawahan	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
3	Desa Kalak	2.730.461,00	5.343.744,00	324.882,00	8.399.087,00
4	Desa Sendang	2.730.461,00	123.006.944,00	324.882,00	126.062.287,00
5	Desa Klepu	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
6	Desa Gedompol	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
7	Desa Cemeng	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
8	Desa Gendaran	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
9	Desa Sukodono	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
10	Desa Sekar	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
11	Desa Donorojo	6.113.021,00	5.313.743,00	324.882,00	11.751.646,00
12	Desa Belah	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
II	**KECAMATAN PUNUNG**	**49.143.793,00**	**123.098.859,00**	**4.223.466,00**	**176.466.118,00**
1	Desa Bomo	2.730.461,00	58.115.143,00	324.882,00	61.170.486,00
2	Desa Sooko	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
3	Desa Punung	12.561.541,00	5.313.743,00	324.882,00	18.200.166,00
4	Desa Mendolo Kidul	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
5	Desa Mendolo Lor	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
6	Desa Kendal	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
7	Desa Piton	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
8	Desa Wareng	2.730.461,00	6.532.543,00	324.882,00	9.587.886,00
9	Desa Mantren	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
10	Desa Ploso	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
11	Desa Gondosari	6.547.181,00	5.313.743,00	324.882,00	12.185.806,00
12	Desa Tinatar	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
13	Desa Kebonsari	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
III	**KECAMATAN PRINGKUKU**	**36.215.873,00**	**169.816.659,00**	**4.223.466,00**	**210.255.998,00**
1	Desa Watukarung	2.730.461,00	63.601.743,00	324.882,00	66.657.086,00
2	Desa Dersono	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
3	Desa Sugihwaras	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
4	Desa Jlubang	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
5	Desa Candi	2.730.461,00	47.763.743,00	324.882,00	50.819.086,00
6	Desa Poko	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
7	Desa Dadapan	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
8	Desa Pringkuku	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
9	Desa Sobo	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
10	Desa Ngadirejan	3.450.341,00	5.313.743,00	324.882,00	9.088.966,00
11	Desa Glinggangan	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
12	Desa Pelem	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
13	Desa Tamanasri	2.730.461,00	5.313.743,00	324.882,00	8.369.086,00
IV	**KECAMATAN PACITAN**	**69.467.500,00**	**106.274.880,00**	**6.497.640,00**	**182.240.020,00**
1	Desa Kembang	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
2	Desa Sukoharjo	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
3	Desa Kayen	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
4	Desa Sirnoboyo	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
5	Desa Arjowinangun	13.745.421,00	5.313.744,00	324.882,00	19.384.047,00

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
6	Desa Bangunsari	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
7	Desa Sedeng	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
8	Desa Sumberharjo	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
9	Desa Tanjungsari	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
10	Desa Menadi	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
11	Desa Mentoro	4.556.101,00	5.313.744,00	324.882,00	10.194.727,00
12	Desa Purworejo	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
13	Desa Nanggungan	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
14	Desa Widoro	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
15	Desa Semanten	4.748.141,00	5.313.744,00	324.882,00	10.386.767,00
16	Desa Sambong	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
17	Desa Banjarsari	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
18	Desa Bolosingo	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
19	Desa Ponggok	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
20	Desa Tambakrejo	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
V	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	**51.878.757,00**	**100.961.106,00**	**6.172.758,00**	**159.012.621,00**
1	Desa Plumbungan	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
2	Desa Karangnongko	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
3	Desa Kalipelus	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
4	Desa Katipugal	2.730.461,00	5.313.744,00	324.882,00	8.369.087,00
5	Desa Klesem	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
6	Desa Sidomulyo	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
7	Desa Worawari	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
8	Desa Mantren	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
9	Desa Gawang	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
10	Desa Karanganyar	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
11	Desa Kebonagung	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
12	Desa Purwoasri	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
13	Desa Banjarejo	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
14	Desa Gembuk	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
15	Desa Sanggrahan	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
16	Desa Punjung	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
17	Desa Wonogondo	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
18	Desa Ketepung	2.730.461,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.085,00
19	Desa Ketro	2.730.459,00	5.313.742,00	324.882,00	8.369.083,00
VI	**KECAMATAN ARJOSARI**	**53.135.723,00**	**115.512.997,00**	**5.522.992,00**	**174.171.712,00**
1	Desa Mlati	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
2	Desa Sedayu	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
3	Desa Tremas	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
4	Desa Arjosari	9.448.379,00	5.313.741,00	324.882,00	15.087.002,00
5	Desa Gunungsari	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
6	Desa Pagotan	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
7	Desa Gembong	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
8	Desa Borang	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
9	Desa Gegeran	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
10	Desa Kedungbendo	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
11	Desa Mangunharjo	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
12	Desa Jetis Kidul	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
13	Desa Temon	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
14	Desa Jatimalang	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
15	Desa Gayuhan	2.730.459,00	5.313.741,00	324.882,00	8.369.082,00
16	Desa Karangrejo	2.730.459,00	30.493.141,00	324.881,00	33.548.481,00
17	Desa Karanggede	2.730.459,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.081,00

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
VII	**KECAMATAN NAWANGAN**	**28.469.939,00**	**50.375.678,00**	**2.923.929,00**	**81.769.546,00**
1	Desa Gondang	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
2	Desa Mujing	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
3	Desa Sempu	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
4	Desa Nawangan	6.626.259,00	5.313.742,00	324.881,00	12.264.882,00
5	Desa Tokawi	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
6	Desa Jetis Lor	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
7	Desa Penggung	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
8	Desa Pakis Baru	2.730.460,00	7.865.742,00	324.881,00	10.921.083,00
9	Desa Ngromo	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
VII	**KECAMATAN BANDAR**	**24.856.839,00**	**42.509.936,00**	**2.599.048,00**	**69.965.823,00**
1	Desa Petungsinarang	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
2	Desa Ngunut	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
3	Desa Bandar	5.743.619,00	5.313.742,00	324.881,00	11.382.242,00
4	Desa Kledung	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
5	Desa Tumpuk	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
6	Desa Watupatok	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
7	Desa Bangunsari	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
8	Desa Jeruk	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
IX	**KECAMATAN TEGALOMBO**	**30.035.060,00**	**58.451.162,00**	**3.573.691,00**	**92.059.913,00**
1	Desa Kebondalem	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
2	Desa Gedangan	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
3	Desa Ngreco	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
4	Desa Kasihan	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
5	Desa Pucangombo	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
6	Desa Gemaharjo	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
7	Desa Ploso	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
8	Desa Tegalombo	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
9	Desa Kemuning	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
10	Desa Tahunan	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
11	Desa Tahunan Baru	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
X	**KECAMATAN TULAKAN**	**51.549.459,00**	**90.333.597,00**	**5.522.977,00**	**147.406.033,00**
1	Desa Jetak	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
2	Desa Nglaran	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
3	Desa Wonoanti	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
4	Desa Padi	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
5	Desa Kluwih	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
6	Desa Bungur	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
7	Desa Tulakan	7.862.099,00	5.313.741,00	324.881,00	13.500.721,00
8	Desa Jatigunung	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
9	Desa Kalikuning	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
10	Desa Gasang	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
11	Desa Ngile	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
12	Desa Bubakan	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
13	Desa Losari	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
14	Desa Ngumbul	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
15	Desa Wonosidi	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
16	Desa Ketro	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
17	Desa Ketroharjo	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
XI	**KECAMATAN NGADIROJO**	**55.273.999,00**	**98.815.956,00**	**5.847.858,00**	**159.937.813,00**
1	Desa Sidomulyo	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
2	Desa Hadiwarno	2.730.460,00	8.482.342,00	324.881,00	11.537.683,00
3	Desa Tanjungpuro	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
4	Desa Hadiluwih	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
5	Desa Pagerejo	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
6	Desa Wiyoro	8.856.179,00	5.313.742,00	324.881,00	14.494.802,00
7	Desa Ngadirojo	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
8	Desa Bogoharjo	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
9	Desa Cokrokembang	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
10	Desa Bodag	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
11	Desa Tanjung Lor	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
12	Desa Nogosari	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
13	Desa Cangkring	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
14	Desa Wonodadi Kulon	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
15	Desa Wonodadi Wetan	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
16	Desa Wonokarto	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
17	Desa Wonoasri	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
18	Desa Wonosobo	2.730.460,00	5.313.742,00	324.881,00	8.369.083,00
XII	**KECAMATAN SUDIMORO**	**27.304.607,00**	**53.137.410,00**	**3.248.810,00**	**83.690.827,00**
1	Desa Pager Kidul	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
2	Desa Pager Lor	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
3	Desa Sukorejo	2.730.460,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.082,00
4	Desa Sudimoro	2.730.461,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.083,00
5	Desa Ketanggung	2.730.461,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.083,00
6	Desa Klepu	2.730.461,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.083,00
7	Desa Gunung Rejo	2.730.461,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.083,00
8	Desa Karang Mulyo	2.730.461,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.083,00
9	Desa Sembowo	2.730.461,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.083,00
10	Desa Sumberejo	2.730.461,00	5.313.741,00	324.881,00	8.369.083,00
		2.730.461,00	5.313.741,00		

Lampiran 6

REKAPITULASI PENYALURAN DAN PENYERAPAN DANA DESA

KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

No	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Silpa Tahun Sebelumnya	Realisasi Penyaluran	Realisasi Belanja	Sisa
81	3501062004	Arjosari	Arjosari	960.429.000,00	83.279.680,00	960.429.000,00	906.405.730,00	137.302.950,00
43	3501042007	Pacitan	Arjowinangun	1.091.597.000,00	100.487.911,00	840.918.440,00	900.339.600,00	41.066.751,00
106	3501082003	Bandar	Bandar	1.263.892.000,00	369.421.055,00	1.263.892.000,00	1.267.905.000,00	365.408.055,00
44	3501042009	Pacitan	Bangunsari	990.196.000,00	156.584.114,00	755.934.800,00	764.441.746,00	148.077.168,00
110	3501082007	Bandar	Bangunsari	1.140.086.000,00	276.135.375,00	889.127.400,00	1.023.074.000,00	142.188.775,00
71	3501052013	Kebonagung	Banjarjo	698.594.000,00	229.848.540,00	698.594.000,00	682.508.000,00	245.934.540,00
55	3501042022	Pacitan	Banjarsari	686.774.000,00	341.699.401,00	445.416.800,00	548.414.775,00	238.701.426,00
12	3501012012	Donorojo	Belah	955.088.000,00	146.006.421,00	955.088.000,00	989.049.350,00	112.045.071,00
149	3501112010	Ngadirojo	Bodag	885.591.000,00	237.911.757,00	885.591.000,00	868.617.645,00	254.885.112,00
147	3501112008	Ngadirojo	Bogoharjo	825.375.000,00	182.452.197,00	825.375.000,00	821.862.292,00	185.964.905,00
56	3501042023	Pacitan	Bolosingo	667.523.000,00	323.509.124,00	667.523.000,00	799.833.588,00	191.198.536,00
26	3501032001	Punung	Bomo	832.047.000,00	103.810.814,00	832.047.000,00	876.435.700,00	59.422.114,00
85	3501062008	Arjosari	Borang	847.905.000,00	302.721.382,00	847.905.000,00	1.069.109.520,00	81.516.862,00
134	3501102012	Tulakan	Bubakan	1.142.555.000,00	89.867.326,00	1.142.555.000,00	1.198.482.400,00	33.939.926,00
128	3501102006	Tulakan	Bungur	1.226.129.000,00	88.598.735,00	1.226.129.000,00	1.188.475.200,00	126.252.535,00
17	3501022005	Pringkuku	Candi	918.986.000,00	314.150.737,00	767.215.600,00	849.283.900,00	232.082.437,00
152	3501112013	Ngadirojo	Cangkring	696.746.000,00	41.439.769,00	493.769.300,00	517.172.500,00	18.036.569,00
7	3501012007	Donorojo	Cemeng	852.759.000,00	4.483.587,00	852.759.000,00	847.177.500,00	10.065.087,00
148	3501112009	Ngadirojo	Cokrokembang	877.349.000,00	69.248.232,00	877.349.000,00	833.772.900,00	112.824.332,00
19	3501022007	Pringkuku	Dadapan	786.735.000,00	63.500.073,00	786.735.000,00	766.793.300,00	83.441.773,00
13	3501022001	Pringkuku	Dersono	970.853.000,00	62.260.028,00	970.853.000,00	970.231.000,00	62.882.028,00
11	3501012011	Donorojo	Donorojo	1.212.788.000,00	43.631.516,00	1.212.788.000,00	1.206.798.800,00	49.620.716,00
131	3501102009	Tulakan	Gasang	863.331.000,00	174.797.416,00	863.331.000,00	855.729.400,00	182.399.016,00
68	3501052010	Kebonagung	Gawang	831.654.000,00	137.613.646,00	618.537.600,00	716.736.500,00	39.414.746,00
92	3501062015	Arjosari	Gayuhan	783.696.000,00	103.490.829,00	783.696.000,00	740.703.700,00	146.483.129,00
113	3501092002	Tegalombo	Gedangan	817.224.000,00	184.466.535,00	817.224.000,00	874.075.986,00	127.614.549,00
6	3501012006	Donorojo	Gedompol	975.308.000,00	288.586,00	975.308.000,00	968.576.300,00	7.020.286,00
86	3501062009	Arjosari	Gegeran	715.979.000,00	23.369.700,00	715.979.000,00	701.433.050,00	37.915.650,00
117	3501092006	Tegalombo	Gemaharjo	1.234.405.000,00	202.125.524,00	1.234.405.000,00	1.210.690.250,00	225.840.274,00
84	3501062007	Arjosari	Gembong	861.051.000,00	96.298.619,00	861.051.000,00	832.249.700,00	125.099.919,00
72	3501052014	Kebonagung	Gembuk	979.400.000,00	37.093.972,00	746.225.600,00	752.607.000,00	30.712.572,00
8	3501012008	Donorojo	Gendaran	796.509.000,00	53.133.078,00	796.509.000,00	789.858.900,00	59.783.178,00
23	3501022011	Pringkuku	Glinggangan	1.148.430.000,00	61.363.830,00	936.812.000,00	985.736.000,00	12.439.830,00
95	3501072001	Nawangan	Gondang	1.364.876.000,00	15.457.000,00	1.364.876.000,00	1.330.870.000,00	49.463.000,00
36	3501032011	Punung	Gondosari	1.035.884.000,00	76.158.514,00	1.035.884.000,00	1.027.416.050,00	84.626.464,00
166	3501122009	Sudimoro	Gunungrejo	888.492.000,00	180.216.850,00	888.492.000,00	930.843.100,00	137.865.750,00
82	3501062005	Arjosari	Gunungsari	806.889.000,00	161.572.214,00	806.889.000,00	698.536.500,00	269.924.714,00
143	3501112004	Ngadirojo	Hadiluwih	794.037.000,00	111.500.392,00	794.037.000,00	784.110.500,00	121.426.892,00
141	3501112002	Ngadirojo	Hadiwarno	921.236.000,00	27.028.482,00	921.236.000,00	855.629.000,00	92.635.482,00
130	3501102008	Tulakan	Jatigunung	1.328.845.000,00	117.381.426,00	1.036.159.000,00	1.126.393.288,00	27.147.138,00
94	3501062017	Arjosari	Jatimalang	849.123.000,00	217.232.110,00	849.123.000,00	785.722.193,00	280.632.917,00
111	3501082008	Bandar	Jeruk	1.330.420.000,00	96.298.058,00	1.330.420.000,00	1.322.088.950,00	104.629.108,00
123	3501102001	Tulakan	Jetak	1.477.207.000,00	184.981.115,00	1.127.961.000,00	1.244.755.500,00	68.186.615,00
100	3501072006	Nawangan	Jetis Lor	1.103.546.000,00	73.117.482,00	1.103.546.000,00	1.116.160.700,00	60.502.782,00
89	3501062012	Arjosari	Jetiskidul	711.968.000,00	20.753.300,00	711.968.000,00	664.528.000,00	68.193.300,00
16	3501022004	Pringkuku	Jlubang	812.205.000,00	69.816.780,00	812.205.000,00	809.720.000,00	72.301.780,00
3	3501012003	Donorojo	Kalak	943.121.000,00	234.571.753,00	646.116.200,00	765.285.250,00	115.402.703,00

No	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Silpa Tahun Sebelumnya	Realisasi Penyaluran	Realisasi Belanja	Sisa
132	3501102010	Tulakan	Kalikuning	1.623.271.000,00	65.267.466,00	1.142.710.240,00	1.181.369.560,00	26.608.146,00
61	3501052003	Kebonagung	Kalipelus	824.331.000,00	143.423.981,00	824.331.000,00	808.222.276,00	159.532.705,00
62	3501052004	Kebonagung	Karanganyar	803.106.000,00	153.755.756,00	803.106.000,00	838.588.500,00	118.273.256,00
91	3501062014	Arjosari	Karanggede	1.138.751.000,00	116.209.589,00	1.138.751.000,00	1.112.808.900,00	142.151.689,00
165	3501122008	Sudimoro	Karangmulyo	1.099.892.000,00	144.558.250,00	1.099.892.000,00	1.131.722.350,00	112.727.900,00
60	3501052002	Kebonagung	Karangnongko	833.709.000,00	75.151.674,00	833.709.000,00	768.631.000,00	140.229.674,00
93	3501062016	Arjosari	Karangrejo	865.218.000,00	73.313.747,00	865.218.000,00	894.543.000,00	43.988.747,00
115	3501092004	Tegalombo	Kasihan	1.462.270.000,00	204.715.320,00	1.462.270.000,00	1.476.597.800,00	190.387.520,00
63	3501052005	Kebonagung	Katipugal	798.003.000,00	51.679.710,00	798.003.000,00	809.207.000,00	40.475.710,00
41	3501042005	Pacitan	Kayen	783.213.000,00	104.915.000,00	594.474.600,00	676.816.500,00	22.573.100,00
69	3501052011	Kebonagung	Kebonagung	634.073.000,00	46.178.372,00	634.073.000,00	633.481.600,00	46.769.772,00
112	3501092001	Tegalombo	Kebondalem	1.134.747.000,00	236.453.526,00	906.725.000,00	902.370.000,00	240.808.526,00
37	3501032012	Punung	Kebonsari	848.634.000,00	85.639.073,00	848.634.000,00	846.905.400,00	87.367.673,00
87	3501062010	Arjosari	Kedungbendo	855.459.000,00	42.956.682,00	855.459.000,00	834.238.340,00	64.177.342,00
39	3501042003	Pacitan	Kembang	802.488.000,00	89.742.436,00	519.556.200,00	560.722.700,00	48.575.936,00
120	3501092009	Tegalombo	Kemuning	1.253.134.000,00	297.047.621,00	1.086.769.180,00	1.176.797.500,00	207.019.301,00
31	3501032006	Punung	Kendal	707.906.000,00	110.153.395,00	707.906.000,00	687.016.940,00	131.042.455,00
162	3501122005	Sudimoro	Ketanggung	1.050.221.000,00	168.825.207,00	1.050.221.000,00	1.110.043.400,00	109.002.807,00
76	3501052018	Kebonagung	Ketepung	970.613.000,00	85.740.054,00	970.613.000,00	987.540.000,00	68.813.054,00
77	3501052019	Kebonagung	Ketro	999.374.000,00	136.124.123,00	999.374.000,00	944.961.000,00	190.537.123,00
138	3501102016	Tulakan	Ketro	1.399.003.000,00	130.197.973,00	1.100.342.400,00	1.230.540.373,00	0,00
139	3501102017	Tulakan	Ketro Harjo	1.016.240.000,00	27.406.000,00	1.016.240.000,00	944.806.000,00	98.840.000,00
107	3501082004	Bandar	Kledung	1.027.847.000,00	76.972.134,00	1.027.847.000,00	1.010.017.000,00	94.802.134,00
5	3501012005	Donorojo	Klepu	1.057.754.000,00	44.289.589,00	1.057.754.000,00	1.072.613.032,00	29.430.557,00
163	3501122006	Sudimoro	Klepu	997.223.000,00	183.070.163,00	997.223.000,00	1.061.608.800,00	118.684.363,00
64	3501052006	Kebonagung	Klesem	1.044.101.000,00	182.774.522,00	1.044.101.000,00	1.027.097.000,00	199.778.522,00
127	3501102005	Tulakan	Kluwih	1.126.965.000,00	188.407.360,00	920.193.360,00	1.013.151.077,00	95.449.643,00
135	3501102013	Tulakan	Losari	1.287.739.000,00	77.233.937,00	1.287.739.000,00	1.123.547.500,00	241.425.437,00
88	3501062011	Arjosari	Mangunharjo	803.613.000,00	301.381.842,00	803.613.000,00	795.420.000,00	309.574.842,00
33	3501032008	Punung	Mantren	827.289.000,00	49.363.237,00	827.289.000,00	818.648.500,00	58.003.737,00
67	3501052009	Kebonagung	Mantren	812.802.000,00	192.987.586,00	812.802.000,00	772.212.534,00	233.577.052,00
48	3501042015	Pacitan	Menadi	753.741.000,00	78.378.636,00	753.741.000,00	729.687.000,00	102.432.636,00
29	3501032004	Punung	Mendolo Kidul	818.889.000,00	55.861.713,00	818.889.000,00	811.174.200,00	63.576.513,00
34	3501032009	Punung	Mendolo Lor	896.889.000,00	385.763.115,00	614.084.520,00	868.527.925,00	131.319.710,00
49	3501042016	Pacitan	Mentoro	768.492.000,00	73.608.727,00	768.492.000,00	681.843.025,00	160.257.702,00
78	3501062001	Arjosari	Mlati	902.786.000,00	78.158.054,00	495.214.400,00	535.178.000,00	38.194.454,00
96	3501072002	Nawangan	Mujing	1.657.672.000,00	46.313.162,00	1.657.672.000,00	1.672.510.040,00	31.475.122,00
51	3501042018	Pacitan	Nanggungan	755.859.000,00	25.404.014,00	755.859.000,00	757.113.542,00	24.149.472,00
98	3501072004	Nawangan	Nawangan	1.184.317.000,00	23.858.626,00	1.017.024.600,00	1.040.260.000,00	623.226,00
22	3501022010	Pringkuku	Ngadirejan	1.147.793.000,00	220.942.178,00	918.632.600,00	918.443.800,00	221.130.978,00
146	3501112007	Ngadirojo	Ngadirojo	1.022.367.000,00	18.536.541,00	1.022.367.000,00	1.013.096.498,00	27.807.043,00
133	3501102011	Tulakan	Ngile	1.066.976.000,00	35.829.300,00	1.066.976.000,00	1.082.362.800,00	20.442.500,00
124	3501102002	Tulakan	Nglaran	1.220.515.000,00	1.908.869,00	1.220.515.000,00	1.203.598.000,00	18.825.869,00
114	3501092003	Tegalombo	Ngreco	1.327.585.000,00	114.991.604,00	1.327.585.000,00	1.238.307.800,00	204.268.804,00
103	3501072009	Nawangan	Ngromo	1.327.121.000,00	12.419.961,00	1.001.942.800,00	1.014.362.761,00	0,00

No	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Silpa Tahun Sebelumnya	Realisasi Penyaluran	Realisasi Belanja	Sisa
136	3501102014	Tulakan	Ngumbul	1.285.825.000,00	220.619.405,00	1.285.825.000,00	1.262.872.100,00	243.572.305,00
105	3501082002	Bandar	Ngunut	1.214.281.000,00	176.632.588,00	1.214.281.000,00	1.196.461.650,00	194.451.938,00
151	3501112012	Ngadirojo	Nogosari	855.816.000,00	133.223.114,00	855.816.000,00	852.682.990,00	136.356.124,00
126	3501102004	Tulakan	Padi	1.381.855.000,00	234.673.997,00	1.080.705.400,00	1.155.900.000,00	159.479.397,00
144	3501112005	Ngadirojo	Pagerejo	1.030.934.000,00	62.208.540,00	859.424.800,00	892.674.335,00	28.959.005,00
158	3501122001	Sudimoro	Pagerkidul	1.205.777.000,00	71.971.378,00	1.205.777.000,00	1.160.302.400,00	117.445.978,00
159	3501122002	Sudimoro	Pagerlor	1.052.525.000,00	38.520.381,00	1.052.525.000,00	1.061.674.200,00	29.371.181,00
83	3501062006	Arjosari	Pagutan	780.006.000,00	131.181.339,00	780.006.000,00	774.337.590,00	136.849.749,00
102	3501072008	Nawangan	Pakis Baru	1.217.551.000,00	15.887.607,00	1.217.551.000,00	1.209.743.275,00	23.695.332,00
24	3501022012	Pringkuku	Pelem	984.653.000,00	250.999.992,00	984.653.000,00	834.689.695,00	400.963.297,00
101	3501072007	Nawangan	Penggung	1.334.173.000,00	25.498.466,00	1.166.615.800,00	1.192.077.600,00	36.666,00
104	3501082001	Bandar	Petungsinarang	1.317.319.000,00	122.260.355,00	1.317.319.000,00	1.274.251.000,00	165.328.355,00
30	3501032005	Punung	Piton	787.137.000,00	160.722.473,00	787.137.000,00	761.258.709,00	186.600.764,00
35	3501032010	Punung	Ploso	1.224.577.000,00	293.853.593,00	1.224.577.000,00	1.195.976.110,00	322.454.483,00
118	3501092007	Tegalombo	Ploso	1.338.721.000,00	323.434.442,00	975.793.300,00	1.101.459.550,00	197.768.192,00
59	3501052001	Kebonagung	Plumbungan	736.694.000,00	189.141.135,00	634.097.600,00	662.694.591,00	160.544.144,00
18	3501022006	Pringkuku	Poko	802.176.000,00	134.864.213,00	802.176.000,00	845.405.800,00	91.634.413,00
57	3501042024	Pacitan	Ponggok	825.138.000,00	241.813.460,00	825.138.000,00	797.600.395,00	269.351.065,00
20	3501022008	Pringkuku	Pringkuku	995.978.000,00	286.186.397,00	788.495.600,00	924.210.000,00	150.471.997,00
116	3501092005	Tegalombo	Pucangombo	1.475.497.000,00	522.468.151,00	1.475.497.000,00	1.661.340.120,00	336.625.031,00
74	3501052016	Kebonagung	Punjung	826.746.000,00	178.997.959,00	826.746.000,00	851.484.642,00	154.259.317,00
28	3501032003	Punung	Punung	1.306.636.000,00	25.272.917,00	1.306.636.000,00	1.280.789.500,00	51.119.417,00
70	3501052012	Kebonagung	Purwoasri	756.459.000,00	329.191.288,00	756.459.000,00	755.374.700,00	330.275.588,00
50	3501042017	Pacitan	Purworejo	753.675.000,00	495.486.995,00	753.675.000,00	801.911.899,00	447.250.096,00
54	3501042021	Pacitan	Sambong	970.046.000,00	444.741.634,00	970.046.000,00	1.078.467.302,00	336.320.332,00
73	3501052015	Kebonagung	Sanggrahan	895.218.000,00	26.076.086,00	895.218.000,00	855.932.907,00	65.361.179,00
2	3501012002	Donorojo	Sawahan	724.421.000,00	57.524.743,00	724.421.000,00	721.393.610,00	60.552.133,00
79	3501062002	Arjosari	Sedayu	983.810.000,00	242.997.735,00	983.810.000,00	910.930.480,00	315.877.255,00
45	3501042010	Pacitan	Sedeng	818.748.000,00	92.749.155,00	818.748.000,00	827.379.700,00	84.117.455,00
10	3501012010	Donorojo	Sekar	925.709.000,00	72.175.082,00	925.709.000,00	923.971.889,00	73.912.193,00
53	3501042020	Pacitan	Semanten	734.169.000,00	98.039.967,00	530.596.500,00	605.859.221,00	22.777.246,00
164	3501122007	Sudimoro	Sembowo	837.483.000,00	380.375.437,00	837.483.000,00	855.023.000,00	362.835.437,00
97	3501072003	Nawangan	Sempu	1.318.945.000,00	15.807.000,00	1.318.945.000,00	1.289.943.000,00	44.809.000,00
4	3501012004	Donorojo	Sendang	1.132.194.000,00	45.596.231,00	1.132.194.000,00	1.115.524.500,00	62.265.731,00
65	3501052007	Kebonagung	Sidomulyo	1.072.513.000,00	75.268.764,00	832.355.800,00	884.693.000,00	22.931.564,00
140	3501112001	Ngadirojo	Sidomulyo	1.292.066.000,00	48.221.508,00	1.030.569.200,00	1.041.004.250,00	37.786.458,00
42	3501042006	Pacitan	Sirnoboyo	891.983.000,00	152.289.288,00	759.027.800,00	874.774.700,00	36.542.388,00
21	3501022009	Pringkuku	Sobo	688.442.000,00	154.119.280,00	688.442.000,00	605.022.335,00	237.538.945,00
27	3501032002	Punung	Sooka	787.650.000,00	261.617.659,00	787.650.000,00	829.081.525,00	220.186.134,00
161	3501122004	Sudimoro	Sudimoro	1.174.606.000,00	25.660.351,00	1.174.606.000,00	1.190.949.450,00	9.316.901,00
14	3501022002	Pringkuku	Sugihwaras	674.909.000,00	109.200.094,00	473.819.600,00	524.988.500,00	58.031.194,00
9	3501012009	Donorojo	Sukodono	935.738.000,00	4.529.764,00	935.738.000,00	930.143.640,00	10.124.124,00
40	3501042004	Pacitan	Sukoharjo	730.179.000,00	359.573.153,00	570.218.040,00	647.876.789,00	281.914.404,00
160	3501122003	Sudimoro	Sukorejo	1.059.681.000,00	75.402.241,00	1.059.681.000,00	1.044.591.050,00	90.492.191,00
167	3501122010	Sudimoro	Sumberejo	1.172.540.000,00	268.305.853,00	1.172.540.000,00	1.166.694.945,00	274.150.908,00
46	3501042011	Pacitan	Sumberharjo	774.318.000,00	102.272.450,00	623.661.200,00	634.186.900,00	91.746.750,00
121	3501092010	Tegalombo	Tahunan	1.064.141.000,00	241.691.618,00	1.064.141.000,00	1.036.327.000,00	269.505.618,00
122	3501092011	Tegalombo	Tahunan Baru	877.371.000,00	91.317.070,00	709.686.060,00	801.003.130,00	0,00
25	3501022013	Pringkuku	Tamanasri	937.989.000,00	54.472.629,00	937.989.000,00	900.803.600,00	91.658.029,00
58	3501042025	Pacitan	Tambakrejo	783.588.000,00	81.006.979,00	783.588.000,00	772.441.180,00	92.153.799,00
150	3501112011	Ngadirojo	Tanjunglor	898.833.000,00	206.976.692,00	898.833.000,00	876.553.600,00	229.256.092,00

No	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Silpa Tahun Sebelumnya	Realisasi Penyaluran	Realisasi Belanja	Sisa
142	3501112003	Ngadirojo	Tanjungpuro	1.021.986.000,00	20.561.920,00	939.339.200,00	916.765.741,00	43.135.379,00
47	3501042014	Pacitan	Tanjungsari	855.917.000,00	101.971.816,00	855.917.000,00	866.552.907,00	91.335.909,00
119	3501092008	Tegalombo	Tegalombo	934.655.000,00	44.254.093,00	934.655.000,00	898.463.755,00	80.445.338,00
90	3501062013	Arjosari	Temon	1.084.085.000,00	119.746.997,00	778.848.800,00	898.595.797,00	0,00
38	3501032013	Punung	Tinatar	1.168.215.000,00	89.335.400,00	1.168.215.000,00	1.202.280.050,00	55.270.350,00
99	3501072005	Nawangan	Tokawi	1.271.014.000,00	9.620.000,00	924.165.200,00	933.785.200,00	0,00
80	3501062003	Arjosari	Tremas	765.168.000,00	190.242.949,00	765.168.000,00	902.836.700,00	52.574.249,00
129	3501102007	Tulakan	Tulakan	1.220.555.000,00	142.875.452,00	947.322.400,00	999.355.764,00	90.842.088,00
108	3501082005	Bandar	Tumpuk	1.193.458.000,00	211.051.143,00	1.193.458.000,00	1.238.323.100,00	166.186.043,00
32	3501032007	Punung	Wareng	1.010.211.000,00	60.467.811,00	1.010.211.000,00	953.775.870,00	116.902.941,00
15	3501022003	Pringkuku	Watukarung	1.013.529.000,00	57.351.021,00	1.013.529.000,00	1.033.473.734,00	37.406.287,00
109	3501082006	Bandar	Watupatok	991.406.000,00	128.433.327,00	991.406.000,00	1.091.458.750,00	28.380.577,00
1	3501012001	Donorojo	Widoro	857.220.000,00	105.271.578,00	857.220.000,00	881.882.500,00	80.609.078,00
52	3501042019	Pacitan	Widoro	986.907.000,00	90.219.982,00	785.496.400,00	852.042.700,00	23.673.682,00
145	3501112006	Ngadirojo	Wiyoro	716.208.000,00	117.778.037,00	716.208.000,00	730.138.262,00	103.847.775,00
125	3501102003	Tulakan	Wonoanti	1.109.462.000,00	160.830.800,00	707.436.800,00	720.127.000,00	148.140.600,00
157	3501112018	Ngadirojo	Wonoasri	982.127.000,00	67.077.951,00	982.127.000,00	967.583.000,00	81.621.951,00
154	3501112015	Ngadirojo	Wonodadi Kulon	1.027.301.000,00	79.716.966,00	807.618.000,00	850.865.200,00	36.469.766,00
153	3501112014	Ngadirojo	Wonodadi Wetan	792.702.000,00	102.765.221,00	792.702.000,00	750.070.000,00	145.397.221,00
75	3501052017	Kebonagung	Wonogondo	793.428.000,00	28.672.765,00	793.428.000,00	805.592.000,00	16.508.765,00
155	3501112016	Ngadirojo	Wonokarto	951.350.000,00	53.029.190,00	951.350.000,00	918.958.000,00	85.421.190,00
137	3501102015	Tulakan	Wonosidi	1.288.639.000,00	12.303.476,00	1.288.639.000,00	1.233.963.618,00	66.978.858,00
156	3501112017	Ngadirojo	Wonosobo	863.358.000,00	58.850.842,00	863.358.000,00	842.577.500,00	79.631.342,00
66	3501052008	Kebonagung	Worawari	804.972.000,00	264.821.618,00	804.972.000,00	858.136.000,00	211.657.618,00
				164.996.136.000,00	**22.119.453.813,00**	**154.141.351.140,00**	**156.405.688.438,00**	**19.855.116.515,00**

Lampiran 7

RINCIAN SISA KAS DI BLUD TAHUN ANGGARAN 2025

Nama UPT/BLUD	SALDO AWAL	JASA GIRO	PENDAPATAN JASA LAYANAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2025 (sesuai LRA)	SALDO SESUAI RC	Selisih
RSUD dr. DARSONO	7.488.166.041,62			537.751.149		103.524.417.820	104.062.168.968,76	103.991.519.710,98	7.558.815.299,40	7.558.815.299,40	-
PUSK PACITAN	164.441.896,00	**1.809.605,00**	-	-	**1.367.221.443,00**	-	1.369.031.048,00	**3.181.949.725,88**	120.481.402,00	120.481.402,00	-
PUSK TANJUNGSARI	226.606.459,00	3.382.193,00	-	-	2.395.001.188,00	-	2.398.383.381,00	2.114.928.933,00	366.842.372,00	366.842.372,00	-
PUSK KEBONAGUNG	74.880.269,00	720.546,00	-	-	1.737.065.767,00	-	1.737.786.313,00	2.222.979.536,00	68.621.116,00	68.621.116,00	-
PUSK KETROWONOJOYO	7.740.568,52	618.072,71	-	-	1.188.848.334,00	-	1.189.466.406,71	725.088.882,00	111.626.405,23	111.626.405,23	-
PUSK ARJOSARI	501.633.712,39	4.229.625,80	-	-	2.764.331.459,00	-	2.768.561.084,80	1.603.365.441,00	88.245.071,31	88.245.071,31	-
PUSK KEDUNGBENDO	11.131.820,00	383.503,00	-	-	604.229.539,00	-	604.613.042,00	2.475.663.735,00	91.140.073,00	91.140.073,00	-
PUSK PUNUNG	126.495.664,00	2.095.552,00	-	-	1.948.591.910,00	-	1.950.687.462,00	1.328.230.959,00	63.072.972,00	63.072.972,00	-
PUSK GONDOSARI	158.829.884,73	1.355.003,75	-	-	1.409.360.408,00	-	1.410.715.411,75	1.237.316.534,00	241.314.337,48	224.314.337,48	17.000.000,00
PUSK PRINGKUKU	71.895.563,00	1.142.559,00	-	-	1.074.321.086,00	-	1.075.463.645,00	747.844.903,00	64.311.614,00	64.311.614,00	-
PUSK CANDI	10.740.645,66	259.094,22	-	-	748.901.470,00	-	749.160.564,22	1.744.045.466,00	34.812.327,88	34.812.327,88	-
PUSK DONOROJO	5.950.323,59	407.640,37	-	-	1.646.424.560,00	-	1.646.832.200,37	524.604.789,00	49.417.082,96	49.417.082,96	-
PUSK KALAK	10.371.701,51	176.067,97	-	-	756.546.576,00	-	756.722.643,97	1.085.580.570,00	19.249.442,48	19.249.442,48	-
PUSK NGADIROJO	526.504.172,93	3.283.191,35	-	-	3.649.825.295,00	-	3.653.108.486,35	2.311.888.567,00	242.246.962,28	242.246.962,28	-
PUSK WONOKARTO	146.690.354,24	1.393.211,28	-	-	932.886.640,00	-	934.279.851,28	3.937.365.697,00	160.449.794,52	160.449.794,52	-
PUSK TULAKAN	297.290.115,01	2.543.671,31	-	-	4.838.456.158,00	-	4.840.999.829,31	1.412.991.542,00	502.104.247,32	502.104.247,32	-
PUSK BUBAKAN	215.167.406,10	1.567.812,79	-	-	2.549.514.708,00	-	2.551.082.520,79	2.385.714.248,00	543.270.390,89	543.270.390,89	-
PUSK SUDIMORO	360.539.462,34	2.960.919,38	-	-	1.348.045.942,00	-	1.351.006.861,38	1.083.047.594,00	477.592.711,72	477.592.711,72	-
PUSK SUKOREJO	124.127.922,14	1.119.702,32	-	-	1.112.084.404,00	-	1.113.204.106,32	2.014.110.154,00	114.672.764,46	114.672.764,46	-
PUSK TEGALOMBO	259.880.390,00	3.209.965,00	-	-	3.098.718.960,00	-	3.101.928.925,00	1.233.953.612,00	400.861.258,00	400.861.258,00	-
PUSK GEMAHARJO	426.735.692,00	2.398.945,00	-	-	2.089.827.343,00	-	2.092.226.288,00	1.122.659.264,00	43.298.245,00	43.298.245,00	-
PUSK NAWANGAN	183.864.703,35	1.035.062,52	-	-	2.344.339.513,00	-	2.345.374.575,52	2.258.147.468,00	217.350.711,87	217.350.711,87	-
PUSK PAKISBARU	219.328.404,63	2.302.671,98	-	-	2.376.636.804,00	-	2.378.939.475,98	2.960.948.057,00	212.553.632,61	212.553.632,61	-
PUSK BANDAR	266.101.999,28	2.126.206,96	-	-	1.932.527.256,00	-	1.934.653.462,96	4.636.185.697,00	85.826.529,24	85.826.529,24	0,00
PUSK JERUK	105.058.678,98	810.986,63	-	-	1.169.492.507,00	-	1.170.303.493,63	920.520.411,00	38.045.638,61	38.045.638,61	0,00
TOTAL	**4.502.007.808,40**	**41.331.809,34**	**-**	**537.751.148,76**	**45.083.199.270,00**	**103.524.417.820,00**	**149.186.700.048,10**	**149.260.651.495,86**	**11.916.222.402,26**	**4.340.407.102,86**	**17.000.000,00**

Lampiran 8

RINCIAN SISA KAS DANA BOS

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO TAHUN 2024	RINCIAN SALDO		
					TUNAI	BANK	TOTAL KAS
BOSP- PAUD DAN KESETARAAN							
1	20570130	TK NEGERI PEMBINA NGADIROJO	NEGERI	-	-	-	-
2	20569650	TK NEGERI PEMBINA PACITAN	NEGERI	-	-	-	-
3	20569649	TK NEGERI PEMBINA PRINGKUKU	NEGERI	-	-	-	-
4	20569652	TK NEGERI PEMBINA TULAKAN	NEGERI	-	-	-	-
5	P9956860	SKB PACITAN (PAUD)	NEGERI	-	-	-	-
6	P9956860	SKB PACITAN (KESETARAAN)	NEGERI	-	-	-	-
JUMLAH SISA KAS BOSP PAUD DAN KESETARAAN				**-**	**-**	**-**	**-**
BOSP- JEJANG SD							
1	20511270	SD NEGERI 1 BELAH	NEGERI	205.500,00	-	698.280,00	698.280,00
2	20511500	SD NEGERI 1 CEMENG	NEGERI	-	-	-	-
3	20511469	SD NEGERI 1 DONOROJO	NEGERI	394.560,00	-	186.150,00	186.150,00
4	20511478	SD NEGERI 1 GEDOMPOL	NEGERI	186.490,00	-	100.200,00	100.200,00
5	20511539	SD NEGERI 1 GENDARAN	NEGERI	-	-	-	-
6	20511405	SD NEGERI 1 KALAK	NEGERI	-	-	-	-
7	20551732	SD NEGERI 1 KLEPU	NEGERI	335.691,00	-	161.900,00	161.900,00
8	20510776	SD NEGERI 1 SAWAHAN	NEGERI	-	-	-	-
9	20510784	SD NEGERI 1 SEKAR	NEGERI	20.406,00	-	326.300,00	326.300,00
10	20510839	SD NEGERI 1 SENDANG	NEGERI	60.120,00	-	-	-
11	20510812	SD NEGERI 1 SUKODONO	NEGERI	141.203,00	-	145.820,00	145.820,00
12	20511033	SD NEGERI 1 WIDORO	NEGERI	-	-	-	-
13	20511269	SD NEGERI 2 BELAH	NEGERI	129.582,00	-	1.319.420,00	1.319.420,00
14	20511499	SD NEGERI 2 CEMENG	NEGERI	-	-	-	-
15	20511468	SD NEGERI 2 DONOROJO	NEGERI	222.277,00	-	226.624,00	226.624,00
16	20511477	SD NEGERI 2 GEDOMPOL	NEGERI	-	-	-	-
17	20511547	SD NEGERI 2 GENDARAN	NEGERI	382.240,00	-	-	-
18	20511404	SD NEGERI 2 KALAK	NEGERI	-	-	-	-
19	20511431	SD NEGERI 2 KLEPU	NEGERI	77.170,00	-	22.000,00	22.000,00
20	20510778	SD NEGERI 2 SAWAHAN	NEGERI	-	-	7.000,00	7.000,00
21	20510783	SD NEGERI 2 SEKAR	NEGERI	-	-	-	-
22	20510838	SD NEGERI 2 SENDANG	NEGERI	158.220,00	-	-	-
23	20510820	SD NEGERI 2 SUKODONO	NEGERI	2.743,00	-	18.273,00	18.273,00
24	20511022	SD NEGERI 2 WIDORO	NEGERI	8.236,00	-	9.000,00	9.000,00
25	20511268	SD NEGERI 3 BELAH	NEGERI	-	-	-	-
26	20511498	SD NEGERI 3 CEMENG	NEGERI	-	-	-	-
27	20511467	SD NEGERI 3 DONOROJO	NEGERI	14.067,00	-	20.200,00	20.200,00
28	20511466	SD NEGERI 3 GEDOMPOL	NEGERI	95,00	-	-	-
29	20551733	SD NEGERI 3 KLEPU	NEGERI	47.800,00	-	10.099.000,00	10.099.000,00
30	20510837	SD NEGERI 3 SENDANG	NEGERI	-	-	-	-
31	20510821	SD NEGERI 3 SUKODONO	NEGERI	82.921,00	37.391,00	-	37.391,00
32	20511428	SD NEGERI 4 KLEPU	NEGERI	109.220,00	-	133.920,00	133.920,00
33	20511494	SD NEGERI 1 BOMO	NEGERI	-	-	-	-
34	20511540	SD NEGERI 1 GONDOSARI	NEGERI	-	-	-	-
35	20511434	SD NEGERI 1 MANTREN	NEGERI	-	-	-	-
36	20510881	SD NEGERI 1 MENDOLO KIDUL	NEGERI	66.050,00	-	70.200,00	70.200,00
37	20510879	SD NEGERI 1 MENDOLO LOR	NEGERI	-	-	-	-
38	20510911	SD NEGERI 1 PITON	NEGERI	261.900,00	-	339.500,00	339.500,00
39	20510907	SD NEGERI 1 PLOSO	NEGERI	197.580,00	-	-	-
40	20510802	SD NEGERI 1 PUNUNG	NEGERI	20.550,00	-	46.220,00	46.220,00
41	20510832	SD NEGERI 1 SOOKA	NEGERI	1.084,00	-	50.306,00	50.306,00
42	20511054	SD NEGERI 1 TINATAR	NEGERI	-	-	-	-
43	20511493	SD NEGERI 2 BOMO	NEGERI	-	-	46.440,00	46.440,00
44	20511528	SD NEGERI 2 GONDOSARI	NEGERI	-	-	-	-
45	20511423	SD NEGERI 2 MANTREN	NEGERI	-	-	-	-
46	20510880	SD NEGERI 2 MENDOLO KIDUL	NEGERI	-	-	-	-
47	20510878	SD NEGERI 2 MENDOLO LOR	NEGERI	-	-	-	-
48	20510910	SD NEGERI 2 PITON	NEGERI	218.864,00	-	109.935,00	109.935,00
49	20510895	SD NEGERI 2 PLOSO	NEGERI	116.130,00	-	-	-
50	20510791	SD NEGERI 2 PUNUNG	NEGERI	1.141.200,00	-	15.100,00	15.100,00
51	20510831	SD NEGERI 2 SOOKA	NEGERI	-	-	-	-
52	20511043	SD NEGERI 2 TINATAR	NEGERI	-	-	-	-
53	20511492	SD NEGERI 3 BOMO	NEGERI	-	-	818.820,00	818.820,00
54	20511527	SD NEGERI 3 GONDOSARI	NEGERI	-	-	-	-
55	20510799	SD NEGERI 3 PLOSO	NEGERI	180,00	-	-	-
56	20510790	SD NEGERI 3 PUNUNG	NEGERI	15.800,00	-	165.166,00	165.166,00
57	20511042	SD NEGERI 3 TINATAR	NEGERI	-	-	6.136.000,00	6.136.000,00
58	20510797	SD NEGERI 4 PLOSO	NEGERI	-	-	-	-
59	20510788	SD NEGERI 4 PUNUNG	NEGERI	-	-	-	-
60	20510775	SD NEGERI 6 PUNUNG	NEGERI	46.301,00	-	5.650,00	5.650,00
61	20511397	SD NEGERI KEBONSARI	NEGERI	-	-	-	-
62	20511452	SD NEGERI KENDAL	NEGERI	240,00	-	-	-
63	20511039	SD NEGERI WARENG	NEGERI	14.091,00	-	121.581,00	121.581,00
64	20511505	SD NEGERI 1 CANDI	NEGERI	30.276,00	-	5.819.600,00	5.819.600,00
65	20511473	SD NEGERI 1 DADAPAN	NEGERI	387.660,00	-	133.000,00	133.000,00
66	20511471	SD NEGERI 1 DERSONO	NEGERI	408,00	-	72.020,00	72.020,00
67	20511546	SD NEGERI 1 GLINGGANGAN	NEGERI	62.990,00	-	6.842.370,00	6.842.370,00
68	20511407	SD NEGERI 1 JLUBANG	NEGERI	140.130,00	-	43.200,00	43.200,00
69	20510902	SD NEGERI 1 PELEM	NEGERI	22.712,00	-	2.640,00	2.640,00
70	20510793	SD NEGERI 1 PRINGKUKU	NEGERI	-	-	28.000,00	28.000,00
71	20510815	SD NEGERI 1 SUGIHWARAS	NEGERI	11.000,00	-	-	-
72	20511062	SD NEGERI 1 TAMANASRI	NEGERI	-	-	-	-
73	20511504	SD NEGERI 2 CANDI	NEGERI	232.131,00	-	469.300,00	469.300,00
74	20511474	SD NEGERI 2 DADAPAN	NEGERI	508.460,00	-	21.000,00	21.000,00
75	20511470	SD NEGERI 2 DERSONO	NEGERI	80.800,00	-	34.400,00	34.400,00
76	20511545	SD NEGERI 2 GLINGGANGAN	NEGERI	2.520,00	2.520,00	201.600,00	204.120,00
77	20511406	SD NEGERI 2 JLUBANG	NEGERI	122.195,00	-	360.000,00	360.000,00
78	20510903	SD NEGERI 2 PELEM	NEGERI	614.880,00	-	1.057.198,00	1.057.198,00
79	20510792	SD NEGERI 2 PRINGKUKU	NEGERI	4.250,00	-	-	-
80	20510814	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	NEGERI	2.700,00	-	-	-
81	20511051	SD NEGERI 2 TAMANASRI	NEGERI	253.320,00	-	-	-
82	20511503	SD NEGERI 3 CANDI	NEGERI	131.166,00	-	-	-
83	20511472	SD NEGERI 3 DERSONO	NEGERI	169.775,00	-	311.070,00	311.070,00
84	20511544	SD NEGERI 3 GLINGGANGAN	NEGERI	1.397,00	-	9.750,00	9.750,00
85	20510901	SD NEGERI 3 PELEM	NEGERI	102.300,00	-	1.500,00	1.500,00
86	20510800	SD NEGERI 3 PRINGKUKU	NEGERI	-	-	-	-
87	20511502	SD NEGERI 4 CANDI	NEGERI	2.520,00	-	-	-
88	20555437	SD NEGERI NGADIREJAN	NEGERI	-	-	-	-
89	20510795	SD NEGERI POKO	NEGERI	33.510,00	-	-	-
90	20510843	SD NEGERI SOBO	NEGERI	-	-	149.822,00	149.822,00
91	20511038	SD NEGERI WATU KARUNG	NEGERI	349.550,00	-	17.400,00	17.400,00
92	20511264	SD NEGERI 1 BALEHARJO	NEGERI	30.576,00	-	28.090.510,00	28.090.510,00
93	20511391	SD NEGERI 1 KAYEN	NEGERI	-	-	4.320,00	4.320,00
94	20510909	SD NEGERI 1 PLOSO	NEGERI	500,00	-	-	-
95	20510771	SD NEGERI 1 SAMBONG	NEGERI	66.170,00	-	-	-

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO TAHUN 2024	RINCIAN SALDO		
					TUNAI	BANK	TOTAL KAS
96	20510786	SD NEGERI 1 SEDENG	NEGERI	2.027,00	-	-	-
97	20510846	SD NEGERI 1 SIRNOBOYO	NEGERI	169.160,00	10,00	-	10,00
98	20511050	SD NEGERI 1 TAMBAKREJO	NEGERI	1.051.532,00	-	-	-
99	20511263	SD NEGERI 2 BALEHARJO	NEGERI	12.200,00	-	82.440,00	82.440,00
100	20511392	SD NEGERI 2 KAYEN	NEGERI	2.280,00	-	-	-
101	20510906	SD NEGERI 2 PLOSO	NEGERI	15.113,00	-	12.848.600,00	12.848.600,00
102	20510770	SD NEGERI 2 SAMBONG	NEGERI	208.200,00	-	128.763,00	128.763,00
103	20510785	SD NEGERI 2 SEDENG	NEGERI	459.497,00	-	326.785,00	326.785,00
104	20510845	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	NEGERI	249.200,00	-	-	-
105	20511049	SD NEGERI 2 TAMBAKREJO	NEGERI	-	-	-	-
106	20510844	SD NEGERI 3 SIRNOBOYO	NEGERI	251.155,00	-	92.600,00	92.600,00
107	20511276	SD NEGERI ARJOWINANGUN	NEGERI	4.550,00	-	33.856,00	33.856,00
108	20555436	SD NEGERI BANGUNSARI	NEGERI	77.291,00	77.291,00	-	77.291,00
109	20511271	SD NEGERI BANJARSARI	NEGERI	-	-	-	-
110	20537131	SD NEGERI BOLOSINGO	NEGERI	333.253,00	-	-	-
111	20511394	SD NEGERI KEMBANG	NEGERI	35.116,00	-	42.166,00	42.166,00
112	20510894	SD NEGERI MENADI	NEGERI	104.360,00	-	35.610,00	35.610,00
113	20510877	SD NEGERI MENTORO	NEGERI	-	-	-	-
114	20510892	SD NEGERI NANGGUNGAN	NEGERI	240,00	-	38.000,00	38.000,00
115	20510921	SD NEGERI PACITAN	NEGERI	25.250,00	-	-	-
116	20510794	SD NEGERI PONGGOK	NEGERI	600,00	-	7.018,00	7.018,00
117	20510805	SD NEGERI PUCANGSEWU	NEGERI	192.257,00	-	11.680,00	11.680,00
118	20510772	SD NEGERI PURWOREJO	NEGERI	601.885,00	-	-	-
119	20510782	SD NEGERI SEMANTEN	NEGERI	-	-	-	-
120	20510836	SD NEGERI SIDOHARJO	NEGERI	53.850,00	-	110.770,00	110.770,00
121	20510813	SD NEGERI SUKOHARJO	NEGERI	54.276,00	-	138.950,00	138.950,00
122	20510825	SD NEGERI SUMBERHARJO	NEGERI	600.451,00	-	900,00	900,00
123	20511044	SD NEGERI TANJUNGSARI	NEGERI	2.809.677,00	-	20.439,00	20.439,00
124	20511034	SD NEGERI WIDORO	NEGERI	-	-	31.449,00	31.449,00
125	20511484	SD NEGERI 1 GAWANG	NEGERI	-	-	-	-
126	20511537	SD NEGERI 1 GEMBUK	NEGERI	-	-	-	-
127	20511418	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	NEGERI	-	-	-	-
128	20511402	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	NEGERI	500,00	-	-	-
129	20511384	SD NEGERI 1 KATIPUGAL	NEGERI	33.621,00	-	32.992,00	32.992,00
130	20511447	SD NEGERI 1 KETEPUNG	NEGERI	96.000,00	-	-	-
131	20511455	SD NEGERI 1 KETRO	NEGERI	144.924,00	-	63.900,00	63.900,00
132	20511425	SD NEGERI 1 KLESEM	NEGERI	-	-	17.100,00	17.100,00
133	20510804	SD NEGERI 1 PUNJUNG	NEGERI	10.480,00	-	-	-
134	20510774	SD NEGERI 1 PURWOASRI	NEGERI	590.949,00	-	631.000,00	631.000,00
135	20510769	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	NEGERI	-	-	-	-
136	20510833	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	NEGERI	8.520,00	-	8.620,00	8.620,00
137	20511094	SD NEGERI 1 WONOGONDO	NEGERI	101.200,00	-	19.200,00	19.200,00
138	20511069	SD NEGERI 1 WORAWARI	NEGERI	-	-	-	-
139	20511483	SD NEGERI 2 GAWANG	NEGERI	115.102,00	-	58.595,00	58.595,00
140	20511538	SD NEGERI 2 GEMBUK	NEGERI	5.195.594,00	-	60.000,00	60.000,00
141	20511417	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	NEGERI	49.100,00	-	3.000,00	3.000,00
142	20511401	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	NEGERI	280.338,00	-	1.450,00	1.450,00
143	20511383	SD NEGERI 2 KATIPUGAL	NEGERI	-	-	-	-
144	20511446	SD NEGERI 2 KETEPUNG	NEGERI	28.800,00	-	41.000,00	41.000,00
145	20511463	SD NEGERI 2 KETRO	NEGERI	317.747,00	-	170.315,00	170.315,00
146	20511424	SD NEGERI 2 KLESEM	NEGERI	-	-	-	-
147	20510803	SD NEGERI 2 PUNJUNG	NEGERI	-	-	-	-
148	20510773	SD NEGERI 2 PURWOASRI	NEGERI	262.800,00	-	262.000,00	262.000,00
149	20510768	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	NEGERI	56.000,00	-	-	-
150	20510842	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	NEGERI	150.730,00	-	463.800,00	463.800,00
151	20511202	SD NEGERI 2 WONOGONDO	NEGERI	62.074,00	-	21.777,00	21.777,00
152	20511068	SD NEGERI 2 WORAWARI	NEGERI	-	-	107.625,00	107.625,00
153	20510850	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	NEGERI	8.000,00	-	-	-
154	20511272	SD NEGERI BANJARJO	NEGERI	-	-	-	-
155	20511419	SD NEGERI KALIPELUS	NEGERI	144.100,00	-	56.100,00	56.100,00
156	20511400	SD NEGERI KEBONAGUNG	NEGERI	478.000,00	-	301.760,00	301.760,00
157	20511435	SD NEGERI MANTREN	NEGERI	-	-	-	-
158	20510796	SD NEGERI PLUMBUNGAN	NEGERI	-	-	-	-
159	20511491	SD NEGERI 1 BORANG	NEGERI	71.338,00	-	289.600,00	289.600,00
160	20511530	SD NEGERI 1 GEMBONG	NEGERI	827.811,00	-	260.456,00	260.456,00
161	20511526	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	NEGERI	392.600,00	-	399.000,00	399.000,00
162	20511409	SD NEGERI 1 JETISKIDUL	NEGERI	-	-	-	-
163	20511416	SD NEGERI 1 KARANGGEDE	NEGERI	550.000,00	-	12.756,00	12.756,00
164	20511390	SD NEGERI 1 KARANGREJO	NEGERI	330.932,00	-	90.798,00	90.798,00
165	20511396	SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO	NEGERI	-	-	4.000,00	4.000,00
166	20510876	SD NEGERI 1 MLATI	NEGERI	12.500,00	-	-	-
167	20510779	SD NEGERI 1 SEDAYU	NEGERI	68.737,00	-	297.410,00	297.410,00
168	20511058	SD NEGERI 1 TEMON	NEGERI	98.030,00	-	-	-
169	20511490	SD NEGERI 2 BORANG	NEGERI	20.396,00	-	-	-
170	20511529	SD NEGERI 2 GEMBONG	NEGERI	26.795,00	-	-	-
171	20511515	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI	NEGERI	513,00	-	86.100,00	86.100,00
172	20511408	SD NEGERI 2 JETISKIDUL	NEGERI	-	-	-	-
173	20511415	SD NEGERI 2 KARANGGEDE	NEGERI	73.864,00	-	19.620,00	19.620,00
174	20511389	SD NEGERI 2 KARANGREJO	NEGERI	302.123,00	-	669.616,00	669.616,00
175	20511395	SD NEGERI 2 KEDUNGBENDO	NEGERI	19.000,00	-	7.500,00	7.500,00
176	20510875	SD NEGERI 2 MLATI	NEGERI	58.020,00	-	83.540,00	83.540,00
177	20510787	SD NEGERI 2 SEDAYU	NEGERI	282.100,00	-	-	-
178	20511057	SD NEGERI 2 TEMON	NEGERI	104.920,00	-	250.800,00	250.800,00
179	20511514	SD NEGERI 3 GUNUNGSARI	NEGERI	-	-	-	-
180	20511414	SD NEGERI 3 KARANGGEDE	NEGERI	100.439,00	-	22.096,00	22.096,00
181	20511436	SD NEGERI 3 MANGUNHARJO	NEGERI	-	-	-	-
182	20510874	SD NEGERI 3 MLATI	NEGERI	24.750,00	-	-	-
183	20511056	SD NEGERI 3 TEMON	NEGERI	103.950,00	-	-	-
184	20511403	SD NEGERI 4 KARANGGEDE	NEGERI	101.170,00	-	63.248,00	63.248,00
185	20511055	SD NEGERI 4 TEMON	NEGERI	264.350,00	198.650,00	84.800,00	283.450,00
186	20511288	SD NEGERI ARJOSARI	NEGERI	94.000,00	-	119.343,00	119.343,00
187	20511482	SD NEGERI GAYUHAN	NEGERI	387.500,00	-	6.800,00	6.800,00
188	20511536	SD NEGERI GEGERAN	NEGERI	1.156.875,00	1.070.110,00	-	1.070.110,00
189	20555441	SD NEGERI JATIMALANG	NEGERI	888.989,00	-	7.200,00	7.200,00
190	20555439	SD NEGERI MANGUNHARJO	NEGERI	209.600,00	-	43.550,00	43.550,00
191	20510927	SD NEGERI PAGUTAN	NEGERI	224.840,00	-	12.000,00	12.000,00
192	20511026	SD NEGERI TREMAS	NEGERI	4.353,00	-	159.100,00	159.100,00
193	20511543	SD NEGERI 1 GONDANG	NEGERI	100.514,00	-	1.567.814,00	1.567.814,00
194	20511422	SD NEGERI 1 JETIS LOR	NEGERI	203.710,00	-	241.594,00	241.594,00
195	20510882	SD NEGERI 1 MUJING	NEGERI	284.200,00	-	544.600,00	544.600,00
196	20510891	SD NEGERI 1 NAWANGAN	NEGERI	9.010,00	-	41.000,00	41.000,00
197	20510869	SD NEGERI 1 NGROMO	NEGERI	4.262.066,00	112.194,00	-	112.194,00
198	20510916	SD NEGERI 1 PAKIS BARU	NEGERI	71.150,00	-	66.400,00	66.400,00
199	20510900	SD NEGERI 1 PENGGUNG	NEGERI	-	-	-	-
200	20510781	SD NEGERI 1 SEMPU	NEGERI	1.250.754,00	-	141.342,00	141.342,00
201	20511041	SD NEGERI 1 TOKAWI	NEGERI	-	-	-	-
202	20511542	SD NEGERI 2 GONDANG	NEGERI	-	-	-	-

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO TAHUN 2024	RINCIAN SALDO		
					TUNAI	BANK	TOTAL KAS
203	20511411	SD NEGERI 2 JETIS LOR	NEGERI	-	-	-	-
204	20510883	SD NEGERI 2 MUJING	NEGERI	213.045,00	-	-	-
205	20510889	SD NEGERI 2 NAWANGAN	NEGERI	1.000,00	-	-	-
206	20510868	SD NEGERI 2 NGROMO	NEGERI	91.200,00	-	71.200,00	71.200,00
207	20510915	SD NEGERI 2 PAKIS BARU	NEGERI	-	-	-	-
208	20510899	SD NEGERI 2 PENGGUNG	NEGERI	-	-	-	-
209	20510780	SD NEGERI 2 SEMPU	NEGERI	127.600,00	-	28.900,00	28.900,00
210	20511030	SD NEGERI 2 TOKAWI	NEGERI	8.500,00	-	-	-
211	20511541	SD NEGERI 3 GONDANG	NEGERI	1.705.790,00	-	1.285.440,00	1.285.440,00
212	20511410	SD NEGERI 3 JETIS LOR	NEGERI	-	-	-	-
213	20510893	SD NEGERI 3 MUJING	NEGERI	133.500,00	-	4.922,00	4.922,00
214	20510887	SD NEGERI 3 NAWANGAN	NEGERI	-	-	-	-
215	20510867	SD NEGERI 3 NGROMO	NEGERI	8.000,00	-	-	-
216	20510914	SD NEGERI 3 PAKIS BARU	NEGERI	78.500,00	-	-	-
217	20510898	SD NEGERI 3 PENGGUNG	NEGERI	11.500,00	-	-	-
218	20510851	SD NEGERI 3 SEMPU	NEGERI	159.600,00	-	-	-
219	20511029	SD NEGERI 3 TOKAWI	NEGERI	337.800,00	-	-	-
220	20510886	SD NEGERI 4 NAWANGAN	NEGERI	-	-	-	-
221	20510897	SD NEGERI 4 PENGGUNG	NEGERI	602.000,00	-	-	-
222	20510840	SD NEGERI 4 SEMPU	NEGERI	37.905,00	-	30.430,00	30.430,00
223	20511028	SD NEGERI 4 TOKAWI	NEGERI	13.500,00	-	-	-
224	20510885	SD NEGERI 5 NAWANGAN	NEGERI	-	-	-	-
225	20555440	SD NEGERI 1 BANDAR	NEGERI	402,00	1,00	401,00	402,00
226	20511257	SD NEGERI 1 BANGUNSARI	NEGERI	600.185,00	-	269,00	269,00
227	20511523	SD NEGERI 1 JERUK	NEGERI	430.103,00	-	-	-
228	20511459	SD NEGERI 1 KLEDUNG	NEGERI	378,00	-	-	-
229	20510863	SD NEGERI 1 NGUNUT	NEGERI	-	-	203.000,00	203.000,00
230	20510896	SD NEGERI 1 PETUNGSINARANG	NEGERI	75,00	-	-	-
231	20511031	SD NEGERI 1 TUMPUK	NEGERI	-	-	-	-
232	20511037	SD NEGERI 1 WATUPATOK	NEGERI	4.055,00	-	260,00	260,00
233	20511261	SD NEGERI 2 BANDAR	NEGERI	453,00	-	-	-
234	20511274	SD NEGERI 2 BANGUNSARI	NEGERI	174,00	1.975.000,00	-	1.975.000,00
235	20511522	SD NEGERI 2 JERUK	NEGERI	-	-	16.224,00	16.224,00
236	20511458	SD NEGERI 2 KLEDUNG	NEGERI	-	-	-	-
237	20510852	SD NEGERI 2 NGUNUT	NEGERI	-	-	3.000,00	3.000,00
238	20510904	SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG	NEGERI	-	-	-	-
239	20511032	SD NEGERI 2 TUMPUK	NEGERI	-	-	500.000,00	500.000,00
240	20511036	SD NEGERI 2 WATUPATOK	NEGERI	-	-	3.000,00	3.000,00
241	20511260	SD NEGERI 3 BANDAR	NEGERI	6.073,00	-	-	-
242	20511273	SD NEGERI 3 BANGUNSARI	NEGERI	-	-	-	-
243	20511521	SD NEGERI 3 JERUK	NEGERI	312.526,00	-	441.048,00	441.048,00
244	20511457	SD NEGERI 3 KLEDUNG	NEGERI	4,00	-	-	-
245	20510935	SD NEGERI 3 NGUNUT	NEGERI	-	-	-	-
246	20510905	SD NEGERI 3 PETUNGSINARANG	NEGERI	-	-	-	-
247	20511040	SD NEGERI 3 TUMPUK	NEGERI	27.398,00	-	542.340,00	542.340,00
248	20511035	SD NEGERI 3 WATUPATOK	NEGERI	-	-	-	-
249	20511520	SD NEGERI 4 JERUK	NEGERI	-	-	-	-
250	20510924	SD NEGERI 4 NGUNUT	NEGERI	-	-	-	-
251	20510913	SD NEGERI 4 PETUNGSINARANG	NEGERI	5.701,00	-	-	-
252	20511258	SD NEGERI 5 BANDAR	NEGERI	504,00	504,00	-	504,00
253	20511519	SD NEGERI 5 JERUK	NEGERI	627.835,00	-	-	-
254	20510912	SD NEGERI 5 PETUNGSINARANG	NEGERI	-	-	43.000,00	43.000,00
255	20511480	SD NEGERI 1 GEDANGAN	NEGERI	-	-	-	-
256	20511535	SD NEGERI 1 GEMAHARJO	NEGERI	9.600,00	-	1.000,00	1.000,00
257	20511388	SD NEGERI 1 KASIHAN	NEGERI	-	-	-	-
258	20511399	SD NEGERI 1 KEBONDALEM	NEGERI	-	-	-	-
259	20511393	SD NEGERI 1 KEMUNING	NEGERI	-	-	-	-
260	20510855	SD NEGERI 1 NGRECO	NEGERI	-	-	-	-
261	20510908	SD NEGERI 1 PLOSO	NEGERI	-	-	-	-
262	20510801	SD NEGERI 1 PUCANGOMBO	NEGERI	-	-	-	-
263	20510823	SD NEGERI 1 TAHUNAN	NEGERI	-	-	-	-
264	20510824	SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU	NEGERI	-	-	-	-
265	20511052	SD NEGERI 1 TEGALOMBO	NEGERI	187.388,00	-	23.259,00	23.259,00
266	20511479	SD NEGERI 2 GEDANGAN	NEGERI	-	-	-	-
267	20511534	SD NEGERI 2 GEMAHARJO	NEGERI	-	-	-	-
268	20511387	SD NEGERI 2 KASIHAN	NEGERI	-	-	-	-
269	20511398	SD NEGERI 2 KEBONDALEM	NEGERI	-	-	-	-
270	20511382	SD NEGERI 2 KEMUNING	NEGERI	376.500,00	-	-	-
271	20510854	SD NEGERI 2 NGRECO	NEGERI	-	-	-	-
272	20510810	SD NEGERI 2 PLOSO	NEGERI	-	-	-	-
273	20510809	SD NEGERI 2 PUCANGOMBO	NEGERI	-	-	-	-
274	20510822	SD NEGERI 2 TAHUNAN	NEGERI	-	-	-	-
275	20510811	SD NEGERI 2 TAHUNAN BARU	NEGERI	-	-	-	-
276	20511053	SD NEGERI 2 TEGALOMBO	NEGERI	26.000,00	-	18.000,00	18.000,00
277	20511533	SD NEGERI 3 GEMAHARJO	NEGERI	588.877,00	-	-	-
278	20511386	SD NEGERI 3 KASIHAN	NEGERI	-	-	-	-
279	20511465	SD NEGERI 3 KEMUNING	NEGERI	-	-	-	-
280	20510853	SD NEGERI 3 NGRECO	NEGERI	-	-	-	-
281	20510798	SD NEGERI 3 PLOSO	NEGERI	-	-	-	-
282	20510808	SD NEGERI 3 PUCANGOMBO	NEGERI	-	-	-	-
283	20510936	SD NEGERI 3 TAHUNAN	NEGERI	-	-	-	-
284	20555442	SD NEGERI 3 TEGALOMBO	NEGERI	-	-	-	-
285	20511532	SD NEGERI 4 GEMAHARJO	NEGERI	-	-	605.474,00	605.474,00
286	20511385	SD NEGERI 4 KASIHAN	NEGERI	125.000,00	-	-	-
287	20511453	SD NEGERI 4 KEMUNING	NEGERI	-	-	-	-
288	20510861	SD NEGERI 4 NGRECO	NEGERI	-	-	-	-
289	20510807	SD NEGERI 4 PUCANGOMBO	NEGERI	-	-	-	-
290	20511060	SD NEGERI 4 TEGALOMBO	NEGERI	-	-	-	-
291	20511531	SD NEGERI 5 GEMAHARJO	NEGERI	105.136,00	-	29.000,00	29.000,00
292	20510862	SD NEGERI 5 NGRECO	NEGERI	92.950,00	-	32.500,00	32.500,00
293	20510806	SD NEGERI 5 PUCANGOMBO	NEGERI	-	-	-	-
294	20510870	SD NEGERI 6 NGRECO	NEGERI	-	-	-	-
295	20511489	SD NEGERI 1 BUBAKAN	NEGERI	-	-	-	-
296	20511475	SD NEGERI 1 GASANG	NEGERI	15.600,00	-	312.000,00	312.000,00
297	20511509	SD NEGERI 1 JATIGUNUNG	NEGERI	2.263,00	-	17.500,00	17.500,00
298	20511518	SD NEGERI 1 JETAK	NEGERI	-	-	-	-
299	20511412	SD NEGERI 1 KALIKUNING	NEGERI	-	-	-	-
300	20511454	SD NEGERI 1 KETRO	NEGERI	1.075.410,00	-	-	-
301	20511464	SD NEGERI 1 KETRO HARJO	NEGERI	-	-	505.950,00	505.950,00
302	20511432	SD NEGERI 1 KLUWIH	NEGERI	-	-	-	-
303	20511441	SD NEGERI 1 LOSARI	NEGERI	3.993,00	-	-	-
304	20510860	SD NEGERI 1 NGILE	NEGERI	152.570,00	-	165.650,00	165.650,00
305	20510858	SD NEGERI 1 NGLARAN	NEGERI	144.141,00	-	-	-
306	20510866	SD NEGERI 1 NGUMBUL	NEGERI	-	-	-	-
307	20510919	SD NEGERI 1 PADI	NEGERI	-	-	-	-
308	20511025	SD NEGERI 1 TULAKAN	NEGERI	-	-	-	-
309	20511091	SD NEGERI 1 WONOANTI	NEGERI	-	-	-	-

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO TAHUN 2024	RINCIAN SALDO		
					TUNAI	BANK	TOTAL KAS
310	20511084	SD NEGERI 1 WONOSIDI	NEGERI	-	-	-	-
311	20511488	SD NEGERI 2 BUBAKAN	NEGERI	140.536,00	-	-	-
312	20511476	SD NEGERI 2 GASANG	NEGERI	-	-	-	-
313	20511508	SD NEGERI 2 JATIGUNUNG	NEGERI	11.500,00	-	-	-
314	20511507	SD NEGERI 2 JETAK	NEGERI	-	-	-	-
315	20511413	SD NEGERI 2 KALIKUNING	NEGERI	-	-	-	-
316	20511462	SD NEGERI 2 KETRO	NEGERI	-	-	-	-
317	20511461	SD NEGERI 2 KETRO HARJO	NEGERI	-	-	1.364.400,00	1.364.400,00
318	20511433	SD NEGERI 2 KLUWIH	NEGERI	-	-	-	-
319	20511440	SD NEGERI 2 LOSARI	NEGERI	13.600,00	-	-	-
320	20510859	SD NEGERI 2 NGILE	NEGERI	-	-	-	-
321	20510857	SD NEGERI 2 NGLARAN	NEGERI	39.960,00	-	-	-
322	20510865	SD NEGERI 2 NGUMBUL	NEGERI	18.000,00	-	41.200,00	41.200,00
323	20510918	SD NEGERI 2 PADI	NEGERI	-	-	-	-
324	20511024	SD NEGERI 2 TULAKAN	NEGERI	-	5,00	-	5,00
325	20511090	SD NEGERI 2 WONOANTI	NEGERI	45.900,00	-	-	-
326	20511083	SD NEGERI 2 WONOSIDI	NEGERI	-	-	7.500,00	7.500,00
327	20511516	SD NEGERI 3 JATIGUNUNG	NEGERI	582.500,00	-	135.800,00	135.800,00
328	20511421	SD NEGERI 3 KALIKUNING	NEGERI	542.225,00	-	128.788,00	128.788,00
329	20511460	SD NEGERI 3 KETRO	NEGERI	208.700,00	-	1.600,00	1.600,00
330	20510856	SD NEGERI 3 NGLARAN	NEGERI	-	-	-	-
331	20510864	SD NEGERI 3 NGUMBUL	NEGERI	-	-	-	-
332	20510917	SD NEGERI 3 PADI	NEGERI	-	-	-	-
333	20511023	SD NEGERI 3 TULAKAN	NEGERI	121.140,00	-	-	-
334	20511082	SD NEGERI 3 WONOSIDI	NEGERI	138.750,00	-	-	-
335	20511517	SD NEGERI 4 JATIGUNUNG	NEGERI	-	-	-	-
336	20511420	SD NEGERI 4 KALIKUNING	NEGERI	-	-	-	-
337	20557632	SD NEGERI 4 KETRO	NEGERI	-	-	-	-
338	20511439	SD NEGERI 4 LOSARI	NEGERI	29.600,00	-	-	-
339	20511071	SD NEGERI 4 WONOSIDI	NEGERI	-	-	-	-
340	20557631	SD NEGERI 5 KALIKUNING	NEGERI	-	-	-	-
341	20511070	SD NEGERI 5 WONOSIDI	NEGERI	-	-	-	-
342	20511496	SD NEGERI BUNGUR	NEGERI	58.205,00	-	-	-
343	20511267	SD NEGERI 1 BODAG	NEGERI	-	-	-	-
344	20511381	SD NEGERI 1 BOGOHARJO	NEGERI	-	-	-	-
345	20511487	SD NEGERI 1 COKROKEMBANG	NEGERI	78.400,00	-	78.400,00	78.400,00
346	20511513	SD NEGERI 1 HADILUWIH	NEGERI	358.200,00	246.000,00	148.425,00	394.425,00
347	20511511	SD NEGERI 1 HADIWARNO	NEGERI	-	-	-	-
348	20510872	SD NEGERI 1 NGADIROJO	NEGERI	7.920,00	-	-	-
349	20510923	SD NEGERI 1 NOGOSARI	NEGERI	-	-	-	-
350	20510925	SD NEGERI 1 PAGEREJO	NEGERI	-	-	-	-
351	20510834	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	NEGERI	-	-	-	-
352	20511048	SD NEGERI 1 TANJUNG LOR	NEGERI	27.260,00	-	-	-
353	20511046	SD NEGERI 1 TANJUNGPURO	NEGERI	-	-	-	-
354	20511099	SD NEGERI 1 WONOASRI	NEGERI	700,00	-	-	-
355	20511089	SD NEGERI 1 WONODADI KULON	NEGERI	-	-	98.780,00	98.780,00
356	20511085	SD NEGERI 1 WONODADI WETAN	NEGERI	-	-	-	-
357	20511201	SD NEGERI 1 WONOKARTO	NEGERI	1.301.000,00	-	-	-
358	20511200	SD NEGERI 1 WONOSOBO	NEGERI	-	-	-	-
359	20511256	SD NEGERI 2 BODAG	NEGERI	81.760,00	-	-	-
360	20511506	SD NEGERI 2 BOGOHARJO	NEGERI	-	-	76.400,00	76.400,00
361	20511486	SD NEGERI 2 COKROKEMBANG	NEGERI	36.784,00	-	67.800,00	67.800,00
362	20511512	SD NEGERI 2 HADILUWIH	NEGERI	-	-	-	-
363	20511510	SD NEGERI 2 HADIWARNO	NEGERI	14.400,00	-	9.000,00	9.000,00
364	20510871	SD NEGERI 2 NGADIROJO	NEGERI	-	-	1.000,00	1.000,00
365	20510922	SD NEGERI 2 NOGOSARI	NEGERI	-	-	-	-
366	20510926	SD NEGERI 2 PAGEREJO	NEGERI	12.800,00	-	-	-
367	20510841	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	NEGERI	-	-	-	-
368	20511047	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	NEGERI	1.208,00	-	-	-
369	20511045	SD NEGERI 2 TANJUNGPURO	NEGERI	-	-	-	-
370	20511096	SD NEGERI 2 WONOASRI	NEGERI	-	-	-	-
371	20511088	SD NEGERI 2 WONODADI KULON	NEGERI	-	-	-	-
372	20511093	SD NEGERI 2 WONODADI WETAN	NEGERI	-	-	-	-
373	20511097	SD NEGERI 2 WONOKARTO	NEGERI	-	-	-	-
374	20511098	SD NEGERI 2 WONOSOBO	NEGERI	-	-	-	-
375	20511485	SD NEGERI 3 COKROKEMBANG	NEGERI	-	-	-	-
376	20510934	SD NEGERI 3 PAGEREJO	NEGERI	-	-	-	-
377	20510849	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	NEGERI	25.005,00	-	-	-
378	20511087	SD NEGERI 3 WONODADI KULON	NEGERI	-	-	6.408.600,00	6.408.600,00
379	20511095	SD NEGERI 3 WONOKARTO	NEGERI	-	-	-	-
380	20510933	SD NEGERI 4 PAGEREJO	NEGERI	-	-	-	-
381	20510848	SD NEGERI 4 SIDOMULYO	NEGERI	-	-	-	-
382	20511086	SD NEGERI 4 WONODADI KULON	NEGERI	-	-	-	-
383	20510847	SD NEGERI 5 SIDOMULYO	NEGERI	-	-	-	-
384	20511501	SD NEGERI CANGKRING	NEGERI	-	-	-	-
385	20511203	SD NEGERI WIYORO	NEGERI	-	-	92.000,00	92.000,00
386	20510819	SD NEGERI 1 GUNUNGREJO	NEGERI	1.047.100,00	-	532.200,00	532.200,00
387	20511449	SD NEGERI 1 KARANGMULYO	NEGERI	3.000,00	-	-	-
388	20511451	SD NEGERI 1 KETANGGUNG	NEGERI	-	-	2.650,00	2.650,00
389	20511442	SD NEGERI 1 KLEPU	NEGERI	693.600,00	-	1.470.000,00	1.470.000,00
390	20510932	SD NEGERI 1 PAGERKIDUL	NEGERI	-	-	10.800,00	10.800,00
391	20510930	SD NEGERI 1 PAGERLOR	NEGERI	-	-	-	-
392	20511495	SD NEGERI 1 SEMBOWO	NEGERI	-	-	-	-
393	20510830	SD NEGERI 1 SUDIMORO	NEGERI	245.000,00	-	155.000,00	155.000,00
394	20510829	SD NEGERI 1 SUKOREJO	NEGERI	236.000,00	-	103.500,00	103.500,00
395	20510828	SD NEGERI 1 SUMBEREJO	NEGERI	13.200,00	-	8.700,00	8.700,00
396	20510816	SD NEGERI 2 GUNUNGREJO	NEGERI	637.380,00	-	382.800,00	382.800,00
397	20511448	SD NEGERI 2 KARANGMULYO	NEGERI	-	-	-	-
398	20511450	SD NEGERI 2 KETANGGUNG	NEGERI	154.663,00	-	15.000,00	15.000,00
399	20537132	SD NEGERI 2 KLEPU	NEGERI	14.400,00	400,00	217.000,00	217.400,00
400	20510931	SD NEGERI 2 PAGERKIDUL	NEGERI	-	-	-	-
401	20510929	SD NEGERI 2 PAGERLOR	NEGERI	-	-	-	-
402	20511426	SD NEGERI 2 SEMBOWO	NEGERI	100.000,00	-	32.500,00	32.500,00
403	20510818	SD NEGERI 2 SUDIMORO	NEGERI	-	-	1.618.300,00	1.618.300,00
404	20510827	SD NEGERI 2 SUKOREJO	NEGERI	17.000,00	-	118.800,00	118.800,00
405	20510826	SD NEGERI 2 SUMBEREJO	NEGERI	18.600,00	-	35.000,00	35.000,00
406	20511427	SD NEGERI 3 KLEPU	NEGERI	-	-	-	-
407	20510928	SD NEGERI 3 PAGERLOR	NEGERI	48.900,00	-	12.378.050,00	12.378.050,00
408	20510817	SD NEGERI 3 SUDIMORO	NEGERI	197.600,00	-	-	-
JUMLAH SISA KAS BOSP JENJANG SD				**52.245.535,00**	**3.720.076,00**	**117.553.808,00**	**121.273.884,00**
BOSP-JENJANG SMP							-
1	20510961	SMPN 1 ARJOSARI	NEGERI	2.730,00	-	30.463,00	30.463,00
2	20510972	SMPN 2 ARJOSARI	NEGERI	-	-	-	-
3	20549692	SMPN 3 ARJOSARI	NEGERI	-	-	-	-
4	20573295	SMPN 4 ARJOSARI SATU ATAP	NEGERI	12,00	-	1.000,00	1.000,00
5	20510960	SMPN 1 BANDAR	NEGERI	28.500,00	-	-	-
6	20510971	SMPN 2 BANDAR	NEGERI	49.534,00	-	-	-

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO TAHUN 2024	RINCIAN SALDO		
					TUNAI	BANK	TOTAL KAS
7	20510940	SMPN 3 BANDAR	NEGERI	387,00	-	-	-
8	20557250	SMPN 4 BANDAR SATAP	NEGERI	60,00	-	-	-
9	20510959	SMPN 1 DONOROJO	NEGERI	31.740,00	-	-	-
10	20510970	SMPN 2 DONOROJO	NEGERI	-	-	-	-
11	20510939	SMPN 3 DONOROJO	NEGERI	-	-	-	-
12	20540380	SMPN 4 DONOROJO SATU ATAP	NEGERI	154,00	-	-	-
13	20510967	SMPN 1 KEBONAGUNG	NEGERI	1.741.654,00	-	-	-
14	20510969	SMPN 2 KEBONAGUNG	NEGERI	-	-	-	-
15	20573297	SMPN 3 KEBONAGUNG SATU ATAP	NEGERI	-	-	-	-
16	20510968	SMPN 1 NAWANGAN	NEGERI	-	-	-	-
17	20510958	SMPN 2 NAWANGAN	NEGERI	-	-	-	-
18	20510938	SMPN 3 NAWANGAN	NEGERI	-	-	-	-
19	20510950	SMPN 4 NAWANGAN	NEGERI	-	-	-	-
20	20510937	SMPN 1 NGADIROJO	NEGERI	-	-	-	-
21	20510957	SMPN 2 NGADIROJO	NEGERI	-	-	-	-
22	20510946	SMPN 3 NGADIROJO	NEGERI	423,00	-	-	-
23	20540381	SMPN 4 NGADIROJO SATU ATAP	NEGERI	-	-	7.000,00	7.000,00
24	20557251	SMPN 5 NGADIROJO SATU ATAP	NEGERI	-	-	-	-
25	20510976	SMPN 1 PACITAN	NEGERI	250.000,00	-	-	-
26	20510956	SMPN 2 PACITAN	NEGERI	4.671,00	-	-	-
27	20510947	SMPN 3 PACITAN	NEGERI	-	-	-	-
28	20510949	SMPN 4 PACITAN	NEGERI	42.759,00	-	-	-
29	20570232	SMPN 5 PACITAN SATU ATAP	NEGERI	-	-	-	-
30	20510975	SMPN 1 PRINGKUKU	NEGERI	230,00	-	-	-
31	20510945	SMPN 2 PRINGKUKU	NEGERI	-	-	-	-
32	20510955	SMPN 3 PRINGKUKU	NEGERI	-	-	-	-
33	20510974	SMPN 1 PUNUNG	NEGERI	-	-	-	-
34	20510944	SMPN 2 PUNUNG	NEGERI	-	-	-	-
35	20510954	SMPN 3 PUNUNG	NEGERI	522,00	-	-	-
36	20510973	SMPN 1 SUDIMORO	NEGERI	-	-	-	-
37	20510943	SMPN 2 SUDIMORO	NEGERI	-	-	-	-
38	20510953	SMPN 3 SUDIMORO	NEGERI	-	-	-	-
39	20549693	SMPN 4 SUDIMORO SATU ATAP	NEGERI	-	-	-	-
40	20570242	SMPN 5 SUDIMORO SATU ATAP	NEGERI	-	-	-	-
41	69831500	SMPN 6 SUDIMORO	NEGERI	-	-	-	-
42	20511021	SMPN 1 TEGALOMBO	NEGERI	-	-	-	-
43	20510942	SMPN 2 TEGALOMBO	NEGERI	-	-	-	-
44	20510952	SMPN 3 TEGALOMBO	NEGERI	48.534,00	-	5.254,00	5.254,00
45	20573296	SMPN 4 TEGALOMBO SATU ATAP	NEGERI	-	-	-	-
46	69766201	SMPN 5 TEGALOMBO SATU ATAP	NEGERI	-	-	-	-
47	20511009	SMPN 1 TULAKAN	NEGERI	-	-	-	-
48	20510941	SMPN 2 TULAKAN	NEGERI	37,00	-	-	-
49	20510951	SMPN 3 TULAKAN	NEGERI	-	-	-	-
50	20510948	SMPN 4 TULAKAN	NEGERI	-	-	-	-
							-
JUMLAH SISA KAS BOSP JENJANG SMP				**2.201.947,00**	**-**	**43.717,00**	**43.717,00**
TOTAL RINCIAN SISA KAS DANA BOS				**54.447.482,00**	**3.720.076,00**	**117.597.525,00**	**121.317.601,00**

Lampiran 9

RINCIAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PIUTANG DENDA PBBP2 TAHUN 2025

NO	NOP	NAMA	JUMLAH
	PEMBEBASAN SANKSI 2018	PERBUP NO. 90 TH.2018	2.918.750
	2014		35.192
	2015		47.258
	2016		2.287.678
	2017		548.622
	PEMBEBASAN SANKSI 2020	KEPBUP NO. 188.45/894/KPTS/408.12/2020	10.016.373
	2011		126.412
	2012		232.409
	2013		537.067
	2014		677.473
	2015		654.076
	2016		1.287.511
	2017		1.432.215
	2018		1.985.006
	2019		3.084.204
	PEMBEBASAN SANKSI 2021	PERBUP NO. 58 TH.2021	45.729.088
	2011		341.848
	2012		273.249
	2013		141.450
	2014		214.930
	2015		283.814
	2016		1.050.396
	2017		1.018.194
	2018		1.418.264
	2019		3.422.835
	2020		37.564.108
	PEMBEBASAN SANKSI 2022	PERBUP NO. 117 TH.2022	10.997.930
	2012		158.242
	2013		57.160
	2014		445.542
	2015		429.377
	2016		222.501
	2017		435.129
	2018		444.437
	2019		917.100
	2020		554.064
	2021		7.334.378
	PEMBEBASAN SANKSI 2024	KEPBUP NO. 100.3.3.2/773/KPTS/408.12/2024	37.677.927
	2011		36.595
	2012		36.115
	2013		40.374
	2014		1.487.766
	2015		3.143.265
	2016		5.938.926
	2017		2.591.369
	2018		7.065.269
	2019		2.530.801
	2020		10.259.492
	2021		4.547.955
	PEMBEBASAN SANKSI 2025	KEPBUP NO. 100.3.3.2/485/KPTS/408.12/2025	19.185.973
	2011		274.603
	2012		163.084
	2013		131.786
	2014		198.816
	2015		793.629
	2016		717.038
	2017		1.680.172
	2018		1.037.315
	2019		4.268.757
	2020		7.463.710
	2021		2.446.839
	2002		1.920
	2011		245.706
	2012		224.899
	2013		179.598
	2014		685.850
	2015		1.922.650
	2016		1.930.913
	2017		2.430.540
	2018		1.796.305
	2019		2.275.766
	2020		3.168.872
	2021		3.006.863
		JUMLAH	144.395.923

Lampiran 10

Daftar Obat kedaluwarsa (expired date/ED)

Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA	JUMLAH	ED	JUMLAH
RSUD Dr.Darsono						
1	Adalat Oros 30 mg	Tablet	4.423,97	5,00	Jun-25	22.119,85
2	Allopurinol 100 mg	Tablet	164,00	10,00	Mar-25	1.640,00
3	Almen 5 mg	Tablet	16.317,00	60,00	Jun-25	979.020,00
4	Aloclair Plus Mouthwash 60ml	Botol	87.912,00	1,00	Sep-25	87.912,00
5	Amoxan 500 mg	Tablet	3.479,85	2,00	Jul-25	6.959,70
6	Ampicyllin 500 mg	Tablet	555,00	17,00	Jan-25	9.435,00
7	Asi - M Caps	Capsul	3.058,05	10,00	Mar-25	30.580,50
8	Asi - M Caps	Capsul	3.058,05	30,00	Sep-25	91.741,50
9	Atropini Sulfas 2 ml Inj.	Ampul	3.699,63	13,00	Jan-25	48.095,19
10	Atropini Sulfas 2 ml Inj.	Ampul	3.699,63	5,00	Mar-25	18.498,15
11	Bamgetol 200 mg	Tablet	1.470,70	500,00	Apr-25	735.350,00
12	Becefort	Tablet	1.006,25	16.272,00	Jul-25	16.373.700,00
13	Benzatin Benzil Penisilin 1.200.000iu Injeksi	Vial	22.555,20	18,00	Jan-25	405.993,60
14	Berry vision tab	Tablet	3.479,85	10,00	Mar-25	34.798,50
15	Bledstop Tab	Tablet	685,42	6,00	Apr-25	4.112,52
16	Cal -95	Tablet	6.432,45	7,75	Dec-25	49.851,49
17	Calcii Gluconas Inj.	Ampul	10.450,00	1,00	Apr-25	10.450,00
18	Calcii Gluconas Inj.	Ampul	10.450,00	1,00	Feb-27	10.450,00
19	Candepress 8 mg	Tablet	7.752,24	10,00	Jun-25	77.522,40
20	Canderin 16 mg	Tablet	10.545,00	8,00	Jan-25	84.360,00
21	Canderin 16 mg	Tablet	10.545,00	30,00	Feb-25	316.350,00
22	Carbazochrome 500 mg Injeksi	Ampul	10.188,02	1,00	Sep-25	10.188,02
23	Cataflam 50 mg	Tablet	6.164,21	3,00	Aug-25	18.492,63
24	Cefila 100 mg	Capsul	22.144,50	32,00	Jun-25	708.624,00
25	Cendo Augentonic 5 ml Tetes Mata	Botol	25.099,32	1,00	Dec-25	25.099,32
26	Cepezet 100 mg	Tablet	548,34	24,75	Mar-25	13.571,42
27	Cepezet 100 mg	Tablet	548,34	6,88	Nov-25	3.772,58
28	Ciflos	Tablet	14.235,75	3,00	May-25	42.707,25
29	Clindamicyn 150 mg	Tablet	723,28	17,00	Sep-25	12.295,76
30	Clindamicyn 150 mg	Tablet	723,28	144,00	Oct-25	104.152,32
31	Clindamicyn 150 mg	Tablet	723,28	300,00	Nov-25	216.984,00
32	Clozapine 25 mg	Tablet	473,00	5,00	May-25	2.365,00
33	Cotrimoxazol suspensi	Botol	6.700,00	2,00	Apr-25	13.400,00
34	Cravox	Tablet	39.960,00	4,00	Feb-25	159.840,00
35	Deferiprone 500 mg tab	Tablet	7.692,00	5,00	Sep-25	38.460,00
36	Dexamethason Inj.	Ampul	1.250,00	9,00	May-25	11.250,00
37	Dexamethason Inj.	Ampul	1.250,00	2,00	Jul-25	2.500,00
38	Dexketoprofen Trometamol 25mg/ml Injeksi	Ampul	9.988,30	37,00	Feb-25	369.567,10
39	Dextrose 5 % 100 ml Pigypaks (Otsuka)	Botol	8.099,67	1,00	Jul-25	8.099,67
40	Dextrose 5 % Inf. 500 ml	Botol	7.500,27	1,00	Jul-25	7.500,27
41	Dopamine inj 200mg/5ml	Ampul	3.876,01	1,00	Mar-25	3.876,01
42	Dumin Rectal 125 mg Supp	Tube	19.884,80	2,00	Jul-25	39.769,60
43	Dumin Rectal 125 mg Supp	Tube	19.884,80	4,00	Aug-25	79.539,20
44	Enoxrin - 6000 Inj	Syringe	142.357,50	1,00	Feb-25	142.357,50
45	Ephedrine HCl Inj	Ampul	22.200,00	3,00	Feb-25	66.600,00
46	Ephedrine HCl Inj	Ampul	22.200,00	4,00	Oct-25	88.800,00
47	Erytromicin 500 mg	Tablet	1.300,00	20,00	Mar-25	26.000,00
48	Exaflam 25 mg	Tablet	1.299,01	15,00	May-25	19.485,15
49	Frimania 200 mg	Tablet	2.198,00	24,00	May-25	52.752,00
50	Frimania 200 mg	Tablet	2.198,00	57,00	Jul-25	125.286,00
51	Gentamicyn 40 mg / 2 ml inj.	Ampul	2.884,00	2,00	Mar-25	5.768,00
52	Gliclazide 80mg Tab	Tablet	309,00	14,00	Jan-25	4.326,00
53	Glyseril Guaiacolat 100 mg / GG	Tablet	85,01	11,00	May-25	935,11
54	Goflex	Tablet	7.770,00	2,00	Jan-25	15.540,00
55	Harnal	Tablet	8.369,99	29,00	Nov-25	242.729,71
56	Herbeser CD 100 mg	Tablet	5.059,00	11,00	Oct-25	55.649,00
57	Hexymer	Tablet	471,75	10,25	Feb-25	4.835,44
58	Ibuprofen 100 mg/ml Inj	Vial	60.384,00	2,00	Dec-25	120.768,00
59	Invomit inj	Ampul	47.727,22	10,00	Sep-25	477.272,20
60	Ketokonazol 200 mg	Tablet	380,00	1,00	Jun-25	380,00
61	Ketoprofen 100 mg tab	Tablet	1.226,04	648,00	Nov-25	794.473,92
62	Ketorolac 30 MG Inj 3%	Ampul	1.350,00	1,00	Jul-25	1.350,00
63	KTM- 100 Injeksi	mg	131,19	540,00	Feb-26	70.842,60
64	Lameson 4 mg	Tablet	3.954,38	2,00	May-25	7.908,76
65	Lapiflox 500mg	Tablet	14.763,00	18,00	Apr-25	265.734,00
66	Lasalcom 2,5 ml Injeksi	Ampul	11.322,00	2,00	May-25	22.644,00
67	Levemir Flexpen	Pcs	89.799,00	2,00	May-25	179.598,00
68	Levemir Flexpen	Pcs	89.799,00	1,00	Sep-25	89.799,00
69	Levetiracetam 250 mg Tablet	Tablet	6.000,00	2,40	Jul-25	14.400,00
70	Lidocain HCl Spray	Botol	133.200,00	1,00	Jan-25	133.200,00
71	Lodomer Injeksi 5 mg	Ampul	12.005,48	16,00	Sep-25	192.087,68
72	Lodomer Injeksi 5 mg	Ampul	12.005,58	8,00	Jan-25	96.044,64
73	Loperamid	Tablet	79,00	19,00	Jan-25	1.501,00
74	Metoklopramid 10 mg	Tablet	117,01	150,00	Jun-25	17.551,50
75	Mg SO4 40 % 25 ml Infus	Ampul	5.661,00	4,00	Jan-25	22.644,00
76	Microgest 100 mg	Tablet	12.654,00	16,00	Feb-25	202.464,00
77	Monarin FC Tablet 10mg	Tablet	7.892,10	89,00	Mar-25	702.396,90
78	N- Epi Injeksi	Ampul	79.920,00	3,00	Jan-25	239.760,00
79	Natrium Bicarbonat tab	Tablet	150,00	3,00	Dec-25	450,00
80	Natrium Diklofenak 25 mg	Tablet	136,00	50,00	May-25	6.800,00
81	Neurosanbe	Tablet	1.370,85	15,00	Jun-25	20.562,75
82	NTG Injeksi 10mg	Ampul	54.112,50	5,00	Apr-25	270.562,50
83	NTG Injeksi 10mg	Ampul	54.112,50	6,00	Jul-25	324.675,00
84	Nudep 50 mg	Tablet	14.763,00	3,50	Aug-25	51.670,50
85	Ondane 4 Injeksi	Ampul	22.311,00	2,00	Feb-25	44.622,00
86	Oseltamivir 75 mg kaps	Capsul	12.999,00	3.491,00	Aug-25	45.379.509,00

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA	JUMLAH	ED	JUMLAH
87	Phenoxymethyl Penicilin 250 mg	Tablet	915,75	20,00	Aug-25	18.315,00
88	Piracetam 800 mg	Tablet	507,99	63,00	Jun-25	32.003,37
89	Pramifrol ER 0,375 mg tab	Tablet	5.280,00	6,00	Feb-25	31.680,00
90	Pramifrol ER 0,75 mg tab	Tablet	8.991,00	12,00	Mar-25	107.892,00
91	Proris 60 ml Syrup	Botol	22.722,00	3,00	Aug-25	68.166,00
92	Proris Forte 60 ml Syrup	Botol	26.373,60	1,00	Jan-25	26.373,60
93	Quetiapine Fumarate 100 mg Tab	Tablet	8.436,00	5,50	Sep-25	46.398,00
94	Redacid Kaplet	Tablet	9.990,00	6,00	May-25	59.940,00
95	Redacid Kaplet	Tablet	9.990,00	18,00	Jun-25	179.820,00
96	Rifampicin 300 mg	Capsul	1.402,50	198,00	Feb-25	277.695,00
97	Rincobal 500 mcg	Capsul	1.370,85	6,00	Aug-25	8.225,10
98	Ringers + Dextrose 500 ml Infus (Widrata)	Botol	12.200,01	7,00	Dec-25	85.400,07
99	Salticin 80 mg Injeksi	Ampul	28.846,12	3,00	Dec-25	86.538,36
100	Septanest Injeksi	Ampul	17.094,00	16,00	Mar-25	273.504,00
101	Serum Anti Tetanus(1500ui)	Ampul	152.625,00	1,00	Jan-25	152.625,00
102	Serum Anti Tetanus(1500ui)	Ampul	167.887,50	1,00	Sep-26	167.887,50
103	Simvastatin 20 mg	Tablet	173,00	28,50	Jul-25	4.930,50
104	Sistenol	Tablet	2.497,50	2,00	Jan-25	4.995,00
105	Stelosi 5 mg	Tablet	608,97	1,50	Sep-25	913,46
106	Sulcolon tab	Tablet	7.536,90	11,00	Jan-25	82.905,90
107	Sulcolon tab	Tablet	7.536,90	55,00	Apr-25	414.529,50
108	Topamax 25 mg	Tablet	2.950,00	7,00	Oct-25	20.650,00
109	Tordex 25mg Injeksi	Vial	48.951,00	16,00	Jul-25	783.216,00
110	Trogyl 500 mg	Tablet	1.878,12	89,00	Jul-25	167.152,68
111	Tutosol 500 ml Infus	Softbag	40.499,46	1,00	Feb-25	40.499,46
112	Ultraproct N Supp	Suppo	22.000,00	2,00	Apr-25	44.000,00
113	Urispas 200 mg	Tablet	6.800,00	2,00	Mar-25	13.600,00
114	Vancomycin inj 500 mg	Vial	89.000,00	5,00	Oct-25	445.000,00
115	Vitamin C 50 mg / As. Askorbat	Tablet	42,38	64,00	Apr-25	2.712,32
116	Xylocain 2% jell 10 gr	Syringe	48.378,02	4,00	Jan-25	193.512,08
117	Zibramax	Tablet	42.180,00	6,50	Jan-25	274.170,00
118	Zibramax	Tablet	42.180,00	1,00	Jul-25	42.180,00
119	Zincpro Drops 15ml	Botol	30.858,00	4,00	Apr-25	123.432,00
120	Morfin Injeksi	Ampul	34.359,50	5,00	Apr-25	171.797,50
121	Pethidin HCl 100 mg / 2 ml Inj.	Ampul	23.590,05	1,00	Nov-25	23.590,05
122	Diazepam Enema 10 mg/2,5 ml	Tube	12.210,00	1,00	Oct-25	12.210,00
123	Riklona 2mg	Tablet	10.725,26	8,00	Aug-25	85.802,08
124	Blood Bag 350 ml (kantong darah)	Pcs	72.150,00	10,00	Dec-25	721.500,00
125	Bubble Cpap Mask Size M	Pcs	541.874,24	1,00	Sep-25	541.874,24
126	Cat Gut Plain 3/0 DS 24 MM	Pcs	40.199,96	12,00	May-25	482.399,52
127	Condom Cathteter S	Pcs	5.800,00	4,00	Feb-25	23.200,00
128	Condom Cathteter S	Pcs	6.600,00	3,00	Feb-25	19.800,00
129	ECG Electrode Pediatric 30 mm	Pcs	1.347,00	83,00	Jan-25	111.801,00
130	ECG Elektroda	Pcs	3.874,00	1,00	Jan-25	3.874,00
131	Epilong Kit Touhy Needle 18G x 90mm / Epidural Cat	Pcs	192.199,70	1,00	Mar-25	192.199,70
132	ETT Non Kingking curved No.4,5	Pcs	93.900,00	3,00	Feb-25	281.700,00
133	ETT Non Kingking curved No.5	Pcs	121.999,90	2,00	Jun-25	243.999,80
134	ETT Non Kingking Curved No.7,5	Pcs	123.109,00	1,00	Feb-25	123.109,00
135	ETT Oral No. 5,0 Performed/ Palato With Cuff	Pcs	91.999,60	1,00	Jan-25	91.999,60
136	Feeding Tube No. 3,5 FR (35cm)	Pcs	12.714,00	3,00	Jun-25	38.142,00
137	Feeding Tube No. 3,5 FR (35cm)	Pcs	12.714,00	10,00	Aug-25	127.140,00
138	Guedel / Mayo 100 mm	Pcs	12.574,00	1,00	Jul-25	12.574,00
139	Guedel / Mayo 50 mm	Pcs	11.000,00	2,00	Jul-25	22.000,00
140	Guedel / Mayo 60 mm	Pcs	19.980,00	1,00	Apr-25	19.980,00
141	Guedel / Mayo 80 mm	Pcs	11.440,00	6,00	Mar-25	68.640,00
142	High Flow Nasal Cannula Size 4	Pcs	266.400,00	1,00	Jul-25	266.400,00
143	Iodium Povidone 10 % 1 liter	ml	83,64	7.000,00	Dec-25	585.480,00
144	Masker Oxygen / Canula Anak	Pcs	29.040,00	1,00	Jul-25	29.040,00
145	Masker Oxygen / Canula Dewasa	Pcs	29.304,00	1,00	Jul-25	29.304,00
146	Nasal Prong 3,0 mm/ 2,0 mm	Pcs	359.973,00	1,00	Apr-25	359.973,00
147	Nasopharyngeal Airway Standart PVC No. 7,0	Pcs	77.000,00	4,00	Jun-25	308.000,00

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA	JUMLAH	ED	JUMLAH
148	Nelaton Catheter No. 12	Pcs	22.000,00	1,00	Jun-25	22.000,00
149	Neonatal Expiration Filtration Ventilator	Pcs	66.600,00	17,00	Sep-25	1.132.200,00
150	Neonatal Expiration Filtration Ventilator	Pcs	66.600,00	10,00	Nov-25	666.000,00
151	Rectal Tube No. 26	Pcs	19.800,00	3,00	Jan-25	59.400,00
152	Silk Black 1 DS 24 mm	Pcs	56.166,00	6,00	Mar-25	336.996,00
153	Silk Black 2/0 DS 19 mm	Pcs	21.647,00	1,00	Apr-25	21.647,00
154	Suction Catheter No. 14	Pcs	4.540,91	1,00	Apr-25	4.540,91
155	Tensoplast STK Anak 2"	Pcs	250.449,30	2,00	Jan-25	500.898,60
156	T-Mono Polyglecaprone25, 90cm Tapercut 36mm (M1	Pcs	110.889,00	6,00	Nov-25	665.334,00
157	T-Mono Polyglecaprone25, 90cm Tapercut 36mm (M1	Pcs	114.885,00	12,00	Nov-25	1.378.620,00
158	Tracheostomy Tube With Cuff+Set Size 7.0	Pcs	560.046,00	1,00	May-25	560.046,00
159	Tranfusion Set Pump	Pcs	35.431,20	5,00	Dec-25	177.156,00
160	Cartridge TCM	Pcs	129.039,00	150,00	Apr-25	19.355.850,00
161	DBS Collection Kit	Kit	26.833,00	5,00	Dec-25	134.165,00
162	Deteksi Malaria PF/PAN Antigen (Dinkes)	Pcs	10.758,12	25,00	Sep-25	268.952,94
163	Ethionamide 250 mg Tablet (Dinkes)	Tablet	1.400,00	100,00	May-25	140.000,00
164	Hyperhep 0,5 ml Program	Syringe	1.389.500,00	1,00	May-25	1.389.500,00
165	Hyperhep 0,5 ml Program	Syringe	1.389.500,00	2,00	Oct-25	2.779.000,00
166	Infusion Set Dewasa (Dinkes)	Pcs	8.400,00	3,00	Feb-25	25.200,00
167	Lubricant	Pcs	331,00	900,00	Feb-25	297.900,00
168	Mineral Mix (Dinkes)	Sachet	4.336,00	10,00	Sep-25	43.360,00
169	Moxiflocaxin 400 mg Tablet (Dinkes)	Tablet	3.585,00	500,00	Jan-25	1.792.500,00
170	Moxiflocaxin 400 mg Tablet (Dinkes)	Tablet	3.475,00	457,00	Apr-25	1.588.075,00
171	Moxiflocaxin 400 mg Tablet (Dinkes)	Tablet	4.400,00	325,00	Nov-25	1.430.000,00
172	Rifampicin 75 mg + Isoniazid 50 mg	Tablet	1.099,00	84,00	Jun-25	92.316,00
173	Rifapentin 300mg + Isoniazid 300mg	Tablet	6.776,00	92,00	Jan-25	623.392,00
174	Tenofovir300 + Lamivudin300 + Dolutegravir50 (TLD)	Tablet	2.850,00	3,00	Jun-25	8.550,00
175	Tuberculin Injeksi (PROGRAM)	ml	119.837,00	3,00	Sep-25	359.511,00
176	Vaksin Anti Rabies Rabivax (Dinkes)	Vial	154.879,99	1,00	Nov-25	154.879,99
177	Vaksin Polio 10 Dosis	Vial	21.810,80	10,00	Mar-25	218.108,00
178	Vaksin Polio IPV	Vial	142.793,00	5,00	May-25	713.965,00
179	Vitamin A 200.000 ui	Softcaps	553,00	3,00	Apr-25	1.659,00
180	Vitamin A 200.000 ui	Softcaps	553,00	45,00	Jul-25	24.885,00
181	ZDV+3T Zidovudine(300) Lamivudine (150)	Tablet	3.848,00	3,00	Oct-25	11.544,00
182	Zidofudin 100 mg	Capsul	1.555,00	30,00	Oct-25	46.650,00
183	Ziehl Neelsen (Dinkes)	Paket	178.500,00	1,00	Nov-25	178.500,00
184	Ethionamide 250 mg Tablet (Program)	Tablet	1.566,00	510,00	Jan-25	798.660,00
185	Pyrazinamide 500 mg Tablet (Program)	Tablet	346,00	399,00	Jan-25	138.054,00
186	Obat Suntik KB I (3 bulan)	Vial	4.800,00	20,00	Jan-25	96.000,00
JUMLAH						**119.408.137,22**
DINAS KESEHATAN						
1	Aminofillina 200 mg	TABLET	268,00	100,00	30/09/2025	26.800,00
2	Ampisillin 1 gram Injeksi	VIAL	9.400,00	249,00	30/03/2025	2.340.600,00
3	Ampisillin 1 gram Injeksi	VIAL	9.400,00	140,00	31/03/2025	1.316.000,00
4	ASAM ASETAT 6 % 100 ML	BTL	20.899,08256	303,00	31/12/2025	6.332.422,02
5	Calcium Gluconas 100 mg/ml inj.	AMPUL	10.450,00	9,00	30/09/2025	94.050,00
6	Catridge kit	PCS	129.039,00	50,00	06/04/2025	6.451.950,00
7	ETHAMBUTOL 100 mg	TAB	688,00	100,00	02/01/2025	68.800,00
8	ETHAMBUTOL 400 mg	TAB	500,00	392,00	30/06/2025	196.000,00
9	FITOMENADION (VIT K 1) INJ 2 mg/ml	AMP	3.400,00	100,00	30/09/2025	340.000,00
10	Fitomenadion (Vit K) Injeksi	AMPUL	2.775,00	710,00	30/06/2025	1.970.250,00
11	Haloperidol 5 Mg	TABLET	54,00	90,00	30/04/2025	4.860,00
12	Haloperidol 5 Mg	TABLET	218,00	58,00	31/07/2025	12.644,00
13	Haloperidol 5 Mg	TABLET	190,00	14.500,00	30/11/2025	2.755.000,00
14	Haloperidol 0,5 mg	TAB	55,00	300,00	30/08/2024	16.500,00
15	Haloperidol Inj 50 mg/ml	AMPUL	109.000,00	210,00	31/12/2025	22.890.000,00
16	Haloperidol Inj 50 mg/ml	AMPUL	109.000,00	45,00	31/12/2025	4.905.000,00
17	Hyperhep	AMPUL	1.375.000,00	2,00	31/12/2024	2.750.000,00
18	Hyperhep	AMPUL	1.389.500,00	1,00	18/10/2025	1.389.500,00
19	Levothyroxine 100 mcg	TAB	770,00	2.910,00	28/02/2025	2.240.700,00
20	Metilergometrin M.Injeksi	AMPUL	2.050,00	14,00	31/01/2025	28.699,99
21	MGSO4 20%	AMP	4.724,00	3,00	0001-01-01	14.172,00
22	MGSO4 40%-Otsu	FLASH	5.377,95	1,00	30/06/2025	5.377,95
23	MOXIFLOCAXIN 400 mg	TAB	4.400,00	400,00	30/11/2025	1.760.000,00
24	MOXIFLOCAXIN 400 mg	TAB	4.400,00	100,00	30/11/2025	440.000,00
25	Obat Anti TBC / FDC Kt I/III	PAKET	418.971,00	1,00	30/11/2024	418.971,00
26	Oseltamivir 75 mg	TAB	7.000,00	1.880,00	31/07/2025	13.160.000,00
27	Oseltamivir 75 mg	TAB	14.299,00	10.000,00	31/08/2025	142.990.000,00
28	Oxygen Masker Non Rebreathing Anak	PCS	13.464,00	200,00	30/04/2025	2.692.800,00
29	Oxygen Masker Non Rebreathing Anak	PCS	13.464,00	250,00	28/02/2025	3.366.000,00
30	Rapid Anti HCV	TES	6.332,00	25,00	06/09/2025	158.300,00
31	RDT HIV 3 DETEKSI TESTER ANTI HIV 1/2 TEST	Test	7.454,00	50,00	10/08/2025	372.700,00
32	RIFAPENTIN 150 mg	TAB	2.886,00	300,00	31/12/2025	865.800,00
33	Tenofovir 300 mg	BOTOL	67.200,00	1,00	30/11/2024	67.200,00
34	Tenofovir 300 mg	BOTOL	67.200,00	1,00	30/11/2024	67.200,00
35	Trepocheck Syphilis	Test	4.385,71	25,00	31/10/2024	109.642,75
36	Tuberkulin	VIAL	119.837,00	1,00	30/09/2025	119.837,00
37	Vit B6 25 mg HIV	TAB	252,00	3.000,00	30/11/2025	756.000,00
38	Z. VAKSIN HEP B 1 DS (VECON PEDIATRIC)	PCS	39.516,22	1,00	16/05/2026	39.516,22
JUMLAH						**223.533.292,93**
TOTAL						**104.125.155,71**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Surat Pernyataan Direksi	ii - iii
Laporan Auditor Independen	iv - vii
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 – 17

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Jl. SuryoPranoto no. 2 Telp. (0357) 881393 Fax. (0357) 886 034
PACITAN - 63514

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : AGUS SUSENO,SE., MM
   Alamat Kantor : Jl. Suryo Pranoto No.2 Pacitan
   Alamat Domisili sesuai KTP : RT 02 RW 02 Ngaglik Menadi Pacitan
   Jabatan : Direktur

2. Nama : RISDA ANTIKA,SE
   Alamat Kantor : Jl. Suryo Pranoto No.2 Pacitan
   Alamat Domisili sesuai KTP : RT 02 RW 05 Sidoharjo Pacitan
   Jabatan : Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

Untuk dan atas nama Direksi dan Kabag Adm & Keu PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN sebagai pihak yang bertanggung jawab atas PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN menyatakan bahwa:

1. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.
2. Direksi PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat efektif 1 Januari 2025.
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan pada laporan keuangan terlampir
4. Laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
5. Semua informasi dalam laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atas fakta material yang tidak benar , dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

6. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN telah membuat catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan suatu usaha perusahaan, termasuk catatan yang terdisi dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal hal lain yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan Undang -undang yang berlaku.
7. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN serta sistem pengendalian internal dalam PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pacitan, 2026

AGUS SUSENO, SE.,MM	RISDA ANTIKA, SE
Direktur	Kabag Admin & Keu

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan
Nomor Izin Usaha: Kep/969/KM.I/2022
License
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MANAGEMENT & TAX CONSULTANT

Nomor: 00034/3.0461/AU.8/11/1321-1/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan
Pacitan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan (Perusahaan), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian pada Catatan No. 18 atas laporan keuangan terlampir, dimana Perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik menjadi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat. Informasi mengenai perbedaan dan dampak perubahan tersebut terhadap laporan keuangan

disajikan dalam Catatan No. 18 atas laporan keuangan terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan laporan keuangan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat Bab 10 tentang "kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan", dimana laporan keuangan per 31 Desember 2024 disajikan kembali dengan penyesuaian pada akun-akun tertentu atas laporan keuangan periode sebelumnya.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor laporan 00016/2.1110/AU.2/11/1297-1/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat

diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang terindentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan

Dr. Kurnia, Ak., CA., CPA

Izin Akuntan Publik No. AP. 1321

Bandung, 11 Maret 2026

00034

LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

ASET

	CATATAN	2025	2024
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b,3	13.199.887.490	12.445.877.084
Piutang Usaha	2c,4	2.163.343.436	2.047.627.046
Persediaan	2d,5	256.953.717	242.467.091
Jumlah Aset Lancar		15.620.184.643	14.735.971.221
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp.49,312,467,168 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp.47,489,136,365 pada tanggal 31 Desember 2024	2f, 6	18.767.248.899	19.239.286.310
Jumlah Aset Tidak Lancar		18.767.248.899	19.239.286.310
Aset Lain-lain	2g, 7	1.294.254.184	613.646.231
JUMLAH ASET		35.681.687.726	34.588.903.762

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Mengetahui, Menyetujui
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

AGUS SUSENO, SE,MM

Pacitan,
Dibuat Oleh
Kabag Adm &Keuangan

RISDA ANTIKA, SE.
NIK. 202 007 116

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS

	CATATAN	2025	2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang Pajak	8	98.071.625	88.347.136
Hutang Usaha	9	-	40.327.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		98.071.625	128.674.136
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Pajak Tangguhan	10	8.333.749	8.211.838
Imbalan Paska Kerja	11	895.670.756	301.893.602
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		904.004.505	310.105.440
EKUITAS			
Modal Pemerintah Daerah (Pemda)		9.766.304.823	9.766.304.823
Modal Pemerintah Pusat		5.614.900.041	5.614.900.041
Modal Hibah		2.772.529.471	2.772.529.471
Modal Pemerintah yang Belum Ditetapkan statusnya		34.455.074.798	34.455.074.798
Saldo Laba	12	(17.929.197.538)	(18.458.684.948)
Jumlah Ekuitas		34.679.611.597	34.150.124.185
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		35.681.687.726	34.588.903.762

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Mengetahui / Menyetujui
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

AGUS SUSENO, SE,MM

Pacitan,
Dibuat Oleh
Kabag Adm &Keuangan

RISDA ANTIKA, SE.
NIK. 202 007 116

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Usaha	2i, 13	17.846.098.448	18.155.737.226
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Langsung	2j, 14	15.583.483.997	15.929.470.048
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2j, 14	1.823.330.802	1.849.214.946
LABA USAHA		**439.283.648**	**377.052.232**
Pendapatan (Beban) Non Operasional	2j, 15	225.793.234	213.429.562
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**665.076.882**	**590.481.794**
Beban Pajak Tangguhan		8.333.749	8.211.838
Beban Pajak Penghasilan	16	98.071.625	88.274.696
LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN		**558.671.508**	**493.995.261**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Pacitan,

Mengetahui, Menyetujui
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

AGUS SUSENO, SE,MM

Dibuat Oleh
Kabag Adm &Keuangan

RISDA ANTIKA, SE.
NIK. 202 007 116

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Pemda	Modal Disetor Pemerintah Pusat	Hibah	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya		Saldo Laba (Rugi) Ditahan	Jumlah Ekuitas
				Daerah	Pusat		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Per 31 Desember 2023	9.766.304.823	5.614.900.041	2.772.529.471	-	34.455.074.798	(18.725.727.169)	33.883.081.964
Koreksi	-	-	-	-	-	(226.953.040)	(226.953.040)
Laba (Rugi) Tahun berjalan	-	-	-	-	-	493.995.261	493.995.261
Saldo Per 31 Desember 2024	9.766.304.823	5.614.900.041	2.772.529.471	-	34.455.074.798	(18.458.684.947)	34.150.124.186
Koreksi	-	-	-	-	-	(29.184.099)	(29.184.099)
Laba (Rugi) Tahun berjalan	-	-	-	-	-	558.671.508	558.671.508
Saldo Per 31 Desember 2025	9.766.304.823	5.614.900.041	2.772.529.471	-	34.455.074.798	(17.929.197.538)	34.679.611.597

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Setelah Pajak	558.671.508	493.995.261
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi:		
Penyusutan aset tetap	1.823.330.802	1.849.214.946
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	2.382.002.310	2.343.210.207
Piutang Usaha	(115.716.390)	59.335.552
Persediaan	(14.486.626)	(3.224.745)
Uang Muka	(680.607.953)	(82.452.629)
Kenaikan (Penurunan):		
Hutang Usaha	(40.327.000)	26.600.000
Hutang Pajak	9.724.489	88.347.136
Liabilitas Pajak Tangguhan	121.911	8.211.838
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(841.291.569)	2.440.027.364
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI:		
Perolehan Aset Tetap	(1.351.293.391)	(1.193.584.757)
Imbalan Pasca Kerja	593.777.154	-
Kas Yang Digunakan Untuk Kegiatan Investasi	(757.516.237)	(1.193.584.757)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Koreksi Saldo Laba	(29.184.099)	(141.635.320)
Kas Yang Diperoleh Dari Kegiatan Pendanaan	(29.184.099)	(141.635.320)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	754.010.405	1.104.807.282
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	12.445.877.084	11.341.069.802
KAS DAN SETARA KAS	13.199.887.490	12.445.877.084

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

CATATAN LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di Jalan Suryo Pranoto No 2 Kabupaten Pacitan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan No 2 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur, No HK/120/76/U/SK tanggal 6 Maret 1995.

Kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan adalah penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan.

Modal Perusahaan
Modal perusahaan meliputi antara lain:

Modal Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan No.2 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992, modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan terdiri dari semua aktiva dan pasiva pada saat pendirian. Jumlah keseluruhan modal Pemerintah Daerah kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.768.304.823 (rincian Modal Pemerintah Daerah disajikan pada catatan nomor 11).

Modal Pemerintah Pusat
Jumlah Keseluruhan modal Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.614.900.041,- (Rincian Modal Pemerintah Pusat disajikan pada catatan nomor 11)

Modal Hibah
Modal Hibah merupakan hibah yang diperoleh Perusahaan dari masyarakat tahun 1995 sebesar Rp800.000,- Untuk kantor IKK Ketonagung. Pada tahun 2019 memperoleh hibah Aset Ketro yang semula merupakan aset pinjam pakai senilai Rp2.771.729.489, sehingga jumlah hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.772.529.471.

Modal Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya
Modal pemerintah yang belum ditentukan statusnya terdiri dari Penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp.2.771.729.489 dan Penyertaan Pemerintah Pusat yang berupa nilai atas proyek proyek sebesar Rp.24.455.074.798 (Rincian dari modal ini disajikan pada catatan nomor 11).

Susunan Pengurus
Berdasarkan Surat keputusan Bupati No.188.45/140/KPTS/408.12/2018, telah ditetapkan Sdr. Agus Suseno,SE,MM., sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dengan masa jabatan periode tahun 2018 - 2022, dan SK No.188.45/957/kpts/408.12/2022 untuk masa jabatan tahun 2022-2027

Susunan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan, diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan No. 16 Tahun 2001, yang terdiri dari Direksi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.

Dewan Pengawas Perusahaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan No. 100.3.3.2/720/KPTS/408.12/2024 untuk masa jabatan periode 2024-2028 yang hanya terdiri dari satu orang yaitu :

Ketua (merangkap anggota)	: Khemal Pandu Pratikna, S.STP

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Pernyataan Kepatuhan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2025. Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan telah menerapkan SAK EP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2025. Oleh karena itu laporan keuangan tahun 2025 disajikan berdasarkan SAK EP

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan prinsip harga perolehan (historical cost) dan akrual, kecuali untuk investasi pada efek dinyatakan sebesar nilai wajar.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara kas terdiri dari Kas dan Bank. Setara kas meliputi deposito yang jangka waktunya sama atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya.

d. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan piutang rekening air yang berasal dari piutang penjualan air dan unsur pendapatan lainnya yang termasuk dalam rekening tagihan air. Piutang usaha diakui pada saat rekening air diterbitkan. Perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang apabila terdapat kemungkinan besar bahwa piutang tersebut tidak dapat diterima seluruhnya.

e. Persediaan

Perusahaan menilai persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO), dan tidak mengadakan cadangan atas persediaan yang tidak dapat dipakai, persediaan yang tidak dapat dipakai langsung dibebankan sebagai harga pokok. Persediaan perusahaan meliputi :

a. Persediaan Bahan Kimia
b. Persediaan Alat Tulis dan Cetakan
c. Pipa dan peralatan
d. Bahan Pembantu

f. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus *(straight line method)* untuk bangunan dan metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk asset tetap selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan (%)
Instalasi Sumber Air	10	10%
Instalasi pengolahan Air	10	10%
Instalasai Transmisi dan Distribusi	10	10%
Bangunan	20	5%
Kendaraan	4	25%
Inventaris Kantor	2	50%

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Pengeluaran untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomis di masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi atau pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan rugi laba tahun bersangkutan.

g. Uang Muka

Uang muka ini adalah akumulasi penyetoran kepada pemerintah kabupaten Pacitan sebagai bagian laba Pemda yang akan di perhitungkan kemudian, karena sampai saat ini Perumdam Kabupaten Pacitan Pacitan secara komulatif masih dalam keadaan Rugi sebesar Rp. 398.583.428 pada tanggal 31 Desember 2025.

h. Kewajiban Perpajakan

Beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba kena pajak, yaitu laba komersial setelah dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan mengakui adanya pajak tangguhan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi *(Lanjutan)*

I. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha diakui pada saat kubikasi pemakaian air pelanggan dicatat.

j. Pengakuan Beban

Beban usaha diakui pada saat terjadi transaksi.

k. Beban Dana Pensiun

Beban Dana Pensiun adalah pengeluaran untuk membayar iuran pensiun setiap bulan yang besaran jumlahnya ditentukan berdasarkan perhitungan dasar pensiun oleh lembaga dana pensiun Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (disingkat DAPENMA PAMSI).

l. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menerapkan kebijakan pensiun untuk para pegawai tetap perusahaan dengan mengikutsertakan pada program pensiun di lembaga dana pensiun Dana Pensiun Bersama Perushaan Air Minum Seluruh Indonesia (disingkat DAPENMA PAMSI). Imbalan pasca kerja ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 tentang Imbalan Pasca Kerja.

Perusahaan telah melakukan perhitungan estimasi kewajiban manfaat pensiun karyawan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ("UUCK") No. 11/2023 (2023: UU No. 13/2003) yang terutama berkaitan dengan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang menjadi beban Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Kas dan Setara Kas

Akun ini merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri atas:

	2025 Rp	2024 Rp
Kas Besar	3.624.720	15.496.714
Bank IDR:		
- Bank Jatim No.Rek 0211000499	884.678.631	769.954.579
- Bank Jatim No.Rek 0211011726	3.005.636.608	2.787.094.684
- Bank Jatim No.Rek 0211014377	5.886.901	5.883.361
- Bank Jatim No.Rek 021119514	590.788.623	248.844.353
- BNI rekening 0754169243	2.061.186.539	1.609.667.912
- BTN rekening 011120130000045	2.704.612.881	2.783.677.314
- Bank BPR rekening 02220028895	83.082.093	61.712.408
- Bank Mandiri rek.17110445859	778.002.706	1.124.537.907
- Bank BRI rek 0066701002632300	82.387.788	39.007.852
Deposito:		
- Deposito Bank BPR No. 0117076	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito BTN No. A 1862745	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito BTN No. A 1939410	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah	13.199.887.490	12.445.877.084

4. Piutang Usaha

Akun ini merupakan saldo piutang usaha per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang Usaha		
Piutang Air	2.720.621.539	2.688.956.257
Piutang Non air	46.269.109	46.269.109
Penyisihan Piutang		
Penurunan Nilai Piutang Air	(557.064.585)	(641.329.211)
Penurunan Nilai Non Air	(46.482.627)	(46.269.109)
Jumlah	2.163.343.436	2.047.627.046

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Persediaan

Akun ini merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp
Persediaan Bahan Kimia	6.698.188	4.244.775
Persediaan Alat Tulis dan Cetakan	4.920.000	7.045.000
Pipa dan Peralatan	245.335.529	231.177.316
Jumlah	256.953.717	242.467.091

6. Aset Tetap

	31-Dec-24 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31-Dec-25 Rp
Biaya Perolehan:				
Tanah	435.735.000	-		435.735.000
Gedung/ Bangunan	1.921.954.627	20.776.500		1.942.731.127
Instalasi Sumber Air	889.220.463	6.896.000		896.116.463
Instalasi Perpompaan	9.910.888.074	665.987.391		10.576.875.465
Instalasi Pengolahan Air	11.277.279.986	643.800		11.277.923.786
Instalasi Trans/Distribusi	40.444.791.845	624.745.200		41.069.537.045
Kendaraan / Angkutan	857.944.250	-		857.944.250
Inventaris Kantor	990.608.430	32.244.500		1.022.852.930
Jumlah	66.728.422.676	1.351.293.391		68.079.716.067
Akumulasi Penyusutan:				
Gedung/ Bangunan	996.581.969	47.140.127	66.000	1.043.656.096
Instalasi Sumber Air	557.698.087	20.620.763		578.318.850
Instalasi Perpompaan	6.978.630.622	333.180.750	44.000	7.311.767.372
Instalasi Pengolahan Air	9.015.947.321	205.798.013		9.221.745.334
Instalasi Trans/Distribusi	28.177.053.757	1.195.313.511	12.068.233	29.360.299.035
Kendaraan / Angkutan	832.929.572	6.253.669		839.183.241
Inventaris Kantor	930.295.039	27.202.202		957.497.241
Jumlah	47.489.136.365	1.835.509.035	12.178.233	49.312.467.168
Nilai Buku	19.239.286.310			18.767.248.899

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Aset Tetap (Lanjutan)

	31-Dec-23 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31-Dec-24 Rp
Biaya Perolehan:				
Tanah	435.735.000	-	-	435.735.000
Gedung/ Bangunan	1.886.468.127	35.486.500	-	1.921.954.627
Instalasi Sumber Air	889.220.463	-	-	889.220.463
Instalasi Perpompaan	9.765.364.517	145.523.557	-	9.910.888.074
Instalasi Pengolahan Air	11.262.594.486	14.685.500	-	11.277.279.986
Instalasi Trans/Distribusi	39.482.090.845	962.701.000	-	40.444.791.845
Kendaraan / Angkutan	857.944.250	-	-	857.944.250
Inventaris Kantor	955.420.230	35.188.200	-	990.608.430
Jumlah	65.534.837.918	1.193.584.757	-	66.728.422.676

	31-Dec-23 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31-Dec-24 Rp
Akumulasi Penyusutan:				
Gedung/ Bangunan	948.911.342	47.670.627	-	996.581.969
Instalasi Sumber Air	535.746.565	21.951.522	-	557.698.087
Instalasi Perpompaan	6.666.827.948	311.802.674	-	6.978.630.622
Instalasi Pengolahan Air	8.789.025.606	226.921.715	-	9.015.947.321
Instalasi Trans/ Distribusi	26.981.412.049	1.195.641.708	-	28.177.053.757
Kendaraan / Angkutan	824.591.346	8.338.226	-	832.929.572
Inventaris Kantor	893.406.564	36.888.475	-	930.295.039
Jumlah	45.639.921.419	1.849.214.946	-	47.489.136.365
Nilai Buku	19.894.916.499			19.239.286.310

Beban penyusutan dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Operasional (catatan 14)	1.823.330.802	1.849.214.946
Jumlah	1.823.330.802	1.849.214.946

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Aset Lain-lain

Akun ini merupakan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu:

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Yang ditangguhkan	895.670.756	301.893.602
Uang Muka	398.583.428	311.752.629
Jumlah	1.294.254.184	613.646.231

8. Perpajakan

a. Hutang Pajak

Akun ini merupakan saldo hutang pajak atas PPN per 31 Desember 2025 dan 2024 :

	2025	2024
	Rp	Rp
PPh pasal 29	98.071.625	88.347.136
PPh pasal 21	-	-
Jumlah	98.071.625	88.347.136

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laporan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

	2025	2024
	Rp	Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	665.076.882	630.967.190
Beda temporer		
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	75.761.354	74.653.069
Jumlah beda temporer	75.761.354	74.653.069
Beda tetap		
- Pendapatan bunga Bank	(246.975.552)	(233.453.531)
- Pajak Atas bunga bank	21.182.318	20.023.969
Jumlah beda tetap	(225.793.234)	(213.429.562)
Jumlah laba kena pajak	515.045.002	492.190.697
Jumlah laba kena pajak (pembulatan)	515.045.000	492.190.000
Yang memperoleh		
Fasilitas : 11% x Rp 138.529775	15.238.275	13.446.484
Yang tidak memperoleh		
Fasilitas : 22% x Rp 376.515.225	82.833.350	74.828.212
PPh 29 kurang (lebih) bayar	98.071.625	88.274.696

8. Perpajakan (Lanjutan)

Beban Pajak Tangguhan		
(11%xbeda temporer)	**8.333.749**	**8.211.838**

9. Hutang Usaha

Akun ini merupakan saldo hutang usaha atas PPN per 31 Desember 2025 dan 2024

	2025	2024
	Rp	Rp
Yuan Teai	-	13.909.000
PT Parfima Mekadaya	-	26.418.000
Jumlah	-	40.327.000

10. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan perbedaan temporer (sementara) antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak, di mana laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	8.333.749	8.211.838

11. Imbalan Pasca Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan menerapkan kebijakan pensiun untuk para pegawai tetap perusahaan. Berdasarkan surat DAPENMA PAMSI selaku aktuaria nomor S-13/DP.04/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Estimasi Kewajiban Iuran Tahun 2024 dan Pendanaan Pegawai.

Mutasi kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah	895.670.756	301.893.602

12. Ekuitas

Merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
	Rp	Rp
Modal Pemerintah Daerah		
Tanah	22.301.000	22.301.000
Pelimpahan proyek Tahun 1985/1986	3.239.175.042	3.239.175.042
Pelimpahan proyek Tahun 1993/1995	950.426.615	950.426.615
Penanggulangan Operasional PDAM Tahun 2002	188.479.269	188.479.269
Pembangunan Sumur Tahun 2003	213.965.000	213.965.000

12. Ekuitas (Lanjutan)

Peningkatan Pelayanan Tahun 2004	150.062.000	150.062.000
Sarana dan Prasarana Tahun 2006	609.895.897	609.895.897
Sharing Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun 2007	1.000.000.000	1.000.000.000
Pengadaan Pipa Transmisi/ Dist Tahun 2008	250.000.000	250.000.000
Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun 2009	822.000.000	822.000.000
Penggantian instalasi PLN Tahun 2010	100.000.000	100.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tahun 2011	100.000.000	100.000.000
Pengadaan Sambungan Rumah Tahun 2012	100.000.000	100.000.000
Pembuatan DED dan Penambahan daya IPA Purworejo 2013	420.000.000	420.000.000
Penyertaan Tanah Tulakan 2014	100.000.000	100.000.000
Pengadaan Pemasangan Pipa Nanggungan,Punung 2015	300.000.000	300.000.000
Tambah Daya PLN ,Pemasangan Pipa, Pengadaan Pompa 2016	300.000.000	300.000.000
Penyertaan 2017, pengadaan Pompa Power, pengadaan pipa	300.000.000	300.000.000
Pengadaaan Pompa CR 15 l/dt + Pengadaan Kabel Power 2019	300.000.000	300.000.000
Pengadaan Pompa Submer Sible 40 l/d Kedungbanteng Donorojo	300.000.000	300.000.000
Sub-jumlah	9.766.304.823	9.766.304.823
Modal Pemerintah Pusat		
PPSAB Jatim (Ex-BPAM) s.d 1992	3.489.987.457	3.489.987.457
PPSAB Jatim Tahun 1994 s.d 1998	866.318.200	866.318.200
PPSAB Jatim 1999 s.d 2006	1.258.594.384	1.258.594.384
Sub-jumlah	5.614.900.041	5.614.900.041
Modal Hibah		
Merupakan hibah yang diperoleh PDAM Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dari masyarakat tahun 1985 untuk Kantor IKK		
Kebonagung	800.000	800.000
Hibah Asset Ketro dari PEMDA Pacitan yg sebelumnya pinjam pakai.	2.771.729.471	2.771.729.471
Sub-jumlah	2.772.529.471	2.772.529.471
Modal Pemerintah Yang belum ditetapkan statusnya		
Proyek DAS Bengawan Solo di Maron Tahun 2003	7.976.000.000	7.976.000.000
Proyek Tahun 2004	336.721.000	336.721.000
Proyek Tahun 2006	5.585.703.860	5.585.703.860
Proyek Tahun 2007	189.981.000	189.981.000
Proyek Tahun 2008	1.869.598.700	1.869.598.700
Proyek Tahun 2009	934.963.370	934.963.370

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Ekultas (Lanjutan)		
Proyek Tahun 2010	876.602.100	876.602.100
Proyek Tahun 2011	2.440.790.000	2.440.790.000
Proyek Tahun 2012	10.555.582.400	10.555.582.400
Proyek Tahun 2019	3.689.132.368	3.689.132.368
Sub-jumlah	34.455.074.798	34.455.074.798
Saldo Laba		
Saldo Laba (Rugi) TahunSebelumnya	(18.413.852.624)	(18.725.727.169)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	558.671.508	493.995.261
Penyesuaian	(122.713.657)	(182.120.716)
Jumlah	(17.977.894.773)	(18.413.852.624)

13. Penjualan

Akun ini merupakan jumlah penjualan air dan non air selama tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp
Penjualan Air :		
Harga Air	14.473.184.980	14.652.998.720
Jasa Adminstrasi/Jasa Pemeliharaan	2.794.847.000	2.759.438.000
Penjualan Air/Tangki	14.065.000	68.360.000
Penjualan non Air :		
Sambungan Baru	147.534.838	263.358.408
Denda	396.135.000	379.072.500
Balik Nama	5.275.000	5.900.000
Non Air lainnya	15.056.630	26.609.598
Jumlah	17.846.098.448	18.155.737.226

14. Beban Operasional

Akun ini merupakan saldo beban operasional selama tahun 2025 dan 2024, yang terdiri atas:

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Langsung		
Beban Karyawan	4.907.552.044	5.085.040.035
Beban Dana Pensiun	1.435.600.594	1.786.814.218
Asuransi	358.430.799	367.718.438

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. Beban Operasional (Lanjutan)		
Beban Energi	6.069.887.876	6.571.677.776
Beban Air Baku	84.803.684	83.062.328
Beban Pemakaian Bahan Kimia	381.474.235	452.155.225
Beban Pemeliharaan		
• Pemeliharaan Sumber	26.179.408	34.984.387
• Pemeliharaan IPA	53.833.335	52.743.950
• Pemeliharaan Instalasi Transmisi dan Distribusi	582.445.150	198.864.744
• Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.906.500	9.381.800
• Pemeliharaan Gedung	12.150.000	-
• Pemeliharaan Kendaraan	29.729.850	45.414.120
Pemeriksaan air	40.817.000	32.760.000
Beban Air Bawah Tanah	170.591.532	-
Beban Penyisihan Nilai Piutang	1.266.612	85.317.721
Beban Perjalanan Dinas	73.434.623	57.902.750
Beban BBM	177.847.750	213.790.700
Beban Sewa	46.021.000	45.296.000
Rupa-rupa biaya Kantor	15.421.545	13.241.800
Beban Dewan Pengawas	31.706.580	34.877.238
Beban Hubungan Langganan	261.522.043	252.532.617
Beban Perpanjangan STNK Kend.Dinas	8.272.400	7.309.550
Beban Penagihan	39.459.987	28.065.049
Beban Audit	34.369.370	35.000.000
Beban Diklat	95.342.900	25.621.600
Beban Pakaian Dinas	33.660.000	15.100.000
Beban Tamu	15.304.420	12.839.250
Beban Air Minum	9.801.520	9.172.640
Beban ATK	60.972.000	30.157.000
Beban Pajak Bumi dan Bangunan	1.236.956	1.376.863
Beban Iuran Keanggotaan	31.846.650	9.000.000
Beban umum Lainya	481.595.635	332.252.249
Sub-jumlah	15.583.483.997	15.929.470.048
Beban Penyusutan		
Gedung/ Bangunan	47.074.127	47.670.627
Instalasi Sumber Air	20.620.763	21.951.522
Instalasi Perpompaan	333.136.750	311.802.674
Instalasi Pengolahan Air	205.798.013	226.921.715
Instalasi Trans/Distribusi	1.183.245.278	1.195.641.708
Kendaraan / Angkutan	6.253.669	8.338.226
Inventaris Kantor	27.202.202	36.888.475
Sub-jumlah	1.823.330.802	1.849.214.946
Jumlah	17.406.814.800	17.778.684.994

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. Pendapatan (Beban) Non Operasional

Akun ini merupakan saldo pendapatan(beban) non operasional selama tahun 2025 dan 2024, yang terdiri atas:

	2025	2024
	Rp	Rp
Bunga/Jasa Giro Bank	246.975.552	233.453.531
Beban Pajak Jasa Bank	(21.182.318)	(20.023.969)
Jumlah	225.793.234	213.429.562

16. Beban Pajak Tangguhan

Akun ini merupakan saldo beban pajak Tangguhan selama tahun 2025 dan 2024, yang terdiri atas:

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pajak Penghasilan untuk periode tahun 2025	8.333.749	8.211.838
Jumlah	8.333.749	8.211.838

17. Beban Pajak Penghasilan

Akun ini merupakan saldo beban pajak penghasilan selama tahun 2025 dan 2024, yang terdiri atas:

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pajak Penghasilan untuk periode tahun 2025	98.071.625	96.486.534
Jumlah	98.071.625	96.486.534

18. Perubahan Standar Akuntansi dan Restatement

Laporan keuangan tahun 2024 telah disajikan kembali untuk mencerminkan perubahan Standar Akuntansi dari SAK ETAP menjadi SAK EP yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Perubahan ini telah mempengaruhi akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Pajak Tangguhan. Sebagai hasilnya, akun CKPN telah disesuaikan sebesar Rp687.598.320 dan Beban Pajak Tangguhan telah disesuaikan sebesar Rp 8.221.838. Perubahan ini telah diterapkan secara retrospektif dan laporan keuangan tahun sebelumnya telah disajikan kembali untuk mencerminkan perubahan ini.

19. Persetujuan Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 11 Maret 2026.

Lampiran 12

REKAP SALDO AKHIR PERLENGKAPAN KANTOR PER OPD

KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama SKPD	Keadaan per 1 Januari 2025		Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025				Keadaan per 31 Desember 2025		Ket.
				Bertambah		Berkurang				
		Jml	Harga	Jml	Jumlah Harga	Jml	Jumlah Harga	Jml	Jumlah Harga	
1	2	3							4	
1	DINAS PENDIDIKAN	403.520	41.736.887.565,80	1.693	345.786.519,91			405.213	42.082.674.085,71	
2	DINAS KESEHATAN	36.991	5.025.438.425,93	3.801	342.089.073,60			40.792	5.367.527.499,53	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3.522	728.483.603,50					3.522	728.483.603,50	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.235	891.492.646,00	100	1.776.000			1.335	893.268.646,00	
5	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	211	93.574.500,00	25	7.908.750,00			236	101.483.250,00	
6	DINAS PERHUBUNGAN	3.532	653.233.880,40	20	3.996.000,00			3.552	657.229.880,40	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	327	241.579.211,18	10	4.551.000			337	246.130.211,18	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	633	142.655.000	14	350.700,00			647	143.005.700,00	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	297	98.286.133,34					297	98.286.133,34	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	560	196.030.882,05					560	196.030.882,05	
11	DINAS SOSIAL	1.611	260.583.154,00	2	10.316.300,00			1.613	270.899.454,00	
12	*DINAS KOPERASI ,USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN*	*946*	*246.171.354*			*50*	*5.717.500,00*	*896*	*240.453.854,00*	
13	*DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA*	*2.227*	*427.571.350,00*	*15*	*2.105.754,00*			*2.242*	*429.677.104,00*	
14	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	351	220.198.321,00	37	8.470.745	243	64.361.665,00	145	164.307.401,31	
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	680	119.529.950,00					680	119.529.950,00	
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.984	221.952.525,00	3	870.600,00			3.987	222.823.125,00	
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	654	121.407.100,00	253	41.725.500			907	163.132.600,00	
18	SEKRETARIAT DAERAH	9.694	1.485.769.050,00	1169	41.089.250			10.863	1.526.858.300,00	
19	SEKRETARIAT DPRD	2.447	362.615.350,00					2.447	362.615.350,00	
20	**BADAN KEUANGAN DAERAH**	864	433.553.645,00	*182*	*47.759.909,38*	510	281.329.645,31	536	199.983.909,06	
21	INSPEKTORAT	72	27.516.828					72	27.516.828,00	
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	306	293.563.909			132	42.042.409,38	174	251.521.499,99	
23	*BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*	*631*	*89.970.224,91*	*8*	*1.792.000,00*			*639*	*91.762.224,91*	
24	KANTOR KECAMATAN PACITAN	3.239	274.740.600,00	44	6.080.580			3.283	280.821.180,00	
25	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	338	42.107.026,00			192	10.651.706,00	146	31.455.320,00	
26	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	756	100.205.900,00	170	2.641.800,00			926	102.847.700,00	
27	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	494	75.058.550,00	21	4.412.250,00			515	79.470.800,00	
28	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	1.289	142.015.120,00					1.289	142.015.120,00	
29	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	536	85.212.650,00					536	85.212.650,00	
30	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	553	70.672.735,00	4	814.000,00			557	71.486.735,00	
31	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	391	39.627.700,00	208	28.641.108,00			599	68.268.808,00	
32	KANTOR KECAMATAN BANDAR	300	42.160.500	2	967.200			302	43.127.700,00	
33	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	143	8.358.200,00					143	8.358.200,00	
34	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	151	24.612.666,65					151	24.612.666,65	
35	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	816	53.053.200,00					816	53.053.200,00	
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	102	85.348.755,00					102	85.348.755,00	
37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	443	122.499.125,00	161	32.663.970,00			604	155.163.095,00	
38	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	1.314	345.912.002,00	24	2.348.100			1.338	348.260.102,00	
39	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	409	108.793.750	70	5.361.300,00			479	114.155.050,00	
40	DINAS PERIKANAN	748	140.052.695,20	17	1.470.000,00			765	141.522.695,20	
	Jumlah Total	**487.316**	**55.878.495.784,33**	**8.053**	**945.988.410,20**	**1.127**	**404.102.925,70**	**494.242**	**56.420.381.268,83**	

Lampiran 12

REKAP PENYUSUTAN PERLENGKAPAN PER OPD

KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	NILAI PERLENGKAPAN	PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	DINAS PENDIDIKAN	42.082.674.085,71	37.215.574.573,04	4.867.099.512,67
2	DINAS KESEHATAN	5.367.527.499,53	4.683.454.960,68	684.072.538,85
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	728.483.603,50	718.633.191,00	9.850.412,50
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	893.268.646,00	669.325.632,22	223.943.013,78
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	101.483.250,00	91.868.328,13	9.614.921,87
6	DINAS PERHUBUNGAN	657.229.880,40	649.350.463,73	7.879.416,67
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	246.130.211,18	123.315.207,01	122.815.004,17
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	143.005.700,00	129.748.962,50	13.256.737,50
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98.286.133,34	67.321.133,34	30.965.000,00
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	196.030.882,05	190.208.649,89	5.822.232,16
11	DINAS SOSIAL	270.899.454,00	267.783.167,54	3.116.286,46
12	DINAS KOPERASI ,USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN	240.453.854,00	202.901.474	37.552.379,58
13	DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	429.677.104,00	354.286.232,00	75.390.872,00
14	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	164.307.401,31	92.891.206,31	71.416.195,00
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	119.529.950,00	115.859.950,00	3.670.000,00
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	222.823.125,00	209.140.437,50	13.682.687,50
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	163.132.600,00	127.130.456,25	36.002.143,75
18	SEKRETARIAT DAERAH	1.526.858.300,00	1.219.499.156,25	307.359.143,76
19	SEKRETARIAT DPRD	362.615.350,00	353.874.933,33	8.740.416,67
20	BADAN KEUANGAN DAERAH	199.983.909,06	192.453.914,06	7.529.995,00
21	INSPEKTORAT	27.516.828,00	17.751.828,00	9.765.000,00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	251.521.499,99	47.381.500,00	204.139.999,99
23	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	91.762.224,91	89.533.391,58	2.228.833,33
24	KANTOR KECAMATAN PACITAN	280.821.180,00	259.302.087,50	21.519.092,50
25	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	31.455.320,00	24.893.320,00	6.562.000,00
26	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	102.847.700,00	93.456.972,92	9.390.727,08
27	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	79.470.800,00	70.591.607,29	8.879.192,71
28	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	142.015.120,00	100.443.411,67	41.571.708,33
29	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	85.212.650,00	76.787.650,00	8.425.000,00
30	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	71.486.735,00	54.324.953,75	17.161.781,25
31	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	68.268.808,00	30.742.526,00	37.526.282,00
32	KANTOR KECAMATAN BANDAR	43.127.700,00	26.407.225,00	16.720.475,00
33	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	8.358.200,00	7.093.200,00	1.265.000,00
34	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	24.612.666,65	23.347.666,65	1.265.000,00
35	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	53.053.200,00	35.159.700,00	17.893.500,00
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	85.348.755,00	24.143.755,00	61.205.000,00
37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	155.163.095,00	89.807.792,50	65.355.302,50
38	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	348.260.102,00	322.453.684,67	25.806.417,33
39	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	114.155.050,00	78.380.304,58	35.774.745,42
40	DINAS PERIKANAN	141.522.695,20	104.719.020,20	36.803.675,00
	Jumlah Total	**56.420.381.268,83**	**49.251.343.626,50**	**7.169.037.642,33**

Lampiran 12

REKAP AMORTISASI PER OPD

KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	NILAI AMORTISASI	AMORTISASI	NILAI BUKU
1	DINAS PENDIDIKAN	526.414.000,00	526.414.000,00	-
2	DINAS KESEHATAN	142.439.000,00	109.333.800,00	33.105.200,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.530.000,00	2.530.000,00	-
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.530.000,00	2.530.000,00	-
6	DINAS PERHUBUNGAN	1.265.000,00	1.265.000,00	-
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	118.533.900,00	85.902.120,00	32.631.780,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.265.000,00	1.265.000,00	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	30.965.000,00	30.965.000,00	-
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	1.265.000,00	1.265.000,00	-
11	DINAS SOSIAL	1.265.000,00	1.265.000,00	-
12	DINAS KOPERASI ,USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN	7.315.000,00	7.315.000,00	-
13	DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	55.214.500,00	55.214.500,00	-
14	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	51.048.500,00	31.135.100,00	19.913.400,00
15	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.265.000,00	1.265.000,00	-
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.760.000,00	12.760.000,00	-
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.530.000,00	2.530.000,00	-
18	SEKRETARIAT DAERAH	151.600.000,00	120.385.000,00	31.215.000,00
19	SEKRETARIAT DPRD	1.265.000,00	1.265.000,00	-
20	BADAN KEUANGAN DAERAH	7.529.995,00	7.529.995,00	-
21	INSPEKTORAT	1.265.000,00	1.265.000,00	-
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	204.140.000	174.620.000,00	29.520.000,00
23	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.265.000,00	1.265.000,00	-
24	KANTOR KECAMATAN PACITAN	7.590.000,00	7.590.000,00	-
25	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	1.265.000,00	1.265.000,00	-
26	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	1.265.000,00	1.265.000,00	-
27	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	1.265.000,00	1.265.000,00	-
28	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	1.265.000,00	1.265.000,00	-
29	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	1.265.000,00	1.265.000,00	-
30	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	1.265.000,00	1.265.000,00	-
31	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	1.265.000,00	1.265.000,00	-
32	KANTOR KECAMATAN BANDAR	1.265.000,00	1.265.000,00	-
33	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	1.265.000,00	1.265.000,00	-
34	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	1.265.000,00	1.265.000,00	-
35	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	1.265.000,00	1.265.000,00	-
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	61.205.000,00	25.241.000,00	35.964.000,00
37	DINAS PERPUSTAKAAN	1.265.000,00	1.265.000,00	-
38	DINAS KETAHANAN PANGAN & PERTANIAN	2.530.000,00	2.530.000,00	-
39	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	11.965.000,00	7.685.000,00	4.280.000,00
40	DINAS PERIKANAN	26.125.000	26.125.000,00	-
	Jumlah Total	**1.450.264.895,00**	**1.263.635.515,00**	**186.629.380,00**

LAMPIRAN 13

RINCIAN ASET TETAP RENOVASI

KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Brg					Tgl	Jumlah	Jumlah Harga	Ket
1	Prasarana TPA Dadapan Kec. Pringkuku	07	01	01	004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	21/11/2025	1	289.809.278,00	
2	Gedung Ex Kawedanan Lorok Lanjutan	07	01	01	003	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	13/08/2025	1	137.980.068,00	
3	Sarana Prasarana/Gedung Pemerintah Kab. Pacitan (Rumah Dinas Bupati)	07	01	01	003	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	03/12/2025	1	177.692.517,00	
4	Sarana Prasarana Gedung DPMPTSP Kab. Pacitan	07	01	01	003	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	22/07/2025	1	213.923.231,00	
5	Trotoar Alun Alun Pacitan Lanjutan (Depan Bapedda)	07	01	01	004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	26/08/2025	1	214.631.141,00	
6	Penataan Kawasan Rest Area JLS Lanjutan	07	01	01	004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	17/11/2025	1	963.221.872,00	
JUMLAH								**6**	**1.997.258.107,00**	

LAMPIRAN 14

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
KABUPATEN PACITAN

No	Uraian	Letak/Lokasi	Dokumen		Mulai	Status Tanah	Kode Tanah	Asal Usul	Nilai Kontrak
			Tanggal	Nomor					
A	**Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan**								***10.054.305.043,45***
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	1.3.6.01.01.01.003	Ex Kantor Camat Ngadirojo	20/07/2021	641.6/888/CK/VII/2021	20/07/2021	Milik Pemda	1.3.1.01.01.04.001	Pengadaan	553.310.455,45
2	1.3.6.01.01.01.003	Kawasan Ex. Kantor Kawedanan Lorok (Paving Playground)	15/12/2022	32/BA-P1/VII/2022	15/12/2022	Milik Pemda	1.3.1.01.01.04.001	Pengadaan	122.578.000,00
3	1.3.6.01.01.01.003	Persiapan Lahan Pembangunan TPS3R Kel. Ploso Kec. Pacitan	03/06/2025	236.1/BA-P1/PM/V1/2025	03/06/2025	Milik Pemda	1.3.1.01.01.04.001	Pengadaan	148.976.058,00
									824.864.513,45
	RSUD dr. Darsono								
1	1.3.6.01.01.01.003	Jl. DI Panjaitan Pacitan	17/12/2024	01/BAST.I/CV.RI/RSUD.PCT/XII/2024	10/06/2024	Milik Pemda	1.3.1.01.01.04.001	Pengadaan	5.369.922.280,00
2	1.3.6.01.01.01.003	Jl. DI Panjaitan Pacitan	06/12/2024	28.11/BAST/ADM.BMT/X/2025	24/06/2025	Milik Pemda	1.3.1.01.01.04.001	Pengadaan	3.859.518.250,00
									9.229.440.530,00
B	**Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**								***6.823.045.208,00***
	Dinas Kesehatan								
1	1.3.6.01.01.01.004	Puskesmas Nawangan Kecamatan Nawangan	29/12/2025	5.01/04.0/002143/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	29/12/2025	Milik Pemda	1.3.1.01.01.04.001	Pengadaan	485.119.146,00
									485.119.146,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Gegeran	19/12/2019	15.07/P1-AS/XI/2022	19/12/2019	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	4.058.341.159,00
2	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Kepek Kalikuning	07/11/2022	CV.MJM-168.214.VIII.2022	07/11/2022	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	193.943.555,00
3	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Tawang-Mujing	29/09/2022	052/EG-PCT/X/2023	29/09/2022	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	125.974.155,00
4	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Gantung Dsn.Sempu Ds.Kemuning	5/10/2023	057/NI-PCT/IX/2023	5/10/2023	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	206.585.051,00
5	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Banyuanget	16/12/2024	030/CV.LGW.PCT-P1/XII/2024	16/12/2024	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	383.816.375,00
6	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Tosari	09/07/2024	017/EG-PCT/VII/2024	09/07/2024	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	555.042.735,00
7	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Krajan Ngreco	4/9/2023	057/NI-PCT/IX/2023	4/9/2023	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	227.183.507,00

No	Uraian	Letak/Lokasi	Dokumen		Mulai	Status Tanah	Kode Tanah	Asal Usul	Nilai Kontrak
			Tanggal	Nomor					
8	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Caruban Ds.Sidomulyo	06/12/2024	569.6/BA-P1/PS/XII/2024	06/12/2024	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	52.749.450,00
9	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Dsn.Krajan Ds.Ploso	25/09/2024	569.2/BA-P1/PS/IX/2024	25/09/2024	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	87.758.073,00
10	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Dsn.Pinggir Ds.Jatigunung Dsn.Tembelang Ds.Tulakan	19/07/2024	012/PP-REG/2024	19/07/2024	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	76.259.814,00
11	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Dsn.Semen Ds.Gondang	05/12/2024	023/WM.P1/XII/2024	05/12/2024	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	193.070.059,00
12	1.3.6.01.01.01.004	Jembatan Wonosobo-Wonoasri	19/08/2024	02.08/UWK.P-1/VIII/2024	19/08/2024	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	138.070.189,00
13	1.3.6.01.01.01.004	Perencanaan Teknis Dak 2025 Wilayah I (Jalan T	19-12-2024	363-2.B/06/LES/11/2024	19-12-2024	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	13.268.940,00
14	1.3.6.01.01.01.004	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan 2025 (J	19-12-2024	51/MCE-BA/XII/2024	19-12-2024	Milik Pemda	1.3.1.01.03.07.010	Pengadaan	25.863.000,00
									6.337.926.062,00
Total Konstruksi Dalam Pengerjaan (A + B)									**16.877.350.251,45**

DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN YANG TERMASUK PROPERTI INVESTASI

No.	SKPD Pengguna	Nama Barang	Mitra Pemanfaatan/ Pihak Pemanfaat	Luas (m2)	Lokasi	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Ket.
Tanah								
1	PUPR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		564	Desa Bungur Tulakan	1990	84.600.000,00	idle
2	PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III		337	DS.COKROKEMBANG, NGADIROJO	1990	58.975.000,00	idle
3	BKD	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku		102	Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo	1990	7.650.000,00	idle
4	BKD	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan		331	Jalan K. Umar No.- Pacitan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan	1991	49.650.000,00	idle
5	PARIWISATA	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi		10.394	Rt 3 RW X Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan	1994	564.600.000,00	idle
6	BKD	Tanah Hutan Lindung		119.335	JetisLor,,Nawangan, JETISLOR, NAWANGAN	1995	5.966.750.000,00	idle
7	BKD	Tanah Hutan Produksi		45.070	-, KEBONSARI, PUNUNG	1999	2.253.500.000,00	idle
8	BKD	Tanah Hutan Lindung		82.000	-, JERUK, BANDAR	2003	1.921.950.000,00	idle
9	BKD	Tanah Hutan Lindung		38.439	-, JERUK, BANDAR	2003	1.537.560.000,00	idle
10	BKD	Tanah Hutan Lindung		10.305	Desa Tahunan, TAHUNAN, TEGALOMBO	1987	1.000.000.000,00	idle
11	BKD	Tanah Hutan Lindung		9.300	, TAHUNAN, TEGALOMBO	1987	257.625.000,00	idle
12	BKD	Tanah Hutan Lindung		25.410	, TAHUNAN, TEGALOMBO	1987	1.016.400.000,00	idle
13	BKD	Tanah Hutan Lindung		26.945	, TAHUNAN, TEGALOMBO	1987	1.077.800.000,00	idle
14	BKD	Tanah Hutan Lindung		6.498	, JERUK, BANDAR	1987	232.500.000,00	idle
15	Dinas Pendidikan	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan		603	Kalak Donorogo	2009	19.025.000,00	idle
16	BKD	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan		5.993	Desa Sedeng Kecamatan Pacitan	1985	308.671.061,94	idle
17	PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III		140	DS.COKROKEMBANG, NGADIROJO	1990	24.675.000,00	idle
18	PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III		178	DS.COKROKEMBANG, NGADIROJO	1992	13.767.600,00	idle
19	BKD	Tanah Hutan Lindung				2013	14.000.000,00	idle
20	BKD	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan		4.071	Kawasan Wisata Pancer Door/ Kelurahan Ploso Pacitan	2020	20.000.000,00	idle
21	BKD	Tanah Hutan Lindung				2013	77.716.000,00	idle
22	BKD	Tanah Hutan Lindung		104.799	Njeruk bandar	2013	1.131.675.000,00	idle
23	KEC. PACITAN	Tanah Hutan Cagar Alam		1.500	Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan	1998	21.000.000,00	idle
24	BKD	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan		958	Sukorejo, Sudimoro	2007	188.690.000,00	idle
25	Dinas Kesehatan	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu		503	Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung	1990	72.600.000,00	idle
26	BKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		460 M2	Ngadirejan,Pringkuku	1987	57.500.000,00	sewa
27	KBPP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		469 m2	Jalan Raya Solo - Pacitan Kec. Donorojo	1994	58.625.000,00	sewa
Jumlah							**18.037.504.661,94**	
Gedung dan Bangunan								
1	Badan Keuangan Daerah	Bangunan Klinik/Puskesmas		371	Desa Kebonagung	23/06/2023	338.486.382,36	idle
2	Satpol PP	Bangunan Anjungan Tunai Mandiri Permanen	BPD Jatim	3	Jalan Imam Bonjol	2003-01-01	12.000.000,00	sewa
3	Dinas Perdagangan	Bangunan Anjungan Tunai Mandiri Permanen	BPD Jatim	12	Pasar Buah Arjowinangun	2019-12-16	199.499.866,00	sewa
4	Dinas Perdagangan	Bangunan Anjungan Tunai Mandiri Permanen	BPD Jatim	12	Pasar Sawo	2016-12-22	173.185.000,00	sewa
5	Kecamatan Pringkuku	Bangunan Gedung Kantor Permanen	BPR Jatim	460	Pringkuku	1979-01-01	145.301.000,00	sewa
Jumlah							**868.472.248,36**	
Akumulasi Penyusutan							**-340.339.265,53**	
Nilai Buku							**528.132.982,83**	

RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERADA TIDAK DI TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
1	Sekolah	SD NEGERI GEGERAN	Gegeran	Arjosari	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
2		SD NEGERI 1 GEMBONG	Gembong	Arjosari	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
3		SD NEGERI 1 KARANGGEDE	Karanggede	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD SKD
4		SD NEGERI 3 KARANGGEDE	Karanggede	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD SKD
5		SD NEGERI 4 KARANGGEDE	Karanggede	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD SKD
6		SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO	Kedungbendo	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD
7		SD NEGERI PAGUTAN	Pagutan	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD
8		SD NEGERI 1 TEMON	Temon	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD
9		SD NEGERI 2 TEMON	Temon	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD
10		SD NEGERI 3 TEMON	Temon	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD
11		SD NEGERI 4 TEMON	Temon	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD
12		SD NEGERI TREMAS	Tremas	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD
13		SD NEGERI 1 JERUK	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	TKD SKD
14		SD NEGERI 2 JERUK	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	TKD SKD
15		SD NEGERI 3 JERUK	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	TKD SKD
16		SD NEGERI 4 JERUK	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	TKD SKD
17		SD NEGERI 5 JERUK	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	TKD SKD
18		SD NEGERI 1 BELAH	Belah	Donorojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
19		SD NEGERI 2 BELAH	Belah	Donorojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
20		SD NEGERI 3 BELAH	Belah	Donorojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
21		SD NEGERI 1 CEMENG	Cemeng	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD
22		SD NEGERI 2 CEMENG	Cemeng	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD
23		SD NEGERI 1 DONOROJO	Donorojo	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
24		SD NEGERI 2 DONOROJO	Donorojo	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
25		SD NEGERI 1 GENDARAN	Gendaran	Donorojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
26		SD NEGERI 2 GENDARAN	Gendaran	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
27		SD NEGERI 1 KALAK	Kalak	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
28		SD NEGERI 2 KALAK	Kalak	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
29		SD NEGERI 1 SAWAHAN	Sawahan	Donorojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
30		SD NEGERI 1 SEKAR	Sekar	Donorojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
31		SD NEGERI 2 SEKAR	Sekar	Donorojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
32		SD NEGERI 1 SUKODONO	Sukodono	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
33		SD NEGERI 2 SUKODONO	Sukodono	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
34		SD NEGERI 1 WIDORO	Widoro	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
35		SD NEGERI BANJARJO	Banjarjo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
36		SD NEGERI KALIPELUS	Kalipelus	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
37		SD NEGERI 1 KARANGANYAR	Karanganyar	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
38		SD NEGERI 2 KARANGANYAR	Karanganyar	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
39		SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	Karangnongko	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
40		SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	Karangnongko	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
41		SD NEGERI 1 KATIPUGAL	Katipugal	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
42		SD NEGERI 2 KATIPUGAL	Katipugal	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
43		SD NEGERI KEBONAGUNG	Kebonagung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
44		SD NEGERI 1 KETEPUNG	Ketepung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
45		SD NEGERI 2 KETEPUNG	Ketepung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
46		SD NEGERI 1 KETRO	Ketro	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
47		SD NEGERI 2 KETRO	Ketro	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
48		SD NEGERI 1 KLESEM	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
49		SD NEGERI PLUMBUNGAN	Plumbungan	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
50		SD NEGERI 1 PUNJUNG	Punjung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
51		SD NEGERI 2 PUNJUNG	Punjung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
52		SD NEGERI 1 PURWOASRI	Purwoasri	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
53		SD NEGERI 2 PURWOASRI	Purwoasri	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
54		SD NEGERI 1 SIDOMULYO	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
55		SD NEGERI 2 SIDOMULYO	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
56		SD NEGERI 3 SIDOMULYO	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
57		SD NEGERI 1 WONOGONDO	Wonogondo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
58		SD NEGERI 2 WONOGONDO	Wonogondo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
59		SD NEGERI 1 WORAWARI	Worawari	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
60		SD NEGERI 2 WORAWARI	Worawari	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
61		SD NEGERI 1 GONDANG	Gondang	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
62		SD NEGERI 2 GONDANG	Gondang	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
63		SD NEGERI 3 GONDANG	Gondang	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
64		SD NEGERI 1 MUJING	Mujing	Nawangan	Pemerintah Daerah	TKD
65		SD NEGERI 2 MUJING	Mujing	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
66		SD NEGERI 3 MUJING	Mujing	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
67		SD NEGERI 1 NGROMO	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD-Copy/Scan Sertipikat belum ada.Perlu ke desa
68		SD NEGERI 2 NGROMO	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD-Copy/Scan Sertipikat belum ada.Perlu ke desa
69		SD NEGERI 3 NGROMO	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD-Copy/Scan Sertipikat belum ada.Perlu ke desa
70		SD NEGERI 2 PAKIS BARU	Pakis Baru	Nawangan	Pemerintah Daerah	TKD
71		SD NEGERI 3 PAKIS BARU	Pakis Baru	Nawangan	Pemerintah Daerah	TKD
72		SD NEGERI 1 SEMPU	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
73		SD NEGERI 2 SEMPU	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
74		SD NEGERI 3 SEMPU	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
75		SD NEGERI 4 SEMPU	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
76		SD NEGERI 1 BODAG	Bodag	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
77		SD NEGERI 1 BOGOHARJO	Bogoharjo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
78		SD NEGERI 2 BOGOHARJO	Bogoharjo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
79		SD NEGERI CANGKRING	Cangkring	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
80		SD NEGERI 1 COKROKEMBANG	Cokrokembang	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
81		SD NEGERI 2 COKROKEMBANG	Cokrokembang	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
82		SD NEGERI 3 COKROKEMBANG	Cokrokembang	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
83		SD NEGERI 1 HADILUWIH	Hadiluwih	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
84		SD NEGERI 2 HADILUWIH	Hadiluwih	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
85		SD NEGERI 1 HADIWARNO	Hadiwarno	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
86		SD NEGERI 2 HADIWARNO	Hadiwarno	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
87		SD NEGERI 1 NGADIROJO	Ngadirojo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
88		SD NEGERI 2 NGADIROJO	Ngadirojo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
89		SD NEGERI 1 NOGOSARI	Nogosari	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
90		SD NEGERI 2 NOGOSARI	Nogosari	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
91		SD NEGERI 1 PAGEREJO	Pagerejo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
92		SD NEGERI 2 PAGEREJO	Pagerejo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
93		SD NEGERI 3 PAGEREJO	Pagerejo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
94		SD NEGERI 4 PAGEREJO	Pagerejo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
95		SD NEGERI 1 SIDOMULYO	Sidomulyo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
96		SD NEGERI 2 SIDOMULYO	Sidomulyo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
97		SD NEGERI 3 SIDOMULYO	Sidomulyo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
98		SD NEGERI 4 SIDOMULYO	Sidomulyo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
99		SD NEGERI 5 SIDOMULYO	Sidomulyo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
100		SD NEGERI 1 TANJUNG LOR	Tanjung Lor	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
101		SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	Tanjung Lor	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
102		SD NEGERI 1 TANJUNGPURO	Tanjungpuro	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD-Copy/Scan Sertipikat belum ada.Perlu ke desa
103		SD NEGERI 2 TANJUNGPURO	Tanjungpuro	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD-Copy/Scan Sertipikat belum ada.Perlu ke desa
104		SD NEGERI WIYORO	Wiyoro	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
105		TK NEGERI PEMBINA NGADIROJO	Wiyoro	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
106		SD NEGERI 1 WONODADIKULON	Wonodadikulon	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
107		SD NEGERI 2 WONODADIKULON	Wonodadikulon	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
108		SD NEGERI 3 WONODADIKULON	Wonodadikulon	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
109		SD NEGERI 4 WONODADIKULON	Wonodadikulon	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
110		SD NEGERI 1 WONODADIWETAN	Wonodadiwetan	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
111		SD NEGERI 2 WONODADIWETAN	Wonodadiwetan	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
112		SD NEGERI ARJOWINANGUN	Arjowinangun	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
113		SD NEGERI BANJARSARI	Banjarsari	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
114		SD NEGERI BOLOSINGO	Bolosingo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
115		SD NEGERI 1 KAYEN	Kayen	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
116		SD NEGERI 2 KAYEN	Kayen	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
117		SD NEGERI MENADI	Menadi	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
118		SD NEGERI NANGGUNGAN	Nanggungan	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
119		SD NEGERI PONGGOK	Ponggok	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
120		SD NEGERI PURWOREJO	Purworejo	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
121		SD NEGERI 1 SAMBONG	Sambong	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
122		SD NEGERI 2 SAMBONG	Sambong	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
123		SD NEGERI 1 SEDENG	Sedeng	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
124		SD NEGERI 2 SEDENG	Sedeng	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
125		SD NEGERI SEMANTEN	Semanten	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
126		SD NEGERI 1 SIRNOBOYO	Sirnoboyo	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
127		SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	Sirnoboyo	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
128		SD NEGERI 3 SIRNOBOYO	Sirnoboyo	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
129		SD NEGERI SUKOHARJO	Sukoharjo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
130		SD NEGERI 1 TAMBAKREJO	Tambakrejo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
131		SD NEGERI 2 TAMBAKREJO	Tambakrejo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
132		SD NEGERI TANJUNGSARI	Tanjungsari	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
133		TK NEGERI PEMBINA PACITAN	Tanjungsari	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
134		SD NEGERI WIDORO	Widoro	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
135		SD NEGERI 1 CANDI	Candi	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
136		SD NEGERI 2 CANDI	Candi	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
137		SD NEGERI 3 CANDI	Candi	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
138		SD NEGERI 4 CANDI	Candi	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
139		SD NEGERI NGADIREJAN	Ngadirejan	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
140		TK NEGERI PEMBINA PRINGKUKU	Ngadirejan	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
141		SD NEGERI 1 PELEM	Pelem	Pringkuku	Pemerintah Daerah	TKD
142		SD NEGERI 2 PELEM	Pelem	Pringkuku	Pemerintah Daerah	TKD
143		SD NEGERI 3 PELEM	Pelem	Pringkuku	Pemerintah Daerah	TKD
144		SD NEGERI POKO	Poko	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
145		SD NEGERI 1 PRINGKUKU	Pringkuku	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
146		SD NEGERI 2 PRINGKUKU	Pringkuku	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
147		SD NEGERI 3 PRINGKUKU	Pringkuku	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
148		SD NEGERI 1 SUGIHWARAS	Sugihwaras	Pringkuku	Pemerintah Daerah	TKD
149		SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	Sugihwaras	Pringkuku	Pemerintah Daerah	TKD
150		SD NEGERI 2 GONDOSARI	Gondosari	Punung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
151		SD NEGERI KEBONSARI	Kebonsari	Punung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
152		SD NEGERI 2 MANTREN	Mantren	Punung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
153		SD NEGERI 1 PLOSO	Ploso	Punung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
154		SD NEGERI 2 PLOSO	Ploso	Punung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
155		SD NEGERI 4 PLOSO	Ploso	Punung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
156		SD NEGERI 2 PUNUNG	Punung	Punung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
157		SD NEGERI 3 PUNUNG	Punung	Punung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
158		SD NEGERI 1 SOOKA	Sooka	Punung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
159		SD NEGERI 2 SOOKA	Sooka	Punung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
160		SD NEGERI 2 TINATAR	Tinatar	Punung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
161		SD NEGERI 1 GUNUNGREJO	Gunungrejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
162		SD NEGERI 2 GUNUNGREJO	Gunungrejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
163		SD NEGERI 1 KLEPU	Klepu	Sudimoro	Pemerintah Daerah	TKD
164		SD NEGERI 2 KLEPU	Klepu	Sudimoro	Pemerintah Daerah	TKD
165		SD NEGERI 3 KLEPU	Klepu	Sudimoro	Pemerintah Daerah	TKD
166		SMP NEGERI 5 SUDIMORO SATU AT	Klepu	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
167		SD NEGERI 1 PAGERLOR	Pager Lor	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD-Copy/Scan Sertipikat belum ada.Perlu ke desa
168		SD NEGERI 2 PAGERLOR	Pager Lor	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD-Copy/Scan Sertipikat belum ada.Perlu ke desa
169		SD NEGERI 3 PAGERLOR	Pager Lor	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD-Copy/Scan Sertipikat belum ada.Perlu ke desa
170		SD NEGERI 1 SEMBOWO	Sembowo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	TKD
171		SD NEGERI 2 SEMBOWO	Sembowo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
172		SMP NEGERI SATU ATAP 4 SUDIMO	Sembowo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
173		SD NEGERI 1 SUKOREJO	Sukorejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	TKD
174		SD NEGERI 2 SUKOREJO	Sukorejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	TKD
175		SD NEGERI 1 GEDANGAN	Gedangan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
176		SD NEGERI 2 GEDANGAN	Gedangan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
177		SD NEGERI 1 GEMAHARJO	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
178		SD NEGERI 2 GEMAHARJO	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
179		SD NEGERI 3 GEMAHARJO	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
180		SD NEGERI 4 GEMAHARJO	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
181		SD NEGERI 5 GEMAHARJO	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
182		SD NEGERI 1 KASIHAN	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
183		SD NEGERI 2 KASIHAN	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
184		SD NEGERI 3 KASIHAN	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
185		SD NEGERI 1 KEBONDALEM	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
186		SD NEGERI 2 KEBONDALEM	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
187		SD NEGERI 1 KEMUNING	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
188		SD NEGERI 2 KEMUNING	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
189		SD NEGERI 3 KEMUNING	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
190		SD NEGERI 4 KEMUNING	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
191		SD NEGERI 1 NGRECO	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
192		SD NEGERI 2 NGRECO	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
193		SD NEGERI 3 NGRECO	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
194		SD NEGERI 4 NGRECO	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
195		SD NEGERI 5 NGRECO	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
196		SD NEGERI 6 NGRECO	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
197		SD NEGERI 1 PUCANGOMBO	Pucangombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
198		SD NEGERI 2 PUCANGOMBO	Pucangombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
199		SD NEGERI 3 PUCANGOMBO	Pucangombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
200		SD NEGERI 4 PUCANGOMBO	Pucangombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
201		SD NEGERI 5 PUCANGOMBO	Pucangombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
202		SD NEGERI 1 TAHUNAN	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
203		SD NEGERI 2 TAHUNAN	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
204		SD NEGERI 3 TAHUNAN	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
205		SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU	Tahunan Baru	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
206		SD NEGERI 2 TAHUNAN BARU	Tahunan Baru	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
207		SD NEGERI 2 TEGALOMBO	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
208		SD NEGERI 1 BUBAKAN	Bubakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
209		SD NEGERI 2 BUBAKAN	Bubakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
210		TK NEGERI PEMBINA TULAKAN	Bungur	Tulakan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
211		SD NEGERI 1 GASANG	Gasang	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
212		SD NEGERI 2 GASANG	Gasang	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
213		SD NEGERI 1 JETAK	Jetak	Tulakan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
214		SD NEGERI 1 KETRO	Ketro	Tulakan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
215		SD NEGERI 2 KETRO	Ketro	Tulakan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
216		SD NEGERI 3 KETRO	Ketro	Tulakan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
217		SD NEGERI 4 KETRO	Ketro	Tulakan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
218		SD NEGERI 5 KETRO	Ketro	Tulakan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
219		SD NEGERI 1 KLUWIH	Kluwih	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
220		SD NEGERI 2 KLUWIH	Kluwih	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
221		SD NEGERI 1 LOSARI	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
222		SD NEGERI 2 LOSARI	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
223		SD NEGERI 4 LOSARI	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
224		SD NEGERI 1 NGILE	Ngile	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
225		SD NEGERI 2 NGILE	Ngile	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
226		SD NEGERI 1 NGLARAN	Nglaran	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
227		SD NEGERI 2 NGLARAN	Nglaran	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
228		Gedung Pustu Borang	Borang	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD SKD
229		Gedung Pustu Karangrejo	Karangrejo	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD SKD
230		Puskesmas Kedungbendo	Kedungbendo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
231		Gedung Pustu Pagutan	Pagutan	Arjosari	Pemerintah Daerah	TKD
232		Gedung Pustu Gendaran	Gendaran	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD SKD
233		Gedung Pustu Klepu	Klepu	Donorojo	Pemerintah Daerah	TKD
234		Gedung Pustu Kalipelus	Kalipelus	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
235		Gedung Pustu Ketepung	Ketepung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
236		Gedung Pustu Sidomulyo	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD
237		Gedung Pustu Worawari	Worawari	Kebonagung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
238		Pustu Gondang	Gondang	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
239		Gedung Pustu Penggung	Penggung	Nawangan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD. Perlu ke Desa. Copy/Scan Sertipikat belum ada
240		Gedung Pustu Pagerejo	Pagerejo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
241		Gedung Pustu Sidomulyo	Sidomulyo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
242		Gedung Pustu Wiyoro	Wiyoro	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
243	Kesehatan	Gedung Pustu Wonodadi Wetan	Wonodadi Wetan	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	TKD
244		Pustu Banjarsari	Banjarsari	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD
245		Gedung Pustu Bolosingo	Bolosingo	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
246		Gedung Pustu Ponggok	Ponggok	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
247		Gedung Pustu Semanten	Semanten	Pacitan	Pemerintah Daerah	TKD SKD
248		Pustu Sukoharjo	Sukoharjo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
249		Gedung Pustu Pelem	Pelem	Pringkuku	Pemerintah Daerah	TKD
250		Gedung Pustu Mantren	Mantren	Punung	Pemerintah Daerah	TKD SKD
251		Gedung Pustu Gunungrejo	Gunungrejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
252		Gedung Pustu Pager Lor	Pager Lor	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
253		Gedung Puskesmas Gemaharjo	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
254		Gedung Pustu Kasihan	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
255		Gedung Puskesmas Bubakan Lama	Bubakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
256		Gedung Pustu Kalikuning	Kalikuning	Tulakan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
257		Gedung Pustu Ketro	Ketro	Tulakan	Pemerintah Daerah	Sertipikat TKD
258		Gedung Pustu Kluwih	Kluwih	Tulakan	Pemerintah Daerah	TKD
259		Gayuhan kiri	Arjosari	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
260		Wongsokerti	Arjosari	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
261		Ngalian	Borang	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
262		Kampir	Borang	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
263		Gayuhan kanan	Gayuhan	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
264		Gayuhan kiri	Gayuhan	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
265		Krai	Gayuhan	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
266		Ngalian	Gembong	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
267		Blawong	Gembong	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
268		Pronggo	Gembong	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
269		Kerti kanan	Gunungsari	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
270		Kerti kiri	Gunungsari	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
271		Gayuhan kiri	Jatimalang	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
272		Kedungsapi	Jetiskidul	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
273		Sringin	Jetiskidul	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
274		Karang	Karanggede	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
275		Katulan	Karanggede	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
276		Mendang	Karanggede	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
277		Beji	Karanggede	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
278		Budukan	Karanggede	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
279		Wonosari	Karangrejo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
280		Sb.Kitri	Karangrejo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
281		Krajan	Karangrejo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
282		Jembret	Karangrejo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
283		Kedungsapi	Kedungbendo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
284		Ngasem	Kedungbendo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
285		Kedungsapi	Mangunharjo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
286		Tegal	Mangunharjo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
287		Sepatan	Mangunharjo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
288		Tempel	Mangunharjo	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
289		Mlati kanan	Mlati	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
290		Mlati kiri	Mlati	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
291		Dungjati	Mlati	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
292		Pandaan	Mlati	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
293		Kerti kanan	Pagutan	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
294		Tumalang	Pagutan	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
295		Mlati kanan	Sedayu	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
296		Mlati kiri	Sedayu	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
297		Miri-miri	Sedayu	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
298		Baungan	Sedayu	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
299		Daren	Sedayu	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
300		Gayuhan kiri	Tremas	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
301		Mlati kanan	Tremas	Arjosari	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
302		Tosari Kanan	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
303		Tosari Kiri	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
304		Kalitowo	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
305		Panjing	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
306		Saren	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
307		Ngagik	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
308		Dokkriyo	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
309		Sb. Kumbahan	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
310		Sb. Ngrejo	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
311		Gamping	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
312		Duren	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
313		Dungdowo	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
314		Gesing	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
315		Becik	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
316		D.Wajak	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
317		Wadar	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
318		Kaliwungu	Bandar	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
319		Baleharjo	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
320		Pelemsengir	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
321		Dungmiri	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
322		Duduk	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
323		Tanjung	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
324		Poletan	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
325		Pule	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
326		WatuBale	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
327		Sawah Lungguh	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
328		Selojoyo	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
329		Kalipasang	Bangunsari	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
330		Jambu	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
331		Sidodadi	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
332		Gitri	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
333		Watukudi	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
334		Nalangan	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
335		Gonggang	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
336		Jurug Bendo	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
337		Gondang	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
338		Bolang	Jeruk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
339		Jetis kanan	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
340		Jetis Kiri	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
341		Tempuran	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
342		Salam	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
343		Klacen	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
344		Mekung	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
345		Plupuh	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
346		Sb. Jumbleng	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
347		Duren Satunggu	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
348		Blumbang	Kledung	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
349		Kracan	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
350		Kalidoyo	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
351		Randualas	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
352		Dung Mote	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
353		Ngepoh	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
354		Sb. Nglaran	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
355		Sb. Morotonggo	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
356		Watusigar	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
357		DungDut	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
358		Puladadi	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
359		Dungsuru	Ngunut	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
360		J. Menjangan	P.Sinarang	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
361		S. Nginuman	P.Sinarang	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
362		K. Tempuran	P.Sinarang	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
363		Waruteklok	P.Sinarang	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
364		Jerogelo	P.Sinarang	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
365		Dungsuru Kn	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
366		Dungsuru Kr	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
367		Gagakan	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
368		Bener	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
369		Nguni	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
370		Miri	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
371		Delisen	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
372		Padas	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
373		Jeblokan	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
374		Watubuyeng	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
375		Ngampo	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
376		Sambeng	Tumpuk	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
377		Dungdowo Kanan	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
378		Dungdowo Kiri	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
379		Banaran	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
380		P. Wulung	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
381		Semanding	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
382		D. Bungkik	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
383		Ngringin	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
384		Gembuk	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
385		G. Limas	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
386		Sabwatu	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
387		Pajringan	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
388		K. Ngelo	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
389		Dungtelon	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
390		Baran	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
391		Jebukan	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
392		Temon	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
393		Plandi	Watupatok	Bandar	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
394		Nglebeng	Belah	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
395		Druju	Donorojo	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
396		Sb. Wirati	Kalak	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
397		Ngobyongan	Kalak	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
398		Sb. Tanjung	Sekar	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
399		Sb. Grasak	Sekar	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
400		Sb. Marik	Sekar	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
401		Sb. Guwo	Sukodono	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
402		Sb. Ngepoh	Sukodono	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
403		Sb. Kalilo	Sukodono	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
404		Sb. Dungtimo	Widoro	Donorojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
405		Banjarjo	Banjarjo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
406		Gondosuli	Banjarjo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
407		Kalitelu	Banjarjo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
408		Gembuk	Gawang	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
409		Gawang	Gawang	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
410		Kalitelu	Gawang	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
411		Salam	Gawang	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
412		Dondong	Gawang	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
413		Gembuk	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
414		Dungnongo	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
415		Salamrejo	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
416		Tejo	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
417		Jengglong	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
418		Sriten	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
419		Tawang	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
420		Dung Pule	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
421		Dung Jurug	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
422		Sempol	Gembuk	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
423		Kidulsalak	Kalipelus	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
424		Sb. Linggomanik	Kalipelus	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
425		Sb. Balong	Kalipelus	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
426		Sb. Duren	Kalipelus	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
427		Pandan Wangi	Kalipelus	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
428		Banar	Karanganyar	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
429		Waru	Karanganyar	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
430		Jambean	Karangnongko	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
431		Karangnongko	Karangnongko	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
432		Sule	Karangnongko	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
433		Lumbung Rondo	Karangnongko	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
434		Tawang	Karangnongko	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
435		Tempuran	Katipugal	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
436		Kluwih	Katipugal	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
437		Kebonagung	Kebonagung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
438		Sawit	Ketepung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
439		Krajan	Ketepung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
440		Garong	Ketro	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
441		Sb. Bulu	Ketro	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
442		Nongko	Ketro	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
443		Telan	Ketro	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
444		Kaliuni	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
445		Sb. Gondang	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
446		Sb. Dadapan	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
447		Sb. Wangen	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
448		Sb. Kendal	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
449		Sb. Kaliuni	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
450		Salam Cengklok	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
451		Kutukan	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
452		Watu Pecah	Klesem	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
453		Gembuk	Mantren	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
454		Dungnongo	Mantren	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
455		Cemplong	Mantren	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
456		Gondang	Mantren	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
457		Mundu	Mantren	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
458		Sinoman	Mantren	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
459		Nyemono	Plumbungan	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
460		Ganggang	Plumbungan	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
461		Punjung	Punjung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
462		Sb. Ngaresan	Punjung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
463		Ngunut	Punjung	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
464		Kebonagung	Purwoasri	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
465		Sampang	Purwoasri	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
466		Ngaren	Sanggrahan	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
467		Sanggrahan	Sanggrahan	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
468		Kaliwaru	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
469		Pagersari	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
470		Jambu	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
471		Sb. Pule	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
472		Sb. Beji	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
473		Sb. Ketos	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
474		Ngricik	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
475		Dung Tukul	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
476		Sb. Genjong	Sidomulyo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
477		Klampok	Wonogondo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
478		Jaten	Wonogondo	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
479		Dungnongo	Worawari	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
480		Worawari	Worawari	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
481		Dungdowo	Worawari	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
482		Dungguyangan	Worawari	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
483		Ngoyan	Worawari	Kebonagung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
484		Wiyoro	Gondang	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
485		Dawung	Gondang	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
486		Semen	Gondang	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
487		Dilem	Gondang	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
488		Dungbiru	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
489		Jalen	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
490		Pagersari	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
491		Giyono	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
492		JR. Panggang	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
493		Beder I	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
494		Beder II	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
495		Bono Nongko	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
496		Troudan	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
497		Dunglempir	Jetislor	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
498		Mujing	Mujing	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
499		Gayam	Mujing	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
500		Kasihan	Nawangan	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
501		Jalen II	Nawangan	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
502		Jurang	Nawangan	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
503		Genting	Nawangan	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
504		Clono	Nawangan	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
505		Watubatang	Nawangan	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
506		Gondang	Nawangan	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
507		Kalipancuran	Nawangan	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
508		Dungpring	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
509		Tangkil	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
510		Siama I	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
511		Siama II	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
512		Dungjangan	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
513		D. Penggung	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
514		Cendiki	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
515		Mujing	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
516		Sobo	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
517		Jajar	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
518		Sono	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
519		Beran	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
520		Glodakan	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
521		Gentong	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
522		Mbedotan	Ngromo	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
523		Payungan	Pakis	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
524		Ngampo	Pakis	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
525		Kandri	Pakis	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
526		D. Panjang	Pakis	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
527		Mbotan	Pakis Baru	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
528		Sobo	Pakisbaru	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
529		Tempel	Pakisbaru	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
530		Menur	Pakisbaru	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
531		Pakistangkil	Pakisbaru	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
532		Jurug kanan	Penggung	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
533		Kalitulung	Penggung	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
534		Jeruman	Penggung	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
535		Kali Putihan	Penggung	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
536		Sempu kanan	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
537		Sempu kiri	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
538		Ngamblo	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
539		Ngremeng	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
540		Celong	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
541		Kalisapi Kn.	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
542		Kalisapi Kr.	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
543		Mloko	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
544		Gading	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
545		Kalisono	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
546		Miri Gejek	Sempu	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
547		Jurug kiri	Tokawi	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
548		Yoro	Tokawi	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
549		Badut/Joso	Tokawi	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
550		Sengon	Tokawi	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
551		Krincing	Tokawi	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
552		Ndrono	Tokawi	Nawangan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
553		Nogosari I	Bodag	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
554		Bodag	Bodag	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
555	Irigasi	Kedungbendo	Bogoharjo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
556		Nogosari II	Cangkring	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
557		Cangkring	Cokrokembang	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
558		Kedung Pinihan	Cokrokembang	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
559		Ngancar	Cokrokembang	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
560		Gunungduwur	Cokrokembang	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
561		Cerbon	Hadiluwih	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
562		Plukisan	Hadiluwih	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
563		Sb. Ampik-ampik	Hadiwarno	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
564		Plukisan	Hadiwarno	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
565		Sb. Nguncar	Hadiwarno	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
566		Sb. Melikan	Hadiwarno	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
567		Cerbon	Ngadirojo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
568		Kedung Pinihan	Ngadirojo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
569		Ngancar	Ngadirojo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
570		Nogosari II	Nogosari	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
571		Plelesan	Nogosari	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
572		Nogosari I	Nogosari	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
573		Cerbon	Pagerejo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
574		Talang	Pagerejo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
575		Pagotan	Sidomulyo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
576		Soge	Sidomulyo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
577		Yuwono	Tanjunglor	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
578		Padi	Tanjunglor	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
579		Crabak	Tanjunglor	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
580		Nogosari I	Tanjunglor	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
581		Cerbon	Tanjungpuro	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
582		Sawah Purno	Tanjungpuro	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
583		Cerbon	Wiyoro	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
584		Kedung Pinihan	Wiyoro	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
585		Bogohan	Wonoasri	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
586		Shipen	Wonoasri	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
587		Sb. Bligo	Wonoasri	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
588		Nogosari II	Wonodadikulon	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
589		Gandu	Wonodadikulon	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
590		Batang	Wonodadiwetan	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
591		Gandu	Wonodadiwetan	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
592		Sb. Kasri	Wonokarto	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
593		Njeruk	Wonokarto	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
594		Sb. Ponggok	Wonokarto	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
595		Ngemplak	Wonosobo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
596		Pucangan	Wonosobo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
597		Kepuh	Wonosobo	Ngadirojo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
598		Arjowinangun	Arjowinangun	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
599		In. Bengkal	Baleharjo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
600		Sundeng	Bangunsari	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
601		Banjarsari	Banjarsari	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
602		Pucung	Bolosingo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
603		Kayen	Kayen	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
604		Kembang	Kembang	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
605		Sb. Waru	Kembang	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
606		Belik Sambi	Kembang	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
607		Menadi	Menadi	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
608		Mentoro	Mentoro	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
609		In. Semanten	Nanggungan	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
610		In. Bengkal	Ploso	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
611		Dawung	Ponggok	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
612		Nglenjoh	Ponggok	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
613		Jati	Purworejo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
614		Demeling	Purworejo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
615		Sedeng	Sedeng	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
616		Kali Botak	Sedeng	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
617		In. Bengkal	Sidoharjo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
618		Sukoharjo Ka.	Sirnoboyo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
619		Sukoharjo Ka.	Sukoharjo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
620		Sukoharjo Ki	Sukoharjo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
621		Kowang	Sukoharjo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
622		Nglegok	Tambakrejo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
623		Kalisat	Tambakrejo	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
624		In. Semanten	Tanjungsari	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
625		In. Semanten	Widoro	Pacitan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
626		Kalibarong	Candi	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
627		Sb. Beji	Dadapan	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
628		Krajan	Dadapan	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
629		Sempon	Glinggangan	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
630		Sb. Blimbing	Ngadirejan	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
631		Sumber	Ngadirejan	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
632		Sb. Pelem	Pelem	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
633		Sb. Janglot	Pelem	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
634		Sb. Kaliuni	Pelem	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
635		Sb. Jaten	Pelem	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
636		Benglai	Pelem	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
637		Gondang	Pringkuku	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
638		Kalimangun	Pringkuku	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
639		Sb. Beji	Pringkuku	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
640		Sb. Pindol	Pringkuku	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
641		Sb. Seno	Pringkuku	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
642		Geblas	Sobo	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
643		Jliro	Tamanasri	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
644		Cokel	Watukarung	Pringkuku	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
645		Sb. Glinggangan	Glinggangan	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
646		Kalitelu	Gondosari	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
647		Tekil	Gondosari	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
648		Kalimojo	Gondosari	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
649		K. Bayangkaki	Kebonsari	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
650		Kayen	Kebonsari	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
651		Sb. Kalilor	Kendal	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
652		Kali Sabuk	Mendolo Lor	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
653		Glonggong	Ploso	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
654		K.Mojo	Punung	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
655		SB. Ubalan	Punung	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
656		Pagutan	Punung	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
657		K. Dringo	Sooka	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
658		K. Kambang	Sooka	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
659		Kalitelu	Tinatar	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
660		Buyutan	Tinatar	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
661		Wareng	Wareng	Punung	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
662		Pagergunung	Gunungrejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
663		Rejoso	Gunungrejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
664		Bungkuk	Ketanggung	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
665		Kedungaren	Ketanggung	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
666		Sobo	Ketanggung	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
667		Kaligondang	Ketanggung	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
668		Karanganyar	Ketanggung	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
669		Dungwiyu	Ketanggung	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
670		Talun	Klepu	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
671		Kelis	Klepu	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
672		Mulyosari	Klepu	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
673		Grojokan	Pagerkidul	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
674		Pagerlor	Pagerlor	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
675		Tanggalan	Pagerlor	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
676		Sembowo	Sembowo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
677		Nglintrik	Sembowo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
678		Gablok	Sudimoro	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
679		Konto	Sudimoro	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
680		Dolo	Sudimoro	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
681		Kaliuning	Sukorejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
682		Pengkol	Sukorejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
683		Kalisuci	Sukorejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
684		Kedaung	Sukorejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
685		Ngumbul	Sumberejo	Sudimoro	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
686		Kalilongan I	Gedangan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
687		Kalilongan II	Gedangan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
688		Gebang	Gedangan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
689		Grego	Gedangan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
690		J.Teleng Kr.	Gedangan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
691		Poko	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
692		Gemaharjo	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
693		Gombang	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
694		Sb. Gemaharjo	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
695		Sb. Ngringin	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
696		Tangkeban	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
697		Sb. Dondong	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
698		Sb. Ngrejang	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
699		Sb. Jambon	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
700		Sb. Jurugmaling	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
701		Kalialang	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
702		Ngelo	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
703		Tonggo	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
704		Sobo	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
705		Ciger	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
706		Klampok	Gemaharjo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
707		Sb. Kasihan	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
708		Bunder	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
709		Kalilarang	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
710		Glagahombo	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
711		Pasarlegi	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
712		Banu	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
713		Ubalan	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
714		Gentungan	Kasihan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
715		Grenjeng	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
716		Sb. Duren	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
717		Mujing	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
718		S. Agung	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
719		J.Teleng Kn.	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
720		Gamping	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
721		Bomati	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
722		Kayen	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
723		Kalipoh	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
724		Sewan	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
725		Baksari	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
726		Gemah	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
727		Tranggono	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
728		Dagen	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
729		Sb. Bungur	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
730		Sb. Klesem	Kebondalem	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
731		Tambakan	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
732		Jurug	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
733		Grigak	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
734		Tempel	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
735		Nglangsep	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
736		Puring	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
737		Jambon	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
738		Jublek	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
739		Cendol	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
740		Suren	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
741		Krincing	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
742		Mbolesung	Kemuning	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
743		Menjangan	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
744		Klumpit	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
745		Gamping	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
746		Ngreno	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
747		Ngreco	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
748		Srikulit	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
749		Tumpeng	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
750		Kalicabol	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
751		Catho	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
752		Bonpaing	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
753		Belik	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
754		Doplang	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
755		S. Blawong	Ngreco	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
756		Plelesan	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
757		Padi	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
758		Gringsing	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
759		Sb. Ploso	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
760		Jurang	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
761		Gusit	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
762		Cikal	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
763		Patoksuru	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
764		Kopo	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
765		Ketro	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
766		Tanjung	Ploso	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
767		Pager	Pucangombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
768		Pojok	Pucangombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
769		Kaliogan	Pucangombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
770		Sb. Tahunan	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
771		Kenongo	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
772		Pait	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
773		Dawuhan	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
774		Watu Kajang	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
775		Jero Gelo	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
776		Dung Kidang	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
777		Cindilan	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
778		Sb. Grejo	Tahunan	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
779		Simbaton	Tahunan Baru	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
780		Dungdowo	Tahunan Baru	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
781		Sawahan	Tahunan Baru	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
782		Dung Kapluk	Tahunan Baru	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
783		Pondok	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
784		Kalitelu	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
785		Sb. Tegalombo	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
786		Karanggede	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
787		Sawah lor	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
788		R.Asri Kn.	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
789		R.Asri Kr.	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
790		Ngelo	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
791		Ngepring	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
792		Ngewer	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
793		Beder	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
794		Gebang	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
795		Gelap	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
796		Mbakalan	Tegalombo	Tegalombo	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
797		Poko	Bubakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
798		Tulakan	Bubakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
799		Gombang	Bubakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
800		Krikoh	Bubakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
801		Dompyong	Bungur	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
802		Komplang	Bungur	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
803		Somopuro	Bungur	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
804		Krajan	Gasang	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
805		Tanjung	Gasang	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
806		Sb. Plapar	Jatigunung	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
807		Jambon	Jatigunung	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
808		Prambon	Jatigunung	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
809		Crabak	Jatigunung	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
810		Lengkong	Jatigunung	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
811		Bolang	Jetak	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
812		Suren	Kalikuning	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
813		Paku Paku	Kalikuning	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
814		Pagergunung	Kalikuning	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
815		Salam	Ketro	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
816		Montongan	Ketro	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
817		Arjosari	Ketro	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
818		Kalipelem	Kluwih	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
819		Dompyong	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
820		Pletes	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
821		Pakel	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
822		Podang	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
823		Pelawan	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
824		Pucung	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
825		Menjangan	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
826		Watugupit	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
827		Watu Gathuk	Losari	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
828		Ngile	Ngile	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
829		Jenggring	Ngile	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
830		D.Layur	Ngile	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
831		Salam	Ngile	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
832		Bolan	Nglaran	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
833		Jembaran	Nglaran	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
834		Sb. Turusan	Nglaran	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
835		Wadang	Nglaran	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
836		Yuwono	Ngumbul	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
837		Bandarangin	Ngumbul	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
838		Ngapak	Ngumbul	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
839		Ngagik	Ngumbul	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
840		Padi	Padi	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
841		Pletes	Tulakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
842		Gesingan	Tulakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
843		Komplang	Tulakan	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
844		Dilem	Wonoanti	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
845		Sb. Puring	Wonoanti	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
846		Sb. Duren	Wonoanti	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
847		Kendal	Wonoanti	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
848		Jengglong	Wonoanti	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

No	Penggunaan	Nama Lembaga	Desa	Kecamatan	Kepemilikan Bangunan	Keterangan
849		Papringan	Wonosidi	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
850		Dandan	Wonosidi	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik
851		Krajan	Wonosidi	Tulakan	Pemerintah Daerah	Belum diidentifikasi natara TKD / Hak milik

Lampiran 17

RINCIAN BELANJA MODAL DI NON KAPITALISASI REKLAS KE BARJAS
TAHUN 2025

No	SKPD	Reklas ke Rekening Barjas	Aset Tetap	Nilai
1	KECAMATAN TEGALOMBO	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	814.000,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.908.750,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	350.700
5	DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	777.000
6	DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Personal Computer	169.830
7	SEKRETARIAT DAERAH	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.984.000
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.158.924
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kantor Lainnya	8.491.500
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Mebel	2.830.500
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Permainan	2.960.370
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.381.600
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	496.000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Beban Pemeliharaan	Bangunan Gedung Kantor	8.281.600
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Produksi Perikanan	1.508.000
15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Personal Computer	344.100
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.776.000
17	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kantor Lainnya	793.500,00
18	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.381.492,44
19	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	1.443.751,47
20	DINAS PENDIDIKAN	Beban Pemeliharaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	285.297.077,32
21	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Timbangan/Biara	1.976.390,00
22	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Laboratorium Pertanian	360.000,00
23	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.270.000,00
24	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kantor Lainnya	97.047.600,00
25	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Mebel	55.665.000,00
26	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pengukur Waktu	9.053.400,00
27	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pendingin	8.909.800,00
28	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.223.400,00
29	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Studio Audio	12.879.500,00
30	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Studio Video dan Film	495.000,00
31	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	589.410,00
32	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	899.500,00
33	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	1.665.000,00
34	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama	3.530.000,00
35	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	11.521.500,00
36	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Komputer Jaringan	790.500,00
37	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Jaringan	974.000,00
38	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Komputer Lainnya	4.496.600,00
39	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Peraga Percontohan	1.200.000,00
40	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Olahraga Atletik	482.100,00
41	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Audio Visual	963.342,00
42	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Permainan	189.600,00
43	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Mebel	40.415.419,00
45	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	24.748.500,00
46	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Te	39.116.593,38
47	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Te	26.372.710,20
48	DINAS PENDIDIKAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Labora	370.900,00
44	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Beban Pemeliharaan	Bangunan Gedung Kantor	80.617.126,48
49	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	5.183.380,00
50	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	1.435.500,00
51	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kantor Lainnya	2.032.499,00
52	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.195.468,00
53	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Personal Computer	4.171.998,00
54	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	2.594.944,00
55	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pendingin	2.203.350,00
56	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Mebel	5.716.500,00
57	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	5.696.200,00
58	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Gigi	1.437.450,00
59	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	2.871.000,00
60	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kantor Lainnya	2.109.000,00
61	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.045.393,00
62	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	6.031.000,00
63	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Personal Computer	1.781.550,00
64	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Mebel	14.785.200,00
65	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	1.914.000,00
66	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Personal Computer	1.132.200,00
67	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	3.496.950,00
68	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Personal Computer	266.500,00
69	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	954.000,00
70	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Jaringan	723.000,00
71	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	4.714.560,00
72	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Gigi	5.672.100,00
73	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	1.914.000,00
74	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	2.552.000,00
75	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Personal Computer	4.662.000,00
76	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	16.102.298,58
77	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	7.816.478,00
78	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kantor Lainnya	2.950.000,00
79	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	9.270.000,00
80	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	4.843.205,00
81	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kantor Lainnya	5.689.305,00
82	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Komputer Unit Lainnya	2.998.000,02
83	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	1.595.000,00
84	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	3.172.060,00
85	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	4.524.900,00
86	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pendingin	4.107.000,00
87	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	3.349.500,00
88	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.042.151,00
89	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	9.898.340,00
90	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pendingin	6.882.000,00
91	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.495.245,00
92	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pemadam Kebakaran	716.000,00
93	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	2.871.000,00
94	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	6.092.400,00
95	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Personal Computer	3.066.930,00
96	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Mebel	9.765.780,00
97	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pendingin	499.500,00
98	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Dapur	1.920.300,00
99	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	5.582.500,00
100	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	9.293.490,00

No	SKPD	Reklas ke Rekening Barjas	Aset Tetap	Nilai
101	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	1.914.000,00
102	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Perkakas Standard (Standard Tools)	4.257.683,00
103	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	599.400,00
104	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.670.850,00
105	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Jaringan	942.000,00
106	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Mebel	1.498.500,00
107	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	1.750.850,00
108	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Lainnya	480.000,00
109	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	891.330,00
110	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	460.000,00
111	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.182.700,00
112	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	843.620,00
113	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Peralatan Jaringan	968.500,00
114	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	4.750.000,00
115	DINAS KESEHATAN	Extracomtable/Beban Aset Tetap	Alat Kedokteran Umum	316.976,00
116	DINAS KESEHATAN	Beban Pemeliharaan	Bangunan Kesehatan	19.425.000,00
117	DINAS KESEHATAN	Beban Pemeliharaan	Bangunan Kesehatan	49.210.535,00
				1.209.968.654,89
	RINCIAN PER BELANJA MODAL YANG DI NON KAPITALISASI REKLAS KE BARJAS			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			**700.684.670,51**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			**508.320.642,38**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			**963.342,00**
	Jumlah			**1.209.968.654,89**

-

BANTUAN PERALATAN dari BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PENYERAHAN TANGGAL 21 DESEMBER 2024

No	Jenis Barang	Penyedia	Jumlah		Harga		Total Harga	
1	Tenda Pengungsi		5	Unit	Rp	49.383.000	**Rp**	**246.915.000**
2	Light Tower		2	Unit	Rp	280.830.000	**Rp**	**561.660.000**
3	Velbed		100	Unit	Rp	1.207.000	**Rp**	**120.700.000**
4	Pompa Alkon		10	Unit	Rp	98.340.000	**Rp**	**983.400.000**
5	Tenda Keluarga 4x4		200	Unit	Rp	7.621.000	**Rp**	**1.524.200.000**
6	Perahu Karet + Mesin		4	Unit	Rp	79.000.000	**Rp**	**316.000.000**
7	Perahu Fiber Kapasitas 8 Orang		4	Unit	Rp	54.500.000	**Rp**	**218.000.000**
8	Genset		5	Unit	Rp	5.128.200	**Rp**	**25.641.000**
Total							**Rp**	**3.996.516.000**